



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) RKPD Tahun 2024 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah tahun 2024;
 - b. prioritas pembangunan Daerah tahun 2024; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Daerah Tahun 2024.
- (3) RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. BAB VII : Penutup.
- (4) Rincian sistematika RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 menjadi dasar untuk:
 - a. perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
 - b. penyusunan rancangan KUA Tahun 2024 dan rancangan PPAS Tahun 2024.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang akan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Juli 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RKPD 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-11
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-12
1.4.1 Maksud	I-12
1.4.2 Tujuan.....	I-12
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-12
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II-1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-37
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-55
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-411
2.2 Layanan Keistimewaan	II-431
2.2.1 Urusan Keistimewaan.....	II-431
2.2.2 Urusan Pemerintah Daerah yang didukung Pembiayaan Dana Keistimewaan.....	II-454
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-461
2.3.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul	II-462
2.3.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	II-468
2.3.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022.....	II-477
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-545
2.4.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-545

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH..... II-1

3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Kondisi dan Arahana Perekonomian Nasional	III-1
3.1.2	Kondisi dan Arahana Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta	III-4
3.1.3	Kondisi dan Arahana Perekonomi Kabupaten Bantul	III-5
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-15
3.2.1	Kemampuan Keuangan Daerah	III-16
3.2.3	Analisa Keuangan Daerah	III-20
3.2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024	III-24
3.2.4	Sumber Pendanaan Pembangunan Non APBD Kabupaten	III-42

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1

4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024	IV-46
4.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kewilayahan.....	IV-89
4.4	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-103
4.5	Keistimewaan.....	IV-131
4.6	Pokok Pikiran DPRD Bantul.....	IV-153
4.6.1	Pendahuluan.....	IV-153
4.6.2	Landasan Hukum.....	IV-154
4.6.3	Maksud Dan Tujuan.....	IV-154
4.6.4	Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2024	IV-155
4.6.5	Saran Dan Masukan.....	IV-158

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

BAB VII PENUTUP..... VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Wilayah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul.....	II-4
Tabel 2.2	Formasi Batuan Kabupaten Bantul.....	II-10
Tabel 2.3	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul.....	II-12
Tabel 2.4	Sungai di Kabupaten Bantul	II-13
Tabel 2.5	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di SDA Ringinharjo Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-14
Tabel 2.6	Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2022	II-16
Tabel 2.7	Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha) Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-17
Tabel 2.8	Kawasan Rawan Bencana Menurut Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.....	II-27
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon Tahun 2018 – 2022	II-34
Tabel 2.10	Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-35
Tabel 2.11	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Bantul.....	II-36
Tabel 2.12	Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%).....	II-39
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022	II-41
Tabel 2.14	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2018-2022.....	II-41
Tabel 2.15	Perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022	II-43
Tabel 2.16	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-44
Tabel 2.17	Rasio Gini Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-45
Tabel 2.18	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018 – 2022	II-46
Tabel 2.19	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022....	II-47
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) per Kapanewon di Kabupaten Bantul.....	II-47
Tabel 2.21	Tingkat Kemiskinan Ekstrem di DIY 2021-2022.....	II-48
Tabel 2.22	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018 – 2022.....	II-49
Tabel 2.23	Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional	II-53

Tabel 2.24 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-55
Tabel 2.25 Perkembangan APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-56
Tabel 2.26 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-57
Tabel 2.27 Rasio Murid dan Guru jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.....	II-58
Tabel 2.28 Ketersediaan Sekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bantul.....	II-59
Tabel 2.29 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022	II-60
Tabel 2.30 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bantul.....	II-60
Tabel 2.31 Perkembangan Tingkat Kelulusan Sekolah di Kabupaten Bantul.....	II-61
Tabel 2.32 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-61
Tabel 2.33 Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-62
Tabel 2.34 Kondisi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul.....	II-63
Tabel 2.35 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2021	II-64
Tabel 2.36 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-65
Tabel 2.37 Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022	II-65
Tabel 2.38 Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-66
Tabel 2.39 Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-67
Tabel 2.40 Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-68
Tabel 2.41 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022.....	II-69
Tabel 2.42 Strata Posyandu Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022	II-69
Tabel 2.43 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-70
Tabel 2.44 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-71
Tabel 2.45 Jumlah Puskesmas Menurut Status Akreditasi Tahun 2018-2022.....	II-71

Tabel 2.46 Kelas Rumah Sakit Tahun 2022	II-72
Tabel 2.47 Net Death Rate (NDR) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022....	II-72
Tabel 2.48 Bed Occupation Rate (BOR) di Rumah Sakit di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-73
Tabel 2.49 Turn Over Interval (TOI) di Rumah Sakit Tahun 2018-2022	II-73
Tabel 2.50 Bed Turn Over (BTO) di Rumah Sakit Tahun 2018-2022.....	II-74
Tabel 2.51 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-74
Tabel 2.52 Jumlah Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022	II-75
Tabel 2.53 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022	II-76
Tabel 2.54 Rasio Posyandu Lansia per 1.000 Lansia di Kabupaten Bantul ...	II-77
Tabel 2.55 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-77
Tabel 2.56 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-79
Tabel 2.57 Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-79
Tabel 2.58 Jumlah Desa Siaga Purnama Mandiri menurut Strata di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-80
Tabel 2.59 Hasil Capaian Tatanan PHBS di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022	II-80
Tabel 2.60 Akses Sanitasi di Kabupaten Bantul tahun 2022	II-81
Tabel 2.61 Akses air minum aman di Kabupaten Bantul tahun 2022	II-82
Tabel 2.62 Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-83
Tabel 2.63 Hasil Vaksinasi Covid-19 Tahun 2022.....	II-84
Tabel 2.64 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-87
Tabel 2.65 Data Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-88
Tabel 2.66 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022.....	II-90
Tabel 2.67 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-98
Tabel 2.68 Kondisi Jalan Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022	II-99
Tabel 2.69 Data Penerbitan IMB dan PBG di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022.....	II-99
Tabel 2.70 Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-100
Tabel 2.71 Saluran Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-101

Tabel 2.72 Target dan Capaian Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-101
Tabel 2.73 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-103
Tabel 2.74 Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-104
Tabel 2.75 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-104
Tabel 2.76 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2022	II-104
Tabel 2.77 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-106
Tabel 2.78 Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022	II-108
Tabel 2.79 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022	II-110
Tabel 2.80 Produk Perencanaan dan Peraturan Tata Ruang di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2022	II-111
Tabel 2.81 Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021	II-114
Tabel 2.82 Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022	II-116
Tabel 2.83 Penanganan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha Tahun 2021-2022	II-116
Tabel 2.84 Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani di Kabupaten Bantul Tahun 2018 -2022	II-116
Tabel 2.85 Data Penanganan RTLH Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2022	II-117
Tabel 2.86 Data Perumahan Terfasilitasi PSU di Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2022	II-119
Tabel 2.87 Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang Ditindaklanjuti	II-121
Tabel 2.88 Jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-122
Tabel 2.89 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-124
Tabel 2.90 Jumlah Sasaran Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-124
Tabel 2.91 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-125
Tabel 2.92 Rasio Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-125
Tabel 2.93 Persentase Kelompok Jagawarga yang terbentuk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022	II-126

Tabel 2.94 Capaian Nilai Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-127
Tabel 2.95 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2022	II-128
Tabel 2.96 Capaian Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-128
Tabel 2.97 Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022	II-129
Tabel 2.98 Kerugian dan Korban Bencana di Kabupaten Bantul 2018-2022.....	II-130
Tabel 2.99 Togor EWS Kabupaten Bantul.....	II-130
Tabel 2.100 Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-132
Tabel 2.101 Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021.....	II-132
Tabel 2.102 Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Bantul.....	II-132
Tabel 2.103 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022.....	II-135
Tabel 2.104 Jumlah penduduk di kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana	II-136
Tabel 2.105 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-137
Tabel 2.106 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Bantul.....	II-142
Tabel 2.107Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-142
Tabel 2.108 Jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-143
Tabel 2.109 Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2021.....	II-143
Tabel 2.110 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-145
Tabel 2.111 Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-145
Tabel 2.112 Upah Minimum Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-146
Tabel 2.113 Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Jamsostek di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-147
Tabel 2.114 Persentase Sengketa Hubungan Industrial yang terselesaikan	II-147

Tabel 2.115 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-148
Tabel 2.116 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-150
Tabel 2.117 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-150
Tabel 2.118 Data Kasus Anak Korban Kekerasan Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-151
Tabel 2.119 Jumlah KDRT di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022	II-152
Tabel 2.120 Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-153
Tabel 2.121 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-154
Tabel 2.122 Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022	II-155
Tabel 2.123 Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-157
Tabel 2.124 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-158
Tabel 2.125 Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi Kabupaten Bantul	II-159
Tabel 2.126 Cadangan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-161
Tabel 2.127 Pengembangan Desa Mandiri Pangan	II-162
Tabel 2.128 Desa Rentan Pangan Berdasarkan Peta FSVA di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022	II-165
Tabel 2.129 Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Bantul	II-166
Tabel 2.130 Pendaftaran Tanah Pemerintah (bidang) 2018-2022	II-166
Tabel 2.131 Permasalahan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022	II-167
Tabel 2.132 Persentase Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020	II-168
Tabel 2.133 Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul melalui izinonline.bantulkab.go.id Tahun 2021-2022	II-169
Tabel 2.134 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul melalui oss.go.id Tahun 2021-2022	II-170
Tabel 2.135 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018-2022	II-170
Tabel 2.136 Hasil Kualitas Air Sungai di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-172
Tabel 2.137 Hasil Analisa Laboratorium Udara Ambient Tahun 2022	II-173
Tabel 2.138 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022	II-174

Tabel 2.139 Penambahan Tutupan Lahan (km2) Di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-175
Tabel 2.140 Dokumen Persetujuan Teknis Yang Diterbitkan Tahun 2022 ...	II-178
Tabel 2.141 Dokumen Rincian Teknis LB3 dan Berita Acara Penerimaan Berkas Pengelolaan LB3 tahun 2022	II-179
Tabel 2.142 Hasil Pengawasan terhadap Ketentuan Izin Lingkungan Tahun 2018-2022	II-180
Tabel 2.143 Pokok Aduan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Tahun 2018-2022	II-181
Tabel 2.144 Pengelolaan Sampah Tahun 2018-2022	II-183
Tabel 2.145 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-183
Tabel 2.146 Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022.....	II-184
Tabel 2.147 TPS3R di Kabupaten Bantul Tahun 2022	II-185
Tabel 2.148 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-187
Tabel 2.149 Cakupan Kepemilikan KTP menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-189
Tabel 2.150 Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022.....	II-190
Tabel 2.151 Cakupan Kepemilikan KIA menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul	II-191
Tabel 2.152 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-193
Tabel 2.153 Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-1 di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-194
Tabel 2.154 Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-194
Tabel 2.155 Status Kabupaten Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019-2022	II-196
Tabel 2.156 Status Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018-2022	II-197
Tabel 2.157 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPMD di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-202
Tabel 2.158 Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-202
Tabel 2.159 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate -TFR) Kabupaten Bantul Tahun 2022	II-203
Tabel 2.160 Kepesertaan KB di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-204
Tabel 2.161 Cakupan Anggota Kelompok BKB ber-KB di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-204

Tabel 2.162 Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Kelompok Tribina Tahun 2022	II-204
Tabel 2.163 Profesi Korban dan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2022	II-206
Tabel 2.164 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2018	II-209
Tabel 2.165 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022	II-209
Tabel 2.166 V/C Ratio Jalan Kabupaten.....	II-210
Tabel 2.167 Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum yang masih Beroperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-212
Tabel 2.168 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020.....	II-214
Tabel 2.169 Pembangunan Halte 2017- 2021	II-215
Tabel 2.170 Aktivitas di Terminal yang berada di Satuan Ruang Strategis Tahun 2021- 2022	II-216
Tabel 2.171 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-218
Tabel 2.172 Nilai Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	II-219
Tabel 2.173 Tahapan Penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik	II-220
Tabel 2.174 Kualifikasi Keterbukaan Informasi Badan Publik	II-221
Tabel 2.175 Badan Publik Informatif Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022	II-221
Tabel 2.176 Badan Publik Menuju Informatif Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022.....	II-223
Tabel 2.177 Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik di Kabupaten Bantul.....	II-225
Tabel 2.178 Jumlah titik sambung jaringan internet Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-226
Tabel 2.179 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-227
Tabel 2.180 Follower Media Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-228
Tabel 2.181 Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-230
Tabel 2.182 Jumlah Koperasi Menurut Bentuk Koperasi Tahun 2018-2022.....	II-231
Tabel 2.183 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Tahun 2018-2022	II-231
Tabel 2.184 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Terbit Tahun 2018-2022	II-232
Tabel 2.185 Penghargaan Koperasi kepada 10 Koperasi Berdasarkan Kategori Jenis Koperasi Tahun 2019 – 2022.....	II-233

Tabel 2.186 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Tahun Tutup Buku 2021-2022	II-234
Tabel 2.187 Sasaran Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Tahun 2019- 2022.....	II-235
Tabel 2.188 Keragaan Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-236
Tabel 2.189 Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset Tahun 2020 - 2022	II-236
Tabel 2.190 Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-237
Tabel 2.191 Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM di Kabupaten Bantul....	II-238
Tabel 2.192 Data Penerbitan IUMK di Kabupaten Bantul	II-239
Tabel 2.193 Data Penerbitan NIB di Kabupaten Bantul	II-239
Tabel 2.194 Persentase Usaha Mikro Berizin di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-240
Tabel 2.195 Capaian UMKM Naik Kelas di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-241
Tabel 2.196 Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan I Tahun 2022	II-243
Tabel 2.197 Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan II Tahun 2022	II-244
Tabel 2.198 Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan III Tahun 2022	II-245
Tabel 2.199 Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan IV Tahun 2022	II-246
Tabel 2.200 Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul Sampai dengan Tahun 2022	II-248
Tabel 2.201 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul.....	II-249
Tabel 2.202 Daya Serap Investasi terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2022	II-249
Tabel 2.203 Kegiatan Pengawasan Usaha Tahun 2022	II-251
Tabel 2.204 Jumlah Pemuda Pelopor di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-252
Tabel 2.205 Data Organisasi Kepemudaan Tahun 2018-2022	II-252
Tabel 2.206 Organisasi Olahraga di Kabupaten Bantul	II-253
Tabel 2.207 Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar Tingkat DIY Tahun 2018-2022	II-255
Tabel 2.208 Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XV JAWA BARAT Tahun 2018.....	II-256
Tabel 2.209 Kejuaraan Nasional NPC Indonesia 2019.....	II-256
Tabel 2.210 Kejuaraan Tennis Kursi Roda "Kapusrehab Cup 2020".....	II-257
Tabel 2.211 Kejuaraan Nasional NPC Indonesia 2021.....	II-257
Tabel 2.212 Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2019-2022	II-260
Tabel 2.213 Jumlah Kegiatan Statistik menurut Cara Pengumpulan Data Tahun 2022.....	II-262

Tabel 2.214 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Kontra Penginderaan (Sterilisasi Ruangan)	II-263
Tabel 2.215 Jumlah Aduan/Panggilan Valid, Prank dan Ghost Call Tahun 2020-2022.....	II-266
Tabel 2.216 Jumlah Panggilan Masuk Call Center 112 Menurut Jenis Kejadian Tahun 2020-2022	II-266
Tabel 2.217 Rekapitulasi Tindak Lanjut OPD terhadap Panggilan Darurat 112.....	II-267
Tabel 2.218 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020-2022.....	II-269
Tabel 2.219 Rekapitulasi Asesmen Keamanan Aplikasi Tahun 2020-2022 ...	II-270
Tabel 2.220 Hasil Pendataan Sistem Elektronik Tahun 2022.....	II-271
Tabel 2.221 Kategori Aplikasi Berdasar Proses Asesmen Tahun 2022.....	II-271
Tabel 2.222 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Tahun 2020-2022.....	II-272
Tabel 2.223 Sistem Informasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-274
Tabel 2.224 Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Bantul.....	II-277
Tabel 2.225 Data Register Kelompok Seni dan Budaya di Kabupaten Bantul.....	II-280
Tabel 2.226 Rekapitulasi Fasilitas Kelompok Seni di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022	II-282
Tabel 2.227 Fasilitas Pentas Seni di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022.....	II-282
Tabel 2.228 Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bantul.....	II-284
Tabel 2.229 Data Budaya Tak Benda Potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	II-301
Tabel 2.230 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022	II-304
Tabel 2.231 Jumlah Pojok Baca.....	II-305
Tabel 2.232 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-307
Tabel 2.233 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Usia tahun 2018-2022.....	II-308
Tabel 2.234 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2022	II-309
Tabel 2.235 Jumlah Koleksi Buku/ Bahan Pustaka di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-310
Tabel 2.236 Data Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2018-2022	II-311
Tabel 2.237 Daftar Akuisisi yang Telah Dilaksanakan	II-313
Tabel 2.238 Jumlah Arsip yang Disimpan dan Dikelola pada Tahun 2020-2022.....	II-314
Tabel 2.239 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-316

Tabel 2.240	Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Komoditi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-319
Tabel 2.241	Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-320
Tabel 2.242	Produksi Benih Ikan (ekor) dan Ikan Konsumsi (Kg) dari UPTD. BBI di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-321
Tabel 2.243	Produksi Benih Ikan (Ekor), Calon Induk (Ekor), Dan Ikan Konsumsi (Kg) Per Jenis Ikan di UPTD BBI Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-322
Tabel 2.244	Produksi Garam, Luas Tambak Dan Rerata Produktivitas Per Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022.....	II-323
Tabel 2.245	Kejadian pelanggaran aturan di Kabupaten Bantul tahun 2019-2022.....	II-325
Tabel 2.246	Jumlah UKM, Tenaga Kerja dan Produksi Olahan (Ton) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022	II-325
Tabel 2.247	Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-327
Tabel 2.248	Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-327
Tabel 2.249	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-329
Tabel 2.250	Data Usaha Pariwisata Yang Sudah Mempunyai Koordinat	II-330
Tabel 2.251	Data Event di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022.....	II-331
Tabel 2.252	Jumlah Wisatawan per Destinasi Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-331
Tabel 2.253	Data Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-332
Tabel 2.254	Jumlah Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-335
Tabel 2.255	Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 ...	II-336
Tabel 2.256	Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2022	II-338
Tabel 2.257	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-340
Tabel 2.258	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-341
Tabel 2.259	Produktivitas Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-343
Tabel 2.260	Daftar Kelompok Penangkar Benih Padi	II-345
Tabel 2.261	Produksi Benih Padi (ton) Tahun 2020-2022	II-345
Tabel 2.262	Panjang Irigasi Tersier (dalam meter) Tahun 2022.....	II-346

Tabel 2.263 Populasi Ternak Besar (Ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-346
Tabel 2.264 Populasi Ternak Kecil (ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-347
Tabel 2.265 Populasi Ternak Unggas (ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-347
Tabel 2.266 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-348
Tabel 2.267 Pelayanan Kesehatan Ternak UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Kabupaten Bantul, Tahun 2018-2022.....	II-348
Tabel 2.268 Jenis Penyakit Hewan Ternak Kabupaten Bantul, Tahun 2018-2022.....	II-349
Tabel 2.269 Pelayanan Pemotongan UPT RPH Kabupaten Bantul, Tahun 2018-2022.....	II-349
Tabel 2.270 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah).....	II-350
Tabel 2.271 Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021	II-351
Tabel 2.272 Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-354
Tabel 2.273 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021.....	II-357
Tabel 2.274 Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022	II-358
Tabel 2.275 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022.....	II-358
Tabel 2.276 Sentra Industri Kabupaten Bantul Berdasar Cabang Bidang Industri Tahun 2022	II-359
Tabel 2.277 Data Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 ...	II-360
Tabel 2.278 Izin Usaha Berdasar Tingkat Risiko.....	II-363
Tabel 2.279 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-364
Tabel 2.280 Jumlah Pendaftar Transmigrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-364
Tabel 2.281 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2019.....	II-366
Tabel 2.282 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022.....	II-366
Tabel 2.283 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2017-2021.....	II-368
Tabel 2.284 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-369
Tabel 2.285 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	II-369

Tabel 2.286 Top Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020.....	II-371
Tabel 2.287 Target Raperda Tahun 2022	II-372
Tabel 2.288 Produk Hukum yang Dihasilkan Tahun 2022	II-373
Tabel 2.289 Persentase Raperda yang Disetujui Bersama Kabupaten Bantul, Tahun 2018-2022.....	II-375
Tabel 2.290 Capaian Indikator Perencanaan 2018-2022.....	II-377
Tabel 2.291 Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-378
Tabel 2.292 Gambaran Keuangan Kabupaten Bantul	II-380
Tabel 2.293 Persentase Komponen Belanja terhadap Total Belanja Tahun 2021-2022.....	II-381
Tabel 2.294 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022	II-385
Tabel 2.295 IKU Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2022	II-387
Tabel 2.296 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-388
Tabel 2.297 Pengembangan Inovasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021 ...	II-390
Tabel 2.298 Inovasi Kabupaten Bantul Tahun 2022	II-392
Tabel 2.299 Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Tahun 2021-2022	II-396
Tabel 2.300 Progres Keberhasilan Pemda Bantul Pada 8 (Delapan) Area Intervensi Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2022 ...	II-397
Tabel 2.301 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-398
Tabel 2.302 Nilai SPIP Kabupaten Bantul tahun 2018-2022.....	II-400
Tabel 2.303 Realisasi Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-401
Tabel 2.304 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kapanewon Lingkup Kabupaten Bantul 2018-2022	II-402
Tabel 2.305 Kegiatan Sosialisasi Pemilos (Pemilihan OSIS) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-404
Tabel 2.306 Kegiatan Pendidikan politik di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-405
Tabel 2.307 Persentase Pemilih yang Berpartisipasi	II-405
Tabel 2.308 Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2020.....	II-406
Tabel 2.309 Jumlah ormas yang terverifikasi di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022.....	II-407
Tabel 2.310 Organisasi Masyarakat (Ormas) yang terverifikasi pada Tahun 2022.....	II-409
Tabel 2.311 Kasus Intoleransi Tahun 2018-2022	II-410

Tabel 2.312 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun) Tahun 2018 – 2022.....	II-411
Tabel 2.313 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-413
Tabel 2.314 Sistem Informasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-414
Tabel 2.315 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2022	II-416
Tabel 2.316 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2021	II-418
Tabel 2.317 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021	II-420
Tabel 2.318 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2022	II-421
Tabel 2.319 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-421
Tabel 2.320 Rekapitulasi Kesesuaian SOP dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022	II-425
Tabel 2.321 Penetapan IMB per Satuan Bangunan Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021	II-426
Tabel 2.322 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha/Investasi di Kabupaten Bantul	II-427
Tabel 2.323 Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022.....	II-429
Tabel 2.324 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bantul Tahun 2018–2022.....	II-430
Tabel 2.325 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tindak Lanjut Urusan Keistimewaan	II-433
Tabel 2.326 Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Bantul.....	II-435
Tabel 2.327 Penetapan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul	II-436
Tabel 2.328 Penetapan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul.....	II-438
Tabel 2.329 Desa Wisata di Kabupaten Bantul	II-439
Tabel 2.330 Kelompok Prima di Desa Prima Kabupaten Bantul Tahun 2009 – 2019	II-441
Tabel 2.331 Desa Preneur Kabupaten Bantul Tahun 2022	II-444
Tabel 2.332 Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul Tahun 2015 - 2021	II-446
Tabel 2.333 Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul	II-446
Tabel 2.334 Daftar Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Tahun 2022 Kabupaten Bantul.....	II-449
Tabel 2.335 Produk Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Keistimewaan di Kabupaten Bantul	II-453
Tabel 2.336 Kegiatan Muatan Lokal Pendidikan Berbasis Budaya	II-454
Tabel 2.337 Puskesmas dan Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi	II-455

Tabel 2.338	Data Inovasi Bantul Seroja Tahun 2020 – 2022.....	II-457
Tabel 2.339	Sebaran Kelompok Jagawarga Tahun 2022.....	II-459
Tabel 2.340	Jumlah Kelompok Jagawarga di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022.....	II-459
Tabel 2.341	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022	II-462
Tabel 2.342	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Bantul Tahun 2022	II-471
Tabel 2.343	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022	II-478
Tabel 2.344	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-554
Tabel 3.1	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	III-6
Tabel 3.2	Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	III-6
Tabel 3.3	Tingkat Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022.....	III-7
Tabel 3.4	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	III-9
Tabel 3.5	Capaian Rasio Gini Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	III-10
Tabel 3.6	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	III-10
Tabel 3.7	Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bantul Tahun 2024	III-11
Tabel 3.8	Kategori Fiskal Daerah dalam PMK	III-17
Tabel 3.9	Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah	III-17
Tabel 3.10	Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	III-18
Tabel 3.11	Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Bantul.....	III-18
Tabel 3.12	Perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024	III-19
Tabel 3.13	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022	III-20
Tabel 3.14	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022	III-21
Tabel 3.15	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022	III-21
Tabel 3.16	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022	III-22

Tabel 3.17 Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022	III-27
Tabel 3.18 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	III-28
Tabel 3.19 Penyandingan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	III-33
Tabel 3.20 Penyandingan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	III-34
Tabel 3.21 Penyandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	III-39
Tabel 3.22 Capaian TSLP/CSR Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022, Target Tahun 2023 dan 2024	III-43
Tabel 4.1 Sinkronisasi Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Bantul dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.....	IV-5
Tabel 4-2 Sinergitas Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul Tahun 2024	IV-47
Tabel 4.3 Interkoneksi Pendekatan Prioritas dan Sasaran Kabupaten Bantul dengan sasaran dan program prioritas Perangkat Daerah ahun 2024	IV-61
Tabel 4.4 Sinkronisasi Dukungan Program/Kegiatan DIY-Bantul.....	IV-89
Tabel 4.5 Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi	IV-103
Tabel 4.6 Rencana Pemenenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2024	IV-108
Tabel 4-7 Usulan BKK Dana Keistimewaan per Urusan di Kabupaten Bantul Tahun 2024	IV-132
Tabel 4-8 Anggaran Keistimewaan Urusan Kelembagaan Berdasarkan Program dan Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	IV-134
Tabel 4-9 Anggaran Keistimewaan Urusan Kebudayaan Berdasarkan Program dan Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	IV-137
Tabel 4-10 Anggaran Keistimewaan Urusan Pertanahan Berdasarkan Program dan Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	IV-149
Tabel 4-11 Anggaran Keistimewaan Urusan Tata Ruang Berdasarkan Program dan Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	IV-151
Tabel 5.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Menurut Perangkat Daerah	V-1
Tabel 5.2 Kebutuhan Pendanaan per Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perangkat Daerah Tahun 2024	V-3
Tabel 5.2 Pemetaan Program dengan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	V-384
Tabel 6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024	VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-11
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul	II-2
Gambar 2.2 Luas Wilayah Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul	II-2
Gambar 2.3 Luas Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul	II-7
Gambar 2.4 Kemiringan Lereng di Kabupaten Bantul	II-8
Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Bantul	II-9
Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul	II-11
Gambar 2.7 Peta Sub Das di Kabupaten Bantul	II-12
Gambar 2.8 Curah Hujan menurut Bulan di 6 Stasiun Pemantauan di Kabupaten Bantul Tahun 2022	II-15
Gambar 2.9 Jumlah Curah Hujan menurut Bulan di SDA Ringinharjo	II-15
Gambar 2.10 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul	II-18
Gambar 2.11 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bantul	II-27
Gambar 2.12 Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Bantul	II-28
Gambar 2.13 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bantul....	II-28
Gambar 2.14 Peta Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Bantul	II-29
Gambar 2.15 Peta Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Bantul	II-29
Gambar 2.16 Peta Bahaya Cuaca Ekstrem Kabupaten Bantul	II-30
Gambar 2.17 Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Bantul	II-31
Gambar 2.18 Peta Bahaya Kebakaran Kabupaten Bantul	II-31
Gambar 2.19 Peta Bahaya Epidemi Wabah Penyakit Kabupaten Bantul	II-32
Gambar 2.20 Peta Bahaya Penyebaran Covid-19 Kabupaten Bantul	II-33
Gambar 2.21 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul 2018-2022	II-37
Gambar 2.22 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-38
Gambar 2.23 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor Tahun 2018-2022 (%)	II-40

Gambar 2.24 Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-42
Gambar 2.25 Angka Rata-rata Lama Sekolah	II-50
Gambar 2.26 Angka Harapan Lama Sekolah	II-51
Gambar 2.27 Umur Harapan Hidup	II-53
Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-54
Gambar 2.29 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-67
Gambar 2.30 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-78
Gambar 2.31 CNR dan SR Penderita TB di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-85
Gambar 2.32 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul	II-86
Gambar 2.33 Peta Indeks Risiko Air Limbah Domestik.....	II-105
Gambar 2.34 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022	II-110
Gambar 2.35 Peta Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Bantul Tahun 2022	II-133
Gambar 2.36 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-148
Gambar 2.37 Persentase Partisipasi PNS Perempuan di Lembaga Pemerintahan.....	II-153
Gambar 2.38 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-159
Gambar 2.39 Peta Lokasi Pengambilan Sampel Air Sungai	II-172
Gambar 2.40 Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Bantul tahun 2018-2022.....	II-172
Gambar 2.41 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul tahun 2018-2022.....	II-174
Gambar 2.42 Peta Tutupan Vegetasi Kabupaten Bantul	II-176
Gambar 2.43 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul tahun 2018-2022.....	II-177
Gambar 2.44 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-205
Gambar 2.45 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-213
Gambar 2.46 Grafik Dataset menurut Perangkat Daerah di Portal Data	II-260
Gambar 2.47 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022	II-316
Gambar 2.48 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	II-317

Gambar 2.49 Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tiap Tahun dalam kurun waktu 2018-2022.....	II-318
Gambar 2.50 Pertumbuhan Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018-2022.....	II-319
Gambar 2.51 Indeks RB Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.....	II-367
Gambar 2.52 Statistik Penerbitan Nomor Induk Berusaha/NIB (04 Agustus 2021 s.d 29 Desember 2022)	II-423
Gambar 2.53 Kesesuaian SOP dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022.....	II-425
Gambar 2.54 Grafik target dan realisasi fisik Tahun 2022.....	II-468
Gambar 2.55 Grafik target dan realisasi keuangan Tahun 2022.....	II-469
 Gambar 4.1 Identifikasi Isu Strategis.....	 IV-46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pasal 260 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah yang berupa dokumen perencanaan Daerah untuk periode satu tahun. RKPD disusun oleh pemerintah daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1. Secara substansial menjadi arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan,

- indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab program kegiatan;
2. Secara normatif menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Secara operasional berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan menjadi tanggung jawab SKPD sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) PD dan
 4. Secara faktual berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2024 tersebut, disusun dengan menggunakan empat pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, RKPD Tahun 2024 juga disusun menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial. Pendekatan tematik-holistik dilaksanakan dengan mempertimbangkan

unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang meliputi:

1. Persiapan penyusunan

Pada tahap persiapan serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. penyusunan Rancangan SK Bupati Bantul tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Tahap penyusunan Rancangan Awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis Rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
- d. penelaahan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. perumusan prioritas pembangunan Daerah;

k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan forum konsultasi publik merupakan pembahasan Rancangan Awal RKPD bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Masukan dan saran tersebut, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik. Selanjutnya, Rancangan Awal RKPD yang telah disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

4. Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan Rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan:

- a. Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi;
- b. hasil penelaahan terhadap Rancangan awal RKPD DIY, RKP dan program strategis nasional.

5. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pelaksanaan musrenbang RKPD terdiri atas musrenbang RKPD di kapanewon dan musrenbang RKPD di kabupaten. Musrenbang RKPD di kapanewon merupakan forum pembahasan daftar usulan kalurahan lingkup kapanewon. Sedangkan musrenbang RKPD di kabupaten merupakan forum pembahasan Rancangan RKPD yang dilaksanakan dalam rangka:

- a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
- b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
- c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;

- d. penyesuaian program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan DIY;
- e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

6. Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

7. Penetapan RKPD

Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan. Peraturan Bupati tentang RKPD dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Seluruh proses penyusunan RKPD Tahun 2024 tersebut, memerlukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan serta dilakukan dengan berbasis *e-planning* dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

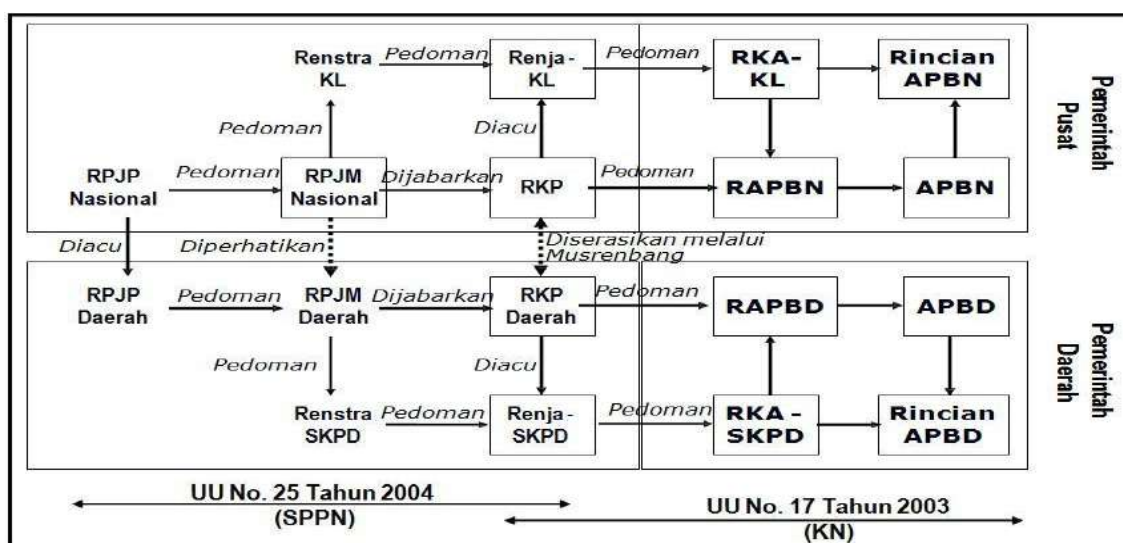
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Bidang Kesehatan;
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

- Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
 32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
 33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun. Penyusunan RKPD harus diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD DIY Tahun 2024.

Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Hubungan Dokumen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RKPD diselaraskan dengan RKP, program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, dan RKPD DIY. Selanjutnya RKPD menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta menjadi pedoman dalam proses penyusunan rancangan APBD. Dokumen RKPD juga menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan bersinergi dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RKPD disusun untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan serta antar lembaga pemerintahan pusat dan daerah provinsi maupun kabupaten, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD adalah

1. Sebagai arah pembangunan tahunan pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Sebagai tolok ukur tahunan keberhasilan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; dan
4. Sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Tahun 2024.

1.5. Sistematika Penulisan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur sistematika penulisan dokumen RKPD sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan aspek kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD,

permasalahan pembangunan daerah (yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang: (1) Arah kebijakan ekonomi daerah yang memuat arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari RKP dan kebijakan ekonomi dalam dokumen RPJMD; (2) Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan mengenai arah kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana kerja dan pendanaan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan daerah Tahun 2024.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini mengemukakan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

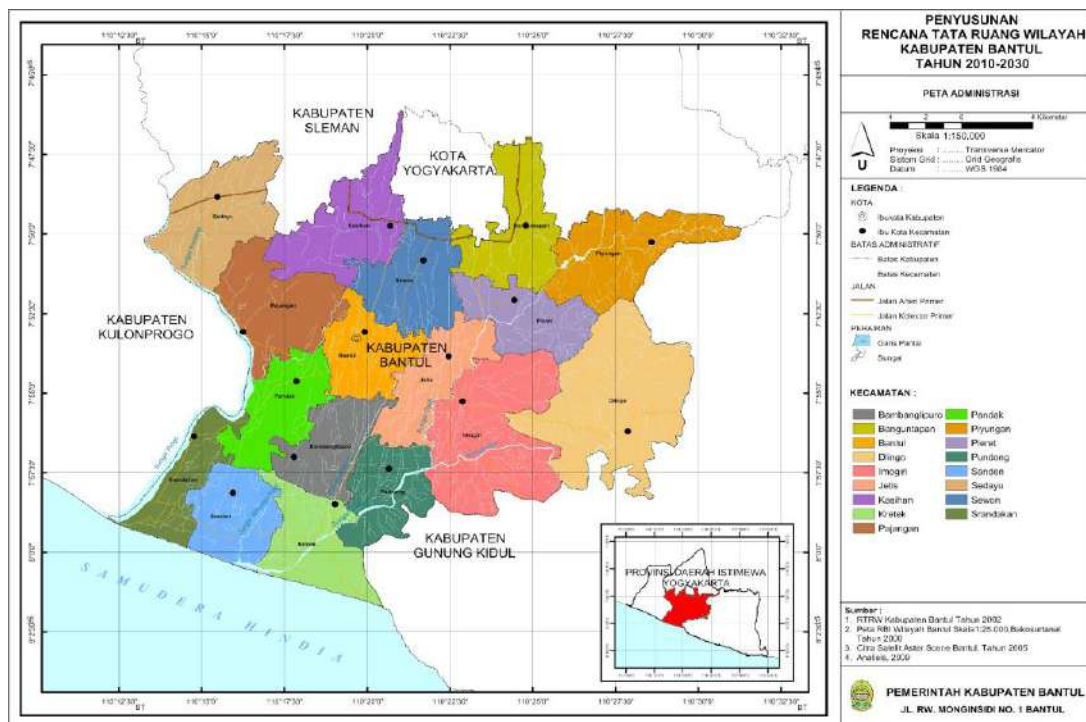
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di wilayah bagian selatan dengan luas wilayah 506,85 km² (sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030). Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

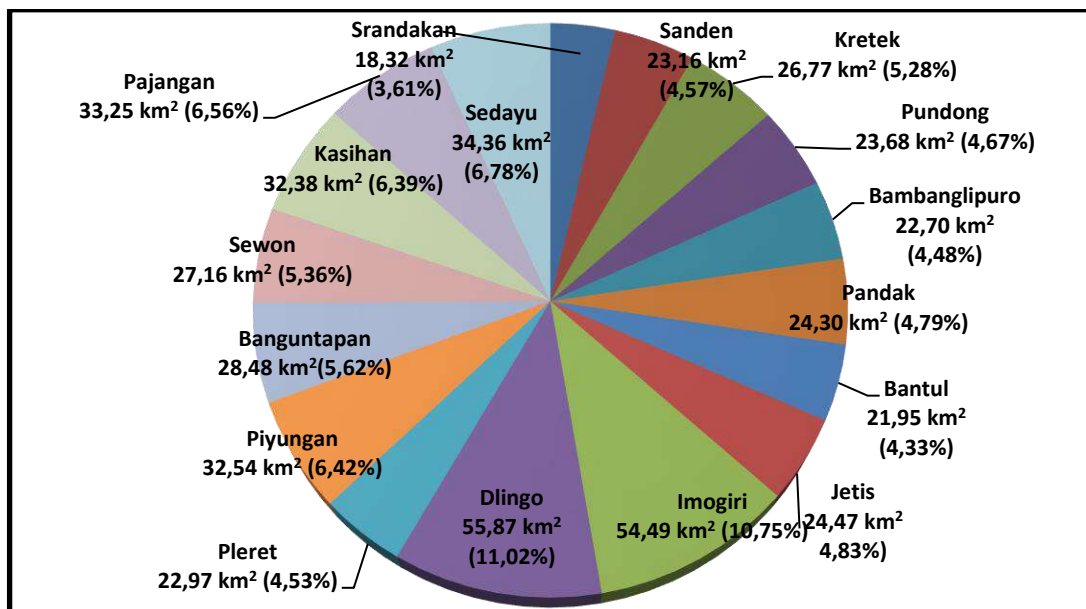
Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon. Sebutan kapanewon merupakan sebutan lain kecamatan di wilayah kabupaten/kota di DIY sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Demikian pula sebutan kalurahan merupakan sebutan lain desa di wilayah DIY yang merupakan gabungan beberapa pedukuhan dan berkedudukan di bawah kapanewon.



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul

Persentase luas wilayah menurut kapanewon di Kabupaten Bantul disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.2 Luas Wilayah Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul

Kapanewon Dlingo adalah kapanewon yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 km² (11,02%) sementara Kapanewon Srandakan adalah kapanewon dengan wilayah paling sempit, yaitu 18,32 Km² (3,62%).

Wilayah Kabupaten Bantul juga terbagi atas 75 kalurahan dan 933 pedukuhan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia, terdapat 21 kalurahan (28%) dengan klasifikasi 'perdesaan' (*rural area*) dan 54 kalurahan (72%) dengan klasifikasi 'perkotaan' (*urban area*) dari 75 kalurahan yang ada di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan wilayah administrasi kapanewon, maka seluruh kalurahan yang ada di Kapanewon Srandakan, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Piyungan, Banguntapan, Sewon, dan Kasihan merupakan 'perkotaan'. Klasifikasi wilayah lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Klasifikasi Wilayah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul

No.	Kapanewon	Klasifikasi Wilayah								
		Jumlah Kalurahan	Desa Perdesaan	Jumlah RT	Jumlah Padukuhan	Luas (km²)	Desa Perkotaan	Jumlah RT	Jumlah Padukuhan	Luas (km²)
1	Srandakan	2	-				Trimurti	135	19	6,46
						Poncosari	120	24	11,86	
2	Sanden	4	Gadingharjo	24	6	3,08	Gadingsari	92	18	8,12
						Srigading	81	20	7,57	
						Murtigading	75	18	4,39	
3	Kretek	5	Tirtohargo	27	6	3,62	Donotirto	68	13	4,7
			Parangtritis	55	11	11,87	Tirtomulyo	66	15	4,19
			Tirtosari	42	7	2,39				
4	Pundong	3	-				Srihardono	103	17	6,87
						Seloharjo	73	16	11,1	
						Panjangrejo	75	16	5,71	
5	Bambanglipuro	3					Sidomulyo	100	15	8,05
						Sumbermulyo	115	16	8,19	
						Mulyodadi	84	14	6,45	
6	Pandak	4	-				Wijirejo	61	10	4,68
						Caturharjo	77	14	5,93	
						Triharjo	63	10	6,43	
						Gilangharjo	91	15	7,26	
7	Bantul	5	-				Palbapang	81	10	5,53
						Ringinharjo	43	6	2,77	
						Bantul	93	12	5,24	
						Trirenggo	109	17	6,1	
						Sabdodadi	39	5	2,32	
8	Jetis	4	Patalan	88	20	5,65	Canden	76	15	5,36
			Trimulyo	119	12	7,11	Sumberagung	94	17	6,35
9	Imogiri	8	Selopamioro	112	18	22,75	Karangtalun	23	5	1,21
			Sriharjo	63	13	6,32	Imogiri	32	4	0,83
			Karangtengah	41	6	2,88	Wukirsari	101	16	15,39
			Kebonagung	23	5	1,87				
			Girirejo	46	5	3,24				
10	Dlingo	6	Mangunan	46	6	9,52	Temuwuh	64	12	7,67
			Muntuk	73	11	12,85				
			Dlingo	47	10	9,16				
			Jatimulyo	55	10	8,91				

No.	Kapanewon	Klasifikasi Wilayah								
		Jumlah Kalurahan	Desa Perdesaan	Jumlah RT	Jumlah Padukuhan	Luas (km ²)	Desa Perkotaan	Jumlah RT	Jumlah Padukuhan	Luas (km ²)
			Terong	42	9	7,76				
11	Pleret	5	Bawuran	35	7	4,97	Wonokromo	73	12	4,34
			Wonolelo	37	8	4,54	Pleret	79	11	4,25
							Segoroyoso	48	9	4,87
12	Piyungan	3	-				Srimulyo	119	22	14,56
							Srimartani	112	17	8,58
							Sitimulyo	111	21	9,4
13	Banguntapan	8	-				Baturetno	94	8	3,94
							Banguntapan	209	11	8,33
							Tamanan	52	9	3,75
							Jagalan	25	2	0,27
							Singosaren	18	5	0,67
							Wirokerten	67	8	3,86
							Jambidan	54	7	3,76
							Potorono	84	9	3,9
14	Sewon	4	-				Pendowoharjo	94	16	6,98
							Panggungharjo	119	14	5,61
							Timbulharjo	122	16	7,78
							Bangunharjo	127	16	6,79
15	Kasihan	4	-				Tirtonirmolo	102	12	5,13
							Tamantirto	92	10	6,72
							Ngestiharjo	127	12	5,1
							Bangunjiwo	146	19	15,43
16	Pajangan	3	Triwidadi	106	22	12,71	Guwosari	77	15	8,78
			Sendangsari	91	18	11,76				
17	Sedayu	4	Argodadi	100	14	11,21	Argosari	60	13	6,37
							Argorejo	72	13	7,23
							Argomulyo	110	14	9,55
	Jumlah	75	21		224	164,17	54		709	342,68
	Jumlah RT							5.899		
	Jumlah Dusun								933	
	Luas Kabupaten (km ²)									506,85

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul (sesuai Perka BPS No 37/2010), 2023

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

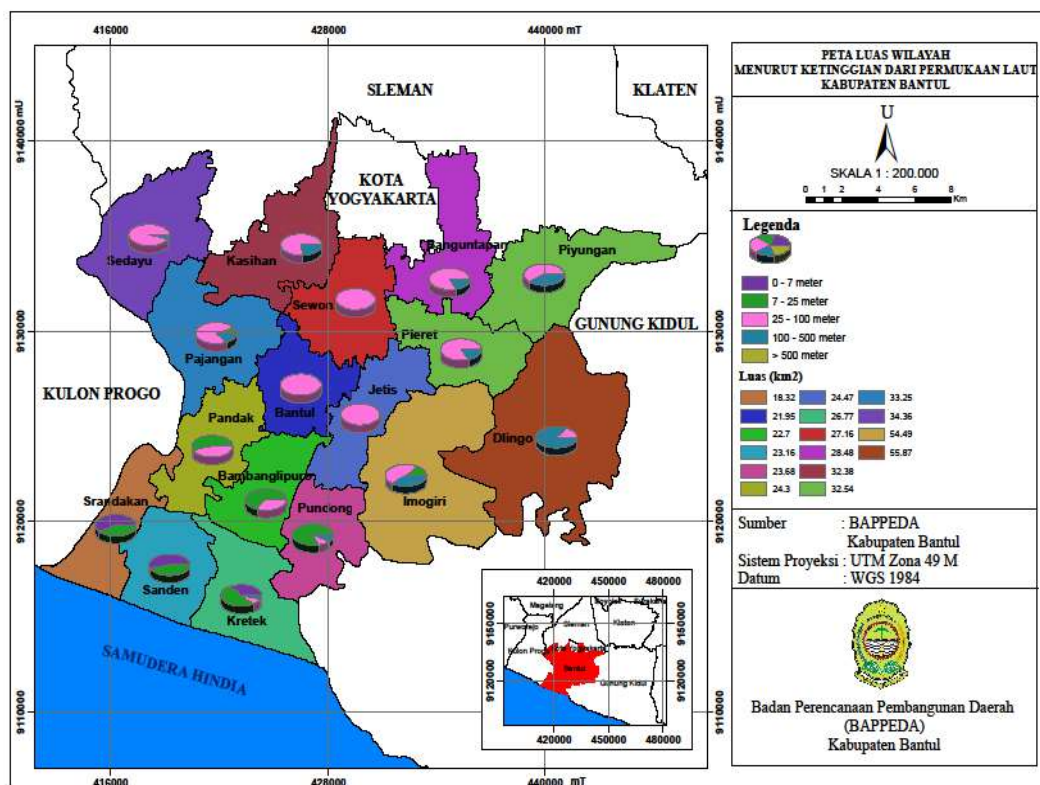
Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 110°12'34"-110°31'08" Bujur Timur dan 7°44'04" 8°00'27" Lintang Selatan.

Bentang alam wilayah Kabupaten Bantul merupakan dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari:

- a. Bagian Barat, adalah daerah landai merupakan daerah yang kurang subur serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73 % dari seluruh wilayah).
- b. Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km² (41,62 %).
- c. Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%).
- d. Bagian Selatan, adalah daerah yang sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan wilayah Kapanewon Srandakan, Sanden dan Kretek.

2.1.1.1.3 Kondisi Topografi

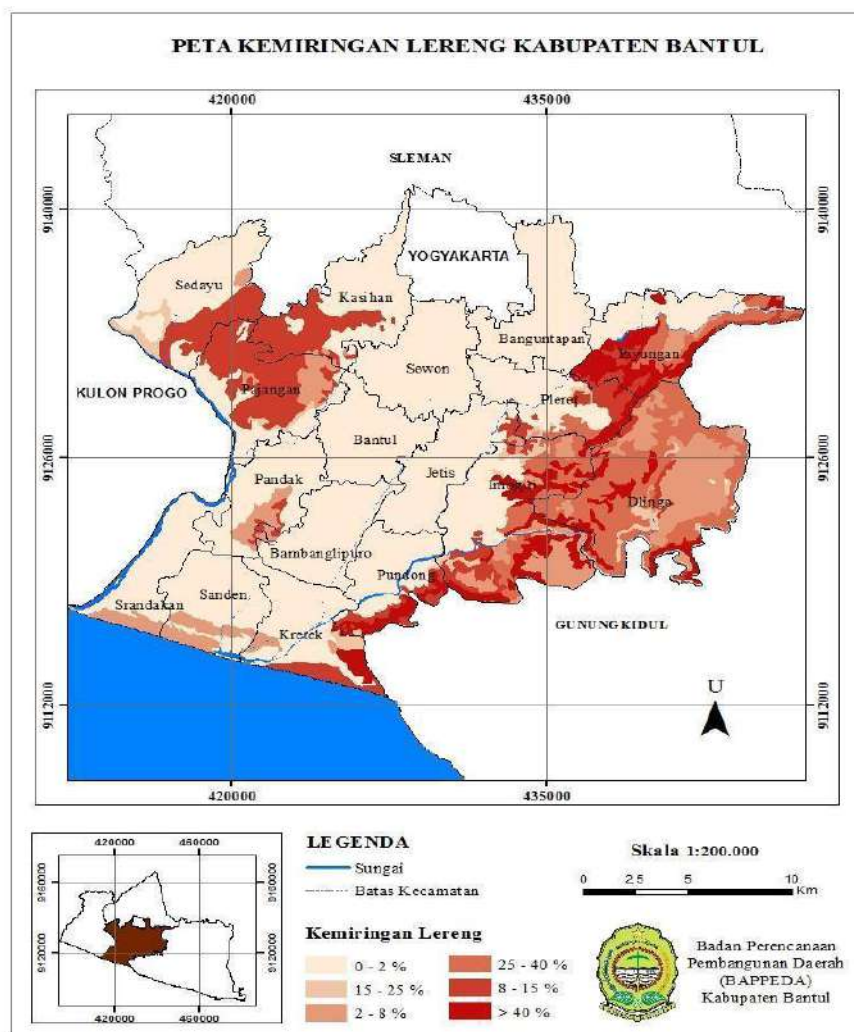
Ketinggian tempat Kabupaten Bantul meliputi empat kelas ketinggian dan hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya secara spasial ditunjukkan pada peta luas wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut.



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.3 Luas Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul

Kelas ketinggian tempat yang dimiliki Kabupaten Bantul penyebaran paling luas adalah elevasi antara 25–100 meter (27.709 Ha atau 54,67%) yang merupakan daerah datar landai dan sedikit berbukit dengan sebagian merupakan daerah pertanian yang subur, terletak pada bagian utara, bagian tengah dan bagian tenggara Kabupaten Bantul. Sedangkan wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 3.228 Ha (6,37%) terdapat di bagian selatan yaitu di Kapanewon Kretek, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Srandakan. Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudra Hindia dengan keadaan alamnya berpasir dan sedikit berlaguna. Untuk wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan.



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.4 Kemiringan Lereng di Kabupaten Bantul

Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi enam kelas. Wilayah Kabupaten Bantul pada umumnya berupa daerah dataran (kemiringan kurang dari 2%) dengan penyebaran di wilayah selatan, tengah, dan utara dari Kabupaten Bantul dengan luas sebesar 2.674 Ha (5,67%).

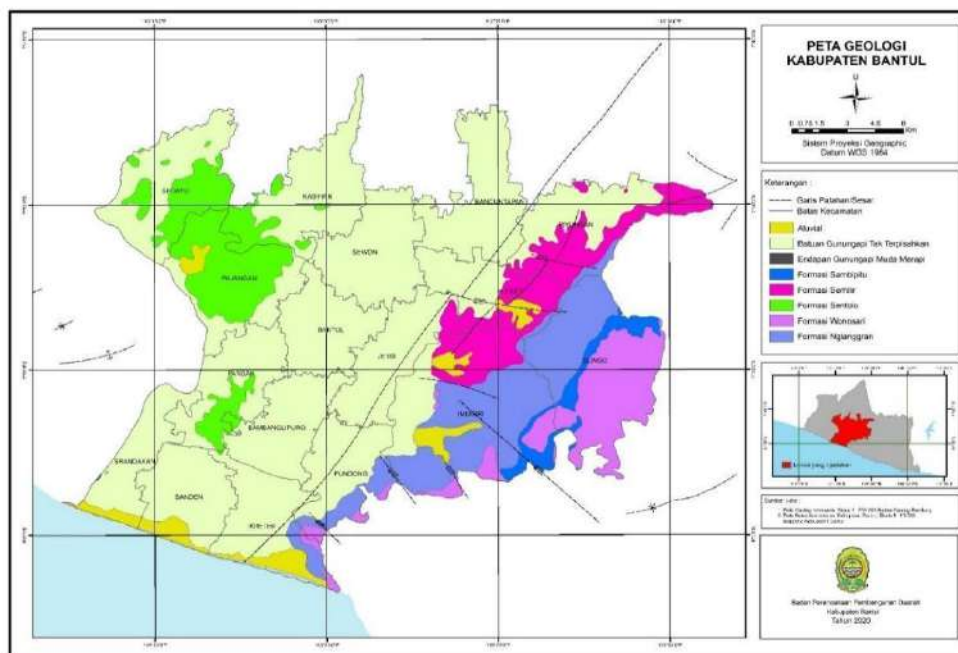
Wilayah dengan kemiringan 2%-8% seluas 20.166,7 Ha (39,79%) ada di wilayah selatan, tengah dan utara, wilayah dengan kemiringan 8%-15% seluas 14.341,20 Ha (28,29%) ada di wilayah barat dan timur, Wilayah dengan kemiringan 15%-25% seluas 7.453,50 Ha (14,71%) ada di wilayah barat dan timur, wilayah dengan kemiringan 25%-40% seluas 3.947,40 Ha (7,79%) ada di wilayah barat dan timur, sedang wilayah dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 2.101,90 Ha (4,15%) ada di wilayah timur Kabupaten

Bantul. Apabila dilihat per wilayah kapanewon terlihat bahwa wilayah kapanewon yang paling luas memiliki lahan miring terletak di Kapanewon Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah kapanewon yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kapanewon Sewon dan Banguntapan.

2.1.1.1.4 Kondisi Geologi

Geologi menunjukkan kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang. Untuk mengetahui jumlah cadangan bahan galian dan prospek pengembangannya memerlukan penanganan lebih lanjut. Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan.

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri dari dua jenis batuan yaitu batuan beku dan batuan sedimen. Berdasarkan sifat-sifat batuan dapat dirinci menjadi beberapa formasi. Formasi batuan di Kabupaten Bantul sesuai Peta Geologi, dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM 2003 (diolah) Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Bantul

Sedangkan formasi batuan di Kabupaten Bantul menurut luasannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Formasi Batuan Kabupaten Bantul

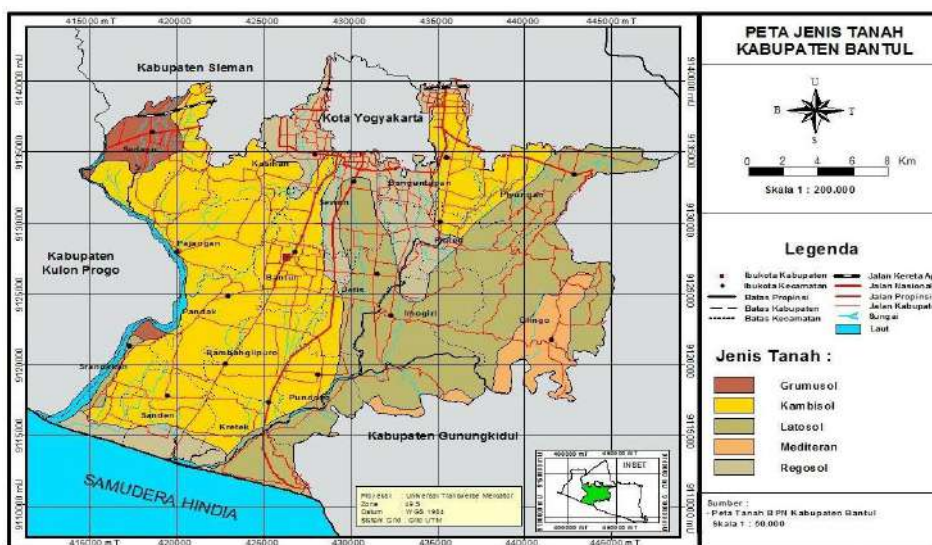
No.	Formasi Batuan	Luas (Ha)	%
1	Aluvial	1.669,69	3,27
2	Batuan Gunung api Tak Terpisahkan	30.984,03	60,63
3	Endapan Gunung api Muda Merapi	4,02	0,01
4	Formasi Sambipitu	950,10	1,86
5	Formasi Semilir	3.703,62	7,25
6	Formasi Sentolo	4.622,49	9,04
7	Formasi Wonosari	3.388,69	6,63
8	Formasi Nglanggran	5.783,37	11,32
9	Jumlah	51.106,01	100,00

Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM 2003 (diolah) Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

Kabupaten Bantul sesuai Peta Geologi Indonesia, sebagian besar terdiri atas formasi batuan Gunung Api Tak Terpisahkan (*Consolidated*) seluas 30.984.03 Ha atau 60,63%; formasi Nglanggran seluas 5.783,37 Ha atau 11,32%; formasi Sentolo seluas 4.622,49 Ha atau 9.04 %; formasi Aluvial seluas 1.669,69 Ha atau 3,27%; endapan Gunung api Muda Merapi seluas 4,02 Ha atau 0,01%; formasi Sambipitu 950,10 Ha atau 1,86%; formasi Wonosari seluas 3.388,69 Ha atau 6,63%; dan formasi semilir seluas 3.703,62 Ha atau 7,25%. Luas wilayah Kabupaten Bantul berdasar formasi batuan adalah 51.106,01 Ha, hal ini berbeda dengan luas wilayah bersumber dari Perda no 4 tahun 2011 tentang RTRW Kab Bantul 2010-2030 seluas 50.685 Ha.

2.1.1.1.5 Jenis Tanah

Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai lima jenis tanah yaitu tanah Grumusol, Kambisol, Latosol, Mediteran, Regosol. Peta jenis tanah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Sumber: BPN,2021

Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul

Tanah Latosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret. Tanah Grumusol berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, napal, dan tuff, terdapat di Kapanewon Sedayu, Pajangan, Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan.

Tanah Mediteran berasal dari batu gamping karang, batu gamping berlapis, dan batupasir, tersebar di Kapanewon Dlingo dan sedikit di Sedayu. Jenis tanah Regosol merupakan jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Tanah Regosol adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan solum tebal dan memiliki tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini tersebar pada Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro.

2.1.1.1.6 Hidrologi

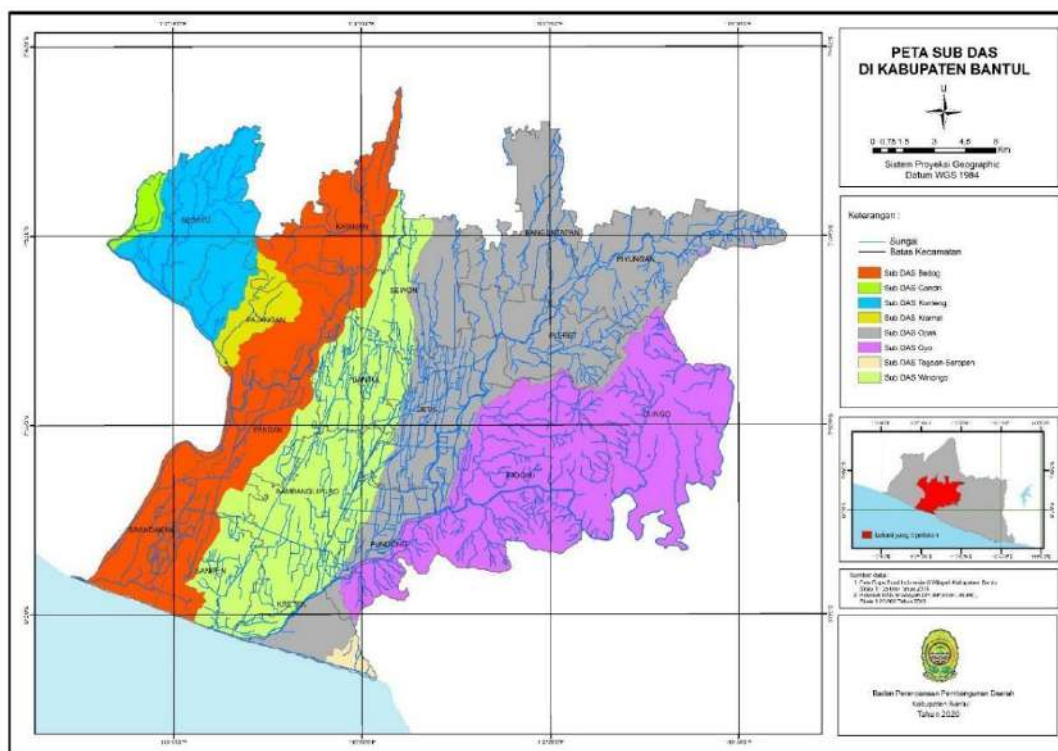
Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum adalah suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar di muara sungai. Kabupaten Bantul terdapat dua Daerah Aliran Sungai (DAS)

yaitu DAS Progo dan DAS Opak. Rincian DAS tersebut dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.3 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul

No.	DAS	Sub DAS	Luas (Ha)	Sub Luas DAS (Ha)
1	DAS Progo	Sub DAS Bedog Progo	7.979,02	19.118,16
		Sub DAS Gandri	310,50	
		Sub DAS Koteng	5.602,93	
		Sub DAS Progo Hilir	5.225,71	
2	DAS Opak	Sub DAS Opak	15.037,44	36.500,12
		Sub DAS Oyo	11.576,88	
		Sub DAS Winongo	9.885,80	

Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai KLHK, 2023



Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai KLHK, 2023

Gambar 2.7 Peta Sub Das di Kabupaten Bantul

Wilayah Kabupaten Bantul dilewati sungai besar dan sungai kecil. Dari sungai tersebut, 5 sungai merupakan sungai prioritas yaitu Sungai Bedog, Winongo, Code, Gajah Wong dan Opak. Sungai-sungai tersebut berperan sebagai sumber air irigasi pertanian, perikanan, namun juga digunakan sebagai pembuangan akhir dari kegiatan manusia baik kegiatan domestik

maupun kegiatan usaha/industri yang menjadi sumber pencemar bila tidak dikelola dengan baik dan benar.

Tabel 2.4 Sungai di Kabupaten Bantul

No.	Nama Sungai	Panjang (m)	Hulu	Hilir
I. Sungai Besar (Lintas Provinsi)				
1	Opak	36.140	Srimulyo, Piyungan	Samudera Indonesia, Parangtritis Kretek
2	Oyo	22.850	Jatimulyo, Dlingo	Sungai Opak, Selopamioro Imogiri
3	Progo	26.440	Argosari, Sedayu	Samudera Indonesia, Poncosari Srandakan
II. Sungai Kecil (Lintas Kabupaten)				
1	Bedog	2.700	Tirtomirmolo, Kasihan	Sungai Progo, Triharjo Pandak
2	Buntung	1.950	Srimartani, Piyungan	Kali Gawe, Srimulyo Piyungan
3	Code	9.440	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo Jetis
4	Gajah Wong	5.520	Singosaren, Banguntapan	Sungai Opak, Wonokromo Pleret
5	Gawe	8.200	Srimartani, Piyungan	Sungai Opak, Srimulyo Piyungan
6	Kedung Semerangan	9.860	Baturetno, Banguntapan	Sungai Gajah Wong, Pleret
7	Kenteng	5.040	Srimartani, Piyungan	Sungai Gawe, Srimartani, Piyungan
8	Konteng	5.570	Argomulyo, Sedayu	Sungai Progo, Argodadi Sedayu
9	Krusuk	5.740	Argosari, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo Sedayu
10	Kuning	1.940	Sitimulyo, Piyungan	Sungai Opak, Sitimulyo, Piyungan
11	Mruwe	7.910	Baturetno, Banguntapan	Sungai Opak, Jambidan Banguntapan
12	Timoho	11.960	Argomulyo, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo Sedayu
13	Winongo	20.080	Ngestiharjo, Kasihan	Sungai Opak, Donotirto Kretek
III. Sungai Kecil (Dalam Kabupaten)				
1	Belik	5.130	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo Jetis
2	Celeng	10.370	Muntuk, Dlingo	Sungai Oyo, Sriharjo Imogiri
3	Kedung miri	6.280	Terong, Dlingo	Sungai Oyo, Terong Dlingo
4	Kramat	5.230	Bangunjiwo, Kasihan	Sungai Progo, Triwidadi Pajangan
5	Pesing	8.500	Srimulyo, Piyungan	Sungai Opak, Segoroyoso Pleret
6	Plilan	3.570	Selopamioro, Imogiri	Sungai Kajor, Selopamioro Imogiri
7	Urang	5.670	Muntuk, Dlingo	Sungai Oyo, Dlingo
8	Winongo lama	2.200	Tirtohargo Kretek	Sungai Opak, Tirtohargo Kretek

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

2.1.1.1.7 Klimatologi

Ada dua musim yang terjadi di Indonesia, yaitu kemarau dan penghujan. Disebut musim kemarau jika curah hujan per bulan berada di bawah 60 mm per bulan dan sebaliknya terjadi di musim penghujan. Menurut klasifikasi iklim Koppen, Bantul memiliki iklim muson tropis.

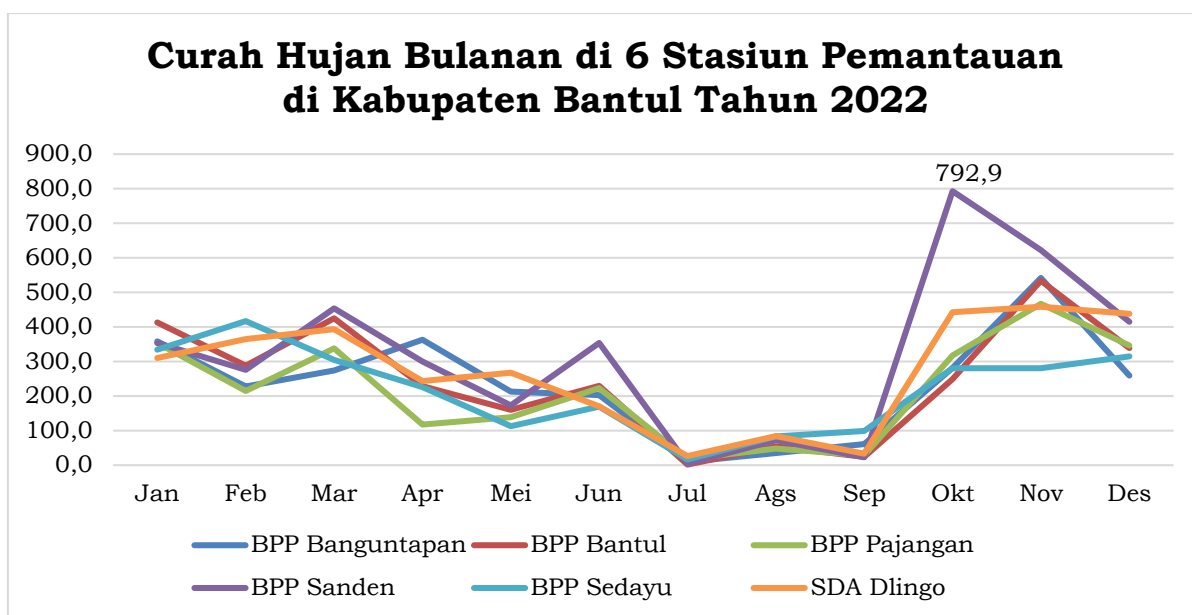
Data curah hujan tahun 2018-2022 pada tabel di bawah ini diambil dari data stasiun pemantau cuaca SDA Ringinharjo yang terletak di pusat kota Kabupaten Bantul.

Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di SDA Ringinharjo Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Bulan	Curah Hujan (mm3)					Hari Hujan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	594	440	285	455	297	21	23	16	21	24
Februari	310	185	377	621	222	16	12	19	22	19
Maret	247	621	534	140	170	12	21	22	20	25
April	89	184	440	206	48	7	9	14	10	14
Mei	-	-	212	-	158	-	-	11	-	11
Juni	-	-	8	285	178	-	-	2	10	11
Juli	-	-	-	13	8	-	-	-	2	3
Agustus	-	-	-	11	40	-	-	-	6	5
September	5	-	-	41	16	1	-	-	7	3
Oktober	-	-	149	101	718	-	-	11	6	22
November	389	13	306	356	959	10	1	14	23	27
Desember	293	247	396	235	333	13	17	19	20	16
Rata-rata	275	282	301	224	262	11	14	14	13	15

Sumber: BMKG, DIY 2023

Dari tabel di atas, pada tahun 2022 rata-rata curah hujan di pusat Kabupaten Bantul adalah 262 mm³/bulan, meningkat sekitar 38 mm³ jika dibanding tahun 2021. Curah hujan tertinggi pada bulan Oktober, November dan Desember, sedangkan curah hujan terendah pada Juli dan September.



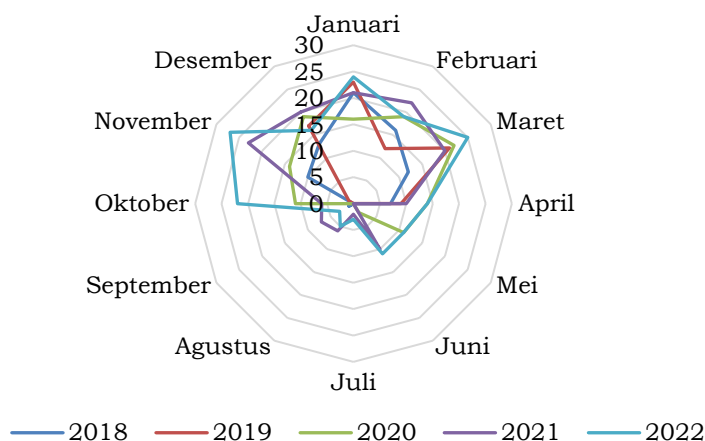
Sumber: BMKG, DIY 2023

Satuan: mm³/bulan

Gambar 2.8 Curah Hujan menurut Bulan di 6 Stasiun Pemantauan di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari BMKG DIY terdapat enam Stasiun Pemantauan yang dapat menggambarkan curah hujan di berbagai lokasi di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2022, curah hujan maksimum tercatat di BPP Sanden pada bulan Oktober yaitu 792,9 mm³/bulan. Sedangkan curah hujan minimum tercatat di BPP Bantul pada bulan Juli yaitu 1,8 mm³/bulan.

Jumlah Hari Hujan di SDA Ringinharjo Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022



Gambar 2.9 Jumlah Curah Hujan menurut Bulan di SDA Ringinharjo Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa curah hujan tinggi di SDA Ringinharjo terjadi pada tahun 2022 tepatnya pada Bulan Oktober dan November. Rata rata hari hujan di tahun 2022 adalah 15 hari dimana rata rata ini adalah rata-rata hari hujan tertinggi dalam kurun 2018-2022.

2.1.1.1.8 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Luas lahan di Kabupaten Bantul sebesar 50.685 ha terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan. Data penggunaan lahan Kabupaten Bantul, tahun 2022 digunakan citra satelit dengan resolusi spasial yang tinggi (skala 1:50.000) dan mengikuti SNI-7645-1:2014.

Tabel 2.6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
		Tahun 2022
1	Hutan Kerapatan Rendah	642,60
2	Hutan Kerapatan Sedang	360,2
3	Hutan Kerapatan Tinggi	611,6
4	Ladang/Tegalan	4175,8
5	Kebun Campuran	6407,8
6	Sawah Irigasi	12.261,70
7	Sawah Tadah Hujan	1.127,30
8	Lahan Terbuka	78,6
9	Semak/Belukar	471,8
10	Permukiman	23.760,50
11	Industri	90,20
12	Tubuh Air	501,90
13	Lahan Terbuka Lain (Gosong Sungai)	33,5
14	Pasir Pantai	157,5
15	Mangrove	4
Jumlah		50.685,00

Sumber: DPTR Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan peta lahan baku sawah yang dikeluarkan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2017 luas lahan pertanian irigasi dan tadah hujan Kabupaten Bantul dengan skala 1:5000 sebesar 14.968,38Ha. Terjadi pengurangan sawah di Kabupaten Bantul berdasarkan data

Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) oleh BPN Bantul dan data hasil digitasi alih fungsi lahan pertanian dari citra satelit resolusi tinggi (CSRT) setiap tahunnya. Adapun pengurangan sawah irigasi dan tadah hujan 2018 s.d. 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.7 Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha) Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

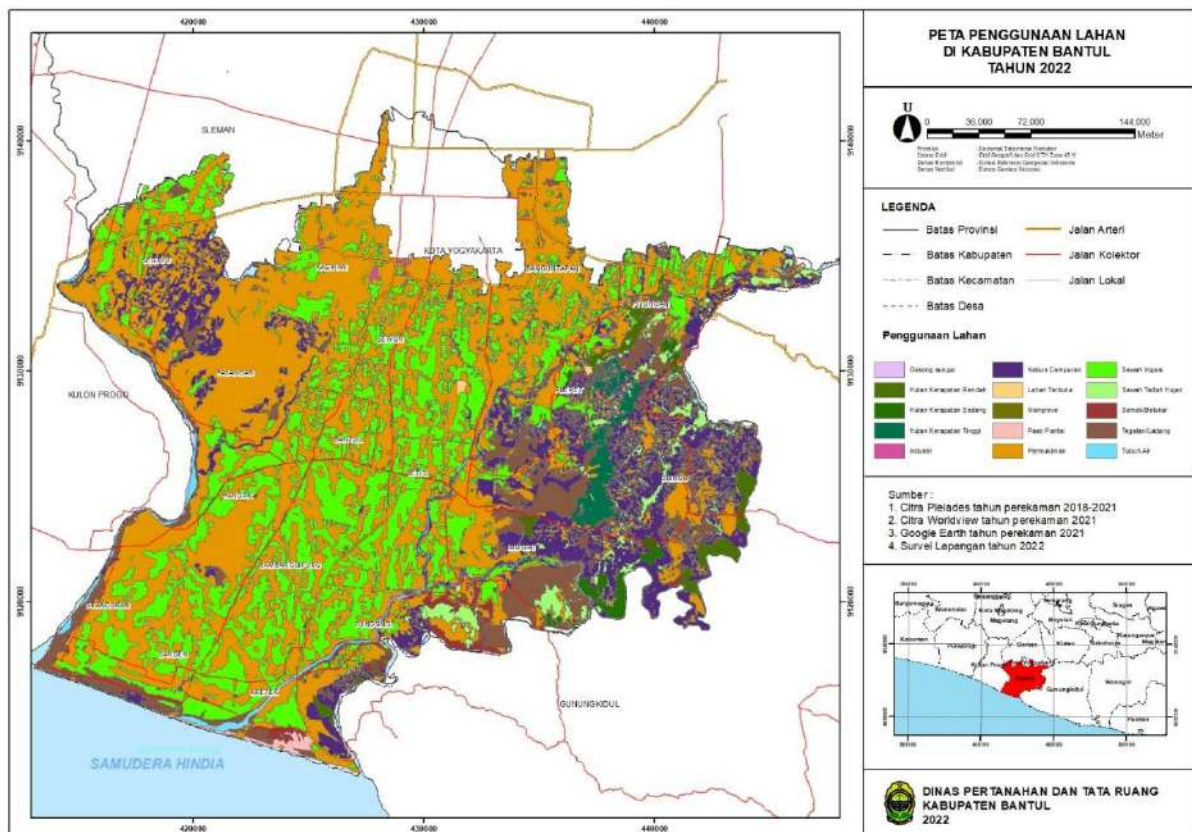
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha)	172,17	455,22	171,93	106,43	67,38

Sumber: Bappeda dan DPTR 2023, diolah

Fakta perubahan lahan dimaksud di atas mengindikasikan terjadinya alih fungsi lahan pada sawah irigasi menjadi pemanfaatan lahan yang lain. Hal ini berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi.

Penyebab kenaikan alih fungsi lahan pada 2018 merupakan masa masa pasca pencabutan moratorium alih fungsi lahan sehingga terjadi derasnya alih fungsi, dan menurun pada tahun 2021 karena diterbitkan Keputusan Bupati nomor 463 Tahun 2021 tentang LP2B Bantul dan adanya aturan LSD.

Perubahan penggunaan lahan khususnya lahan sawah yang dilakukan masyarakat didorong oleh kebutuhan untuk pembangunan rumah pribadi yang dilakukan tanpa melalui proses perijinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis dari Pemerintah Bantul terkait alih fungsi lahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan langkah-langkah guna pengendalian alih fungsi lahan dengan penyusunan Peraturan Daerah Pengendalian Lahan Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan (PLP2B) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selain upaya tersebut, juga, dilakukan langkah penumbuhan minat dan perlindungan pertanian, sehingga masyarakat tetap mempertahankan lahannya. Penggunaan lahan secara detail dapat dilihat dalam gambar peta di bawah ini.



Sumber: Dinas Pertanahan dan tata Ruang Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.10 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat diamati penggunaan permukiman dan penggunaan sawah irigasi berada di wilayah bagian tengah memanjang dari utara ke selatan. Hal ini merupakan konsekuensi dari kondisi kesuburan tanah di wilayah ini sehingga juga mendorong perkembangan wilayah permukiman. Sementara wilayah timur cenderung merupakan lahan pertanian non irigasi dan belum banyak permukiman. Oleh karena itu, perlu kebijakan pemerataan wilayah terbangun agar tidak terkonsentrasi di wilayah tengah.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bantul dapat diketahui dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Penataan ruang Kabupaten Bantul yaitu mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya,

perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Potensi pengembangan wilayah berada pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia. Kawasan budidaya meliputi kawasan peruntukan perkebunan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya.

a. Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan peruntukan perkebunan rakyat direncanakan seluas kurang lebih 8.545 (delapan ribu lima ratus empat puluh lima) hektar atau 16,86% (enam belas koma delapan enam persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya difokuskan pada Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Jetis, Kapanewon Pundong, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, dan Kapanewon Sanden.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian tanaman lahan kering, dan kawasan peternakan, yaitu:

- 1) Kawasan pertanian lahan basah direncanakan seluas kurang lebih 13.324 (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh empat) Hektar atau 26,29% (dua puluh enam koma dua sembilan persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul difokuskan terutama pada bagian tengah dan selatan, tetapi penyebarannya terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul kecuali Kecamatan Kasihan hanya sebagian kecil wilayah.
- 2) Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten direncanakan seluas

kurang lebih 5.247 (lima ribu dua ratus empat puluh tujuh) Hektar atau 10,35% (sepuluh koma tiga lima persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul difokuskan terutama pada bagian timur yaitu di Desa Jatimulyo, Desa Terong, Desa Muntuk, Desa Dlingo Kecamatan Dlingo, sebagian Desa Srimartani, Desa Srimulyo, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, Desa Wonolelo, Desa Bawuran, Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret, Desa Imogiri, Desa Selopamioro, Desa Wukirsari, Desa Girirejo, Desa Karangtalun Kecamatan Imogiri, Desa Parangtritis Kecamatan Kretek, Desa Seloharjo Kecamatan Pundong.

- 3) Kawasan peternakan di Kabupaten direncanakan sebagai berikut:
- a. peternakan itik di Kecamatan Kretek, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Sanden;
 - b. peternakan sapi perah di Kecamatan Srandakan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Sedayu;
 - c. peternakan sapi potong tersebar di hampir seluruh kecamatan;
 - d. peternakan babi di Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Kasihan;
 - e. peternakan kambing tersebar di hampir seluruh kecamatan;
 - f. peternakan kerbau di Kecamatan Sanden dan Kecamatan Banguntapan; dan
 - g. peternakan kelinci di Kecamatan Sanden.

c. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari:

- (1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten direncanakan di wilayah Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Kretek untuk pengembangan jenis perikanan laut dan untuk jenis perikanan darat direncanakan di seluruh kecamatan.
- (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kabupaten direncanakan di Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Sedayu.

d. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam meliputi:

- a. Kecamatan Dlingo berupa Breksi Andesit, Batu Gamping, Batu Pasir, Batu Lempung, dan Fosfat;
- b. Kecamatan Imogiri berupa Breksi Andesit, Batu Gamping, Mangaan, Lempung, Breksi Pumice, Batu Pasir Tufan, dan Batu Pasir Pumice;
- c. Kecamatan Piyungan berupa Lempung, Breksi Pumice, dan Batu Pasir Pumice;
- d. Kecamatan Banguntapan berupa Usaha Lempung dan Tanah Urug;
- e. Kecamatan Sewon berupa Batu Pasir dan Tanah Urug;
- f. Kecamatan Pleret berupa Batu Pasir Pumice, Breksi Pumice, Lempung, dan Pasir Tufan;
- g. Kecamatan Jetis berupa Pasir, Lempung, Breksi Batu Apung, dan Breksi Andesit;
- h. Kecamatan Banguntapan berupa Batu lempung dan Tanah Urug;
- i. Kecamatan Pajangan berupa Batu Gamping Berlapis, Pasir, Kerikil berpasir (sirtu), dan Tanah Urug;
- j. Kecamatan Sedayu berupa Batu Pasir, Batu Gamping, dan Tanah Urug.
- k. Kecamatan Pandak berupa Batu Gamping, Pasir, Kerikil berpasir, dan Tanah Urug;
- l. Kecamatan Bambanglipuro berupa Tanah Urug dan Pasir;
- m. Kecamatan Srandakan berupa Pasir, Kerikil berpasir (Sirtu), Pasir Besi, dan Tanah urug;
- n. Kecamatan Sanden berupa Tanah Urug, Pasir, dan Pasir Besi.
- o. Kecamatan Kretek berupa Tanah Urug, Pasir, dan Pasir Besi;
- p. Kecamatan Pundong berupa Pasir, Lempung, dan Breksi Andesit; dan
- q. Seluruh kecamatan yang meliputi Wilayah Kerja Eksplorasi ataupun Wilayah Kerja Eksploitas minyak dan gas bumi.

e. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. Kawasan peruntukan industri direncanakan meliputi industri menengah dan besar di Desa Argosari, Desa Argorejo, Desa Argodadi, Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu dan Desa Srimulyo, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, industri kecil, dan menengah tersebar di seluruh Kecamatan.
- b. Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi.
- c. Industri mikro dan kecil merupakan industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan akan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.
- d. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh kecamatan diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM.

f. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan.

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya di Kabupaten terdapat di:
 - a. Kompleks Makam Raja-raja Imogiri di Desa Girirejo Kecamatan Imogiri;
 - b. Kompleks Situs Ambarbinangun di Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan;
 - c. Situs Keraton Mataram di Desa Pleret Kecamatan Pleret;
 - d. Padepokan Ki Ageng Mangir di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan;
 - e. Kawasan Kotagedhe di Desa Jagalan dan Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan;
 - f. Gua Selarong di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan;
 - g. Gua Jepang di Desa Seloharjo Kecamatan Pundong;
 - h. Desa Budaya Dlingo Kecamatan Dlingo, Desa Seloharjo Kecamatan Pundong, Desa Srigading Kecamatan Sanden, Desa Triwidadi

Kecamatan Pajangan, Desa Trimurti Kecamatan Srandakan; Padepokan Seni Bagong Kusudiharja di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan;

- i. Cepuri Parangkusumo di Desa Parangtritis; dan
- j. Parangendog di Desa Parangtritis;

(2) Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di:

- a. Kawasan Pantai Parangtritis (Parangtritis, Parangkusumo, Depok);
- b. Kawasan Pantai Samas (Pantai Samas, Pandansari, Patehan);
- c. Kawasan Pantai Pandansimo (Kuwaru, Pandansimo);
- d. Kompleks Gua Cerme di Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri;
- e. Goa Jepang di Desa Seloharjo Kecamatan Pundong;
- f. Agrowisata Samas di Desa Srigading, Kecamatan Sanden; dan
- g. Agrowisata Dlingo di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo.

(3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdapat di:

- a. Desa Wisata Kebon Agung di Desa Kebon Agung, Kecamatan Imogiri.
- b. Desa Kerajinan Gabusan – Manding – Tembi (GMT) di Kecamatan Bantul dan Kecamatan Sewon;
- c. Desa Kerajinan Krebet di Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan. Desa Kerajinan Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem) di Kecamatan Kasihan;
- d. Desa Kerajinan Panjangrejo Kecamatan Pundong;
- e. Desa Wisata Serut;
- f. Desa Wisata Trimulyo; dan
- g. Tempat Rekreasi dan Taman Bermain di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan.

g. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

- (1) Rencana kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 5.434 (lima ribu empat ratus tiga puluh empat) Hektar atau 10,72% (sepuluh koma tujuh

dua persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya difokuskan di wilayah Kecamatan Sewon, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Pleret, dan Kecamatan Piyungan.

- (2) Rencana Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri di Desa Guwosari, Desa Sendangsari dan Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan dan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan direncanakan seluas kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) Hektar.
- (3) Rencana untuk kawasan permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 5.738 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) Hektar atau 11,32% (sebelas koma tiga dua persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten, kecuali Kecamatan Banguntapan.

h. Kawasan Peruntukan lainnya

Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, dan kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya, dengan sebaran sebagai berikut:

- 1) Rencana kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di Kabupaten meliputi:
 - a. Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Udara di Kecamatan Banguntapan;
 - b. Sekolah Polisi Negara di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri;
 - c. Kompi Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Gondowulung;
 - d. Polisi Air Udara di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek;
 - e. Pos Angkatan Laut di Desa Srigading Kecamatan Sanden; dan
 - f. Stasiun Radar di Kecamatan Kretek.
- 2) Rencana pengembangan kawasan fasilitas pelayanan umum lainnya diarahkan sebagai berikut:
 - a) Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa, yaitu:

- i. pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
 - ii. pengembangan perdagangan dan jasa wajib menyediakan parkir dalam halaman atau gedung;
 - iii. perencanaan pintu masuk keluar gedung agar tidak mengganggu sirkulasi dan keamanan berlalulintas; dan
 - iv. pengaturan jadwal waktu penyaluran (loading) barang-barang perdagangan pada kawasan yang padat bangunan dan aktivitas.
- b) Rencana pengembangan fasilitas pendidikan, yaitu :
- i. mengupayakan terlayannya wilayah Kabupaten secara merata dengan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar (TK dan SD) sampai dengan SMA;
 - ii. pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Sewon; dan
 - iii. meningkatkan estetika, keamanan, kenyamanan lingkungan, dan lokasi sehingga menunjang kegiatan belajar.
- c) Rencana pengembangan fasilitas kesehatan, yaitu:
- i. menjamin kelancaran aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit ; dan
 - ii. menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi pengguna/pasien dalam menjalani perawatan dan pengobatan.
- d) Rencana pengelolaan peribadatan dilakukan dengan memperhatikan aspek sumber dayalahan dan potensi umat, kegiatan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lahan yang layak bagi pengembangan, sedangkan potensi umat sebagai barometer untuk mengukur tingkat kebutuhan sarana peribadatan.
- e) Rencana pengembangan fasilitas rekreasi/olah raga, yaitu:
- i. fasilitas olah raga skala Kabupaten berpusat di area Stadion Sultan Agung;
 - ii. pengembangan rekreasi terpadu dengan skala Kabupaten dan regional dan rekreasi tematik yang dikelola secara profesional;

- iii. pengembangan pusat rekreasi skala regional dan lokal diarahkan pada wilayah-wilayah yang masih tersedia lahan yang besar dengan tingkat pertumbuhan rendah, agar menarik kegiatan yang lain sehingga tercapai dekonsentrasi pembangunan di Kabupaten; dan
 - iv. fasilitas rekreasi dan olahraga diarahkan tersebar di masing-masing kecamatan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan.
- f) Rencana pengembangan fasilitas perkantoran yaitu:
- i. fungsi perkantoran dibangun dekat dengan sasaran pelayanannya; dan
 - ii. perkantoran swasta lainnya dapat berlokasi pada semua kawasan budidaya kecualipadakawasan pertanian.
- g) Rencana pengembangan taman pekuburan/pemakaman.

Luasan yang direncanakan untuk permukiman akan terpenuhi di akhir tahun perencanaan, karena pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan migrasi pendatang yang ingin investasi maupun menyekolahkan anak di wilayah Yogyakarta umumnya dan Kabupaten Bantul khususnya.

Agar terjadi integrasi RTRW dengan RP3KP maka dalam penyusunan RP3KP selalu mengacu pada RTRW sedangkan perencanaan lebih detil dituangkan dalam dokumen RDTR, sehingga terkait peruntukan lahannya mengikuti RDTR.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 disebutkan kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam, meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan. Berdasarkan hasil kajian dan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2011, Kawasan rawan bencana sebagai berikut:

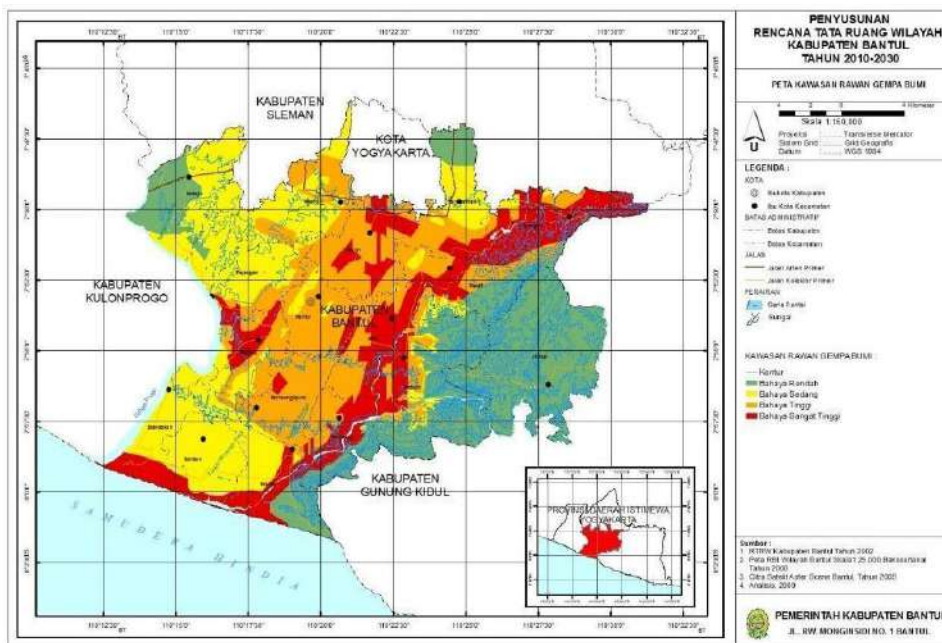
Tabel 2.8 Kawasan Rawan Bencana Menurut Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

No	Jenis Bencana	Lokasi yang Berpotensi
1.	Kawasan rawan gempa bumi	Di seluruh Kapanewon
2.	Kawasan rawan longsor	Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, Pundong dan Pajangan
3.	Kawasan rawan banjir	Srandakan, Pandak, Kretek, Sanden, Pundong, Jetis dan Pleret
4.	Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi	Kretek, Srandakan, dan Sanden, sebagian Kapanewon Pandak, sebagian Kapanewon Pundong, sebagian Kapanewon Imogiri, sebagian Kapanewon Jetis, dan sebagian Kapanewon Bambanglipuro
5.	Kawasan rawan kekeringan	Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Kawasan Rawan bencana di Kabupaten Bantul disajikan dalam gambar berikut:

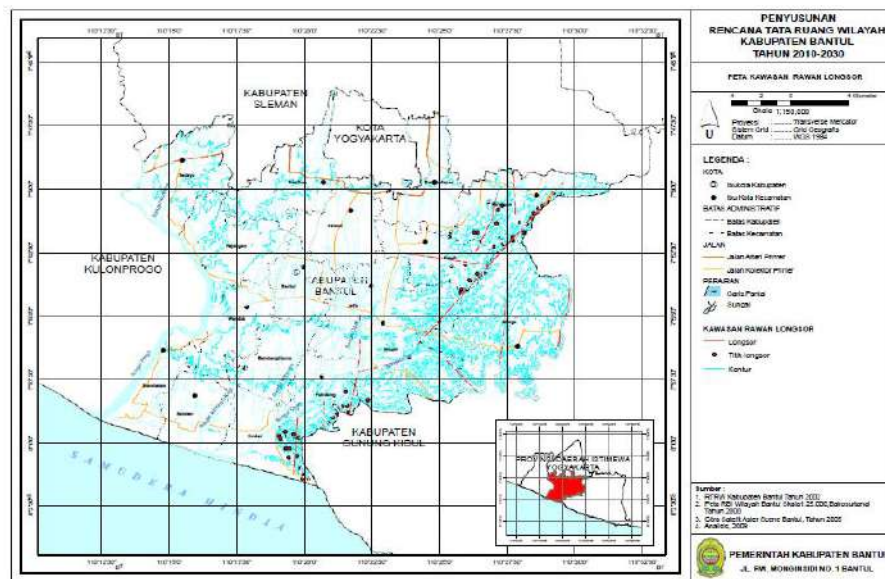
1. Kawasan rawan bencana gempa bumi meliputi seluruh kapanewon.



Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

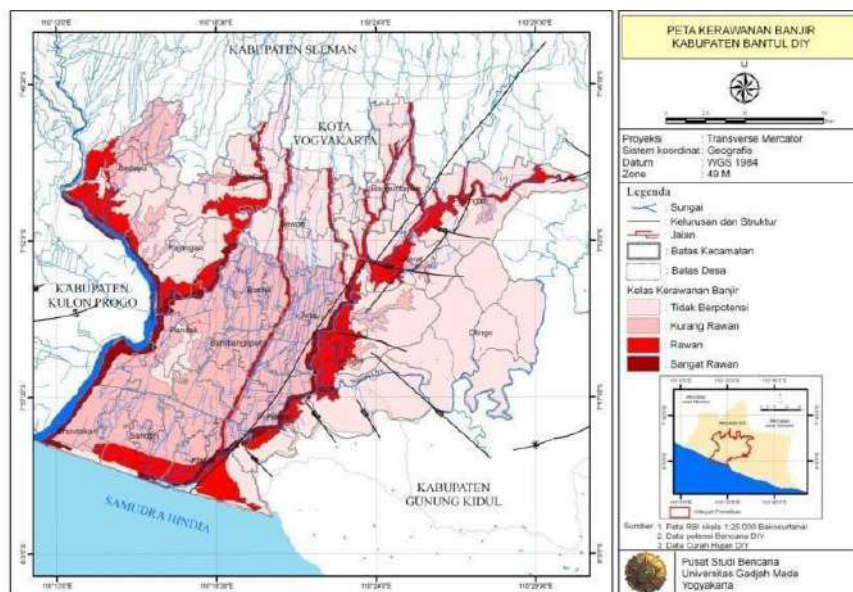
Gambar 2.11 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bantul

2. Kawasan rawan longsor meliputi wilayah Kapanewon Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, Pundong dan Pajangan.



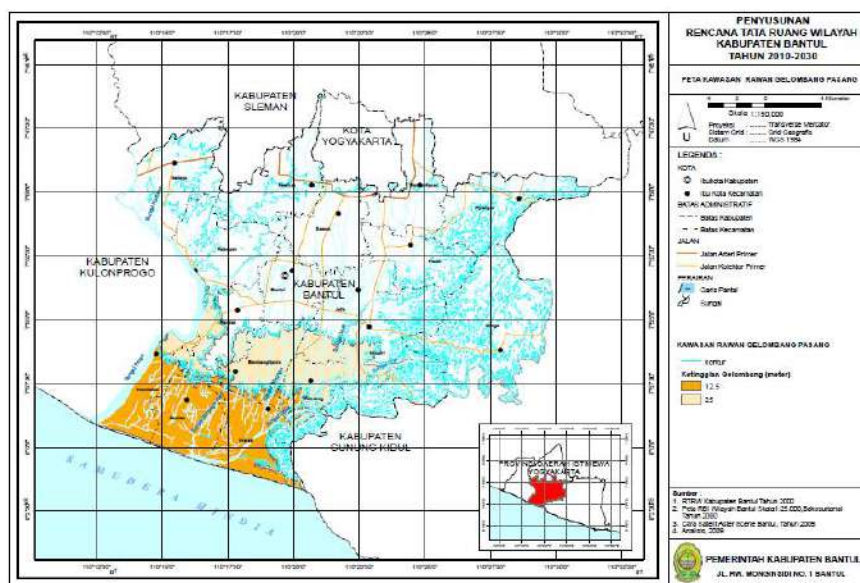
Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
Gambar 2.12 Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Bantul

3. Kawasan rawan banjir meliputi wilayah Kapanewon Srandakan, Pandak, Kretek, Sanden, Pundong, Jetis dan Pleret



Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
Gambar 2.13 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bantul

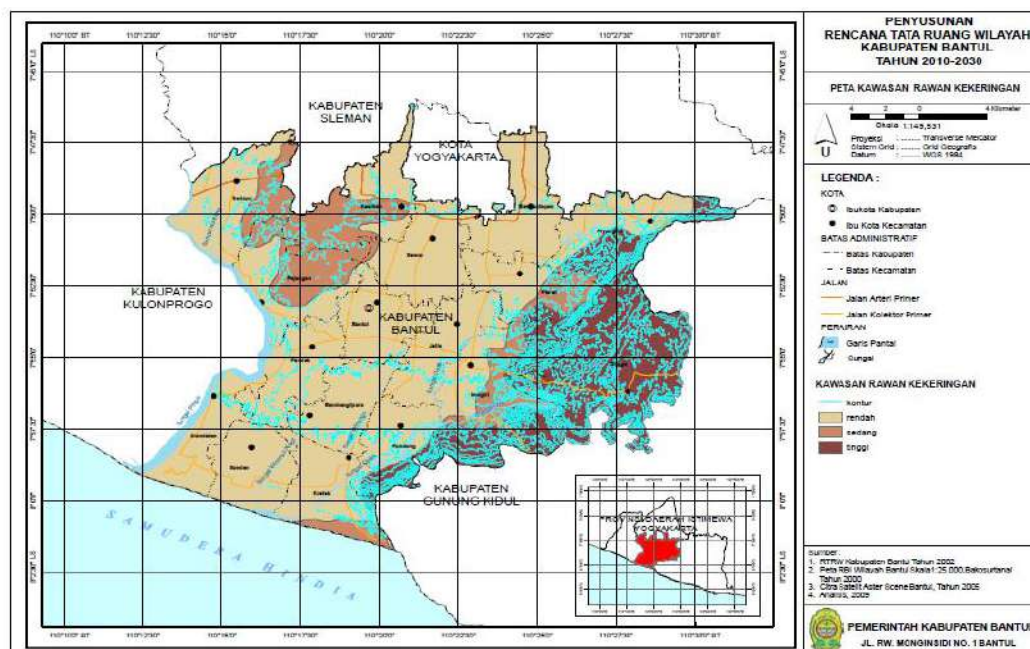
4. Kawasan rawan gelombang ekstrem dan abrasi meliputi Kapanewon Kretek, Srandakan, dan Sanden, sebagian Kapanewon Pandak, Pundong, Imogiri, Jetis, dan Bambanglipuro.



Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2.14 Peta Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Bantul

5. Kawasan rawan kekeringan meliputi Kapanewon Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek.



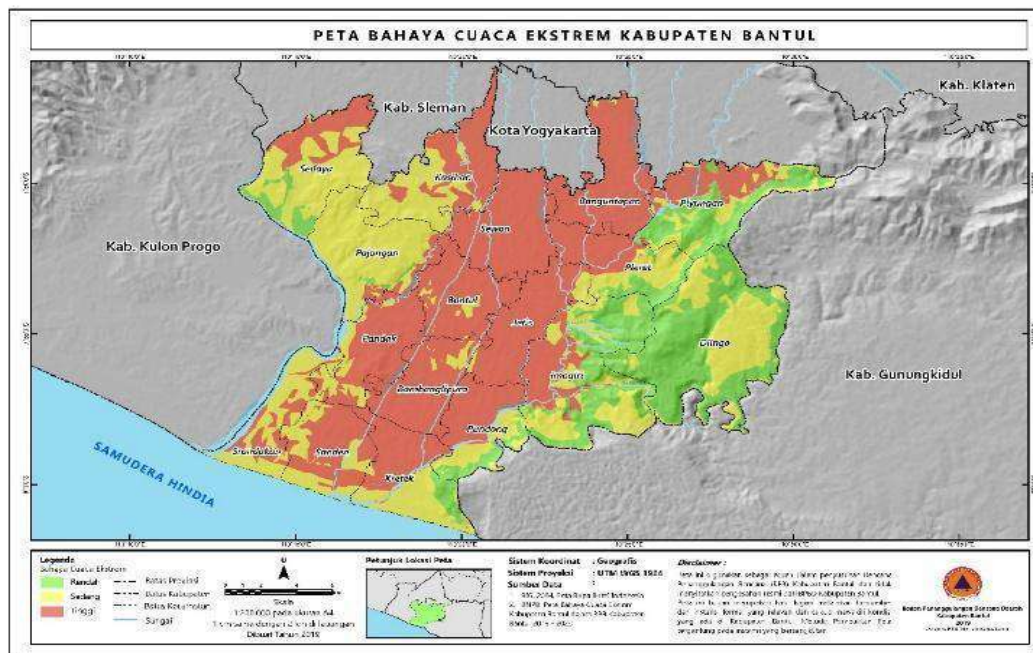
Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2.15 Peta Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Bantul

Selain kawasan rawan bencana tersebut di atas masih ada potensi bencana lain di Kabupaten Bantul, diantaranya bahaya cuaca ekstrem,

tsunami, kebakaran, dan epidemi wabah penyakit. Peta potensi bencana disajikan pada gambar berikut.

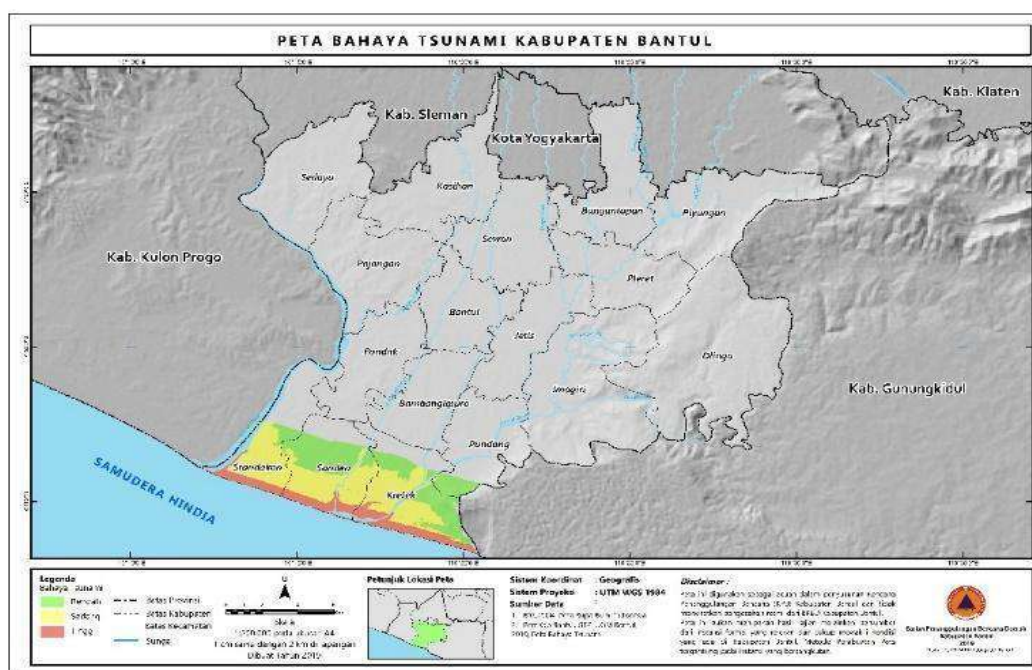
1. Potensi bahaya cuaca ekstrem meliputi Kapanewon Banguntapan, Sewon, Bantul, Jetis, Pandak, Bambanglipuro, Sanden, dan sebagian Kretek, Kasihan, Piyungan, Imogiri.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Gambar 2.16 Peta Bahaya Cuaca Ekstrem Kabupaten Bantul

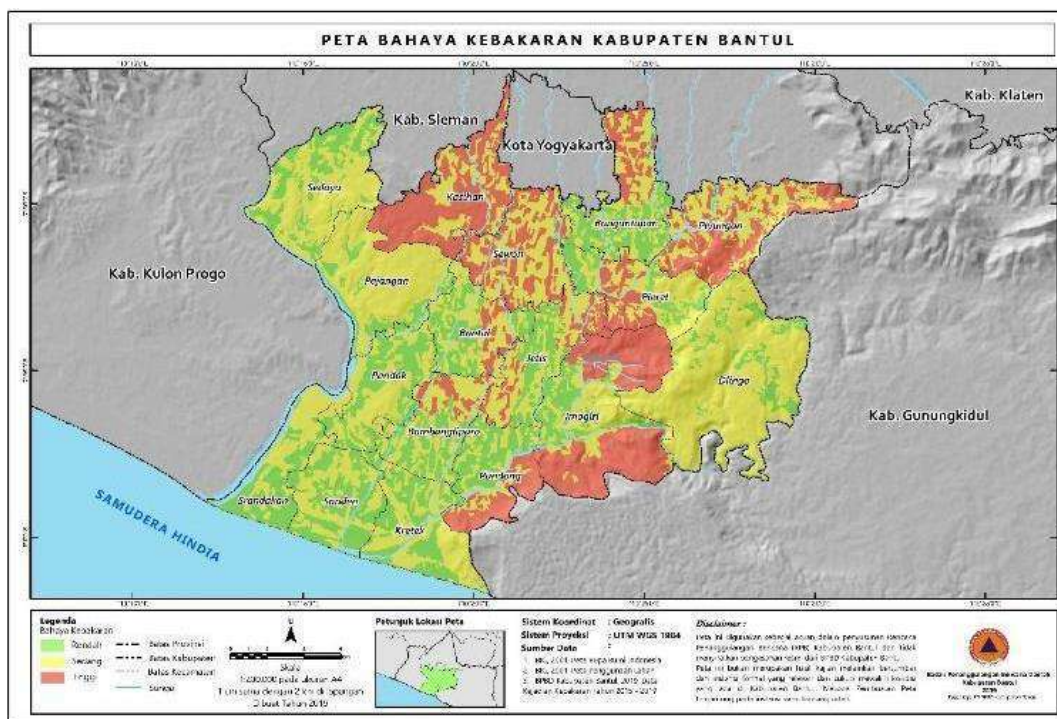
2. Potensi bahaya tsunami meliputi Kapanewon Srandakan, Sanden, dan Kretek.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Gambar 2.17 Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Bantul

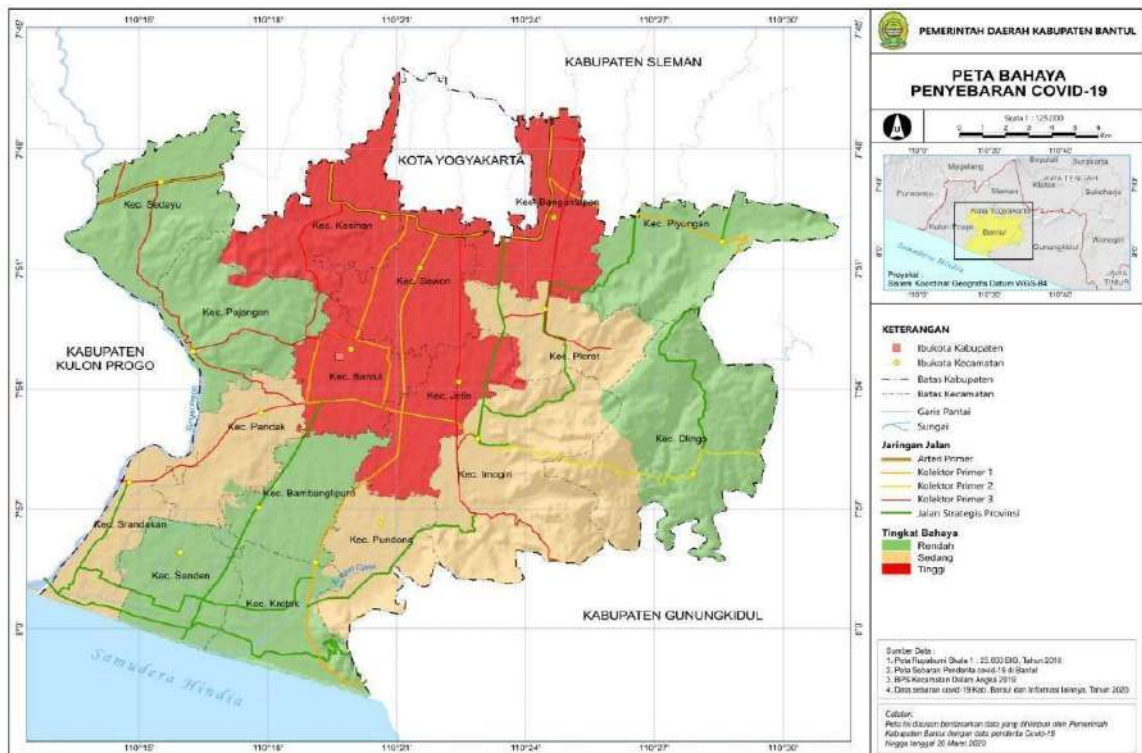
3. Potensi bahaya kebakaran meliputi Kapanewon Kasihan, Sewon, Piyungan, dan sebagian Pleret, dan Imogiri, Pundong, Bantul, Bambanglipuro.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Gambar 2.18 Peta Bahaya Kebakaran Kabupaten Bantul

II-32



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, 2020
Gambar 2.20 Peta Bahaya Penyebaran Covid-19 Kabupaten Bantul

Upaya pemerintah dalam mengendalikan covid berhasil, pembatasan aktivitas, sosialisasi pola hidup sehat, pemakaian masker dan vaksinasi mampu meredam gejala covid pada tahun 2022. Mempertimbangkan situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, pemulihan ekonomi yang berjalan cepat, dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada seluruh wilayah Indonesia maka keluarlah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi.

2.1.1.4 Demografi

Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari kebijakan kependudukan yang berdampak terhadap dinamika penduduk suatu daerah. Kebijakan kependudukan pada hakikatnya merupakan

pembangunan manusia secara menyeluruh. Secara umum kebijakan kependudukan didasarkan pada kondisi demografis daerah.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul cenderung meningkat namun pertumbuhannya mengalami perlambatan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon Tahun 2018 – 2022

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Srandakan	31.164	31.218	31.082	31.078	31.069
2	Sanden	31.967	31.972	31.810	31.786	31.844
3	Kretek	30.855	30.863	30.764	30.667	30.720
4	Pundong	35.668	35.908	35.666	35.811	35.896
5	Bambanglipuro	41.621	41.880	41.706	41.693	41.861
6	Pandak	51.781	52.013	52.036	51.892	52.218
7	Bantul	63.669	64.365	64.652	64.730	65.451
8	Jetis	58.206	58.549	58.631	58.709	59.199
9	Imogiri	63.179	63.542	63.835	63.820	64.281
10	Dlingo	39.092	39.537	39.998	40.002	40.257
11	Pleret	47.499	48.170	48.497	48.570	49.052
12	Piyungan	51.692	52.333	52.862	53.025	53.457
13	Banguntapan	110.126	111.955	113.298	113.684	115.127
14	Sewon	98.506	99.807	100.563	100.872	101.431
15	Kasihan	102.175	103.527	104.599	104.961	106.202
16	Pajangan	35.465	36.040	36.551	36.768	37.281
17	Sedayu	47.053	47.646	48.156	48.445	48.899
Jumlah		939.718	949.325	954.706	956.513	964.245
Pertumbuhan (%)		1,35	1,02	0,57	0,19	0,81

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2022 meningkat 0,81% dibandingkan tahun 2021. Kenaikan ini cukup signifikan dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di masa pandemi covid-19 tahun 2020 dan tahun 2021.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul menurut wilayah kapanewon, terbanyak ada di Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Sewon. Daerah tersebut merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di lokasi tersebut.

Dilihat dari kepadatan penduduk kapanewon, penyebaran penduduk belum merata, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10 Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Kapanewon	Luas (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Srandakan	18,32	1.701,09	1.704,04	1.696,62	1.696,40	1.695,91
2	Sanden	23,16	1.380,27	1.380,48	1.373,49	1.372,45	1.374,96
3	Kretek	26,77	1.152,60	1.152,90	1.149,20	1.145,57	1.147,55
4	Pundong	23,68	1.506,25	1.516,39	1.506,17	1.512,29	1.515,88
5	Bambanglipuro	22,70	1.833,52	1.844,93	1.837,27	1.836,70	1.844,10
6	Pandak	24,30	2.130,91	2.140,45	2.141,40	2.135,47	2.148,89
7	Bantul	21,95	2.900,64	2.932,35	2.945,42	2.948,97	2.981,82
8	Jetis	24,47	2.378,67	2.392,68	2.396,04	2.399,22	2.419,25
9	Imogiri	54,49	1.159,46	1.166,12	1.171,50	1.171,22	1.179,68
10	Dlingo	55,87	699,70	707,66	715,91	715,98	720,55
11	Pleret	22,97	2.067,87	2.097,08	2.111,32	2.114,50	2.135,48
12	Piyungan	32,54	1.588,57	1.608,27	1.624,52	1.629,53	1.642,81
13	Banguntapan	28,48	3.866,78	3.931,00	3.978,16	3.991,71	4.042,38
14	Sewon	27,16	3.626,88	3.674,78	3.702,61	3.713,99	3.734,57
15	Kasihan	32,38	3.155,50	3.197,25	3.230,36	3.241,54	3.279,86
16	Pajangan	33,25	1.066,62	1.083,91	1.099,28	1.105,80	1.121,23
17	Sedayu	34,36	1.369,41	1.386,67	1.401,51	1.409,92	1.423,14
Kepadatan Penduduk Geografis Kabupaten Bantul			1.854,04	1.872,99	1.883,61	1.887,17	1.902,43

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2023

Pada tahun 2022 kepadatan penduduk Kabupaten Bantul meningkat menjadi 1.902 jiwa untuk setiap km². Kepadatan penduduk tertinggi ada di 3 (tiga) wilayah kapanewon yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yaitu Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon dan Kapanewon Kasihan. Sementara itu kepadatan penduduk geografis terendah ada di wilayah dataran tinggi yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul yaitu Kapanewon Dlingo.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hampir di semua kapanewon mengalami peningkatan kepadatan penduduk. Hal ini perlu diwaspadai terkait kebijakan alih fungsi lahan pertanian, karena dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk akan menyebabkan masalah daya dukung lingkungan menjadi semakin terbatas, dan akan berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

Kebijakan kependudukan perlu mempertimbangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia, di mana ada perbedaan perlakuan terhadap kelompok usia produktif dan non produktif. Disamping itu kelompok usia dapat dibedakan menjadi kelompok pra kerja (usia muda atau 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan usia sekolah pendidikan dasar), kelompok kerja (usia produktif) dan kelompok pasca kerja (usia lanjut/pensiun).

Tabel 2.11 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022

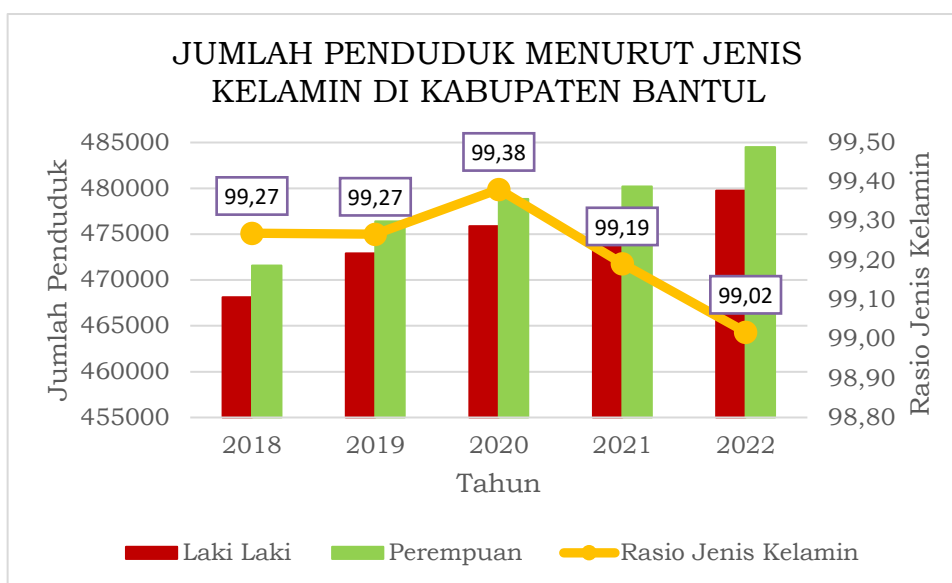
No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Proporsi 2022 (%)	
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	0 – 4	59.034	58.270	59.539	59.207	59.634	6,18	20,74
2	5 – 9	70.171	69.500	69.111	68.092	66.877	6,94	
3	10 – 14	69.332	71.130	72.451	73.244	73.462	7,62	
4	15 – 19	66.612	65.820	66.698	65.845	67.128	6,96	69,42
5	20 – 24	64.063	64.420	65.883	66.389	67.164	6,97	
6	25 – 29	65.950	66.659	67.959	68.474	68.236	7,08	
7	30 – 34	67.229	65.916	65.634	65.952	66.976	6,95	
8	35 – 39	75.432	75.583	75.793	73.867	70.939	7,36	
9	40 – 44	70.200	72.659	73.010	73.867	76.039	7,89	
10	45 – 49	68.737	67.358	68.073	69.495	69.154	7,17	
11	50 – 54	65.721	68.482	67.487	67.217	68.528	7,11	
12	55 – 59	59.134	59.016	59.606	60.798	61.455	6,37	
13	60 – 64	46.266	49.665	51.923	52.007	53.728	5,57	9,84
14	65 – 69	30.145	32.746	33.929	35.888	38.087	3,95	
15	70 – 74	21.193	21.437	21.111	21.771	23.429	2,43	
16	> 75	40.499	40.664	36.499	34.400	33.409	3,46	
JUMLAH		939.718	949.325	954.706	956.513	964.245	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2022 didominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,42%, sementara itu penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 20,74%, dan kelompok usia lanjut (di atas 64 tahun) sebesar 9,84%. Penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut disebut juga penduduk non produktif.

Menurut proyeksi penduduk Indonesia yang didasarkan pada survei penduduk antar sensus 2015, tahun 2020-2024 merupakan puncak bonus demografi/puncak keemasan (*the window of opportunity*). *The Window of*

Opportunity (jendela peluang) merupakan kondisi saat rasio ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai titik terendah¹. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menentukan kebijakan pembangunan manusia harus dapat menangkap peluang adanya bonus demografi khususnya kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2022

Gambar 2.21 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul 2018-2022

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan yang berperspektif *gender*. Penduduk laki-laki Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sebanyak 479.742 jiwa (49,75%) dan penduduk perempuan sebanyak 484.503 jiwa (50,25%). Informasi mengenai komposisi jenis kelamin penduduk di Kabupaten Bantul dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan sehingga kelompok penduduk laki – laki dan perempuan dapat memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan serta menerima manfaat dari pembangunan secara adil dan setara.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

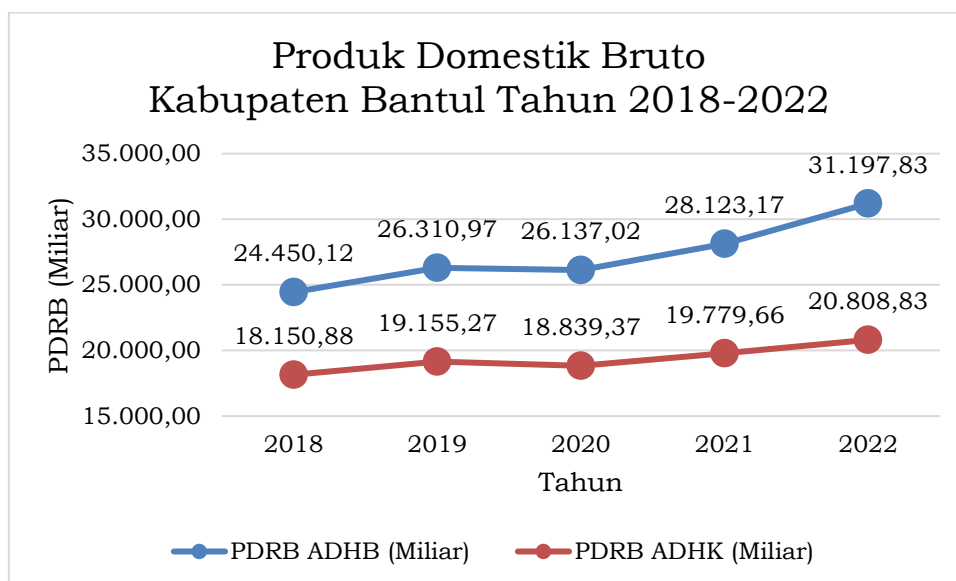
Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak

¹ Population Policy, Sonny Harry B Harmadi dan Riant Nugroho, 2020

dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pembangunan terhadap masyarakat pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

2.1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB pada dasarnya merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah tertentu dalam satu tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. PDRB selain menjadi bahan penyusunan perencanaan juga bermanfaat untuk bahan evaluasi dari hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Besaran PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.22 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) mempunyai *trend* yang sama, yaitu mengalami kenaikan berturut turut dalam kurun waktu 2016 – 2019. Namun pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan, hal ini karena dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi penurunan kontribusi beberapa sektor

lapangan usaha secara signifikan. Pada tahun 2022 PDRB ADHK maupun ADHB mengalami kenaikan dan merupakan PDRB tertinggi Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun. Kontribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

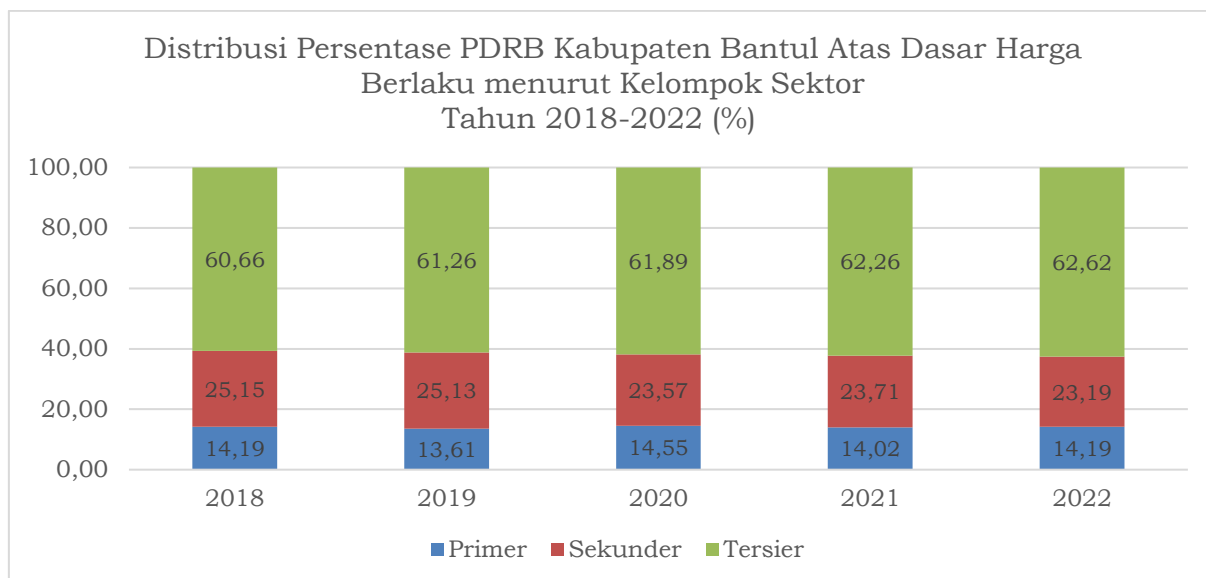
Tabel 2.12 Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,65	13,10	14,09	13,60	13,78
2	Pertambangan dan Penggalian	0,54	0,51	0,46	0,42	0,41
3	Industri Pengolahan	15,21	15,16	14,84	14,50	14,16
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
6	Konstruksi	9,72	9,75	8,50	9,00	8,82
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	8,69	8,64	8,47	8,18	8,29
8	Transportasi dan Pergudangan	4,72	4,85	4,46	4,44	4,89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,68	11,95	10,74	11,12	11,97
10	Informasi dan Komunikasi	7,32	7,26	8,73	9,66	9,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,83	2,95	2,88	2,88	3,01
12	Real Estate	6,56	6,71	6,91	6,57	6,30
13	Jasa Perusahaan	0,47	0,49	0,43	0,43	0,44
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	7,72	7,58	7,73	7,41	7,13
15	Jasa Pendidikan	6,83	6,93	7,40	7,32	6,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,81	1,85	2,29	2,28	2,23
17	Jasa-jasa Lainnya	2,04	2,05	1,86	1,97	2,13
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel di atas menjelaskan terdapat tiga lapangan usaha yang kontribusinya relatif besar dibanding dengan lapangan usaha yang lainnya. Ketiga lapangan usaha tersebut adalah pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum.

Berdasarkan data PDRB ADHB, distribusi persentase PDRB dikelompokkan dalam sektor tersier, sekunder dan primer.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul (2023), diolah.

Gambar 2.23 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor Tahun 2018-2022 (%)

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 pangsa sektor primer (pertanian dan pertambangan dan penggalian) cenderung meningkat dari 14,02% di tahun 2021 menjadi 14,19% di tahun 2022. Sebaliknya pada sektor sekunder (industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan konstruksi) mengalami penurunan dari 23,71% di tahun 2021 menjadi 23,19% di tahun 2022. Sektor tersier (kategori lainnya) secara konsisten mengalami *trend* kenaikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Sektor tersier ini memberikan kontribusi lebih dari 60% dari total PDRB Kabupaten Bantul.

a) **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan kapasitas produksi secara berkesinambungan. Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Bantul	5,47	5,53	-1,65	4,99	5,20
DIY	6,20	6,59	-2,67	5,53	5,15
Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,70	5,31

Sumber: BPS, 2023

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,65%. Penurunan tersebut disebabkan pandemic covid-19 yang terjadi sejak awal maret 2020. Perekonomian Bantul selama 2021 tumbuh sebesar 4,49 persen, hal ini karena 13 (tiga belas) lapangan usaha yang tumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya.

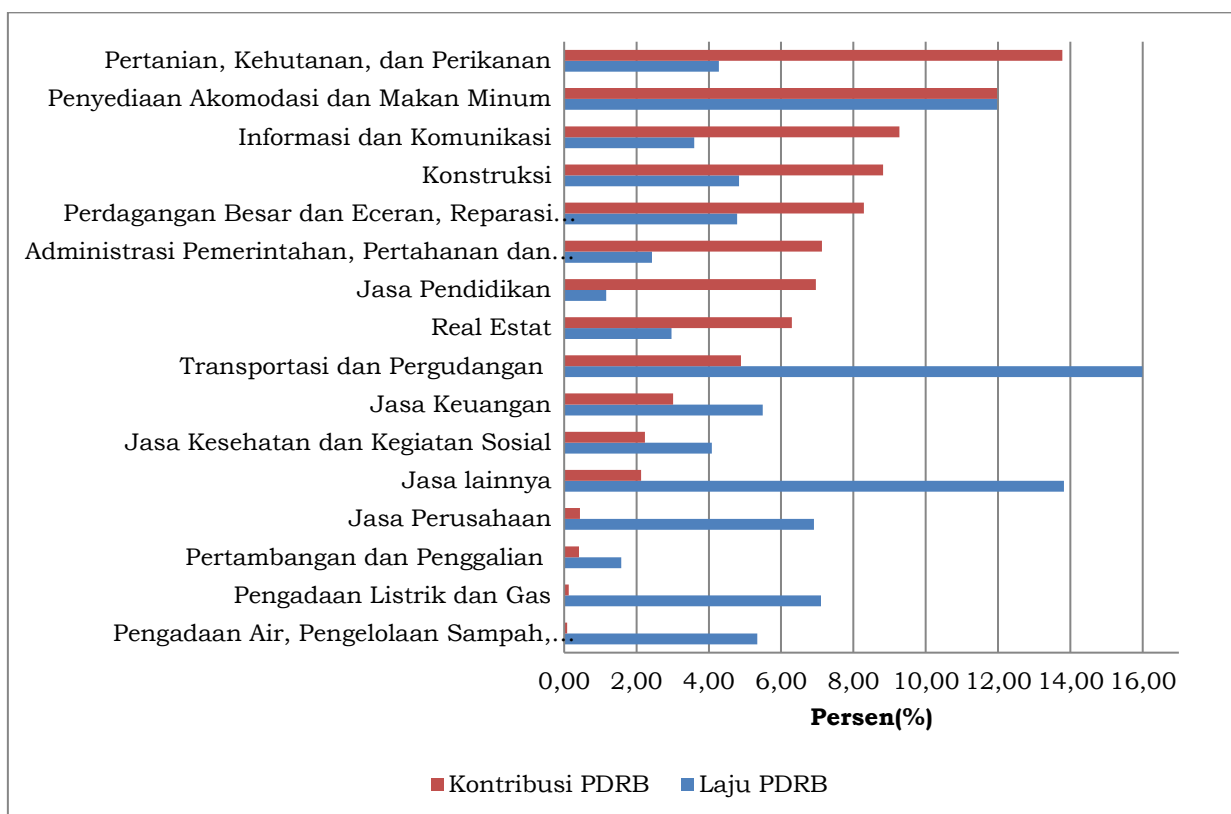
Pada tahun 2022, perekonomian Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional secara umum mulai mengalami perbaikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai LPE yang meningkat dua tahun berturut-turut. LPE Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 5,20 melebihi DIY 5,15 persen, namun masih di bawah Nasional sebesar 5,31 persen. Besarnya pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Tabel 2.14 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2018-2022

No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,00	0,13	4,80	1,60	4,28
2	Pertambangan dan Penggalian	1,57	-0,27	-11,32	-5,14	1,58
3	Industri Pengolahan	5,53	5,48	-4,71	0,82	3,09
4	Pengadaan Listrik, Gas	4,85	4,83	-1,77	2,48	7,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,80	8,62	0,61	6,62	5,34
6	Konstruksi	7,39	5,08	-13,78	10,80	4,84

No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	5,59	5,11	-4,20	1,23	4,78
8	Transportasi dan Pergudangan	5,51	6,45	-12,58	3,71	15,99
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,69	8,77	-11,55	7,04	11,97
10	Informasi dan Komunikasi	6,20	7,27	19,89	16,21	3,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,59	10,00	-2,41	2,03	5,49
12	Real Estate	5,41	6,51	0,23	0,27	2,97
13	Jasa Perusahaan	5,37	7,38	-14,40	6,69	6,91
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,44	3,21	-1,96	-0,42	2,43
15	Jasa Pendidikan	6,08	6,65	3,79	3,92	1,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,74	7,18	18,86	4,17	4,08
17	Jasa Lainnya	7,14	6,09	-11,21	11,95	13,82
PDRB		5,47	5,53	-1,65	4,99	5,20

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.24 Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2022

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, pada tahun 2022 seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan minimal 1%. Sektor Pertambangan dan Penggalan merupakan sektor dengan pertumbuhan terendah sebesar 1,58%. Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,99%. PDRB Kabupaten Bantul tahun 2022 didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 14,16%, pertanian sebesar 13,78%, dan penyediaan akomodasi sebesar 11,97%.

b) PDRB Perkapita

PDRB per kapita secara teoritis merupakan ketersediaan barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakat di daerah tersebut. Semakin besar nilai PDRB per kapita, semakin banyak pula ketersediaan barang dan jasa yang dapat mereka nikmati. Dengan demikian semakin besar PDRB per kapita, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Bantul.

Tabel 2.15 Perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan Tahun 2010	
		Nilai (000 Rp)	Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2018	24.287,59	18.030,22	4,27
2	2019	25.725,00	18.728,00	3,87
3	2020	26.556,00	19.141,00	2,20
4	2021	28.161,00	19.806,00	3,48
5	2022	30.792,00	20.538,00	3,70

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Nilai PDRB per kapita baik ADHK maupun ADHB Kabupaten Bantul sejak tahun 2018-2022 senantiasa mengalami kenaikan, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Bantul, meskipun pada tahun 2020 laju PDRB per kapita lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat serta

terganggunya distribusi barang dan jasa akibat pembatasan kegiatan masyarakat.

Terdapat kenaikan PDRB per kapita tahun 2020 meskipun PDRB mengalami penurunan, hal ini karena jumlah penduduk dari hasil SP2020 jumlahnya lebih kecil daripada data jumlah penduduk pada tahun sebelumnya (menggunakan data proyeksi). PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, tahun 2021 sebesar Rp28.161.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp30.792.000,00.

2.1.2.2 Laju Inflasi

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah keseimbangan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), biaya produksi, jumlah uang beredar, nilai tukar dan ekspektasi. Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Laju Inflasi Kabupaten Bantul	2,61	2,71	1,40	2,29	6,49
Laju Inflasi Kota Yogyakarta/DIY	2,66	2,77	1,40	2,29	6,49
Laju Inflasi Nasional	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Besaran inflasi Kabupaten Bantul dari tahun 2018 dan tahun 2019 lebih rendah dari pada inflasi DIY dan Nasional. Mulai tahun 2020 BPS Kabupaten Bantul sudah tidak menghitung laju inflasi di Kabupaten Bantul karena perubahan indeks harga di Kabupaten Bantul relatif mirip dengan perubahan indeks harga di Kota Yogyakarta. Inflasi tahun 2021 sebesar 2,29, penyebab inflasi ini karena komoditas pangan cabe rawit merah yang tidak stabil. Pada tahun 2022 Inflasi Kota Yogyakarta meningkat menjadi 6,49 melebihi laju inflasi Nasional. Laju inflasi pada tahun 2022 merupakan laju inflasi tertinggi selama lima tahun terakhir disebabkan oleh adanya kenaikan bensin dan bahan bakar rumah tangga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat. Komoditas lain yang dominan menyumbang inflasi di DIY dan Nasional adalah angkutan udara, beras dan telur ayam ras.

Dinamika naik turunnya inflasi Kabupaten Bantul sejalan dengan Inflasi Nasional. Kabupaten Bantul membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kegiatan koordinasi secara periodik dilaksanakan guna mengidentifikasi dan menentukan solusi dalam pengendalian inflasi. Bantul telah membuat Peraturan Bupati tentang peta jalan pengendalian inflasi daerah tahun 2022-2024 dimana terdapat 4 indikator yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

2.1.2.3 Rasio Gini

Rasio Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.

Menurut Harry T. Oshima, nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan, jika nilai kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Tabel 2.17 Rasio Gini Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Gini Kabupaten Bantul	0,448	0,422	0,418	0,441	0,410
Rasio Gini DIY	0,441	0,423	0,434	0,441	0,439
Rasio Gini Nasional	0,384	0,380	0,385	0,384	0,384

Sumber: BPS, 2023

Tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2018-2022 masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang” karena berkisar antara 0,400-0,500. Pada tahun 2022 Rasio Gini Kabupaten Bantul mengalami penurunan menjadi 0,410, angka ini merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan

Kabupaten Bantul yang menurun dari 14,04 persen di tahun 2021 menjadi 12,27 di tahun 2022.

Penurunan Rasio Gini merupakan salah satu indikator mulai menggeliatnya ekonomi pasca pandemi Covid-19. Rasio Gini Kabupaten Bantul Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan DIY. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya melalui fasilitasi kesempatan berusaha, padat karya dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.

2.1.2.4 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Tabel 2.18 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul	13,43	12,92	13,50	14,04	12,27
Tingkat Kemiskinan D.I Yogyakarta	12,13	11,70	12,28	12,80	11,34
Tingkat Kemiskinan Nasional	9,82	9,41	9,78	10,14	9,54

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Pada Tahun 2022 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 12,27% atau lebih rendah 1,77% dibandingkan tahun 2021. Tingkat kemiskinan di Bantul relatif lebih tinggi dibandingkan kemiskinan DIY dan Nasional.

Kemiskinan bukan hanya masalah jumlah jiwa atau proporsi penduduk miskin (P0) tetapi juga menyangkut kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur sejauh mana perbedaan antara rerata pengeluaran maskin dari garis kemiskinannya. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rerata pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinannya. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2.19 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan* (Rp/Kap/Bln)	Kenaikan Garis Kemiskinan (%)
2018	13,43	134.835	2,17	0,46	369.480	6,33
2019	12,92	131.151	1,87	0,43	381.538	3,26
2020	13,50	138.660	1,85	0,43	405.613	6,31
2021	14,04	146.980	2,24	0,54	418.265	3,12
2022	12,27	130.130	2,11	0,50	445.511	6,51

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan mengalami peningkatan karena adanya pandemi Covid-19. Jumlah penduduk miskin tahun 2022 berkurang sekitar 16 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun 2021. Indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan mengalami penurunan dan garis kemiskinan naik 6,51% menjadi Rp. 445.511.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengendalian harga tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul nomor 15 tahun 2022 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 yang mencakup 4 (empat) strategis pengendalian yaitu:

1. Keterjangkauan harga,
2. Ketersediaan pasokan,
3. Kelancaran distribusi,
4. Komunikasi efektif.

Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022

No	Kapanewon	2021	2022
1	Bambanglipuro	9.262	4.974
2	Banguntapan	7.981	6.566
3	Bantul	5.743	6.734
4	Dlingo	9.241	10.531
5	Imogiri	13.099	14.529
6	Jetis	8.274	9.053
7	Kasihan	9.820	9.021
8	Kretek	4.906	3.350
9	Pajangan	9.551	10.207
10	Pandak	13.198	8.167
11	Piyungan	7.530	4.980

No	Kapanewon	2021	2022
12	Pleret	8.672	8.814
13	Pundong	9.045	5.760
14	Sanden	6.698	4.959
15	Sedayu	6.650	7.903
16	Sewon	9.594	8.954
17	Srandakan	7.716	5.628
Total		146.980	130.130

Sumber: Dinas Sosial dan Bappeda Kabupaten Bantul, diolah 2023

Pada tahun 2021 kapanewon dengan kemiskinan tertinggi di Kabupaten Bantul adalah Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pandak dan Kapanewon Kasihan. Pada tahun 2022 kapanewon dengan kemiskinan tertinggi adalah Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Pajangan. Perubahan daerah kantong kemiskinan ini disebabkan oleh perbedaan *baseline* data, tahun 2021 menggunakan data DTKS sedangkan tahun 2022 menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tabel 2.21 Tingkat Kemiskinan Ekstrem di DIY 2021-2022

Kabupaten/ Kota	2021		2022	
	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribuan)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribuan)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem
Kulon Progo	15,18	3,44	14,78	3,31
Bantul	27,73	2,65	27,51	2,59
Gunungkidul	39,24	5,13	33,26	4,30
Sleman	19,41	1,54	18,16	1,42
Yogyakarta	2,34	0,53	3,01	0,67
DIY	103,91	2,63	96,73	2,41

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Pemerintah Pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada tahun 2024. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, kemiskinan ekstrem Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 2,59% atau sebanyak 27.510 orang.

2.1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak. Penghitungan IPM untuk dimensi pengetahuan menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dimensi standar hidup layak menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, sedangkan untuk menghitung dimensi kesehatan menggunakan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Metode agregasinya disempurnakan menjadi rata-rata geometrik. Ketidakterdediaan data PNB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, digunakan proksi pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Tabel 2.22 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
IPM Kabupaten Bantul	79,45	80,01	80,01	80,28	80,69
IPM D.I Yogyakarta	79,53	79,99	79,97	80,22	80,64
IPM Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mulai dari 79,45 pada tahun 2018 hingga mencapai 80,69 pada tahun 2022 dengan level capaiannya menjadi sangat tinggi ($IPM \geq 80$).

Capaian IPM Kabupaten Bantul konsisten naik dari tahun ke tahun dan lebih tinggi dibandingkan DIY dan nasional. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi semakin dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

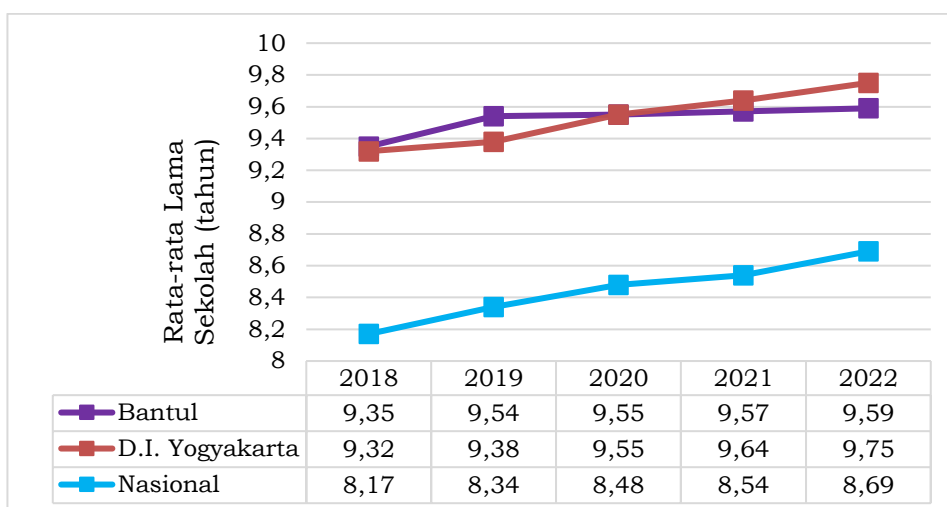
IPM Kabupaten Bantul masih dapat ditingkatkan antara lain dengan peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan yaitu lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia, penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas BAB penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal

penduduk; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk melalui upaya semua anak usia sekolah (SD-SLTA) bisa bersekolah dan tidak putus sekolah; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH).

2.1.2.6 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka RLS di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan, dari 9,35 tahun pada tahun 2018 menjadi 9,59 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bantul menamatkan sekolah setingkat Sekolah Menengah Pertama.

Upaya peningkatan RLS di Kabupaten Bantul perlu dilakukan dengan menekan angka putus sekolah melalui kebijakan Bantuan Operasional Sekolah dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bidang pendidikan. Angka RLS di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.25 Angka Rata-rata Lama Sekolah

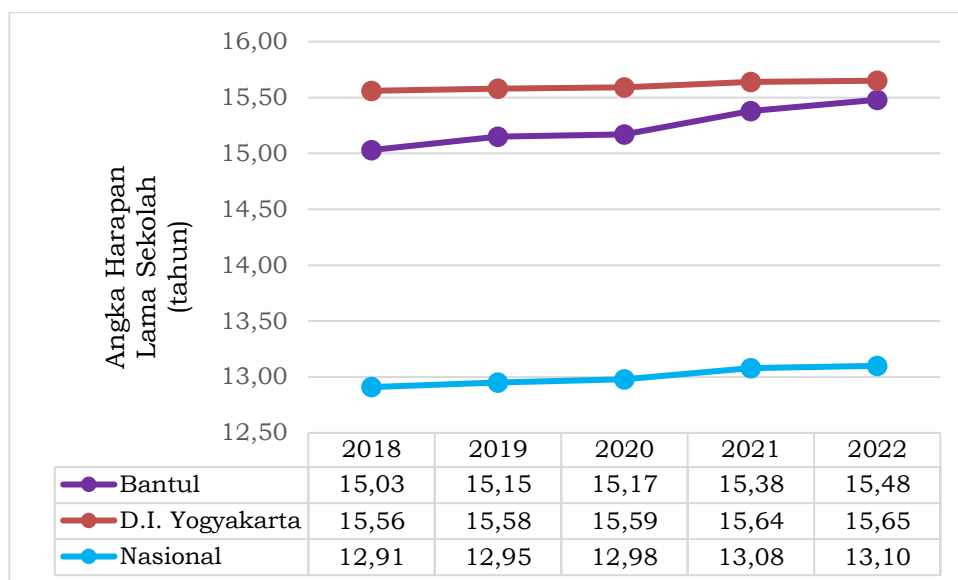
Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022

Angka RLS di Kabupaten Bantul lebih tinggi satu tahun daripada angka RLS Nasional. Tingginya angka RLS di Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana berupa ketersediaan lembaga penyelenggara pendidikan baik formal dan non formal, negeri maupun swasta di Kabupaten Bantul.

2.1.2.7 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. AHLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar di bawah menunjukkan bahwa AHLS Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sebesar 15,48 tahun. Hal ini berarti lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 15,48 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan perguruan tinggi jenjang Diploma III.



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

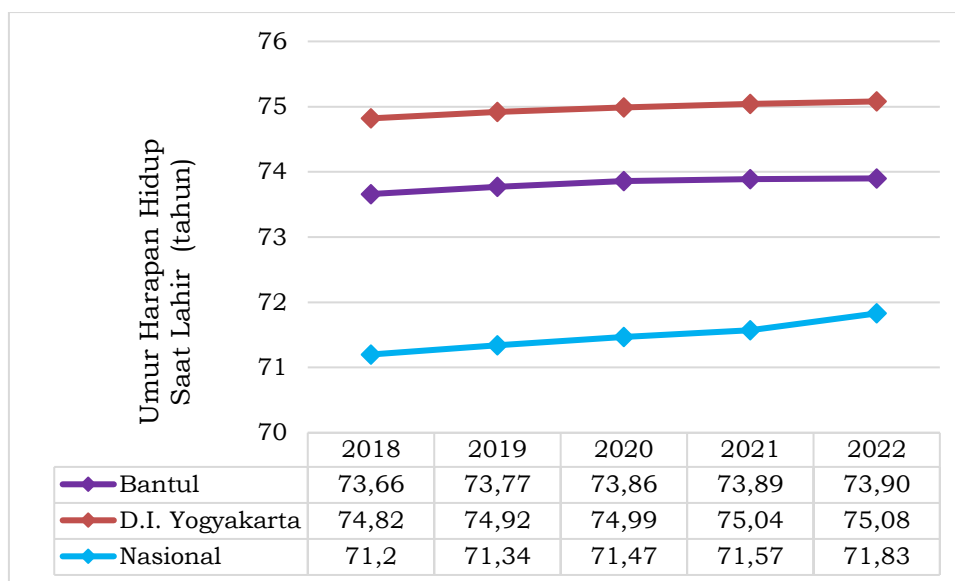
Gambar 2.26 Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022

AHLS Kabupaten Bantul secara konsisten naik dari tahun ke tahun dan melebihi AHLS Nasional, meskipun masih dibawah AHLS DIY.

2.1.2.8 Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. UHH pada tahun 2018 sebesar 73,66 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 73,90. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor antara lain Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), prevalensi balita gizi buruk, prevalensi HIV /AIDS, dan angka kesakitan (Incidence Rate/ IR) DBD.

Penyakit Tidak Menular (PTM) juga memengaruhi pencapaian indikator UHH. Kelompok PTM, seperti stroke, Diabetes Mellitus, kanker, hipertensi merupakan kelompok penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan PTM jelas berdampak negatif pada produktivitas masyarakat. Di sisi lain, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan. Kondisi morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat disertai dengan masih banyaknya penyakit menular di masyarakat, akan menjadikan beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan. Untuk itu penanganan penyakit menular dan tidak menular harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.27 Umur Harapan Hidup
Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022

UHH Kabupaten Bantul secara konsisten naik dari tahun ke tahun dan melebihi UHH Nasional meskipun tidak setinggi UHH DIY.

2.1.2.9 Tingkat Pengangguran

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

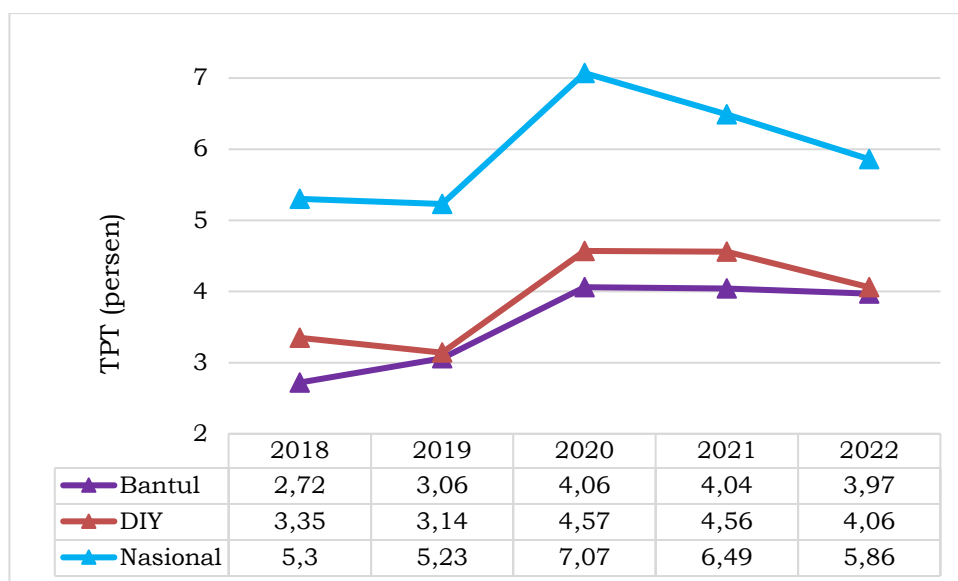
Jumlah pengangguran Kabupaten Bantul fluktuatif. Pada tahun 2020 jumlah pengangguran meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019 karena pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 jumlah pengangguran menurun tetapi pada tahun 2022 meningkat lagi.

Tabel 2.23 Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Bantul	16.188	18.080	24.783	24.075	24.875
DIY	75.032	71.482	101.846	106.432	94.945
Nasional	7.073.390	7.104.420	9.767.750	9.102.050	8.425.930

Sumber: BPS, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja terdapat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022

Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,04% di tahun 2021 menjadi 3,97% di tahun 2022. Setiap tahun TPT Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan DIY dan Nasional. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1) Kondisi Pendidikan PAUD

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA, sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi Kelompok Bermain (KB), TPA, dan satuan PAUD sejenis.

Tabel 2.24 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Guru			Rasio Murid/Guru
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%	
2018								
1	TK/RA	2	530	27.364	2.295	1.157	50,41	11,92
2	KB	0	487	10.720	1.379	0	0	7,77
3	TPA	0	52	1.112	180	0	0	6,18
4	SPS	0	248	4.486	688	0	0	6,52
Jumlah		2	1.317	43.682	4.542	1.157	25,47	9,62
2019								
1	TK/RA	2	544	27.360	2.357	1.258	53,37	11,61
2	KB	0	490	10.286	1.373	0	0	7,49
3	TPA	0	57	1.125	189	0	0	5,95
4	SPS	0	237	4.283	653	0	0	6,58
Jumlah		2	1.328	43.054	4.572	1.258	27,51	9,42
2020								
1	TK/RA	7	553	26.188	2.886	1.674	58	9,07
2	KB	0	492	8.263	1605	0	0	5,15
3	TPA	0	56	811	214	0	0	3,79
4	SPS	0	237	3.604	778	0	0	4,63
Jumlah		7	1.338	38.866	5.483	1.674	30,53	7,09
2021								
1	TK/RA	7	553	22.810	2.844	1.627	57,35	8,02
2	KB	0	489	7.864	1.031	0	0	7,63
3	TPA	0	55	670	154	0	0	4,35
4	SPS	0	235	3.109	493	0	0	6,31
Jumlah		7	1.332	34.453	4.522	1.627	35,98	7,62
2022								
1	TK/RA	7	553	26.169	2.816	1.649	58,56	9,29
2	KB	0	495	4.826	1.047	0	0	4,61
3	TPA	0	54	848	149	0	0	5,69
4	SPS	0	232	3.485	525	0	0	6,64

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Guru			Rasio Murid/Guru
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%	
	Jumlah	7	1.334	35.328	4.537	1.649	36,35	7,79

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 lembaga PAUD yang dikelola swasta di Kabupaten Bantul sebanyak 1.334 lembaga sehingga dapat membantu dalam peningkatan Pendidikan PAUD di Kabupaten Bantul. Secara umum rasio murid per guru pada tahun 2018-2022 di bawah angka 10, artinya seorang guru membimbing kurang dari 10 siswa PAUD.

2) APK dan APM Pendidikan PAUD

Indikator untuk mengukur tingkat partisipasi Pendidikan PAUD adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK PAUD menunjukkan proporsi anak yang terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini terhadap penduduk pada kelompok usia 4-6 tahun. Adapun APM PAUD menunjukkan Proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang terdaftar dalam PAUD terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Selain itu, APM PAUD juga menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia PAUD. Nilai APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul dari tahun 2018-2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.25 Perkembangan APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100,70	106,24	97,70	100,17	103,86
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	86,54	83,84	81,20	85,21	87,43

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2023

Nilai APK yang semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk secara umum semakin meningkat, hal ini berarti kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan yang dimulai pada usia dini semakin meningkat pula, sebagaimana diketahui bahwa usia PAUD merupakan masa emas perkembangan otak dan kecerdasan anak. Turunnya nilai APK pada tahun 2020 merupakan dampak pandemi Covid-19 dimana terjadi perubahan pola pembelajaran yang menuntut penggunaan teknologi informasi/internet yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh siswa PAUD secara optimal. Fasilitas pendidikan jenjang PAUD yang tersedia pada masa pandemi dan

PPKM mikro atau PPKM darurat membatasi ruang gerak masyarakat termasuk pembelajaran tatap muka.

Sejak tahun 2013, Pemerintah melalui Peraturan Presiden No.60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menetapkan strategi Nasional pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI). PAUD HI merupakan upaya pengembangan anak usia dini yang kompleks dan menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

b. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1) Kondisi Pendidikan dasar

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan program pemerintah yang menjamin penduduk usia 7-15 tahun untuk mengenyam pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun ditentukan oleh banyak faktor diantaranya kualitas tenaga pendidik, lembaga pendidikan dan partisipasi peserta didik. Kondisi pendidikan dasar sembilan tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
2018							
1	SD	281	82	76.898	5.078	2507	49,37
2	MI	3	29	4.065	319	136	42,63
3	SMP	47	43	30.909	2.385	1.612	67,59
4	MTs	9	18	8.622	775	436	56,26
2019							
1	SD	281	82	75.099	5.007	2.507	50,07
2	MI	3	29	6.195	450	136	30,22
3	SMP	47	45	31.552	2.399	1.612	67,19
4	MTs	9	15	8026	693	436	62,91
2020							
1	SD	281	83	73.523	5.033	2552	50,71
2	MI	3	30	6.584	492	215	43,7
3	SMP	47	46	31.618	2.268	1.461	64,42
4	MTs	9	16	8.273	735	368	50,07
2021							
1	SD	281	84	70.941	5.125	2.374	46,32

No	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
2	MI	3	30	6.584	496	219	44,15
3	SMP	47	48	31.933	2.323	1.355	58,32
4	MTs	9	16	8.469	706	346	49,01
2022							
1	SD	281	85	70.428	5.214	2.454	47,07
2	MI	3	38	6.808	570	197	34,56
3	SMP	47	48	31.618	2.357	1.269	53,84
4	MTs	9	19	8.983	781	387	49,55

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase pendidik bersertifikasi pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan karena pemerintah pusat mulai tahun 2021 membatasi kuota dan menaikkan *passing grade* pemberkasan sertifikasi pendidik. Penurunan jumlah pendidik yang bersertifikasi juga disebabkan oleh pembatasan peserta penjarangan Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPG) serta masa pensiun pendidik.

Sementara itu rasio murid dan guru pada jenjang Sekolah Dasar dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.27 Rasio Murid dan Guru jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	5.397	5.457	5.525	5.621	5.784
1.2	Jumlah Murid	80.943	81.294	80.107	77.525	77.236
1.3	Rasio murid per guru	15,00	14,90	14,50	13,79	13,35
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	3.160	3.092	3.003	3.029	3.138
2.2	Jumlah Murid	39.531	39.578	39.891	40.402	40.601
2.3	Rasio murid per guru	12,51	12,80	13,28	13,33	12,94

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 rasio perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru jenjang SD/MI adalah 13,35, artinya satu guru melayani 13 murid, menurun dibandingkan tahun 2021. Sementara itu rasio perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid jenjang SMP/MTS adalah 12,94, artinya satu guru melayani 12 sampai 13 murid, mengalami penurunan jika

dibandingkan tahun 2021. Membaiknya rasio murid-guru dalam satu sekolah meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar.

Tabel 2.28 Ketersediaan Sekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	395	395	397	398	407
1.2	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	85.489	86.394	86.597	85.631	84.291
1.3	Rasio	46,20	45,72	45,84	46,48	48,28
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	117	116	118	120	123
2.2	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	39.963	40.424	41.694	43.624	44.732
2.3	Rasio	29,28	28,70	28,30	27,51	27,49

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2023

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 setiap 10.000 penduduk usia 7 – 12 tahun tersedia 48 fasilitas pendidikan sekolah dasar, artinya tiap satu fasilitas pendidikan sekolah dasar dapat menampung 207 siswa. Sementara itu untuk setiap 10.000 penduduk usia 13 – 15 tahun tersedia 28 fasilitas pendidikan menengah pertama, artinya tiap satu fasilitas pendidikan SMP menampung 363 siswa.

Ketersediaan sekolah di wilayah Kabupaten Bantul sesuai dengan data di atas sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

2) APK, APM dan APS Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

Tabel 2.29 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angka Partisipasi Kasar					
	APK SD/MI	98,45	95,26	101,78	99,38	92,95
	APK SMP/MTs	97,83	101,38	102,86	104,45	92,01
2.	Angka Partisipasi Murni					
	APM SD/MI	89,55	85,86	92,96	92,08	85,94
	APM SMP/MTs	77,33	76,8	79,01	80,88	72,62

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2022

Dari tabel diketahui bahwa realisasi APK SD/MI dan APK SMP/MTs pada tahun 2022 merupakan capaian terendah dalam kurun waktu lima tahun, begitu juga yang terjadi pada APM SMP/MTs. Sementara itu APM SD/MI cenderung fluktuatif.

Penurunan APK/APM jenjang SD/MI disebabkan adanya penduduk usia sekolah dasar yang sudah masuk sekolah di jenjang berikutnya dan penduduk usia sekolah dasar namun masih tinggal di jenjang sebelumnya (sebesar 8.741 siswa atau 10,37%). Sementara itu penurunan APK/APM jenjang SMP/MTS disebabkan karena adanya penduduk usia 13-15 yang sudah masuk sekolah di jenjang berikutnya dan masih tinggal di jenjang sebelumnya sebesar (10.068 siswa atau 22,51%).

Tabel 2.30 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bantul Tahun 2018- 2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun	80.826	80.902	82.166	81.865	87.090
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	85.489	86.394	86.597	85.631	84.291
1.3	APS SD/MI	94,55	93,64	94,88	95,60	103,32
2	SMP/Mts					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun	37.538	39.047	41.006	41.888	51.226
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	39.963	40.424	41.694	43.624	44.732
2.3	APS SMP/MTs	93,93	96,59	98,35	96,02	114,52

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 partisipasi sekolah di Kabupaten Bantul secara angka mengalami kenaikan pada jenjang Sekolah Dasar dan kenaikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Akses dan pelayanan mutu Pendidikan menjadi

faktor utama dalam capaian Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bantul. Dengan adanya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah yang naik secara signifikan perlu adanya regulasi dan pemahaman kepada orangtua murid untuk menyekolahkan anaknya sesuai dengan kelompok usia masing.

3) Tingkat Kelulusan dan Putus Sekolah Jenjang SD dan SMP

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada lima tahun terakhir hingga tahun 2021 mencapai 100%.

Tabel 2.31 Perkembangan Tingkat Kelulusan Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Persentase Kelulusan	2018	2019	2020	2021	2022
SD / MI	100	100	100	100	100
SMP / MTs	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2023

Dalam kaitannya dengan angka putus sekolah, segala upaya telah dilakukan untuk meniadakan anak putus sekolah. Angka putus sekolah pada jenjang SD/MI tahun 2017-2022 menunjukkan kenaikan begitu pula pada jenjang SMP/MTs.

Tabel 2.32 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	0,01	0,004	0,004	0,003	0,03
SMP/MTs	0,02	0,01	0,004	0,004	0,04

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2023

Pada jenjang SMP/Mts angka putus sekolah pada tahun 2022 kenaikan dengan tahun 2021 sebesar 0,04 %, sedangkan pada jenjang SD/MI mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar menjadi 0,03 % pada tahun 2022. Hal ini terjadi bukan karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya bantuan operasional Pendidikan, akan tetapi lebih pada rendahnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan, motivasi belajar, dan dukungan keluarga.

c. Kondisi Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan program pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melengkapi pendidikan formal. Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.33 Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul
 Tahun 2018-2022

No	Nama Lembaga dan Keterangan	Jumlah Perkembangan Per Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)					
	- Jumlah Lembaga	1	1	1	1	1
	- Jumlah Warga Belajar	170	317	379	404	374
	- Jumlah Tutor	36	36	35	31	13
2	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)					
	- Jumlah Lembaga	31	31	26	27	27
	- Jumlah Warga Belajar	2.570	3.115	3.009	2.898	3.267
	- Jumlah Tutor	135	226	404	393	184
3	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)					
	- Jumlah Lembaga	44	34	42	42	42
	- Jumlah Warga Belajar	2.272	2.296	2.296	1.886	2.059
	- Jumlah Tutor	300	315	264	172	264
4	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)					
	- Jumlah Lembaga	53	n/a	66	66	66
	- Jumlah Warga Belajar	0	n/a	n/a	n/a	n/a
	- Jumlah Tutor	0	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Rumah Pintar (Rumpin)					
	- Jumlah Lembaga	2	n/a	0	0	0
	- Jumlah Warga Belajar	12	n/a	0	0	0
	- Jumlah Tutor	6	n/a	0	0	0
6	Homeschooling					
	- Jumlah Lembaga	2	n/a	0	0	0
	- Jumlah Warga Belajar	25	n/a	0	0	0
	- Jumlah Tutor	10	n/a	0	0	0

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2023

Dari tabel tersebut diketahui pada tahun 2019-2022 jumlah data rumah pintar dan *homeschooling* nol karena lembaga tersebut tidak mengajukan izin dan masyarakat banyak memilih ke Program Pendidikan Kesetaraan.

Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang belum mampu menamatkan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dilakukan melalui program pendidikan kesetaraan yaitu Kelompok Belajar (Kejar) paket. Kejar paket A setara dengan SD, Kejar paket B setara dengan SMP, dan Kejar paket C setara dengan SMA.

Tabel 2.34 Kondisi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul
 Tahun 2018-2022

Kelompok Belajar	Laki-laki	Perempuan	Total	Peserta UN	Lulus	Belum Lulus	% Kelulusan
2018							
Paket A	178	377	555	175	158	17	90,29
Paket B	203	372	575	367	272	95	74,11
Paket C	679	761	1440	680	557	123	81,91
2019							
Paket A	178	377	555	245	209	36	85,31
Paket B	203	372	575	400	301	99	75,25
Paket C	679	761	1440	1.084	859	225	79,24
2020							
Paket A	563	469	1.032	182	175	7	96,15
Paket B	466	203	669	368	356	12	96,74
Paket C	998	458	1.456	610	573	37	93,93
2021							
Paket A	548	430	978	221	215	6	97,29
Paket B	513	311	824	305	283	22	92,79
Paket C	984	516	1.500	583	548	35	94,00
2022							
Paket A	599	492	1.091	192	192	0	100,00
Paket B	305	261	566	296	285	11	96,28
Paket C	717	401	1.118	571	519	52	90,89

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2023

Hasil Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) baik paket B dan C serta ujian sekolah paket A penentuan kelulusan dilaksanakan oleh lembaga masing-masing.

d. Capaian SPM Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan Pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang pendidikan.

Capaian SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 dan 2021 telah memenuhi 100% yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2021

No	Bidang Urusan Pendidikan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2020			2021		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	PAUD	Pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 – 6 tahun dalam PAUD yang mendapat layanan	25.029	25.029	100	24.933	24.933	100
2	SD	Pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 – 12 tahun dalam pendidikan dasar (SD/MI) yang mendapat layanan	82.166	82.166	100	80.963	80.963	100
3	SMP/MTs	Pendidikan dasar	Jumlah anak usia 12 – 15 tahun dalam pendidikan dasar (SMP/MTs) yang mendapat layanan	41.006	41.006	100	38.895	38.895	100
4	Pendidikan Kesenjangan	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.046	2.046	100	2.021	2.021	100

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2023

Jenis pelayanan dan indikator SPM bidang Pendidikan pada tahun 2022 mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Capaian SPM bidang Pendidikan Kabupaten Bantul tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.36 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Pendidikan	Pendidikan anak usia dini	Warga Negara yang usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	24.933	24.933	100
2		Pendidikan dasar	Warga Negara yang usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	110.859	110.859	100
3		Pendidikan Kesetaraan	Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	2.021	2.021	100

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2023

2.1.3.1.2 Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.37 Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul	8,27	8,41	6,93	5,40	8,30
Angka Kematian Bayi DIY	7,00	6,70	7,90	7,00	3,36
Angka Kematian Bayi Nasional	21,86	21,12	*	*	*

Keterangan:

*: data belum tersedia

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, 2020 & BPS, 2023

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas bahwa capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2022 tercatat 8,30 per 1000 kelahiran hidup (90 kematian) terjadi kenaikan dibanding tahun 2021 sebesar 5,40 per 1.000 kelahiran hidup (63 kematian).

Apabila dibandingkan dengan AKB di DIY, AKB di Bantul pada tahun 2022 jauh lebih tinggi. Hal ini kemungkinan disebabkan kenaikan Angka Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Pada Tahun 2022 KTD di Bantul sebanyak 224 kasus meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya 167 kasus. Penyebab kematian bayi pada tiap tahunnya beragam, secara lengkap data penyebab kematian bayi di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.38 Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Sebab Kematian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bayi berat lahir rendah	31	28	16	16	13
2	Asfiksia	32	27	16	12	23
3	Kelainan bawaan	19	20	26	19	19
4	Lain2 (Aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya)	25	35	17	16	33
J u m l a h		107	109	75	63	90

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

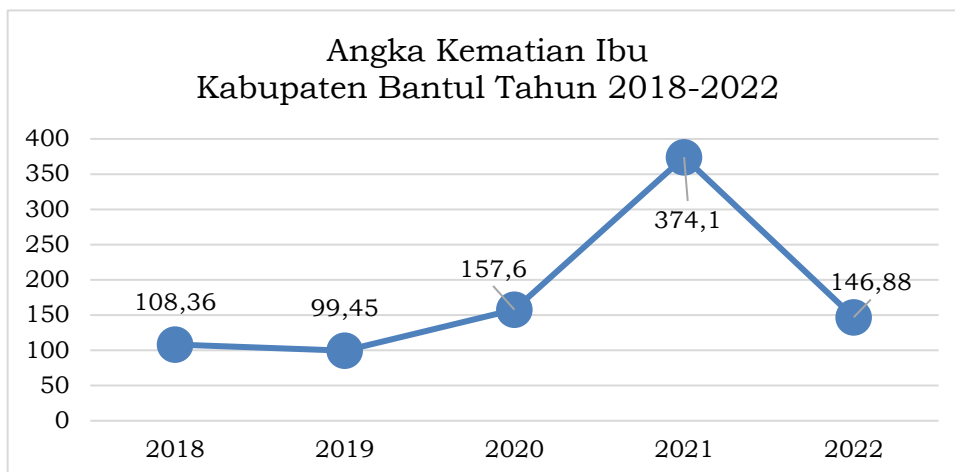
Pada tahun 2022 faktor penyebab kematian bayi terbanyak disebabkan karena aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya dengan jumlah 33 kasus atau 37%. Selanjutnya, faktor kedua terbanyak penyebab kematian bayi di tahun 2022 yaitu disebabkan asfiksia dengan jumlah 23 kasus atau 26%. Kemudian, faktor berikutnya penyebab kematian bayi adalah adanya kelainan bawaan sebesar 21% atau 19 kasus dan bayi berat lahir rendah sebesar 14% atau 13 kasus.

Hal-hal yang dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain meningkatkan peran serta masyarakat melalui program dan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan meningkatkan

kuantitas dan kualitas sumberdaya di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pencegahan KTD saat ini dilakukan antara lain dengan promosi Kesehatan reproduksi pada remaja di sekolah.

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari jumlah kematian ibu maternal (hamil, melahirkan, dan nifas atau selama 42 hari setelah persalinan), bukan karena sebab kecelakaan ataupun penyakit lainnya dibagi jumlah kelahiran hidup kali 100.000. Tren kematian ibu di kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.29 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

AKI pada tahun 2022 mencapai 146,88 per 100.000 kelahiran hidup (16 kasus kematian ibu dari 10.893 kelahiran hidup) menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 374,10 per 100.000 kelahiran hidup (44 kasus kematian ibu dari 11.763 kelahiran hidup). AKI di kabupaten Bantul dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.39 Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul	108,36	99,45	157,6	374,10	146,88
Angka Kematian Ibu DIY	84,00	84,80	122,00	337,07	119,30
Angka Kematian Ibu Nasional	111,50	119,80	64,00	305,00	*

Keterangan:

*: data belum tersedia

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, 2020 dan Dinas Kesehatan, 2023.

Sejak tahun 2018 AKI di Kabupaten Bantul lebih tinggi dibandingkan DIY. Secara rinci penyebab kematian ibu dapat dilihat pada tabel bawah ini.

Tabel 2.40 Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Penyebab Kematian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perdarahan	5	4	1	5	4
2	PER/PEB/ Eklamsi	2	4	5	2	2
3	Emboli air ketuban	0	0	0	0	0
4	Infeksi	0	0	3	0	6
5	Lain2/ Penyakit penyerta	7	2	0	4	1
6	Penyakit Jantung	0	2	5	3	2
7	<i>Psikosis post partum dengan acute coronary syndrome</i>	0	0	0	0	0
8	Ileus paralitik	0	1	0	0	0
9	Kanker	0	0	2	0	0
10	Syok septic/ Hypovolemik	0	0	2	2	0
11	Covid-19	0	0	2	28	0
J u m l a h		14	13	20	44	16

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kematian ibu di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sebagian besar disebabkan oleh infeksi dan perdarahan. Hal ini dikarenakan pada masa kehamilan hingga masa nifas terdapat ibu yang terinfeksi akibat komplikasi berbagai penyakit sebanyak 6 ibu atau sebesar 37,5%. Selanjutnya faktor penyebab kematian ibu terbanyak kedua disebabkan oleh perdarahan sebanyak 4 ibu atau 25%. Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan kematian ibu baik di masyarakat, puskesmas maupun rumah sakit sebagai fasilitas rujukan.

c. Pelayanan Kesehatan

1) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk memberikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, maka strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

Tabel 2.41 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah posyandu balita	1.141	1.139	1.139	1.148	1.148
2	Jumlah balita	58.096	57.627	56.111	57.448	51.192
3	Rasio posyandu per 1000 balita	19,64	19,77	20.30	19,98	22,45

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat 1.148 posyandu. Rasio posyandu per 1.000 balita pada tahun 2022 sebesar 22,452, artinya dalam 1.000 balita terdapat setidaknya 22 posyandu, atau satu posyandu melayani sekitar 51 balita. Idealnya satu Posyandu melayani 50 Balita.

Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Setiap dusun idealnya minimal ada satu posyandu balita. Untuk memantau perkembangannya, Posyandu dikelompokkan ke dalam 4 strata posyandu berdasarkan fasilitas dan keaktifan yaitu strata pratama, strata madya, strata purnama dan strata mandiri. Strata Posyandu disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.42 Strata Posyandu Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

Strata Posyandu	2018		2019		2020		2021		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pratama	40	3,51	40	3.51	836	73.40	153	13	18	2
Madya	188	16,48	187	16.42	143	12.55	109	7	5	0
Purnama	523	45,84	523	45.92	86	7.55	206	18	130	11
Mandiri	390	34,18	389	34.15	74	6.50	680	62	995	87
Total	1.141	100	1.139	100	1.139	100	1.148	100	1.148	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Secara umum strata Posyandu Mandiri pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 87% (995 Posyandu). Sementara untuk Posyandu Purnama sebesar 11% (130 Posyandu). Dengan demikian

posyandu di Kabupaten Bantul Aktif dalam kegiatannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2) Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan swasta. Secara umum fasilitas kesehatan semakin meningkat, dengan demikian diharapkan lebih banyak kemudahan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Tabel 2.43 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (unit)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rumah Sakit Umum	10	10	10	10	11
2	Rumah Sakit Khusus (bedah, paru, KIA)	6	6	6	6	5
3	Klinik Utama	2	2	2	5	5
4	Klinik Pratama :					
	Klinik Pratama Rawat Jalan	45	50	59	59	65
	Klinik Pratama Rawat Inap	11	11	11	11	11
5	Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	0	0	0	0	0
6	Apotek	140	157	175	210	210
7	Laboratorium	4	4	3	3	1
8	Toko obat	6	8	10	11	11
9	Optik	13	7	7	7	7
10	Puskesmas :					
	Puskesmas Rawat Inap	16	16	16	16	16
	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11	11	11	11
	Puskesmas Pembantu (Pustu)	67	67	67	57	48
	Puskesmas Keliling	27	27	27	27	27
11	Posyandu :					
	Posyandu Balita	1.141	1.139	1.139	1.148	1.148
	Posyandu Lansia	1034	1034	1034	1.034	1.034

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 jumlah RS KIA dan Pustu menurun. Hal ini disebabkan RS tidak memperpanjang izinnya. Sementara untuk pustu berkurang karena hasil analisa SDM, integrasi pelayanan primer serta sarana prasarana tidak memenuhi syarat,

Merujuk Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 534/KPTS/M/2001 diatur bahwa setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit RS. Penduduk Kabupaten Bantul tahun 2022 sebanyak 964.245

jiwa, berarti minimal harus ada 4 unit RS. Sampai tahun 2022 terdapat RS Umum sejumlah 11 unit, Rumah Sakit Khusus 5 unit. Hal ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bantul telah mencukupi. Data Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Satuan Penduduk dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.44 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah rumah sakit	16	16	16	16	16
2	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu	152	157	166	153	160
3	Jumlah penduduk	939.718	949.325	954.706	956.513	964.245
4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk	0,161	0,165	0,173	0,159	0,166
5	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,018	0,017	0,017	0,017	0,016

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Seluruh puskesmas di Kabupaten Bantul sudah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) penuh sejak tanggal 2 Januari 2016. Pelaksanaan BLUD puskesmas ini dilaksanakan di 27 puskesmas yang terdiri dari 16 puskesmas rawat inap, dan 11 puskesmas rawat jalan. Adapun hasil penilaian akreditasi puskesmas sebanyak 27 puskesmas telah terakreditasi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang perizinan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19, pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan akreditasi puskesmas.

Tabel 2.45 Jumlah Puskesmas Menurut Status Akreditasi Tahun 2018-2022

No	Puskesmas	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paripurna	1	2	2	2	2
2	Utama	4	16	16	16	16
3	Madya	-	9	9	9	9
Jumlah		5	27	27	27	27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Dari tabel dapat dilihat bahwa Puskesmas di Bantul sebagian akreditasi Utama (59%) dilanjutkan akreditasi Madya (33 %) dan Paripurna (7%).

Selain puskesmas standarisasi pelayanan kesehatan juga dilakukan di rumah sakit. Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui penetapan kelas dan akreditasi rumah sakit milik pemerintah dan

swasta. Penetapan kelas dan status akreditasi rumah sakit disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46 Kelas Rumah Sakit Tahun 2022

No	Sarana Pelayanan Kesehatan	Kepemilikan	Mutu & Akreditasi	
			Kelas	Akreditasi
1	RUMAH SAKIT UMUM			
	1. RSUD Panembahan Senopati	Pemda	B Pend.	Paripurna
	2. RSU Griya Mahardhika	Swasta	D	Madya
	3. RSU Universitas Islam Indonesia	PT Unisia Edu Medika	C	Paripurna
	4. RSU Rajawali Citra	Yayasan	D	Dalam Proses
	5. RSU PKU Muhammadiyah Bantul	Persyarikatan Muhammadiyah	C	Paripurna
	6. RSU Rachma Husada	Yayasan Bina Mitra Husada	C	Madya
	7. RSU Nur Hidayah	Yayasan	D	Paripurna
	8. RSPAU dr. S. Hardjolukito	TNI Angkatan Udara	B	Paripurna
	9. RSU Santa Elisabeth	Yayasan Panti Rapih	D	Paripurna
	10. RSUD Saras Adyatma	Pemda	D	Belum
	11. RSU Permata Husada	PT Purwahardja Husada	D	Paripurna
2	RUMAH SAKIT KHUSUS			
	1. RSKIA Ummi Khasanah	SWASTA	C	PERDANA
	2. RSKB Adelia	Yayasan	C	Paripurna
	3. RSKB Ring Road Selatan	Perkumpulan	C	Utama
	4. RSKIA Kahyangan	PT RSKIA KAHYANGAN	C	Paripurna
	5. RS Paru Respira	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	C	Paripurna

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

3) Rumah Sakit

a) Net Death Rate (NDR)

Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit. Nilai NDR yang dianggap masih ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000. Berikut merupakan NDR di Kabupaten Bantul

Tabel 2.47 Net Death Rate (NDR) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Nama Rumah Sakit	2018	2019	2020	2021	2022
1	RSUD Panembahan Senopati	19.69	18.70	21.10	36.3	20.4
2	RSU Griya Mahardhika	3.36	0.25	0.06	5.1	0.0
3	RSKIA Ummi Khasanah	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
4	RSKB Adelia	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0
5	RSKB Ring Road Selatan	6.89	2.00	3.50	2.2	0.0
6	RSU Universitas Islam Indonesia	belum ada	2.82	3.32	2.8	2.9
7	RSU Rajawali Citra	2.84	5.06	5.97	11.2	0.5
8	RSU PKU Muhammadiyah Bantul	11.19	16.39	20.90	22.7	12.7
9	RSU Rachma Husada	7.63	6.07	1.98	8.9	6.9
10	RSU Nur Hidayah	13.13	25.58	14.47	14.5	1.9

No	Nama Rumah Sakit	2018	2019	2020	2021	2022
11	RSPAU dr. S. Hardjolutito	15.17	17.20	20.83	42.0	20.7
12	RSKIA Kahyangan	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
13	RSU Santa Elisabeth	8.81	15.02	11.79	22.5	25.0
13	RSUD Saras Adyatma	belum ada	belum ada	belum ada	belum ada	0.0
15	RSU Permata Husada	0.00	0.00	5.81	24.8	5.2
16	RS Khusus Paru Respira	0.00	14.24	0.0	19.3	0.0
	RS ADINDA	0.0	0.00	0.0	0.0	Sudah tidak Aktif
KABUPATEN/KOTA		12.29	20.05	11.97	23.3	13.2

Sumber: Dinkes Kabupaten Bantul, 2023

Capaian *Net Death Rate* di Bantul tahun 2022 mencapai 13,2 permil menurun dibandingkan tahun 2021 karena pada tahun 2022 pandemi covid-19 cenderung mereda.

b) Bed Occupation Rate (BOR)

Bed Occupation Rate (BOR) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%.

Tabel 2.48 Bed Occupation Rate (BOR) di Rumah Sakit di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Bed Occupation Rate BOR (%)	51.4	54.0	57,29	39.39	42.65

Sumber: Dinas Kesehatan 2023

Capaian BOR Rumah Sakit tahun 2022 sebesar 42.65. Hal ini terjadi karena kasus covid-19 cenderung sudah menurun.

c) Turn Over Interval (TOI)

Turn Over Interval (TOI) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati, yaitu dari setelah terisi sampai ke saat terisi berikutnya. Turn Over Interval (TOI) ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong/tidak terisi yaitu pada kisaran 1-3 hari.

Tabel 2.49 Turn Over Interval (TOI) di Rumah Sakit Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Turn Over Interval TOI (hari)	3.13	2.90	2,69	5,22	4.62

Capaian TOI Rumah Sakit di Kabupaten Bantul sebesar 4,62 hari. TOI yang semakin panjang menunjukkan semakin lama interval tempat tidur tidak digunakan, sehingga memungkinkan proses pembersihan dan sterilisasi ruangan dan sarana prasarana semakin maksimal dilakukan.

d) Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, yaitu berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Bed Turn Over (BTO) berguna untuk melihat berapa kali tempat tidur rumah sakit digunakan/ditempati oleh pasien. Semakin rendah BTO berarti semakin jarang tempat tidur digunakan, sehingga ada kesempatan untuk mensterilkan tempat tidur tersebut sebelum digunakan kembali.

Tabel 2.50 Bed Turn Over (BTO) di Rumah Sakit Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Bed Turn Over _BTO (kali)	56.74	57.91	46,29	42.38	45.33

Capaian BTO Rumah Sakit di Bantul sebesar 45,33. Selain fasilitas fisik sebagaimana diuraikan di atas, fasilitas lain yang disediakan pemerintah Kabupaten Bantul adalah pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Bantul melalui kepesertaan JKN.

Tabel 2.51 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2018		2019		2020		2021		2022	
		Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	499.511	53.16	443.462	46,71	442.505	46,35	399.908	41,81	497.322	51,58
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	61,28	6.52	46.674	4,92	50.887	5,33	54.861	5,74	59.437	6,16
3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	84,985	9.04	216.212	22,78	224.980	23,57	240.358	25,13	251.139	26,05
4	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	114,557	12.19	88.543	9,33	88.688	9,29	91.296	9,54	84.043	8,72
5	Bukan Pekerja	35,842	3.81	32.340	3,41	31.048	3,25	32.166	3,36	30.661	3,18
	Jumlah penduduk	889,815	94.69	827.231	87,14	838.108	87,79	818.589	85,58	922.602	95,63

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2018		2019		2020		2021		2022	
		Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%
	yang terdaftar JKN										
	Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN	-55,694	5,93	122.094	12,86	116.598	12,21	137.924	14,42	41.643	4,32
	Total penduduk Kab Bantul	939718	100	949.325	100	954.706	100	956.513	100	964.245	100

Sumber: BPJS Kesehatan Bantul, 2023

Pada tahun 2022 pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Bantul telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui kepesertaan JKN telah terdaftar sebesar 922.602 jiwa atau 95.63%, meningkat dari tahun 2021 yaitu 85,5%. Jumlah penduduk yang belum terdaftar kepesertaan JKN sebesar 41,643 jiwa atau 4,32%.

4) Laboratorium Kesehatan Daerah

UPT Labkesda dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 5 Tahun 2021. Pada awalnya UPT Labkesda merupakan laboratorium untuk pemeriksaan kualitas air, tetapi pada tahun 2020 seiring dengan adanya Pandemi Covid 19, terjadi keterlambatan pemeriksaan PCR Covid 19 di seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mengembangkan laboratorium air menjadi laboratorium daerah dengan memperluas jenis pemeriksaan maupun melengkapi sarana dan prasarana laboratorium.

5) Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisisionis, analis, *radiographer*, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya.

Tabel 2.52 Jumlah Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Tenaga	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dokter Spesialis	38	40	44	45	49
2	Dokter Umum	105	135	137	180	159
3	Dokter Gigi Spesialis	5	6	5	5	5

No	Jenis Tenaga	2018	2019	2020	2021	2022
4	Dokter Gigi	37	42	42	45	49
5	Perawat	513	604	595	627	638
6	Perawat Gigi	65	57	60	72	76
7	Bidan	291	294	312	308	309
8	Kefarmasian	136	92	53	101	92
9	Kesehatan Masyarakat	38	36	47	58	52
10	Sanitarian	44	44	45	57	66
11	Gizi	59	62	59	74	93
12	Keterampilan Fisik	20	30	34	35	48

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Tabel 2.53 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Dokter Umum	105	135	137	180	209
2	Jumlah Dokter Spesialis	44	46	50	50	49
3	Jumlah Penduduk	939.718	949.325	954.706	956.513	964.245
4	Rasio Dokter Umum (per 1000 penduduk)	0,11	0,14	0,14	0,19	0,21
5	Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 rasio dokter per jumlah penduduk mencapai 0,21 per 1.000 penduduk atau satu dokter melayani 4.614 penduduk, meningkat dari tahun 2021, namun hal ini menunjukkan masih kurangnya dokter di Kabupaten Bantul. Menurut standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk. Upaya pemenuhan kebutuhan dokter dengan cara melakukan kontrak tenaga dokter dan adanya dokter praktek umum swasta.

6) Pelayanan Kesehatan Lansia

Pelayanan kesehatan lansia meliputi promotif dan preventif sesuai standar (SPM) meliputi pemeriksaan tanda vital, tes kolesterol, gula darah dan tes gangguan memori, Pelayanan ini dilaksanakan bersama oleh dan dari masyarakat melalui Posyandu Lansia.

Tabel 2.54 Rasio Posyandu Lansia per 1.000 Lansia di Kabupaten Bantul
 Tahun 2018 - 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah posyandu Lansia	1034	1034	1034	1034	1034
2	Jumlah Lansia	122.363	119.898	132.562	145.380	144.640
3	Rasio posyandu per 1000 lansia	8,45	8,62	7,80	7,11	7,15

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Jumlah Posyandu Lansia setiap tahun sama yaitu sebanyak 1.034. Sampai dengan tahun 2022 belum terdapat penambahan jumlah Posyandu Lansia. Pada tahun 2021 masih terjadi pandemi Covid 19 sehingga belum dapat menambah jumlah Posyandu Lansia. Posyandu lansia telah dilaksanakan skrining, senam lansia dan penyuluhan kesehatan. Rasio posyandu per 1000 lansia yaitu 7,15 yang berarti bahwa setiap Posyandu Lansia melayani 140 lansia.

d. Kesehatan Masyarakat

1) Status Gizi Balita

Status gizi Balita dapat diketahui dari berat badan menurut umur, yaitu membandingkan antara berat badan menurut umur ataupun panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

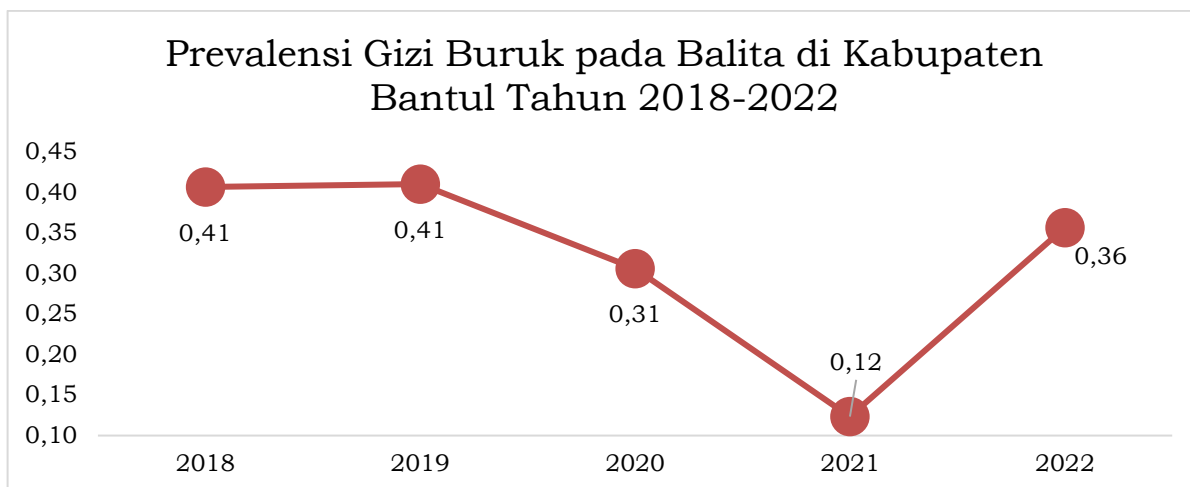
Tabel 2.55 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Balita yang diukur	48.943	48.502	18.621	47.788	55.256
Jumlah Balita Gizi Buruk	199	199	57	59	197
Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,41%	0,41%	0,31%	0,12%	0,42%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 hingga tahun 2021 menunjukkan tren penurunan. Namun pada tahun 2022 tercatat adanya kenaikan kasus balita gizi buruk. Pada tahun 2022 prevalensi balita gizi buruk tercatat 0,42% atau 197 balita. Terjadi kenaikan kasus dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 0,12% atau 59 balita. Masih banyaknya kasus gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, sanitasi lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan

sosial di dalam keluarga. Prevalensi gizi buruk pada Balita disajikan pada grafik di bawah ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.30 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Disamping gizi buruk balita, masalah lain yang sangat erat dengan gizi adalah stunting. Stunting adalah kondisi tubuh anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ukuran tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Kondisi stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan prevalensi balita stunting diantaranya adalah kampanye dan deklarasi penanggulangan stunting, penyusunan Peraturan Bupati dan RAD Stunting, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan, konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis anak pada balita stunting, dan pendampingan balita stunting oleh kader.

Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Balita yang Diukur	48.553	48.181	18.638	47.786	55.256
Jumlah Balita Stunting	4.733	3.725	1.816	3.996	3.001
Prevalensi Balita Stunting (%)	9,75%	7,73%	9,74%	8,36%	6,42%

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Tahun 2019 Kabupaten Bantul ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai lokasi khusus (lokus) dalam penanggulangan Stunting Tahap 2. Prevalensi stunting berhasil diturunkan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 9,75% menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,73%. Namun angka prevalensi stunting kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%. Prevalensi stunting kembali turun ada tahun 2021 menjadi 8,36% dan tahun 2022 menjadi 6,42%. Adanya penurunan angka prevalensi stunting kembali pada tahun 2021 dan 2022 karena intervensi program percepatan penurunan stunting. Determinan masalah penyebab stunting di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.57 Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Analisa Penyebab	Balita Stunting (%)
1	Keluarga Miskin	47,29
2	Usia Ibu<20	3,05
3	Usia Ibu>35	9,20
4	Ibu KEK Sewaktu Hamil	15,60
5	Ibu Anemia Sewaktu Hamil	11,41
6	Tidak ASI Eksklusif	21,04
7	Pengasuhan Anak kepada Orang Lain	2,7
8	Pengasuhan Anak kepada Campuran	30,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

2) Desa Siaga

Desa siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga lahir sebagai respon pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia yang tak kunjung selesai. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti tuberkulosis paru, merebaknya berbagai penyakit baru yang bersifat pandemi serta belum hilangnya penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah merupakan masalah utama kesehatan di Indonesia. Bencana alam yang sering menimpa bangsa Indonesia seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, banjir,

tanah longsor dan kecelakaan massal menambah kompleksitas masalah kesehatan di Indonesia.

Tujuan umum desa siaga adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. Adapun syarat menjadi desa siaga adalah :

- Minimal memiliki pos kesehatan desa yang berfungsi memberi pelayanan dasar (dengan sumberdaya minimal 1 tenaga kesehatan dan sarana fisik bangunan, perlengkapan & peralatan alat komunikasi ke masyarakat & ke puskesmas)
- Memiliki sistem gawat darurat berbasis masyarakat
- Memiliki sistem pembiayaan kesehatan secara mandiri
- Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat

Berdasarkan hal diatas, desa siaga dibagi menjadi 4 strata yaitu pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Perkembangan jumlah desa sesuai strata dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.58 Jumlah Desa Siaga Purnama Mandiri menurut Strata di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Strata	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pratama	0	3	2	6	2
2	Madya	30	11	6	7	11
3	Purnama	22	24	26	19	22
4	Mandiri	23	37	41	43	40
Jumlah		75	75	75	75	75

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum.

Data capaian PHBS tahun 2018 hingga 2022 di Kabupaten Bantul pada semua tatanan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59 Hasil Capaian Tatanan PHBS di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

No	Tatanan PHBS	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rumah Tangga	50,27%	53,00%	53.1%	51,14%	53,00%
2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	83,82%	91,67%	91.70%	94,84%	94,34%

No	Tatanan PHBS	2018	2019	2020	2021	2022
3	Institusi Pendidikan	54,77%	61,00%	62.20%	72,15%	70,39%
4	Tempat Kerja	39,15%	41,21%	41.21%	43,38%	47,00%
5	Tempat-tempat umum	58,52%	59,00%	59.15%	55,60%	71,84%

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Tatanan PHBS di Rumah Tangga masih relatif rendah (53%). Dari tahun ke tahun relatif sama sehingga upaya promosi kesehatan sangat diperlukan. Pola hidup sehat masih rendah di tingkat rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum. Lingkungan permukiman kumuh berpotensi menjadi semakin buruk dengan tren pola hidup sehat di lingkungan rumah tangga yang masih rendah.

Tatanan PHBS meliputi berbagai sub indikator. Sub indikator yang paling berperan sehingga tatanan PHBS belum tercapai adalah larangan merokok di dalam rumah dan larangan meludah di sembarang tempat. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memenuhi sub indikator ini antara lain konsultasi berhenti merokok dan pembentukan kawasan bebas asap rokok.

4) Sanitasi

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga. *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Bantul dari tahun 2018-2022 adalah 100%.

Tabel 2.60 Akses Sanitasi di Kabupaten Bantul tahun 2022

Jumlah KK	Jumlah KK Pengguna			
	Akses Sanitasi Layak Aman	Akses Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Belum Layak	BABS
343.879	81.671	271.160	45.048	-

Sumber: Hasil Monev Sanitasi DIY, Bappeda diolah, 2022

a) Akses Jamban

Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) telah dilakukan oleh 27 puskesmas dengan memotret kondisi kesehatan dari anggota keluarga sekaligus memberikan intervensi dan

edukasi kesehatan salah satunya adalah tersedianya akses/jamban sehat untuk keluarga sebesar 100%, meskipun masih ada yang menggunakan jenis cemplung dan plengsengan. Adanya jamban jenis cemplung/plengsengan yang berpotensi mengakibatkan memburuknya kualitas lingkungan permukiman, terutama di permukiman padat dapat berdampak pada pola hidup yang kurang sehat dan kesehatan masyarakat.

Kegiatan pengawasan kualitas air meliputi pengawasan kualitas air baik secara internal maupun eksternal serta pembinaan DAM dan pengelola air minum peKalurahan Yogyakarta. Pengawasan dilakukan terhadap air bersih maupun air minum. Pengawasan dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perusahaan Depot Air Minum (DAM), Pengelola Air Minum PeKalurahan (Pamdes), dan sumber air bersih masyarakat (sumur gali, mata air, dan lain-lain).

Pada tahun 2021 kegiatan pengawasan eksternal dilakukan dengan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air bagi masyarakat dan dunia usaha. Pengawasan kualitas mencakup sampel sejumlah 3.005 sampel, yang terdiri dari sampel air minum yang bersumber dari PDAM adalah lima sampel tiap Kapanewon dan jumlah sampel air bersih sebanyak lima sampel tiap Kalurahan.

Tabel 2.61 Akses air minum aman di Kabupaten Bantul tahun 2022

Puskesmas	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Sarana Air Minum	Sarana Air Minum Yang Diawasi/ Diperiksa Kualitas Air Minumnya Sesuai Standar (Aman)	
			Jumlah	%
Srandakan	2	6	6	100
Sanden	4	4	4	100
Kretek	5	5	5	100
Pundong	3	7	2	28,57
Bambanglipuro	3	2	0	0
Bantul I	2	4	4	100
Bantul II	3	10	10	100
Pandak I	2	4	4	100
Pandak II	2	6	4	67

Puskesmas	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Sarana Air Minum	Sarana Air Minum Yang Diawasi/ Diperiksa Kualitas Air Minumnya Sesuai Standar (Aman)	
			Jumlah	%
Jetis I	2	2	1	50
Jetis II	2	6	4	66,67
Imogiri I	4	8	5	62,5
Imogri II	4	11	7	64
Dlingo I	3	8	8	100
Dlingo II	3	46	40	87
Pleret	5	7	7	100
Piyungan	3	25	19	76
Banguntapan I	3	2	2	100
Banguntapan II	4	4	4	100
Banguntapan III	1	1	1	100
Sewon I	2	1	1	100
Sewon II	2	2	2	100
Kasihani I	2	5	4	80
Kasihani II	2	0	0	0
Pajangan	3	8	8	100
Sedayu I	2	6	6	100
Sedayu II	2	17	8	47
KABUPATEN	75	207	166	80,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

b) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Data penyakit menular di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.62 Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Covid-19	0	0	3.163	53.953	18.483
2	Tuberkulosis (TB) BTA Positif	344	112	343	220	283
3	Kasus HIV	184	127	103	97	160
4	Kasus AIDS	36	22	38	15	52
5	Kasus Syphilis	8	64	25	18	8
6	Kusta	15	8	4	4	4
7	Jumlah Kasus Campak	3	1	0	0	0
8	Pneumonia Balita ditemukan dan ditangani	1.093	941	424	499	582

No	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2018	2019	2020	2021	2022
9	Diare ditemukan dan ditangani	4.877	4.622	6.005	4.136	7.812
10	AFP Rate (non polio) < 15 th	9	5	3	4	0
11	DBD	192	1.424	1.222	410	957
12	Malaria	0	7	3	0	3
13	Leptospirosis	93	92	79	42	140

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2022

1) Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

Pada awal tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bantul mulai melaksanakan vaksinasi massal kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul diawali vaksinasi kepada tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dilanjutkan kepada pelayan publik. Vaksinasi masih terus dilakukan di tahun 2022. Hasil cakupan vaksinasi yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63 Hasil Vaksinasi Covid-19 Tahun 2022

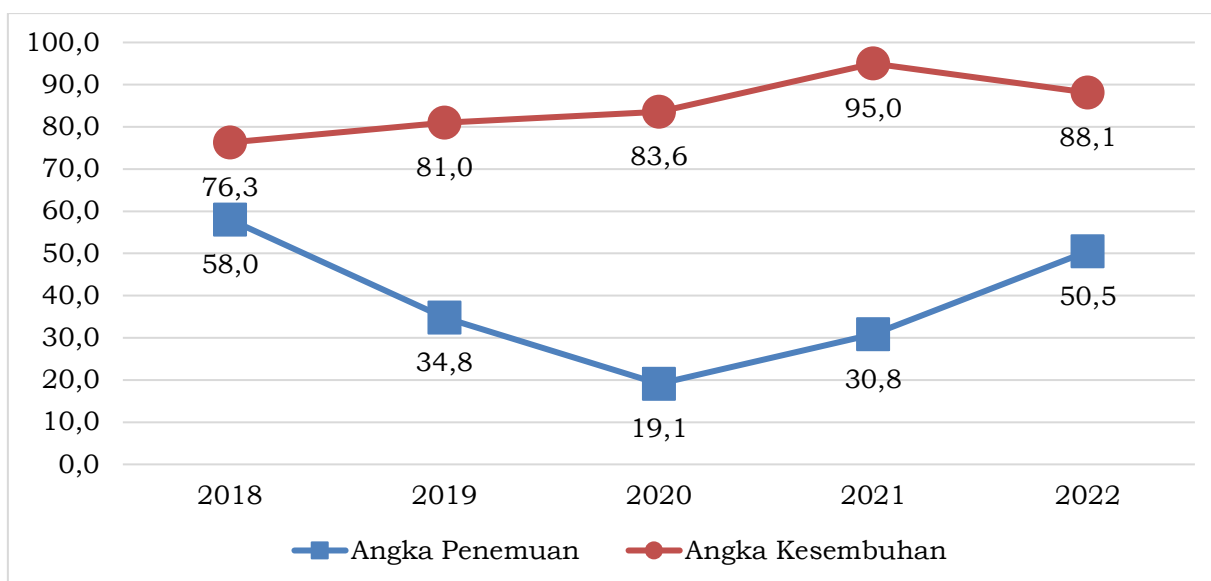
Uraian	Sasaran	Jumlah Penduduk yang divaksin	Cakupan (%)
DOSIS 1	899,352	792,070	88.07
DOSIS 2	899,352	760,069	84.51
DOSIS 3	752,225	210,482	27.98
DOSIS 4	8,298	5,202	62.69

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2023

2) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh *mycobacterium*, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh di mana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Tuberkulosis adalah penyakit yang paling umum yang dialami oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang bisa menjaga kebersihan yang ada di lingkungannya.

Masalah yang dihadapi terkait penyakit TB adalah penemuan kasus dan kesembuhan penderita TB Adapun grafik notifikasi kasus TB (*Case Notification Rate/CNR*) dan keberhasilan pengobatan (*Success Rate/SR*) dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten, 2022

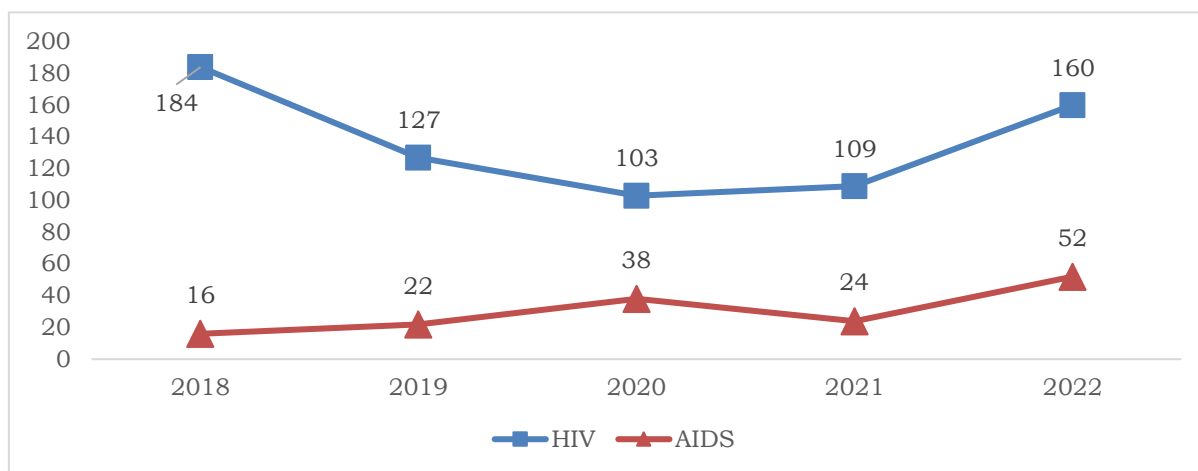
Gambar 2.31 CNR dan SR Penderita TB di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa angka Notifikasi semua kasus TBC (*Case Notification Rate/CNR*) mengalami tren kenaikan pada tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya, terkait dengan angka keberhasilan TB yang pada tahun 2022 keberhasilan pengobatan mencapai 88% terjadi penurunan bila dibandingkan tahun 2021 sebesar 95%. Angka tersebut masih berada di atas target keberhasilan pengobatan yaitu 85%.

Upaya penanganan kasus TB antara lain adalah Penyusunan RAD penanggulangan TB; Meningkatkan peran serta dari layanan kesehatan swasta dalam penemuan TB melalui supervisi oleh wasor TB/*District officer* TB, dan pengelola program HIV; Kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat; Kolaborasi dengan PD Aisyiyah; Revitalisasi Gerakan Terpadu Daerah (Gerduda) Kapanewon; Penyediaan ruang tersendiri untuk poli batuk dan TB MDR di puskesmas; dan Pendampingan penemuan TB di puskesmas melalui kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan fokus pada penyegaran tentang strategi DOTS, *Active Selective Case Finding (ASCF)* melalui pemeriksaan dahak pada suspek, Pemberian makanan tambahan pada penderita TB yang sedang diobati.

3) Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS

Penyebaran HIV-AIDS memang sangat sulit terdeteksi. Data yang didapatkan saat ini hanya sebagian kecil dari besarnya jumlah orang yang sebenarnya mengidap HIV-AIDS. Banyak orang yang tidak memeriksakan dirinya sehingga angka pasti jumlah ODHA hingga saat ini tidak dapat diketahui. Inilah yang dinamakan fenomena gunung es. Masih banyak ODHA yang tidak terdeteksi hingga hari ini. Lebih dari itu, banyak ODHA yang tidak sadar bahwa saat ini dirinya terjangkit HIV. Grafik penemuan HIV AIDS tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2022

Gambar 2.32 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul

Penemuan kasus HIV dan AIDS pada tahun 2022 terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022 kasus HIV dan AIDS terjadi 212 kasus (HIV 162 kasus, AIDS 52 kasus) menjadi 133 kasus (HIV 109 kasus, AIDS 24 kasus) di tahun 2021. Data HIV tidak dijumlahkan dengan data AIDS, karena didalam data HIV sudah termasuk data AIDS

Alur Pencatatan Data HIV AIDS:

- Data didapatkan dari laporan masing-masing layanan kesehatan (Puskesmas dan RS) di Kabupaten Bantul, melalui aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS).
- Validasi data di tingkat kabupaten dilakukan setiap 3 bulan sekali.
- Setiap 6 bulan dilakukan validasi tingkat provinsi.

Akselerasi pengendalian HIV-AIDS dilakukan melalui kegiatan :

- Pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko HIV, yaitu Bumil, TBC dan

Penderita Infeksi Menular Seksual (IMS) dan populasi kunci (WPS, LSL, Waria WBP) dengan pengadaan rapid HIV Sifilis yang didistribusikan ke seluruh fasyankes yang sudah mampu melaksanakan pemeriksaan HIV (27 puskesmas dan 9 Rumah Sakit);

- Penambahan layanan PDP dengan melatih Puskesmas Imogiri I, Puskesmas Pajangan, Puskesmas Sewon I dan Puskesmas Dlingo I untuk memudahkan akses pengobatan Orang dengan HIV AIDS (ODHA);
- Konseling dan testing HIV di 27 puskesmas dan 9 RS (RS PKU, RS Elizabeth, RS Nur Hidayah, RS Rahma Husada, RS Rajawali Citra, RSK Paru Respira, RSPAU Hardjolukito, RS Panembahan Senopati dan RS UII).
- Layanan Perawatan dukungan dan pengobatan (PDP) meliputi: RS Panembahan Senopati, Puskesmas Kretek, RSPAU Hardjolukito, Puskesmas Srandakan, Puskesmas Banguntapan I, Puskesmas Piyungan, Puskesmas Sedayu II, Puskesmas Kasihan II)
- Mentoring Klinis layanan PDP oleh tim mentor Kabupaten kepada layanan PDP untuk mencari solusi terhadap kendala yang muncul di layanan.
- Pelatihan notifikasi pasangan pada layanan PDP untuk menemukan kasus baru HIV.

4) Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Jumlah kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.64 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kasus	182	1424	1222	410	957
IR (‰)	9,21	151,5	129	43,2	99,9
Jumlah Meninggal	0	4	4	1	5
CFR (%)	0	0,28	0,33	0,24	0,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Angka kesakitan DBD pada tahun 2022 sebesar 99,9 per 100.000 penduduk (957 kasus). Terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 43,2 per 100.000 penduduk (410 kasus).

Pada tahun 2022 terdapat 5 kematian karena DBD, terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 hanya 1 penderita DBD yang meninggal.

Berbagai upaya yang dilaksanakan dalam menangani kasus DBD yang meningkat antara lain melalui kegiatan :

- Pengendalian bekerjasama dengan Yayasan Tahija dalam Eliminate Dengue Project (EDP), yaitu dengan melepas nyamuk Wolbachia;
- Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD;
- Pemberdayaan kader-kader dusun, remaja dan siswa SD untuk PSN; Melakukan dan koordinasi dan komunikasi di tingkat Kapanewon; Melaksanakan *fogging* sesuai Standar Prosedur yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di puskesmas pada semua kasus demam yang sudah ≥ 2 hari, dengan cara pemeriksaan menggunakan antigen dengue;
- Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DB melalui media elektronik; Pembagian Larvasida di wilayah endemik pada saat PE;
- KIE dan kerjasama Lintas program dan lintas sektor;
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui gertak PSN; dan *Fogging* Fokus untuk memutus mata rantai penularan.

Penyakit menular lain yang saat ini tetap harus ada pemantauan adalah malaria. Status yang sudah eliminasi mengharuskan tetap diadakan kegiatan untuk mempertahankannya. Begitu juga dengan leptospirosis. Pada tahun 2022 ini terjadi peningkatan kasus yang perlu diwaspadai yaitu 140 kasus. Meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 42 kasus.

e. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Data penyakit tidak menular di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.65 Data Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kasus IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun	19	44	6	17	401
2	Jumlah tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun	31	45	2	7	10
3	Kalurahan/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	9	12	81	75	74
4	Diabetes Melitus	33.013	43.696	18.516	18.306	15.727
5	Gangguan Jiwa	6.844	9.761	2.097	2.682	2.784
6	Hipertensi/tekanan darah tinggi	69.228	91.266	58.069	34.913	39.053

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Tahun 2019 dilakukan upaya *screening* awal untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular Diabetes Mellitus (DM) dan Pengendalian kasus Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD). Pada tahun 2022 pelayanan kesehatan pada penderita DM sebanyak 15.727 kasus, menurun dibandingkan pada tahun 2021 pelayanan pada DM sebanyak 18.306 kasus. Adapun pelayanan pada Hipertensi sebanyak 39.053 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebanyak 34.913 kasus.

f. Capaian SPM Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang kesehatan.

Capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2021 belum memenuhi 100%. Data capaian dan kendala dalam pemenuhan SPM bidang kesehatan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.66 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2020			2021			2022		
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	12.708	12.088	95,12	11.779	11.569	98,22	10,894	10,514	96.51
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	12.708	12.697	99,91	11.779	11.757	99,81	10,894	10,885	99.92
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	12.624	10.680	84,60	11.713	9.595	81,92	10,829	8,990	83.02
4.	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	53.647	39.055	72.80	56.311	41.713	74,08	57,211	49,818	87.08
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	113.058	106.072	93,82	114.343	103.409	90,44	122,027	117,696	96.45
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	584.084	407.090	69.70	664.592	252.244	37,95	533,295	234,862	44.04
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	121.619	35.247	28.98	145.380	61.680	42,43	144,640	77,422	53.53

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2020			2021			2022		
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
		skrinning kesehatan sesuai standar									
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60.204	36.777	61.09	61.916	23.757	38,37	39,053	4,393	11.25
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21.138	13.584	64.26	22.646	12.252	54,10	15,727	4,754	30.23
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.353	2.178	92.56	2.489	2.248	90,32	2,784	2,344	84.20
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	4.438	4.438	100	3.370	3.370	100	10,399	10,244	98.51
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	16.101	16.101	95.60	14.231	13.660	95,99	18,008	18,008	100.00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

Tabel 2-67 Kendala Capaian SPM Bidang Kesehatan Kurang dari 100% di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2021

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2019	2020	2021	2022
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	Capaian 97 % Beberapa ibu hamil belum melaksanakan K4 pada trimester 3 karena adanya mobilisasi penduduk atau pindah daerah	Capaian 95,12% Selama pandemi, kunjungan ibu hamil ke puskesmas menurun. Bahkan setelah ada pengaturan jadwal kunjungan dan dilakukan kunjungan luar gedung, masih terdapat ibu hamil yang tidak berkunjung sesuai dengan jadwal. Masih terdapat Ibu hamil datang pertama kali ke puskesmas sudah lewat dari 12 minggu jadi tidak bisa dihitung sebagai K1. Terdapat Ibu hamil yang memeriksa ke fasilitas kesehatan swasta, kunjungan K1 nya tidak terpantau. Terdapat kasus Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) sehingga ketika kunjungan ke puskesmas sudah lewat K1 dan K 2.	Capaian 98,22% Selama pandemi, kunjungan ibu hamil ke puskesmas menurun. Bahkan setelah ada pengaturan jadwal kunjungan dan dilakukan kunjungan luar gedung, masih terdapat ibu hamil yang tidak berkunjung sesuai dengan jadwal. Masih terdapat Ibu hamil datang pertama kali ke puskesmas sudah lewat dari 12 minggu jadi tidak bisa dihitung sebagai K1. Terdapat Ibu hamil yang memeriksa ke fasilitas kesehatan swasta, kunjungan K1 nya tidak terpantau. Terdapat kasus Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) sehingga ketika kunjungan ke puskesmas sudah lewat K1 dan K 2.	Capaian 99,72% Masih ada 1 ibu hamil yang belum mendapatkan standar pelayanan minimal secara menyeluruh, hal ini dikarenakan ibu hamil tidak menyadari jika dirinya hamil serta ibu hamil merasa tidak ada keluhan sehingga datang ke faskes tidak sejak trimester awal kehamilan
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Capaian 99,8 % Ada ibu bersalin tidak di fasyankes walaupun dilayani oleh nakes	Capaian 99,91 % Lahir spontan di rumah sebelum mendapatkan pertolongan nakes. Ibu hamil datang ke Rumah Sakit untuk persalinan tetapi sesuai	Capaian 99,82 % Beberapa ibu hamil tidak melakukan kunjungan nifas ketiga ke fasyankes karena pandemi Covid meskipun telah dilakukan konsultasi kesehatan oleh puskesmas lewat whatsapp.	Capaian 99,72% persalinan tidak dilakukan di faskes (dirumah) tetapi dibantu oleh tenaga kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2019	2020	2021	2022
				indikasi medis dipulangkan, namun ternyata sampai rumah melahirkan. Ibu hamil menyandang gangguan jiwa (ODGJ) melahirkan di rumah Beberapa ibu hamil tidak melakukan kunjungan nifas ketiga ke fasyankes karena pandemi Covid meskipun telah dilakukan konsultasi kesehatan oleh puskesmas lewat whatsapp.		
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Capaian 84,1% Beberapa bayi gagal IMD	Capaian 84,60% Beberapa bayi baru lahir belum dilakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Kunjungan Neonatal (KN3) ditunda bahkan tidak dilakukan karena kondisi pandemi Covid-19	Capaian 81,92% Beberapa bayi baru lahir belum dilakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Kunjungan Neonatal (KN3) ditunda bahkan tidak dilakukan karena kondisi pandemi Covid-19	Capaian 85,43 % KN1 yang tidak terpenuhi terutama dalam pelaksanaan IMD yang tidak tercapai
4.	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Capaian 70,2% Masih ada balita yang belum tercatat ditimbang secara rutin	Capaian 72,80% Posyandu dan Deteksi Tumbuh Kembang Balita (DTKB) tidak dilaksanakan dengan maksimal karena pandemi Covid-19-19	Capaian 74,08% Posyandu dan Deteksi Tumbuh Kembang Balita (DTKB) tidak dilaksanakan dengan maksimal karena pandemi Covid-19-19	Capaian 79,29% a. Balita banyak yang tidak ditimbang sebanyak 8 kali selama setahun b. Masih banyak balita tidak dinilai tumbuh kembangnya setahun dua kali
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Capaian 100%	Capaian 93,82% screening tidak maksimal karena pandemi Covid-19 aplikasi mobscreen penjarkes belum optimal	Capaian 90,44% Karena pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan skrining tidak maksimal. Sebagian besar skrining (pelayanan kesehatan pada usia pendidikan	Capaian 96,45% sebagian besar skrining (pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar) dilakukan melalui aplikasi mobscreen penjarkes. Aplikasi online

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2019	2020	2021	2022
					dasar) dilakukan melalui aplikasi mobscreen penjarkes. Aplikasi online ini memerlukan kerjasama dari wali murid dan guru sehingga tergantung pada keaktifan wali murid dan guru. Kendala yang dialami yaitu terdapat wali murid yang belum bisa menggunakan aplikasi ini atau tidak dapat terkoneksi jaringan internet maupun tidak memiliki perangkat/gawai yang mendukung aplikasi.	ini memerlukan kerjasama aktif dari para wali murid dan guru. Sedangkan yang menjadi kendala yaitu masih adanya wali murid belum semua bisa menggunakan aplikasi ini. Keterbatasan SDM dalam input hasil pemeriksaan kesehatan.
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Capaian 100%	Capaian 69,70% screening tidak maksimal karena pandemi Covid-19-19	Capaian 37,95% Pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan skrining tidak maksimal. Selama pandemi Covid-19 di tahun 2021, kegiatan masyarakat dibatasi (diberlakukan PPKM) sehingga skrining dilakukan jika telah mendapat izin pelaksanaan pertemuan. Pelayanan kesehatan pada usia produktif di dalam gedung juga tidak maksimal karena jumlah kunjungan ke puskesmas menurun.	Capaian 44,04% pandemi covid sehingga screening tidak maksimal. Selama pandemi kegiatan masyarakat dibatasi, sehingga skrining dilakukan jika telah mendapat izin pelaksanaan pertemuan. Pelayanan kesehatan pada usia produktif di dalam gedung juga turun karena kunjungan ke puskesmas menurun. Selain itu, dikarenakan pencatatan dan pelaporan yang belum maksimal serta kurangnya sumber daya manusia dan BMHP skrining
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining	Capaian 82,2% Keterbatasan lansia mengisi form skrining	Capaian 28,98% Banyak lansia yang terkendala dalam pengisian instrument deteksi	Capaian 42,43% Selama pandemi Covid-19 kegiatan luar gedung tidak terlaksana	a. Lansia tidak aktif ke posyandu atau ke puskesmas karena masih

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2019	2020	2021	2022
		kesehatan sesuai standar		gangguan mental emosional dan perilaku termasuk kepikunan. Selama pandemi kegiatan luar gedung tidak berjalan, screening dioptimalkan pada kunjungan lansia di puskesmas padahal kunjungan pasien juga menurun.	sehingga kegiatan skrining dioptimalkan pada kunjungan lansia di puskesmas dimana jumlah kunjungan pasien lansia di puskesmas menurun selama pandemi Covid-19 di tahun 2021. Banyak lansia terkendala dalam pengisian instrumen deteksi gangguan mental emosional dan perilaku termasuk kepikunan	aktif bekerja b. Pencatatan lansia yang sudah dilakukan skrining masih kurang baik
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Capaian 100%	Capaian 61,09% penderita Hipertensi yang mengakses fasyankes swasta belum terdata Kunjungan menurun karena ketakutan masyarakat diperiksa di layanan Kesehatan selama era pandemi. Selain itu, kegiatan pelayanan di luar gedung juga menurun.	Capaian 39,20% Kerja sama dengan jejaring swasta untuk pelaporan kasus belum maksimal, sehingga penderita hipertensi yang mengakses fasyankes swasta belum terdata. Jumlah kunjungan di layanan kesehatan menurun karena ketakutan masyarakat memeriksakan kesehatannya di layanan kesehatan selama pandemi Covid-19. Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung menurun karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi Covid-19.	Capaian 11,25% a. kepatuhan kontrol pasien penderita hipertensi di puskesmas masih rendah b. pencatatan dan pelaporan belum dapat memotret data dari fasyankes di luar puskesmas.

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2019	2020	2021	2022
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Capaian 100%	Capaian 64,26 Penderita yang mengakses fasyankes swasta belum terdata Kunjungan menurun karena ketakutan masyarakat periksa di layanan Kesehatan selama era pandemi. Selain itu, kegiatan pelayanan di luar gedung juga menurun	Capaian 57,08% Kerja sama dengan jejaring swasta untuk pelaporan kasus belum maksimal, sehingga penderita Diabetes Melitus yang mengakses fasyankes swasta belum terdata. Jumlah kunjungan di layanan kesehatan menurun karena ketakutan masyarakat memeriksakan kesehatannya di layanan kesehatan selama pandemi Covid-19. Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung menurun karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi Covid-19.	Capaian 30,23 % masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pasien DM untuk kembali kontrol ke puskesmas, pencatatan dan pelaporan belum dapat memotret data dari luar puskesmas
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Capaian 100%	Capaian 92,56 Kesadaran pasien dan keluarganya untuk rutin berobat masih rendah Kunjungan menurun karena ketakutan masyarakat periksa di layanan Kesehatan selama era pandemi. Selain itu, kegiatan pelayanan di luar gedung juga menurun	Capaian 90,32% Jumlah kunjungan di layanan kesehatan menurun karena ketakutan masyarakat memeriksakan kesehatannya di layanan kesehatan selama pandemi Covid-19. Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung menurun karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi Covid-19.	Capaian 84,2% a. Stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa b. Kurangnya kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap kesehatan jiwa

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2019	2020	2021	2022
					Kesadaran pasien dan keluarganya untuk rutin berobat masih rendah.	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Capaian 98 % Orang terduga tuberkulosis, disebabkan penderita TB tidak taat minum obat secara rutin	Capaian 100%	Capaian 100%	Capaian 98,51% terduga yang sudah terjaring oleh layanan tidak kembali mengumpulkan dahak, hal ini menyebabkan terduga tidak mendapatkan pemeriksaan penunjang sesuai kriteria SPM
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Capaian 100%	Capaian 95,60% pandemi Covid-19 menyebabkan: Pemeriksaan ANC terpadu tidak dilakukan pada beberapa ibu hamil Layanan VCT mobile berhenti	Capaian 95,99% Pemeriksaan ANC terpadu tidak dilakukan pada beberapa ibu hamil dan layanan VCT mobile terhenti akibat pandemi Covid-19.	Capaian 100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1 Pekerjaan Umum

a. Jaringan Jalan

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi baik untuk memperlancar transportasi.

1) Jalan Kabupaten

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 41/KEP/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi, ruas jalan provinsi di Kabupaten Bantul sepanjang 152,685 KM. Sedangkan, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 376 ruas, dengan panjang 624,47 Km.

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Kondisi jalan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.67 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	Panjang (km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
2018	624,47	465,73	74,55	158,74	25,45
2019	624,47	468,97	75,10	156,64	24,90
2020	624,47	470,98	75,42	153,49	24,58
2021	624,47	472,49	75,66	151,98	24,34
2022	624,47	473,57	75,84	150,90	24,16

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Pada Tahun 2022 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 473,57 km (75,84%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 472,49 km (75,66%) pada Tahun 2021. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 150,90 km, sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan di Kabupaten Bantul bisa dalam kondisi mantap.

2) Jalan Desa

Kawasan pedesaan merupakan kawasan dengan intensitas pembangunan fisik relatif rendah dan mayoritas penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian. Kondisi yang dihadapi sering kali sarana prasarana di pedesaan masih sangat minim. Jalan-jalan di pedesaan sebagai salah satu sarana prasarana dasar belum sepenuhnya pada kondisi yang mantap sehingga mengganggu mobilitas penduduk/barang/jasa dan keselamatan pengguna jalan. Penyediaan sarana prasarana dasar bagi kawasan perdesaan merupakan langkah penting dalam pengembangan pedesaan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Infrastruktur jalan desa di Kabupaten Bantul mendapat perhatian penuh dari pemerintah dalam upaya pemenuhan akses masyarakat ke pusat-pusat perekonomian, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 274 Tahun 2017 Tentang Status Jalan Desa di Kabupaten Bantul, terdapat 598 ruas jalan desa sepanjang

571,13 km. Kondisi jalan desa di Kabupaten Bantul seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.68 Kondisi Jalan Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

Tahun	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
2020	571,13	457,943	80,62	110,097	19,38
2021	571,13	469,72	82,24	101,41	17,76
2022*	571,13	471,24	82,51	99,89	17,49

Keterangan : *data sementara

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Terdapat penambahan kondisi jalan desa mantap pada tahun 2022 sepanjang 1,52 km sehingga total panjang kondisi jalan desa mantap adalah 471,24 km (82,51%), dan kondisi jalan belum mantap total berkurang menjadi 99,89 km (17,49%).

b. Gedung Bangunan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Dalam mendirikan bangunan gedung, masyarakat harus memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Data IMB dan PBG Tahun 2020-2021 di Kabupaten Bantul seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.69 Data Penerbitan IMB dan PBG di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

Tahun	IMB			PBG
	Gedung	Non Gedung	RTLH	
2020	1.652	107	n/a	n/a
2021	2.096	129	54	2
2022	-	-	-	362

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Untuk dapat dimanfaatkan, bangunan gedung harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. SLF yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2021 dalam 80 meningkat dari tahun 2020 yaitu 48.

c. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektivitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha.

Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

Data capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.70 Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	Panjang saluran irigasi primer (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2018	96.724,00	81.122,42	83,87

Tahun	Panjang saluran irigasi primer (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2019	96.724,00	79.427,97	82,12
2020	96.724,00	79.724,50	82,42
2021	96.724,00	80.029,00	82,74
2022	96.724,00	79.626,00	82,32

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Kondisi jaringan irigasi primer berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2022 adalah 82,32% (79.626,00 m). Menurun 403 m dibandingkan tahun 2021.

Tabel 2.71 Saluran Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	Panjang saluran irigasi sekunder (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2018	140.877,00	125.535,50	89,11
2019	140.877,00	115.761,25	82,17
2020	140.877,00	115.096,00	81,70
2021	140.877,00	111.974,00	79,48
2022	140.877,00	114.710,70	81,43

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Kondisi jaringan irigasi sekunder berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2022 adalah 81,43% (114.710,70 m). Meningkat 2.736,7 m dibandingkan tahun 2021.

Data target dan capaian daerah irigasi yang terlayani air irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.72 Target dan Capaian Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44
2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19
2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01
2021	7.180,03	83,16	6.997,86	81,05
2022	6.939,15	80,37	6.946,82	80,46

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Luas sawah sepanjang daerah irigasi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,46% (6.946,82 ha) di tahun 2022. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa belum semua daerah irigasi memiliki saluran irigasi kualitas baik dan teraliri dengan baik. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan infrastruktur terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi basis pertanian, tetapi memiliki keterbatasan

sarana prasarana pendukung. Adapun kegiatan yang mendukung pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi adalah pemeliharaan jaringan irigasi.

Salah satu dampak alih fungsi lahan pertanian adalah fungsi jaringan irigasi terganggu. Kejadian ini terjadi pada beberapa daerah irigasi, antara lain terjadi di:

- DI Bengkung; dihapus karena untuk hutan rakyat, memenuhi kebutuhan air minum dan untuk komplek makam raja-raja (Imogiri).
- Embung Ngentak; dihapus karena lahan dipergunakan untuk tambak udang.
- Embung Pandansimo, lahan dipergunakan untuk tambak udang.
- DI Kretek, daerah irigasi dihapus karena lahan menjadi perumahan, dan lahan tidak produktif.

Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

d. Akses Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Akan tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam. Air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.

Akses air minum layak di Kabupaten Bantul dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan jangkauan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga salah satu upaya pemenuhannya dapat dilakukan dengan penambahan sambungan rumah melalui jaringan PDAM, membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Berikut

merupakan persentase penduduk berakses air minum layak di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022.

Tabel 2.73 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak
Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	76,61	97,14	98,09	97,03	97,03*

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Ket: * data Sementara

Dalam penyediaan air minum layak, capaian layak kabupaten Bantul tahun 2022 adalah 97,03%, sedang capaian layak aman adalah 13,29%. SPAM Regional Kartamantul sebagai penyedia air baku akan melayani kebutuhan air bersih bagi warga yang tinggal di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. SPAM ini mempunyai kapasitas air 700 liter per detik, dengan alokasi serapan untuk Bantul 100 liter per detik. Sampai dengan tahun 2022 dari target 100 liter per detik serapan Bantul pada angka 78 liter per detik.

e. Sanitasi

Pengertian Sanitasi adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Manfaat sanitasi untuk mencegah penyakit menular, mencegah kecelakaan, mencegah timbulnya bau tidak sedap, menghindari pencemaran, mengurangi jumlah presentase sakit, serta lingkungan menjadi bersih, sehat dan nyaman. Permasalahan sanitasi harus segera ditangani dengan lebih optimal terutama permasalahan air limbah, drainase dan persampahan.

1) Penanganan Air Limbah

Air limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua yaitu *grey water* dan *black water*. Air limbah yang termasuk dalam kategori *grey water* adalah air limbah rumah tangga berupa limbah cucian dapur, cucian pakaian (sabun), dan air buangan dari kamar mandi, sedangkan yang termasuk dalam *black water* adalah, tinja manusia, urine, air penggelontor, kertas pembersih, dan air pembersih. Secara umum dari hasil survey air limbah relatif terkelola dengan baik. Limbah rumah tangga selain tinja masuk dalam saluran air

limbah ataupun sumur peresapan, sedangkan limbah tinja terkelola dengan tangki septik ataupun IPAL Komunal.

Tabel 2.74 Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak
Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak	97,19	98,35	99,5	97,19	97,19*

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Ket: * data Sementara

Pengelolaan air limbah ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah. Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada.

Tabel 2.75 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Tahun	SPALD-T Skala Permukiman		SPALD-T Skala Kota	
		Jumlah Unit	Jumlah SR	Jumlah Unit	Jumlah SR
1	2018	124	10633	1	2389
2	2019	130	11013	1	2509
3	2020	140	11663	1	2899
4	2021	144	11919	2	3124
5	2022	151	12304	2	3448

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Tabel 2.76 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2022

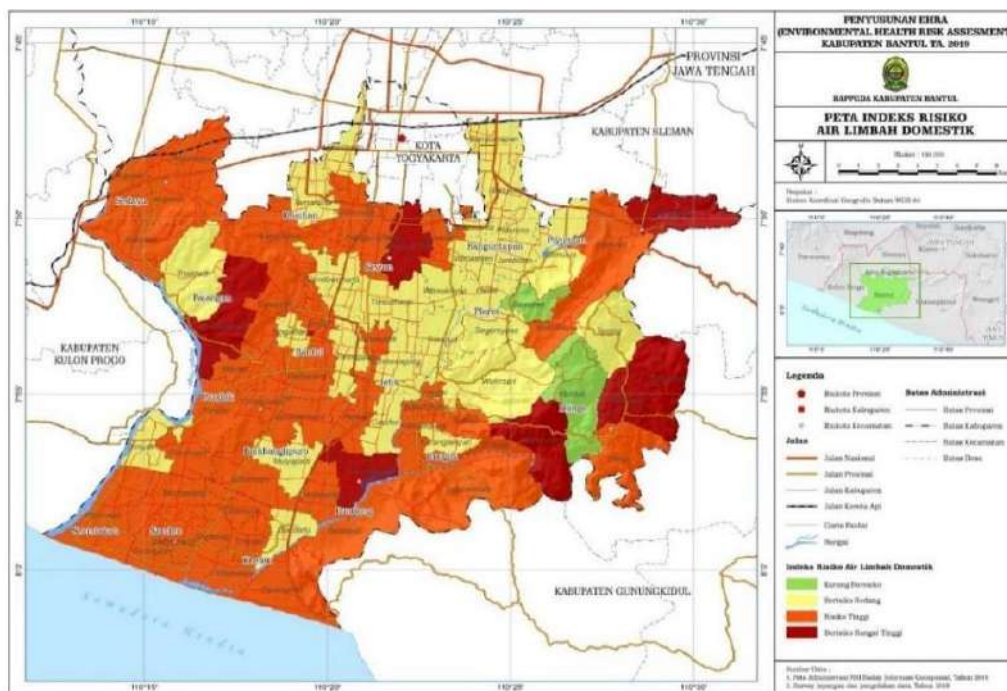
No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi	
				Berfungsi	Tdk berfungsi
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	SPALD-Setempat				
1	Berbasis komunal				
	- MCK Komunal	unit	-		-
2	Truk Tinja	unit	2	√	
3	IPLT : kapasitas	m3/hari	50	√	
	SPALD-Terpusat				
1	Berbasis komunal				
	- Tangki septik komunal >10KK	unit	-	-	-
	- IPAL Komunal	Unit/kk	170/12.521	√	-
2	IPAL Kawasan/Terpusat				
	- Kapasitas	kk	3.000	√	-
	- Sistem		-	-	-
3	- SPAL-DT Bambanglipuro	SR	6.000		√

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa prasarana dan sarana yang terbangun sampai 2022 ini masih berfungsi dengan baik. Penanganan

pengelolaan air diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah di IPAL Sewon. Pada tahun 2022 ada penambahan sebanyak 380 SR, sehingga jumlah SR IPAL Sewon yang di wilayah Kabupaten Bantul menjadi 3.506 SR. Direncanakan pada taun 2024 ada penambahan lagi sebanyak 210 SR.

Berdasarkan Studi Strategi Sanitasi Kabupaten (2021), ditinjau dari sanitasi air limbah domestik Kabupaten Bantul terbagi menjadi 2 zona tingkat risiko sanitasi yang menunjukkan skala 4 (resiko sangat tinggi) dan 3 (resiko tinggi), dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Sumber: Bappeda, Studi SSK, 2022

Gambar 2.33 Peta Indeks Risiko Air Limbah Domestik

Zona tingkat risiko sanitasi pada air limbah domestik yaitu :

- Risiko Sangat Tinggi (skala 4), yang meliputi Kalurahan Gilangharjo, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Tamanan, Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Panggungharjo, dan Kalurahan Tirtonirmolo.

- b) Risiko Tinggi (skala 3), yang meliputi Kalurahan Poncosari, Kalurahan Trimurti, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Panjangrejo, Kalurahan Srihardono, Kalurahan Sidomulyo, Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Wijirejo, Kalurahan Palbapang, Kalurahan Ringin Harjo, Kalurahan Bantul, Kalurahan Tirenggo, Kalurahan Sabdodadi, Kalurahan Patalan, Kalurahan Sumber Agung, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Karangtalun, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Wukirsari, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Temuwuh, Kalurahan Terong, Kalurahan Sitimulyo, Kalurahan Srimulyo, Kalurahan Srimartani, Kalurahan Jagalan, Kalurahan Singosaren, Kalurahan Wirokerten, Kalurahan Baturetno, Kalurahan Pendowoharjo, Kalurahan Timbulharjo, Kalurahan Tamantirto, Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Sendangsari, Kalurahan Guwosari, dan Kalurahan Argomulyo.

2) Drainase

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Bantul pada saat ini sedang menyusun rencana induk sistem drainase cakupan kabupaten. Kondisi eksisting saat ini di Bantul masih bersifat parsial, belum terintegrasi dalam satu sistem kabupaten. Rencana induk sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, karena masuk dalam sistem daerah aliran sungai Opak, dan Progo. Sehingga, kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik.

Tabel 2.77 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	Luas daerah rawan banjir (ha)	Realisasi	
		Penanganan Banjir (ha)	%
2018	893,56	226,02	25,29
2019	893,56	257,49	28,82

Tahun	Luas daerah rawan banjir (ha)	Realisasi	
		Penanganan Banjir (ha)	%
2020	893,56	297,58	33,30
2021	893,56	338,48	37,88
2022	893,56	353,69	39,58

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

f. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Pekerjaan Umum. Capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2022 telah memenuhi 100%, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-77 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI			
				2019	2020	2021	2022*
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100%	$\frac{222.979}{222.979} \times 100 \%$ = 100 %	$\frac{329.616}{329.616} \times 100 \%$ = 100 %	$\frac{333.130}{333.130} \times 100 \%$ = 100%	$\frac{335.389}{335.389} \times 100 \%$ = 100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	$\frac{318.539}{318.539} \times 100 \%$ = 100 %	$\frac{329.616}{329.616} \times 100 \%$ = 100 %	$\frac{333.130}{333.130} \times 100 \%$ = 100 %	$\frac{335.389}{335.389} \times 100 \%$ = 100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

Ket: * data Sementara

2.1.3.1.3.2 Penataan Ruang

a. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Penyelenggaraan urusan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan harus memperhatikan sumber daya manusia, dan perlindungan fungsi ruang serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dengan adanya penataan ruang yang baik diharapkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah dapat lebih terkendali dan berwawasan lingkungan.

Untuk dapat menjaga konsistensi dan perwujudan dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, maka perlu dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada terhadap rencana tata ruang wilayahnya.

Hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.78 Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022

FUNGSI KAWASAN		Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai	
LINDUNG	Kawasan Hutan Lindung	1653.78	-	270.09	1923.87
	Kawasan Cagar Budaya	225.71	-	64.85	290.56
	Kawasan Resapan Air	2388.10	-	47.60	2435.70
	Sempadan Pantai	253.75	-	83.41	337.16
	Sempadan Sungai	1618.36	-	630.43	2248.79
	Jumlah Lindung (Ha)	6139.70	-	1096.38	7236.08
	% terhadap Kawasan Lindung	84,85		15,15	100,00
	% terhadap Kabupaten Bantul	12,42		2,22	14,64
BUDIDAYA	Kawasan Peruntukan Industri	895.98	611.81	304.93	1812.72
	Kawasan Peruntukan Pariwisata	701.36	-	-	701.36
	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	8096.93	1930.02	79.97	10106.92
	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	848.07	230.64	311.92	1390.63

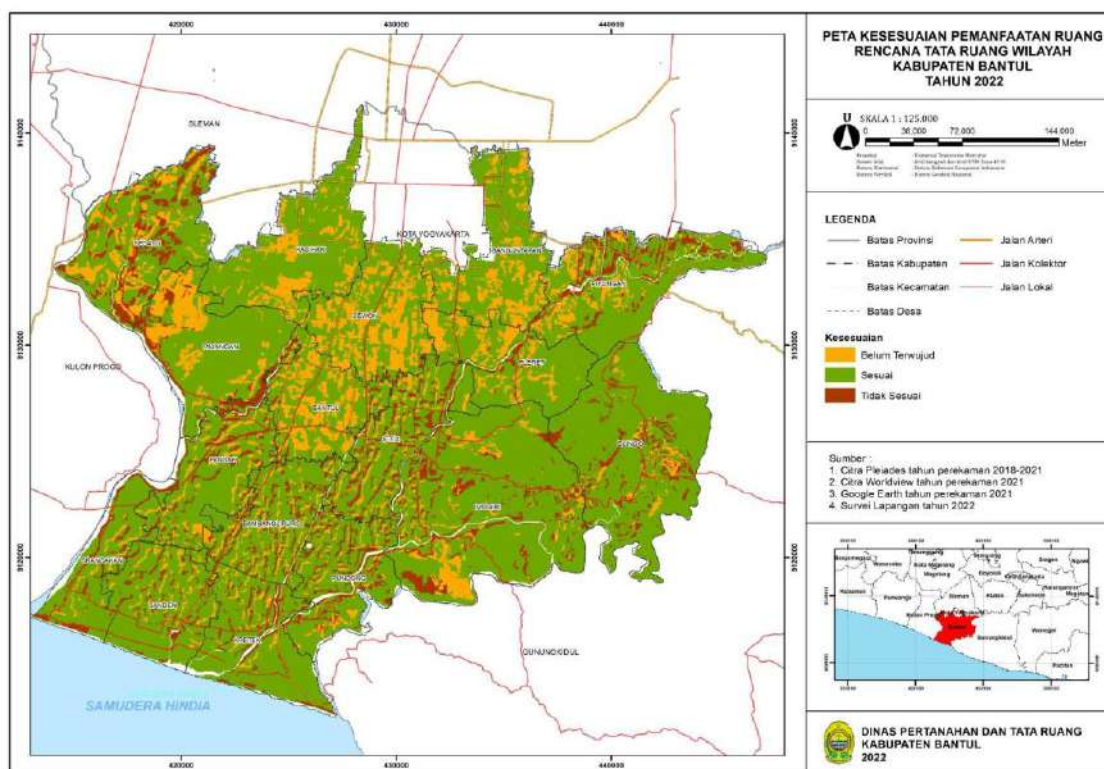
FUNGSI KAWASAN		Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai	
	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	8677.77	3570.63		12248.40
	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	7326.11	871.08	2725.52	10922.71
	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	4494.04	366.97	163.40	5024.41
	Jumlah Budidaya (Ha)	31040.26	7581.15	3585.74	42207.15
	% terhadap Kawasan Budidaya	73,54	17,96	8,50	100,00
	% terhadap Kabupaten Bantul	62,78	15,33	7,25	86,38
TOTAL (Ha)		37179.96	7581.15	4682.12	49443.23
% terhadap Kabupaten Bantul		75,20	15,33	9,47	100,00

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2023

Tingkat kesesuaian pada tabel di atas diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu sesuai, belum sesuai dan tidak sesuai dengan arahan kebijakan RTRW. Penggunaan lahan yang sama dengan arahan kebijakan RTRW masuk klasifikasi “sesuai”. Penggunaan lahan yang tidak sama dengan arahan kebijakan RTRW namun berpotensi untuk dibangun dan dikembangkan sesuai arahan RTRW masuk klasifikasi “belum sesuai”. Penggunaan lahan yang tidak sama dengan arahan kebijakan RTRW dan sulit atau tidak dimungkinkan untuk diubah sesuai arahan kebijakan RTRW masuk dalam klasifikasi “tidak sesuai”.

Evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan pola ruang diperoleh hasil bahwa tingkat kesesuaian pola ruang Kabupaten Bantul tahun 2022 dengan kriteria ‘sesuai’ sebesar 75,20%; ‘belum sesuai’ sebesar 15,33%; dan ‘tidak sesuai’ sebesar 9,47%.

Berdasarkan penilaian kesesuaian pola ruang tersebut, maka tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Bantul menurut klasifikasi dari Permen ATR/Kepala BPN No. 9/2017 secara umum berada pada klasifikasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas (50% - 80%), artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.34 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.79 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,45	72,50	75,01	75,50	75,20

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2023

Persentase pemanfaatan ruang dari 2018-2021 mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 75,20. Penyelenggaraan urusan penataan ruang diampu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran daerah berupa Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada tahun 2022 mempunyai target 75,03% sehingga c indikator telah tercapai dengan realisasi 75,20%.

Selanjutnya Indikator Kinerja Urusan Perangkat Daerah Urusan Penataan Ruang adalah Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah

memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk mengukur perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Upaya pencapaian sasaran strategis kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

b. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Bantul sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.80 Produk Perencanaan dan Peraturan Tata Ruang di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2022

No.	Produk Perencanaan Tata Ruang
1.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
2.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon 2018-2038
3.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan 2018-2038
4.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang
5.	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sejumlah 17 Kapanewon : RDTR dan PZ Kapanewon Pajangan, Imogiri, Pleret, Pandak, dan Sedayu (2014) RDTR dan PZ Kapanewon Piyungan, dan Pantai Selatan (Sanden, Kretek, Srandakan) (2015) RDTR dan PZ Kapanewon Pundong dan Jetis (2016) RDTR dan PZ Kapanewon Bambanglipuro, Dlingo,(2017) Raperda RDTR dan PZ Piyungan, Pansela, Jetis, Pundong (2017) RDTR dan PZ Kapanewon Sewon dan Kasihan (2018) RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaaan (2018) Draft Raperbup Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di 4 kawasan (Pansela, Perkotaan, Bantul Barat, Bantul Timur) (2020) RDTR dan PZ Perkotaan dan Pansela (2022)
6.	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) : RTBL Kawasan Srandakan, Kawasan Bantul Kota , Kawasan Sanden (2018) RTBL Zona pengembangan Kawasan Parangtritis II (2018) RTBL Jetis, Kawasan Industri Kasihan, Watu Gilang, Depok, Parangtritis (2019) RTBL Segoroyoso, RTBL Imogiri, Masjid Pathok Negero Babadan, Masjid Pathok Negero Dongkelan (2020) RTBL Perbukitan Parangtritis (2021) RTBL Kawasan Karangkitri (2022)
7.	Kajian KLHS RTRW dan review Naskah Akademik RTRW (2018) Dokumen Draft Peninjauan Kembali RTRW (2020) Dokumen Permohonan Persetujuan Substansi reviu RTRW ke Kementerian ATR/BPN dan lampirannya (2021)
8.	Masterplan, Rencana Induk dan DED : Desain Citra Kota Bantul, Jalan Jendral Sudirman (2017) Masterplan dan DED Gerbang masuk Kabupaten Bantul dan Kawasan Lindung Hargodumilah (2018) Masterplan Watu Amben (2019)

No.	Produk Perencanaan Tata Ruang
	Rencana Induk SRS Samas-Parangtritis (2022)

Sumber: Bappeda dan DPTR Kabupaten Bantul, 2023

Perkembangan terakhir demi efektivitas dan efisiensi penyusunan dokumen RDTR di kabupaten Bantul dibagi menjadi 4 (empat), yaitu RDTR Perkotaan, RTDR Pansela, RDTR Bantul Barat, dan RDTR Bantul Timur.

- Tahun 2020 dokumen RDTR yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah adalah RDTR dan PZ BWP Sewon dan RDTR dan PZ BWP Kasihan, yang kemudian akan digabung dalam RDTR dan PZ BWP Perkotaan. RDTR Perkotaan ditargetkan selesai tahun 2023.
- RDTR dan PZ BWP Pansela ditargetkan selesai pada tahun 2023.
- RDTR dan PZ BWP Bantul Barat dan RDTR dan PZ BWP Bantul Timur yang awalnya merupakan RDTR dan PZ BWP Perdesaan ditargetkan selesai pada tahun 2024.

Proses Review Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 saat ini telah mengajukan Permohonan Persetujuan Substansi ke Kementerian ATR/BPN.

Penyusunan RDTR Pansela pada saat sekarang adalah revisi Pra Locket di Kementerian ATR/BPN. Setelah revisi Pra Locket selesai kemudian masuk resmi di Locket dan dilanjutkan Pembahasan Lintas Sektor. Kemudian setelah Pembahasan Lintas Sektor selesai mendapatkan Persetujuan Substansi dan penetapan melalui Peraturan Bupati pada Desember 2023.

c. Pelaksanaan Tata Ruang

Dalam rangka mengefektifkan pemanfaatan ruang, mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan, serta menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi dibutuhkan suatu bentuk pelaksanaan penataan ruang dalam bentuk rekomendasi atau izin untuk melaksanakan suatu kegiatan di suatu lokasi dengan mempertimbangkan kesesuaian peruntukan lokasi tersebut terhadap perencanaan peruntukan awalnya.

Kegiatan pelaksanaan penataan ruang melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2021 telah masuk permohonan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan tata ruang untuk kegiatan berusaha maupun kegiatan non berusaha sejumlah 1.398 permohonan. Dari jumlah permohonan tersebut sejumlah 1.229 telah diizinkan dengan dikeluarkannya rekomendasi dan 169 tidak diizinkan karena tidak memenuhi dengan persyaratan yang ada. Permohonan rekomendasi yang tidak diizinkan tersebut karena lokasi yang dimohonkan melanggar aturan rencana penggunaan ruang atau dokumen berkas permohonan yang tidak dapat dilengkapi pemohon.

d. Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang

Kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan berasal dari penilaian KKPR/Pernyataan Mandiri (OSS RBA), penilaian kesesuaian aspek tata ruang yang telah dikeluarkan DPTR, Pelimpahan dari DPTR DIY dan Data Indikasi Alih Fungsi Lahan dari Bappeda Kabupaten Bantul. Penilaian dilakukan dengan melakukan validasi pembangunan di lapangan terkait dengan pemanfaatan ruang dan ketentuan perizinan teknis dari fungsi zona. Selain itu, fasilitasi pengendalian dan pengawasan tata ruang dilakukan dari aduan masyarakat. Untuk kegiatan terkait OSS RBA KKPR sudah dilakukan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian di 115 lokasi yang dimohonkan secara keseluruhan. Karena selain keterbatasan sumber daya tetapi juga data alamat pemohon tidak lengkap dan tanpa titik koordinat. Hal ini disebabkan karena proses pengurusan OSS RBA KKPR dilakukan menggunakan aplikasi yang diisi secara online oleh pemohon dan terbit otomatis. Dari program ini mendukung pencapaian target kinerja berupa persentase cakupan pengendalian tata ruang. Target yang ditetapkan tahun 2022 dan merupakan target akhir Renstra adalah 80% dengan realisasi 95%. Pencapaian target kinerja tahun 2022 dengan rincian yang dilakukan inspeksi pengendalian dan pengawasan di lapangan sejumlah 565 lokasi. Dari hasil inspeksi tersebut terdapat 16 titik lokasi yang terindikasi pelanggaran dan ditindaklanjuti dengan surat peringatan.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Penanganan Kawasan Kumuh

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalannya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi dengan luas 79,58 Ha.

Selanjutnya untuk mewujudkan nol persen kawasan kumuh, pada tahun 2020 dilakukan peninjauan kembali kondisi kekumuhan. Berdasarkan hasil *review* ditetapkan Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 193 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bantul Lokasi Kawasan kumuh ada di 31 Kalurahan pada 7 Kapanewon dengan luas 330,26 Ha.

SK Kumuh yang lama mencakup 4 kapanewon Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu Banguntapan, Kasihan, Sewon, dan Bantul. Sedangkan SK Kumuh yang baru meliputi 7 (tujuh) kapanewon, yaitu Sewon, Kasihan, Banguntapan, Bantul, Sedayu, Pajangan, dan Piyungan. Penambahan 3 kapanewon dengan alasan pada Kapanewon Sedayu, Pajangan, dan Piyungan merupakan kawasan yang sangat pesat perkembangan jumlah penduduk, aktivitas industri, serta perumahan maupun kawasan permukimannya.

Tabel 2.81 Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
1	Pajangan	31,15	12	Dukuh, Benyo, Ngincep
2	Bantul	73,54	34	Bantul Warung, Badegan, Geblag, Serayu, Soropaten, Gemahan, Deresan, Bogorin, Cepoko, Priyan, Kweden, Taskombang, Serut, Bolon, Neco

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
3	Banguntapan	75,75	43	Plumbon – Karangbendo, Wiyoro, Pamotan, Bodon, Singosaren 3, Grojogan, Dladan, Kragilan, Nglaren, Salakan, Sampangan
4	Piyungan	21,58	10	Ngablak, Wanujaya Kidul, Sandeyan
5	Sewon	59,74	28	Sawahan, Kaliputih, Banyon, Semail, Randubelang, Ngireng Ireng, Geneng, Jaranan, Pelemsewu, Glugo, Glondong, Cabean, Pandes, Ngentak
6	Kasihan	40,94	17	Kasongan, Jogonalan Lor, Jogonalan Kidul, Kembaran Jetis, Brajan, Kasihan, Ngewotan/Janten
7	Sedayu	27,56	15	Sungapan Dukuh, Bakal Dukuh, Sukoharjo, Pereng Wetan, Jaten Plawonan, Watu
Total		330,26	159	

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Skema pengentasan permukiman kumuh tertuang dalam dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dan direncanakan dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Sinergi penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul dilaksanakan baik oleh pusat, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kalurahan sesuai kewenangan. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, 10– 15 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan sampai dengan 10 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selengkapnya, data penanganan Kawasan kumuh Tahun 2021 dan 2022 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82 Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022

No	Kapanewon	Jumlah RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Penanganan Kawasan Kumuh (Ha)		Total Penanganan (Ha)	Kawasan Kumuh Belum Tertangani (Ha)
				2021	2022		
1	Banguntapan	43	75,75	9,17	6,58	15,75	50,95
2	Bantul	34	73,54	55,54	3,24	58,78	14,76
3	Kasihan	17	40,94	19,28	0	19,28	26,44
4	Pajangan	12	31,15	-	9,11	9,11	22,04
5	Piyungan	10	21,58	-	3,72	3,72	17,86
6	Sedayu	15	27,56	13,85	0,29	14,14	13,42
7	Sewon	28	59,74	24,46	2,48	26,94	32,8
Jumlah		159	330,26	122,3	25,42	147,72	178,27

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Sedangkan khusus Kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul, sampai dengan Tahun 2022 telah ditangani seluas 102,10 Ha dari total Kawasan kumuh di bawah 10 Ha 196,19 Ha atau sekitar 52,04%. Penanganan Kawasan kumuh di bawah 10 Ha tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.83 Penanganan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha Tahun 2021-2022

No	Kapanewon	Jumlah RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Penanganan Kawasan Kumuh (Ha)			Kawasan Kumuh Belum Tertangani (Ha)
				2021	2022	Total Penanganan	
1	Banguntapan	11	23,23	7,3	6,58	13,88	9,35
2	Bantul	32	60,9	42,9	3,24	46,14	14,76
3	Kasihan	7	8,52	2,32	0	2,32	6,20
4	Pajangan	4	7,1	-	0	0	7,10
5	Piyungan	10	21,58	-	0	0	21,58
6	Sedayu	15	27,56	13,85	0,29	14,14	13,42
7	Sewon	23	47,3	23,14	2,00	25,14	22,16
Jumlah		102	196,19	89,51	12,59	102,10	94,06

Sumber: DPUPKP, Bappeda, 2023 diolah

Tabel 2.84 Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani di Kabupaten Bantul Tahun 2018 -2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Luas kawasan kumuh(ha)	79,58	79,58	79,58	330,26	330,26
Luas kawasan kumuh	73,26	73,60	73,60	122,30	147,72

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
yang tertangani (ha)					
Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	92,06	92,49	92,49	37,03	44,72
Dasar Peraturan	SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016	SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016	SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016	SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021	SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

b. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian secara teknis maupun non teknis. Kriteria atau persyaratan yang dimaksud, yaitu keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni

Tabel 2-86 Peningkatan Kualitas RTLH di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Sumber Anggaran RTLH	2018	2019	2020	2021	2022
BSPS (Unit)	959	1365	1.577	925	35
DAK (Unit)	150	176	139	127	132
APBD I (Unit)	517	443	-	368	200
APBD II (Unit)	171	83	-	-	150
Total	1.797	2.067	1.716	1.420	517

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor 056/PERKIM-648/2020 tentang Penetapan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul terdapat 6.381 unit RTLH di Kabupaten Bantul. Berbagai upaya dalam rangka penanganan dan peningkatan kualitas RTLH telah dilakukan. Pada tahun 2022 sebanyak 3.746 unit RTLH atau 58,70% dari total 6.381 unit telah ditangani baik melalui pemterintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

Data penanganan RTLH Tahun 2020-2022 di Kabupaten Bantul tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.85 Data Penanganan RTLH Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2022

No	Kapanewon	RTLH	Penanganan			Total Penanganan RTLH
			2020	2021	2022	
1	Bambanglipuro	302	80	56	32	168

No	Kapanewon	RTLH	Penanganan			Total Penanganan RTLH
			2020	2021	2022	
2	Banguntapan	294	47	32	21	100
3	Bantul	263	71	126	35	232
4	Dlingo	347	300	96	34	430
5	Imogiri	472	83	221	72	376
6	Jetis	472	82	54	49	185
7	Kasihan	261	0	141	17	158
8	Kretek	305	60	8	8	76
9	Pajangan	717	117	64	22	203
10	Pandak	296	83	68	77	228
11	Piyungan	186	124	58	1	183
12	Pleret	415	212	142	82	438
13	Pundong	217	90	21	60	171
14	Sanden	392	85	38	19	142
15	Sedayu	523	164	111	23	298
16	Sewon	373	60	175	17	252
17	Srandakan	546	57	9	40	106
Jumlah		6.381	1.715	1.420	609	3.746

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

c. Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan Permukiman.

Penyediaan PSU pada perumahan di Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa prasarana lingkungan perumahan meliputi jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air hujan

(drainase dan tempat pembuangan sampah. Sarana lingkungan perumahan meliputi fasilitas sarana Pendidikan, sarana Kesehatan, sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana rekreasi dan olahraga, sarana peribadatan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan sarana parkir. Sedangkan utilitas umum perumahan meliputi jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi dan halte, sarana pemadam kebakaran dan sarana penerangan jalan umum.

Perumahan di Kabupaten Bantul yang telah terfasilitasi PSU Tahun 2020 - 2022 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.86 Data Perumahan Terfasilitasi PSU di Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2022

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Jumlah Perumahan (unit)	265	279	192
2	Luas perumahan (Ha)	3.033.255	3.291.449	3.444.237
3	Rumah dengan Akses Air Minum (unit)	17.791	19.634	20.777
4	Rumah dengan Akses Jalan Lingkungan (unit)	17.791	19.634	20.777
5	Rumah dengan Akses Sanitasi (unit)	17.791	19.634	20.777
6	Rumah dengan Akses PJU (unit)	17.791	19.634	20.777

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

d. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Perumahan Rakyat. Capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Bantul Tahun 2019, 2020 dan 2021 telah memenuhi 100%, disajikan sebagai berikut.

Tabel 2-89 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR (Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018)	TARGET	REALISASI			
				2019	2020	2021	2022
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	100%	$\frac{110}{110} \times 100\% = 100\%$	$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$ (tidak terjadi bencana)	$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$ (tidak terjadi bencana)
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	100%	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$ (baru ada pendataan tahun 2022, sehingga belum dilaksanakan fisiknya)

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2023
DPUPKP, 2023

2.1.3.1.5 Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.1.3.1.5.1 Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengatur standar pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan dari dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

a. Penegakan Perda

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas Penegakan Perda melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi serta melaksanakan patroli wilayah untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Operasi Yustisi dan non yustisi dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah untuk meminimalisir penyakit masyarakat dan pelanggaran peraturan daerah dengan tujuan akhir menurunnya Pelanggaran Perda.

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan penyuluhan pencegahan praktek prostitusi, pencegahan miras dan pemberantasan cukai ilegal.

Dalam rangka mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran Perda dilaksanakan Operasi Penegakan Perda. Rekapitulasi hasil operasi penegakan Perda dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87 Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Tindakan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Berijin	196	77	6	0	0
2	Proses Hukum	80	77	28	7	11
3	Pembinaan	173	191	86	418	70
4	Panggilan PPNS	11	25	11	6	105
5	Bukti Pelanggaran Perda	7	8	41	0	62
6	Membuat Surat Pernyataan	8	4	18	154	21
7	Pembongkaran Pribadi	n/a	0	0	0	10
8	Tidak Memenuhi Panggilan	10	4	6	10	20
9	Tidak Ditemukan Barang Bukti	n/a	0	0	0	0
10	Pembubaran Kegiatan	n/a	n/a	n/a	18	0
11	Penutupan Sementara	n/a	n/a	n/a	22	0
Jumlah		485	406	196	635	299

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2023

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mendapatkan hasil operasi yustisi dan non yustisi sebanyak 11 kali proses hukum yang selanjutnya dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Bantul. Selain itu dilakukan pembinaan sebanyak 70 kali kegiatan, pemanggilan oleh PPNS sebanyak 105 kali, tidak memenuhi panggilan PPNS sebanyak 20 kali, ditemukan bukti pelanggaran perda sebanyak 62 bukti, membuat surat pernyataan sebanyak 21 kali, pembongkaran baliho secara mandiri sebanyak 10 kali kegiatan. Untuk kegiatan terkait perizinan, Satpol PP tidak menemukan pelanggaran, pembubaran dan penutupan sementara tidak ditemukan karena penyesuaian kondisi PPKM pandemi covid-19 di Kabupaten Bantul telah menurun. Data pada setiap tindakan tahun 2022

sekaligus menunjukkan jumlah total temuan/ kasus, karena setiap terjadi kasus langsung dilakukan tindakan sampai kasus dinyatakan selesai.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Berikut adalah data PPNS di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.88 Jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Bantul
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PPNS	25	25	25	20	16

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Bantul dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan. Jumlah PPNS pada tahun 2022 sebanyak 16 orang, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena adanya PPNS yang telah memasuki masa purna tugas, selain itu belum adanya pengiriman personil untuk mengikuti diklat PPNS membuat jumlahnya tidak bertambah. Sampai dengan saat ini belum ada landasan hukum yang mengatur jumlah kebutuhan PPNS.

Pola Penegakan Perda terdiri dari penyelidikan dan penyidikan, sebagai berikut:

a. Penyelidikan

- 1) Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
- 2) PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau

pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah).

- 3) Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.

b. Penyidikan

Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Pelanggaran ketentuan peraturan daerah yang diketahui dari:

- 1) Laporan dari setiap orang
- 2) Laporan dari petugas

Tertangkap tangan baik oleh masyarakat / diketahui langsung oleh PPNS.

Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

Dalam hal tertangkap tangan, setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan:

- 1) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- 2) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan.
- 3) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran peraturan daerah.

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.89 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Bantul
Tahun 2018-2022

Tindakan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	n/a	n/a	32	18	19
Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi	n/a	n/a	32	25	25
Persentase Perda yang ditegakkan	95,6%	66%	100%	72%	76%

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2023

Hasil persentase perda dan perkada yang ditegakkan di Kabupaten Bantul didapatkan dari jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang ditegakkan terhadap jumlah peraturan Daerah yang memuat sanksi. Realisasi pada tahun 2022 adalah 100% dengan rincian jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan sebanyak 19 dari jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi sebanyak 25. Persentase yang didapatkan sejumlah 76% dengan target tahun 2022 adalah 76%, hasil ini meningkat dibandingkan dengan hasil persentase pada tahun sebelumnya.

b. Peningkatan Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini dilaksanakan dengan menjalin kerja sama lintas sektoral yang intensif dan diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen, serta peningkatan kinerja pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah penertiban PKL, penertiban Anak Jalanan (Anjal), dan menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk.

Tabel 2.90 Jumlah Sasaran Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)
di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pedagang Kaki Lima (PKL)	48	130	27	149	20
2	Anak Jalanan (Anjal)	41	49	36	40	18
3	Aduan	130	80	101	124	165
Total		219	259	164	313	203

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2023

Jumlah kegiatan dalam upaya penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) tahun 2022 sebanyak 203 kasus dengan

rincian penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 165 kali, penertiban Anak Jalanan (Anjal) 18 kegiatan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 20 kali kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kegiatan penertiban anjal dilakukan dengan bersama Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Anjal yang terjaring diberikan pembinaan berupa pengarahan.

Tabel 2.91 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tindakan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2023

Capaian kinerja dalam penyelesaian pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) oleh Satpol PP Kabupaten Bantul tahun 2022 menunjukkan hasil yang baik dengan capaian 100%. Hasil ini merupakan capaian dari program yang telah dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat dengan target penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL), kegiatan patroli Anak Jalanan (Anjal), dan penanganan aduan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bantul.

c. Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

Tabel 2.92 Rasio Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Jumlah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Petugas Linmas	5.501	5.501	6.522	6.562	6.575
2	Rukun Tetangga (RT)	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775
Rasio Jumlah Petugas Linmas		95.3%	95,3 %	112,9%	113,6%	113,8%

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2023

Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sebanyak 6.575 orang, mengalami penambahan anggota sebanyak 13 orang dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya rekrutmen anggota dari Kalurahan dengan menyesuaikan kebutuhan setiap rukun tetangga (RT) dengan rasio 113,8%.

d. Kelompok Jagawarga

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendorong/menggerakkan prakarsa masyarakat melalui pranata sosial dalam upaya menggali, menjaga dan menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat; melakukan mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat dan melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Indikator program ini adalah persentase pembentukan kelompok jagawarga. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di pedukuhan oleh Satpol PP, namun demikian terdapat beberapa dusun yang membentuk kelompok jagawarga secara mandiri.

Tabel 2.93 Persentase Kelompok Jagawarga yang terbentuk di Kabupaten Bantul
Tahun 2020-2022

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Jumlah Kelompok Jagawarga yang terbentuk	279	358	648
2	Jumlah Dusun	933	933	933
3	Persentase Kelompok Jagawarga yang terbentuk	29,90%	38,37%	69,45%

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Bantul dan Satpol PP Kabupaten Bantul, 2023

Pengampu kegiatan pembentukan Jagawarga di Kabupaten Bantul diawali oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2021. Sesuai dengan Peraturan Gubernur No 28 Tahun 2021 tentang Jagawarga, tahun 2022 diampu oleh Satpol PP. Dari anggaran yang didanai oleh Dana Keistimewaan DIY, Satpol PP melakukan pembinaan kelompok Jagawarga sebanyak 25 dusun dan melakukan pengukuhan oleh Bupati Bantul. Kelompok Jagawarga yang sudah terbentuk di Kabupaten

Bantul sebanyak 648 dusun dari jumlah keseluruhan 933 dusun, dengan persentase sebesar 69,45%.

2.1.3.1.5.2 Sub Urusan Bencana Daerah

Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, yaitu (1) pelayanan informasi rawan bencana; (2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan (3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pelayanan Informasi rawan bencana diwujudkan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang menerangkan bahwa terdapat 9 (Sembilan) ancaman bencana dengan berbagai tingkat risiko.

Tabel 2.94 Capaian Nilai Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Indeks Risiko Bencana (IRB)	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bantul	187,20	187,20	187,20	157,30	167,97
2	Kulon Progo	203,2	203,2	203,2	180,8	157,94
3	Gunungkidul	157,6	157,6	157,6	142,09	122,42
4	Sleman	90,17	83,72	83,72	78,96	80,01
5	Kota Yogyakarta	73	72,86	72,86	72,57	69,46
6	DIY	142,24	140,92	140,92	126,34	119,56

Sumber: BNPB, 2023

Nilai indeks risiko bencana tahun 2022 berdasarkan Buku IRBI tahun 2022 adalah 167,97 yang tergolong kategori tinggi. Nilai IRB DIY tahun 2022 sebesar 119,56 dengan kategori sedang. Terjadi kenaikan indeks risiko sebesar 6,78% dari tahun 2021. Kenaikan ini disebabkan kenaikan frekuensi bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan kenaikan bencana khususnya longsor.

Komponen perhitungan selain dari bahaya (*hazzard*) adalah kapasitas yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Berdasarkan penilaian terhadap 71 Indikator, diperoleh nilai IKD Kabupaten Bantul tahun 2022

sebesar 0,5. Nilai ini masuk dalam kategori sedang. Hasil pengukuran nilai IKD tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.95 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Prioritas	Nilai
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,93
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,77
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,69
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,63
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,58
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,36
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0,5 (Sedang)

Sumber: BPBD, 2023

Berdasarkan hasil pengukuran IKD tersebut, terdapat 2 Prioritas yang masih harus ditingkatkan karena masuk kategori rendah yaitu: Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, berupa serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana).

Tabel 2.96 Capaian Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	13	20	20	27	33
2	Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana)	28	35	35	39	42

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2023

Jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul sebanyak 12 atau 0,61% dari 1.971 satuan pendidikan. Percepatan pengembangan SPAB akan dilaksanakan mulai tahun 2024 sebagai amanat Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan melalui pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) SPAB yang melibatkan semua sektor di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Desa Tangguh Bencana yang terbentuk sampai dengan tahun 2022 sebanyak 42 Kalurahan atau mencapai 56% dari 75 Kalurahan di Kabupaten

Bantul. Tahun 2022 dilaksanakan pembentukan 3 Kalurahan tangguh bencana di Kalurahan Argosari, Kalurahan Sitimulyo, dan Kalurahan Murtigading. Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) pada tahun 2022 dilaksanakan di 6 satuan pendidikan yaitu: SLB Mardi Mulyo Kretek, MTSN 4 Bantul, SMKN 1 Pandak, SMAN 1 Dlingo, SMPN 2 Sanden, dan SDN 1 Panggang Bambanglipuro. Pembentukan SPAB dilaksanakan melalui pendanaan APBD Kabupaten, APBD Pemda DIY, dan pembiayaan mandiri sekolah.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, berupa serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Kejadian bencana tahun 2017 -2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.97 Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Ancaman	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Kebakaran	Kali	209	227	130	124	134
2	Banjir	Kali	0	8	0	5	12
3	Tsunami	Kali	0	0	0	0	0
4	Gempa (dirasakan)	Kali	7	6	13	204	153
5	Tanah Longsor	Kali	23	176	85	93	144
6	Kekeringan	Desa	12	26	9	0	0
7	Gelombang Ekstrim	Kali	2	0	1	0	1
8	Cuaca Ekstrim	Kali	22	16	22	83	38
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	Kali	0	0	1	1	1

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2023

Sepanjang tahun 2018-2022 Kabupaten Bantul mencatat kejadian bencana terbesar adalah kejadian kebakaran, tanah longsor, dan cuaca ekstrim yang menyebabkan pohon tumbang dan tanah longsor, dengan trend yang cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Cuaca ekstrim pada tahun 2019 berupa siklon tropis Dahlia dan siklon tropis Savanna yaitu terjadinya peningkatan intensitas hujan, angin puting beliung di Kabupaten Bantul menyebabkan terjadi banjir besar di beberapa wilayah menyebabkan

korban jiwa dan kerusakan sejumlah infrastruktur. Kerugian akibat bencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.98 Kerugian dan Korban Bencana di Kabupaten Bantul 2018-2022

Tahun	Estimasi kerusakan	Jumlah Korban	
		Luka	MD
2018	Rp 2.667.930.000	7	4
2019	Rp 95.675.921.376	7	7
2020	Rp 14.576.944.000	4	2
2021	Rp 15.298.418.000	17	0
2022	Rp 23.762.130.000	19	0

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2023

Untuk mengurangi kerugian yang besar akibat terjadinya bencana, diperlukan *Early Warning System* (EWS). EWS yang ada di Kabupaten Bantul meliputi EWS tsunami, banjir dan longsor. EWS Tsunami di Kabupaten Bantul berfungsi sebagai diseminasi informasi dan komando dan sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di BMKG untuk meneruskan informasi peringatan diri bencana tsunami sekaligus komando evakuasi kepada masyarakat di kawasan rawan tsunami. Titik-titik penempatan diseminasi EWS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.99 Togor EWS Kabupaten Bantul

No	Lokasi
	EWS Tsunami
1	Padukuhan Ngentak Kalurahan Poncosari, Srandakan
2	TPR Samas Kalurahan Srigading, Sanden
3	Pos SAR Parangtritis, Kretek/Paranghargo
4	Padukuhan Cangkring, Kalurahan Poncosari, Srandakan
5	Padukuhan Muneng Kalurahan Tirtohargo, Kretek
6	Padukuhan Depok Kalurahan Parangtritis, Kretek
7	Padukuhan Mancingan Kalurahan Parangtritis, Kretek
8	Padukuhan Parangkusumo Kalurahan Parangtritis, Kretek
9	Padukuhan Babakan Kalurahan Poncosari, Srandakan
10	Masjid Pranasakti Padukuhan Ngepet Kalurahan Srigading, Sanden
11	Padukuhan Mancingan Belakang Pendopo Parangtritis, Kretek
12	Masjid Al-Fajar, Ngentak, Poncosari, Srandakan
13	Masjid Kuwatul Islam, Kuwaru, Poncosari, Srandakan
14	Masjid Makmur, Babakan Kalurahan Poncosari, Srandakan
15	Masjid Sabillil Huda, Bondowaluh, Poncosari, Srandakan
16	Masjid Singgelo, Singgelo, Poncosari, Srandakan
17	Masjid Baiturrahman, Krajan, Poncosari, Srandakan
18	Masjid Baitur Rohman, Demangan, Gadingsari, Sanden
19	Masjid Bismillahinur, Wonorejo, Gadingsari, Sanden
20	Masjid An-Nur Era, Patehan, Gadingsari, Sanden
21	Masjid Wonoroto, Gadingsari, Sanden
22	Masjid Al-Haadti, Gadingsari, Sanden
23	Masjid Al-Muttaqin, Ngepet, Srigading, Sanden
24	Masjid Al-Huda, Tegalrejo, Srigading, Sanden

No	Lokasi
25	Masjid Al-Mujahidin, Bros Muneng, Tirtohargo, Kretek
26	Masjid Nurul Hidayah, Gegunung, Tirtohargo, Kretek
	EWS Banjir
1.	Jembatan Dzikrul Ghafilin, Pajangan
2.	Jembatan Benyo. Sendangsari
3.	Jembatan Kiringan,
4.	Jembatan Kedungjati, Imogiri
5.	Jembatan Gayam, Segoroyoso
	EWS Longsor
1.	Wonolelo
2.	Srimartani
3.	Selopamioro
4.	Muntuk

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

2.1.3.1.5.3 Sub Urusan Kebakaran

Penanganan kebakaran, mengacu Permendagri No 114 Tahun 2018 yaitu SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, berupa layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran; layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan wilayah dengan karakteristik memiliki kesamaan kebutuhan sistem proteksi kebakaran dalam batas wilayah tertentu. Layanan WMK ditentukan oleh *response time* yang tidak boleh lebih dari 15 menit dengan radius daerah layanan tidak lebih dari 7,25 km. Kinerja pelayanan sub urusan kebakaran dinyatakan dalam cakupan pelayanan dan tingkat waktu tanggap (*response time rate*). Cakupan pelayanan kebakaran dinyatakan dengan perbandingan jumlah penanganan kejadian di wilayah Kabupaten Bantul terhadap jumlah kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap 15 menit terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK. Cakupan pelayanan Sub Urusan Kebakaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.100 Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	4	7	7	7	7
2	Mobil Damkar yang dimiliki (unit)	8	8	8	8	8
3	Luas WMK (ha)	N/A	176,62	176,62	176,62	176,62
	Jumlah kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul	175	193	114	123	134
	Jumlah penanganan kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul	175	193	114	123	134
4.	Cakupan pelayanan kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2023

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap 15 menit terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) Sub Urusan Kebakaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.101 Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (a)	175	203	114	123	126
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK (b)	175	193	114	123	126
3	Jumlah kebakaran di luar jangkauan WMK (c)	34	34	16	6	8
4	Jumlah total terjadi kebakaran (b+c)	209	227	130	129	134
5	Tingkat waktu tanggap (a/b)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2023

Cakupan pelayanan kebakaran dan Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) sangat tergantung dengan jumlah mobil pemadam kebakaran, personil dan peralatan pendukung yang dimiliki. Tahun 2022 Kabupaten Bantul memiliki 7 sektor Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.102 Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Bantul

No	Nama Sektor	Alamat
1.	Sektor Bantul	Sumuran, Palbapang, Bantul
2.	Sektor Kasihan	Kembaran, Tamantirto, Kasihan
3.	Sektor Banguntapan	Klakaran, Baturetno, Banguntapan
4.	Sektor Imogiri	Manggung, Wukirsari, Imogiri
5.	Sektor Sedayu	Semampir, Argorejo, Sedayu

No	Nama Sektor	Alamat
6.	Sektor Pundong	Piring, Srihardono, Pundong
7.	Sektor Piyungan	Kabregan, Srimulyo, Piyungan

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2023



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Gambar 2.35 Peta Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Bantul Tahun 2022

Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Capaian SPM bidang Ketentraman,

Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2020, 2021, dan 2022, disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.103 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0	100%	0	0	100 %	600	600	100%
		Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	32	32	100%	18	18	100%	19	19	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	826.056	826.056	100%	897.306	897.306	100%	100%	70,15%	70,15%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	954.706	954.706	100%	956.513	956.513	100%	964.245	964.245	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.159	3.159	100%	56.696	56.696	100%	1.852	1.852	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	130	130	100%	390	390	100%	285	285	100%

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Bantul, 2023

Capaian SPM tahun 2020 dan 2021 telah mencapai 100%, sedangkan tahun 2022 dari 5 (lima) jenis layanan dengan 6 indikator, 5 indikator mencapai 100%. Indikator layanan jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada jenis layanan pelayanan informasi rawan bencana terealisasi 70,15%. Faktor penghambat capaian jenis layanan ini adalah ada informasi bencana yang belum tersampaikan ke seluruh warga yaitu gempa bumi, abrasi, dan kekeringan. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.104 Jumlah penduduk di kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana

No.	Jenis Ancaman Bencana	Target	Realisasi	Persentase
1	Gempa Bumi	94.878	2.850	3,00
2	Tsunami	24.558	22.733	92,57
3	Banjir	34.735	36.065	103,83
4	Longsor	93.414	93.681	100,29
5	Cuaca Ekstrem	63.369	50.975	80,44
6	Gelombang Ekstrem/ Abrasi	93.460	40.593	43,43
7	Kekeringan	692.936	100	0,01
8	Kebakaran	7.031	7.571	107,68
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	837.734	837.734	100
Rata-rata persentase capaian				70,15

Sumber: BPBD Bantul, 2023

Adapun upaya pemenuhan SPM pada jenis layanan untuk kelompok rentan dilaksanakan dengan:

5. Memberi fasilitasi SPAB di SLB Mardimulyo Kretek,
6. Pembentukan Difabel Siaga Bencana (Difagana),
7. Memberi fasilitasi akreditasi puskesmas aman bencana.

2.1.3.1.6 Sosial

Penyelenggaraan pelayanan urusan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi sosial melalui sumberdaya yang dimiliki.

a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diketahui terdapat 26 jenis PPKS. Namun demikian di Kabupaten Bantul hanya terdapat 25 jenis PPKS karena tidak adanya jenis PPKS Komunitas Adat Terpencil.

Tabel 2.105 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Anak Balita Terlantar	Seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.	74	65	34	31	21
2	Anak Terlantar	Seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.	1.862	1.731	1.475	1.277	574
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena	87	124	121	74	6

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
		melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.					
4	Anak Jalanan	Anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.	14	12	5	6	2
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.	446	450	353	352	539
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.	81	115	114	128	113
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.	81	115	114	205	120
8	Lanjut Usia Terlantar	Seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	8.971	8.085	7.684	7.208	5.363
9	Penyandang Cacat/disabilitas	Mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama	6.324	6.137	6.535	6.264	7.983

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
		dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.					
10	Tuna Susila	Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.	71	46	24	35	9
11	Gelandangan	Orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.	38	35	12	32	26
12	Pengemis	Orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.	25	22	25	21	19
13	Pemulung	Orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.	156	154	66	133	94
14	Korban Minoritas	Kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.	0	0	0	0	n/a
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.	155	151	47	105	41
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan	184	127	103	77	125

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
		untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.					
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.	100	97	21	71	60
18	Korban Trafficking	Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.	2	1	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.	210	229	231	113	232
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.	69	57	30	49	52
21	Korban Bencana Alam	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.	61	21	405	533	222
22	Korban Bencana Sosial	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.	0	100	0	709	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.	3.068	2.991	2.865	2.714	2.667

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
24	Fakir Miskin	Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.	57.022	52.509	50.609	57.299	54.539
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.	1.329	1.319	1.228	1.198	882
26	Komunitas Adat Terpencil	Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.	-	-	-	-	n/a

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2023

a. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

PSKS seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terdiri dari : Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Dunia Usaha. Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.106 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

PSKS	2018	2019	2020	2021	2022
Karang Taruna	93	93	93	93	93
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	17	17	17	17	17
Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	26	43	52	60	62
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	400	400	630	631	400
Taruna Siaga Bencana (Tagana)	119	119	137	137	117
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB)	34	34	47	62	78

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2023

b. Sarana Sosial

Kabupaten Bantul memiliki sarana sosial berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial yang jumlahnya cenderung mengalami peningkatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.107 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Sarana Sosial	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	26	43	52	60	62

Sumber: Dinsos Kabupaten Bantul, 2023

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kabupaten Bantul sejumlah 62 lembaga dengan rincian:

- 32 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- 5 Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- 2 Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas; dan
- 23 Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya

c. Kampung Siaga Bencana (KSB)

Kampung Siaga Bencana yang selanjutnya disebut KSB adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana, tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana (KSB). Berikut ini data jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022:

Tabel 2.108 Jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Bantul
 Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah KSB	6	6	6	6	11

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2023

d. Capaian SPM Bidang Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang sosial. Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bantul telah memenuhi 100%.

Tabel 2.109 Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2021

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Rumus
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial (Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma)	$\frac{200}{200} \times 100\% = 100\%$	$\frac{6535}{6535} \times 100\% = 100\%$	$\frac{6.264}{6.264} \times 100\% = 100\%$	$\frac{8.522}{8.522} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Jumlah yang ditangani}}{\text{Jumlah Target Penangan}}$
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial (Pelayanan dasar bagi anak asuh panti sosial)	$\frac{500}{500} \times 100\% = 100\%$	$\frac{1475}{1475} \times 100\% = 100\%$	$\frac{1.308}{1.308} \times 100\% = 100\%$	$\frac{595}{595} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Jumlah yang ditangani}}{\text{Jumlah Target Penangan}}$
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial (Bimbingan sosial dan bantuan bagi KK miskin non potensial/ke srakat dan lansia rentan sosial ekonomi)	$\frac{200}{200} \times 100\% = 100\%$	$\frac{7684}{7684} \times 100\% = 100\%$	$\frac{7.208}{7.208} \times 100\% = 100\%$	$\frac{5.363}{5.363} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Jumlah yang ditangani}}{\text{Jumlah Target Penangan}}$
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	$\frac{57}{57} \times 100\% = 100\%$	$\frac{40}{40} \times 100\% = 100\%$	$\frac{53}{53} \times 100\% = 100\%$	$\frac{45}{45} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Jumlah yang ditangani}}{\text{Jumlah Target Penangan}}$

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Rumus
	terutama gelandangan dan pengemis di luar panti sosial (Penanganan dan pembinaan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat)					
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota (Penyediaan beras penyangga/ Buffer stock)	$\frac{92}{92} \times 100\% = 100\%$	$\frac{405}{405} \times 100\% = 100\%$	$\frac{1.201}{1.201} \times 100\% = 100\%$	$\frac{750}{750} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Jumlah yang ditangani}}{\text{Jumlah Target Penanganan}}$

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2023

2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Konsep tenaga kerja yang digunakan BPS mengikuti konsep internasional, mengacu pada *The Labour International Concept* yang disarankan oleh *International Labour Organization (ILO)*, bahwa penduduk usia kerja adalah yang telah berumur 15 tahun keatas.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.110 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul
 Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pembilang: Jumlah Angkatan Kerja	577.530	579.229	609.943	595.343	626.283
Penyebut: Jumlah Usia Kerja	781.731	791.533	819.264	830.967	841.939
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	73,87	73,18	74,45	71,64	74,38

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan tabel di atas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul di tahun 2022 sebesar 74,38%, mengalami peningkatan sekitar 2,74% dibandingkan tahun 2021.

b. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentase jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja yaitu perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tahun 2018-2022 di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

 Tabel 2.111 Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kabupaten Bantul
 Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pembilang: Pencari kerja yang ditempatkan	3.230	3.329	2.556	3.033	3.681
Penyebut: Pencari kerja yang terdaftar	3.772	3.828	4.816	5.953	6.762
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	85,63%	86,96%	53,07%	50,95%	54,44%

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2023

Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2022 sebesar 54,44% atau mengalami kenaikan dari tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pencari kerja terdaftar di tahun 2022.

Data penempatan tenaga kerja pada tahun 2021 sebesar 3.033 orang, sedangkan dari program padat karya dengan 169 lokasi, dapat menyerap tenaga kerja sebesar 5.954 orang. Maka total serapan dari kegiatan penempatan tenaga kerja dan program padat karya sebesar 8.987 orang.

Pada tahun 2022 jumlah penempatan tenaga kerja sebesar 3.681 orang, sedangkan dari program padat karya dengan 274 lokasi, dapat menyerap tenaga kerja sebesar 10.140 orang. Pelatihan BLK menyerap tenaga kerja 348 orang serta pelatihan subsidi program 61 orang. Maka total serapan tenaga kerja sebesar 14.230 orang.

Adapun formula perhitungannya adalah jumlah tenaga kerja yang terserap dari program penempatan tenaga kerja meliputi Alokasi Kerja Lokal (AKL), Alokasi Kerja Antar Daerah (AKAD), Alokasi Kerja Antar Negara (AKAN) dan Program Padat Karya.

Padat Karya masuk dalam salah satu unsur pendukung serapan tenaga kerja disebabkan karena pekerja pada program padat karya, merupakan tenaga kerja informal yang rata-rata berprofesi sebagai tukang, asisten tukang, petani, pedagang dan buruh, manakala mereka tidak sedang bekerja pada program padat karya, mereka kembali bekerja pada pekerjaan mereka masing-masing.

Upah Minimum Kabupaten Bantul Tahun 2018- 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.112 Upah Minimum Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Upah Minimum Kabupaten Bantul	1.527.150	1.649.800	1.790.500	1.842.460	1.916.848
Upah Minimum DIY	1.454.154	1.570.923	1.704.608	1.765.000	1.840.916
Dasar	Keputusan Gubernur DIY Nomor 223/KEP/2017	Keputusan Gubernur DIY Nomor 320/KEP/2018	Keputusan Gubernur DIY Nomor 257/KEP/2019	Keputusan Gubernur DIY Nomor 340/KEP/2020	Keputusan Gubernur DIY Nomor 373/KEP/2021

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2023

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bantul Tahun 2022 mengalami kenaikan 4,03 persen dari UMK tahun 2021 sebesar Rp1.842.460,00. Kenaikan ini disebabkan adanya perhitungan terhadap penyesuaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

c. Perlindungan Tenaga Kerja

Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Bantul, dilakukan melalui program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta program peningkatan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan tenaga kerja adalah besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (kepesertaan BPJS ketenagakerjaan) dan besaran penyelesaian sengketa hubungan industrial. Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek tahun 2018-2022 Kabupaten Bantul ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.113 Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Jamsostek di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pembilang: Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek	26.664	28.666	30.686	35.825	40.536
2	Penyebut: Jumlah pekerja/buruh	48.908	49.036	41.140	45.705	49.895
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	54,52%	58,46%	74,56%	78,38%	81,24%

Sumber: Data Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, diolah Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 tingkat kepesertaan Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul meningkat 2,86% dari 78,38% di tahun 2021 menjadi 81,24% di tahun 2022. Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek dan jumlah pekerja buruh diambil dari sistem Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). Kenaikan pekerja/buruh di Kabupaten Bantul yang menjadi peserta Jamsostek/kepesertaan BPJS ketenagakerjaan merupakan hasil dari kegiatan pendampingan dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan(PP), Perjanjian Kerja Bersama(PKB) dan Lembaga Kerja Sama Bipartit yang dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bantul.

Persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial tahun 2018-2022 Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.114 Persentase Sengketa Hubungan Industrial yang terselesaikan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah sengketa	69	37	36	24	31

Jumlah sengketa yang terselesaikan	69	37	36	24	31
Persentase sengketa yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

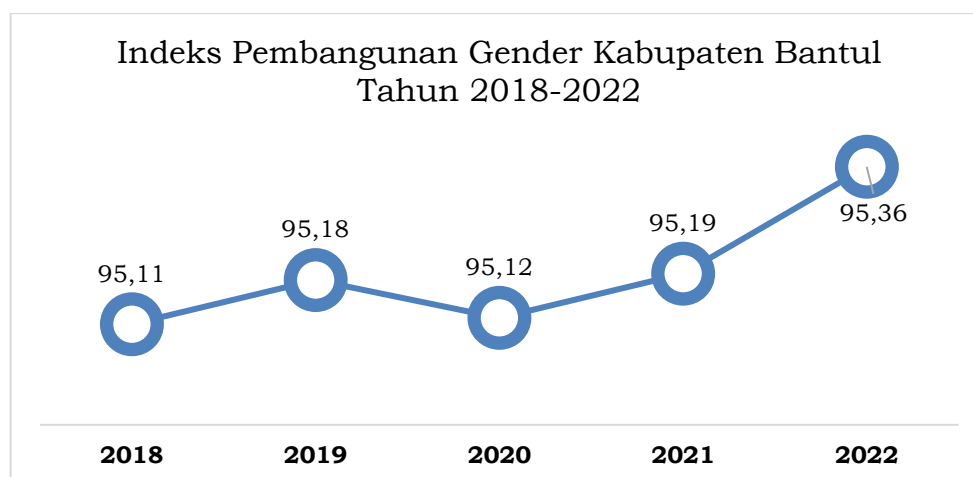
Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2023

Di tahun 2022 persentase sengketa yang ditangani Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencapai 100%. Hal ini karena adanya komitmen dari para mediator, disertai dengan itikad pekerja dan perusahaan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM.



Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2023

Gambar 2.36 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Pada kurun waktu 2018-2022 capaian IPG Kabupaten Bantul cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 IPG Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. IPG Kabupaten Bantul lebih tinggi jika dibandingkan IPG DIY dan IPG Nasional.

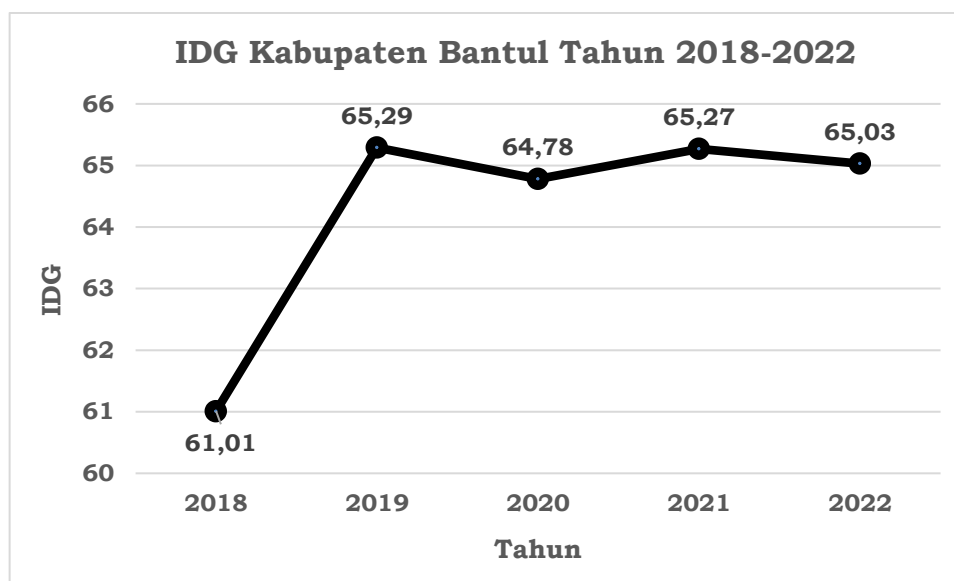
Tabel 2.115 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
IPG Kabupaten Bantul	95,11	95,18	95,12	95,19	95,36
IPG DIY	94,73	94,77	94,80	94,88	94,99
IPG Nasional	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63

Sumber: BPS, 2023

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi.



Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2022

Gambar 2-39 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Pada tahun 2019 Kabupaten Bantul mengalami peningkatan capaian IDG yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang dari nilai 61,01 menjadi 65,29, sementara untuk tahun 2020 capaian IDG Kabupaten Bantul menurun menjadi 64,78 dan meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 65,27. Capaian IDG tahun 2022 turun menjadi 65,03. Penyebab menurunnya IDG tersebut antara lain karena faktor berkurangnya sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi.

IDG Kabupaten Bantul lebih rendah jika dibandingkan IDG DIY dan IDG Nasional, artinya tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan

keputusan dibidang politik dan ekonomi di Kabupaten Bantul lebih rendah dari DIY dan Nasional.

Tabel 2.116 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
IDG Kabupaten Bantul	61,01	65,29	64,78	65,27	65,03
IDG DIY	69,64	73,59	74,73	76,7	76,87
IDG Nasional	72,1	75,24	75,57	76,26	76,59

Sumber: BPS, 2023

c. Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan mengamanatkan bahwa anak dan perempuan berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, seperti kekerasan fisik (*physical violence*), kekerasan psikis (*psychological violence*), pencabulan (*molestation*), perkosaan (*rape*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), eksploitasi (*sexual exploitation*), perdagangan orang (*trafficking*), dan penelantaran (*neglect*). Pada tahun 2022 ini Kabupaten Bantul juga sudah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Meskipun demikian masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.117 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Bentuk Kekerasan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Fisik	94	85	95	72	53
2	Psikis	53	69	45	69	53
3	Perkosaan	3	10	16	9	4
4	Pelecehan Seksual	19	23	20	18	18
5	Pencabulan	21	32	41	70	17
6	Penelantaran	20	9	14	17	15
7	Eksploitasi	0	0	0	0	1
8	<i>Trafficking</i>	0	1	0	0	0
Jumlah		210	229	231	255	161

Sumber: Aplikasi SIGA OUTD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2023

Pada tahun 2022 terdapat 161 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik yang terjadi di lingkup keluarga maupun di luar lingkup keluarga sudah mendapatkan penanganan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Kepolisian Resort Bantul, dan Rumah Sakit. Adapun jenis pelayanan yang diberikan adalah layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Layanan pendampingan korban termasuk di dalamnya pendampingan kesehatan, hukum, psikologi, dan sosial.

Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membuktikan bahwa masih sangat diperlukan upaya:

- Sosialisasi pencegahan perkawinan anak, *parenting*, dan pencegahan *bullying*;
- Optimalisasi peran kader Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tingkat Kalurahan, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPPK) tingkat kabupaten dan tim pendamping korban kekerasan tingkat kapanewon;
- Penegakan peraturan daerah tentang perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan, serta penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di daerah harus dioptimalkan.

Sebanyak 161 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2022, di dalamnya terdapat kasus KDRT dan kasus kekerasan terhadap anak sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.118 Data Kasus Anak Korban Kekerasan Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Rentang Usia (tahun)	2018	2019	2020	2021	2022
0-5	12	18	12	7	17
6-10	20	33	33	27	9
11-17	49	64	69	92	45
Total	81	115	114	126	71

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2023

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak juga mengalami penurunan pada tahun 2022 setelah sebelumnya dari tahun 2018-2021 cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan kasus kekerasan terhadap anak meningkat disebabkan masih lemahnya ketahanan keluarga, dalam hal ini 8 (delapan) fungsi keluarga belum dipahami oleh keluarga, baik ibu, ayah, anak maupun orang dewasa lain dengan hubungan kekerabatan. Komunikasi antar anggota keluarga yang kurang intens, pengasuhan positif yang belum optimal dipahami dan dilakukan oleh orang tua juga menjadi pemicu semakin tingginya angka kekerasan terhadap anak, sehingga pembangunan keluarga menjadi hal yang sangat penting untuk diupayakan oleh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua pihak agar kesadaran orang tua dan/atau orang dewasa untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat diwujudkan.

Tabel 2.119 Jumlah KDRT di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022

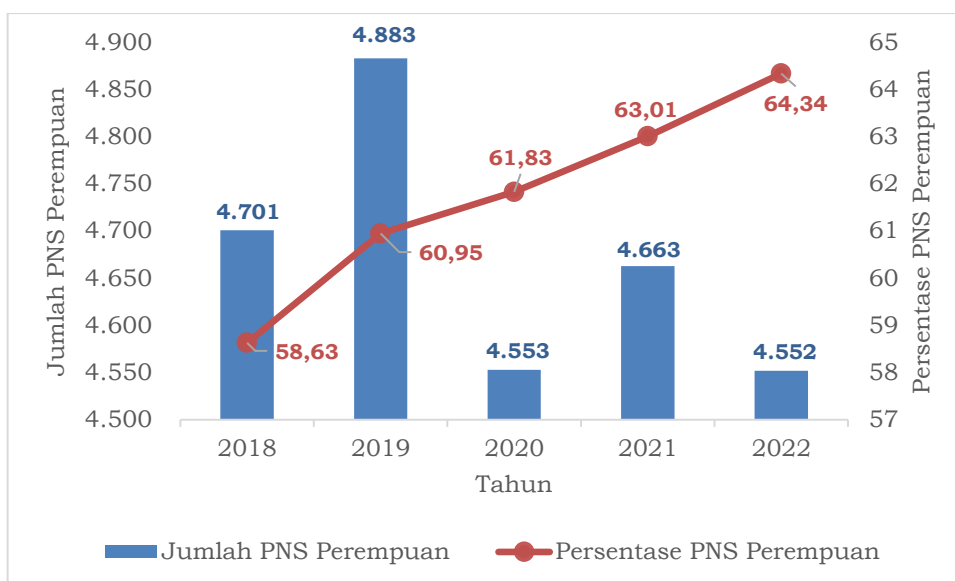
No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kasus	97	113	107	179	78
2	Persentase Kasus Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2023

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

d. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja. Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah ini diwakili dengan persentase Pegawai Negeri Sipil perempuan yang disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: BKPSDM Kabupaten Bantul diolah, 2022

Gambar 2.37 Persentase Partisipasi PNS Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Berdasarkan data pilah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan pemberdayaan perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Bantul semakin meningkat. Untuk jumlah total ASN di Kabupaten Bantul per 31 Desember 2022 sebanyak 7.075 ASN.

Persentase PNS Perempuan yang menduduki jabatan eselon II-IV di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.120 Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	4	4	3	4	6
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	43	46	47	52	56
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	231	250	227	228	155
4	Jumlah Pekerja perempuan yang menempati jabatan eselon II -IV	278	300	277	284	217
5	Jumlah PNS perempuan	4.701	4.883	4.553	4.663	4.552
6	Persentase PNS perempuan yang menempati jabatan eselon II – IV (4/5)	5,91	6,14	6,08	6,09	4,77

Sumber: BKPSDM Kabupaten Bantul, 2023

Jumlah PNS perempuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menduduki jabatan eselon II dan III mengalami peningkatan di tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021. Hal ini menandakan perempuan lebih diperhitungkan dan diberi kesempatan menduduki jabatan yang lebih tinggi, Sedangkan penurunan pejabat Eselon IV karena adanya penyetaraan jabatan Eselon IV menjadi jabatan fungsional.

e. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.121 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
1	2018	254.243	399.001	63,72
2	2019	259.445	401.996	64,54
3	2020	269.969	415.798	64,93
4	2021	255.177	421.516	60,54
5	2022	278.233	427.799	65,03

Sumber: Sakernas, BPS, 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Bantul cenderung naik dari tahun 2018 sampai tahun 2022, kecuali pada tahun 2021 karena adanya pandemi covid-19. Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan dari 60,54% di tahun 2021 menjadi 65,03% di tahun 2022 atau meningkat sebanyak 4,49%.

f. Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan yang berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak

dan Perlindungan Khusus Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan anak yang juga didukung oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dipertegas bahwa urusan Pemerintah di bidang perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan didukung oleh masyarakat, media, dan dunia usaha sebagai empat pilar pembangunan. Disamping itu pada tahun 2021 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan lahirnya Peraturan Presiden ini berarti dasar hukum pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia menjadi lebih kuat.

Kabupaten/Kota Layak Anak terdiri dari lima predikat yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Penghargaan kabupaten kota layak anak akan diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim dari Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tim Kementerian lembaga dan tim independen.

Capaian Kabupaten Layak Anak Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.122 Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Kategori KLA	Madya	Madya	Nindya
2	Kecamatan/Kapanewon Layak Anak (Kelana)	11	17	17
3	Desa/Kalurahan Layak Anak (Delana)	13	18	75

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

Upaya percepatan pencapaian status Kabupaten Layak Anak pada tahun 2022 dilakukan dalam semua kluster. Pada Kluster kelembagaan dilakukan dengan penetapan kebijakan penyelenggaraan yang mendukung perwujudan Kabupaten Layak Anak yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- 3) Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, yang telah dalam proses pembahasan di tingkat inisiator (DPRD Kabupaten Bantul) dan telah menjadi program pembentukan peraturan daerah Triwulan I Tahun 2023.
- 4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah.

Selain itu komitmen pencapaian status Kabupaten Layak Anak dilakukan dengan penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat melalui pelatihan Konvensi Hak Anak kepada tenaga pendidik, aparatur pemerintah di semua OPD dan Kapanewon, Penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan Konvensi Hak Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada 21 Kalurahan.

Pada Kluster Hak Sipil dan Kebebasan, dilakukan penguatan pelembagaan partisipasi anak melalui pelibatan forum anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan, baik di tingkat Kalurahan, Kapanewon maupun Kabupaten, pengukuhan kepengurusan forum anak di tingkat Kalurahan dan Kapanewon, dan penguatan kapasitas forum anak melalui pelatihan Konvensi Hak Anak, Latihan Dasar Kepemimpinan dan Pelatihan Pelopor dan Pelapor. Selain itu, peningkatan informasi layak anak dilakukan melalui optimalisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), kampanye literasi melalui penguatan peran “Bunda Literasi” ke sekolah-sekolah, serta perpustakaan keliling.

Pada Kluster Lingkungan Keluarga dan pengasuhan Alternatif, dilakukan dengan layanan *one stop services* pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), pencegahan pernikahan usia anak melalui sekolah, masyarakat dan dunia usaha, penyediaan fasilitas ruang bermain/ ruang terbuka hijau ramah anak serta pengembangan PAUD Holistik Integratif melalui Bina Keluarga Balita di semua Kalurahan.

Pada Kluster Kesehatan Dasar dan Kesehatan, melalui penetapan Pelayanan Ramah Anak pada Puskesmas dari 17 menjadi 27 Puskesmas pada tahun 2022, percepatan penurunan stunting, penerapan dan penetapan kawasan tanpa rokok pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kantor pemerintah, tempat wisata, tempat ibadah dan tempat umum lainnya, serta monitoring dan evaluasi Sekolah Ramah Anak, fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana dan fasilitasi pembentukan sekolah Bebas Narkoba (Bersinar) di wilayah Kecamatan Bersinar.

Pada Kluster Perlindungan Khusus Anak, dilakukan melalui penerapan kebijakan *restorative justice* bagi anak berhadapan dengan hukum, pencegahan pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak pada perusahaan dan pemantauan melalui pemerintah Kalurahan.

Pencapaian status Kabupaten Layak Anak melalui dukungan Kapanewon dan Kalurahan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi Kapanewon dan Kalurahan secara berkala.

g. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang terjadi di bawah batas usia minimal yaitu batas usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun undang-undang memberlakukan usia minimum pernikahan adalah 19 tahun, namun pada praktiknya perkawinan di bawah umur cenderung meningkat.

Tabel 2.123 Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kasus Perkawinan di Bawah Umur	83	125	246	163	147

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Bantul, 2023

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur cenderung meningkat pada kurun waktu tahun 2018-2020 dan menurun di Tahun 2021-2022. Beberapa faktor yang menjadi penyebab diantaranya kurangnya perhatian orangtua dan pengawasan lingkungan terhadap anak. Pengaruh perkembangan zaman dengan adanya dunia maya (internet) yang

terbuka, Pergaulan, perceraian orang tua, *broken home*, Pola asuh dalam keluarga kurang baik, faktor Pendidikan orang tua yang masih kurang.

2.1.3.2.3 Pangan

a. Pola Pangan Harapan

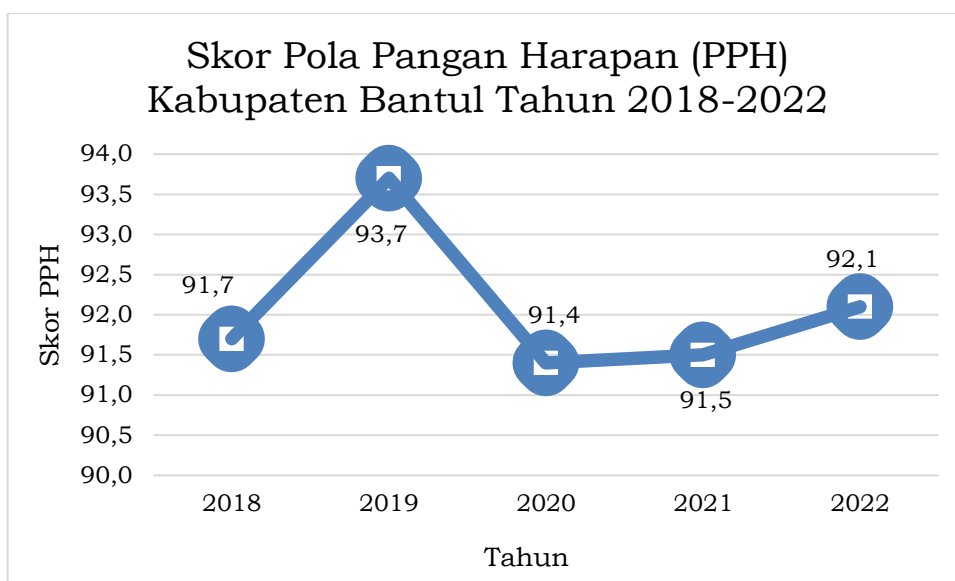
Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam.

Tabel 2.124 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan					Skor Maks
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	24,8	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	1,4	1,3	2,0	2,0	2,5	2,5
3	Pangan hewani	24,0	24,0	22,4	23,0	24,0	24,0
4	Minyak dan lemak	1,5	1,8	1,2	1,2	0,2	5,0
5	Buah/biji berlemak	0,6	1,0	0,5	0,2	0,1	1,0
6	Kacang-kacangan	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Gula	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3	2,5
8	Sayur dan buah	28,8	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		91,7	93,7	91,4	91,5	92,1	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023

Skor ideal PPH adalah sebesar 100 yang mengindikasikan kualitas pola konsumsi pangan sudah menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) beragam diantara 9 kelompok pangan utama.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2022

Gambar 2.38 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Pada kurun waktu tiga tahun terakhir, PHH selalu naik. Hasil perhitungan analisis PPH tahun 2022 sebesar 92,1. Skor tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 91,5. Hasil tersebut mengindikasikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Bantul meningkat. Hal ini karena telah meningkatnya ketersediaan bahan pangan keluarga yang beragam, berimbang dan kecukupan gizi yang diperoleh dari hasil pemanfaatan pekarangan sehingga tidak harus membeli dari pasar.

b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia yaitu energi sebesar 2.150 kal/kap/hr dan protein sebesar 57 gr/kap/hr pada tingkat konsumsi. Sedangkan berdasar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 menjadi 2.400 kal/kap/hr.

Tabel 2.125 Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	Energi (kal/kap/hr)	Tingkat Ketersediaan Energi (%)	Protein (gram/kap/hr)		
			Nabati	Hewani	Total
2018	2.993	139,21	66,73	11,63	78,36

Tahun	Energi (kal/kap/hr)	Tingkat Ketersediaan Energi (%)	Protein (gram/kap/hr)		
			Nabati	Hewani	Total
2019	3.123	130,13	75,10	14,86	89,95
2020	3.092	100,00	71,28	11,62	82,90
2021	3.112	129,67	74,56	9,52	84,08
2022	3.114	129,75	74,50	28,80	101,30

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Bantul sudah di atas rata-rata kecukupan energi dan protein penduduk Indonesia. Pada tahun 2021 ketersediaan energi mencapai 3.112 kal/kap/hr atau 29,75% di atas standar nasional yaitu 2.400 kal/kap/hr. Ketersediaan protein mencapai 84,08 gram/kap/hr atau 60,79% di atas standar nasional yaitu 63 gram/kap/hr. Walaupun secara kuantitas ketersediaan energi dan protein sudah terpenuhi, namun secara kualitas masih perlu peningkatan ketersediaan terhadap kelompok bahan pangan hewan.

c. Penguatan Cadangan Pangan

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan harga pangan pokok. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang

dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.

Tabel 2.126 Cadangan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cadangan Pangan Pemerintah (ton)	5,036	5,036	5,036	5,036	15,036
2	Cadangan Pangan Masyarakat (ton)	-	8,41	-	13,70	30,20
3	Lumbung Pangan Masyarakat (unit)	24	27	27	28	29
4	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) (unit)	17	18	18	18	18

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2023

Cadangan pangan pemerintah daerah dikelola oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Koperasi Beras Sehat Makmur Wijirejo Pandak.

Sejak tahun 2009 di Kabupaten Bantul telah berkembang kelompok-kelompok lumbung pangan baik kelompok yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah maupun kelompok-kelompok lumbung swadaya. Sampai dengan tahun 2022 ada 29 kelompok lumbung yang aktif.

Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras) dihitung dari jumlah cadangan pangan dibagi jumlah kebutuhan pangan. Jumlah cadangan pangan terdiri dari jumlah cadangan pangan pemerintah serta jumlah cadangan pangan masyarakat yang terdiri dari stok pangan di lumbung pangan masyarakat dan 10% jumlah produksi beras. Sedangkan jumlah kebutuhan pangan terdiri dari kebutuhan per kapita dikalikan jumlah penduduk.

d. Desa Mandiri Pangan (Demapan)

Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

Pada tahun 2022, terdapat 21 Desa Mandiri Pangan (Demapan), 1 Desa Pengembangan dan 1 Desa Penumbuhan di Kabupaten Bantul yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.127 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

No	Tahun	Desa	Tahapan
1	2006	Kalurahan Muntuk, Dlingo	Exit Program
2	2006	Kalurahan Selopamioro, Imogiri	Exit Program
3	2007	Kalurahan Wukirsari, Imogiri	Exit Program
4	2007	Kalurahan Jatimulyo, Dlingo	Exit Program
5	2008	Kalurahan Seloharjo, Pundong	Exit Program
6	2009	Kalurahan Srihardono, Pundong	Exit Program
7	2010	Kalurahan Temuwuh, Dlingo	Exit Program
8	2010	Kalurahan Dlingo, Dlingo	Exit Program
9	2010	Kalurahan Mangunan, Dlingo	Exit Program
10	2011	Kalurahan Argodadi, Sedayu	Exit Program
11	2011	Kalurahan Sriharjo, Imogiri	Exit Program
12	2011	Kalurahan Girirejo, Imogiri	Exit Program
13	2011	Kalurahan Karangtengah, Imogiri	Exit Program
14	2012	Kalurahan Triwidadi Pajangan	Exit Program
15	2012	Kalurahan Bangunjiwo, Kasihan	Exit Program
16	2012	Kalurahan Bawuran, Pleret	Exit Program
17	2012	Kalurahan Segoroyoso, Pleret	Exit Program
18	2012	Kalurahan Wonolelo, Pleret	Exit Program
19	2013	Kalurahan Tamantirto, Kasihan	Exit Program
20	2013	Kalurahan Jagalan, Banguntapan	Exit Program
21	2014	Kalurahan Argorejo, Sedayu	Exit Program
22	2021	Kalurahan Trimurti, Srandakan	Tahap Pengembangan
23	2021	Kalurahan Guwosari, Pajangan	Tahap Penumbuhan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2023

e. Kerawanan Pangan dan Kerentanan Pangan

Pengukuran Kerentanan Pangan dan Kerawanan Pangan adalah sebagai berikut:

1) Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Penyusunan Peta Desa Rawan Pangan dan Gizi berdasarkan pada 3 indikator yaitu:

- a) Ketersediaan Pangan dipengaruhi oleh Produksi, Jumlah Penduduk, dan Cadangan Pangan;
- b) Akses Pangan diperoleh dari jumlah keluarga prasejahtera;

- c) Pemanfaatan Pangan diperoleh dari data kekurangan energi protein (KEP).

Berdasarkan hasil analisis dan kajian kerawanan pangan/Situasi Pangan dan Gizi tahun 2022 di 75 kalurahan dan 17 kapanewon se Kabupaten Bantul, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2022 berdasarkan hasil Analisis Komposit Ketahanan Pangan (Tahunan), situasi pangan dan gizi di Kabupaten Bantul untuk tingkat kapanewon, ada 2 kapanewon yaitu Pleret dan Pajangan memiliki Indek Ketahanan Pangan 2 atau waspada (wama kuning). Tingkat kalurahan ada 8 kalurahan yaitu Trimurti, Seloharjo, Selopamioro, Karangtengah, Segoroyoso, Bawuran, Sendangsari dan Guwosari yang memiliki Indek Ketahanan Pangan 2 atau waspada (wama kuning), sedangkan 67 kalurahan lainnya memiliki Indek Ketahanan Pangan (tahunan) 1 atau Aman (warna hijau).
2. Dari aspek ketersediaan pangan, ada 4 kapanewon yaitu Pleret, Banguntapan, Kasihan dan Pajangan yang memiliki skor 2 atau risiko pangan dan gizi waspada (warna kuning), sedangkan 13 kapanewon lainnya memiliki skor 1 atau risiko pangan dan gizi aman (warna hijau). Tingkat kalurahan ada 24 kalurahan yang memiliki skor 2 atau risiko pangan dan gizi waspada (warna kuning) yaitu kalurahan Trimurti, Seloharjo, Karangtengah, Girirejo, Imogiri, Wukirsari, Pleret, Segoroyoso, Bawuran, Tamanan, jagalan, Singosaren, Wirokerten, Potorono, Baturetno, Banguntapan, Bangunharjo. Panggungharjo, Bangunjiwo, Tirtonirmolo, Tamantirto, Ngestiharjo Sendangsari dan Guwosari. Sedangkan 51 kalurahan lainnya memiliki skor 1 atau risiko pangan dan gizi aman (warna hijau).
3. Dari aspek akses pangan, dari 17 kapanewon tidak ada kapanewon yang memiliki skor 3 atau resiko pangan dan gizi rentan (warna merah). Namun demikian ada 8 kapanewon yaitu Srandakan, Sanden, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Dlingo, Pleret dan Pajangan yang memiliki skor 2 atau risiko pangan dan gizi waspada (warna kuning). Dilihat dari tingkat kalurahan ada 32 kalurahan yang memiliki skor 2

atau waspada (warna kuning) yaitu Poncosari, Trimurti, Gadingsari, Gadingharjo, Tirtomulyo, Seloharjo, Panjangrejo, Sidomulyo, Mulyodadi, Sumbermulyo, Caturharjo, Triharjo, Gilangharjo, Wijirejo, Canden, Selopamioro, Kebun Agung, Karangtengah, Mangunan, Muntuk, Dlingo, Temuwuh, Jatimulyo, Segoroyoso, Bawuran, Wonolelo, Srimartani, Triwidadi, Sendangsari, Guwosari, Argodadi, dan Argosari.

4. Dari Aspek Pemanfaatan Pangan, 17 kapanewon semuanya memiliki skor 1 atau risiko pangan dan gizi aman (warna hijau), dan dari 75 kalurahan ada 1 kalurahan memiliki skor 2 atau risiko pangan dan gizi waspada (warna kuning) yaitu Selopamioro.
5. Penyebab adanya kondisi waspada (warna kuning) dari aspek ketersediaan dan akses pangannya, sedangkan dari aspek pemanfaatan pangan tidak bermasalah. Ketersediaan pangan sumber karbohidrat menurun, disebabkan penurunan produksi pangan sumber karbohidrat karena beralih ke komoditas hortikultura (bawang merah dan cabai). Untuk itu kalurahan Trimurti, Seloharjo, Selopamioro, Karangtengah, Segoroyoso, Bawuran, Sendangsari dan Guwosari perlu mendapatkan perhatian dan pemantauan melalui program/kegiatan yang dapat meningkatkan ketersediaan dan akses pangan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi rentan pangan harapannya dari skor 2 atau waspada menjadi skor 1 atau aman (Wama hijau).

2) Analisis *Food Security And Vulnerability Atlas* (FSVA)/ Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Penyusunan Peta FSVA disusun berdasarkan pada indikator sebagai berikut:

a) Aspek Ketersediaan Pangan

- 1) Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah Kalurahan;
- 2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga.

b) Aspek Akses terhadap Pangan

- 1) Rasio jumlah penduduk dengan kesejahteraan rendah pada desil I dibanding dengan jumlah penduduk kalurahan;
- 2) Kalurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air dan udara.
- c) Aspek Pemanfaatan Pangan
 - 1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kalurahan;
 - 2) Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kalurahan.

Kalurahan pada prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah.

Berdasarkan Peta FSVA Kabupaten Bantul tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.128 Desa Rentan Pangan Berdasarkan Peta FSVA di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022

No	Desa Rentan Pangan	2019		2020		2021		2022	
		Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan	Jumlah	Kalurahan
1	Prioritas 1	5	Selopamioro, Muntuk, Jatimulyo, Sendangsari Triwidadi	5	Selopamioro, Muntuk, Jatimulyo, Sendangsari, Triwidadi.	3	Jatimulyo, Sendangsari Triwidadi	1	Jatimulyo
2	Prioritas 2	2	Mangunan Dlingo	1	Dlingo	3	Selopamioro, Muntuk Dlingo	1	Dlingo
3	Prioritas 3	9	Seloharjo, Gilangharjo, Wukirsari, Temuwuh, Segoroyoso, Bawuran, Wonolelo, Bangunharjo, Argodadi	12	Seloharjo, Triharjo, Sriharjo, Girirejo, Wukirsari, Mangunan, Temuwuh, Bawuran, Wonolelo, Bangunjiwo, Guwosari Argodadi.	5	Poncosari, Seloharjo, Triharjo, Wonolelo, Argodadi	5	Seloharjo, Kebonagung, Girirejo, Wonolelo dan Jagalan
Total		16		18		11		7	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kalurahan pada prioritas 1 (tingkat rentan pangan tinggi) menurun dari tahun 2019 s.d. 2022, dan pada Tahun 2022 tinggal 1 kalurahan saja. Sedangkan pada rentan pangan rendah (prioritas 3) terdapat 5 kalurahan pada Tahun 2022.

2.1.3.2.4 Pertanian

a. Luas Lahan Bersertifikat

Luas wilayah kerja dan kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.129 Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	Kepemilikan Tanah Terdaftar (Bersertifikat)			Kepemilikan Tanah belum Terdaftar		Kepemilikan Tanah Total	
	Jumlah bidang	Luas (m ²)	Persentase Luas	Luas (m ²)	Persentase Luas	Luas (m ²)	Persentase Luas
2018	587.300	343.736.990	67,81	163.113.010	32,19	506.850.000	100
2019	639.312	371.041.984	73,19	135.808.016	26,81	506.850.000	100
2020	664.139	378.533.558	74,65	128.316.442	25,35	506.850.000	100
2021	678.521	387.339.670	76,42	119.510.330	23,58	506.850.000	100
2022	687.446	390.974.077	77,14	115.875.923	22,86	506.850.000	100

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 luas kepemilikan tanah yang terdaftar sebesar 77,14% naik 0,72% dari tahun 2021 dengan luas tanah belum terdaftar 115.875.923m². Dalam proses pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum di Kabupaten Bantul selalu memerlukan tanah sebagai lokasi pembangunan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada awalnya hanya berfokus pada proses pembebasan tanahnya, sehingga kemudian diperlukan kegiatan lanjutan untuk memproses pendaftaran sertifikasi bidang tanah yang telah dilakukan pembebasan atas hak tersebut di Badan Pertanahan Nasional untuk kemudian menjadi aset atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pendaftaran tanah milik Pemerintah Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.130 Pendaftaran Tanah Pemerintah (bidang) 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pendaftaran Tanah Pemerintah	11	16	1	7	2

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2023

Secara umum kendala yang dihadapi saat proses pendaftaran dan pemberkasan bidang tanah milik Pemda Kabupaten Bantul adalah persyaratan dokumen pengadaan yang tidak dapat dilengkapi karena riwayat pengadaan sulit ditelusuri kembali.

Terkait dengan kepemilikan tanah, pada masa lalu banyak terjadi proses tukar menukar tanah desa dengan tanah warga yang dilaksanakan untuk menunjang pembangunan fasilitas kepentingan umum. Pada saat ini

kedua belah pihak secara fisik sudah menguasai dan mengolah tanah masing-masing bahkan sudah sampai pada ahli waris yang bertingkat dan bahkan sudah ada yang dijual dan atau berpindah hak. Kondisi ini tentu saja akan merugikan bagi masyarakat pemilik tanah maupun pemerintah kalurahan. Pada saat ini pemerintah kalurahan dan masyarakat pemilik tanah mempunyai keinginan untuk memiliki secara utuh sesuai dengan aturan dan alas hak yang tetap yaitu sertifikat sehingga masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum. Sebagai langkah untuk penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga yang digunakan untuk kepentingan umum, maka perlu dilakukan identifikasi permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga yang selanjutnya untuk diproses tukar menukarnya secara administrasi pertanahan sehingga masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

Tabel 2.131 Permasalahan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Masalah	Lokasi	Jumlah
1	2018	Tukar guling tanah (2 Kasus)	Kalurahan Bangunjiwo	1
			Kalurahan Selopamioro	1
2	2019	Tukar guling tanah (14 Kasus)	Kalurahan Sitimulyo	1
			Kalurahan Bangunharjo	1
			Kalurahan Triwidadi	1
			Kalurahan Argomulyo	1
			Kalurahan Tamantirto	1
			Kalurahan Srimulyo	1
			Kalurahan Bantul	1
			Kalurahan Sumberagung	1
			Kalurahan Sriharjo	5
			Kalurahan Tirtonirmolo	1
3	2020	Tukar guling tanah (18 kasus)	Kalurahan Murtigading	1
			Kalurahan Sumberagung	1
			Kalurahan Canden	1
			Kalurahan Tirtohargo	2
			Kalurahan Poncosari	1
			Kalurahan Terong	1
			Kalurahan Pleret	1
			Kalurahan Mangunan	1
			Kalurahan Srigading	1
			Kalurahan Tamantirto	1
			Kalurahan Patalan	1
			Kalurahan Segoroyoso	1
			Kalurahan Tirtonirmolo	1
			Kalurahan Argomulyo	1
			Kalurahan Temuwuh	1
			Kalurahan Bawuran	1
			Kalurahan Timbulharjo	1
4	2021	Tukar guling tanah (41 Kasus)	Kalurahan Patalan	6
			Kalurahan Tirtosari	4

No	Tahun	Masalah	Lokasi	Jumlah
			Kalurahan Tirtomulyo	6
			Kalurahan Tirtonirmolo	1
			Kalurahan Parangtritis	1
			Kalurahan Sitimulyo	2
			Kalurahan Bantul	7
			Kalurahan Srihardono	7
			Kalurahan Trimulyo	3
			Kalurahan Gilangharjo	1
			Kalurahan Sumberagung	3
		Klarifikasi kepemilikan tanah (25 kasus)	Kalurahan Segoroyoso	23
	Kalurahan Banguntapan	1		
	Kalurahan Bawuran	1		
5	2022	Tukar menukar tanah (19 kasus)	Kalurahan Tirtosari, Kretek	4
			Kalurahan Tirtomulyo, Kretek	6
			Kalurahan Srihardono, Pundong	7
			Kalurahan Gilangharjo, Pandak	1
			Kalurahan Tamantirto, Kasihan	1

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 permasalahan tanah menurun dari tahun 2021 sebanyak 66 kasus menjadi 19 kasus. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat Bantul pada umumnya tentang status hukum kepemilikan bidang tanah.

b. Penyelesaian Izin Lokasi dan KKPR

Perizinan terkait pemanfaatan ruang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul yaitu persetujuan prinsip, kesesuaian aspek tata ruang, Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), perizinan klarifikasi/perizinan lokasi, perizinan mendirikan bangunan, perizinan gangguan, dan perizinan teknis operasional. Perizinan lokasi di peruntukan untuk izin pemanfaatan ruang dengan luasan lahan di atas satu hektar.

Tabel 2.132 Persentase Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Jumlah Permohonan Izin Lokasi	6	7	10
2	Jumlah Izin Lokasi	4	6	8
3	Persentase (%)	66,67	85,71	80,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, 2023

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2021 tentang Izin Lokasi dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 18), maka dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan

pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, diberikan dalam bentuk Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), dengan mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 Pasal 97 terdiri atas:

- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha yang penyelenggaraan pengurusannya melalui Aplikasi *Online Single Submission* (oss.go.id)
- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha yang penyelenggaraan pengurusannya melalui Aplikasi *izinonline.bantulkab.go.id* ;dan
- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Tabel 2.133 Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul melalui ***izinonline.bantulkab.go.id*** Tahun 2021-2022

No	Uraian	2021	2022
1	Jumlah Permohonan PKKPR Non Berusaha	882	735
2	Jumlah PKKPR Non Berusaha yang terbit	258	724
3	Persentase (%)	29,25	98,50

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, 2023

Jumlah PKKPR Berusaha yang terbit di Bantul pada tahun 2021 tidak tersedia data, sedangkan yang terbit tahun 2022 sebanyak 402, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.134 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul melalui **oss.go.id** Tahun 2021-2022

No	Uraian	2021	2022
1	Jumlah PKKPR Berusaha yang terbit	n/a	402

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, 2023

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, di mana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan Provinsi di Indonesia.

IKLH terdiri dari 3 indikator: Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform (mengacu Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air); Indeks Kualitas Udara (IKUd) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu: SO₂ dan NO₂; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot 40%, yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018– 2022.

Tabel 2.135 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018-2022

No	Indeks Kualitas	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	34,67	39,63	51,80	56	36,67
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,66	90,9	85,18	83,28	86,34
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	43,15	53,09	54,82	55,21	64,34
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		53,36	60,40	63,02	66,87	62,84

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2023

Keterangan :

Sangat baik ($90 \leq \text{IKLH} \leq 100$)

Baik ($70 \leq \text{IKLH} < 90$)

Sedang ($50 \leq \text{IKLH} < 70$)

Kurang ($25 \leq \text{IKLH} < 50$)

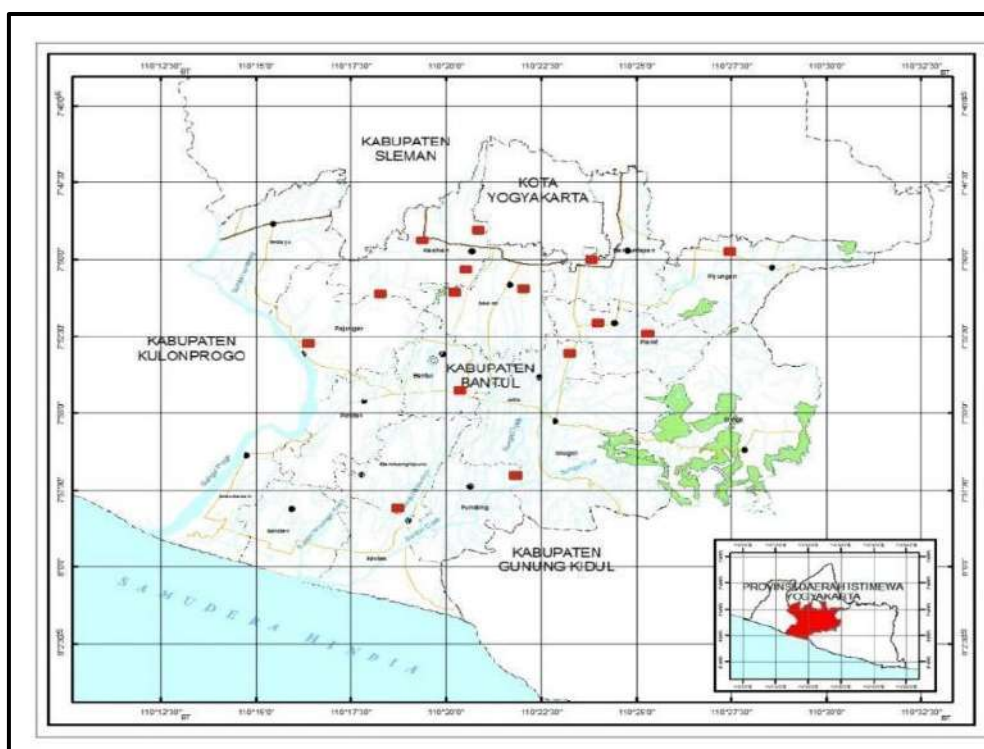
Sangat Kurang ($0 \leq \text{IKLH} < 25$)

*Sumber : Permen LH Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 62,84 masuk kategori sedang, tetapi capaian ini lebih rendah 4,03 dari capaian tahun 2021 sebesar 66,87. Indeks IKLH menurun karena indeks kualitas air turun. Penurunan IKA terjadi disebabkan angka bakteri *coliform* masih tinggi dikarenakan buangan limbah domestik rumah tangga dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan. Sedangkan, faktor penyebab penurunan kualitas udara disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor (SONOX) masih tinggi.

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 ini pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 5 (lima) sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Winongo, Oyo, Bedog, Opak dan Gajahwong. Sampel air berjumlah 15 sampel dari 15 titik pengambilan, yaitu mewakili hulu, tengah, hilir pada 2 (dua) periode (penghujan dan kemarau).



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.39 Peta Lokasi Pengambilan Sampel Air Sungai

Pemantauan kualitas air sungai berdasarkan beberapa parameter, antara lain: derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi (TSS), oksigen terlarut (DO), nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), total fosfat dan fecal coliform. Selanjutnya dianalisis dan dihitung untuk mengetahui kondisi kualitas air di masing-masing sungai.

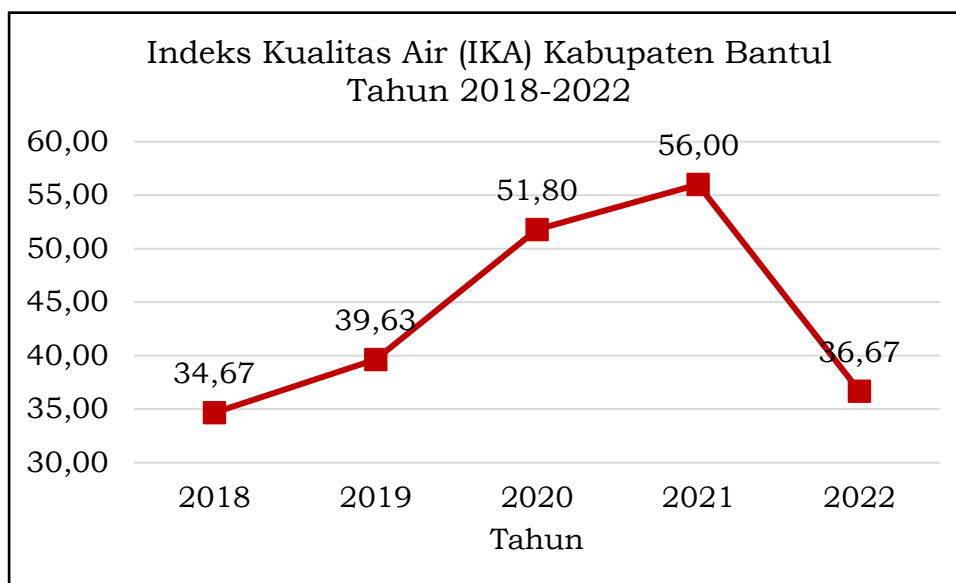
Tabel 2.136 Hasil Kualitas Air Sungai di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Nama Sungai	Nilai Indeks Kualitas Air				
	2018	2019	2020	2021	2022
Winongo	37,500	43,333	53,330	60	23,33
Code	41,666	42,500	50,830	50	n/a
Gajahwong	38,334	30,000	43,330	50	36,67
Bedog	43,332	40,667	48,180	56,67	36,67
Oyo	33,334	41,667	37,500	63,33	43,33
Opak	n/a	n/a	n/a	n/a	43,33

Keterangan :

- n/a : tidak dilakukan pengambilan sample

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2023



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.40 Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Bantul tahun 2018-2022

Keterangan :

Sangat baik ($90 \leq \text{IKA} \leq 100$)

Baik ($70 \leq \text{IKA} < 90$)

Sedang ($50 \leq \text{IKA} < 70$)

Kurang ($25 \leq \text{IKA} < 50$)

Sangat Kurang ($0 \leq \text{IKA} < 25$)

*Sumber : Permen LH Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Hasil capaian IKA Kabupaten Tahun 2022 sebesar 36,67 atau termasuk kategori kurang, menurun dibandingkan capaian IKA tahun 2021 sebesar 56. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas, antara lain dengan melakukan pengolahan air limbah domestik sebelum dibuang ke sungai, baik secara individu maupun komunal.

2) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pemantauan udara ambien dilakukan di 4 (empat) titik pantau/lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul, pada lokasi-lokasi yang mewakili daerah padat transportasi, daerah atau kawasan industri, pemukiman padat penduduk dan kawasan perkantoran. Parameter pemantauannya, yaitu Sulfur dioksida (SO₂) dan Nitrogen dioksida (NO₂). Kategori IKU mengacu Permen LHK nomor 27/2021.

Tabel 2.137 Hasil Analisa Laboratorium Udara Ambient Tahun 2022

Peruntukan	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2
	Kadar NO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar SO ₂
	µg/Nm ³	µg/Nm ³	µg/Nm ³	µg/Nm ³
Transportasi	19,82	5,73	18,19	6,62
Industri/Agro Industri	9,30	5,64	17,12	5,50
Pemukiman	19,02	6,51	13,42	7,57
Perkantoran/ Komersial	7,12	6,88	10,83	8,85
Rerata	13,82	6,19	14,89	7,14

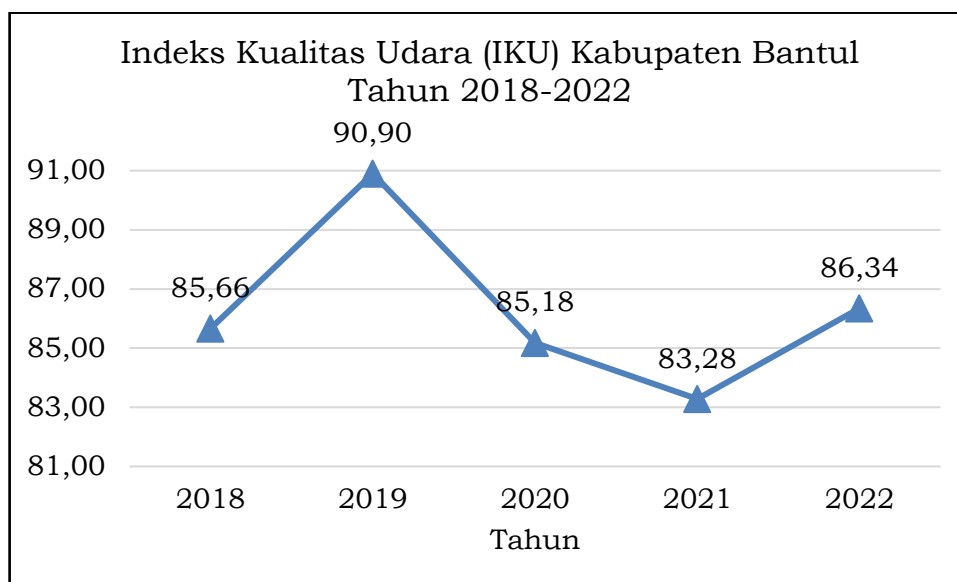
Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2023

Hasil pengukuran kualitas udara di Kabupaten Bantul ditampilkan pada tabel IKU dibawah ini.

Tabel 2.138 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022

Parameter	2018			2019			2020			2021			2022		
	Rerata ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	E U	IE U	Rerata ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	E U	IE U	Rerata ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	E U	IE U	Rerata ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	E U	IE U	Rerata ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	E U	IE U
NO ₂	16,16	40	0,4041	14,81	40	0,3703	13,97	40	0,3493	14,92	40	0,3729	14,35	40	0,359
SO ₂	6,24	20	0,3121	3,15	20	0,1575	7,68	20	0,384	8,58	20	0,4292	6,66	20	0,333
Rerata			0,3581			0,2638			0,3666			0,401			0,346
Indeks Kualitas Udara			85,66			90,90			85,18			83,28			86,34

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2023



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.41 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul tahun 2018-2022

Keterangan :

Sangat baik ($90 \leq \text{IKU} \leq 100$)

Baik ($70 \leq \text{IKU} < 90$)

Sedang ($50 \leq \text{IKU} < 70$)

Kurang ($25 \leq \text{IKU} < 50$)

Sangat Kurang ($0 \leq \text{IKU} < 25$)

*Sumber : Permen LH Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2022 terjadi kenaikan rata-rata kualitas udara yang mencapai angka 86,34 naik dari rata-rata kualitas udara pada tahun 2021 sebesar 83,28. Hal ini dikarenakan adanya dampak positif dari upaya konservasi dan penambahan tutupan lahan selama tahun 2022.

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi kawasan hutan dan area penggunaan lain. Tutupan Lahan (TL) dihitung dari penjumlahan dari:

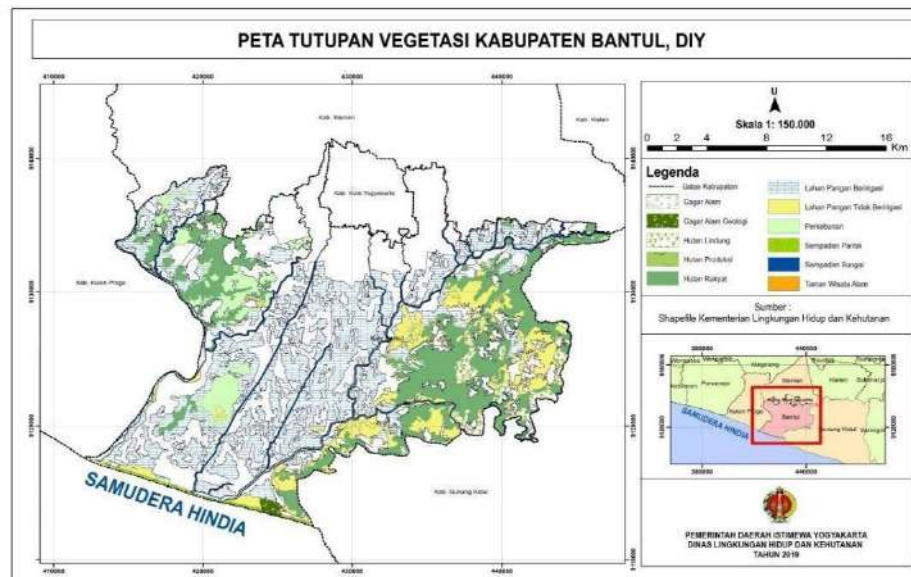
- Kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan pada daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai kondisi eksisting.
- Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan Tutupan Lahan berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/ waduk, lahan kemiringan lereng >25%.
- Berkaitan dengan arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, paling sedikit 30% peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau. Peruntukan sebagai ruang terbuka hijau tersebut dapat berupa hutan kota paling sedikit 10% dari luas perkotaan, kebun raya, taman keanekaragaman hayati atau taman kota yang didominasi pepohonan
- Rehabilitasi hutan dan lahan.

Upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan area bekas tambang dan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.

Tabel 2.139 Penambahan Tutupan Lahan (km²) Di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Jenis Tutupan Vegetasi	Penambahan Luasan Tutupan Lahan (km ²)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penghijauan lingkungan	0,01	12	9,53125	0,882	0,36
2	Mangrove	0,01	0,01	0,01	1,25	1,25
3	Reklamasi bekas tambang	0,04	0,02	0,001	0,001	0,001
4	Hutan Rakyat	85,95	42,65	0	0	48,65
5	RTH/TAMAN	0	0	0,0016	0,0034	0,00082
Total Penambahan		86,13	54,68	9,54	2,14	50,2618
Total Luas Tutupan Lahan		114,38	169,06	178,6	180,74	231,00

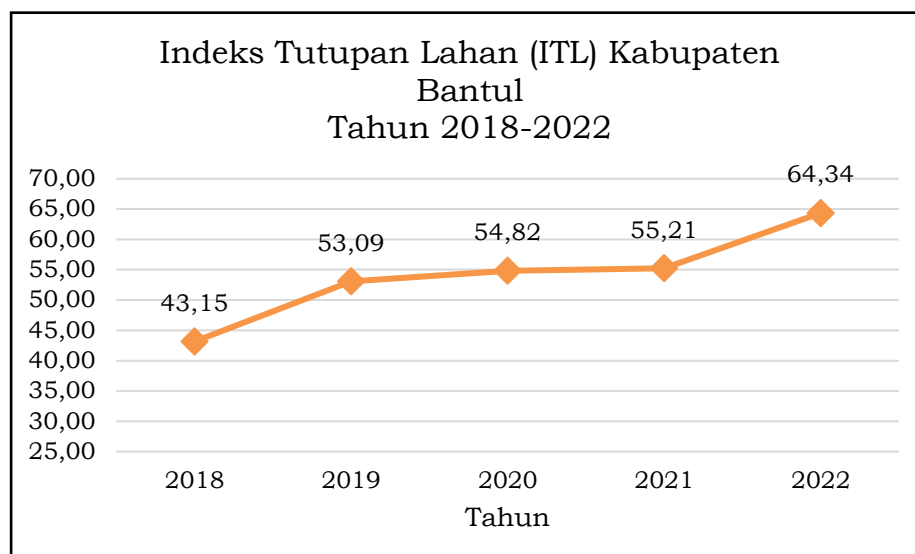
Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2023



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2022

Gambar 2.42 Peta Tutupan Vegetasi Kabupaten Bantul

Pada tahun 2022 dengan adanya penambahan tutupan lahan sebesar 50,26 km², maka total luas tutupan lahan Kabupaten Bantul hingga tahun 2022 menjadi 231,00 km². Penambahan luasan tutupan lahan pada jenis tutupan vegetasi RTH tahun 2022 tidak seluas tahun 2021, karena pada tahun 2022 hanya ada penambahan 2 lokasi yaitu RTH Kalurahan Bantul dan RTH Kalurahan Trirenggo. Penambahan luasan tutupan lahan disebabkan adanya penambahan luasan hutan rakyat sebagai variabel IKTL yang pada tahun 2020 sampai tahun 2021 tidak dihitung sebagai variabel IKTL.



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.43 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul tahun 2018-2022

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul tahun 2022 adalah sebesar 64,34 atau naik sebesar 9,13 poin dibandingkan dengan tahun 2021.

b. Izin Lingkungan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Mulai tahun 2019 Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa izin lingkungan hanya untuk kantor pemerintah, sekolah, pasar dan tambang pasir. Sedangkan Izin untuk badan usaha maupun perorangan diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk dan atas nama Bupati Bantul yaitu Dinas Perijinan dan Penanaman Modal. Sejak *launching Online Single Submission Risk Based Assessment* (OSS RBA) pada tanggal 9 Agustus 2021 penapisan dokumen lingkungan telah dilakukan secara otomatis oleh sistem OSS. Adapun verifikasi dokumen lingkungan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup izin PPLH berubah menjadi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, pemenuhan baku mutu emisi dan rincian teknis limbah B3. Izin lingkungan berubah menjadi persetujuan lingkungan dan persetujuan pemerintah untuk kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.

Pada tahun 2022 diterima surat permohonan persetujuan teknis sebanyak 12 pemohon. Adapun tindak lanjut dari permohonan tersebut diterbitkan 7 surat persetujuan dan 5 surat balasan.

Tabel 2.140 Dokumen Persetujuan Teknis Yang Diterbitkan Tahun 2022

No	Instansi	Permohonan	No. Surat Masuk	Tgl Surat Masuk	No. Surat Keluar	Tgl Surat Keluar	Output
1	Rumah Sakit Paru Respira	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	666/05841	01 Juli 2022	660/1921 /bid3	31 Oktober 2022	Surat Balasan
2	Kemendikbudris tek RI / Asrama Mahasiswa Nusantara Yogyakarta	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	62943/A7/LK.00.03/2022	03 Oktober 2022	660/1989 /bid3	10 Nopember 2022	Surat Balasan
3	Kemendikbudris tek RI / Asrama Mahasiswa Nusantara Yogyakarta	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	62942/A7/LK.00.03/2022	03 Oktober 2022	660/2268 /bid3	20 Desember 2022	Surat Persetujuan
4	Dinas Kebudayaan / Taman Budaya Bantul	Persetujuan Teknis Pemenuhan BM Emisi	430/3128	25 Oktober 2022	660/1988 /bid3	10 Nopember 2022	Surat Balasan
5	Dinas Kebudayaan / Taman Budaya Bantul	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	610/3304	15 Nopember 2022	660/0234 1/bid3	27 Desember 2022	Surat Persetujuan
6	Politeknik ATK Yogyakarta	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	B/1279/BPSDMI/ATK/MS/IX/2022	27 September 2022	660/2356 /bid3	29 Desember 2022	Surat Persetujuan
7	Rumah Sakit KIA Kahyangan	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	0132/RSKHY/PRM HN/III/2022	09 Maret 2022	660/1645 /bid3	29 Agustus 2022	Surat Persetujuan
8	Rumah Sakit Santa Elisabeth	Persetujuan Teknis Pemenuhan BM Emisi	699/RSSE/D2/X/2022	24 Oktober 2022	660/2104 /bid3	24 Oktober 2022	Surat Balasan
9	PT Nutrindo Boga Alami	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	001/SKL/NBA/I/2022	26 Januari 2022	660/0516 /bid3	30 Maret 2022	Surat Persetujuan
10	PT Nutrindo Boga Alami	Persetujuan Teknis Pemenuhan BM Emisi	001/SKL/NBA/VI/2022	29 Juni 2022	660/1458 /bid3	30 Agustus 2022	Surat Persetujuan
11	RS Khusus Bedah Ring Road Selatan	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	385/SU/DIR/RRS/VI/2022	21 Juni 2022	660/1420 /bid3	04 Agustus 2022	Surat Persetujuan
12	RS PKU Muhammadiyah Bantul	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah				04 Juli 2022	Penilaian Substansi

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2023

Adapun jumlah persetujuan dokumen rincian teknis LB3 dan Berita Acara Penerimaan Berkas Pengelolaan Limbah B3 tahun 2022, ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.141 Dokumen Rincian Teknis LB3 dan Berita Acara Penerimaan
Berkas Pengelolaan LB3 tahun 2022

No. Permohonan	Nama Usaha/ Kegiatan	Jenis usaha/ kegiatan	Alamat usaha/ kegiatan	No BA	Tanggal BA
1	PT Dagsap Enduro Eatore	Industri Pengelolaan Unggas & Pengawetan Produk Daging & Daging Unggas	Jl. Wates Km. 14 Argosari, Sedayu, Bantul	PLB3/TPSLB3 /01/02/2022	3 Februari 2022
2	RSU PKU Muh Bantul	Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit)	Jl. Jendral Sudirman 124 RT.03 Kurahan Bantul, Bantul	PLB3/TPSLB3 /02/02/2022	8 Februari 2022
3	RSU Griya Mahardhika Yogyakarta	Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit)	Jl. Parangtritis Km. 4,5 Gg. Wijayakusuma No. 212, Druwo, Bangunharjo, Sewon, Bantul	PLB3/TPSLB3 /03/02/2022	9 Februari 2022
4	RS Santa Elisabeth	Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit)	Ganjuran, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	PLB3/TPSLB3 /04/03/2022	22 Maret 2022
5	Puskesmas Sanden	Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	Jalan Raya Sanden, Pucanganom, Murtigading, Sanden, Bantul	PLB3/TPSLB3 /05/05/2022	27 Mei 2022
6	Pembangunan Student Dormitory UMY	Student Dormitory/ Asrama Mahasiswa	Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul	PLB3/TPSLB3 /06/06/2022	2 Juni 2022
7	Puskesmas Pandak II	Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	Salam, Triharjo, Pandak, Bantul	PLB3/TPSLB3 /07/06/2022	7 Juni 2022
8	Puskesmas Bantul II	Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	Jl. Kiyai Ageng Teram, Geblag, Bantul	PLB3/TPSLB3 /08/06/2022	8 Juni 2022
9	Puskesmas Kasihan II	Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan Bantul	PLB3/TPSLB3 /09/06/2022	10 Juni 2022
10	Puskesmas Jetis I	Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	Jl. Imogiri Barat, Trimulyo, Jetis, Bantul	PLB3/TPSLB3 /10/06/2022	10 Juni 2022
11	Puskesmas Dlingo I	Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	Jl. Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul	PLB3/TPSLB3 /11/06/2022	10 Juni 2022
12	Puskesmas Bantul I	Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	Jl. KH. Wakhid Hasyim 208 Sumuran, Palbapang, Bantul	PLB3/TPSLB3 /12/06/2022	10 Juni 2022
13	Puskesmas Sedayu I	Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	Dusun Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul	PLB3/TPSLB3 /13/06/2022	13 Juni 2022
14	Puskesmas Pleret	Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	Jl. Imogiri Timur Km. 9, Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul	PLB3/TPSLB3 /14/06/2022	13 Juni 2022
15	Puskesmas Kasihan I	Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	Jl. Bibis Km. 8, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul	PLB3/TPSLB3 /15/07/2022	8 Juli 2022
16	Puskesmas Kretek	Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	Jl. Paris Km. 21, Sruwuh, Donotirto, Kretek, Bantul	PLB3/TPSLB3 /16/07/2022	8 Juli 2022
17	Puskesmas Pandak I	Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	Jl. Sedayu Gesikan - Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul	PLB3/TPSLB3 /17/07/22	18 Juli 2022
18	Puskesmas Sedayu II	Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	Jl. Wates Km 12, Argorejo, Sedayu, Bantul	PLB3/TPSLB3 /18/07/22	26 Juli 2022

No. Permohonan	Nama Usaha/ Kegiatan	Jenis usaha/ kegiatan	Alamat usaha/ kegiatan	No BA	Tanggal BA
19	Puskesmas Pundong	Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	Piring Srihardono Pundong Bantul DIY	PLB3/TPSLB3 / 19/09/2022	01 September 2022
20	Rumah Sakit Paru Respira	Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit)	Jl. P. Senopati No. 4 Palbapang Bantul D.I.Yogyakarta	PLB3/TPSLB3 / 20/10/2022	12 September 2022
21	Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Yogyakarta	Gedung (Asrama)	Jalan Sorowajan Baru No. 1, Padukuhan Jomblangan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY	PLB3/TPSLB3 / 21/10/2022	25 Oktober 2022
22	Taman Budaya Bantul	Taman Wisata/Rekreasi (KLBI 93211) Seni Kreatifitas (KLBI 90090)	Kamijoro RT 07 Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul	PLB3/TPSLB3 / 22/11/2022	03-Nov-22

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah permohonan persetujuan yang diterima sebanyak 34. Dari 34 permohonan terbit 29 persetujuan yang terdiri atas 7 persetujuan teknis dan 22 rincian teknis limbah B3.

Untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan kegiatan pengawasan, sesuai pasal 496 PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan dilakukan dengan cara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara reguler dan insidentil. Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dalam hal hasil pengawasan tidak langsung menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan ancaman yang serius terhadap lingkungan hidup selanjutnya dilakukan pengawasan langsung.

Tabel 2.142 Hasil Pengawasan terhadap Ketentuan Izin Lingkungan Tahun 2018-2022

Pengawasan	2018	2019	2020	2021	2022
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung	11	24	19	24	24

Pengawasan	2018	2019	2020	2021	2022
Hasil pengawasan (Kegiatan yang taat)	0	13	12	11	4

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022, dari 24 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung, hasil pengawasan menunjukkan bahwa terdapat 4 atau 16,67 persen usaha yang memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Penyebab utama ketidaktaatan usaha/kegiatan di Kabupaten Bantul adalah pelaku usaha belum melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik, seperti IPAL belum memenuhi baku mutu ; belum melakukan ketentuan teknis; belum melaporkan dan tidak adanya SDM yang membidangi secara teknis

Tingkat penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diharapkan setiap tahun semakin meningkat dan diharapkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah taat dapat mempertahankan pengelolaan lingkungannya. laporan yang masuk dievaluasi, kemudian data dimasukkan aplikasi sebagai bahan untuk evaluasi perusahaan dan evaluasi bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam merencanakan pengawasan lanjutan. Beberapa kasus setelah diverifikasi dan ditemukan terjadi pelanggaran peraturan daerah akan ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kabupaten Bantul.

Tabel 2.143 Pokok Aduan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Tahun 2018-2022

Pokok Aduan	2018	2019	2020	2021	2022
Gangguan Kebisingan dan Pencemaran Udara	10	11	28	28	18
Pencemaran Air dan Pencemaran akibat Limbah Cair	6	27	5	9	6
Kerusakan lingkungan	0	0	0	2	0
Total	16	38	33	39	24

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2023

c. Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sedangkan arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Capaian Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Sampah yang masuk ke TPA Piyungan pada tahun 2022 dari bulan Januari sampai bulan September rata-rata sebesar 728,403 ton dengan proporsi sampah berasal dari Kabupaten Bantul sebanyak 25,26%, sampah dari Kabupaten Sleman sebanyak 38,90% dan sampah dari Kota Yogyakarta sebanyak 35,86% (laporan Jakstrada 2022).

Sejak akhir November 2022 sel sampah TPAS Regional Piyungan eksisting telah ditutup. Sampah rumah tangga yang berasal dari kabupaten dan kota sementara dibuang di TPA Sampah Transisi, namun kapasitasnya sangat terbatas. Kabupaten Bantul telah melakukan proses pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yaitu TPST Modalan dan ITF Niten.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Bantul menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Diperlukan suatu pengelolaan sampah supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat, baik itu sampah di tingkat rumah tangga sampai dengan tingkat kabupaten. Timbulan sampah di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sebesar 644.819,13 ton dengan Volume Sampah yang tertangani sebesar 63,29% atau sebesar 409.826,99 ton. Seiring dengan hal tersebut perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah dari sumbernya. Melalui program Bantul Bersama (Bantul Bersih Sampah 2025) Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk mengatasi permasalahan persampahan di wilayah kabupaten bantul dengan melibatkan *stakeholder* baik lingkup Instansi, Perguruan Tinggi maupun lembaga kemasyarakatan dengan upaya dan langkah:

1. Membangkitkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
2. Peningkatan peran dan kapasitas Kelompok Pengelola Sampah (BUMKal, TPS 3R dan Pelanggan Sampah).
3. Penyusunan dan Penetapan regulasi operasional terkait pengelolaan

sampah.

4. Pembangunan fasilitas dan sarana prasarana pengelolaan sampah (Pembangunan *Intermediate Treatment Facility* (ITF)).

Tabel 2.144 Pengelolaan Sampah Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Total sampah yang terkelola (a)	486.784	452.185,43	460.032	482.854,64	409.826,99
Volume timbunan sampah (b)	726.543	608.731,64	752.154	775.148,22	644.819,13
Volume Sampah yang tertangani (a/b)x100%	67,00%	74,28%	61,16%	62,29%	63,56%

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 volume sampah yang dapat terkelola sebesar 409.826,99 m³, atau 63,56% sampah tertangani. Hal ini mengalami peningkatan dari Tahun 2021 dengan sampah tertangani 62,29%.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk.

Tabel 2.145 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah TPS (unit)	275	334	350	378	384
2	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	1.650	2.668	3.088	3.354	3.412
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	939.718	945.441	949.325	985.780	998.647
	Rasio Daya Tampung TPS per 1000 penduduk (m ³ /1000 penduduk)	1,76	2,82	3,25	3,40	3,42

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2023

Ket: Jumlah penduduk bersumber dari Laporan Kebijakan dan Strategis Daerah (Jakstrada)

Rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 jumlah TPS sebanyak 378 unit dengan rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk adalah 3,40 m³. Rasio ini naik dibandingkan dengan rasio pada tahun 2020 sebesar 3,25.

Upaya pengurangan sampah dari sumbernya salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk Bank Sampah. pembentukan bank sampah merupakan momentum awal dalam membina kesadaran kolektif

masyarakat untuk mulai memilah, memanfaatkan, dan mendaur-ulang sampah. Hal ini penting, karena sampah mempunyai nilai jual dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi budaya baru masyarakat.

Peran dan eksistensi bank sampah diperkuat secara hukum dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui bank sampah. Menurut peraturan ini, bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Tabel 2.146 Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

No	Kapanewon	2020			2021			2022		
		Status Aktif	Status Tidak Aktif	Jumlah Bank Sampah	Status Aktif	Status Tidak Aktif	Jumlah Bank Sampah	Status Aktif	Status Tidak Aktif	Jumlah Bank Sampah
1	Bambanglipuro	1	8	9	2	7	9	7	8	15
2	Banguntapan	10	3	13	11	9	20	10	9	19
3	Bantul	3	0	3	4	0	4	5	1	6
4	Dlingo	0	3	3	0	3	3	4	4	8
5	Imogiri	5	3	8	5	3	8	6	7	13
6	Jetis	8	11	19	10	10	20	9	15	24
7	Kasihan	5	4	9	5	4	9	6	7	13
8	Kretek	4	3	7	3	4	7	1	8	9
9	Pajangan	5	3	8	6	2	8	8	5	13
10	Pandak	6	4	10	5	5	10	1	10	11
11	Piyungan	4	4	8	4	4	8	10	10	20
12	Pleret	10	8	18	9	9	18	6	17	23
13	Pundong	4	2	6	4	2	6	2	6	8
14	Sanden	4	1	5	4	1	5	2	3	5
15	Sedayu	2	12	14	2	12	14	10	12	22
16	Sewon	10	3	13	11	3	14	2	12	14
17	Srandakan	4	5	9	4	5	9	2	8	10
Total		85	77	162	89	83	172	91	142	233

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2023

Sampai dengan Tahun 2022 sudah terbentuk Bank Sampah sebanyak 233 Bank Sampah dengan status aktif sebanyak 91 buah dan yang non aktif sebanyak 142 buah.

Pendataan TPS3R yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Bantul, terdapat 19 TPS3R yang tersebar di Kabupaten Bantul, dimana 11 TPS3R dikelola oleh KSM dan 8 TPS3R dikelola oleh BUMKal. Dari data 11 TPS3R yang dikelola KSM dan 8 TPS3R yang dikelola BUMKal kebanyakan belum optimal, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar TPS3R yang ada bisa dioptimalkan seperti konsep awal pembangunan. Hasil perhitungan pengelolaan sampah yang dilakukan melalui TPS3R di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa dari 11 TPS3R yang dikelola KSM dengan jumlah sampah yang masuk ke fasilitas pengelolaan sampah sebanyak 17,412 ton/hari dan jumlah pendauran ulang sampah/sampah terkelola sebanyak 8,183 ton/hari. Sedangkan dari 8 TPS3R yang dikelola BUMKal dengan jumlah sampah yang masuk ke fasilitas pengelolaan sampah sebanyak 12,526 ton/hari dan jumlah pendauran ulang sampah/sampah terkelola sebanyak 7,159 ton/hari (Laporan Jakstrada, 2022).

Tabel 2.147 TPS3R di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No.	Nama	Lokasi	Kalurahan	Kapanewon	Sampah Yang Masuk	Residu	Terkelola	
					Ton/hari		Ton/hari	Ton/hari
DIKELOLA KSM PERKOTAAN								
1	TPS 3R Argo Makmur	Grujugan	Bantul	Bantul	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	TPS 3R Gemah Ripah Bantul	Badegan RT 12	Bantul	Bantul	0,20	0,00	0,20	100,00%
3	TPS 3R Himamimo	Tegaldowo RT 05	Bantul	Bantul	0,01	0,00	0,01	95,16%
4	TPS 3R KSM Tirto Asri	Mrisi	Tirtonirmolo	Kasih	0,70	0,55	0,15	21,43%
5	TPS 3R Kauman Bersatu	Kauman	Tamanan	Banguntapan	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	TPS 3R Wirogo Resik	Grojokan RT 01	Wirokerten	Banguntapan	7,00	1,60	5,40	77,14%
7	TPS 3R Manunggal	Sokowaten RT 02	Tamanan	Banguntapan	4,00	2,80	1,20	30,00%
	Jumlah				11,91	4,95	6,96	58,44%
DIKELOLA KSM PERDESAAN								
1	TPS 3R Srihardono Bersih	Mbaran	Srihardono	Pundong	1,00	0,80	0,20	19,71%
2	TPS 3R Agung Rejeki	Nogosari RT 02	Sumberagung	Jetis	2,00	1,10	0,90	45,00%
3	TPS 3R Kasih	Mojosari	Srimartani	Piyungan	2,50	2,38	0,13	5,00%
4	TPS 3R Ringinharjo	Gumuk	Ringinharjo	Bantul	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah				5,50	4,28	1,22	22,22%
DIKELOLA BUMKAL PERKOTAAN								
1	TPS 3R KSM Salakan Bersemi	Salakan RT 05	Potorono	Banguntapan	0,29	0,09	0,20	69,76%
2	TPS 3R Kupas	Sawit RT 03	Panggungharjo	Sewon	6,00	0,90	5,10	85,00%
	Jumlah				6,29	0,99	5,30	84,30%
DIKELOLA BUMKAL PERDESAAN								
1	TPS 3R Murtigading Lestari	Jl Pantai Kuwaru, Mayungan 1	Murtigading	Sanden	0,45	0,39	0,06	12,58%
2	TPS 3R Karangtengah	Karangrejek RT 03	Karangtengah	Imogiri	1,00	0,95	0,05	5,00%
3	TPS 3R Srimartani Makmur		Srimartani	Piyungan	2,50	1,69	0,81	32,24%

4	TPS 3R GO-SARI	Kembang Gedhe RT 04	Guwosari	Pajangan	2,00	1,30	0,70	35,00%
5	TPS 3R Konco Pilah - Bumdes Mukti Lestari	Babakan RT 02	Poncosari	Srandakan	0,07	0,01	0,05	80,00%
6	TPS 3R Panjangrejo Asri	Badan	Panjangrejo	Pundong	0,22	0,03	0,19	87,67%
	Jumlah				6,23	4,38	1,86	29,79%
	Total				29,94	14,59	15,34	51,25%

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2023

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pelayanan dokumen kependudukan diantaranya meliputi:

1) Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk;

Pendaftaran Penduduk, yang akan membawa akibat terhadap penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan atau surat keterangan kependudukan lainnya;

2) Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil.

Pencatatan sipil, yang akan membawa akibat terhadap penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian serta surat keterangan terkait lainnya;

a. Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk

1) Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Cakupan penerbitan KK di Kabupaten Bantul tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.148 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Kapanewon	2018			2019			2020			2021			2022		
		Jumlah KK*	Kepemilikan KK**	%	Jumlah KK*	Kepemilikan KK**	%	Jumlah KK*	Kepemilikan KK**	%	Jumlah KK*	Kepemilikan KK**	%	Jumlah KK*	Kepemilikan KK**	%
1	Srandakan	10,838	10,838	100	10.961	10.961	100	10.929	10.929	100	11.059	11.059	100	11.172	11.172	100
2	Sanden	11,376	11,376	100	11.492	11.492	100	11.524	11.524	100	11.600	11.600	100	11.706	11.706	100
3	Kretek	10,990	10,990	100	11.036	11.036	100	11.083	11.083	100	11.172	11.172	100	11.287	11.287	100
4	Pundong	12,416	12,416	100	12.656	12.656	100	12.648	12.648	100	12.664	12.664	100	12.803	12.803	100
5	Bambanglipuro	14,792	14,792	100	15.006	15.006	100	15.023	15.023	100	15.120	15.120	100	15.311	15.311	100
6	Pandak	17,894	17,894	100	18.133	18.133	100	18.261	18.261	100	18.376	18.376	100	18.608	18.608	100
7	Bantul	11,569	11,569	100	11.838	11.838	100	22.709	22.709	100	22.969	22.969	100	23.272	23.272	100
8	Jetis	22,158	22,158	100	22.585	22.585	100	20.596	20.596	100	20.804	20.804	100	21.098	21.098	100
9	Imogiri	20,120	20,120	100	20.426	20.426	100	22.358	22.358	100	22.513	22.513	100	22.780	22.780	100
10	Dlingo	21,805	21,805	100	22.176	22.176	100	13.984	13.984	100	14.019	14.019	100	14.137	14.137	100
11	Pleret	13,310	13,310	100	13.612	13.612	100	16.252	16.252	100	16.394	16.394	100	16.671	16.671	100
12	Piyungan	35,969	35,969	100	36.787	36.787	100	17.940	17.940	100	18.147	18.147	100	18.432	18.432	100
13	Banguntapan	15,712	15,712	100	16.050	16.050	100	37.647	37.647	100	38.229	38.229	100	38.956	38.956	100
14	Sewon	17,351	17,351	100	17.699	17.699	100	34.409	34.409	100	34.875	34.875	100	35.392	35.392	100
15	Kasihan	32,904	32,904	100	33.659	33.659	100	35.548	35.548	100	36.020	36.020	100	36.681	36.681	100
16	Pajangan	33,883	33,883	100	34.717	34.717	100	12.161	12.161	100	12.361	12.361	100	12.614	12.614	100
17	Sedayu	15,946	15,946	100	16.249	16.249	100	16.544	16.544	100	16.808	16.808	100	17.093	17.093	100
Total		319,033	319,033	100	325.082	325.082	100	100	329.616	100	333.130	333.130	100	338.013	338.013	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2023

Keterangan : * : Kepala Keluarga

** : Kartu Keluarga

2) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Kartu tanda penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Tabel 2.149 Cakupan Kepemilikan KTP menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Kapanewon	2018			2019			2020			2021			2022		
		Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Kepemilikan KTP-EI	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Kepemilikan KTP-EI	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Kepemilikan KTP-EI	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Kepemilikan KTP-EI	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Kepemilikan KTP-EI
1	Srandakan	31.164	24.095	24.065	31.217	24.169	24.068	31.082	24.060	24.002	31.078	24.119	24.065	31.069	24.606	24.364
2	Sanden	31.967	25.154	25.122	31.995	25.130	25.027	31.810	25.056	24.988	31.786	25.036	24.985	31.844	25.464	25.203
3	Kretek	30.855	24.147	24.108	30.898	24.209	24.119	30.764	24.198	24.134	30.667	24.104	24.059	30.720	24.561	24.336
4	Pundong	35.668	27.614	27.563	35.751	27.825	27.701	35.666	27.601	27.508	35.811	27.667	27.585	35.896	28.131	27.843
5	Bambanglipuro	41.621	32.266	32.206	41.778	32.470	32.333	41.706	32.258	32.174	41.693	32.276	32.182	41.861	33.059	32.700
6	Pandak	51.781	40.082	40.041	51.923	40.243	40.053	52.036	40.280	40.176	51.892	40.188	40.093	52.218	41.279	40.808
7	Bantul	35.465	26.892	26.839	35.783	27.325	27.145	64.652	49.295	49.132	64.730	49.375	49.250	65.451	50.977	50.386
8	Jetis	63.669	48.503	48.402	63.975	49.069	48.839	58.631	44.706	44.588	58.709	44.757	44.667	59.199	46.007	45.471
9	Imogiri	58.206	44.308	44.225	58.401	44.578	44.375	63.835	48.508	48.320	63.820	48.508	48.349	64.281	49.849	49.209
10	Dlingo	63.179	48.100	47.973	63.446	48.379	48.169	39.998	31.021	30.890	40.002	31.074	30.975	40.257	31.753	31.361
11	Pleret	39.092	30.310	30.242	39.400	30.622	30.448	48.497	35.746	35.596	48.570	35.785	35.643	49.052	37.020	36.474
12	Piyungan	110.126	81.813	81.639	111.232	83.091	82.670	52.862	39.633	39.498	53.025	39.825	39.684	53.457	41.070	40.334
13	Banguntapan	47.499	34.937	34.877	47.845	35.394	35.190	113.298	84.376	84.110	113.684	84.740	84.519	115.127	87.992	86.440
14	Sewon	51.692	38.611	38.496	52.101	39.126	38.902	100.563	76.331	76.047	100.872	76.502	76.257	101.431	78.695	77.578
15	Kasihan	98.506	74.715	74.568	99.280	75.580	75.239	104.599	79.240	78.982	104.961	79.651	79.474	106.202	82.245	80.968
16	Pajangan	102.175	77.205	77.033	102.969	78.190	77.797	36.551	27.781	27.675	36.768	27.950	27.888	37.281	28.860	28.523
17	Sedayu	47.053	35.766	35.678	47.447	36.287	36.104	48.156	36.740	36.618	48.445	37.025	36.938	48.899	38.191	37.631
	Total	939.718	714.518	713.077	945.441	721.687	718.179	954.706	726.830	724.438	956.513	728.582	726.613	964.245	749.759	739.629

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2023

Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Bantul tahun 2018 – 2022 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.150 Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	713.078	718.179	724.438	726.613	739.629
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP	714.518	721.687	726.830	728.582	749.759
3	Persentase penduduk yang memiliki KTP ber-NIK	99,79	99,51	99,67	99,73	98,65

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2023

Cakupan penerbitan KTP di Kabupaten Bantul meningkat dari tahun ke tahun hal ini dikarenakan adanya berbagai inovasi, antara lain Perekaman Jemput Bola, Go-KTP, Moro Lego (Disdukcapil datang ke kalurahan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat). Meskipun berbagai inovasi dilakukan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh KTP jika belum terbentur kepentingan menjadi salah satu penyebab belum semua penduduk wajib KTP memiliki KTP.

3) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas yang wajib dimiliki setiap anak agar bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri. Selain mengurus akta kelahiran, para orang tua ketika memiliki anak yang baru lahir juga harus membuat KIA untuk buah hatinya. Lewat kartu tersebut pemerintah berupaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hal konstitusional bagi warga negara Indonesia yang masih berumur kurang dari 17 tahun. Cakupan kepemilikan KIA di Kabupaten Bantul tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.151 Cakupan Kepemilikan KIA menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul
Tahun 2018-2022

No	Kapanewon	2020			2021			2022		
		Jumlah Wajib KIA	Memiliki KIA	%	Jumlah Wajib KIA	Memiliki KIA	%	Jumlah Wajib KIA	Memiliki KIA	%
1	Srandakan	6.931	6.189	89,29	6.933	6.396	92,25	6.463	5.881	90,99
2	Sanden	6.696	6.278	93,76	6.707	6.347	94,63	6.380	5.941	93,12
3	Kretek	6.511	5.892	90,49	6.479	5.963	92,04	6.159	5.655	91,82
4	Pundong	7.943	7.065	88,95	8.037	7.358	91,55	7.765	7.032	90,56
5	Bambanglipuro	9.285	8.304	89,43	9.376	8.567	91,37	8.802	7.973	90,58
6	Pandak	11.606	10.375	89,39	11.655	10.637	91,27	10.939	9.965	91,1
7	Pajangan	8.609	7.848	91,16	8.692	8.047	92,58	14.473	12.919	89,26
8	Bantul	15.081	13.474	89,34	15.199	13.820	90,93	13.192	11.677	88,52
9	Jetis	13.819	12.323	89,17	13.885	12.696	91,44	14.432	13.092	90,72
10	Imogiri	15.016	13.748	91,56	15.224	14.216	93,38	8.504	7.679	90,3
11	Dlingo	8.796	7.573	86,1	8.892	7.897	88,81	12.032	10.712	89,03
12	Banguntapan	28.476	22.680	79,65	28.739	23.679	82,39	12.387	11.033	89,07
13	Pleret	12.574	11.139	88,59	12.685	11.565	91,17	27.135	22.831	84,14
14	Piyungan	13.051	11.387	87,25	13.133	11.707	89,14	22.736	19.600	86,21
15	Sewon	23.883	20.076	84,06	24.134	20.837	86,34	23.957	20.411	85,2
16	Kasihan	24.963	19.942	79,89	25.093	20.801	82,90	8.420	7.629	90,61
17	Sedayu	11.180	9.993	89,38	11.367	10.251	90,18	10.707	9.677	90,38
Jumlah		224.420	194.286	86,57	226.230	200.784	88,75	214.483	189.707	88,45

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2023

b. Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Pendaftaran Penduduk

1) Penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan.

Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebaran informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.152 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Kapanewon	2018			2019			2020			2021			2022		
		Jumlah Penduduk	Memiliki Akte Kelahiran	%	Jumlah Penduduk	Memiliki Akte Kelahiran	%	Jumlah Penduduk	Memiliki Akte Kelahiran	%	Jumlah Penduduk	Memiliki Akte Kelahiran	%	Jumlah Penduduk	Memiliki Akte Kelahiran	%
1	Srandakan	31.164	18.427	59,13	31.218	19.015	60,91	31.082	19.448	62,57	31.078	19.722	63,46	31.069	20.003	64,38
2	Sanden	31.967	17.865	55,89	31.972	18.619	58,24	31.810	18.875	59,34	31.786	19.225	60,48	31.844	19.683	61,81
3	Kretek	30.855	16.472	53,39	30.863	17.148	55,56	30.764	17.593	57,19	30.667	17.942	58,51	30.720	18.397	59,89
4	Pundong	35.668	17.898	50,18	35.908	18.781	52,30	35.666	19.347	54,24	35.811	19.930	55,65	35.896	20.415	56,87
5	Bambanglipuro	41.621	20.888	50,19	41.880	22.045	52,64	41.706	22.807	54,69	41.693	23.390	56,10	41.861	24.170	57,74
6	Pandak	51.781	28.801	55,62	52.013	29.903	57,49	52.036	30.864	59,31	51.892	31.475	60,65	52.218	32.504	62,25
7	Bantul	63.669	38.468	60,42	64.365	40.221	62,49	64.652	41.430	64,08	64.730	42.397	65,50	65.451	43.714	66,79
8	Jetis	58.206	33.343	57,28	58.549	34.708	59,28	58.631	35.760	60,99	58.709	36.544	62,25	59.199	37.668	63,63
9	Imogiri	63.179	32.822	51,95	63.542	34.542	54,36	63.835	35.926	56,28	63.820	36.831	57,71	64.281	38.022	59,15
10	Dlingo	39.092	17.795	45,52	39.537	19.084	48,27	39.998	19.976	49,94	40.002	20.469	51,17	40.257	21.133	52,50
11	Pleret	47.499	24.222	50,99	48.170	25.793	53,55	48.497	26.925	55,52	48.570	27.741	57,12	49.052	28.951	59,02
12	Piyungan	51.692	27.196	52,61	52.333	28.559	54,57	52.862	30.056	56,86	53.025	30.941	58,35	53.457	31.998	59,86
13	Banguntapan	110.126	58.048	52,71	111.955	62.600	55,92	113.298	64.961	57,34	113.684	66.793	58,75	115.127	69.405	60,29
14	Sewon	98.506	52.369	53,16	99.807	56.033	56,14	100.563	58.306	57,98	100.872	59.999	59,48	101.431	61.875	61,00
15	Kasihan	102.175	50.700	49,62	103.527	54.504	52,65	104.599	57.018	54,51	104.961	58.954	56,17	106.202	61.619	58,02
16	Pajangan	35.465	20.688	58,33	36.040	21.719	60,26	36.551	22.531	61,64	36.768	23.073	62,75	37.281	23.843	63,95
17	Sedayu	47.053	27.743	58,96	47.646	28.908	60,67	48.156	29.911	62,11	48.445	30.634	63,23	48.899	31.433	64,28
Jumlah		939.718	503.745	53,61	949.325	32.182	56,06	954.706	551.734	57,92	956.513	566.060	59,18	964.245	584.833	60,65

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2023

Selanjutnya pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.153 Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-1 di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk berusia 0-1 yang memperoleh akta kelahiran	10.000	9.928	9.038	8.827	9.436
Jumlah Penduduk berusia 0-1	10.900	9.938	9.075	8.838	9.436
Persentase penerbitan akta kelahiran	99,88	99,90	99,59	99,88	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2023

2) Penerbitan Akta Kematian

Akta kematian merupakan dokumen sebagai tanda bukti sah mengenai peristiwa kematian seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dokumen Akta Kematian mempunyai manfaat penting bagi penduduk karena dapat digunakan sebagai penetapan status janda atau duda (terutama bagi pegawai negeri), sebagai syarat menikah lagi bagi janda atau duda cerai mati, persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), pengurusan pensiun bagi ahli warisnya, pengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, asuransi, dan perbankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 44 ayat 1, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, pejabat pencatatan sipil kemudian akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, kalurahan dan kapanewon. Kebijakan ini bertujuan agar cakupan pencatatan kematian dapat meningkat secara signifikan.

Tabel 2.154 Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan	20.672	12.245	10.006	14.439	13.784

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Indeks Desa Membangun (IDM)

Pembangunan desa merupakan salah satu amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86, yang salah satu ayatnya menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan". Selain itu juga mendukung salah satu Nawacita pemerintah, yaitu "Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan".

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Tabel 2.155 Status Kabupaten Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019-2022

No.	Uraian	2019	Status	2020	Status	2021	Status	2022	Status
1	IDM Kabupaten Bantul	0,8018	Maju	0,8170	Mandiri	0,8356	Mandiri	0,8566	Mandiri
2	IDM DIY	0,7503	Maju	0,7684	Maju	0,8037	Maju	0,8128	Maju

Sumber: E-Book Peringkat IDM, <http://idm.kemendes.go.id>, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa poin Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bantul mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, capaian IDM Kabupaten Bantul juga lebih tinggi dibandingkan dengan IDM DIY. Pada tahun 2022 capaian IDM Kabupaten Bantul menduduki peringkat 7 nasional dengan nilai indeks 0,8566 dengan status Mandiri. Adanya konsistensi peningkatan IDM Kabupaten Bantul karena adanya peningkatan IDM setiap desa/kalurahan di Kabupaten Bantul, sehingga terdapat peningkatan jumlah desa mandiri di Kabupaten Bantul.

Capaian IDM serta status pada setiap desa/kalurahan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.156 Status Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018-2022

No	Kapanewon	Kalurahan	2018	Status	2019	Status	2020	Status	2021	Status	2022	Status
1	Srandakan		0,7650	MAJU	0,8150	MAJU	0,8370	MANDIRI	0,8370	MANDIRI	0,8422	MANDIRI
		Poncosari	0,7290	MAJU	0,7520	MAJU	0,7930	MAJU	0,7930	MAJU	0,7949	MAJU
		Trimurti	0,8203	MANDIRI	0,8780	MANDIRI	0,8817	MANDIRI	0,8820	MANDIRI	0,8894	MANDIRI
2	Sanden		0,7431	MAJU	0,8050	MAJU	0,8120	MAJU	0,8220	MANDIRI	0,8568	MANDIRI
		Srigading	0,8043	MAJU	0,8080	MAJU	0,8133	MAJU	0,8280	MANDIRI	0,8467	MANDIRI
		Gadingsari	0,7201	MAJU	0,8080	MAJU	0,8133	MAJU	0,8230	MANDIRI	0,8525	MANDIRI
		Gadingharjo	0,7888	MAJU	0,7930	MAJU	0,8094	MAJU	0,8190	MANDIRI	0,8852	MANDIRI
		Murtigading	0,8018	MAJU	0,8130	MAJU	0,8149	MAJU	0,8190	MANDIRI	0,8429	MANDIRI
3	Kretek		0,7764	MAJU	0,8150	MAJU	0,8170	MANDIRI	0,8040	MAJU	0,8364	MANDIRI
		Tirtoharjo	0,6449	BERKEMBA NG	0,7550	MAJU	0,7571	MAJU	0,7910	MAJU	0,8175	MANDIRI
		Donotirto	0,8592	MANDIRI	0,8180	MANDIRI	0,8178	MAJU	0,8200	MANDIRI	0,8232	MANDIRI
		Parangtritis	0,8346	MANDIRI	0,8770	MANDIRI	0,8827	MANDIRI	0,8830	MANDIRI	0,9049	MANDIRI
		Tirtosari	0,7693	MAJU	0,8130	MAJU	0,8149	MAJU	0,8150	MAJU	0,8184	MANDIRI
		Tirtomulyo	0,7451	MAJU	0,8100	MAJU	0,8102	MAJU	0,7100	MAJU	0,8179	MANDIRI
4	Pundong		0,7890	MAJU	0,7750	MAJU	0,7760	MAJU	0,7800	MAJU	0,7804	MAJU
		Seloharjo	0,7317	MAJU	0,7230	MAJU	0,7229	MAJU	0,7340	MAJU	0,7340	MAJU
		Srihardono	0,8200	MANDIRI	0,8420	MANDIRI	0,8462	MANDIRI	0,8460	MANDIRI	0,8462	MANDIRI
		Panjangrejo	0,7151	MAJU	0,7590	MAJU	0,7590	MAJU	0,7610	MAJU	0,7610	MAJU
5	Bambanglipuro		0,7848	MAJU	0,8190	MANDIRI	0,8480	MANDIRI	0,8840	MANDIRI	0,9036	MANDIRI
		Sumbermulyo	0,7943	MAJU	0,8650	MANDIRI	0,8787	MANDIRI	0,9010	MANDIRI	0,9365	MANDIRI
		Sidomulyo	0,7275	MAJU	0,8080	MAJU	0,8302	MANDIRI	0,9120	MANDIRI	0,9122	MANDIRI
		Mulyodadi	0,6610	BERKEMBA NG	0,7840	MAJU	0,8343	MANDIRI	0,8400	MANDIRI	0,8622	MANDIRI
6	Pandak		0,7712	MAJU	0,7790	MAJU	0,8110	MAJU	0,8130	MAJU	0,8183	MANDIRI
		Caturharjo	0,7033	BERKEMBA NG	0,7780	MAJU	0,8041	MAJU	0,8060	MAJU	0,8156	MANDIRI
		Wijirejo	0,7221	MAJU	0,7330	MAJU	0,8083	MAJU	0,8120	MAJU	0,8194	MANDIRI

No	Kapanewon	Kalurahan	2018	Status	2019	Status	2020	Status	2021	Status	2022	Status
		Triharjo	0,7159	MAJU	0,8110	MAJU	0,8143	MAJU	0,8150	MAJU	0,8137	MAJU
		Gilangharjo	0,8057	MAJU	0,7970	MAJU	0,8154	MAJU	0,8210	MANDIRI	0,8246	MANDIRI
7	Pajangan		0,7472	MAJU	0,7680	MAJU	0,7720	MANDIRI	0,7970	MAJU	0,8334	MANDIRI
		Guwosari	0,7260	MAJU	0,7670	MAJU	0,7708	MAJU	0,7780	MAJU	0,8322	MANDIRI
		Triwidadi	0,7578	MAJU	0,7590	MAJU	0,7624	MAJU	0,8110	MAJU	0,8340	MANDIRI
		Sendangsari	0,7352	MAJU	0,7770	MAJU	0,7833	MAJU	0,8010	MAJU	0,8340	MANDIRI
8	Bantul		0,7735	MAJU	0,7660	MAJU	0,7930	MAJU	0,8360	MANDIRI	0,8790	MANDIRI
		Sabdodadi	0,7597	MAJU	0,7660	MAJU	0,7660	MAJU	0,8220	MANDIRI	0,8422	MANDIRI
		Palbapang	0,8038	MAJU	0,8080	MAJU	0,8140	MAJU	0,8600	MANDIRI	0,8995	MANDIRI
		Ringinharjo	0,7889	MAJU	0,7100	MAJU	0,7432	MAJU	0,7750	MAJU	0,8138	MAJU
		Bantul	0,8060	MAJU	0,8100	MAJU	0,8105	MAJU	0,9120	MANDIRI	0,9143	MANDIRI
		Trirenggo	0,7238	MAJU	0,8080	MAJU	0,8287	MAJU	0,8520	MANDIRI	0,9252	MANDIRI
9	Jetis		0,7807	MAJU	0,7990	MAJU	0,8400	MANDIRI	0,9110	MANDIRI	0,9213	MANDIRI
		Patalan	0,7764	MAJU	0,7880	MAJU	0,8362	MANDIRI	0,9450	MANDIRI	0,9549	MANDIRI
		Trimulyo	0,7967	MAJU	0,8010	MAJU	0,8376	MANDIRI	0,9250	MANDIRI	0,9365	MANDIRI
		Canden	0,7894	MAJU	0,7970	MAJU	0,8456	MANDIRI	0,8780	MANDIRI	0,8794	MANDIRI
		Sumberagung	0,8097	MAJU	0,8100	MAJU	0,8384	MANDIRI	0,8980	MANDIRI	0,9143	MANDIRI
10	Imogiri		0,7308	MAJU	0,7990	MAJU	0,8070	MAJU	0,8380	MANDIRI	0,8628	MANDIRI
		Selopamioro	0,7399	MAJU	0,7500	MAJU	0,7611	MAJU	0,8240	MANDIRI	0,8240	MANDIRI
		Kebonagung	0,7752	MAJU	0,8130	MAJU	0,8132	MAJU	0,8340	MANDIRI	0,8565	MANDIRI
		Sriharjo	0,7814	MAJU	0,8100	MAJU	0,8138	MAJU	0,8180	MANDIRI	0,8619	MANDIRI
		Karangtalun	0,7837	MAJU	0,7990	MAJU	0,8100	MAJU	0,8840	MANDIRI	0,9327	MANDIRI
		Karangtengah	0,7251	MAJU	0,7540	MAJU	0,7644	MAJU	0,7980	MAJU	0,834	MANDIRI
		Imogiri	0,8740	MANDIRI	0,8850	MANDIRI	0,8987	MANDIRI	0,9060	MANDIRI	0,8748	MANDIRI
		Wukirsari	0,7538	MAJU	0,7670	MAJU	0,7767	MAJU	0,8160	MANDIRI	0,8824	MANDIRI
		Girirejo	0,7959	MAJU	0,8110	MAJU	0,8154	MAJU	0,8250	MANDIRI	0,836	MANDIRI
11	Dlingo		0,6996	BERKEMBANG	0,8030	MAJU	0,8120	MAJU	0,8140	MAJU	0,8314	MANDIRI
		Mangunan	0,8014	MAJU	0,7560	MAJU	0,7540	MAJU	0,7540	MAJU	0,7984	MAJU

No	Kapanewon	Kalurahan	2018	Status	2019	Status	2020	Status	2021	Status	2022	Status
		Dlingo	0,7238	MAJU	0,8070	MAJU	0,8148	MAJU	0,8150	MAJU	0,8281	MANDIRI
		Muntuk	0,7790	MAJU	0,7930	MAJU	0,8059	MAJU	0,8060	MAJU	0,8114	MAJU
		Temuwuh	0,7022	BERKEMBA NG	0,8010	MAJU	0,8046	MAJU	0,8140	MAJU	0,8308	MANDIRI
		Jatimulyo	0,7919	MAJU	0,7780	MAJU	0,7929	MAJU	0,7930	MAJU	0,8095	MAJU
		Terong	0,8312	MANDIRI	0,8840	MANDIRI	0,8971	MANDIRI	0,8990	MANDIRI	0,9102	MANDIRI
12	Banguntapan		0,7884	MAJU	0,8360	MANDIRI	0,8320	MANDIRI	0,8390	MANDIRI	0,8456	MANDIRI
		Tamanan	0,8484	MANDIRI	0,8550	MANDIRI	0,8529	MANDIRI	0,8530	MANDIRI	0,8548	MANDIRI
		Baturetno	0,9060	MANDIRI	0,9080	MANDIRI	0,8879	MANDIRI	0,8960	MANDIRI	0,8956	MANDIRI
		Jagalan	0,7173	MAJU	0,7560	MAJU	0,7798	MAJU	0,7800	MAJU	0,7951	MAJU
		Banguntapan	0,9187	MANDIRI	0,9200	MANDIRI	0,9220	MANDIRI	0,9180	MANDIRI	0,9273	MANDIRI
		Singosaren	0,7314	MAJU	0,7540	MAJU	0,7524	MAJU	0,7620	MAJU	0,7657	MAJU
		Wirokerten	0,8337	MANDIRI	0,8360	MANDIRI	0,8324	MANDIRI	0,8380	MANDIRI	0,8494	MANDIRI
		Jambidan	0,8052	MAJU	0,8140	MAJU	0,8062	MAJU	0,8150	MAJU	0,8246	MANDIRI
		Potorono	0,7362	MAJU	0,8410	MANDIRI	0,8248	MANDIRI	0,8530	MANDIRI	0,8525	MANDIRI
13	Pleret		0,7254	MAJU	0,8000	MAJU	0,8200	MANDIRI	0,8340	MANDIRI	0,8569	MANDIRI
		Bawuran	0,6565	BERKEMBA NG	0,7150	MAJU	0,7521	MAJU	0,7740	MAJU	0,8195	MANDIRI
		Wonokromo	0,8005	MAJU	0,8770	MANDIRI	0,8916	MANDIRI	0,8950	MANDIRI	0,903	MANDIRI
		Wonolelo	0,7743	MAJU	0,7920	MAJU	0,8005	MAJU	0,8080	MAJU	0,827	MANDIRI
		Segoroyoso	0,7430	MAJU	0,7640	MAJU	0,7838	MAJU	0,8030	MAJU	0,8214	MANDIRI
		Pleret	0,8206	MANDIRI	0,8510	MANDIRI	0,8694	MANDIRI	0,8920	MANDIRI	0,9138	MANDIRI
14	Piyungan		0,7714	MAJU	0,7960	MAJU	0,8490	MANDIRI	0,8560	MANDIRI	0,8766	MANDIRI
		Sitimulyo	0,7482	MAJU	0,7510	MAJU	0,8137	MAJU	0,8340	MANDIRI	0,8451	MANDIRI
		Srimulyo	0,8164	MANDIRI	0,9160	MANDIRI	0,9200	MANDIRI	0,9210	MANDIRI	0,936	MANDIRI
		Srimartani	0,7927	MAJU	0,8110	MAJU	0,8132	MAJU	0,8130	MAJU	0,8487	MANDIRI
15	Sewon		0,8342	MANDIRI	0,7990	MAJU	0,8240	MANDIRI	0,8300	MANDIRI	0,8608	MANDIRI
		Pendowoharjo	0,7840	MAJU	0,7950	MAJU	0,8121	MAJU	0,8122	MAJU	0,8421	MANDIRI
		Bangunharjo	0,7840	MAJU	0,7540	MAJU	0,8098	MAJU	0,8120	MAJU	0,8359	MANDIRI

No	Kapanewon	Kalurahan	2018	Status	2019	Status	2020	Status	2021	Status	2022	Status
		Timbulharjo	0,7903	MAJU	0,7670	MAJU	0,8116	MAJU	0,8140	MAJU	0,8621	MANDIRI
		Panggungharjo	0,7099	MAJU	0,8150	MAJU	0,8640	MANDIRI	0,8840	MANDIRI	0,903	MANDIRI
16	Kasihan		0,7566	MAJU	0,8230	MANDIRI	0,8250	MANDIRI	0,8460	MANDIRI	0,8846	MANDIRI
		Tamantirto	0,7227	MAJU	0,8120	MAJU	0,8138	MAJU	0,8270	MANDIRI	0,8735	MANDIRI
		Tirtonirmolo	0,8335	MANDIRI	0,8530	MANDIRI	0,8565	MANDIRI	0,8840	MANDIRI	0,9181	MANDIRI
		Ngestiharjo	0,8011	MAJU	0,8100	MAJU	0,8138	MAJU	0,8200	MANDIRI	0,8659	MANDIRI
		Bangunjiwo	0,8540	MANDIRI	0,8160	MANDIRI	0,8176	MANDIRI	0,8510	MANDIRI	0,881	MANDIRI
17	Sedayu		0,7666	MAJU	0,8060	MAJU	0,8240	MANDIRI	0,8610	MANDIRI	0,8546	MANDIRI
		Argodadi	0,7106	MAJU	0,7690	MAJU	0,7910	MAJU	0,8260	MANDIRI	0,8414	MANDIRI
		Argosari	0,7518	MAJU	0,7780	MAJU	0,7860	MAJU	0,8320	MANDIRI	0,8546	MANDIRI
		Argomulyo	0,8432	MANDIRI	0,8680	MANDIRI	0,8829	MANDIRI	0,9140	MANDIRI	0,9275	MANDIRI
		Argorejo	0,7886	MAJU	0,8100	MAJU	0,8340	MANDIRI	0,8690	MANDIRI	0,8727	MANDIRI

Sumber: E-Book Peringkat IDM ,<http://idm.kemendes.go.id>, 2023

Berdasarkan tabel tersebut analisis status kapanewon dan kalurahan di Kabupaten Bantul menurut IDM, dapat disimpulkan:

- 1) Pada tahun 2022 terdapat 16 Kecamatan Mandiri dan 1 Kecamatan Maju meningkat dari tahun 2021 yaitu 12 Kecamatan Mandiri dan 5 Kecamatan Maju.
- 2) Tidak ada satupun kalurahan di Kab. Bantul yang mendapat status ‘Desa Sangat Tertinggal’, ‘Desa Tertinggal’ dan “Desa Berkembang”
- 3) Pada tahun 2022 terdapat 65 Desa Mandiri dan 15 Desa Maju, meningkat dari tahun 2021 yaitu 46 Desa Mandiri dan 29 Desa Maju.
- 4) Menurut *ranking* IDM, tiga desa dengan skor tertinggi pada tahun 2021 adalah Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis dengan skor 0,9454; Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis dengan skor 0,9246; dan Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan dengan skor 0,9214. Sedangkan pada tahun 2022 adalah Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis dengan skor 0,9549; Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro dengan skor 0,9365; dan Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis dengan skor 0,9365.
- 5) Adapun desa dengan nilai terendah pada tahun 2021 adalah Kalurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek dengan skor 0,7103; Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong dengan skor 0,7340; dan Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo dengan skor 0,7540. Sedangkan pada tahun 2022 adalah Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong dengan skor 0,7340; Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong dengan skor 0,7610; dan Kalurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan dengan skor 0,7657.

b. Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.157 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPMD di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kelompok Binaan LPMD	313	313	313	313	313
2	Jumlah LPMD	75	75	75	75	75
3	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan LPMD	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, 2023

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPMD. Pada tahun 2022 sebanyak 75 LPMD di Kabupaten Bantul memiliki Kelompok Binaan LPMD berjumlah 313. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD di Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 4,17. Hal ini berarti bahwa rata-rata satu LPMD membina lebih dari 4 kelompok.

c. Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah tim penggerak PKK kalurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK.

Tabel 2.158 Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Nama Organisasi	Jumlah				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PKK Kapanewon	17	17	17	17	17
2	Kelompok PKBN	325	-	-	-	-
3	Kelompok Kadarkum	339	-	-	-	-
4	Kelompok Pola Asuh	402	-	-	-	-
5	Kelompok PKK Dusun	933	933	933	933	933
6	Kelompok UP2K-PKK	-	-	-	75	75
7	Kelompok Simulasi (GNAKSA, PAAR)	-	-	-	75	75

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, 2023

Dalam tiga tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, kelompok binaan PKK di Kabupaten Bantul hanya terdiri dari PKK

kapanewon, kelompok PKK Dusun, kelompok UP2K-PKK, serta kelompok Simulasi (GNAKSA, PAAR). Jumlah masing-masing kelompok binaan PKK yaitu 17 kelompok PKK Kapanewon, 933 kelompok PKK Dusun, 75 kelompok UP2K-PKK, dan 75 Kelompok Simulasi (GNAKSA, PAAR).

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate -TFR*)

Angka kelahiran total adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita sampai akhir masa reproduksinya atau masa subur untuk melahirkan anak. Angka tersebut dapat diperoleh dengan memperlihatkan angka kelahiran menurut kelompok umur (ASFR). TFR merupakan angka terbaik untuk membandingkan keadaan fertilitas di beberapa daerah atau negara.

Tabel 2.159 Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate -TFR*) Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jumlah Kelahiran	Jumlah Perempuan	ASFR (Age Specific Fertility Rate)
1	15 - 19	168	32,127	0,010557
2	20 - 24	2320	31,994	0,107882
3	25 - 29	4640	32,234	0,109613
4	30 - 34	2321	32,020	0,100666
5	35 - 39	1195	36,773	0,005075
6	40 - 44	167	36,002	0,000515
7	45 - 49	9	34,104	0
Total Fertility Rate -TFR				1.657877

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul 2023

Dari data dalam tabel di atas dapat diartikan bahwa satu perempuan berusia 15 sampai 49 tahun (usia produktif) di Kabupaten Bantul akan melahirkan satu atau dua orang anak (1,65 anak).

b. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Tabel 2.160 Kepesertaan KB di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PUS	141.317	-	139.938	-	141.317	-	139.938	-	138.790	-
2	Peserta KB Aktif	103.912	73,53	101.691	72,67	103.912	73,53	101.691	72,67	102.014	73,5
3	Peserta KB MKJP	36.454	35,08	35.850	35,25	36.454	35,08	35.850	35,25	36.885	35,15
4	Peserta KB Pria	9.651	9,29	1.021	1	9.651	9,29	1.021	1	867	0,84
5	Peserta KB Baru	17.686	44,42	9.473	53,54	17.686	44,42	9.473	53,54	5.989	52,72
6	PUS Unmet Need	14.226	10,07	14.757	10,55	14.226	10,07	14.757	10,55	17.364	12,04

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul 2022

c. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Tribina

BKB adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (Balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral, dan sosial.

Cakupan anggota kelompok BKB ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih Pasangan usia Subur (PUS) untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok.

Tabel 2.161 Cakupan Anggota Kelompok BKB ber-KB di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan anggota Kelompok BKB ber-KB	94,40	86,40	85,90	87,60	87,57

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul 2022

Tabel 2.162 Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Kelompok Tribina Tahun 2022

Uraian	Jumlah sasaran	Jumlah anggota	Persentase
Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Kelompok Tribina	14.424	4.798	33,26

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul 2022

Kegiatan Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai ketahanan, kesejahteraan di dalam keluarga sehingga mewujudkan keluarga Berkualitas.

2.1.3.2.9 Perhubungan

a. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalannya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda.

Jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2018- 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: POLRES Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.44 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2018 hingga tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan, dan di tahun 2020 mengalami penurunan. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berpengaruh terhadap aktivitas warga berlalu lintas. Sebagai dampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengurangan kegiatan perkantoran, peniadaan kegiatan di lingkungan sekolah dan pengurangan aktivitas warga.

Pada tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah laka sebesar 494 kasus atau sebesar 26% dibandingkan kejadian tahun 2021. Jumlah korban meninggal terjadi penurunan dari 161 orang di tahun 2021 menjadi 156 orang di tahun 2022 (turun 3% dari tahun sebelumnya). Jumlah korban luka ringan pada tahun 2022 sebanyak 2850 naik sebesar 699 orang (32%) dibandingkan tahun 2021 sebesar 2151 orang.

Jika diambil rata-rata, pada tahun 2022 setiap hari hampir terjadi 7 kasus laka. Peningkatan jumlah kejadian laka sangat erat kaitannya dengan pelanggaran PPKM. Masyarakat seakan mengalami euforia setelah sekitar dua tahun dibatasi aktivitasnya. Detail profesi korban dan pelaku pada saat laka tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.163 Profesi Korban dan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2022

No	Uraian	2021		2022	
		Korban	Pelaku	Korban	Pelaku
1	PNS	70	62	79	85
2	TNI	4	2	4	3
3	POLRI	11	9	7	8
4	Karyawan	963	831	1.078	990
5	Pelajar	436	370	540	421
6	Mahasiswa	133	125	275	279
7	Pengemudi	5	8	14	15
8	Pedagang/Petani	68	42	81	48
9	Buruh	270	200	336	217
10	Lain-lain	167	113	285	160
Jumlah		2.127	1.762	2.699	2.226

Sumber: POLRES Kabupaten Bantul, 2023

Karyawan, pelajar, mahasiswa dan buruh menduduki peringkat atas baik sebagai korban maupun pelaku laka. Upaya untuk mengurangi angka kecelakaan harus ditingkatkan. Hal yang dapat ditempuh antara lain

menggalakkan sosialisasi *safety riding*, memberlakukan batas kecepatan kendaraan, melengkapi rambu-rambu lalu lintas, mengatur perjalanan agar tidak berada pada satu jam puncak (misalnya mengatur jam masuk anak sekolah agar tidak berada pada jam yang sama), harus ada upaya memperkecil kepadatan lalu-lintas dengan mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi dengan kendaraan angkutan umum.

Adapun Daerah rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul adalah Jalan Samas, Jalan Imogiri, Jalan Jogja Wonosari, dan Jalan Ringroad Timur yang merupakan jalan utama menuju pusat kegiatan/pelayanan. Upaya tindak lanjut untuk menangani daerah rawan kecelakaan tersebut adalah pemasangan *road water barrier*, pemasangan/perbaikan PJU, pemangkasan ranting pohon yang mengganggu, pemasangan *warning light* dan manajemen rekayasa lalu-lintas yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Regulasi dari pemerintah untuk meningkatkan keselamatan lalu-lintas terbit Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perpres ini diterbitkan karena dilatarbelakangi dengan peningkatan pergerakan manusia dan barang, yang berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi, terutama LLAJ. Program nasional KLLAJ terdiri atas lima pilar yang meliputi Manajemen Keselamatan Jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan berkeselamatan, serta perawatan korban pasca kecelakaan.

Tindak lanjut terhadap implementasi 5 (lima) Pilar dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan dengan Rencana Aksi sebagai berikut :

1. Rencana aksi Pilar I Manajemen Keselamatan Jalan yaitu:

Penyelarasan dan Koordinasi Keselamatan Jalan, Protokol kelalulintasan Kendaraan Darurat, Riset Keselamatan Jalan, *Surveillance Injury* dan Sistem Informasi Terpadu, Dana Keselamatan Jalan, Kemitraan Keselamatan Jalan, Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum dan Penyempurnaan Regulasi Keselamatan Jalan.

2. Rencana aksi pilar II jalan yang berkeselamatan yaitu:
Badan Jalan yang Berkeselamatan, Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan (termasuk perlengkapan jalan) yang berkeselamatan, Menyelenggarakan peningkatan standar kelaikan jalan yang berkeselamatan dan Lingkungan jalan yg berkeselamatan.
3. Rencana aksi pilar III kendaraan yang berkeselamatan yaitu:
Kepatuhan pengoperasian kendaraan, Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji Berkala dan Uji Tipe termasuk bagi Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam Keadaan Bukan Baru dan Modifikasi, Pembatasan kecepatan kendaraan, Penghapusan Kendaraan (*scrapping*), Penanganan Overloading dan Standar keselamatan kendaraan angkutan umum.
4. Rencana aksi dari pilar IV pengguna jalan yang berkeselamatan yaitu:
Pemeriksaan Kondisi Pengemudi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Uji SIM, Penyempurnaan Prosedur Uji SIM, Pembinaan Teknis Sekolah Mengemudi, Kampanye 5 faktor risiko utama plus (helm, sabuk keselamatan, speeding, mabuk, penggunaan Telepon seluler, pengguna jalan rentan), Penggunaan Elektronik Penegakan Hukum, Pendidikan Formal dan Informal Keselamatan Jalan dan Penanganan Terhadap 5 Faktor Risiko Utama Plus.
5. Rencana aksi dari pilar V perawatan pasca kecelakaan yaitu:
Sistem layanan gawat darurat terpadu, Sistem Komunikasi gawat darurat *one access code* (nomor darurat), Penjaminan korban kecelakaan yang dirawat di rumah sakit rujukan, Asuransi pihak ketiga, Pengalokasian sebagian premi asuransi untuk dana keselamatan jalan, Program rehabilitasi pasca kecelakaan, Riset penanganan kecelakaan dan Pendukung rencana aksi keselamatan jalan Indonesia.

b. Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas adalah rasio jumlah trayek dalam suatu wilayah berbanding dengan jumlah kebutuhan trayek pada wilayah tersebut. Rasio konektivitas Kabupaten Bantul pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.164 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2018

Uraian	2018
Jumlah Angkutan Darat	52.621
Jumlah Penumpang Angkutan Darat	610.895
Rasio Konektivitas (%) *	10,30

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2023

Keterangan :

*) Rumus :

$$\frac{JUMLAH\ ANGKUTAN\ DARAT}{JUMLAH\ PENUMPANG\ ANGKUTAN\ DARAT} \times 100\%$$

Rasio konektivitas Kabupaten Bantul pada tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.165 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah Trayek yang dilayani pada kabupaten	7	7	7	10
Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten	23	23	23	26
Bobot Trayek	1	1	1	1
Bobot Angkutan Jalan	100	100	100	100
Rasio Konektivitas (%)*	30,34	30,43	30,43	38,46

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2023

Keterangan :

*) Rumus :

$$\frac{JUMLAH\ TRAYEK\ YANG\ DILAYANI\ PADA\ KAB \times BOBOT\ TRAYEK}{JUMLAH\ KEBUTUHAN\ TRAYEK\ PADA\ KABUPATEN} \times BOBOT\ ANGKUTAN\ JALAN$$

c. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten

Kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometrik, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi eksisting maupun untuk kondisi desain (v/c ratio). Semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukkan semakin baik kinerja lalu lintas.

Persyaratan teknis jalan menetapkan bahwa untuk jalan arteri dan kolektor, jika derajat kejenuhan sudah mencapai 0,75, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya,

misalnya dengan menambah lajur jalan. Untuk jalan lokal, jika derajat kejenuhan sudah mencapai 0,90, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya.

Tabel 2.166 V/C Ratio Jalan Kabupaten

No	Jalan Kabupaten	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jalan Jend. Sudirman	-	-	0,38	0,43	0,45
2.	Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo	-	-	0,17	-	0,42
3.	Jalan Bantul	0,37	0,45	-	-	-
4.	Jalan Imogiri Barat	-	0,39	0,17	-	-
5.	Jl. KH. Wahid Hasyim	-	-	-	-	0,39
6.	Jl. Prof. Dr. Supomo, SH	-	-	-	-	0,42

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2023

d. Izin Trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kewenangan kabupaten adalah memberikan izin trayek untuk pedesaan. Izin trayek di Kabupaten Bantul dikeluarkan oleh Dinas Perijinan dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Jumlah izin trayek yang ada di Bantul tidak ada penambahan, tetap berjumlah 7 trayek yang tersebar di lima kapanewon yaitu: Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo, dan Kasihan.

Adapun 7 (tujuh) jalur trayek di Bantul adalah sebagai berikut:

1. Trayek Toyon-Goa Cerme-Imogiri-Jejeran-Terminal Giwangan-jl Pramuka-Karang Tunggal PP;
2. Trayek Dlingo-Terong-Pathuk-Piyungan-Ketandan-Rejowiangun-Terminal Giwangan PP;

3. Trayek Pantai Samas-Pabapang-Bantul-Dongkelan-Jokteng Kulon-Jokteng Wetan-Druwo-Terminal Giwangan PP;
4. Trayek Trisik-Brosot-Jokteng Kulon-Jokteng Wetan-Druwo-Terminal Giwangan PP;
5. Trayek Parangtritis-Pasar Gabusan-Druwo-Jokteng Wetan-Karangtunggal-Terminal Giwangan PP;
6. Trayek Pantai Baru-Bantul-Dongkelan-Jokteng Kulon-Jokteng Wetan-Druwo-Terminal Giwangan PP;
7. Trayek Srandakan-Palpapan-Bantul-Dongkelan-Jokteng Kulon-Tamansari PP.

e. Angkutan Darat

Angkutan Darat adalah jenis kegiatan ekonomi berupa pemberian/bisnis jasa angkutan/transportasi barang atau orang di darat, seperti yang dilakukan oleh perusahaan bus, taksi maupun kereta api. Angkutan darat yang terorganisir di Kabupaten Bantul berupa angkutan umum penumpang bus dan minibus.

Jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik angkudes, angkutan perbatasan maupun Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP). Penurunan jumlah pengguna angkutan umum karena saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding dengan angkutan umum akibat semakin mudahnya dalam memperoleh kendaraan pribadi (sepeda motor). Penggunaan angkutan umum sebagai sarana transportasi massal dapat mengurangi beban lalu lintas yang semakin padat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis dari Pemerintah Daerah sehingga masyarakat bersedia beralih menggunakan angkutan umum.

Kebijakan Kabupaten Bantul untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum antara lain:

1. Mengajukan usulan perluasan layanan transjogja dari terminal Palbapang-Ngabean dan sudah disetujui.
2. Mengusulkan perluasan layanan transjogja sampai terminal Imogiri (makam raja-raja).

3. Memberikan edukasi bagi masyarakat, dengan melakukan kajian layanan bus sekolah dan akan diuji coba tahun 2024.

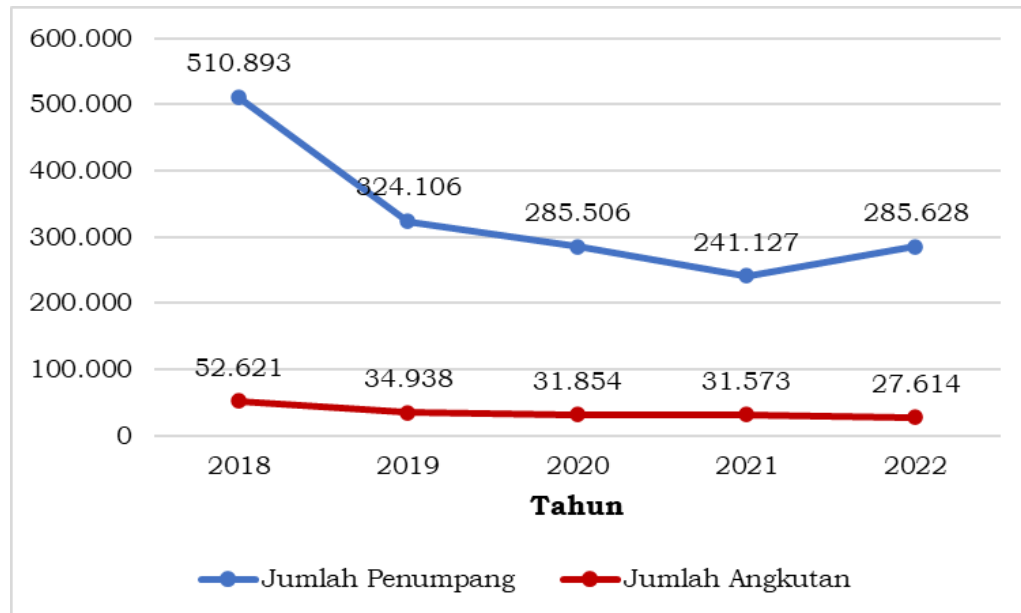
Tabel 2.167 Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum yang masih Beroperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Trayek	Jumlah Armada				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Angkudes					
1	Ps.Bantul-Imogiri	0	0	0	0	0
2	Ps.Bantul-Tugu Genthong	0	0	0	0	0
3	Ps.Bantul-Pundong	0	0	0	0	0
4	Ps.Bantul-Kretek	0	0	0	0	0
5	Ps.Imogiri-Dlingo (lewat Munthuk)	0	0	0	0	0
6	Ps.Imogiri-Dlingo (lewat Seropan)	0	0	0	0	0
7	Ps.Bantul-Pleret	0	0	0	0	0
8	Ps.Bantul-Krebet	0	0	0	0	0
9	Dlingo-Rejoinangun	0	0	0	0	0
10	Pajangan-Bantul-Pajangan	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0
	Angkutan Perbatasan					
1	Yogya- Parangtritis	21	15	15	15	15
2	Yogya- Samas	5	5	5	5	5
3	Yogya- Sorobayan	3	3	3	3	3
4	Yogya-Srandakan	3	2	2	2	2
5	Dlingo - Terminal Giwangan	14	13	13	13	13
6	Yogyakarta – Petoyan	15	6	6	6	6
7	Trisik – Giwangan	14	12	12	12	12
	Jumlah	75	56	56	56	56
	AKDP					
1	Yogya- Panggang GK	13	13	0	0	0
2	Yogya- Parangtritis	26	26	0	0	0
3	Yogya- Samas	14	14	0	0	0
4	Yogya- Pandansimo	13	13	0	0	0
5	Yogya- Wates	17	17	0	0	0
6	Yogya- Ngentakrejo	8	8	0	0	0
7	YIA - Palbapang - Makam Raja Imogiri	-	-	-	5	4
8	Malioboro - Parangtritis - Baron	-	-	-	-	2
9	Palbapang - Ngabean - Malioboro	-	-	-	-	10
	Jumlah	91	91	0	5	16

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2023

f. Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Bantul berupa armada bis angkutan umum dengan jumlah penumpang yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.45 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul
Tahun 2018-2022

Jumlah penumpang angkutan umum bus di Kabupaten Bantul dari tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Penurunan penggunaan angkutan umum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi tinggi, pelayanan angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan, jumlah angkutan umum berkurang, rute/trayek angkutan umum belum menjangkau wilayah, dan kondisi sarana dan prasarana angkutan umum buruk. Kabar baiknya antusiasme masyarakat terhadap angkutan trans jogja sangat tinggi, sehingga jumlah penumpang pada tahun 2022 meningkat.

Untuk mendukung rute Trans Jogja Palbapang-Malioboro Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan pembenahan di terminal Palbapang. Terminal Palbapang selain sebagai terminal tipe C juga menyediakan fasilitas *park and ride*. Masyarakat Bantul yang akan ke Malioboro dengan menggunakan kendaraan pribadi dapat memarkir kendarannya di terminal

Palbapang dan melanjutkan perjalanan dengan Trans Jogja. Pemda Bantul juga telah memasang rambu tempat pemberhentian Trans Jogja.

g. Uji KIR Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe dan uji berkala. Uji tipe merupakan pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, sedangkan uji berkala merupakan pengujian yang diwajibkan untuk mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul dilakukan enam bulan sekali oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis berdasarkan ketetapan oleh Menteri Perhubungan.

Tabel 2.168 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Uji kir kendaraan umum	17.458	19.131	11.762	12.978	12.210

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2023

Jumlah kendaraan wajib di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang melaksanakan kewajiban uji berkala mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji berkala antara lain disebabkan oleh:

- Pembatasan jumlah kendaraan yang dilayani akibat dari pencegahan penularan penyakit Covid-19.
- Sebagian kondisi alat uji dalam keadaan kurang maksimal dan sering trouble akibat usia alat uji.
- Tidak melaksanakan pelayanan uji berkala dalam kurun waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari pada tahun 2021 karena sedang dilakukan perawatan penggantian dan pemasangan alat uji berkala.

h. Terminal Bus

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Di Kabupaten Bantul terdapat empat terminal dengan kategori C, selain itu terdapat tiga lokasi pemungutan retribusi yaitu TPR Imogiri, TPR Piyungan, TPR Sedayu dan TPR Parangtritis. Selama kurun waktu 5 tahun tidak mengalami penambahan atau pengurangan jumlah lokasi terminal.

Sistem transportasi darat (sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Pasal 13 ayat 2) untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi:

- terminal penumpang tipe C di Kalurahan Palbapang Kapanewon Bantul;
- terminal penumpang tipe C di Kalurahan Imogiri Kapanewon Imogiri;
- terminal penumpang tipe C di Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek;
- terminal penumpang tipe C di Kapanewon Bambanglipuro;
- stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu.

Tabel 2.169 Pembangunan Halte 2017- 2021

2017	2018	2019	2020	2021
Halte Pasar Barongan	Halte Kasongan	Halte SMPN 1 Sewon	Halte Jigudan	Halte Depan Mess Persiba
Halte SMAN 1 Bantul	Halte Palbapang	Halte Pasar Angkrusari	Halte Pasar Hewan Pandak	Halte Depan Pasar Niten
Halte SMPN 1 Pandak	Halte Depan SMP 2 Bantul	Halte SMA N 1 Bambanglipuro	Halte Jejeran	
Halte Sapuangin	Halte dua Depan SMU Muhammadiyah Bantul (MUHIBA)	Halte SMAN 1 Sewon	Halte SMK N 1 Pleret	
Halte Srandakan				

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 Dinas perhubungan tidak membangun halte permanen sehingga tidak ada halte di tahun 2022. Adanya trans jogja ada penambahan beberapa halte *portable* yang merupakan hibah dari DIY.

i. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS)

Terminal Imogiri merupakan terminal Tipe C yang berada di Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Terminal yang berada pada Satuan Ruang Strategis Kawasan Pantai Samas-Parangtritis adalah Terminal Parangtritis dan Terminal Samas.

Tabel 2.170 Aktivitas di Terminal yang berada di Satuan Ruang Strategis Tahun 2021- 2022

No	Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS)	Terminal	Jumlah Angkutan		Jumlah Penumpang	
			Tahun		Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	Satuan Ruang Strategis Kawasan Pantai Samas-Parangtritis	Parangtritis	10.518	8.982	87.560	88.190
		Samas	5.386	906	44.565	2.952
2	Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram Di Imogiri.	Imogiri	2.154	3.988	8.901	35.990

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 terdapat kenaikan jumlah penumpang yang cukup tinggi di terminal Imogiri namun di Samas terjadi penurunan jumlah penumpang yang sebanding dengan penurunan jumlah angkutan.

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi, maka perlu dilakukan modernisasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TIK). Sistem ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat pula, namun permasalahannya sejauh ini masing-masing Perangkat Daerah membangun aplikasi pemerintahannya sendiri sendiri, dalam arti implementasi sistem informasi pemerintahan masih belum terintegrasi. Kondisi ini tidak sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE agar SPBE menjadi terpadu sehingga tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah.

1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai salah satu aktor penerapan SPBE juga terus menerus melakukan upaya meningkatkan indeks SPBE yang dimiliki. Berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government, disebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara nasional yang dikenal dengan sebutan SPBE.

Penilaian Pemerintah Kab. Bantul tahun 2021 dengan menggunakan instrumen penilaian terbaru, yaitu menggunakan instrumen penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menggunakan 4 Domain, 8 Aspek, 47 Indikator, dimana terdapat 23 Indikator baru. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam paragraf Tujuan Pengembangan SPBE yang diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu:

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Pemerintah Kabupaten Bantul pun terus berbenah, terus bertekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hingga akhirnya di tahun 2021 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Keputusan Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, dimana Indeks SPBE

Kabupaten Bantul mendapatkan angka 3,62 dengan predikat **Sangat Baik**, dimana angka ini adalah tertinggi pada tingkat kabupaten/kota se Indonesia.

Tabel 2.171 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks SPBE	1,84 (cukup)	3,24 (baik)	3,24 (baik)	3,62 (sangat baik)	3,62 (sangat baik)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, indeks SPBE Kabupaten Bantul mencapai 3,62 (sangat baik) dari skala 5. Ini menunjukkan peningkatan signifikan yakni, 0,38 dari indeks sebelumnya yaitu 3.24 (baik) pada tahun 2019, dan di tahun 2018 indeks SPBE sebesar 1,84 (cukup). Pada tahun 2022 nilai indeks SPBE masih sama 3,62 karena Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 tahun sekali sehingga pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mengikuti evaluasi. Evaluasi SPBE hanya wajib diikuti oleh Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang memiliki indeks SPBE kurang dari 2,6 sehingga tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul menggunakan indeks tahun 2021 yaitu 3,62 dengan predikat sangat baik. Adapun upaya monitoring Dan evaluasi terhadap implementasi SPBE di tahun 2022 dilakukan dengan melakukan koordinasi seluruh anggota Tim Koordinasi SPBE, reviu terhadap berbagai kebijakan internal terkait Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK), perbaikan terhadap layanan SPBE baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan serta penyusunan prosedur-prosedur manajemen SPBE.

2) Nilai Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB melakukan penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan dan implementasi Teknologi Informasi melalui Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian aspek tata kelola SPBE meliputi :

1. Perencanaan strategis, dengan indikator:
 - a. Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - c. Rencana dan anggaran SPBE
 - d. Inovasi proses bisnis SPBE
2. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator:
 - a. Pembangunan aplikasi SPBE
 - b. Layanan Pusat Data
 - c. Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
 - d. Penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah
3. Penyelenggaraan SPBE, dengan indikator:
 - a. Tim koordinasi instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Kolaborasi penerapan SPBE

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana salah satu indikator kinerja sasaran strategisnya adalah penilaian Indeks SPBE oleh KemenPAN RB sebagai dasar untuk Penerapan SPBE Pemkab Bantul, dengan hasil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.172 Nilai Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Tatakelola SPBE	1,57	2,71	2,71	2,9	2,9

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, Nilai Tatakelola SPBE pada indeks SPBE Kabupaten Bantul mencapai 2,9 dari skala 5 . Ini menunjukkan peningkatan yakni, 0,19 dari indeks sebelumnya yaitu 2.71 pada tahun 2019, dan di tahun 2018 Nilai Tatakelola SPBE pada indeks SPBE sebesar 1,57. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 tahun sekali sehingga

pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mengikuti evaluasi dan menggunakan Nilai Tatakelola SPBE pada indeks SPBE Kabupaten Bantul yang sama dengan tahun sebelumnya.

b. Keterbukaan Informasi Publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Pada Tahun 2020 Komisi Informasi Daerah (KID) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di DIY beberapa tokoh pegiat keterbukaan informasi publik dari beberapa instansi di luar KID DIY baik dari lembaga perguruan tinggi (Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Program Studi Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, dan Klinik Keterbukaan Informasi Universitas Islam Indonesia), dari lembaga penelitian (Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP), dan juga dari Civil Society Organization/CSO (IDEA Yogyakarta, Masyarakat Peduli Media, dan Combine Resource Institution). Dari instansi yang dimaksud kemudian melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik, dengan demikian seluruh badan publik akan mengetahui hasil monitoring dan evaluasi terhadap badan publik tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerjanya pada masa-masa mendatang. Tahapan penilaian dan bobotnya untuk melakukan pemeringkatan meliputi:

Tabel 2.173 Tahapan Penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik

No.	Tahapan	Bobot
1.	Self Assesment Questionnaire (SAQ)	30%
2.	Verifikasi Website	35%
3.	Uji Akses	35%

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2023

Uji akses tahun ini dilakukan dengan melakukan permohonan informasi publik secara riil kepada Badan Publik melalui email yang dicantumkan dalam SAQ. Setelah semua tahapan penilaian selesai akan diperoleh nilai dan peringkat keterbukaan informasi Badan Publik dengan kualifikasi sebagai berikut

Tabel 2.174 Kualifikasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

No.	Kualifikasi	Range Nilai
1.	Informatif	90 - 100
2.	Menuju Informatif	80 - 89
3.	Cukup Informatif	60 - 79
4.	Kurang Informatif	40 - 59
5.	Tidak Informatif	< 40

Sumber : KID D.I.Yogyakarta, 2023

Berdasarkan hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta, berikut daftar badan publik yang sudah termasuk kualifikasi “Informatif”.

Tabel 2.175 Badan Publik Informatif Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

No	2020		2021		2022	
	Nama Badan Publik	Nilai	Nama Badan Publik	Nilai	Nama Badan Publik	Nilai
1.	Pemerintah Kabupaten Bantul	92,84	Pemerintah Kabupaten Bantul	98,14	Pemerintah Kabupaten Bantul	96,97
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	98,62	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	98,38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96,91	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100
4.	Dinas Perdagangan	98,26	Dinas Perdagangan	96,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	93,66	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan masyarakat dan Desa	95,85	Dinas Kesehatan	99,07
6.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	93,14	Dinas Komunikasi dan Informatika	94,86	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	98,83

No	2020		2021		2022	
	Nama Badan Publik	Nilai	Nama Badan Publik	Nilai	Nama Badan Publik	Nilai
7.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	92,97	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	93,57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	98,83
8.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan masyarakat dan Desa	90,63	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	93,45	Kapanewon Piyungan	98,60
9.			Kapanewon Pajangan	91,85	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	97,90
10.			Badan Keuangan dan Aset Daerah	91,59	Dinas Komunikasi dan Informatika	97,90
11.					Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	97,67
12.					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	97,67
13.					Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	97,43
14.					Dinas Sosial	97,43
15.					Kapanewon Srandakan	97,20
16.					Pemerintah Kabupaten Bantul	96,97
17.					Dinas Kebudayaan	96,03
18.					Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	96,03
19.					Dinas Lingkungan Hidup	95,80
20.					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	95,57
21.					Kapanewon Sewon	94,87
22.					Bagian Perencanaan dan Keuangan	94,17
23.					Kapanewon Dlingo	93,73
24.					Kapanewon Jetis	93,70
25.					Kapanewon Kasihan	93,27
26.					Kapanewon Bambanglipuro	91,87
27.					Kapanewon Sanden	91,83
28.					Dinas Pariwisata	91,83

No	2020		2021		2022	
	Nama Badan Publik	Nilai	Nama Badan Publik	Nilai	Nama Badan Publik	Nilai
29.					Kapanewon Bantul	91,77
30.					Kapanewon Sedayu	90,70
31.					PT. BPR Bank Bantul	90,20

Sumber: KID D.I.Yogyakarta , 2023

Terdapat peningkatan jumlah badan publik yang memperoleh kategori kualifikasi informatif. Pada tahun 2020 hanya ada 8, tahun 2021 meningkat menjadi 10 dan 2022 meningkat pesat menjadi 30 badan publik.

Pada periode 2020-2022 nilai capaian keterbukaan informasi publik menurun di semua Kabupaten/Kota. Nilai Kabupaten Bantul tertinggi di DIY. Hal tersebut karena banyak perubahan variabel yang dinilai dan harus mengakomodir penyandang disabilitas, sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pada tabel di bawah ini ditampilkan daftar badan publik yang sudah memperoleh kualifikasi “Menuju Informatif”.

Tabel 2.176 Badan Publik Menuju Informatif Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

No	2020		2021		2022	
	Nama Badan Publik	Nilai	Nama Badan Publik	Nilai	Nama Badan Publik	Nilai
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	89,90	Dinas Kebudayaan	89,57	Kapanewon Pandak	89,53
2	RSUD Panembahan Senopati	88,23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	89,39	Dinas Perhubungan	89,27
3	Dinas Pariwisata	87,13	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	89,34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89,34
4	Satuan Polisi Pamong Praja	85,22	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	88,95	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	88,80
5	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	83,90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	87,20	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	86,03
6	Dinas Perhubungan	81,42	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85,45	Kapanewon Imogiri	86,03
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80,88	Dinas Pariwisata	84,81	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85,33
8	Kapanewon Pajangan	80,59	RSUD Panembahan Senopati	84,02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	83

No	2020		2021		2022	
	Nama Badan Publik	Nilai	Nama Badan Publik	Nilai	Nama Badan Publik	Nilai
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80,25	Bagian Hukum	81,89	Kapanewon Banguntapan	81,37
10			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81,56	Satuan Polisi Pamong Praja	81,07
11			Kapanewon Sedayu	80,99	Kapanewon Kretek	80,20

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 terdapat 11 badan publik yang berstatus menuju informatif. Badan publik yang mendapatkan kategori menuju informatif di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami penurunan karena adanya peningkatan peringkat ke kategori informatif.

c. Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik

Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah memberi gambaran seberapa pentingnya perangkat daerah 9 harus melaksanakan evaluasi terhadap kinerjanya. Melalui kegiatan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berharap dapat membantu mendukung secara konkret evaluasi terhadap pelaksanaan penyebaran penyelenggaraan informasi di Kabupaten Bantul. Keterbukaan Informasi saat ini menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi, partisipatif, akuntabilitas dan berkesinambungan menjadi nilai utama dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur Organisasi Publik untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, yang merupakan salah satu Kabupaten yang telah memiliki Perda yang mengatur tentang transparansi informasi sebelum adanya UU KIP, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik.

Hasil analisis terhadap penilaian Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul melalui kuesioner yang sudah disebar kepada responden menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.177 Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	75,33	78,56	83,03	83,77	83,81

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2023

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik (Nilai Interval Konversi) pada tahun 2022 sebesar 83,81 yang artinya Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berkategori “BAIK”. Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik tahun 2021, maka nilai Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik tahun 2022 mengalami kenaikan 0,04 dari nilai 83,77 menjadi 83,81. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

d. Nilai Indeks Pembangunan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi)

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan TIK suatu wilayah pada suatu waktu. Selain itu, IP-TIK dapat mengukur kesenjangan digital serta menginformasikan potensi dalam rangka pembangunan TIK. Beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu :

1. infrastruktur Jaringan internet/intranet,
2. penyediaan *Bandwidth*,
3. penyediaan frekuensi radio,
4. *Disaster Recovery Center* (DRC),
5. Data Center dan Command Center.

Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana komunikasi dan informasi tersebut disiapkan guna memfasilitasi pelayanan dan transaksi elektronik di Perangkat Daerah, maupun pelayanan publik lainnya.

IP-TIK merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan TIK suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan potensi dan progress pembangunan TIK suatu wilayah lebih optimum

Jumlah titik sambung jaringan internet Kabupaten Bantul hingga saat ini meliputi 282 titik. Dari jumlah tersebut 126 titik telah menggunakan jaringan *fiber optic (FO)* dan 156 titik lainnya menggunakan radio *wireless*. Guna melayani penggunaan internet, telah dialokasikan *bandwidth* 500 MB.

Tabel 2.178 Jumlah titik sambung jaringan internet Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Instansi	Jenis Koneksi	
		<i>Fiber Optic</i>	<i>Wide Area Network (WAN)</i>
1.	Perangkat Daerah	25	0
2.	Kapanewon	17	0
3.	Puskesmas	24	4
4.	UPT/Unit Kerja Lainnya	9	25
5.	Kalurahan	27	48
6.	Sekolah (SDN/SMPN)	5	38
7.	Lain - Lainnya	19	41
Jumlah		126	156

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat 4 Puskesmas dan 48 Kalurahan yang belum terkoneksi *fiber optic* di Kabupaten Bantul. Panjang sambungan *fiber optic* pada tahun 2022 sepanjang 244,5 km meningkat dari tahun 2021 sepanjang 226,99 km.

e. Media Informasi

1) Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat kabar merupakan penerbitan yang berupa lembaran yang berisi berita-berita karangan, iklan yang dicetak dan diterbitkan secara tetap atau periodik dan untuk dijual kepada umum. Lingkup berita dapat menyangkut berita internasional, nasional, maupun berita daerah (lokal). Fungsi dari surat kabar itu sendiri adalah untuk memberikan informasi yang beragam bagi masyarakat luas.

Tabel berikut menunjukkan jumlah jenis surat kabar terbitan lokal maupun nasional yang ada di wilayah kabupaten Bantul.

Tabel 2.179 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	4	4	4	4	4
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	6	6	6	6	6
3	Total jenis surat kabar	10	10	10	10	10

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah jenis surat kabar, baik terbitan lokal maupun nasional yang masuk ke Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun cenderung konstan, dengan total jenis surat kabar sekitar sepuluh jenis.

Selanjutnya selain memanfaatkan bahan referensi surat kabar, pemerintah Kabupaten Bantul juga menerbitkan Buletin Sejada. Pada tahun 2021, Buletin Sejada diubah menjadi versi ebook dengan nama e-Sejada yang diunggah pada laman bantulkab.go.id dan berbagai macam platform digital penyebaran ebook yang ada. Tujuan utama dari penerbitan buletin ini selain sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, juga sebagai sarana untuk mensosialisasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memahami program kerja dan kegiatan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan.

Penerbitan buletin ini dilakukan 12 kali/edisi dalam setiap tahunnya. Adapun kendala yang dihadapi adalah dengan tidak adanya versi cetak dari Buletin Sajada ini, tidak dapat menjangkau masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas online dalam kesehariannya.

2) Media Siber/Online

Publikasi penyelenggaraan Pemerintah dituntut untuk lebih inovatif, kreatif, dan persuasif dalam menjalankan perannya, terutama dalam memberikan pelayanan penyebarluasan informasi (diseminasi) melalui media. Pemerintah dituntut untuk menyampaikan informasi mengenai program-program, kebijakan, realisasi kinerjanya secara terbuka, transparan, juga akuntabel. Pola komunikasi yang diusung dua arah,

komunikatif, melibatkan dan menuntut peran aktif masyarakat secara langsung. Dengan perkembangan teknologi dan ditambah situasi Pandemi Covid sejak 2019, Pemerintah Kabupaten Bantul semakin intensif dalam memaksimalkan peran media siber/online. Secara waktu penggunaan Media siber/online lebih efektif, dari anggaran lebih efisien dan maksimal bisa menjangkau langsung, cepat, dan mudah ke seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah bisa memaksimalkan perannya melalui media siber/online dan itu memungkinkan pemerintah bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Baik menginformasikan kebijakan yang akan berlaku, maupun memberikan informasi penting dan cepat. Selain itu akses langsung publik secara online kepada pemerintah menjadi faktor pendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan transparan. Publikasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah kabupaten bantul dapat diakses melalui resmi Beranda - Website Pemerintah Kabupaten Bantul (bantulkab.go.id). Selain menggunakan media website, penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah kabupaten bantul juga dipublikasi menggunakan media sosial resmi Pemkab Bantul seperti Facebook, Instagram, twitter dan youtube dengan link <https://youtu.be/KOimhIvPWH4>. peningkatan jumlah follower media social resmi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.180 *Follower Media Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022*

No	Social Media	2018	2019	2020	2021	2022
1	Facebook	7.202	10.160	172.549	175.347	175.152
2	Instagram	1.108	4.034	44.200	64.722	89.724
3	Twitter	183	955	7863	10.311	11.614
4	youtube	260	913	5.030	19.201	25.602

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2022

Dalam pemanfaatan media sosial, pemerintah kabupaten bantul bertujuan menyimak, untuk memahami dan menyerap aspirasi kebutuhan masyarakat, berbicara, dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pesan dan informasi, serta Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses diseminasi informasi dan komunikasi.

3) Penyiaran Radio/TV

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat adalah melalui dialog interaktif berupa penyiaran di radio ataupun televisi. Tujuan kegiatan ini adalah agar program kerja dan kebijakan pemerintah tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Penyiaran di radio dilakukan bekerjasama dengan Radio Bantul, Radio Sonora, Radio Persatuan, dan RRI, sementara penyiaran televisi bekerjasama dengan TVRI dalam acara Taman Gabusan dan Saba Desa serta RB TV untuk Program Leyeh-leyeh. Model siaran adalah *talkshow* dengan dialog interaktif dengan pemirsa di luar studio.

4) Website Milik Pemerintah Daerah

Keberadaan website milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki satu website utama dengan alamat <http://www.bantulkab.go.id>, dengan 33 subdomain yang terdiri dari 32 subdomain untuk SKPD dan 1 subdomain untuk produk hukum Kabupaten Bantul. Website dan subdomain yang terdapat di perangkat daerah, kalurahan ataupun lembaga diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Koperasi

1) Koperasi Berbadan Hukum

Pada tanggal 21 Juni 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi. Peraturan Menteri ini mengalihkan kewenangan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan berwenang melakukan pengawasan terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Adapun koperasi yang menjadi kewenangan pembinaan dan pengawasan Kabupaten Bantul adalah Koperasi Berbadan Hukum.

Tabel 2.181 Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Kapanewon	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kasihani	28	28	27	27	26
2	Sewon	43	42	44	44	45
3	Banguntapan	25	25	24	24	24
4	Pundong	8	9	9	8	8
5	Dlingo	16	16	16	17	17
6	Piyungan	17	16	17	16	16
7	Pajangan	8	8	8	8	8
8	Bantul	69	69	70	71	72
9	Srandakan	10	11	11	11	11
10	Pandak	13	13	14	15	15
11	Imogiri	24	25	25	28	30
12	Sanden	19	19	19	19	18
13	Kretek	10	10	10	10	9
14	Sedayu	15	15	15	15	16
15	Jetis	17	18	17	17	17
16	Pleret	10	10	10	10	11
17	Bambanglipuro	15	15	15	15	15
Jumlah		347	349	351	355	358

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022, jumlah koperasi berbadan hukum di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan menjadi 358 koperasi. Terdapat penambahan 3 (tiga) koperasi berbadan hukum dibanding tahun 2021. Perubahan jumlah koperasi berbadan hukum dikarenakan adanya penambahan 6 (enam) koperasi baru dan berkurang 3 (tiga) koperasi karena pindah pembinaan ke Dinas Koperasi dan UKM DIY.

Koperasi menurut bentuknya dibagi menjadi 2, koperasi primer dan koperasi sekunder. Jumlah koperasi menurut bentuknya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.182 Jumlah Koperasi Menurut Bentuk Koperasi Tahun 2018-2022

No	Bentuk Koperasi	2018	2019	2020	2021	2022
1	Koperasi Primer	344	346	348	351	354
2	Koperasi Sekunder	3	3	3	4	4
Jumlah		347	349	351	355	358

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022, terdapat penambahan sejumlah 6 (enam) koperasi primer baru di Kabupaten Bantul dan berkurang 3 (tiga) koperasi karena pindah pembinaan ke Dinas Koperasi dan UKM DIY.

Koperasi menurut jenisnya dibagi menjadi 5, yaitu koperasi simpan pinjam, produsen, konsumen, jasa dan pemasaran. Jumlah koperasi menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.183 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Tahun 2018-2022

No	Jenis Koperasi	2018	2019	2020			2021			2022		
				Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total
1	Koperasi Simpan Pinjam	122	121	107	14	121	107	15	122	97	24	121
2	Koperasi Produsen	40	40	35	5	40	36	5	41	36	8	44
3	Koperasi Konsumen	148	150	118	32	150	117	31	148	105	43	148
4	Koperasi Jasa	34	35	36	1	37	38	2	40	35	6	41
5	Koperasi Pemasaran	3	3	3	0	3	3	1	4	3	1	4
Jumlah		347	349	299	52	351	301	54	355	276	82	358

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 jumlah Koperasi Simpan Pinjam bertambah 1 Koperasi baru namun berkurang 2 karena pindah pembinaan ke tingkat Provinsi, jumlah Koperasi Produsen bertambah 3 Koperasi, jumlah Koperasi Konsumen tetap dikarenakan adanya penambahan 1 koperasi baru namun berkurang 1 Koperasi karena pindah pembinaan ke tingkat Provinsi, jumlah

koperasi Jasa bertambah 1 koperasi dan jumlah koperasi pemasaran tidak mengalami perubahan.

2) Penerbitan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Perizinan berusaha berbasis risiko sektor koperasi dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* dengan mengakses *www.oss.go.id* berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi.

OSS-RBA merupakan transformasi dari OSS versi 1.1 seiring disahkannya UU No. 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diimplementasikan melalui PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam memiliki tingkat resiko tinggi sehingga terhadap pemohon perizinan berusaha diberlakukan Nomor Induk Berusaha dan pemenuhan izin.

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi atas pemenuhan izin simpan pinjam, persetujuan kantor cabang (KC), kantor cabang pembantu (KCP), dan kantor kas. Adapun penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi yang terbit selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.184 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Terbit Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Izin Usaha Simpan Pinjam	-	-	-	1	2
Persetujuan Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor Kas	-	-	1	1	-

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

Adapun penerbitan izin usaha simpan pinjam di Kabupaten Bantul selama tahun 2018-2022 belum optimal, dikarenakan adanya beberapa kendala, antara lain:

- a. Masih rendahnya kesadaran pentingnya izin simpan pinjam bagi koperasi,
- b. Persyaratan izin simpan pinjam yang sulit dipenuhi oleh koperasi, yaitu nomor AHU (Administrasi Hukum Umum) dan NPWP koperasi,
- c. Belum terintegrasinya Online Data System (ODS) pada Kementerian Koperasi dan UKM ke dalam sistem badan hukum Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- d. Diterbitkannya moratorium pelaksanaan perizinan usaha simpan pinjam koperasi (pada tahun 2020, 2022, dan 2023).

3) Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Pengawasan dan pemeriksaan koperasi dilakukan terhadap seluruh koperasi di Kabupaten Bantul dengan aktivitas utama pemberian Penghargaan Koperasi kepada 10 koperasi berdasarkan kategori jenis koperasi dengan hasil dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.185 Penghargaan Koperasi kepada 10 Koperasi Berdasarkan Kategori Jenis Koperasi Tahun 2019 – 2022

Kategori	2019	2020	2021	2022
Koperasi Simpan Pinjam	✓ KSPPS BMT Ad Da'wah ✓ Kopdit Amrih Makmur ✓ Kopwan Annisa	✓ KSP CU Tyas Manunggal ✓ KSPPS BMT Mitra Usaha Ummat ✓ KSPPS BMT Mitrama	✓ KSP CU Tyas Manunggal 1 ✓ KSPPS BMT Mojo Bangun Sentosa ✓ KSPPS An-Nahdlah	✓ KSPPS An-Nahdlah ✓ KSP CU Tyas Manunggal ✓ KSPPS BMT El Bummi 373
Koperasi Konsumen	✓ Kopkar Mitra Husada ✓ Primkoppol Tresno ✓ Kopkar Amanah Sejahtera	✓ Kopkar dan Pensiunan Bina Usaha ✓ Kopkar Mitra Husada ✓ KPRI Bina Sejahtera	✓ Primkop TNI Angkatan Darat B-07 ✓ Koperasi Konsumen KPRI Adil Makmur Sejahtera ✓ KPRI Kompag	✓ Koperasi Konsumen KPRI Adil Makmur Sejahtera ✓ Koperasi Karyawan Karya Mulia Mandiri ✓ Koperasi Karyawan Sejahtera
Koperasi Produsen	✓ Kopwan Suka Maju	✓ Koperasi Wanita Jati	✓ Koperasi Wanita	✓ Koperasi Wanita Jati

Kategori	2019	2020	2021	2022
	✓ Kop Kasongan Usaha Bersama ✓ Kopwan Jati Husada Mulya Mandiri	Husada Mulya Mandiri ✓ Koperasi Industri Setya Bawana	Jati Husada Mulya Mandiri ✓ Koperasi Kasongan Usaha Bersama	Husada Mulya Mandiri ✓ Koperasi Kasongan Usaha Bersama ✓
Koperasi Jasa	✓ Kopkar Karlisna ✓ Koperasi Wisata Mina Bahari 45 ✓ Koperasi Jasa Noto Wono	✓ Koperasi Wisata Mina Bahari 45 ✓ Koperasi Karlisna	✓ Koperasi Wisata Mina Bahari 45 ✓ Koperasi Jasa Noto Wono	✓ Koperasi Wisata Mina Bahari 45 ✓ Koperasi Jasa Noto Wono

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2023

4) Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi dilaksanakan pada koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah dan Unit Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Pola Syariah dengan hasil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.186 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Tahun Tutup Buku 2021-2022

No	Jenis Koperasi	Tahun 2021					Tahun 2022				
		Sehat	Cukup Sehat	Dalam Pengawasan	Dalam Pengawasan Khusus	Jumlah	Sehat	Cukup Sehat	Dalam Pengawasan	Dalam Pengawasan Khusus	Jumlah
1	Koperasi Simpan Pinjam	16	32	1	0	49	14	32	1	0	47
2	Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah	14	15	1	0	30	11	14	1	0	26
3	Unit Simpan Pinjam Operasi	50	50	0	0	100	11	85	0	0	96
4	Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Koperasi	0	3	0	0	3	0	3	0	0	3
	Jumlah	80	100	2	0	182	36	134	2	0	172

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Jumlah pemeriksaan kesehatan koperasi dengan usaha simpan pinjam di tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2021 pemeriksaan Kesehatan koperasi dengan cara daring sehingga jangkauan koperasi yang diperiksa lebih banyak tetapi kualitas

pembinaan kurang, dimana berkas-berkas administrasi tidak dapat diperiksa keseluruhannya.

Pemeriksaan kesehatan koperasi tahun 2022 merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi untuk Tutup Buku 2021.

5) Pelatihan Koperasi

Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian menjadi salah satu urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian dilaksanakan dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas yang mana nantinya akan tercipta kinerja koperasi yang baik dan dapat bersaing. Adapun sasaran pendidikan dan pelatihan perkoperasian adalah SDM Koperasi baik Pengurus, Pengawas, Pengelola maupun anggota.

Pada tahun 2019 sampai dengan 2022 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul disamping melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian menggunakan dana APBD juga didukung adanya Dana Alokasi (DAK) Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.

Data sasaran pendidikan dan pelatihan perkoperasian selama tahun 2019- 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.187 Sasaran Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Tahun 2019- 2022

Uraian	Peserta				Keterangan
	2019	2020	2021	2022	
Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	300	270	60	60	APBD
Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	155	155	150	135	DAK PK2UMK
Total	455	425	210	195	

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2023

6) Kualitas Koperasi

Koperasi yang berkualitas diartikan sebagai koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan aset. Ukuran koperasi berkualitas ini ditentukan oleh 3 unsur yang saling berkaitan yaitu:

- Melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) berturut-turut selama 3 tahun terakhir,
- Meningkat volume usahanya, dan
- Meningkat asetnya.

Meningkatnya koperasi yang berkualitas diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas. Pengukuran dilakukan dengan Prosentase Jumlah Koperasi aktif yang berkualitas tahun n – jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun $n-1$ dibagi jumlah koperasi aktif tahun $n \times 100\%$.

Tabel 2.188 Keragaan Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Koperasi	347	349	351	355	358
Jumlah Koperasi Aktif			299	301	276
Anggota (orang)	160.921	160.658	142.908	128.372	155.556
Modal Sendiri (Rupiah)	246.042.269.333	258.292.291.608	331.476.874.701	281.002.247.587	244.301.397.591
Asset (Rupiah)	617.619.689.468	668.640.593.563	652.360.678.099	648.066.589.660	703.262.572.821
Volume Usaha (Rupiah)	421.499.538.845	459.346.775.492	429.146.007.088	395.239.478.408	443.998.019.817
Jumlah Karyawan (orang)	975	843	693	654	611
Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	-	-	-	-5.35	3.65

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Tabel 2.189 Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset Tahun 2020 - 2022

Tahun	Jumlah Seluruh Koperasi (unit)	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya (unit)	Koperasi yang meningkatkan kualitasnya (%)	Peningkatan Koperasi yang meningkatkan Kualitasnya (%)
2020	351	299	121	40,46	-
2021	355	299	105	35,11	-5,35
2022	358	276	107	38,76	3,65

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Pada tahun 2021 terdapat penurunan kualitas koperasi dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan turunnya jumlah koperasi yang menyelenggarakan RAT, volume usaha dan aset koperasi juga banyak yang mengalami penurunan. *Covid-19* juga membawa dampak bagi usaha anggota koperasi yang pada akhirnya mempengaruhi kepercayaan koperasi memberikan pinjaman ke anggota, dampak lainnya simpanan anggota banyak yang diambil berakibat pada penurunan aset koperasi.

Dari data koperasi di Kabupaten Bantul tahun 2022 terdapat koperasi sebanyak 358 koperasi dan jumlah koperasi aktif sebanyak 276 koperasi. Dari jumlah koperasi aktif pada tahun 2022, terdapat jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan 3 ukuran tersebut sebanyak 107 koperasi. Apabila dibandingkan tahun 2021, maka jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya meningkat 3,65% atau terdapat peningkatan 2 koperasi yang meningkat kualitasnya.

b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1) Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perkembangan UKM di Kabupaten Bantul menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian. Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.190 Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Usaha Mikro	28.384	29.098	30.486	86.361	85.099
2.	Usaha Kecil	11.768	11.992	12.201	-	1.674
3.	Usaha Menengah	6.991	7.058	7.114	-	60
Jumlah		47.143	48.148	49.801	86.361	86.833

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro-Kecil dan Menengah (UMKM) dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Kriteria Usaha Mikro berubah dari modal usaha atau kekayaan bersih sebesar 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan menjadi modal usaha sampai dengan 1 milyar rupiah di luar tanah dan

bangunan. Sedangkan hasil penjualan tahunan menurut UU NO. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sampai dengan 300 juta rupiah menjadi hasil penjualan tahunan sampai dengan 2 milyar rupiah.

Dengan adanya perubahan kriteria usaha mikro tersebut, perlu dilakukan updating data usaha mikro di Kabupaten Bantul. Namun karena pada tahun 2021 belum dilaksanakan updating data, maka data usaha mikro tahun 2021 masih dalam bentuk total UMKM dan belum sesuai dengan kriteria/klasifikasi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro-Kecil dan Menengah (UMKM). *Updating* data baru dapat dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga data pada tahun 2022 telah sesuai dengan klasifikasi UMKM yang baru. Pada tahun 2022 total UMKM 86.828 dengan rincian jumlah usaha mikro 85.099 sedangkan jumlah usaha kecil 1.674 dan usaha menengah adalah 60.

Tabel 2.191 Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Usaha Mikro	56.768	58.225	59.890	259.083	123.782
2.	Usaha Kecil	35.130	36.048	36.925	-	31.431
3.	Usaha Menengah	111.856	112.977	113.884	-	72.932
Jumlah		203.754	207.250	210.699	259.083	228.145

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Tabel di atas menunjukkan adanya kecenderungan semakin meningkatnya penyerapan tenaga kerja, seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM. Tahun 2021 data jumlah tenaga kerja terjadi lonjakan sebanyak 22,9%, hal ini dikarenakan adanya input data kedalam aplikasi SIDAKUI secara mandiri oleh pelaku usaha yang belum dilakukan verifikasi oleh admin SIDAKUI. Tahun 2022 data tenaga kerja diambil dari data BPS yang telah diolah dan disandingkan dengan SIDAKUI.

2) Perizinan UMKM

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha

mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Dengan adanya ketentuan baru maka IUMK sudah tidak berlaku dan digantikan dengan NIB.

Tabel 2.192 Data Penerbitan IUMK di Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2016	4.674	IUMK
2	2017	2.749	IUMK
3	2018	4.996	IUMK
4	2019	6.864	IUMK
5	2020	-	OSS
Jumlah		23.814	NIB

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Dengan adanya kebijakan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS), mulai tahun 2020 pelaku usaha mikro kecil harus mengajukan IUMK melalui OSS. Pengajuan IUMK melalui OSS dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Namun data jumlah usaha mikro kecil yang mengajukan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) melalui OSS tidak dapat terlihat, dikarenakan aplikasi OSS belum mendukung penyajian data per wilayah di Indonesia, sehingga data jumlah IUMK pada tahun 2020 dan 2021 tidak dapat disajikan.

Dengan adanya kebijakan perizinan melalui OSS, mulai tahun 2020 pelaku usaha mikro kecil harus mengajukan IUMK melalui OSS. Pengajuan IUMK melalui OSS dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Namun data jumlah usaha mikro kecil yang mengajukan IUMK melalui OSS tidak dapat terlihat, dikarenakan aplikasi OSS belum mendukung penyajian data per wilayah di Indonesia, sehingga data jumlah IUMK pada tahun 2020 tidak dapat disajikan melalui OSS.

Tabel 2.193 Data Penerbitan NIB di Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2021	9.453	NIB
2	2022	10.246	NIB
Jumlah		19.699	NIB

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Pada tahun 2021 terdapat perubahan kebijakan perizinan melalui *Online Single Submission* Berbasis Risiko (OSS RBA). OSS RBA dapat menyajikan data perizinan per wilayah sehingga pada tahun 2021 dan 2022 data dapat disajikan. Kenaikan data perizinan usaha mikro pada tahun 2021

terjadi karena adanya bantuan produktif usaha mikro dengan kebijakan untuk melengkapi persyaratan salah satunya ber NIB. Selain itu tahun 2022 dengan gencarnya pemberitahuan ke masyarakat maupun program pemerintah agar berNIB maka terdapat kenaikan signifikan.

Tabel 2.194 Persentase Usaha Mikro Berizin di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah	Jumlah Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Berizin	Keterangan
1	2018	16.950	28.384	59,71 %	IUMK
2	2019	23.814	29.098	81,84 %	IUMK
3	2020	-	30.486	-	OSS
4	2021	9.453	86.361	10,94 %	NIB
5	2022	19.699	85.104	23,14 %	NIB

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Sebelum berlakunya ketentuan NIB, perizinan dalam bentuk IUMK terdapat kenaikan dan relatif tinggi prosentase UM yang berizin. dengan berlakunya ketentuan perizinan berusaha melalui OSS dalam bentuk NIB prosentase UM yang berizin masih rendah , dikarenakan pemilik UM tidak dapat di integrasi ke dalam NIB sehingga pelaku UM harus mengajukan Kembali perizinan usahanya.

3) Pembinaan UMKM

Pembinaan UMKM yang dilaksanakan di tahun 2022 memiliki cakupan pembinaan yang sangat rendah, yaitu 410 pelaku UMKM atau 0,5% dari jumlah total UMKM yang ada di Kabupaten Bantul sejumlah 86.833 UMKM. Hal ini dikarenakan keterbatasan dukungan anggaran yang ada di dinas untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, FGD, dan kemitraan dengan toko modern berjejaring. Dari pembinaan UMKM yang telah dilaksanakan dan berhasil meningkat omsetnya sejumlah 202 UMKM atau setara dengan 70,3% dari total UMKM yang berhasil naik kelas pada tahun 2022.

Dalam rangka memajukan Bantul Smart City, Pemkab Bantul meluncurkan aplikasi Bantul Online Shop (BOS) pada tahun 2022. Aplikasi

ini ditujukan bagi UMKM di Kabupaten Bantul yang ingin melakukan jual beli secara digital yang diharapkan aktivitas perdagangan di Bantul mampu mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat meningkatkan penghasilan UMKM. Pada Tahun 2022 UMKM yang tergabung dalam Bantul *Online Shop* (BOS) berjumlah 318 pelapak dengan total produk yang dijual sebanyak 536. produk yang dijual di Bantul *Online Shop* dibagi menjadi 8 kategori yaitu alat olahraga, alat rumah tangga, belanja pemerintah, fashion, kerajinan, kuliner, otomotif, dan pertanian.

4) **Kualitas UMKM**

UMKM Naik kelas dapat diartikan dimana usahanya bisa semakin berkembang yang tentu diiringi dengan produktivitas, daya saing meningkat. sehingga berpotensi mencapai lebih tinggi. Berikut beberapa indikator UMKM naik kelas adalah sebagai berikut:

1. Total penjualan dan aset yang dimiliki haruslah meningkat.
2. Usaha harus menjadi formal
3. Jumlah karyawan meningkat
4. Pelanggan yang dilayani meningkat
5. Meningkatnya pajak yang dibayarkan
6. Kualitas sumber daya manusia harus bertambah
7. Produksi barang harus meningkat
8. Administrasi dan keuangan meningkat
9. Dana yang diakses dari perbankan meningkat.

Capaian UMKM naik kelas di tahun 2018-2022 di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.195 Capaian UMKM Naik Kelas di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Capaian UMKM naik kelas (unit)	183	185	185	180	287

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Capaian kinerja persentase usaha mikro yang naik kelas pada tahun 2022 sebesar 70,1 persen atau setara dengan 287 UMKM meningkat omset

dan asetnya dari 410 UMKM yang dibina. Persentase kenaikan Usaha Mikro yang naik kelas pada tahun 2022 sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 62,7% atau setara dengan 107 UMKM. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya kenaikan produktivitas umkm setelah pandemi Covid-19 berakhir dan mulai meningkatnya kembali daya beli masyarakat. Pasca pandemi Covid-19 para pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan perkembangan pasar, memperhatikan tata Kelola dan tata cara penggunaan sosial media sehingga pelaku UMKM lebih siap dengan ekosistem digital yang berdampak pada cakupan pasar yang lebih besar dan membawa pengaruh signifikan dalam omset mereka.

Berbagai program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul untuk meningkatkan kualitas UMKM binaannya diharapkan mampu mendorong UMKM Kabupaten Bantul dapat tumbuh dan berkembang sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Salah satu indikator yang mendorong UMKM naik kelas adalah meningkatnya omset UMKM. Beberapa cara untuk meningkatkan omset UMKM adalah dengan meningkatkan aktivitas pemasaran, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan kualitas produk.

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

a. Investasi PMA dan PMDN

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Seiring diberlakukannya Undang – Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sangat memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di daerah dengan mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem OSS - RBA

(Online Single Submission Risk Based Approach) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pertumbuhan nilai investasi di tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Target investasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 untuk Kabupaten Bantul sebesar Rp.348.678.672.473,-. Sementara nilai realisasi investasi tahun 2022 perhitungan secara total di Kabupaten Bantul telah melampaui target dengan capaian Rp486.378.805.000,- (139,49%). Perhitungan tahun 2022 kontribusi PMDN sebesar Rp15.000.000,- dari sektor primer, Rp.196.460.300.000,- dari sektor sekunder, dan Rp.201.130.100.000,- dari sektor tersier. Untuk PMA tahun 2022 kontribusinya sebesar Rp.64.448.720.000,- dari sektor sekunder dan Rp.24.324.685.000,- dari sektor tersier.

Perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bantul per triwulan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.196 Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan I Tahun 2022

SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
SEKTOR PRIMER	1	0	0	0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0	0	0
Kehutanan	0	0	0	0
Perikanan	0	0	0	0
SEKTOR SEKUNDER	29	8.581.500.000	16	36.141.910.000
Industri Makanan	11	2.756.000.000	0	0
Industri Tekstil	4	966.300.000	5	0
Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	1	340.600.000	1	223.860.000
Industri Kayu	1	285.600.000	1	0
Industri Kertas dan Percetakan	2	600.000	0	0
Industri Kimia dan Farmasi	7	51.800.000	1	266.910.000
Industri Karet dan Plastik	0	0	0	0
Industri Mineral Non Logam	1	4.048.800.000	0	0
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	0	0	0	0
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran,	0	0	0	0

SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam				
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
Industri Lainnya	2	131.800.000	8	35.651.140.000
SEKTOR TERSIER	136	6.922.100.000	8	245.385.000
Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0
Konstruksi	10	239.900.000	0	0
Perdagangan dan Reparasi	96	6.041.300.000	7	245.385.000
Hotel dan Restoran	5	6.300.000	0	0
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	9	11.400.000	0	0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1	550.000.000	0	0
Pertambangan	0	0	0	0
Jasa Lainnya	15	73.200.000	1	0
JUMLAH	166	15.503.600.000	24	36.387.295.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2023

Tabel 2.197 Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan II Tahun 2022

SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
SEKTOR PRIMER	0	0	0	0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	0	0	0	0
Kehutanan	0	0	0	0
Perikanan	0	0	0	0
SEKTOR SEKUNDER	23	41.402.500.000	10	14.787.675.000
Industri Makanan	11	31.601.800.000	0	0
Industri Tekstil	2	287.000.000	5	13.996.990.000
Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	1	1.442.800.000	0	0
Industri Kayu	1	158.200.000	0	0
Industri Kertas dan Percetakan	1	1.093.200.000	0	0
Industri Kimia dan Farmasi	5	216.000.000	0	0
Industri Karet dan Plastik	0	0	0	0
Industri Mineral Non Logam	0	0	0	0

SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	0	0	0	0
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	0	0	0	0
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
Industri Lainnya	2	6.603.500.000	5	790.685.000
SEKTOR TERSIER	54	148.090.600.000	4	8.288.560.000
Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0
Konstruksi	1	0	0	0
Perdagangan dan Reparasi	34	23.470.600.000	3	2.689.190.000
Hotel dan Restoran	3	0	0	0
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	2	28.051.600.000	0	0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	5	54.426.100.000	0	0
Pertambangan	0	0		0
Jasa Lainnya	9	42.142.300.000	1	5.599.370.000
JUMLAH	77	189.493.100.000	14	23.076.235.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2023

Tabel 2.198 Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan III Tahun 2022

SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	ROYEK	INVESTASI (Rp.)
SEKTOR PRIMER	2	15.000.000	0	0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	15.000.000	0	0
Kehutanan	0	0	0	0
Perikanan	0	0	0	0
SEKTOR SEKUNDER	26	67.152.200.000	15	4.494.420.000
Industri Makanan	7	4.492.100.000		
Industri Tekstil	7	54.123.000.000	5	902.615.000
Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	0	0	1	614.180.000
Industri Kayu	1	13.100.000	0	0
Industri Kertas dan Percetakan	2	0	0	0
Industri Kimia dan Farmasi	6	8.283.200.000	0	0

SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	ROYEK	INVESTASI (Rp.)
Industri Karet dan Plastik	0	0	0	0
Industri Mineral Non Logam	1	0	1	0
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	0	0	0	0
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	1	127.600.000	0	0
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
Industri Lainnya	1	113.200.000	8	2.977.625.000
SEKTOR TERSIER	77	25.944.500.000	6	76.055.000
Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0
Konstruksi	2	1.400.000.000	0	0
Perdagangan dan Reparasi	59	4.269.100.000	4	0
Hotel dan Restoran	4	13.600.000	1	76.055.000
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	3	74.100.000	0	0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	2	20.187.700.000	1	0
Pertambangan	0	0	0	0
Jasa Lainnya	7	0	0	0
JUMLAH	105	93.111.700.000	21	4.570.475.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2023

Tabel 2.199 Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan IV Tahun 2022

SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
SEKTOR PRIMER	1	0	0	0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0	0	0
Kehutanan	0	0	0	0
Perikanan	0	0	0	0
SEKTOR SEKUNDER	28	79.324.100.000	19	9.024.715.000
Industri Makanan	7	25.679.000.000		
Industri Tekstil	7	50.261.400.000	5	5.503.225.000
Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	1	89.100.000		
Industri Kayu	1	483.800.000	2	456.330.000

SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
Industri Kertas dan Percetakan	3	100.000.000	0	0
Industri Kimia dan Farmasi	5	140.700.000	1	0
Industri Karet dan Plastik	0	0	1	0
Industri Mineral Non Logam	1	0	0	0
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya		0	0	0
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	1	0	0	0
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
Industri Lainnya	2	2.570.100.000	10	3.065.160.000
SEKTOR TERSIER	117	20.172.900.000	12	15.714.685.000
Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0
Konstruksi	10	6.083.100.000	0	0
Perdagangan dan Reparasi	75	11.207.300.000	11	15.668.765.000
Hotel dan Restoran	4	0	0	0
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	5	25.300.000	0	0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	6	2.014.600.000	0	0
Pertambangan	2	0	0	0
Jasa Lainnya	15	842.600.000	1	45.920.000
JUMLAH	146	99.497.000.000	31	24.739.400.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2023

Capaian sektor tertinggi sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 masih pada sektor sekunder (industri tekstil, industri makanan, industri kayu, Industri Kimia dan Farmasi, Industri Kertas dan Percetakan, Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki).

Tabel 2.200 Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul Sampai dengan Tahun 2022

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMDN+PMA	Pertumbuhan Nilai Investasi	Target Pertumbuh an*)	Capaian
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
s.d 2017	15	46	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.696,05	141.917.800.000,00	8,06	12,72
s.d 2018	47	47	666.256.881.966,05	740.109.755.730,00	1.406.366.637.696,05	149.052.000.000,00	8,08	11,85
s.d 2019	103	106	777.051.181.966,05	760.194.755.730,00	1.537.245.937.696,05	130.879.300.000,00	9,00	9,30
s.d 2020	338	96	808.479.481.966,05	786.267.395.730,00	1.594.746.877.696,05	57.500.940.000,00	9,25	3,74
s.d 2021	554	93	908.524.281.966,05	798.953.335.730,00	1.707.477.617.696,05	112.730.740.000,00	7,85	7,07
s.d 2022	1048	183	1.306.129.681.966,05	887.726.740.730,00	2.193.856.422.696,05	486.378.805.000,00	8,30	28,49

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2022, Februari 2023 (diolah)

*) Target Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026

Kurs yang digunakan : 1 US \$ = Rp. 14.350,- sesuai dengan APBN 2022

b. Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMA/PMDN tersebut.

Tabel 2.201 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah Investor			Jumlah Tenaga Kerja			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
		PMA	PMDN	Jumlah	PMA	PMDN	Jumlah	
1	2018	47	47	94	15.311	11.610	26.921	286,39
2	2019	103	106	209	17.146	11.834	28.980	138,66
3	2020	96	338	434	17.385	12.068	29.453	67,86
4	2021	554	93	647	18.058	13.168	31.226	48,26
5	2022	62	220	282	19.582	14.492	34.074	120,82

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2023

Pertumbuhan realisasi investasi memberikan dampak yang signifikan pada penyerapan tenaga kerja di sepanjang tahun 2022. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dari PMA dan PMDN di Kabupaten Bantul sejumlah 2.848 orang. Sementara rasio daya serap tenaga kerja mencapai 120,82%. Apabila dilihat dari data tersebut diatas selama periode tahun 2018-2022 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul cenderung fluktuatif.

Tabel 2.202 Daya Serap Investasi terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Triwulan	TOTAL	PMDN				PMA			
		(Rp)	Perusahaan	PROYEK	INVESTASI (Rp)	TKI	Perusahaan	PROYEK	INVESTASI (Rp)	TKI
1	I	51.890.895.000	80	166	15.503.600.000	-	12	24	36.387.295.000	-
2	II	212.569.335.000	38	77	189.493.100.000	359	12	14	23.076.235.000	375
3	III	97.682.175.000	45	105	93.111.700.000	594	17	21	4.570.475.000	654
4	IV	124.236.400.000	57	146	99.497.000.000	371	21	31	24.739.400.000	495
TOTAL		486.378.805.000	220	494	397.605.400.000	1324	62	90	88.773.405.000	1524

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, 2023

Peningkatan realisasi investasi pada sektor sekunder (industri tekstil, industri makanan, industri kayu, Industri Kimia dan Farmasi, Industri Kertas dan Percetakan, Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki) di tahun 2022 mampu menciptakan peningkatan daya tampung tenaga kerja.

c. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Pemantauan

Dalam Tahun 2022 telah ditarget sebanyak 116 Pelaku Usaha yang harus dipantau berhasil dicapai sebanyak 119 Pelaku Usaha. Dalam upaya pencapaian target realisasi penanaman modal dilaksanakan kegiatan Pemantauan Penanaman Modal kepada Pelaku Usaha berupa penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

2. Pembinaan

Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN di Tahun 2022 ditargetkan sejumlah 232 perusahaan dan terealisasi sejumlah 232 perusahaan. Pembinaan diberikan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, koordinasi, serta pendidikan dan pelatihan.

Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha bertujuan meningkatkan pemahaman ketentuan dan keterampilan dalam pelaksanaan penanaman modal bagi pelaku usaha, sehingga pada akhirnya akan dapat mempermudah dalam rangka upaya peningkatan realisasi Investasi di Daerah khususnya Kabupaten Bantul.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha yang dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dan dikoordinir oleh DPMPTSP Kabupaten Bantul atas pelaksanaan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Target kegiatan pengawasan di tahun 2022 berupa berita acara pengawasan sejumlah 22 perusahaan dan dapat terealisasi sejumlah berita acara pengawasan 55 perusahaan.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinir oleh Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Bantul selama tahun 2022 mulai Bulan Maret 2022 s.d November 2022, telah dilakukan inspeksi lapangan terhadap 51 pelaku usaha sebagai tabel berikut.

Tabel 2.203 Kegiatan Pengawasan Usaha Tahun 2022

No	Sektor Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha	Jumlah BAP
1	Pariwisata	15	15
2	Perindustrian	16	17
3	Perdagangan	6	6
4	Kelautan dan Perikanan	2	2
5	Ketenagakerjaan	1	1
6	Kesehatan, Obat dan Makanan	12	13
7	Pendidikan dan Kebudayaan	1	1
8	Pertanian	2	2
Jumlah		55	57

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, 2023

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah organisasi dan prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Bantul baik tingkat provinsi maupun nasional meskipun jumlah klub dan gedung olahraga yang ada masih terbatas. Melihat kelompok/organisasi olahraga yang semakin berkembang dan munculnya jenis olahraga baru yang dipertandingkan perlu upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia olahraga yaitu pelatih, wasit, pembina, klub olahraga dan atlet. Selain itu juga perlu melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk latihan maupun pertandingan.

a. Kepemudaan

1) Pemuda Pelopor

Pemuda pelopor merupakan pemuda-pemuda yang mempunyai jiwa kepeloporan di masyarakat dan lingkungan sekitar, mampu menginspirasi dan menggerakkan pembangunan masyarakat sesuai bidangnya masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Bantul menyelenggarakan seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten untuk mencari perwakilan pemuda yang akan dikirim untuk mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat DIY. Seleksi pemuda pelopor dibedakan dalam lima kategori bidang kepeloporan, yaitu: pendidikan; sosial budaya dan pariwisata; pengelolaan SDA dan lingkungan; pangan; dan inovasi teknologi. Seleksi pemuda pelopor bertujuan untuk memberikan penghargaan atas prestasi dan kontribusi kepeloporannya dalam kemajuan masyarakat di lingkungannya. Hal ini menjadi motivasi munculnya pemuda-pemuda pelopor yang lain di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.204 Jumlah Pemuda Pelopor di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2023

2) Organisasi Kepemudaan

Kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan khususnya generasi muda yang tergabung dalam organisasi dan komunitas melalui pengembangan potensi pemuda dan peningkatan peran pemuda dalam pembangunan diantaranya melalui pelatihan bela negara, bakti pemuda dan sosial, expo pemuda, kader anti narkoba dan pemuda pelopor.

Tabel 2.205 Data Organisasi Kepemudaan Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Organisasi Kepemudaan Kabupaten	46	46	46	46	46
1. Penerima Hibah	25	25	24	21	21
2. Belum Menerima Hibah	21	21	22	25	25

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2023

Dari tahun 2018-2022 terdapat beberapa organisasi kepemudaan yang tidak memenuhi syarat dan tidak direkomendasikan oleh KNPI untuk

memperoleh hibah pada tahun berikutnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Olahraga

1) Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Bantul tahun 2022 sejumlah 43 organisasi. Daftar nama organisasi olahraga di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.206 Organisasi Olahraga di Kabupaten Bantul

No	Nama
1	Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)
2	Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI)
3	Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)
4	Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI)
5	Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)
6	Ikatan Sport Sepeda Seluruh Indonesia (ISSI)
7	Perserikatan Baseball Softball Amatir Seluruh Indonesia (PERBASASI)
8	Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI)
9	Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)
10	Perkumpulan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)
11	Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)
12	Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBSVI)
13	Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)
14	Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI)
15	Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)
16	Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI)
17	Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)
18	Persatuan Drumband Seluruh Indonesia (PDBI)
19	Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI)
20	Persatuan Golf Indonesia (PGI)
21	Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI)
22	Federasi Hoki Indonesia (FHI)
23	Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)
24	Federasi Olahraga Karate Do Indonesia (FORKI)
25	Persatuan Bela Diri Kempo Seluruh Indonesia (PERKEMI)
26	Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)
27	Persatuan Menembak Sasaran & Berburu Seluruh Indonesia (PERBAKIN)
28	Persatuan Panahan Seluruh Indonesia (PERPANI)
29	Federasi Panjat Tebing Seluruh Indonesia (FPTI)
30	Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI)
31	Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI)
32	Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PERSANI)
33	Persatuan Rugby Union Indonesia (PRUI)
34	Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PERSANI)
35	Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)

No	Nama
36	Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI)
37	Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEKROSI)
38	Tae Kwon Do Indonesia (TKI)
39	Keluarga Olahraga Tarung Drajat (KODRAT)
40	Persatuan Lapangan Tennis Indonesia (PELTI)
41	Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)
42	Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)
43	Indonesia Woodball Association (IWBA)

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2023

Kabupaten Bantul mempunyai cabang olahraga unggulan antara lain: cabang olahraga panahan; senam; atletik; judo; sepak takraw; pencak silat, tae kwon do, gulat, tinju, tenis lapangan, dan tenis meja.

Cabang olahraga yang berkembang di masyarakat dan diselenggarakan dalam kompetisi olahraga antara lain: cabang olahraga bola voli; tenis meja; tenis lapangan; bulutangkis; futsal; pencak silat, *gate ball*, basket, *korfball*, *yoong moo do*, golf dan sepak bola putri.

c. Ketersediaan Sarana Prasarana Olahraga

Sarana dan prasarana olahraga yang ada terdiri dari: Stadion Sultan Agung; Sirkuit Sepatu Roda; Lapangan Pacuan Kuda; Lapangan *Tennis Indoor*; Lapangan dan Tenis Dwi Windu. Sarana dan prasarana olahraga yang tersedia ini telah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga. Lingkungan Stadion Sultan Agung juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengadakan acara Sunmor atau *Sunday Morning*, yang membolehkan masyarakat untuk berjualan dan mengadakan acara-acara olahraga massa, seperti senam pagi dan lain sebagainya. Pada masa pandemi Covid-19, kegiatan sunmor dan kegiatan lain di SSA yang mengakibatkan kerumunan sempat dilarang dan dibatasi. Kegiatan baru dilaksanakan setelah masa PPKM turun dan tetap menjaga protokol kesehatan.

d. Prestasi dalam Bidang Olahraga

Dalam rangka mensosialisasikan dan memasyarakatkan olahraga maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengadakan berbagai macam kegiatan antara lain olahraga rekreasi yang dikemas dalam *Car Free Day* dan olahraga tradisional, serta mengikuti berbagai macam kompetisi olahraga

seperti PORDA, POR, POPDA, Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA), POSPEDA dan lain sebagainya.

1) Pekan Olahraga Daerah (PORDA)

- Penyelenggaraan PORDA dilaksanakan setiap dua tahun sekali.
- PORDA ke XV Tahun 2019 Kabupaten Bantul berada di posisi ketiga dan meraih 123 medali emas, 132 perak, dan 161 perunggu.
- PORDA tahun 2021 tidak terlaksana karena pandemi covid-19.
- PORDA ke XVI Tahun 2022 Kabupaten Bantul berada di posisi kedua dan meraih 135 medali emas, 138 perak, dan 165 perunggu.

2) Pekan Olahraga (POR) Pelajar dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

Pekan Olahraga (POR) Pelajar kabupaten merupakan kompetisi olahraga berjenjang yang mempertandingkan 23 cabang olahraga dengan peserta pelajar SD, SMP dan SMA. Kegiatan ini merupakan seleksi untuk memilih wakil kabupaten Bantul maju ke POPDA DIY.

Tabel 2.207 Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar Tingkat DIY Tahun 2018-2022

No	Tahun	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	2018	65	46	59	170	1
2	2019	75	68	56	209	1
3	2020	96	77	72	245	1
4	2021	-	-	-	-	-
5	2022	92	62	68	222	1

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2023

Pada ajang POPDA DIY Tahun 2020, Kabupaten Bantul berhasil mempertahankan prestasi sebagai **Juara Umum** dengan memperoleh medali 96 emas, 77 perak dan 72 perunggu. Untuk pelaksanaan POPDA DIY Tahun 2021 ditunda dan akan dilaksanakan pada tahun 2022. Penundaan ini disebabkan oleh adanya kebijakan pembatasan kegiatan (PPKM) yang dijalankan oleh pemerintah pusat dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.

3) Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA)

Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) merupakan salah satu sarana peningkatan mutu prestasi pelajar difabel dan merupakan ajang

untuk mencari bibit-bibit pelajar berprestasi. Daftar prestasi Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA) sebagai berikut:

(a) Pekan Paralimpik Nasional Tahun 2018

Tabel 2.208 Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XV JAWA BARAT Tahun 2018

No	Cabor	Nomor	Klasifikasi	Prestasi
1	Tenis kursi roda	Ganda Pemula Putri	Tuna Daksa Bawah	Emas
		Tunggal Pemula Putri	Tuna Daksa Bawah	Emas
		Ganda Campuran (Quad dan pemula putri)	Tuna Daksa Bawah	Emas
		Ganda Pemula Putra	Tuna Daksa Bawah	Emas
		Tunggal Pemula Putra	Tuna Daksa Bawah	Emas
		Ganda Quad dan Pemula Putra	Tuna Daksa Bawah	Emas
		Beregu Putra	Tuna Daksa Bawah	Perunggu
2	Atletik	Lari 100 m T/F 44 (Ambulant) Putri	Tuna Daksa Atas	Perak
		Lari 200 m T/F 44 (Ambulant) Putri	Tuna Daksa Atas	Perak
		Lompat jauh T.F 54 Putri	Tuna Rungu Wicara	Perak
		Lempat lembing F. 55 (Ambulant) Putra	Tuna Daksa Bawah	Perak
		Lempat Cakram F. 55 (Ambulant) Putra	Tuna Daksa Bawah	Perunggu
		Lempat Peluru F. 55 (Ambulant) Putra	Tuna Daksa Bawah	Perunggu
		Lompat Jauh T/F 44 (Ambulant) Putri	Tuna Daksa Atas	Perunggu
		Lari 800 m T/F. 37 (CP) Putra	CP	Perunggu
3	Tenis Meja	Ganda Mix Class 9	Tuna Daksa Bawah	Perak
		Tunggal Kelas Tuna Netra Putra	Tuna Netra	Perunggu
		Ganda Mix Kelas 11	Tuna Grahita	Perunggu
		Beregu Mix Kelas Tuna Netra	Tuna Netra	Perunggu
		Beregu Mix Kelas Tuna Netra	Tuna Netra	Perunggu
4	Bulutangkis	Ganda Putra (Wch 1 + 2)	Tuna Daksa Bawah	Perak
		Ganda Putra (Wch 1 + 2)	Tuna Daksa Bawah	Perak
		Tunggal Putri Wch Open	Tuna Daksa Bawah	Perak
		Ganda Campuran Open Wheelchair 2	Tuna Daksa Bawah	Perunggu
		Ganda Campuran Open Wheelchair 2	Tuna Daksa Bawah	Perunggu

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2023

(b) Pekan Paralimpik Nasional Tahun 2019

Tabel 2.209 Kejuaraan Nasional NPC Indonesia 2019

No	Cabor	Nomor	Klasifikasi	Prestasi
1	Tenis Meja	Tunggal	Tuna Netra	Emas
		Tunggal	TT4	Perak
		Beregu	TT3-TT5	Perak
		Tunggal	Tuna Netra	Perunggu
		Tunggal	TT3-TT5	Perunggu
2	Bocia	Tunggal	BC 5	Perak
3	Basket Kursi Roda	Beregu 3x3	Wheelchair	Perunggu
4	Angkat Berat	49 Kg	Daksa	Emas
5	Atletik	T. Peluru	F11	Perak
		L. Cakram	F11	Emas
		200 M	T37	Perunggu
		400 M	T37	Perunggu
		200 M	T11	Perak
		L. Jauh	F11	Emas
		100 M	T11	Perunggu

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2022

- (c) Pekan Paralimpik Nasional tahun 2020 karena pandemi Covid-19 Pekan Paralimpik Nasional ditunda pelaksanaannya, namun demikian Kabupaten Bantul mengikuti kejuaraan tenis kursi roda "Kapusrehab Cup 2020" dan memperoleh prestasi sebagai berikut.

Tabel 2.210 Kejuaraan Tenis Kursi Roda "Kapusrehab Cup 2020"

No	Cabang Olahraga	Nomor	Klasifikasi	Prestasi
1	Tenis Kursi Roda	Beregu	Main Draw	Emas
2	Tenis Kursi Roda	Beregu	Second Draw	Emas

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2022

- (d) Pekan Paralimpik Nasional tahun 2021 yang dilaksanakan di Papua.

Tabel 2.211 Kejuaraan Nasional NPC Indonesia 2021

Cabang Olahraga	Nomor Pertandingan	Keterangan	Medali
Angkat Berat	49 kg	Perorangan	Perak
	45 kg	Perorangan	Perunggu
Atletik	400 m T13	Perorangan	Perak
	Lompat jauh TF 54 putri	Perorangan	Emas
	Lompat jauh TF 54 putra	Perorangan	Perunggu
Bulu Tangkis	Ganda campuran WH1/ WH2	Beregu	Perunggu
	Tunggal WH2 putri	Perorangan	Perak
	Ganda campuran WH1/ WH2	Beregu	Perunggu
	Tunggal putri SU5	Perorangan	Perak
	Ganda putri	Beregu	Perunggu
	Tunggal putra nasional WH1	Perorangan	Perunggu
	Tunggal putra elit WH1	Perorangan	Perunggu
Panahan	50 m W1 putri	Perorangan	Perunggu
	Individual W1 putri	Perorangan	Perunggu
	Mixteam W1	Beregu	Perunggu
	Mixteam W1	Beregu	Perunggu
Tenis Kursi Roda	Beregu putri	Beregu	Emas
	Beregu putri	Beregu	Emas
	Ganda campuran nasional putra	Beregu	Emas
	Ganda putra nasional	Beregu	Emas
	Beregu putra nasional	Beregu	Perak
	Tunggal putra nasional	Perorangan	Perunggu
	Beregu nasional putra + quad	Beregu	Perak
	Tunggal elit	Perorangan	Perunggu
	Beregu nasional putra + quad	Beregu	Perak
Tenis Meja	Tunggal nasional kelas 4 putra	Perorangan	Emas
	Beregu T1-T5 putra	Beregu	Emas
	Tunggal elit kelas 4 putra	Perorangan	Perunggu
	Beregu T1-T5 putra	Beregu	Emas
	Tunggal nasional kelas 2-3 putra	Perorangan	Perak
	Tunggal elit kelas 3 putra	Perorangan	Perunggu
	Ganda campuran T9 nasional	Beregu	Perunggu
	Beregu T8-9 putra	Beregu	Perunggu
	Beregu T1-T5 putra	Beregu	Emas
	Tunggal nasional kelas 5 putra	Perorangan	Perunggu
	Beregu tuna netra putra	Beregu	Perunggu
	Tunggal nasional kelas tunanetra putra	Perorangan	Perunggu
	Beregu tuna netra putri	Beregu	Perunggu
	Tunggal nasional kelas tunanetra putri	Perorangan	Perunggu

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2022

NPC (National Paralimpiade Committee) Indonesia Pekan Paralimpik Nasional tahun 2021 yang dilaksanakan di Papua. Dari 29 atlet Bantul yang dikirim, 23 atlet mendapat medali yaitu 9 emas, 8 Perak dan 22 perunggu. Pelaksanaan Pekan Paralimpik Nasional tahun 2022 tidak dilaksanakan karena berdekatan dengan kegiatan serupa di tahun 2021, selanjutnya Pekan Paralimpik Nasional akan digelar pada tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara.

4) Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah (POSPEDA)

Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah dan merupakan salah satu ruang kreasi dan prestasi bagi santriwan dan santriwati di bidang olahraga dan seni Islami. Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah 2018 di bawah binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

2.1.3.2.14 Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, statistik dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar (diselenggarakan oleh BPS), statistik sektoral (diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah), dan statistik khusus (diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya).

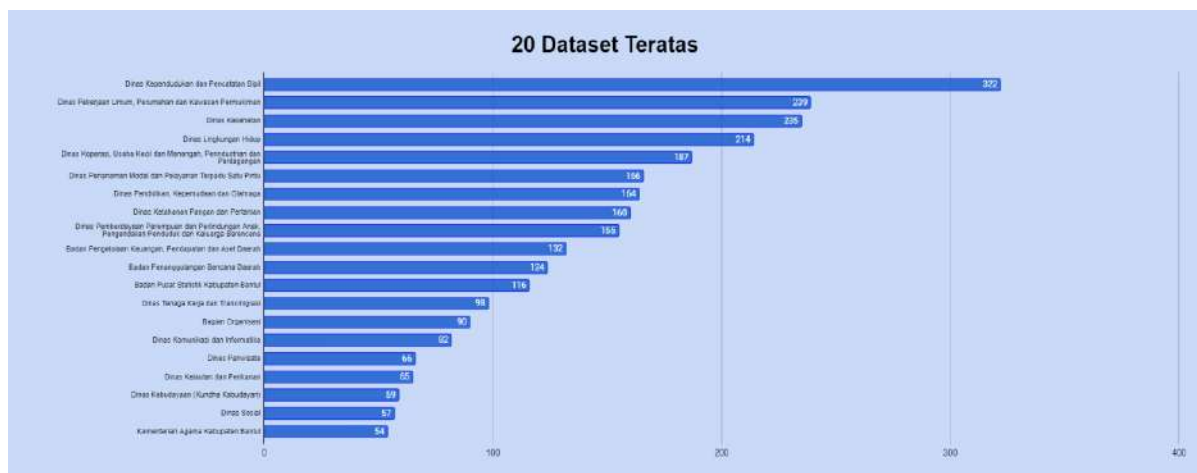
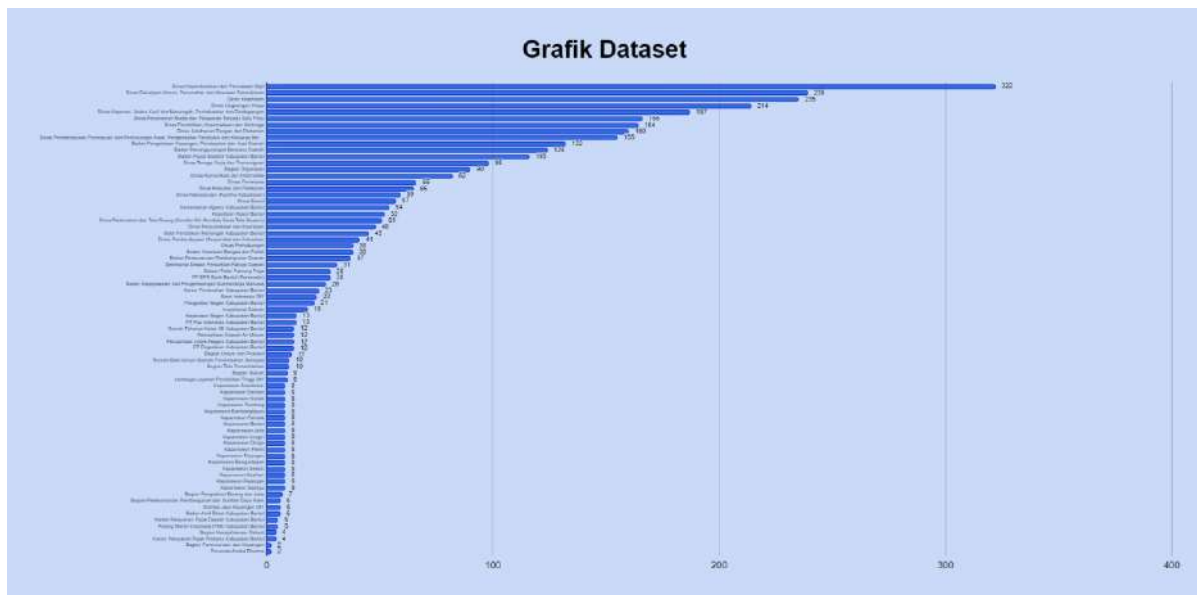
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah kabupaten melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Adapun data yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan di suatu daerah terdiri dari data statistik sektoral dan data geospasial. Dalam pengelolaannya, data dan informasi geospasial, sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diselenggarakan oleh suatu simpul jaringan.

Perpres 39 tahun 2019 tersebut di atas di DIY diturunkan menjadi Peraturan Gubernur DIY no. 3 tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pergub ini sebagai pedoman pelaksanaan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten/Kota. Selanjutnya Bupati Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul sebagai pedoman pelaksanaan SDI.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dimulai dari penetapan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebaran data dengan melibatkan semua perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik.

Kabupaten Bantul telah membangun portal data geospasial (geoportal) dan portal data statistik sektoral yang dapat diakses di <http://data.bantulkab.go.id/> dan telah terhubung ke geoportal nasional <https://tanahair.indonesia.go.id/> dan portal data nasional <https://data.go.id/>.

Data statistik sektoral yang telah dipublikasikan melalui portal data <https://data.bantulkab.go.id/> sejumlah 3.638 kumpulan data (dataset) dan 3.638 data (*resource*) yang diunggah oleh 74 instansi, baik dari perangkat daerah, instansi vertikal, maupun kapanewon. Data geospasial yang telah dipublikasikan melalui portal data <https://data.bantulkab.go.id/> sejumlah 1.015 layer data spasial.



Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2022

Gambar 2.46 Grafik Dataset menurut Perangkat Daerah di Portal Data

Tolak ukur kinerja yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SDI, diantaranya sesuai Permendagri 86/2017 dan Permendagri 18/2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.212 Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2019-2022

Indikator/Tolak Ukur Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022
Jumlah dataset yang dipublikasi	dataset	0	380	439	3.638
Jumlah dataset yang berstatus privat	dataset	0	18	2	0
Jumlah resource yang dipublikasi	resource	0	712	713	3.638
Jumlah resource yang berstatus privat	resource	0	27	19	0
Jumlah data layer spasial yang dipublikasi	data layer spasial	0	157	112	1.015
Persentase data geospasial yang dipublikasi dari daftar data geospasial yang ditetapkan	%	0	58,15	53,70	96,88
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100

Indikator/Tolak Ukur Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022
Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	N/A	100	100	100
Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	0	95,48	97,40	100
Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	83,75	100	70,53	92,68
Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	83,75	100	70,53	92,68
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	sistem	1	2	2	4
Tersedianya buku profil daerah	buku	1	1	1	1
Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	42	43	35	33
Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	25	37	113	48
Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kegiatan	0	0	1	8
Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kegiatan	0	0	0	5

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2023

Dari tabel di atas, beberapa capaian indikator mengalami penurunan, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- Jumlah dataset yang berstatus privat pada tahun 2022 dan jumlah *resource* yang berstatus privat pada tahun 2022 sebanyak 0 dataset dan 0 *resource*, dengan kata lain tidak ada sama sekali. Hal ini bukan berarti menunjukkan hal yang negatif akan tetapi hal ini berarti semakin banyak OPD yang menyadari keterbukaan informasi publik, di samping itu, data yang dimiliki OPD sudah mengacu pada daftar data yang ditetapkan, dimana data tersebut merupakan data yang bersifat publik.
- Jumlah data layer spasial yang dipublikasi dan persentase data geospasial yang dipublikasi dari daftar data geospasial yang ditetapkan meningkat dari 112 layer (53.70%) menjadi 1.015 layer (96.88%). Hal ini dikarenakan data layer spasial yang ada sudah terintegrasi dengan data statistik yang ada di Portal Satu Data, di samping bahwa data-data statistik tersebut sebagian sudah ada yang mempunyai unsur kewilayahan dan koordinat *longitude* dan *latitude*, sehingga dapat dikonversikan menjadi data layer spasial, yang nantinya akan diolah menjadi sebuah peta geospasial di dalam aplikasi geoportal.
- Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik dan persentase kelengkapan metadata variabel statistik meningkat dari 70,53% menjadi 92,68%.

- Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan menurun dari 35 survei menjadi 33 survei, hal ini dikarenakan lebih banyak OPD yang memilih melaksanakan kompilasi produk administrasi dari pendataan melalui aplikasi umum milik pemerintah pusat (survei dilakukan oleh pemerintah pusat), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.213 Jumlah Kegiatan Statistik menurut Cara Pengumpulan Data Tahun 2022

No	Cara Pengumpulan Data	Jumlah	Persentase
1	Pencacahan Lengkap	1	1,22%
2	Survei	33	40,24%
3	Kompilasi Produk Administrasi	48	58,54%
4	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI	0	0,00%
Total		82	100,00%

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2023

2.1.3.2.15 Persandian

a. Penyelenggaraan Pengamanan Persandian

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

Ancaman yang dibawa oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah alasan yang kuat sebagai dasar dilakukannya pengelolaan informasi berklasifikasi melalui cara yang modern, holistik, dan sistematis. Sebagai organisasi yang dinamis, unit teknis persandian baik yang berada di daerah maupun yang berada di pusat dituntut tanggap dan siap untuk melakukan reformasi dalam rangka menyikapi segala perubahan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Pengamanan persandian pada hakekatnya merupakan pengelolaan informasi berklasifikasi rahasia mulai dari pembuatan informasi, pemberian label, pengiriman, dan penyimpanan.

- Untuk naskah dinas berklasifikasi rahasia, kerahasiaannya dilakukan dengan enkripsi.
- Khusus untuk komunikasi melalui jaringan, perlu ada jaminan terhadap keselamatan pesan melalui e-mail.
- Untuk informasi yang dihasilkan dan disimpan dalam bentuk arsip digital, maka kerahasiaan dilakukan dengan enkripsi dan keutuhan data dengan *hash function*.
- Sementara untuk pengiriman informasi digital, maka kerahasiaannya perlu dilakukan dengan cara enkripsi jaringan.
- Khusus untuk pengiriman dalam bentuk *hardcopy*, maka pengamanan dilakukan terhadap fisik pesan dan personil pembawa pesan.

Untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen di pemerintahan Kabupaten Bantul dilakukan dengan kegiatan berupa:

1) Pengamanan Berita Rahasia

Sesuai peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pengamanan keluar masuk berita rahasia baik dari pusat maupun provinsi ke Kabupaten Bantul dan sebaliknya mutlak dilakukan. Proses penyandian dilakukan terhadap berita yang akan dikirim dan berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat.

Proses penyandian harus dilakukan terhadap berita yang akan dikirim dan pembukaan berita sandi menjadi berita terang dilakukan terhadap berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan oleh *sandi-man* karena hanya petugas sandi yang memiliki akses sandi terhadap peralatan sandi maupun sistem kunci yang telah ditetapkan secara nasional oleh BSSN RI sebagai lembaga tingkat pusat yang bertanggung jawab atas persandian secara nasional.

2) Sterilisasi Ruang Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan.

Deteksi adanya potensi kebocoran informasi dengan cara penanaman peralatan penyadap di ruang kerja pejabat, atau adanya sinyal luar yang masuk ke ruang kerja pejabat.

Tabel 2.214 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Kontra Penginderaan (Sterilisasi Ruang)

No	Nama Jabatan / Organisasi	Titik pengamanan Persandian	2022
1	Bupati	Ruang Kerja	√
		Ruang Rapat	√
		Ruang Sekpri	√
2	Wakil bupati	Ruang Kerja	√
		Ruang Rapat	√
		Ruang Sekpri	√
3	Sekda	Ruang Kerja	√
		Ruang Rapat	√
4	Asisten Sekda (I)	Ruang Kerja	√
5	Asisten Sekda (II)	Ruang Kerja	√
6	Asisten Sekda (III)	Ruang Kerja	√
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana)	Ruang Kerja	√
		Ruang Rapat	√
8	Dinas Sosial	Ruang Kerja	√
		Ruang Rapat	√
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ruang Kerja	√
		Ruang Rapat	√
10	Dinas P3APPKB	Ruang Kerja	√
		Ruang Rapat	√
11	Dinas KUKMPPP	Ruang Kerja	√
		Ruang Rapat	√
12	Dinas KUKMPPP (Bidang Sarana Perdagangan)	Ruang Kerja	√
		Ruang Rapat	√
13	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Ruang Kerja	√
		Ruang Rapat	√
14	Perpustakaan Dan Arsip	Ruang Kerja	√
		Ruang Rapat	√
15	Dinas Pariwisata	Ruang Kerja	√
		Ruang Rapat	√
Jumlah Area pengamanan			29

Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika, 2023

3) Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Telepon dan Radio Komunikasi Internal Pemda.

Penyelenggaraan dan pengelolaan jaringan telepon di Kabupaten Bantul dilaksanakan bagi semua OPD dan 17 kapanewon di Kabupaten Bantul. Sampai dengan Tahun 2022 sambungan telepon ekstensi baik analog maupun IPPhone jumlah total 303 sambungan.

Sedangkan untuk layanan komunikasi radio saat ini telah digelar komunikasi radio dengan frekuensi VHF dan UHF sejumlah 4 jalur frekuensi. Pemanfaatan oleh Dinas Sosial, BPBD, Satpol PP, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Lingkungan Hidup. Gelar jaring komunikasi radio tersebut dengan memanfaatkan repeater dan link repeater di enam titik lokasi.

4) Penyediaan Filter Repeater RPU

Penambahan *repeater* dilakukan pada titik-titik strategis yang tidak terjangkau oleh sinyal radio akibat *blind spot*. Tujuan penambahan *repeater* adalah menghindari adanya *signal loss* ketika informasi menempuh jarak yang cukup jauh, atau menemui halangan seperti gunung atau bukit, sehingga memungkinkan tercapainya komunikasi yang lebih efektif dengan kecepatan pengiriman yang lebih *real-time* demi kelancaran komunikasi.

5) Layanan Call Center (Panggilan Darurat) 112

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 diatur tentang layanan nomor tunggal panggilan darurat atau call center harus menggunakan nomor 112, diselenggarakan di tingkat nasional dan daerah serta dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi kebakaran, bencana, kecelakaan, kesehatan, ketentraman dan kriminal.

Panggilan darurat 112 merupakan layanan untuk memudahkan masyarakat melakukan panggilan secara cepat untuk melaporkan berbagai permasalahan seperti kebakaran, gangguan keamanan, masalah kesehatan dan lain-lain. Dalam pengoperasiannya siap untuk melayani dalam waktu 24 jam dan telah terkoordinasi dengan semua pihak dalam penanganannya. Tujuan panggilan darurat 112 diantaranya, mempermudah masyarakat melakukan pelaporan kondisi darurat, mempercepat penanganan kondisi

darurat oleh satuan terkait, mengurangi resiko terhadap gangguan dari masing-masing individu maupun masyarakat dan mengurangi dampak bahaya yang ditimbulkan oleh keadaan darurat.

Layanan Panggilan Darurat 112 Kabupaten Bantul dapat dikelompokkan ke dalam Panggilan Valid, *Prank* dan *Ghost*. Jumlah aduan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.215 Jumlah Aduan/Panggilan Valid, *Prank* dan *Ghost Call* Tahun 2020-2022

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Jumlah Aduan/Panggilan Valid	214	235	9.453
2	Jumlah <i>Prank Call</i>	27.325	8.576	1.839
3	Jumlah <i>Ghost Call</i>	3.416	1.010	522

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2023

Penurunan tingkat panggilan *Prank* dan *Ghost* yang signifikan salah satunya dikarenakan adanya pembaruan sistem Layanan Nomor Tunggal Darurat 112. Sejak launching pada 18 November 2019 s.d 31 Maret 2021 aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi Versi 2 yang diberi nama ESA 112. Sementara per tanggal 1 April 2021 digunakan aplikasi Versi 3 dengan nama SAKTI 112.

Jumlah aduan/panggilan valid pada Tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan Tahun 2021 yaitu dari 235 menjadi 9.453 disebabkan Dinas Komunikasi dan Informatika memperluas jaringan penyebaran informasi tentang *Call Center 112* Kabupaten Bantul melalui pengaktifan kembali dengan postingan-postingan yang menarik serta secara berkala pada media sosial seperti media instagram, twitter dan tiktok serta pemasangan baliho *Call Center 112* pada lokasi - lokasi strategis dan pembagian leaflet atau stiker *Call Center 112*, layanan *Call Center 112* dapat lebih dikenal dan dipahami fungsi dan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.216 Jumlah Panggilan Masuk Call Center 112 Menurut Jenis Kejadian Tahun 2020-2022

No	Kejadian	2020	Kejadian	2021	Kejadian	2022
1.	Kebakaran	10	Kebakaran	10	Kebakaran	10
2.	Ambulance	27	Ambulan	27	Ambulan	12
3.	Kecelakaan	99	Kecelakaan	116	Kecelakaan	110
4.	Kesehatan	11	Kesehatan	9	Kesehatan	8
5.	Binatang Buas	18	Evakuasi Hewan Liar/ Buas/ Berbisa	12	Evakuasi hewan liar / buas / berbahaya	20
6.	Pohon Tumbang	3	Pohon Tumbang	11	Pohon tumbang	11

No	Kejadian	2020	Kejadian	2021	Kejadian	2022
7.	Kebencanaan	8	Banjir	0	Banjir	0
8.			Bencana Alam	2	Bencana alam	0
9.	Kamtibmas	10	Keamanan dan Ketertiban Umum/ Masyarakat	6	Keamanan dan ketertiban umum / masyarakat	8
10.			Kerusuhan/ Tawuran	3	Kerusuhan/tawuran	1
11.	Kepolisian	3	Kriminalitas	1	Kriminalitas	2
12.	KDRT	2	Kekerasan terhadap Perempuan/ Anak/ KDRT	0	Kekerasan perempuan/anak/kdr t	0
13.			Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	2	Orang dengan gangguan jiwa (odgj)	0
14.			Tiang Listrik Rubuh	1	Tiang listrik rubuh (pju/pln/telkom)	2
15.			Kegawatdaruratan Lainnya	1	Kegawatdaruratan lainnya	5
16.	Covid-19	28	Covid-19	39	Covid - 19	2
17.	Informasi	2	Informasi	2	Informasi	0
18.					Penemuan mayat	0
19.					Pelatihan/ testing	1
	Jumlah	221		242		192

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2023

Tiket kejadian yang tercatat pada sistem bersumber dari panggilan langsung dari masyarakat dan tiket yang dibuat secara manual oleh petugas *call taker* 112 berdasarkan informasi yang diperoleh melalui media lain, misalkan radio, media sosial, atau melihat langsung kejadian. Pada update Aplikasi SAKTI 112 di tahun 2021, beberapa penyesuaian dilakukan terkait jenis kejadian yang ada.

Tabel 2.217 Rekapitulasi Tindak Lanjut OPD terhadap Panggilan Darurat 112

No	Unit Kerja/ OPD	2020	2021	2022
1	Dinas Kesehatan	108	149	180
2	Ambulance	87		
3	BPBD	43	8	47
4	Kepolisian	18	8	148
5	Satpol PP	4	103	38
6	Dinas Sosial	2	20	29
	Jumlah	262	288	442

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2022

Satu tiket kejadian dapat direspon oleh lebih dari 1 perangkat daerah, sebagai contoh pada kejadian kerusakan, perangkat daerah yang merespon adalah Kepolisian, Satpol PP, dan bahkan Dinas Kesehatan untuk menangani

korban. Pada update Aplikasi SAKTI 112 di tahun 2021, beberapa penyesuaian dilakukan antara lain bahwa Dinas

b. Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi

1) Penyediaan Frekuensi Radio Internal Pemda Bantul.

Pemanfaatan Radio Komunikasi Internal untuk mendukung komunikasi di beberapa OPD. Pemanfaatan Radio Komunikasi Internal untuk mendukung komunikasi di beberapa OPD yaitu Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dan Badan Penanggulangan Bencana daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi sewa frekuensi untuk komunikasi radio dan pemeliharaan tower serta repeaternya.

2) Pengamanan Sistem Elektronik

Berjalanya proses menuju *Smart City* dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat tinggi ketergantungannya dengan kualitas dan stabilitas jaringan internet. Hal ini tidak bisa terpisahkan dengan pengamanan terhadap sistem elektronik yang digunakan. Dimana ketika semua layanan maupun transaksi birokrasi dilakukan melalui sistem elektronik (aplikasi), maka semua hal tersebut akan menjadi keos ketika terjadi insiden terhadap sistem elektronik (aplikasi) yang digunakan. Menjadi keharusan untuk melakukan *scanning* aplikasi yang akan dipublish, deteksi dini terhadap kerentanan sistem elektronik serta *handling* terhadap gangguan yang terjadi.

Kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui:

- Bimtek *penetration test* terhadap aplikasi dan web,
- Pemilahan aplikasi aktif dan non aktif yang *hosting* di *server* Pemkab Bantul,
- Kerjasama dengan BSSN RI untuk kegiatan *penetration test* .
- Pelatihan Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Implementasi *Digital Signature*

3) Penanganan Insiden Keamanan Informasi

Insiden keamanan informasi merupakan gangguan terhadap suatu sistem atau jaringan elektronik yang berdampak merugikan sistem dan jaringan

serta pengguna sistem dan jaringan tersebut. Kerugian dapat berupa terganggunya layanan publik secara elektronik, kerusakan perangkat dan hilangnya data penting maupun rahasia yang tersimpan pada sistem elektronik.

Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan layanan pemberian peringatan terhadap laporan insiden siber, layanan tersebut diantaranya berupa: layanan penanggulangan dan pemulihan , layanan penanganan kerawanan dan layanan penanganan artifak.

Pada tahun 2022 terjadi insiden keamanan informasi sebanyak 10 insiden meningkat dari tahun 2021, secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.218 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020-2022

No.	Jenis Aplikasi	Jenis Serangan	Penanganan
Tahun 2020			
1	Sistem Informasi, Layanan dan Web Profil	Defacement (Perubahan Tampilan Web)	Take down sementara selama upgrade aplikasi; perbaikan
2	Sistem Informasi	Akses server via web menggunakan backdoor yang ditanamkan di server	Perbaikan
3	Sistem Informasi dan Layanan berbasis desktop dengan database lokal	Ransomware	Recovery menggunakan data backup
4	Sistem Informasi	Defacement (Perubahan Tampilan Web)	Take down permanen,
5	Sistem Informasi	Terdeteksi Malware/ Backdoor di server	Take down permanen
6	Abuse Report	Malware pada perangkat end point (pc/ laptop)	Tracing dan blok ke ip tujuan serangan
Tahun 2021			
1.	Abuse Report	IP / perangkat dalam jaringan internal Pemkab digunakan untuk menyerang Server lain	Melakukan blokir supaya tidak dapat mengakses server yang diserang.
			Melakukan pelacakan terhadap perangkat penyerang dan melakukan scan malware.
2.	Email	Phising Mail	Menginformasikan ke pemerintah kab/kota pemilik email yang digunakan untuk phising
3.	Web Profil	Defacement	Shutdown, mengembangkan web profil baru
4.	Email	Email Spam Attack dari fitur komentar web profil	Menon-aktifkan fitur email, Web Profil pengganti dalam pengembangan
Tahun 2022			
1.	Abuse Report	Server Abuse (Zombie)	Blokir Akses IP
2.	Abuse Report	Server Abuse (Zombie)	Blokir Akses IP

No.	Jenis Aplikasi	Jenis Serangan	Penanganan
3.	Web/ Sistem Elektronik	Exploit File Upload	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi
4.	Web Profil	Web Defacement	Shutdown Aplikasi
5.	Email	Notifikasi Breached Password dari BSSN	Update Password dan Password Strength Enforcement
6.	Web Profil	DDOS (Distributed Denial of Service)	Hardening Firewall
7.	Email	Email Phishing dari domain go.id	Eskalasi ke BSSN
8.	Email	Email Phishing dari domain go.id	Eskalasi ke BSSN
9.	Web Profil	Web Defacement dan Ransom	Asesmen dan Pemulihan Aplikasi
10.	Web/ Sistem Elektronik	Web Defacement	Shutdown Aplikasi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

4) Pengamanan Sistem Elektronik

Dalam rangka pencegahan insiden siber dilakukan penilaian keamanan aplikasi yang ada di server pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang senantiasa berorientasi pada keamanan data, informasi dan aset secara menyeluruh dan berkelanjutan serta langkah-langkah mitigasi risiko keamanan yang mungkin terjadi.

Pelaksanaan asesmen dapat memberikan penilaian terhadap celah kerentanan yang ditemukan pada jaringan maupun aplikasi dan memberikan rekomendasi serta solusi dari celah kerentanan tersebut, pengujian celah kerentanan aplikasi untuk meminimalisir dan menghindari kebocoran informasi, memverifikasi terhadap kemungkinan celah kerentanan pada aplikasi dan infrastruktur dari perspektif eksternal, yaitu dari Internet dan mengetahui efektivitas sistem pendeteksi serangan dini, pencegahan dan kemampuan dalam penanganan insiden. Hasil pelaksanaan asesmen pada tahun 2020 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.219 Rekapitulasi Asesmen Keamanan Aplikasi Tahun 2020-2022

No	Kategori	Deskripsi	Jumlah Aplikasi
2020			
1	Aplikasi Baru		237
	a. Layak	Sudah dilakukan assessment dan atau telah memenuhi standar keamanan	109
	b. Rawan	Sudah dilakukan assessment dan sedang dalam tahap dilakukan perbaikan	10
	c. Pending	Aplikasi lama dan atau belum dilakukan assessment	118
2	Aplikasi Lama		30
	Total Aplikasi yang dinilai		267

No	Kategori	Deskripsi	Jumlah Aplikasi
2021			
1	Aplikasi Baru		18
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	3
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	7
	c. Pending	Dijadwalkan penilaian namun masih dalam pengembangan	8
2	Aplikasi Lama		3
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	0
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	3
	Total Aplikasi yang dinilai		21

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2022

Tahun 2022, dilakukan pendataan ulang Sistem Elektronik yang ada pada Data Center Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam rangka mendukung implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022. Hasil atas pendataan tersebut mengubah jumlah pengkategorian aplikasi dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 2.220 Hasil Pendataan Sistem Elektronik Tahun 2022

No	Status	Deskripsi	Jumlah
1.	Aktif	Aktif	258
2.	Tidak Aktif	Telah di- <i>shutdown</i>	91
3.	Aktif-Redirect	Domain me- <i>redirect</i> yang mengarah ke Aplikasi Aktif	17
Total			366

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2022

Berdasarkan kegiatan asesmen tahun 2022 tersebut dapat disusun kategori aplikasi berdasarkan proses asesmennya sebagai berikut.

Tabel 2.221 Kategori Aplikasi Berdasar Proses Asesmen Tahun 2022

No	Kategori			Jumlah
1.	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi			204
	a.	Lama	102	
	b.	Tahun 2022	102	
2.	Dalam proses asesmen dan atau perbaikan			19
	a.	Lama	6	
	b.	Tahun 2022	13	
3.	Belum Asesmen			35
Total				258

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2023

c. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disruptif pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Keterlibatan pihak ketiga dalam *supply chain* layanan perusahaan menimbulkan risiko baru. Layanan berbasis *cloud* memberikan peluang efisiensi dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan bagi perusahaan namun juga menimbulkan risiko baru terkait data yang berada pada pengendalian pihak penyelenggara layanan. Beberapa aspek kebutuhan keamanan baru tersebut perlu dimitigasi agar bisnis dapat terus berjalan dengan baik.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi.

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat keamanan informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, indeks tingkat keamanan informasi Kabupaten Bantul mencapai 4,16 di tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 yaitu 4,15.

Tabel 2.222 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Tahun 2020-2022

No	Area Evaluasi	2020			2021			2022		
		Skor	Maks	Nilai	Skor	Maks	Nilai	Skor	Maks	Nilai
1.	Tata Kelola Keamanan Informasi	82	126	0.65	120	126	0.95	120	126	0.95
2.	Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	33	54	0.61	63	72	0.88	63	72	0.88
3.	Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi	109	159	0.69	140	159	0.88	143	159	0.90
4.	Pengelolaan Aset Informasi	41	129	0.32	117	168	0.70	117	168	0.70
5.	Teknologi dan Keamanan Informasi	65	111	0.59	89	120	0.74	88	120	0.73
Nilai				2.85			4.15			4.16

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2023

d. Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menentukan kebijakan bahwa *e-Government* merupakan salah satu pengungkit percepatan reformasi birokrasi, hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber Province*. Kebijakan ini berarti pemerintah Kabupaten Bantul memposisikan urusan komunikasi dan informatika sebagai komponen terpenting untuk menuju pemerintahan berbasis elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan *e-Government* menitik beratkan pada layanan unggulan *Digital Government Services* (DGS). Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik maka kebijakan ini didukung oleh sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet yang baik.

Berkenaan dengan hal tersebut maka telah dilakukan penyajian informasi dan aplikasi *e-Gov* melalui *website*, serta 24 sistem informasi dan

68 aplikasi baik yang bersifat *intranet*, *desktop*, maupun *online* sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.223 Sistem Informasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	No.	Nama aplikasi
2018	1.	Aplikasi E-Retribusi
	2.	Aplikasi Kampung KB*
	3.	Aplikasi Pengembangan E-Lapor
	4.	Aplikasi TIK*
	5.	Aplikasi Autentifikasi*
	6.	Jelajah Bantul
	7.	Sigadis Pentul
	8.	Sistem Informasi Administrasi Puskesmas (SIAP)
	9.	Sistem Informasi Manajemen Desa
	10.	Survei Kepuasan Masyarakat
2019	1.	eSurat Bantul
	2.	Biss (Bantul Intergreated Siren System)
	3.	Pembayaran E-retribusi Kendaraan Bermotor.
	4.	Dukcapil Smart.
2020	1.	Aplikasi Kampung KB
	2.	Aplikasi Pengelolaan Zakat Daerah*
	3.	Aplikasi Autentifikasi terpusat
	4.	Aplikasi Sarana TIK*
	5.	Pengembangan Lapor Bantul (e-lapor)
	6.	Pengembangan DGS Layanan Kesehatan
	7.	Soerban (Aplikasi E-Surat Bantul)
	8.	Pacoban (Pemantauan Pendetang dan Kegiatan di Kabupaten Bantul)
2021	1.	Aplikasi Ikutvaksin
	2.	Aplikasi Jaring Aspirasi Masyarakat DPRD
	3.	Aplikasi E-Surat Bantul Mobile Based
	4.	Aplikasi Bantulpedia
	5.	Aplikasi Pengendalian Menara Telekomunikasi*
	6.	Aplikasi eRetribusi Menara Telekomunikasi
	7.	Aplikasi Metadata Statistik
	8.	Sistem Informasi Logistik Farmasi dan Alat Kesehatan (SIMeLog)
	9.	Aplikasi Simbersama DLH
	10.	Aplikasi Bantul Online Shop
	11.	Aplikasi Siapkesos Dinsos
	12.	Portal Bantulkab
	13.	Portal Smartcity
	14.	Portal Covid-19
	15.	Aplikasi Makam Imogiri
	16.	SIDAGEPLAK
	17.	PEMILOS
	18.	SIDAKUI
	19.	SIPENTOL

Tahun	No.	Nama aplikasi
2022	1.	Government Service Bus (GSB) Kabupaten Bantul
	2.	Web Profil Perangkat Daerah (Badan, Dinas, Kapanewon, Puskesmas, dan Lembaga)
	3.	Aplikasi Makam Kotagede
	4.	SISBANYANKES
	5.	Aplikasi Visualisasi Data Portal SDI
	6.	EVOSS
	7.	SIDAMESRA
	8.	Jelajah Bantul
	9.	Web GIS Daerah Irigasi
	10.	SIMDATA PARIWISATA
	11.	LeontinMAS Legalisir dukcapil
	12.	Bukti Potong PPh 21
	13.	Aplikasi Whistle Blowing System
	14.	Aplikasi eAudit
	15.	OJS (Open Journal System/ Jurnal Riset Daerah)
	16.	Aplikasi Sistem Informasi Zona Kawasan Menara Telekomunikasi (Siszora)
	17.	DIREKTORI KEBUDAYAAN
	18.	Aplikasi Kabupaten Layak Anak (KLA)
	19.	Dana Insentif Kalurahan (DIKal)
	20.	Computer Based Test (CBT) Dikpora

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2023

Pada Tahun 2022 pengembangan aplikasi Layanan publik dan layanan administrasi lebih ke fokus integrasi aplikasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah, dengan capaian 7 (tujuh) layanan, sebagai berikut:

- a. Integrasi layanan NIK Nasional pada Aplikasi Surban;

Integrasi layanan NIK Nasional pada Aplikasi Surban melalui *web service* sempat dilaksanakan, namun dikarenakan terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, untuk sementara integrasi layanan NIK Nasional melalui *web service* dihentikan.

- b. Integrasi layanan NIK Bantul pada Aplikasi Sistem Informasi Desa;

Integrasi layanan NIK Bantul pada Aplikasi Sistem Informasi Desa melalui *web service* sempat dilaksanakan, namun dikarenakan terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, untuk sementara integrasi layanan NIK Bantul melalui *web service* dihentikan.

- c. Integrasi layanan NIK Nasional pada Aplikasi Pelaku Perjalanan;

Integrasi layanan NIK Nasional pada Aplikasi Pelaku Perjalanan melalui *web service* sempat dilaksanakan, namun dikarenakan terdapat

perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, untuk sementara integrasi layanan NIK Nasional melalui *web service* dihentikan.

d. Integrasi Aplikasi Satu Data dengan Aplikasi Metadata;

Aplikasi metadata merupakan aplikasi yang dibangun pada tahun 2020. Saat ini integrasi Aplikasi Satu Data dengan Aplikasi Metadata telah dilaksanakan dan dapat berjalan optimal. Juga telah diintegrasikan data antara Portal Satu Data Indonesia Bantul dengan Portal Satu Data Indonesia DIY (Dataku). Hal ini sebagai salah satu keberhasilan integrasi data karena hal tersebut menjadi amanat Perpres 39 tahun 2019.

e. Integrasi Aplikasi Geoportal dengan Sistem Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Integrasi Aplikasi Geoportal dengan Sistem Pengendalian Menara Telekomunikasi telah dilaksanakan, integrasi data dan/atau informasi antara Aplikasi Geoportal dengan Sistem Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat berjalan optimal.

f. Integrasi layanan NIK Nasional pada Aplikasi Sistem Informasi Desa;

Integrasi layanan NIK Nasional pada Aplikasi Sistem Informasi Desa melalui *web service* sempat dilaksanakan, namun dikarenakan terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, untuk sementara integrasi layanan NIK Nasional melalui *web service* dihentikan.

g. Integrasi layanan NIK Nasional pada Aplikasi e-Retribusi.

Integrasi layanan NIK Nasional pada Aplikasi e-Retribusi melalui *web service* sempat dilaksanakan, namun dikarenakan terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, untuk sementara integrasi layanan NIK Nasional melalui *web service* dihentikan.

Selain website dan aplikasi sebagaimana dapat dilihat pada table di atas, juga diterapkan sarana komunikasi dan informasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, yaitu berupa pemanfaatan media telematika, seperti penggunaan aplikasi sistem informasi, *SMS center*, *website* daerah yaitu www.bantulkab.go.id, bantulbiz.com, bantulcraft.com, informasi SKPD melalui subdomain SKPD, Warung Informasi dan Teknologi (Warintek), fasilitas akses jaringan internet dan intranet SKPD dan *telecenter*.

Tabel 2.224 Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2020- 2022

No	Media	2020	2021	2022
1	Siaran Taman Gabusan TVRI Yogyakarta	12 kali siaran	6 kali siaran	0 kali siaran
2	Dialog Interaktif 3 stasiun radio (Bantul FM, Persatuan FM dan Sonora FM)	54 kali siaran	54 kali siaran	36 kali siaran
3	Dinamika Pembangunan	8 kali peliputan UMKM Bantul	8 kali peliputan UMKM Bantul	8 kali peliputan UMKM Bantul
4	Dialog Interaktif Generasi Muda Star Jog	12 kali siaran di beberapa SMA/SMK di Bantul	6 kali siaran di beberapa SMA/SMK di Bantul	6 kali siaran di beberapa SMA/SMK di Bantul
5	Penerbitan Buletin Sejada	7000 eksemplar tersebar s/d kelurahan	12 edisi e-sejada	12 edisi e-sejada
6	Website daerah (www.bantulkab.go.id)	49 sub domain	49 sub domain	49 sub domain
7	Media Sosial Pemerintah Kabupaten	IG, Twitter, Fb, Youtube (BantulTV)	IG, Twitter, Fb, Youtube (BantulTV)	IG, Twitter, Fb, Youtube Tiktok (BantulTV)
8	Publikasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bantul	Media cetak dan elektronik	Media cetak dan elektronik	Media cetak dan elektronik
9	Jurnal Riset Daerah	Penerbitan 3 edisi reguler (bulan April, Agustus, dan Desember) dan 1 edisi khusus	Penerbitan 3 edisi reguler (bulan April, Agustus, dan Desember) dan 1 edisi khusus	Penerbitan 3 edisi reguler (bulan April, Agustus, dan Desember) dan 1 edisi khusus
10	Lapor Bantul(SP4N Lapor)	148 laporan	195 laporan (Lapor Bantul=93, SP4N Lapor=102)	90 laporan SP4N Lapor
11	Panggilan Darurat Bantul 112	30.955 panggilan darurat	9.821 panggilan darurat	11.814 panggilan darurat

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2023

Untuk lebih memasyarakatkan kebijakan tersebut di atas, maka dibentuklah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yaitu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, di mana salah satu peran dan fungsi KIM adalah sebagai partner jaringan informasi dari pemerintah ke masyarakat, sehingga nantinya dapat tercipta masyarakat yang peduli

informasi. Jumlah KIM yang saat ini terdaftar di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul ada 52 KIM.

Peningkatan pembangunan infrastruktur jaringan internet dan intranet OPD Pemerintah Kabupaten Bantul dapat dilihat dengan pembangunan jaringan *fiber optic* sepanjang 244,5 km yang tersebar di seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, kapanewon, dan pemerintah tingkat kalurahan serta puskesmas yang terdiri dari jalur *Backbone* dan jalur *Fiber Optic* menuju 30 Desa. Untuk Kebutuhan pembangunan Backbone masih sepanjang 108 km yang terdiri dari jalur Backbone sepanjang 8,975 km, dan Jalur *Fiber Optic* menuju Desa sepanjang 99.025 km.

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Kebudayaan merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan definisi dari Kemdikbud (2013), kebudayaan sendiri merupakan gagasan, perilaku, serta hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Proses interaksi berbagai macam budaya yang berjalan dalam waktu lama, terikat, dan terstruktur satu sama lain akan membentuk sistem kebudayaan (Kemdikbud, 2013). Kebudayaan memiliki peran yang cukup penting dalam jalannya pembangunan. Dalam hal ini, kebudayaan berfungsi sebagai penguat identitas jati diri bangsa yang berorientasi pada masa depan. Kebudayaan merupakan dasar untuk menentukan arah kebijakan dan arah pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah. Oleh karena itu, perhatian daerah terhadap kebudayaan lokal yang ada di wilayahnya menjadi hal yang penting untuk dikaji.

Secara eksplisit, hal ini tertera dalam UU Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017 yang membahas tentang peranan kebudayaan yang digunakan di segala lini kehidupan. Proses pemajuan kebudayaan dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional Indonesia. Sesuai undang-undang, terdapat 10 objek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan

olahraga tradisional. Pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan UU Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tersebut, penting bagi tiap-tiap daerah untuk mengelola objek-objek budaya di wilayahnya. Berdasarkan undang-undang tersebut pula, tiap daerah memiliki kebijakan masing-masing terkait pengelolaan objek-objek kebudayaan. Budaya sebagai salah satu potensi penyangga utama wisata di Kabupaten Bantul berupa warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda berbasis wisata *heritage* dan obyek wisata cagar budaya. Upaya pelestarian budaya yang dilakukan meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai tradisi budaya dan warisan budaya.

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni serta budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan, setiap seni mengandung kebudayaan yang khas dan setiap kebudayaan pasti memiliki nilai seni yang indah.

a. Pelestarian Seni dan Adat Tradisi

Dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah perlu dilakukan upaya untuk mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat. Inventarisasi potensi masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian dan pembinaan kelompok akan mengoptimalkan tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2020 tentang Nomor Induk Kesenian, pada pasal 5, ayat: (3) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dalam melaksanakan tugasnya melakukan inventarisasi potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian. (4) Pelaksanaan inventarisasi potensi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pencatatan dan pemberian Nomor Induk Kesenian (NIK). Dengan berlakunya Peraturan Bupati tersebut maka NIK yang telah diterbitkan sebelum peraturan Bupati tersebut terbit diminta untuk melakukan pendaftaran kembali.

Dalam rangka menunjang kegiatan pemeliharaan dan pengembangan budaya Daerah, perlu dilakukan inventarisasi potensi masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok seni budaya sehingga dapat berperan serta dalam pelestarian dan pengembangan budaya Daerah. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2020 tentang Nomor Induk Kesenian belum mengatur pelayanan pemberian Nomor Induk terhadap seluruh objek kebudayaan, sehingga ditetapkanlah Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Nomor Induk Kebudayaan.

Adapun Jumlah Kelompok Seni yang terdaftar sejak tahun 2013 (Saat itu masih Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul) sampai dengan tahun 2022 terangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.225 Data Register Kelompok Seni dan Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2022

No	Tahun	Jumlah				Keterangan
		Per Tahun		Sampai Dengan Tahun N		
1	TAHUN 2013	24	Register	24	Register	
2	TAHUN 2014	78	Register	102	Register	
3	TAHUN 2015	244	Register	346	Register	
4	TAHUN 2016	83	Register	429	Register	
5	TAHUN 2017	217	Register	646	Register	
6	TAHUN 2018	251	Register	897	Register	
7	TAHUN 2019	223	Register	1120	Register	
8	TAHUN 2020	258	Register	1378	Register	Jumlah Kelompok Seni yang terdaftar belum berdasarkan Peraturan Bupati Bantul tentang NIK
9	TAHUN 2021	307	Register	1685	Register	Jumlah Kelompok Seni terdaftar sebelum dan sesudah diberlakukan Registrasi sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Nomor Induk Kesenian sampai dengan Desember 2021
NIK Penyesuaian dengan Peraturan Bupati						
	Tahun 2021	307	Register	307	Register	Jumlah NIK baru dan yang sudah diperbaharui sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Nomor Induk Kesenian dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Nomor Induk kebudayaan
10	Tahun 2022	582	Register	899	Register	

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2023

Sumber Data Register Nomor Induk Kesenian (NIK) yang selanjutnya disebut Nomor Induk Kebudayaan (sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022 sejumlah 899 NIK. Untuk NIK yang terbit sebelum peraturan tersebut tetap berlaku, dan wajib memperbaharui pada saat mengajukan fasilitasi atau akan mendapatkan pembinaan/pendampingan. Registrasi ulang diperlukan sebagai bentuk update data kelompok seni/kelompok kebudayaan yang ada di Kabupaten Bantul, mengingat adanya kelompok yang dimungkinkan sudah tidak aktif lagi.

Pembinaan kelompok seni yang telah terdaftar dilaksanakan melalui pembinaan, fasilitasi pentas, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai agar kelompok seni budaya semakin mengembangkan karyanya. Pemerintah telah mempersiapkan pembangunan gedung/sanggar seni/taman budaya yang dapat memfasilitasi kelompok seniman dan budayawan untuk terus mengapresiasi karya-karyanya dengan rencana pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul yang saat ini telah selesai dengan pengadaan lahan, FS, DED, dan Dokumen Lingkungan. Diharapkan Tahun 2024 sudah dimulai proses pembangunannya melalui Dana keistimewaan DIY.

Selain itu, seni budaya merupakan penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Bantul maka perlu dikembangkan wisata budaya yang merupakan salah satu pilar pariwisata sekaligus dapat melestarikan seni dan budaya lokal. Fasilitasi kelompok seni meliputi festival dan pentas seni yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Aktivitas seni budaya tahun 2020-2021 dibatasi karena Pandemi Covid-19 dan pada tahun 2022 geliat aktivitas seni budaya sudah dimulai.

Kegiatan pelestarian Seni, Adat Tradisi yang telah dilaksanakan adalah:

- 1) Fasilitasi Adat dan Tradisi di Rintisan Desa Budaya
- 2) Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional di Rintisan Desa Budaya
- 3) Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal

- 4) Fasilitasi HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME)
- 5) Pembinaan Wayang Kulit
- 6) Fasilitasi Pentas Kelompok Seni
- 7) Upacara Adat Tradisi
- 8) Meti Dusun

Sebagai upaya regenerasi dan pembinaan kebudayaan kedepan Sanggar Seni akan difasilitasi, mengingat dari sanggar dasar-dasar seni budaya diajarkan dan dari sana akan lahir bibit-bibit muda pelestari seni budaya.

Fasilitasi kelompok seni tahun 2018-2019 merupakan kegiatan Provinsi (pembiayaan melalui sumber pendanaan Dana Keistimewaan yang disalurkan melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY. Pada tahun 2020 melalui BKK Dana Keistimewaan Kabupaten Kota, kegiatan fasilitasi seni dilaksanakan Kabupaten Bantul seperti data pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.226 Rekapitulasi Fasilitasi Kelompok Seni di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Fasilitasi Kelompok Seni	-	-	148	285	175

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2023

Dengan telah adanya pelonggaran PPKM dan diizinkannya kegiatan seni budaya di tahun 2022, sejumlah 175 fasilitasi kelompok seni budaya mulai dilakukan secara luring (luar jaringan). Dengan pentas di area publik/langsung diharapkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui seni budaya/pentas seni dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Pada setiap kegiatan pentas tersebut akan menghadirkan /mengundang penonton dan pedagang (lokal maupun keliling), dipastikan ada aktivitas ekonomi yang terjadi.

Tabel 2.227 Fasilitasi Pentas Seni di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Fasilitasi Pentas Seni Budaya	498	228	239	324	211

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2023

Disamping fasilitasi kelompok seni, maupun pentas budaya, pembinaan komunitas/lembaga sebagai wadah dari aktivitas seni budaya di kabupaten Bantul juga dilaksanakan, yaitu fasilitasi pada:

- 1) Dewan Kebudayaan Bantul
- 2) Komunitas HAMKRI
- 3) Komunitas KKB
- 4) Komunitas PASIBAN
- 5) Komunitas Macapat
- 6) Komunitas Seni Lukis
- 7) Komunitas Film
- 8) Penghargaan Seniman Budayawan dan Pelestari Adat Tradisi

b. Warisan Budaya dan Cagar Budaya

Warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni. Warisan budaya dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat dan mengalami perkembangan dari generasi ke generasi, dalam alur suatu tradisi. Pemeliharaan warisan budaya meliputi warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang

dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a) berusia 50 lima puluh tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun; memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Register Nasional Cagar Budaya, dilakukan dengan tahapan: a). Pendaftaran; b) Pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya; c). Penetapan; d). Pencatatan; e). Pemeringkatan; f). Penghapusan.

Warisan budaya benda di Kabupaten Bantul yang dilestarikan dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Gubernur DIY ataupun Keputusan Bupati Bantul sejak tahun 2000 sampai 2022 sejumlah 169 cagar budaya. Cagar Budaya tersebut tercatat dalam kepemilikan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton Surakarta, Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) DIY, Badan Pengelola Sumber Daya Air (BPSDA) DIY, PT KAI, PLN DIY, Dinas Kebudayaan DIY, UGM, DPUPKP Bantul, Dinas Perdagangan Bantul, Dinas Sosial Bantul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantul, Yayasan Kanisius, Pengurus Gereja, milik pribadi ataupun pemerintah kalurahan.

Cagar Budaya di Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2022 disajikan secara terperinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.228 Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bantul

No	Nama	Lokasi		SK	Pemanfaatan	Kepemilikan
		Dusun	Desa			
1	Kompleks Makam Giriloyo	Cengkehan	Wukirsari	PM.89/PW.07/MKP/2011, SK Menteri	Sebagai tempat wisata religi	Kraton
2	Kompleks Makam Banyusumurup	Banyusumurup	Girirejo	PM.89/PW.07/MKP/2011, SK Menteri	Sebagai tempat wisata religi	Kraton
3	Monumen Bibis	Bibis	Bangunjiwo	PM.89/PW.07/MKP/2011, SK Menteri	sebagai tempat tinggal	Pribadi
4	Bangunan Cagar Budaya Dalem Bupati Puroloyo	Tilaman	Wukirsari	SK Gub. DIY	Kantor Sekretariat Juru Kunci Purloyo	Kraton

No	Nama	Lokasi		SK	Pemanfaatan	Kepemilikan
		Dusun	Desa			
5	Bangunan Cagar Budaya Joglo R. Ngt. Hadi Puspito	Dsn. Sawahan	Sumberagung	SK Gub.DIY	Bangunan Tempat Tinggal	Pribadi
6	Bangunan Cagar Budaya Gereja Ganjuran	Ganjuran	Sumbermuljo	SK Gub. DIY Th 2000	tempat ibadah dan wisata religi	Swasta
7	Bangunan Cagar Budaya Joglo Bp. Miji Yuwono	Kweden	Trirenggo	SK Gub. DIY Th 2002	bangunan tempat tinggal	Pribadi
8	Bangunan Cagar Budaya Joglo Broto Sudarmo	Payak Tengah	Gilangharjo	SK Gub. DIY Th 2002	masih ditempati sebagai rumah tinggal	Pribadi
9	Bangunan Cagar Budaya Dalem Kilen Joglo Ciptowening	Ketandan Tengah	Wukirsari	SK Gub. DIY Th 2004	bangunan tempat tinggal dan Museum Batik	Pribadi
10	Struktur Cagar Budaya Saluran air PG Pajangan	Punden	Sendangsari	SK Gub. DIY Th 2008	sebagai sarana irigasi	PSDA DIY
11	Bangunan Cagar Budaya Joglo Yusuf Sudirman	Kunden	Jambidan	SK Gub. DIY	bangunan tempat tinggal	Pribadi
12	Kawasan Cagar Budaya Kotagedhe			SK Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2011	sebagai wisata edukasi dan religi	Disbud DIY
13	Kawasan Cagar Budaya Imogiri			SK Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2011	sebagai wisata religi	Kraton
14	Kawasan Cagar Budaya Kerta - Plered			SK Gubernur DIY Nomor 211/KEP/2019	sebagai wisata edukasi dan religi	Disbud DIY
15	Bangunan Kompleks Masjid Mataram Kotagede	Dondongan	Jagalan	SK Bupati No. 458 Th 2016	masih digunakan untuk tempat ibadah	Kraton
16	Kompleks Makam Imogiri	Pajimatan	Girirejo	SK Bupati No. 458 Th 2016	sebagai tujuan wisata religi segala umat beragama	Kraton

No	Nama	Lokasi		SK	Pemanfaatan	Kepemilikan
		Dusun	Desa			
17	Bangunan Cagar Budaya Panggung Krapyak	Krapyak	Panggunharjo	SK Bupati No. 458 Th 2016	sebagai bangunan monumental	Kraton
18	Struktur Cagar Budaya Dam Kamijoro	Kamijoro	Sendangsari	SK Bupati No. 458 Th 2016	masih digunakan untuk pengairan	PSDA DIY
19	Bangunan Cagar Budaya Stasiun Palbapang	Karasan	Palbapang	SK Bupati No. 458 Th 2016	Digunakan sebagai kantor terminan Palbapang oleh Dinas Perhubungan Bantul	KAI
20	Bangunan Cagar Budaya Cagak ANIEM Palbapang	Karasan	Palbapang	SK Bupati No. 458 Th 2016	sebagai tinggalan Tiang Listrik Peninggalan Kolonial masa Hindia Belanda	PLN DIY
21	Bangunan Cagar Budaya Joglo Lurah Dongkol Girirejo	Pajimatan	Girirejo	SK Bupati No. 458 Th 2016	masih digunakan sebagai tempat tinggal	Pribadi
22	Situs Cagar Budaya Candi Gampingan	Gampingan	Sitimulyo	SK Bupati No. 458 Th 2016	sebagai situs wisata sejarah budaya	BPCB DIY
23	Situs Cagar Budaya Candi Mantup	Sampangan	Baturetno	SK Bupati No. 458 Th 2016	sebagai situs wisata sejarah budaya	BPCB DIY
24	Situs Cagar Budaya Petirtaan Payak	Bintaran Wetan	Srimulyo	SK Bupati No. 458 Th 2016	sebagai situs wisata sejarah budaya	BPCB DIY
25	Benda Cagar Budaya Gilang Baturetno	Gilang	Baturetno	SK Bupati No. 458 Th 2016	sebagai situs wisata sejarah budaya	BPCB DIY
26	Situs Cagar Budaya Gua Siluman	Wonocatur	Banguntapan	SK Bupati No. 458 Th 2016	digunakan tempat untuk menepi atau bersemedi	Kraton
27	Struktur Cagar Budaya Gua Jepang	Ngreco	Seloharjo	SK Bupati No. 458 Th 2016	Sebagai Wisata Sejarah	BPCB DIY

No	Nama	Lokasi		SK	Pemanfaatan	Kepemilikan
		Dusun	Desa			
28	Benda Cagar Budaya Stoomwals PU	Karasan	Palbapang	SK Bupati No. 416 Th 2017	sebagai tinggalan masa Kolonial Hindia-Belanda	DPUPKP BANTUL
29	Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Sri Hartinah	Banyusumurup	Girirejo	SK Bupati No. 416 Th 2017	sebagai bangunan tempat tinggal	Pribadi
30	Situs Cagar Budaya Pesanggrahan Sonopakis	Sonopakis	Ngestiharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	perlu tindakan penyelamatan dari pembangunan rumah warga sekitar	Kraton
31	Situs Cagar Budaya Pesanggrahan Ambarbinangun	Kalipakis	Tirtonirmolo	SK Bupati No. 416 Th 2017	sebagai wisma atlet oleh Balai Pemuda dan Olahraga DIY	Kraton
32	Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Parto Sukardjo	Muneng	Tirtohargo	SK Bupati No. 416 Th 2017	sebagai bangunan tempat tinggal	Pribadi
33	Rumah Tradisional Milik Mardi Utomo	Mangir Lor	Sendangsari	SK Bupati No. 416 Th 2017	sebagai bangunan tempat tinggal	Pribadi
34	Struktur Cagar Budaya Dam Makam Mbulan		Sendangsari	SK Bupati No. 416 Th 2017	masih digunakan untuk pengairan	PSDA DIY
35	Benda Cagar Budaya Arca Hayasya	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
36	Benda Cagar Budaya Arca Mukunda	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
37	Benda Cagar Budaya Arca Muraja	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
38	Benda Cagar Budaya Arca Sukarasya	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
39	Benda Cagar Budaya Arca Vajrabhasa	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY

No	Nama	Lokasi		SK	Pemanfaatan	Kepemilikan
		Dusun	Desa			
40	Benda Cagar Budaya Arca Vajradhupa	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
41	Benda Cagar Budaya Arca Vajragantha	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
42	Benda Cagar Budaya Arca Vajragiti	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
43	Benda Cagar Budaya Arca Vajrakarma	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
44	Benda Cagar Budaya Arca Vajralasi	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
45	Benda Cagar Budaya Arca Vajraloka	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
46	Benda Cagar Budaya Arca Vajranrtya	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
47	Benda Cagar Budaya Arca Vajrapani	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
48	Benda Cagar Budaya Arca Vajraraga	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
49	Benda Cagar Budaya Arca Vajraraksa	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
50	Benda Cagar Budaya Arca Vajrasphota	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
51	Benda Cagar Budaya Arca Vamsa	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
52	Benda Cagar Budaya Arca Vinayaka	Gua Surocolo >> ex-situ BPCB DIY	Seloharjo	SK Bupati No. 416 Th 2017	koleksi temuan oleh BPCB DIY	BPCB DIY
53	Benda Cagar Budaya Kotak Wayang Balok Batu Andesit	Gunung Kelir	Pleret	SK Bupati N0. 595 Th 2018		Pribadi
54	Struktur Cagar Budaya Sendang Moyo	Gunung Kelir	Pleret	SK Bupati No. 596 Th 2018	tempat wisata religi	BPCB DIY

No	Nama	Lokasi		SK	Pemanfaatan	Kepemilikan
		Dusun	Desa			
55	Struktur Cagar Budaya Jembatan Kretek Abang Madukismo	Padokan Lor	Tirtonirmolo	SK Bupati No.597 Th 2018	digunakan untuk jembatan oleh warga	DPUPKP BANTUL
56	Struktur Cagar Budaya Sendang Kasihan	Kasihan	Tamantirto	SK Bupati No. 598 Th 2018	tempat wisata religi	Kraton
57	Bangunan Cagar Budaya Masjid Wonokromo	Wonokromo	Wonokromo	SK Bupati No.599 Th 2018	sebagai tempat ibadah	Kraton
58	Benda Cagar Budaya Mushaf Bejen	Bejen	Bantul	SK Bupati No. 600 Th 2018	koleksi pribadi oleh pemilik	Pribadi
59	Bangunan Cagar Budaya Rumah Dinas Stasiun Sedayu	Gubug	Argosari	SK Bupati No. 601 Th 2018	aset KAI yang tidak terpelihara	KAI
60	Struktur Cagar Budaya Tembok Keliling Sendang Moyo	Gunung Kelir	Pleret	SK Bupati No. 602 Th 2018	sebagai pembatas wilayah sendang	BPCB DIY
61	Benda Cagar Budaya Arca Agastya di Kompleks Sendang Kasihan	Kasihan	Tamantirto	SK Bupati No. 603 Th 2018		BPCB DIY
62	Bangunan Cagar Budaya Masjid Pathok Negoro Dongkelan	Dongkelan	Tirtonirmolo	SK. Bupati No. 604 Th 2018	sebagai tempat ibadah	Kraton
63	Struktur Cagar Budaya Sumur Gumiling Plered	Kedaton	Pleret	SK Bupati No. 605 Th 2018	Sebagai Wisata Sejarah	Disbud DIY
64	Struktur Cagar Budaya Dinding Sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered	Kauman	Pleret	SK Bupati No. 606 Th 2018	Sebagai Wisata Sejarah	Disbud DIY
65	Benda Cagar Budaya Dua Puluh Tiga Umpak Masjid Agung Plered	Kauman	Pleret	SK Bupati No. 607 Th 2018	Sebagai Wisata Sejarah	Disbud DIY
66	Batu Balok Masjid Agung Plered	Kauman	Pleret	SK Bupati No.608 Th 2018	Sebagai Wisata Sejarah	Disbud DIY

No	Nama	Lokasi		SK	Pemanfaatan	Kepemilikan
		Dusun	Desa			
67	Bangunan Cagar Budaya Stasiun Winongo	Glondong	Tirtonirmolo	SK Bupati No. 609 Th 2018	sebagai gudang oleh warga	KAI
68	Struktur Cagar Budaya Lemah Dhuwur Keraton Kerto	Kerto	Pleret	SK Bupati No. 610 Th 2018	Sebagai Wisata Sejarah	Disbud DIY
69	Benda Cagar Budaya Umpak Kerto	Kerto	Pleret	SK Bupati No. 611 Th 2018	Sebagai Wisata Sejarah	Disbud DIY
70	Struktur Cagar Budaya Makam Ki Dalang Panjang Mas	Gunung Kelir	Pleret	SK Bupati No. 612 Th 2018	sebagai tempat wisata religi semua umat beragama	BPCB DIY
71	Bangunan Cagar Budaya Stasiun Bantul	Nyangkringan	Bantul	SK Bupati No. 613 Th 2018	dimanfaatkan sebagai tempat usaha oleh masyarakat	KAI
72	Struktur Cagar Budaya Tembok Keliling Kompleks Makam Ratu Malang	Gunung Kelir	Pleret	SK Bupati No. 614 Th 2018	sebagai tembok pembatas atau benteng makam	BPCB DIY
73	Struktur Cagar Budaya Sendang Banyuurip	Banyuurip	Jatimulyo	SK Bupati No. 615 Th 2018	sebagai tempat wisata religi semua umat beragama	Kraton
74	Struktur Cagar Budaya Makam Ratu Malang	Gunung Kelir	Pleret	SK Bupati No. 616 Th 2018	sebagai tujuan wisata religi segala umat beragama	BPCB DIY
75	Struktur Cagar Budaya Jembatan Kereta Api Winongo	Glondong	Tirtonirmolo	SK Bupati No. 617 Th 2018	sebagai jembatan penyebrangan warga	KAI
76	Benda Cagar Budaya Arca Ganesha di Kompleks Sendang Kasihan	Kasihan	Tamantirto	SK Bupati No. 618 Th 2018		BPCB DIY
77	Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Dwiningsih	Ngibikan	Canden	SK Bupati No. 619 Th 2018	sebagai bangunan tempat tinggal dan	Pribadi

No	Nama	Lokasi		SK	Pemanfaatan	Kepemilikan
		Dusun	Desa			
					perkumpulan masyarakat	
78	Struktur Cagar Budaya Gua Surocolo	Poyahan	Seloharjo	SK Bupati No. 517 Th 2019	Sebagai tempat wisata	BPCB DIY
79	Benda Cagar Budaya Yoni Sembungan	Sembungan	Bangunjowo	SK Bupati No. 518 Th 2019		
80	Bangunan Masjid Pathok Ngoro Babadan	Plumbon	Banguntapan	SK Bupati No. 519 Th 2019	sebagai tempat ibadah	Kraton
81	Bangunan Cagar Budaya Pasar Angkruksari	Tegalsari	Donotirto	SK Bupati No. 520 Th 2019		DKUKMPP Bantul
82	Bangunan Cagar Budaya Bale palereman (Transit Jenazah Raja-raja Mataram)	Pajimatan	Girirejo	SK Bupati No. 521 Th 2019		
83	Bangunan Cagar Budaya Langgar Dhuwur	Celenan	Jagalan	SK Bupati No. 522 Th 2019		
84	Banguna Cagar Budaya Bekas Kantor Sinder Tebu Mojosari	Mojosari	Sitimulyo	SK Bupati No. 523 Th 2019	sebagai aula, gedung TK ABA Mojosari	Pemerintah Desa Sitimulyo
85	Bangunan Cagar Budaya Bekas Kantor Sinder Tebu Madigondo	Madugondo	Sitimulyo	SK Bupati No. 524 Th 2019	sebagai Persatuan PAUD	Pemda Bantul
86	Banguna Cagar Budaya Rumah Tradisional Dinas kebudayaan DIY (Bekas Milik Bu Nur Johan)	Citrang	Jagalan	SK Bupati No. 525 Th 2019	sebagai Sarana untuk masyarakat	Dinas Kebudayaan DIY
87	Struktur Cagar Budaya Makam Syeh Maulana Maghribi	Mancingan	Parangtritis	SK Bupati No. 526 Th 2019	sebagai tempat wisata religi	Kraton
88	Situs Cagar Budaya Gunung Wingko	Ngepet	Srigading	SK Bupati No. 527 Th 2019		Tanah milik warga
89	Bangunan Cagar Budaya Candi Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus	Ganjuran	Sumbermuljo	SK Bupati No. 528 Th 2019	Sebagai Wisata Religi	Pengurus Gereja Papa Miskin

No	Nama	Lokasi		SK	Pemanfaatan	Kepemilikan
		Dusun	Desa			
90	Struktur Cagar Budaya Cepuri Parangkusumo	Kauman	Pleret	SK Bupati No. 529 Th 2019	Sebagai Wisata Sejarah dan Religi	Kraton
91	Bangunan Cagar Budaya Pasar Sangkeh	Sangkeh	Srigading	SK Bupati No. 530 Th 2019	sebagai pasar	Pemerintah Desa Srigading
92	Bangunan Cagar Budaya Dalem Kanjengan (Dalem Bupati Juru Kunci Makam Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat)	Paseban	Wukirsari	SK Bupati No. 531 Th 2019	Sebagai tempat tinggal dan kantor juru kunci	Kraton Surakarta
93	Struktur Cagar Budaya Makan Giriloyo	Cengkehan	Wukirsari	SK Bupati No. 532 Th 2019	Sebagai Wisata Religi	Kraton
94	Bangunan Cagar Budaya Masjid Giriloyo	Cengkehan	Wukirsari	SK Bupati No. 533 Th 2019	Sebagai Tempat Ibadah	Kraton
95	Struktur Cagar Budaya Jagang Cepuri Keraton Koragede	Singosaren	Jagalan	SK Bupati No. 534 Th 2019		BPCB DIY
96	Bangunan Cagar Budaya Pasar Gatak	Jogodayoh	Sumbermulyo	SK Bupati No. 535 Th 2019	dimanfaatkan sebagai Los Pasar	Pemerintah Desa Sumbermulyo
97	Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik UGM	Bodon	Jagalan	SK Bupati No. 536 Th 2019	Sebagai tempat tinggal dan wisata edukatif	UGM
98	Bangaun Cagar Budaya Monumen Segoroyoso	Segoroyoso	Segoroyoso	SK Bupati No. 537 Th 2019		Dinas Sosial Bantul
99	Bangunan Cagar Budaya Rumah Singgah Gerilya Jenderal sudirman	Grogol IX	Parangtritis	SK Bupati No. 538 Th 2019	sebagai Pos Napak tilas Rute Gerilya oleh Taruna Akmil	Pribadi
100	Struktur Cagar Budaya Sendang Seliran	Jagalan	Jagalan	SK Bupati No. 539 Th 2019	sebagai Tempat wisata religi semua umat beragama	Kraton

No	Nama	Lokasi		SK	Pemanfaatan	Kepemilikan
		Dusun	Desa			
101	Omah Demamit	Ngentak	Seloharjo	No. 688 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	sebagai gudang	pribadi
102	Kolam Renang John Kersch	Mancingan	Parangtritis	No. 689 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	Kolam renang umum	pribadi
103	Kamar Mandi Kolam Renang John Kersch	Mancingan	Parangtritis	No. 690 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	sebagai kamar mandi	pribadi
104	Pagar Komplek Kolam Renang John Kersch	Mancingan	Parangtritis	No. 691 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	pagar pembatas tegalan	pribadi
105	SDN 1 Pundong	Tangkil	Srihardono	No. 692 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	sebagai sarana pendidikan	Disdikpora Bantul
106	Rumah Tradisional milik Setyo Pranyoto	Sungapan	Argodadi	No. 693 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	sebagai tempat tinggal	Pribadi
107	Song Kamal	Ngelosari	Srimulyo	No. 694 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	sebagai tempat tirakat	Diatas Tanah Sultan Ground
108	Rumah Tradisional Jawa milik Cokro Subroto	Payak Tengah	Srimulyo	No. 695 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	sebagai tempat tinggal	pribadi
109	Makam Sunan Geseng	Jolosutro	Srimulyo	No. 696 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	sebagai tempat wisata religi	Kraton
110	Rumah Singgah Soedirman	Piyungan	Srimartani	No. 697 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	sebagai tempat tinggal	pribadi

No	Nama	Lokasi		SK	Pemanfaatan	Kepemilikan
		Dusun	Desa			
111	Makam KRT Mangunegoro Bupati Bantul I	Pagergunung	Sitimulyo	No. 698 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	sebagai tempat wisata religi	Pemerintah Kalurahan Sitimulyo
112	Arca Agastya Nomor Inventaris BG. 1815	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	Guwosari	No. 703 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
113	Arca Bodhisattwa Padmapani BG. 575	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	Argodadi	No. 704 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
114	Arca Dhyani Buddha Wairocana Nomor Inventaris BG. 1470.b	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	Sitimulyo	No. 705 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
115	Arca Dhyani Buddha Wairocana Nomor Inventaris BG. 1470.c	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	Sitimulyo	No. 706 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
116	Arca Bodhisattwa Candralokeswara Nomor Inventaris BG.1469	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	Sitimulyo	No. 707 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
117	Arca Jembhala Nomor Inventaris BG. 1474	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	Sitimulyo	No. 708 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
118	Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	Sitimulyo	No. 709 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
119	Arca Siwa dan Parwati Nomor Inventaris BG. 1252	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	Baturetno	No. 710 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
120	Arca Siwa Nomor Inventaris BG. 349	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	Sitimulyo	No. 711 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY

No	Nama	Lokasi		SK	Pemanfaatan	Kepemilikan
		Dusun	Desa			
				Desember 2020		
121	Koleksi Emas Nomor Inventaris BG. 1471 a-i	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	Sitimulyo	No. 712 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
122	Pasar Sungapan	Sungapan	Argodadi	No. 713 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	sebagai los pasar	DKUKMPP Bantul
123	Rumah Indis milik Bapak Muhadi Djajus	Karangasem	Sitimulyo	No. 714 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	sebagai tempat tinggal	pribadi
124	SD Kanisius Ganjuran	Jogodayoh	Sumbermulyo	No. 715 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	sebagai sarana pendidikan	Yayasan Kanisius
125	Penginapan John Kersch	Mancingan	Parangtritis	No. 716 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	sebagai penginapan	pribadi
126	Rumah Tradisional milik Bapak Raditya Wahyu Kumara	Celep	Srigading	No. 717 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020	sebagai tempat tinggal	pribadi
127	Tugu Peringatan Jumeneng 40 Tahun Sri Susuhunan Paku Buwana X Sebagai Benda Cagar Budaya	Pajimatan	Girirejo	SK Bupati No. 558 Th 2021	sebagai tetenger	Keraton Surakarta
128	Masjid Banyusumurup Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Banyusumurup	Girirejo	SK Bupati No. 552 Th 2021	sebagai tempat ibadah	Dikelola Dinas Pariwisata Bantul
129	Goa Selarong Kakung Sebagai Struktur Cagar Budaya Goa	Kembangputihan	Guwosari	SK Bupati No. 304 Th 2021	Situs wisata sejarah	Dikelola Dinas Pariwisata Bantul
130	Goa Selarong Putri Sebagai	Kembangputihan	Guwosari	SK Bupati No. 305 Th 2021	Situs wisata sejarah	Dikelola Dinas

No	Nama	Lokasi		SK	Pemanfaatan	Kepemilikan
		Dusun	Desa			
	Struktur Cagar Budaya					Pariwisata Bantul
131	Yoni Nomor Inventaris C.93a Sebagai Benda Cagar Budaya	Kembangputihan	Guwosari	SK Bupati No. 325 Th 2021	sebagai koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
132	Yoni Nomor Inventaris C.93b Sebagai Benda Cagar Budaya	Kembangputihan	Guwosari	SK Bupati No. 326 Th 2021	sebagai koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
133	Yoni Nomor Inventaris C.93c Sebagai Benda Cagar Budaya	Kembangputihan	Guwosari	SK Bupati No. 328 Th 2021	sebagai koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
134	Yoni Nomor Inventaris C.93d Sebagai Benda Cagar Budaya	Kembangputihan	Guwosari	SK Bupati No. 329 Th 2021	sebagai koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
135	Los Pasar Pundong Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Pundong	Srihardono	SK Bupati No. 551 Th 2021	sebagai sarana perdagangan	Dikelola Dinas Pariwisata Bantul
136	Pintu Penahan Banjir Nambangan Sebagai Struktur Cagar Budaya	Nangsri,	Srihardono	SK Bupati No. 553 Th 2021	sebagai gerbang/gapura	Dikelola BPCB DIY
137	Gapuro Gedongkuning Bagian Timur Sebagai Struktur Cagar Budaya	Tegal Tandan	Banguntapan	SK Bupati No. 554 Th 2021	sebagai pagar rumah	Dikelola BPCB DIY
138	Gapuro Gedongkuning Bagian Barat Sebagai Struktur Cagar Budaya	Tegal Tandan	Banguntapan	SK Bupati No. 555 Th 2021	sebagai pagar rumah	Dikelola BPCB DIY
139	Yoni Nomor Inventaris C.94 Sebagai Benda Cagar Budaya	Kembangputihan	Guwosari	SK Bupati No. 330 Th 2021	sebagai koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
140	Yoni Nomor Inventaris C.95 Sebagai Benda Cagar Budaya	Kembangputihan	Guwosari	SK Bupati No. 335 Th 2021	sebagai koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
141	Yoni Nomor Inventaris C.96 Sebagai Benda Cagar Budaya	Kembangputihan	Guwosari	SK Bupati No. 349 Th 2021	sebagai koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY

No	Nama	Lokasi		SK	Pemanfaatan	Kepemilikan
		Dusun	Desa			
142	Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Ngoto Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Ngoto	Bangunharjo	SK Bupati No. 546 Th 2021	sebagai tempat tinggal	Dikelola Dinas Pariwisata Bantul
143	Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Kedungmiri Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Kedungmiri	Sriharjo	SK Bupati No. 547 Th 2021	sebagai tempat tinggal	Dikelola Ngadiyo
144	Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Blawong Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Bulu	Trimulyo	SK Bupati No. 548 Th 2021	sebagai tempat tinggal	Dikelola Dinas Pariwisata Bantul
145	Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Pertama Karangtengah Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Karangtengah	Karangtengah	SK Bupati No. 549 Th 2021	sebagai tempat tinggal	Dikelola Dinas Pariwisata Bantul
146	Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Mojohuro Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Mojohuro	Sriharjo	SK Bupati No. 550 Th 2021	sebagai tempat tinggal	Dikelola Dinas Pariwisata Bantul
147	Yoni Nomor Inventaris C.87 Sebagai Benda Cagar Budaya	Ngireng-ireng	Panggunharjo	SK Bupati No. 556 Th 2021	sebagai koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
148	Yoni Nomor Inventaris C.93 Sebagai Benda Cagar Budaya	Kembangputihan	Guwosari	SK Bupati No. 557 Th 2021	sebagai koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
149	Gapura Cendonosari Sebagai Struktur Cagar Budaya	Wonocatur	Banguntapan	SK Bupati No. 559 Th 2021	sebagai tetenger	BPCB DIY

No	Nama	Lokasi		SK	Pemanfaatan	Kepemilikan
		Dusun	Desa			
150	Sumur Sekolah Dasar Kasihan Sebagai Struktur Cagar Budaya	Kasihan	Tamantirto	SK Bupati No. 352 Tahun 2022	sebagai sumur	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
151	Bangunan Sekolah Menengah Pertama Kanisius Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Jogodayoh	Sumbermulyo	SK Bupati No. 353 Tahun 2022	sebagai sarana pendidikan	Yayasan Kanisius
152	Bangunan Rumah Sakit Santa Elisabeth Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Ganjuran	Sumbermulyo	SK Bupati No. 354 Tahun 2022	sebagai sarana kesehatan/rumah sakit	Yayasan Panti Rapih
153	Arca Nandi Nomor Inventaris C.102g Sebagai Benda Cagar Budaya	Mangir Lor	Sendangsari	SK Bupati No. 355 Tahun 2022	sebagai koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
154	Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 Sebagai Benda Cagar Budaya	Kauman	Gilangharjo	SK Bupati No. 356 Tahun 2022	sebagai tempat ritual	Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
155	Yoni Nomor Inventaris C.62a Sebagai Benda Cagar Budaya	Kraton	Mulyodadi	SK Bupati No. 357 Tahun 2022	sebagai koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
156	Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 Sebagai Benda Cagar Budaya	Gedongan	Srimulyo	SK Bupati No. 358 Tahun 2022	sebagai koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
157	Prasasti Rumwiga IIB Nomor Inventaris BG. 638 Sebagai Benda Cagar Budaya	Gedongan	Srimulyo	SK Bupati No. 359 Tahun 2022	sebagai koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
158	Prasasti Rumwiga II A Nomor Inventaris BG.	Gedongan	Srimulyo	SK Bupati No. 360 Tahun 2022	sebagai koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY

No	Nama	Lokasi		SK	Pemanfaatan	Kepemilikan
		Dusun	Desa			
	639 Sebagai Benda Cagar Budaya					
159	Bangunan Kelas dan Kamar Mandi Sekolah Dasar Kasihan Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Kasihan	Tamantirto	SK Bupati No. 361 Tahun 2022	sebagai sarana pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
160	Petilasan Gilanglipuro Sebagai Situs Cagar Budaya	Kauman	Gilangharjo	SK Bupati No. 547 Tahun 2022	sebagai tempat ritual	Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
161	Kantor Kalurahan Wijirejo (Eks Rumah Administratur Pabrik Gula Gesikan) Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Gesikan	Wijirejo	SK Bupati No. 548 Tahun 2022	sebagai kantor kalurahan	Pemerintah Kalurahan Wijirejo
162	Los Pasar Bendosari Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Gadungan	Canden	SK Bupati No. 549 Tahun 2022	sebagai sarana perdagangan	DKUKMPP Bantul
163	Los Pasar Pleret Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Kauman	Pleret	SK Bupati No. 550 Tahun 2022	sebagai sarana perdagangan	DKUKMPP Bantul
164	Goa Selarong sebagai Situs Cagar Budaya	Kembangputih	Guwosari	SK Bupati No. 551 Tahun 2022	Sebagai Wisata Sejarah dan Religi	Dinas Pariwisata Bantul
165	Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG.323 Sebagai Benda Cagar Budaya	-	-	SK Bupati No. 552 Tahun 2022	sebagai koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
166	Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG.774 Sebagai Benda Cagar Budaya	-	-	SK Bupati No. 553 Tahun 2022	sebagai koleksi temuan BPCB DIY	BPCB DIY
167	Rumah Tradisional R.Ngt Hadi	Sawahan	Sumberagung	SK Bupati No. 601 Tahun 2022	sebagai tempat tinggal,	Pribadi

No	Nama	Lokasi		SK	Pemanfaatan	Kepemilikan
		Dusun	Desa			
	Puspita Sebagai Bangunan Cagar Budaya				kegiatan sosial	
168	Rumah Tradisional Miji Yuwono Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Kweden	Trirenggo	SK Bupati No. 602 Tahun 2022	sebagai tempat tinggal	Pribadi
169	Rumah Tradisional Yusup Sudirman Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Kunden	Jambidan	SK Bupati No. 603 Tahun 2022	sebagai tempat tinggal	Pribadi

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2023

Warisan budaya tak benda atau *intangible cultural heritage* bersifat tak dapat dipegang (*intangible/* abstrak), seperti konsep dan teknologi; dan sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain.

Warisan Budaya Takbenda berdasarkan *UNESCO Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003*: Warisan Budaya Takbenda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan—serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya—bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan budaya takbenda ini diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia.

Kabupaten Bantul kaya potensi Warisan Budaya Tak Benda, dan sebagai bentuk upaya pelestariannya dilakukan kajian warisan budaya tak benda, sebagai syarat awal dalam upaya untuk dapat ditetapkan menjadi warisan budaya benda. Potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan sejak tahun 2013 hingga 2021 oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah 23 WBTB, secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.229 Data Budaya Tak Benda Potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul

NO	POTENSI WBTB	DOMAIN/OBJEK	No. SK Kemendikbud
1	Nama Lokasi INDUSTRI GERABAH KASONGAN Desa Kasongan, Kasihan , Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Nomor : 238 / M / 2013 tanggal 13 Desember 2013
2	Nama Lokasi BLANGKON YOGYAKARTA Pajangan	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Nomor : 260 /M/ 2017 tanggal 29 September 2017
3	Nama Lokasi MONTRO Desa Pleret, Pleret, Bantul	Seni Pertunjukan	Nomor : 260 /M/ 2017 tanggal 29 September 2017
4	Nama Lokasi WEDANG UWUH IMOGIRI Desa Imogiri, Imogiri, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Nomor : 260 /M/ 2017 tanggal 29 September 2017
5	Nama Lokasi SRANDUL Bambanglipuro	Seni Pertunjukan	Nomor : 260 /M/ 2017 tanggal 29 September 2017
6	Nama Lokasi REBO PUNGKASAN Desa Wonokromo, Pleret, Bantul	Adat istiadat masyarakat, Ritus, dan Perayaan	Nomor : 264 /M/ 2018 tanggal 21 September 2018
7	Nama Lokasi GEPLAK BANTUL Bantul, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Nomor : 264 /M/ 2018 tanggal 21 September 2018
8	Nama Lokasi NINI THOWONG YOGYAKARTA Ds. Panjangrejo, Pundong, Bantul	Seni Pertunjukan	Nomor : 264 /M/ 2018 tanggal 21 September 2018
9	Nama Lokasi BATIK NITIK YOGYAKARTA Kembang songo, Trimulyo, Jetis, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Nomor : 264 /M/ 2018 tanggal 21 September 2018
10	Nama Lokasi GEJOG LESUNG YOGYAKARTA Wukirsari, Imogiri	Seni Pertunjukan	Nomor : 264 /M/ 2018 tanggal 21 September 2018
11	Nama Lokasi BENTHIK YOGYAKARTA Muntuk, Dlingo	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Nomor : 264 /M/ 2018 tanggal 21 September 2018
12	Nama Lokasi ANDONG YOGYAKARTA Potorono, Banguntapan	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Nomor : 362 /M/ 2019 tanggal 24 September 2019
13	Nama Lokasi MIE LETHEK Srandakan, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Nomor : 362 /M/ 2019 tanggal 24 September 2019
14	Nama SHOLAWAT MAULUD JAWI	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Nomor : 362 /M/ 2019

NO	POTENSI WBTB	DOMAIN/OBJEK	No. SK Kemendikbud
	Lokasi Wonokromo, Plerettabw		tanggal 24 September 2019
15	Nama CEMBENGAN Lokasi YOGYAKARTA Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul	Adat istiadat masyarakat, Ritus, dan Perayaan	Nomor : 362 /M/ 2019 tanggal 24 September 2019
16	Nama SATE KLATAHAK Lokasi Jejeran, Pleret, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Nomor : 362 /M/ 2019 tanggal 24 September 2019
17	Nama KERAJINAN KULIT Lokasi TATAH SUNGGING YOGYAKARTA Pucung, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Nomor : 362 /M/ 2019 tanggal 24 September 2019
18	Nama PEWARNA ALAMI Lokasi YOGYAKARTA Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Nomor : 362 /M/ 2019 tanggal 24 September 2019
19	Nama NGURAS ENCEH Lokasi Pajimatan, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Adat istiadat masyarakat, Ritus, dan Perayaan	Nomor : 362 /M/ 2019 tanggal 24 September 2019
20	Nama UPC. ADAT KUPATAN Lokasi JOLOSUTRO Kapanewon Piyungan	Adat istiadat masyarakat, Ritus, dan Perayaan	Nomor : 1044 /P/ 2020 tanggal 2020
21	Nama UPC. NYADRAN AGUNG Lokasi MAKAM SEWU Kapanewon Pandak	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Nomor : 372/M/2021 tanggal 22 November 2021
22	Nama GUDEG MANGGAR Lokasi Kapanewon Mangir Pajangan	Adat istiadat masyarakat, Ritus, dan Perayaan	Nomor : 372/M/2021 tanggal 22 November 2021
23	Nama LEMPER Lokasi Kapanewon Sanden	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	Nomor : 372/M/2021 tanggal 22 November 2021

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2023

c. Desa Pamor Budaya

Sebagai suatu ikhtiar mewujudkan masyarakat Desa/Kalurahan yang berbudaya, maju dan mandiri, Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya mengintegrasikan potensi Desa/Kalurahan, meliputi kekuatan budaya, kekuatan ekonomi, dan kekuatan sosial dengan menetapkan suatu konsep Desa/Kalurahan Pamor Budaya. Kata pamor diilhami dari sebuah tosan aji keris sebagai pusaka orang Jawa yang mengandung estetika, dan makna simbolik sebagai do'a kepada Sang Maha Pencipta untuk pencapaian kualitas hidup si pemilik keris. Keris diciptakan oleh seorang empu melalui proses

fisik dan spiritual sehingga menghasilkan pamor yang indah dan penuh makna simbolik. Demikian pula Pemerintah Kabupaten Bantul, ibarat sebagai seorang empu, maka harus mampu melakukan segala upaya untuk membangun kalurahan dengan sentuhan budaya, sehingga menjadi sebuah kalurahan yang mempunyai pamor budaya, sebuah kalurahan yang maju dan berbudaya.

Desa/Kalurahan Pamor Budaya hanya ada di Kabupaten Bantul, yang merupakan upaya sinergitas Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendorong desa/kalurahan di Kabupaten Bantul dalam percepatan program Pemerintah Provinsi DIY dalam mewujudkan Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dan atau Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Predikat sebagai Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Prima, dan Desa Preneur pada suatu desa sebagai syarat utama yang sinergikan. Sinergitas tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika. Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika.

Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan daerah, yaitu mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya, dengan sasaran pelestarian dan pengembangan budaya daerah. Untuk mengukur segala perubahan yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang akan dicapai, ditentukan suatu indikator. Desa Pamor Budaya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati pada RPJMD Tahun 2021-2026 dengan pengampu Dinas Kebudayaan dan didukung Dinas Pariwisata, DP3APPKB dan DKUKMPP Kabupaten Bantul.

Capaian Desa/Kalurahan Budaya Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama RPJMD adalah 7 atau 175% dari target 4 di tahun 2022. Terlampauinya target didorong oleh jumlah Desa Budaya yang menjadi komponen utama penilaian di Kabupaten Bantul tahun 2021 sudah ada 19 Desa/Kalurahan. Perangkat daerah pengampu 3 predikat lain (desa wisata, desa prima dan desa preneur) di tingkat kabupaten dengan propinsi bersinergi dengan baik. Selanjutnya dibutuhkan kolaborasi bersama untuk

mendorong desa/kalurahan di Kabupaten Bantul untuk mengoptimalkan potensi budaya, pariwisata, preneur dan prima agar dapat memenuhi syarat utama nominasi Desa/Kalurahan Pamor Budaya.

2.1.3.2.17 Perpustakaan

a. Jumlah Perpustakaan

Budaya literasi (baca,tulis dan ucap) masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Bantul, untuk itu pemerintah mempunyai peran penting dalam mencerdaskan masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan atau literatur yang terseleksi dan *update*, selain itu memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat di lokasi perpustakaan maupun perpustakaan keliling.

Perpustakaan di Kabupaten Bantul terdiri dari satu Perpustakaan Daerah yang melaksanakan layanan langsung di kantor, layanan secara online, layanan mandiri dan layanan perpustakaan keliling. Jangkauan layanan perpustakaan keliling mencakup 17 Kapanewon 75 kalurahan dengan sasaran sekolah (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA), tempat ibadah, komunitas, dan pojok baca. Layanan keliling dilakukan pada hari Senin sampai dengan Kamis. Semua unit armada yang ada sudah menerapkan IT dengan sistem otomasi perpustakaan. Pada tahun 2021 layanan mandiri mencakup 34 sekolah yang telah mengajukan kerjasama untuk mengakses buku- buku di perpustakaan. Pelayanan perpustakaan secara langsung di Perpustakaan Daerah dilaksanakan pada hari Senin-Jum'at jam 08.00 WIB – 15.00 WIB. Namun pada masa pandemi ini Perpustakaan Daerah tidak melayani pengunjung pada hari Sabtu, Minggu dan untuk layanan keliling sempat berhenti sementara akan tetapi pada triwulan IV sudah mulai dilaksanakan. Adapun layanan perpustakaan secara online dapat diakses selama 24 jam, akan tetapi peminjaman secara online belum dapat dilayani karena aplikasi layanan perpustakaan saat ini belum memungkinkan untuk melayani peminjaman secara online.

Tabel 2.230 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022

No	Jenis Perpustakaan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perpustakaan Daerah/Kabupaten	1	1	1	1	1

No	Jenis Perpustakaan	2018	2019	2020	2021	2022
2	Perpustakaan Desa	75	75	75	75	75
3	Perpustakaan SD/MI	352	389	398	398	398
4	Perpustakaan SMP/MTs	81	105	118	118	120
5	Perpustakaan SMA/SMK/MA	95	95	101	101	102
6	Perpustakaan Khusus/Instansi	7	7	9	9	9
7	Perpustakaan Tempat Ibadah	56	56	56	56	56
8	Perpustakaan Komunitas	73	107	106	106	106
9	Perpustakaan Pondok Pesantren	7	7	7	7	7
Jumlah		747	842	871	871	874

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perpustakaan di Kabupaten Bantul dari tahun 2018 s/d 2022 mengalami kenaikan sebanyak 127 perpustakaan atau 17%. Kenaikan tertinggi pada tahun 2019 dengan jumlah kenaikan sebesar 95 unit perpustakaan atau 12,73%. Pada tahun 2022 terjadi penambahan 3 perpustakaan yang terdiri atas 2 perpustakaan SMP/MTs, dan 1 perpustakaan SMA/SMK/MA.

b. Pojok Baca

Pembangunan pojok baca merupakan sarana meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara geografis. Pojok baca memiliki nilai lebih dalam membangun budaya baca melalui swadaya dan partisipasi masyarakat. Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 telah terbangun 34 pojok baca. Sedangkan tahun 2020 tidak dilakukan pembangunan pojok baca karena anggaran di *refocusing* untuk penanganan Covid-19.

Tabel 2.231 Jumlah Pojok Baca

No	Tahun	Jumlah	Lokasi
1	2017	3	- Muntuk , Dlingo - Sumbermulyo, Bambanglipuro - Sitimulyo, Piyungan
2	2018	10	- Muntuk, Dlingo - Metuk, Donotirto, Kretek - Janten, Triharjo, Pandak - Bojong, Gilangharjo, Pandak - SD Muh Pepe, Tirenggo, Bantul - Kreet, Sendangsari, Pajangan

No	Tahun	Jumlah	Lokasi
			- Kembang Sari, Srimartani, Piyungan - Pringgolayan, Banguntapan - Serut, Palbapang, Bantul - Sanden, Murtigading, Sanden
3	2019	17	- SD Kanigoro, Mangunan, Dlingo - SD U Aisyiyah, Bantul - Perum Griya Tamansari, Srimartani, Piyungan - Kepuh Wetan Wirokerten Banguntapan - TK IT Ar Raihan Sitimulyo, Piyungan - Jetis, Tirtomulyo, Kretek - Guyangan, Wonolelo, Pleret - Karet, Pleret, Pleret - SD Muh. Bantul Kota, Bantul - SMP 3 Imogiri, Imogiri - Ngelosari, Srimulyo, Piyungan - Manggung, Wukirsari, Imogiri - Tembi, Timbulharjo, Sewon - Perpustakaan Palbapang, Bantul - TK LKMD, Kaliputih, Pendowoharjo, Sewon - Bogor, Trirenggo, Bantul - SD Muh. Blawong, Trimulyo Jetis
4	2020	0	
5	2021	4	- Sorowajan, Panggunharjo, Sewon - Mredo Gatak, Bangunharjo, Sewon - Sudimoro, Timbulharjo, Sewon - Jambon, Argosari, Sedayu
6	2022	3	- TK Negeri 1 Kretek, Parangtritis, Kretek - TK Negeri Pembina Bantul, Timbulharjo, Sewon - TK Negeri Srandakan, Trimurti, Srandakan
	Jumlah	37	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2017 sampai dengan 2022 telah terbangun 37 pojok baca. Pembangunan pojok baca terbanyak dilaksanakan pada tahun 2019 dengan jumlah mencapai 17 unit pojok baca. Adapun pada tahun 2020 tidak dilakukan pembangunan pojok baca karena anggaran *di refocusing* untuk penanganan Covid-19. Pembangunan pojok baca kembali dilakukan pada tahun 2021 dengan terbangunnya 4 unit pojok baca. Sementara pada tahun 2022 dilakukan pembangunan 3 unit pojok baca.

c. Akreditasi Perpustakaan

Akreditasi perpustakaan dimaksudkan meningkatkan kinerja layanan berstandar nasional sehingga dengan semakin bertambahnya jumlah perpustakaan terakreditasi diharapkan semakin mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan jumlah pemustaka. Jumlah perpustakaan yang terakreditasi di Kabupaten Bantul masih sangat minim.

Untuk akreditasi perpustakaan secara reguler perpustakaan desa/kalurahan baru 2,67% yang terakreditasi, 4,64% untuk jenjang SD, 3,13% MI, 12,9% SMP dan 16% MTs. Sedangkan akreditasi perpustakaan melalui jalur relaksasi Perpustakaan Desa baru terakreditasi 4%, Perpustakaan SD ada 17,58% SMP/Mts 3,38%. Sehubungan dengan kondisi tersebut, untuk mendukung percepatan peningkatan jumlah perpustakaan terakreditasi dilaksanakan Program Pembinaan Perpustakaan.

d. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.232 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	732.826	841.154	140.366	114.325	1.075.333

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2023

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah pengunjung mencapai 732.826 orang, dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 841.154 orang pengunjung. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya baca di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Peningkatan pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul antara lain disebabkan oleh metode

layanan dengan menggunakan sistem otomasi, paket dan manual, penambahan lokasi layanan keliling, sarana prasarana dan fasilitas khususnya layanan perpustakaan yang ada di kantor sudah dilengkapi WIFI, ruangan ber-AC, suasana nyaman serta tersedianya SDM pengelola perpustakaan yang memadai.

Pada tahun 2020 pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan sebanyak 140.366, jumlah ini menurun dibandingkan data tahun 2019. Pada tahun 2021 pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan sebanyak 114.325, jumlah ini menurun dibandingkan data tahun 2020. Penurunan ini disebabkan pandemi covid. Untuk mengurangi risiko penularan covid, layanan perpustakaan sempat dihentikan sementara waktu dan pada saat dibuka kembali dilakukan pembatasan jumlah pengunjung dan dengan mewajibkan protokol kesehatan ketat diantaranya, pengunjung memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk perpustakaan serta wajib menjaga jarak. Pada tahun 2022 jumlah pengunjung perpustakaan meningkat pesat yaitu sebanyak 1.075.333 disebabkan oleh dibukanya kembali layanan perpustakaan setelah ada pembatasan pada saat pandemi Covid 19, adanya kerjasama dengan pihak ketiga dan masyarakat untuk ikut mempromosikan perpustakaan, peran Bunda Literasi dalam berbagai event di perpustakaan. Hal ini berarti mengalami peningkatan 8,4 kali dari jumlah pemustaka di Tahun 2021.

Tabel 2.233 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Usia tahun 2018-2022

Jenis Pemustaka	Usia	2018	2019	2020	2021	2022
Paud/TK	3-6 th	11.436	16.115	1.835	474	3.082
SD	7-12 th	479.772	463.769	109.253	80.464	318.058
SMP	13-15 th	59.074	75.367	3.503	16.015	144.620
SMA	16-18 th	87.167	146.549	4.3	2.152	522.811
Mahasiswa	>18 th	14.080	19.958	2.544	2.753	25.744
Umum/lain-lain	>18 th	81.297	119.396	18.931	12.467	42.915
Jumlah		732.826	841.154	140.366	114.325	1.075.063

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengunjung perpustakaan dari tahun 2018 s.d. 2022 didominasi oleh pelajar dan mahasiswa rata-rata

setiap tahun 88,32%. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca sudah dimulai sejak usia sekolah. Harapannya minat baca akan semakin meningkat sampai di usia dewasa. Sedangkan untuk pengunjung kategori umum/lain-lain rata-rata per tahun mencapai 11,07% memang masih jauh dari harapan.

Upaya yang perlu kita lakukan antara lain dengan mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu perpustakaan bisa memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensinya. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan layanan informasi perpustakaan melalui koleksi bahan pustaka, layanan komputer dan internet untuk masyarakat.

e. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan.

Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam usaha memperbaiki pelayanan public. Untuk mengetahui seberapa besar kualitas layanan yang telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul kepada masyarakat.

Survey ini telah dilakukan sejak tahun 2017. Pada tahun 2017 s.d 2020 survey dengan menggunakan angket/kuesioner sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 survey dilakukan secara online dan Portal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Adapun unsur yang dijabarkan dalam kuesioner meliputi: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana prasarana.

Tabel 2.234 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,98	89,01	89,95	89,21	89,38

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2018 s.d. 2022 mengalami kenaikan. Nilai IKM tertinggi pada tahun 2020 sebesar 89.95. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 89.21. Adapun pada tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan menjadi 89,38. Adanya penurunan ini terdapat pada:

- unsur persyaratan dimana menurut responden persyaratan menjadi anggota masih belum mudah dan simple sehingga kedepan membutuhkan kebijakan tentang persyaratan menjadi anggota perpustakaan.
- unsur perilaku pelaksana, hal ini berkaitan dengan kapasitas dan kapabilitas individu pelaksana pelayanan, penguasaan teknis di bidang pelayanan yang masih perlu ditingkatkan melalui bimtek.
- Unsur waktu pelayanan, hal ini berkaitan dengan keterampilan, penguasaan teknis pelayanan dan penguasaan teknis aplikasi Bantul Pinter yang akan mempercepat dan mempersingkat waktu pelayanan. Kedepan diperlukan bimtek teknis serta pengetahuan tentang SOP.

a. Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan ketersediaan bahan pustaka dan bacaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Jumlah koleksi buku yang tersedia di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kemitraan dengan stakeholder perpustakaan dan adanya variasi koleksi. Perkembangan jumlah koleksi bahan pustaka dari 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.235 Jumlah Koleksi Buku/ Bahan Pustaka di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Judul	38.817	39.547	39.812	40.364	40.753
Buku	111.607	113.897	114.162	114.963	115.352
e-book	2.104	2.104	3.372	3.372	3.372

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah judul buku mengalami kenaikan terbanyak pada tahun 2019, naik sebanyak 730 judul atau 1,88%. Adapun kenaikan jumlah buku terbanyak terjadi pada tahun 2019, naik sebanyak 2.290 buah atau 2,05%. Untuk jumlah e-book mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2020 dengan jumlah 1.268 e book.

Koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul yang ada saat ini berjumlah 115.352 buku dengan jumlah judul bahan koleksi yang tersedia sebanyak 40.753 judul dan-koleksi digital

melalui *e-book* sebanyak 562 judul, dan 3.372 copy. Koleksi bahan pustaka diperoleh dari pengadaan buku, hibah Perpustnas RI, hibah masyarakat.

2.1.3.2.18 Kearsipan

Arsip merupakan suatu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik maupun organisasi lainnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna keabsahan dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna keabsahan suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, urusan kearsipan merupakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi kearsipan tersebut, telah ditempatkan sebanyak 35 Calon Arsiparis dan 17 orang Arsiparis dan 156 orang pengelola kearsipan dengan jumlah arsip yang dikelola sebanyak 9.482 dokumen arsip.

a. Pengawasan dan Penilaian arsip

Untuk mewujudkan tertib administrasi telah dilaksanakan pengawasan dan penilaian arsip kepada 52 Perangkat Daerah (PD). Hasil pengawasan dan penilaian sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.236 Data Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2018-2022

No	Kategori Nilai	Jumlah PD				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Memuaskan	0	0	2	5	3
2	Sangat Baik	2	5	3	7	10
3	Baik	20	14	30	28	27
4	Cukup	14	7	4	9	5
5	Kurang	39	26	15	5	8
	Jumlah	75	52	54	54	53

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa sejak tahun 2018 s/d 2022 pengelolaan kearsipan perangkat daerah dengan standar baik mengalami kenaikan. Adapun kenaikan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 84,21%.

Pada tahun 2018, pengawasan kearsipan untuk perangkat daerah ditiadakan dan dialihkan untuk pengawasan kalurahan se-Kabupaten Bantul. Hasil pengawasan kalurahan tahun 2018 adalah 29,3% kalurahan dengan pengelolaan arsip sesuai standar baik, sedangkan 70,7% kalurahan dengan pengelolaan kearsipan belum sesuai standar baik.

Melihat data tersebut mengindikasikan bahwa dari tahun ke tahun semakin muncul kesadaran perangkat daerah untuk mengelola arsipnya dengan baik. Harapan kami di waktu yang akan datang, perangkat daerah lebih meningkatkan pengelolaan kearsipan sesuai standar kearsipan. Sedangkan bagi perangkat daerah dengan pengelolaan arsip kurang baik akan dilakukan pembinaan, pengawasan pengelolaan arsip oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Selain itu diharapkan perangkat daerah dapat lebih memberdayakan pengelola kearsipan untuk melakukan pengolahan arsip yang sesuai standar dan aturan yang ada.

b. Akuisisi Arsip

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa arsip statis sebagai bukti pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dijamin keselamatan arsipnya baik secara fisik dan informasinya sehingga tidak mengalami kerusakan atau hilang. Salah satu penyelamatan arsip adalah akuisisi arsip.

Akuisisi arsip adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul,

yang dilakukan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip (pemerintah daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, perusahaan swasta yang memperoleh anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri), dan arsip perorangan.

Sejak tahun 2017 juga telah dilakukan akuisisi arsip terhadap berbagai macam peristiwa yang terjadi maupun dilaksanakan serta tokoh masyarakat, seniman, serta tokoh tokoh lainnya yang ada di Kabupaten Bantul. Daftar akuisisi yang telah dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.237 Daftar Akuisisi yang Telah Dilaksanakan

No.	Tahun	Obyek Akuisisi	Nama Tokoh
1.	2017	Tokoh keris	Mbah Djiwodiharjo
2.	2017	Pelukis	Ki Joko Pekik
3.	2018	Tokoh dalang	Ki Timbul Hadiprayitno
4.	2018	Arsip event tradisional Gerbang Madu Srimulyo Piyungan	-
5.	2019	Tokoh batik “Jogo Pertiwi”	R.Ngt.Djogo Partiw
6.	2020	Tokoh “seniman dagelan	Ki Ngabdul
7	2021	Akuisisi warisan budaya tak benda “bakmi letheke” Kapanewon Dlingo Dinas PPKBPMD	Yasir Ferry Ismatrada
8	2022	Akuisisi Arsip Bupati-Wakil Bupati Bantul periode 2016-2021	Drs. H. Suharsono dan Drs. H. Abdul Halim Muslih

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021.

Adapun arsip-arsip yang diakuisisi adalah arsip-arsip foto, arsip personal tokoh yang bersangkutan misalnya scanning atau fotocopy KTP, Ijazah, Kartu Keluarga, sertifikat, piagam penghargaan dan lain sebagainya. Selain itu arsip-arsip rekaman juga ada, selebihnya arsip tekstual.

c. Penyimpanan dan Pengelolaan Arsip

Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan menjadi acuan dalam pengelolaan kearsipan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengusulkan pemusnahan arsip ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebanyak

12.000 nomor berkas dan disetujui untuk dilakukan pemusnahan sebanyak 10.829 nomor berkas, dan arsip permanen sebanyak 1171 nomor berkas.

Tabel 2.238 Jumlah Arsip yang Disimpan dan Dikelola pada Tahun 2020-2022

No	Jenis Arsip	2020			2021			2022		
		Sudah dibuat daftar arsip/temubalik	Belum dibuat daftar arsip/temubalik	Jumlah	Sudah dibuat daftar arsip/temubalik	Belum dibuat daftar arsip/temubalik	Jumlah	Sudah dibuat daftar arsip/temubalik	Belum dibuat daftar arsip/temubalik	Jumlah
1.	Arsip Aktif	359	101	460	485	123	608	134.779	57.863	192.642
2.	Arsip Inaktif	872	339	1.211	5.581	1.167	6.748	61.718	6.786	68.504
3.	Arsip Statis	937	384	1.321	1.531	245	1.776	1.827	410	2.237
4	Arsip yang Dialih mediakan	1.346	89	1.435	70	280	350	430	0	430
Jumlah Total		3.514	913	4.427	7.913	1.104	9.017	198.754	65.059	263.813

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Pada tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyimpan dan mengelola arsip sebanyak 4.427 penomoran arsip. Arsip aktif yang sudah dibuatkan daftar arsip temu balik sejumlah 359 arsip (78,04 %), Arsip in aktif sebanyak 872 arsip (72 %), Arsip statis sebanyak 937 arsip (70,93 %), dan Arsip yang di alih mediakan ada sebanyak 1346 arsip (93,73 %). Total arsip, yang disimpan dan dikelola pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.427 nomor arsip.

Pada tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyimpan dan mengelola arsip sebanyak 9.017 penomoran arsip. Arsip aktif yang sudah dibuatkan daftar arsip temu balik sejumlah 485 arsip (79,76 %), Arsip in aktif sebanyak 5.581 arsip (82,7 %), Arsip statis sebanyak 1.531 arsip (86,2 %), dan Arsip yang di alih mediakan ada sebanyak 70 arsip (20 %). Total arsip, yang disimpan dan dikelola pada tahun 2020 adalah sebanyak 9.017 nomor arsip. Jadi pada tahun 2021 ini terjadi peningkatan arsip yang disimpan dan dikelola. Kemudian pada Tahun 2022 terjadi peningkatan arsip yang disimpan secara pesat yaitu arsip aktif sebanyak 192.642 (73%), arsip in aktif sebanyak 68.504 (25,9%), arsip statis sebanyak 2.237(0,84%), Arsip yang dialihmediakan sebanyak 430 (0,16%).

2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Bantul dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada (meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana dan sumberdaya lainnya) serta mengoptimalkan kerjasama *stakeholder* terkait bidang kelautan dan perikanan, berupaya mewujudkan pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundangan tersebut.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan, serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

a. Produksi Perikanan Tangkap

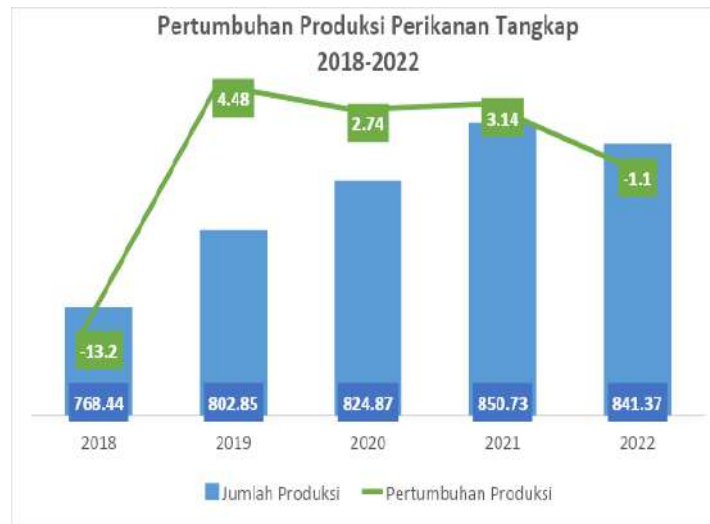
Perikanan tangkap di Kabupaten Bantul dikategorikan kedalam 2 jenis, perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum. Aktivitas perikanan tangkap laut oleh nelayan berlangsung di pantai Bantul sepanjang 13,5 km hingga menjorok ke laut sepanjang 4 mil laut. Sedangkan aktivitas perikanan tangkap perairan umum berlangsung di sungai, muara, laguna, embung dan perairan lainnya yang ada di daratan. Proses transaksi dan penatausahaan produksi perikanan tangkap laut didukung oleh adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berjumlah 5, yakni TPI Depok, TPI Ngepet, TPI Patihan, TPI Kuwaru dan TPI Ngentak.

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bantul secara umum mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.239 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Jumlah (ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi tangkap laut	473,01	497,77	470,14	490,98	467,19
2	Produksi tangkap perairan umum	295,43	305,08	354,73	359,75	374,18
Jumlah		768,44	802,85	824,87	850,73	841,37

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2023



Gambar 2.47 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Persentase pertumbuhan produksi dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif (Gambar 2-53). Merujuk pada Tabel 2-217, kondisi ini disumbang oleh hasil produksi tangkap laut perbandingan *year-on-year* (YoY) yang mengalami kenaikan di tahun 2019 kemudian mengalami penurunan di tahun 2020, mengalami kenaikan lagi di tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2022. Sedangkan produksi tangkap perairan umum mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan besaran pertumbuhan kenaikan yang berbeda tiap tahun.



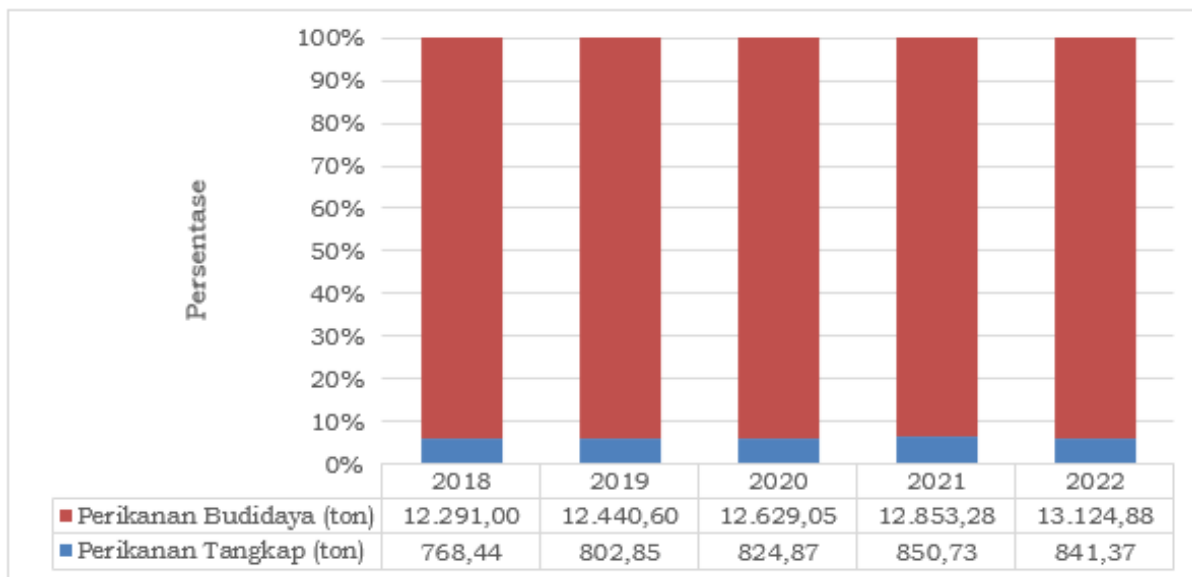
Gambar 2.48 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bantul Tahun 2022

Produksi Perikanan tangkap di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan negatif, yakni menurun sebanyak 1,1% dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan ini disumbang oleh produksi perikanan tangkap laut di musim paceklik pada bulan April hingga bulan September dengan puncak penurunan produksi di bulan Juni. Musim paceklik ditandai dengan terjadinya gelombang tinggi pada bulan-bulan tertentu dengan intensitas kejadian lebih sering dibandingkan dengan bulan lainnya. Kondisi gelombang tinggi berimbas pada bermigrasinya ikan-ikan yang ada di tepi laut yang menjadi target tangkapan nelayan kecil yang ada di Kabupaten Bantul (PMT dan non PMT) menuju ke arah laut lepas sehingga walaupun ada aktivitas penangkapan, baik oleh nelayan PMT dan non PMT, hasilnya relatif menurun. Selain itu, penurunan produksi juga dipengaruhi oleh adanya penurunan jumlah trip melaut pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 32,17%, dimana pada tahun 2022 jumlah trip melaut terdata sebanyak 4.811 trip sedangkan tahun 2021 sebanyak 7.093 trip.

b. Produksi Perikanan Budidaya

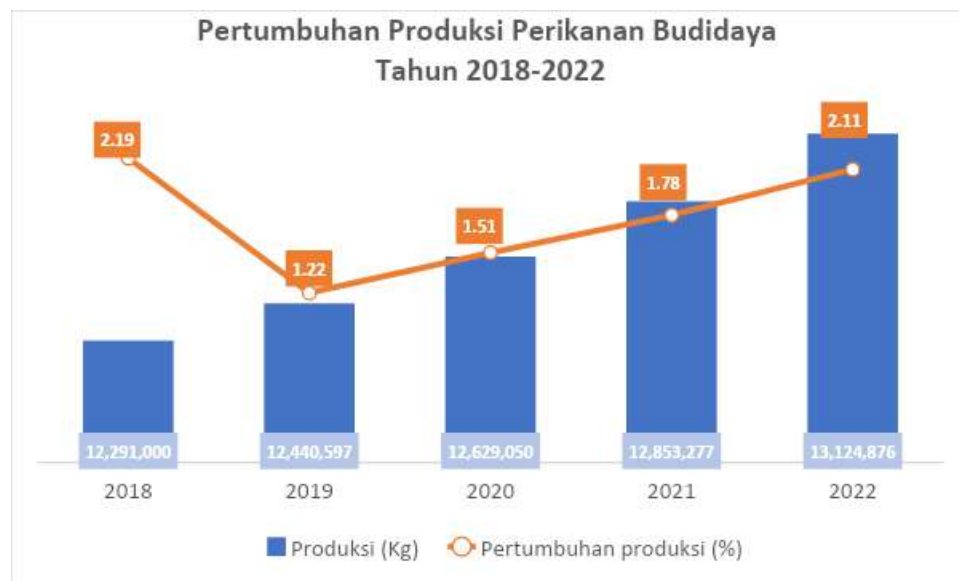
Berbeda halnya dengan perikanan tangkap dimana produksi perikanannya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, produksi dan kapasitas pada perikanan budidaya relatif bisa dikontrol dengan adanya intervensi inovasi teknologi. Perikanan budidaya di Kabupaten Bantul memberikan sumbangsih terbesar dalam pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan

perikanan terutama dalam hal peningkatan produksi perikanan. Dalam kurun waktu lima (5) tahun sejak tahun 2018 hingga 2022, produksi perikanan budidaya memberikan sumbangsih capaian produksi di atas 90%.



Gambar 2.49 Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tiap Tahun dalam kurun waktu 2018-2022

Pertumbuhan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bantul berdasarkan data produksi tahun 2018-2022 menunjukkan pertumbuhan produksi positif. Hal ini diperlihatkan dengan adanya kenaikan produksi sektor perikanan budidaya tiap tahunnya sejak tahun 2018 hingga 2022. Sedangkan dari sisi pertumbuhan produksi, hanya di tahun 2019 yang menunjukkan penurunan pertumbuhan dari tahun sebelumnya dimana pertumbuhan produksi di tahun 2018 adalah sebesar 2,19% sedangkan di tahun 2019 hanya sebesar 1,22%. Pertumbuhan produksi kemudian menunjukkan tren positif meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa intervensi Pemerintah Kabupaten Bantul berhasil dalam mengintervensi pengembangan perikanan budidaya dalam rangka mewujudkan peningkatan produksi.



Gambar 2.50 Pertumbuhan Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018-2022

Perikanan budidaya yang berkembang di Kabupaten Bantul adalah perikanan budidaya air tawar dan air payau. Komoditi perikanan budidaya air tawar meliputi ikan gurami, nila, lele, bawal, patin, mas, sedangkan perikanan budidaya air payau yang dibudidayakan adalah udang vanamei. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bantul per jenis komoditi pada kurun waktu tahun 2018-2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.240 Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Komoditi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Komoditas	Produksi (Kg)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Gurami	2.567.437	1.723.948	1.672.601	1.416.233	1.459.343
2	Nila	2.164.370	2.618.329	2.482.902	1.882.939	1.914.530
3	Lele	7.028.122	7.425.503	7.498.039	8.221.196	8.381.509
4	Bawal	179.914	218.661	236.653	359.912	387.254
5	Patin	37.444	42.888	103.535	261.006	264.861
6	Mas	21.421	36.828	35.876	24.193	22.558
7	Udang Vanamei	292.292	374.440	599.444	687.798	694.821
Jumlah		12.291.000	12.440.597	12.629.050	12.853.277	13.124.876

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

Produksi budidaya pada kurun waktu 2018-2022 secara umum menunjukkan adanya tren peningkatan. Namun, jika dilihat lebih detail pada

produksi masing-masing komoditi perikanan budidaya, dari tujuh (tujuh) komoditi, empat (4) diantaranya menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun sedangkan tiga (3) komoditi lainnya menunjukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif. Komoditi perikanan budidaya yang menunjukkan tren peningkatan antara lain ikan lele, bawal, patin dan udang vanamei, sedangkan yang menunjukkan tren pertumbuhan fluktuatif antara lain ikan gurami, nila dan ikan mas.

Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan konsumsi yang menjadi favorit bagi sebagian besar masyarakat. Selain itu, ikan lele termasuk jenis ikan yang mudah dibudidayakan, memiliki umur panen relatif cepat, dapat dibudidayakan dengan padat tebar tinggi serta relatif memiliki tingkat ketahanan yang bagus terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik. Hal-hal ini diperkirakan menjadi faktor pemicu banyak pembudidaya yang tertarik untuk membudidayakan ikan lele. Pemerintah Kabupaten Bantul juga aktif mensosialisasikan dan mentransfer penerapan teknologi budidaya ikan melalui sistem Matlair (hemat lahan dan air). Teknologi yang relatif baru ini memungkinkan masyarakat atau rumah tangga untuk melaksanakan budidaya ikan lele di pekarangan karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Teknologi Matlair diterapkan dalam kolam bulat dengan *inlet outlet*, aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik. Hal-hal tersebut diperkirakan berimplikasi pada tingginya jumlah produksi komoditi ikan lele di Kabupaten Bantul.

1) Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya.

Pelaku usaha budidaya ikan di Kabupaten Bantul sebagian besar skala rumah tangga, biasa disebut sebagai Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya.

Tabel 2.241 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya (unit)	5.176	5.216	5.416	5.487	7.608

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

Sejak tahun 2018, jumlah RTP budidaya di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan hingga tahun 2022. Jumlah RTP budidaya tahun 2019 meningkat sebanyak 40 RTP dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2020 terdapat penambahan jumlah RTP sebanyak 200 RTP, tahun 2021 bertambah sebanyak 71 RTP, dan tahun 2022 bertambah sebanyak 2.121 RTP. Penambahan RTP budidaya ini terutama pada budidaya lele. Pertambahan RTP pembudidaya ini dikarenakan adanya penambahan anggaran yang cukup signifikan pada bidang kelautan dan perikanan sejak Dinas Kelautan dan Perikanan berdiri kembali menjadi perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Penambahan RTP pembudidaya di tahun 2022 juga merupakan perwujudan dari upaya Kabupaten Bantul dalam meningkatkan produksi melalui penumbuhan pembudidaya baru.

2) UPTD Balai Budidaya Ikan (BBI).

Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki UPTD Balai Budidaya Ikan (BBI) dengan 5 unit kerja yang tersebar di beberapa lokasi, yakni di BBI Barongan (Dsn. Ngentak, Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis), BBI Sanden (Dsn. Ngentak, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden), BBI Gesikan (Dsn. Gesikan, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak), BBI Krapyak (Dsn. Tegal Krapyak, Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon), dan BBI Pundong (Dsn. Derso, Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong). UPTD BBI menjalankan fungsi penyediaan benih ikan dan penyediaan ikan konsumsi bagi RTP budidaya di Kabupaten Bantul serta bagi masyarakat Kabupaten Bantul non RTP budidaya. Produksi benih ikan (ekor) dan ikan konsumsi (kg) di UPTD BBI sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.242 Produksi Benih Ikan (ekor) dan Ikan Konsumsi (Kg) dari UPTD. BBI di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Benih Ikan (ekor)	4.629.118	4.530.470	4.118.504	4.021.050	4.177.161
Produksi Ikan	-	897	684	1.417	1.106

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi (Kg)					

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2023

UPTD BBI mulai menjual ikan ukuran konsumsi kepada masyarakat sejak tahun 2019. Secara umum, produksi ikan konsumsi di BBI tiap tahunnya fluktuatif. Produksi ikan konsumsi tertinggi terdapat di tahun 2021 sebanyak 1.417 Kg dan produksi tertinggi kedua di tahun 2022 sebanyak 1.106 Kg. sedangkan produksi terendah terdapat di tahun 2020 sebanyak 684 Kg. Jenis ikan konsumsi yang terserap di pasaran adalah ikan gurami, nila hitam dan nila merah.

Produksi benih ikan di UPTD BBI sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 nilainya fluktuatif. Secara umum, produksi benih mengalami penurunan di tahun 2019 hingga tahun 2022 bila dibandingkan dengan produksi benih di tahun 2018 yang mencapai 4.629.118 ekor. Namun, produksi benih di BBI mengalami kenaikan di tahun 2022 bila dibandingkan dengan produksi di tahun 2021. Produksi benih tahun 2022 mencapai 4.117.161 ekor sedangkan tahun 2021 sebanyak 4.021.050 ekor.

Tabel 2.243 Produksi Benih Ikan (Ekor), Calon Induk (Ekor), Dan Ikan Konsumsi (Kg) Per Jenis Ikan di UPTD BBI Kabupaten Bantul Tahun 2022

Jenis ikan	Produksi benih (ekor)	Produksi calon induk (ekor)	Produksi konsumsi (Kg)
Gurami	4.950	-	123
Lele	4500	-	-
Mas / tombro	488.459	-	-
Nila hitam	294.173	-	101
Nila merah	2.705.460	-	882
Tawes	677.419	-	-
Koi	1.600	-	-
Komet	600	-	-
Jumlah	4.177.161	-	1.106

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2023

Benih ikan yang diproduksi di UPTD BBI meliputi gurami, mas/tombro, nila hitam, nila merah, tawes, koi dan komet. Produksi benih

ikan terbanyak di tahun 2022 adalah benih ikan nila merah sebanyak 2.705.460 ekor.

Produksi benih yang dihasilkan BBI di Kabupaten Bantul pada dasarnya memiliki kualitas yang baik dan cukup diakui, hal ini terlihat dari adanya konsumen pengguna benih ikan di BBI yang berasal dari beberapa daerah di luar Kabupaten Bantul. Tingkat kepercayaan ini terbentuk berdasarkan informasi yang berkembang dari para pengguna jasa dan juga dikarenakan BBI Kabupaten Bantul selalu menggunakan induk berkualitas yang telah memiliki sertifikat tertentu sehingga benih yang dihasilkan terjamin secara kualitas maupun kuantitas. Dengan kualitas benih ikan yang dihasilkan di BBI dan membandingkan data produksi per komoditi di kurun tahun 2018-2022 di Kabupaten Bantul, masih ada peluang yang cukup besar yang masih menjadi pekerjaan dan tantangan bagi BBI untuk kedepan.

c. Potensi Pengembangan Produksi Garam

Kabupaten Bantul sebagai wilayah yang berbatasan dengan Samudera Hindia di sisi selatan, memiliki air laut dengan kadar garam cukup tinggi dan memperoleh sinar matahari sepanjang tahun memiliki potensi garam yang bisa dikembangkan sebagai salah satu komoditi yang cukup menjanjikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 memberikan pelatihan dan bantuan peralatan untuk produksi garam di Kalurahan Gadingsari. Kegiatan produksi garam di Kalurahan Gadingsari hingga saat ini dikelola oleh BUMKal dengan lokasi produksi berada di Pantai Pandansari, Wonoroto.

Tabel 2.244 Produksi Garam, Luas Tambak Dan Rerata Produktifitas Per Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022

Tahun	Produksi (Kg)	Pertumbuhan Produksi (%)	Luas Tambak (m ²)	Rerata Produktifitas per bulan (Kg/m ²)
2019	833	-	61,25	1,13
2020	4.400	528,21	240,00	3,06
2021	9.600	218,18	240,00	3,33
2022	3.900	-40,63	2.036,00	0,16

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2022

Akhir tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pengembangan tambak garam melalui perluasan jumlah tambak sebanyak

2.036 m². Namun pada prosesnya, hanya tambak seluas 240 m² yang bisa beroperasi maksimal hingga tahun 2021. Pada tahun 2022 awal, dilakukan perbaikan tambak hingga dapat beroperasi seluruhnya, namun hanya selama tiga (3) bulan, yakni bulan Maret hingga bulan Mei. Hal ini dikarenakan ada beberapa permasalahan teknis dan non teknis sehingga sejak bulan Juni hingga Desember, tidak ada tambak yang beroperasi. Permasalahan teknis yang dihadapi adalah adanya kerusakan sarana tambak yang diakibatkan oleh alam sehingga memerlukan adanya perbaikan. Kerusakan ini belum dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan dikarenakan adanya pergantian lurah yang berimbas pada ketidakjelasan pengelola teknis tambak garam. Permasalahan teknis ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk segera menyelesaikannya karena pada dasarnya kualitas garam yang dihasilkan dari usaha ini bagus dan memiliki prospek.

d. Pelanggaran Aturan

Kabupaten Bantul secara geografis dengan luas wilayah daratan 506,85 km² dan laut sebesar 125,94 Km² dengan panjang garis pantai 17 Km dan 6 sungai dengan panjang 114 Km memiliki potensi perikanan yang besar baik laut maupun darat. Disamping itu, kegiatan-kegiatan usaha perikanan seperti penangkapan ikan dan pembudidayaan Ikan di Kabupaten Bantul cukup berkembang sehingga dibutuhkan pengawasan supaya kegiatan usaha perikanan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran di sektor penangkapan ikan yang sering terjadi di perairan umum daratan yaitu penangkapan ikan dengan stroom dan pemakaian obat yang mengakibatkan sumber daya perikanan mati mulai dari yang berukuran kecil hingga besar. Kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak ini secara nyata dapat menjadikan sumberdaya ikan semakin sedikit dan pada akhirnya akan mengalami kepunahan. Sementara pelanggaran yang ada di pembudidayaan ikan lebih banyak berupa pelanggaran karena tidak memenuhi standar pembudidayaan ikan yang baik dan benar.

Kegiatan pengawasan sumber daya perikanan termasuk didalamnya penangkapan ikan dengan cara tidak benar yang dilaksanakan oleh Dislautkan DIY bekerjasama dengan OPD terkait dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) termasuk didalamnya Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bantul serta kegiatan pengawasan pembudidaya ikan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul secara nyata memberikan dampak positif menurunnya jumlah kejadian pelanggaran penangkapan ikan yang merusak dan pelanggaran pembudidayaan ikan yang tidak benar. Berikut data jumlah pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bantul selama kurun waktu 2019 – 2022.

Tabel 2.245 Kejadian pelanggaran aturan di Kabupaten Bantul tahun 2019-2022

Sektor	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Laut	-	-	1	-
PUD	10	7	4	4
Budidaya	-	-	25	24
Total	10	7	30	28

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2022

Pelanggaran aturan di Kabupaten Bantul tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dari 10 kejadian pelanggaran aturan menjadi 7 kejadian. Pada tahun 2019 dan 2020 fokus pengawasan ada di Perairan Umum Daratan dan Laut. Hal ini sesuai dengan tupoksi yang tercantum didalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul No. 115 Tahun 2016 yaitu pelaksanaan pemantauan sumberdaya perikanan. Sementara tahun 2021 aturan tentang perizinan berusaha membuat adanya tambahan obyek pengawasan yaitu di bidang pembudidayaan ikan. Total jumlah kejadian pelanggaran aturan tahun 2022 sebanyak 28 kejadian mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebesar 30 kejadian dengan persentase penurunan sebesar 6,7%.

e. Pengolahan Hasil Perikanan

Skala usaha unit pengolahan ikan di Kabupaten Bantul adalah usaha kecil dan menengah (UKM).

Tabel 2.246 Jumlah UKM, Tenaga Kerja dan Produksi Olahan (Ton) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah UKM	N/A	N/A	25	26
Jumlah Tenaga Kerja	N/A	N/A	53	73

Produksi Olahan (Ton)	7.750	5.912	166.152	323.207

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2023

Hingga tahun 2022, jumlah UKM pengolah ikan yang ada di Kabupaten Bantul adalah sebanyak 26 UKM dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 73 orang. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa rerata penyerapan tenaga kerja di bidang usaha pengolahan ikan di Kabupaten Bantul adalah sebanyak 2-3 orang per UKM. Produksi olahan yang dihasilkan di tahun 2022 sebesar 323,207 ton atau rata-rata 26,934 ton/bulan. Total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) di Kabupaten Bantul tahun 2022 adalah sebesar 13.966,25 ton. Jika diasumsikan bahwa bahan baku pengolahan ikan yang digunakan berasal dari produksi perikanan di Kabupaten Bantul, maka bahan baku yang baru terserap hanya sebesar $\pm$ 2,31% dari total produksi perikanan di tahun 2022. Namun demikian, bahan baku yang digunakan oleh UKM pengolahan ikan di Kabupaten Bantul tidak semuanya berasal dari hasil produksi perikanan di Bantul sehingga masih ada peluang untuk memanfaatkan produksi perikanan di Bantul sebagai sumber bahan baku utama pengolahan. Dilihat dari sisi ekonomi, produk hasil olahan ikan memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan bahan baku mentah dan memiliki masa simpan lebih lama.

2.1.3.3.2 Pariwisata

a. Kunjungan Wisatawan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Jumlah wisatawan dan PAD sektor pariwisata disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.247 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)	Jumlah PAD (Rp)
1.	2018	4.204.422	29.066.376.750,00
2.	2019	5.166.615	31.756.578.250,00
3.	2020	2.348.313	16.874.969.250,00
4.	2021	2.819.748	13.385.022.250,00
5.	2022	5.687.729	26.513.478.000,00

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2022 mencapai 5.687.729 orang, sedangkan dari sisi kontribusi terhadap PAD 2022 mencapai Rp26.513.478.000,00.

Pembangunan sektor pariwisata didukung oleh keanekaragaman obyek wisata yang meliputi alam, budaya/religius, dan minat khusus/buatan, juga didukung oleh pengembangan desa wisata sebagai *alternative tourism* di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut di atas merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa wisata.

Tabel 2.248 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Jenis	2018	2019	2020	2021	2022	Satuan	Keterangan
A.	Daya Tarik Wisata							
1	Alam	25	32	55	66	75	Unit	Kajian Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata
2	Buatan	59	84	129	131	46	Unit	
B.	Usaha Pariwisata							
1	Hotel bintang	3	3	3	3	3	Unit	Kajian Layanan Pendaftaran Usaha jasa Pariwisata
2	Hotel non-bintang	56	56	56	103	118	Unit	
3	Restoran/rumah makan	142	142	142	195	432	Unit	

No	Jenis	2018	2019	2020	2021	2022	Satuan	Keterangan
A.	Daya Tarik Wisata							
4	Jasa perjalanan wisata	33	33	33	39	31	Unit	

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2021 terjadi penambahan destinasi pada saat PPKM hal itu karena masyarakat berusaha memperbaiki perekonomian dengan membuka destinasi walaupun hal itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena syarat untuk membuka obyek wisata harus melalui perijinan dengan syarat protokol kesehatan dan CHSE. Hal tersebut berakibat beberapa destinasi buatan banyak tutup karena keterbatasan modal dan tidak bisa melanjutkan aktifitas wisata karena modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian. Ketika tahun 2022 diadakan identifikasi destinasi banyak yang tidak sesuai dengan data sebelumnya. Ada beberapa alasan jumlah destinasi wisata buatan mengalami penurunan antara lain:

1. Destinasi tidak ditemukan dan tidak ada aktivitas namun namanya masih ada.
2. Adanya peralihan aktivitas karena karakteristik aktifitas yang bersifat musiman.
3. Destinasi wisata mengalami perubahan kegiatan sehingga akan mengubah obyek dan terkesan tidak terurus.

Intervensi dalam usaha meningkatkan jumlah kunjungan antara lain memberikan kemudahan akses, menambah daya tarik wisata secara masif pada destinasi, dan memberikan layanan kepada para wisatawan pada saat berkunjung.

Kunjungan wisata meningkat pada lima hari besar tertentu, yaitu Tahun Baru 1 Januari, padusan, Lebaran, Malam 1 Syuro, Natal, Akhir Tahun dan Malam Tahun Baru, yang tersebar di semua kawasan obyek wisata yang dikelola diantaranya Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok, Kawasan Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Pandansari, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo, Kawasan Goa Selarong dan Kawasan Goa Cerme. Namun dengan adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 jumlah kunjungan mengalami penurunan yang

sangat signifikan dari tahun sebelumnya, dan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 jumlah kunjungan mulai meningkat dari target perubahan. Untuk data daya Tarik wisata buatan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 33,59% dari tahun 2021 hal ini dikarenakan masih adanya pandemi covid-19 sehingga banyak destinasi buatan yang tidak melakukan operasional dan hingga tahun 2022. Termasuk untuk usaha jasa perjalanan wisata pada tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan hal ini dikarenakan pada tahun 2022 masih banyak biro perjalanan wisata yang tidak melakukan operasional dan kebanyakan perjalanan wisata dilakukan secara mandiri. Sedangkan untuk database terkait Usaha Pariwisata berdasarkan hasil Kajian Usaha Jasa Pariwisata selain data tersebut di atas data usaha pariwisata yang sudah mempunyai koordinat antara lain :

Tabel 2.249 Jumlah Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah
Usaha Jasa Transportasi Wisata	7
Usaha Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	1.141
Usaha Daya Tarik Wisata	5

Sumber: Kajian Database Usaha Jasa Pariwisata Berbasis SIS9Sistem Informasi Geografi) – Dinas Pariwisata, 2023

Adapun jika dilihat dari data per kapanewon untuk data Daya Tarik Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.250 Data Usaha Pariwisata Yang Sudah Mempunyai Koordinat

Usaha Jasa Pariwisata	Bambanglipuro	Banguntapan	Bantul	Dlingo	Imogiri	Jetis	Kasihani	Kretek	Pajangan	Pandak	Piyungan	Pleret	Pundong	Sanden	Sedayu	Sewon	Srandakan	Total
Penyediaan Akomodasi	1	17	1				48	25	1		2	1		1	1	23		121
Usaha Jasa Tarik Wisata				2							1	1					1	5
Usaha Jasa Makanan dan Minuman	6	69	34	3	11	7	79	59	6	15	20	28	6	6	15	57	11	432
Usaha Jasa Perjalanan Wisata									1									1
Usaha Jasa Transportasi Wisata		1	1		1	2	1		1									7
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan																		0
Hiburan dan Rekreasi	45	51	65	92	91	64	122	58	77	89	54	44	63	50	48	79	49	1.141
TOTAL	52	138	101	97	103	73	250	142	86	104	77	74	69	57	64	159	61	1.707

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan berbagai macam *event* sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.251 Data *Event* di Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2022

Jenis Event Per Tahun				
2018	2019	2020	2021	2022
1. Pentas Pertunjukan Kecil	1. Festival Makanan Tradisional	1. Pentas di Desa Wisata	1. Njajah Bantul Milangkori	1. Njlajah Bantul Milang Kori
2. Pentas Pertunjukan Besar	2. Festival Ingkung	2. Pentas Kecil		2. Festival Kuliner Mataraman
3. Lomba Kreatifitas Seni (LKS)	3. Festival Mie	3. Pentas Besar		3. Keroncong Pesisiran
4. Pentas Seni Malam 1 Suro	4. Festival Lampion	4. Pentas Malam Tahun Baru Secara Virtual		4. Symphony Gumuk Pasir
5. Pentas Seni Malam 15 Suro	5. Festival Fashion Street	5. Festival Desa Wisata Secara Virtual		5. Festival Lampion
6. Pentas Malam Tahun Baru	6. Festival Dayung	6. Festival Profil Digital Desa Wisata		6. Pameran Pariwisata
Festival Dayung Hari Jadi Kabupaten Bantul	7. Festival Jogja Air Show (JAS)	7. Pentas Seni di Kawasan Pantai Parangtritis		7. Lomba Foto
	8. Festival Malam 1 Syuro	8. Pentas Seni di Kawasan Pantai Goa Cemara		8. Pentas Bandara
	9. Festival Malam 15 Syuro	9. Pentas Seni di Kawasan Goa Selarong		9. Pentas Rintisan di Desa Wisata
	10. Pentas Jathilan			10. Lomba Kreatifitas Seni (LKS)
	11. Pentas Campursari			11. Komunitas Sepeda Bantul
	12. Pentas Koes Plus			12. Komunitas CRV dan Merce
	13. Pentas Akhir Tahun			
	14. Pentas Atraksi Wisata Parangtritis			
	15. The Harmony Nature dan Culture Orchestra			
	16. Symphoni Orkestra			
	17. Surving Kompetisi			

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023

Tujuan diselenggarakannya event di atas adalah untuk mengurangi kesenjangan jumlah kunjungan di semua destinasi wisata. Berikut ini data jumlah kunjungan wisata menurut destinasi.

Tabel 2.252 Jumlah Wisatawan per Destinasi Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Nama Destinasi Wisata	2018	2019	2020	2021	2022
Pantai Parangtritis	2.895.187	2.796.934	1.463.420	1.182.000	2.363.900
Pantai Samas	730.875	537.873	240.152	182.010	338.509

Nama Destinasi Wisata	2018	2019	2020	2021	2022
Goa Cemara					
Pandansimo					
Kwaru					
Goa Selarong	37.847	38.700	20.000	12.200	22.402
Goa Cerme	7.924	6.828	3.403	2.013	3.205
Obyek wisata lainnya	532.589	1.768.280	621.338	1.441.525	2.959.713
Jumlah	4.204.422	5.166.615	2.348.313	2.819.748	5.687.729

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, untuk penyebutan kawasan ada perubahan khususnya untuk Kawasan Pantai Baros, Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Cangkring, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo yang semula berbunyi Kawasan Pantai Samas, Pantai Patehan, Pantai Goa Cemara, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo.

Rata-rata kunjungan wisatawan tahun 2018 – 2022 untuk kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok sebesar 79,19% dari total kunjungan yang berretribusi. Hal ini disebabkan karena Pantai Parangtritis merupakan ciri khas dari objek wisata di Kabupaten Bantul. Kunjungan wisatawan tahun 2022 mencapai 86,66% dari total kunjungan yang berretribusi dan mengalami kenaikan sebesar 97,94% dari tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 pemerintah pusat memberlakukan PPKM level 1 dan pada akhir tahun 2022 dicabutnya PPKM sehingga kunjungan wisatawan mulai ada peningkatan yang cukup signifikan, baik diukur dari jumlah kunjungan yang berretribusi maupun non retribusi yang tersebar di semua destinasi wisata. Adapun data sebaran wisatawan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.253 Data Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Uraian	Pengunjung		Asal Kebangsaan
		Wisnus	Wisman	
1	Kaki Langit	4.837	26	Swiss. Malaysia
2	Goa Gaja Lemah Abang	-	-	
3	Cempluk Tapak Tilas Sultan Agung	4.569	-	
4	Songgo Langit	-	-	
5	Banyu Nibo Rejosari	-	-	

No	Uraian	Pengunjung		Asal Kebangsaan
		Wisnus	Wisman	
6	Karangasem	341	-	
7	Karang Tengah	-	-	
8	Kebon Agung	642	-	
9	Candran	1.914	2	Malaysia
10	Giriloyo Wukirsari	25.060	-	
11	Pucung Rejo	-	-	
12	Imogiri	-	-	
13	Sri Keminut	42.773	-	
14	Krebet	4.170	-	
15	Magir Ki Ageng Wonoboyo	-	-	
16	Guwosari Slarong	22.192	-	
17	Kampung Santan	26.783	-	
18	Kalak Ijo	-	-	
19	Tembi, Timbulharjo	8.840	-	
20	Kaji Gelem	1.734	-	
21	Jipangan	3.618	-	
22	Manding Sabdodadi	55.623	113	Singapura, Malaysia, Swiis, Perancis, Perancis, Swislandia, Thailand
23	Jagalan	26.697	-	
24	Kalibuntung	-	-	
25	Kampung Surocolo	18.196	-	
26	Panjangrejo	-	-	
27	Puton	-	-	
28	Trimulyo	-	-	
29	Kiringan	3.084	-	
30	Mangrov	7.840	-	
31	Laguna Depok Parangtritis	-	-	
32	Mulyodadi	-	-	
33	Kergan Kampung Gurameh	438	-	
34	Lopati	2.050	-	
35	Gilangharjo	831	1	Malaysia
36	Pandansari	87.700	-	
37	Goa Cemara	21.607		
38	Ngringingan	431	-	
39	Argowisata Argorejo	-	-	
40	Balong Park	-	-	
41	Galaxi Water Park	-	-	
42	Goa Jepang	-	-	

No	Uraian	Pengunjung		Asal Kebangsaan
		Wisnus	Wisman	
43	Gua Selarong	22.402	-	
44	Grand Puri Water Park	57.401	-	
45	Gunung Pengger	663.379	-	
46	Puncak Becici	436.541	-	
47	Lintang 1000	20.864	-	
48	Pinus Asri	20.564	-	
49	Pinus Sari	484.871	-	
50	Seribu Batu	154.726		
51	Bukit Panguk	21.630		
52	Buki Mojo	-	-	
53	LBH Dahromo	-	-	
54	Kawasan Cagar Budaya Jagalan	26.697	-	
55	Kebun Buah Mangunan	104.800	-	
56	Kids Fun Parks	93.055	-	
57	Makam Raja - Raja Mataram di Imogiri	16.377	-	
58	Makam Raja - Raja Mataram di Kota Gede	29.300	-	
59	Makam Seniman Girisapto	-	-	
60	Makam Sunan Cirebon	3.015	-	
61	Pasar Seni Gabusan	-	-	
62	Taman Rekreasi Tirta Tamansari	96.456	-	
63	Kompl. Masjid Gede Mataram	503	-	
64	Museum Dirgantara Mandala	210.475	-	
65	Museum Rumah Belanda	431	-	
66	Gumuk Pasir Geospasial	14.081		
67	Padepokan Sumber Karahayon	42	-	
68	Museum Purbakala Pleret	1.719	-	
69	Museum Soeharto	53.575	50	Malaysia
70	Museum Tani Jawa	1.914	2	Belanda
71	Museum Tembi Rumah Budaya	18.728	-	
72	Museum Wayang Kakayon	1.710	5	Swiis, Itali
73	Museum Wayang Beber Sekartaji	2.129	-	
74	Museum Coklat Monggo	34.322	-	
75	Museum History of Java	7.632	113	Singapura, Malaysia, Swiss, Perancis, Perancis, Belanda, Spanyol, Thailand
76	Museum Rumah Garuda	250	-	
77	Museum Laboratorium Sejarah UPY	3.455		

No	Uraian	Pengunjung		Asal Kebangsaan
		Wisnus	Wisman	
78	Museum Tino Sidin	2.588	3	Swiss
79	Gua Cerme	3.205		
80	Pantai Kuwaru	20.814	-	
81	Pantai Parangtritis	2.363.900	-	
82	Pantai Samas	208.111	-	
83	Pantai Goa Cemara	21.584	-	
84	Pantai Pandansimo	88.000	-	
85	Selopamioro Adventure Park	2.753	-	
86	Kebun Pisang Mbah Lasio	1.445	-	
Jumlah		5.687.414	315	
Jumlah Total		5.687.729		

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023

b. Lama Tinggal Wisatawan

Lama tinggal wisatawan merupakan salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya devisa yang diterima untuk negara-negara yang mengandalkan devisa dari industri pariwisata. Lama tinggal yang dimaksud adalah banyaknya hari yang dihabiskan oleh seorang wisatawan berkunjung.

Tabel 2.254 Jumlah Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	1,9	2	1,56	1,57	2,03

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023

Realisasi lama tinggal untuk tahun 2022 meningkat 29,30 % dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 beberapa desa wisata mulai berbenah diri selama pasca pandemik covid-19 dan adanya pelatihan bagi pelaku wisata khususnya bagi usaha penginapan dan adanya dukungan promosi wisata baik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya seperti event-event wisata yang dilaksanakan di destinasi wisata. Disamping itu pada tahun 2022 sudah diberlakukannya PPKM level 1 dan pada akhir tahun 2022 dicabutnya PPKM sehingga dampak ini mempengaruhi peningkatan lama tinggal wisatawan walaupun belum bisa mencapai maksimal karena masih baru tahap perbaikan tingkat ekonomi masyarakat. Dan pada masa pandemi covid merupakan waktu/kesempatan dimanfaatkan untuk mempersiapkan dengan melakukan pembenahan-pembenahan sehingga pada saat nanti sudah tidak diberlakukannya PPKM maka siap untuk menjalankan aktivitasnya.

c. Jumlah Belanja Wisatawan

Jumlah Belanja Wisatawan pada tahun 2022 ditarget sebesar Rp744.188,00/orang dan terealisasi sebesar Rp767.234,00/orang atau sebesar 103,10%. Untuk jumlah belanja wisatawan ini mengalami kenaikan dari realisasi belanja wisatawan tahun 2021 Rp. 675.000,00/orang sebesar Rp. 92.234,00/orang atau 13,67%. Kenaikan ini masih belum maksimal hal ini dikarenakan masih minimnya nilai belanja masyarakat pada masa paska pandemi covid-19.

d. Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif yang Dipenuhi

Jumlah parameter kabupaten kreatif pada tahun 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan target 14 jumlah parameter kabupaten kreatif dengan realisasi 14 jumlah parameter kabupaten kreatif atau sebesar 100%. Indikator ini untuk mendukung Kabupaten Kreatif menuju Kota Kreatif Dunia (UCCN) dengan pengembangan jejaring ekonomi kreatif baik melalui seminar, workshop dan pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif.

e. Desa Wisata

Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata

Kabupaten Bantul juga memiliki desa wisata, pada tahun 2022 terdapat 47 desa wisata yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.255 Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Desa Wisata	37	38	42	43	47

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023

Peningkatan jumlah desa wisata dikarenakan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata kemudian ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan dinas pariwisata. Kegiatannya antara lain : Pembentukan kelembagaan sektor pariwisata di tingkat kalurahan yaitu pokdarwis dan desa wisata. Kegiatan yang lain yaitu peningkatan kelembagaan pokdarwis dan desa wisata. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas pengelola desa wisata diadakan

pelatihan-pelatihan seperti : Pelatihan pengelolaan desa wisata, pengelolaan homestay, pemandu wisata dll.

Adapun tahapan pengembangan Desa Wisata dapat dijabarkan dalam 3 tahap yaitu Rintisan, Berkembang, Maju dan Mandiri. Tahapan ini menggambarkan posisi desa wisata dilihat dari program yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapannya antara lain sebagai berikut :

1. Rintisan

- a) Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata
- b) Pengembangan sarana dan prasarana wisata masih terbatas
- c) Belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar
- d) Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh
- e) Sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta)

2. Berkembang

- a) Sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah
- b) Sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata
- c) Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat
- d) Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh
- e) Masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta)

3. Maju

- a) Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya
- b) Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan termasuk wisatawan mancanegara
- c) Sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai
- d) Masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui pokdarwis/keompok kerja lokal
- e) Masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata

4. Mandiri

- a) Masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversikan produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri

- b) Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia
- c) Sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN
- d) Pengelolaan desa wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan pentahelix sudah berjalan baik
- e) Dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversikan produk wisata di desa wisata

Desa sudah mampu memanfaatkan digitilisasi sebagai bentuk promosi mandiri (mampu membuat bahan promosi dan menjual secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi)

Tabel 2.256 Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Nama Desa Wisata	Alamat	Potensi Wisata	Jenis Kategori
1	Wukirsari	Wukirsari, Imogiri	Batik pewarna alami	Maju
2	Kakilangit	Mangunan, Dlingo	Alam, Kerajinan, Kuliner	Maju
3	Kampungsantan	Guwosari, Pajangan	Kerajinan tempurung, Kuliner Inggung	Maju
4	Krebet	Sendangsari, Pajangan	Kerajinan Batik Kayu	Maju
5	Tembi	Timbulharjo, Sewon	Kerajinan, Outbond	Maju
6	Karangtengah	Karangtengah, imogiri	Alam, Kerajinan	Maju
7	TTSA	Mangunan, Dlingo	Alam, Budaya, Kerajinan	Maju
8	Kebonagung	Kebonagung, Imogiri	Wisata Pendidikan Pertanian	Maju
9	Manding	Sabdodadi, Bantul	Sentra Kerajinan Kulit	Maju
10	Candran	Kebonagung, Imogiri	Museum tani, Kesenian	Maju
11	Lopati	Trimurti, Srandakan	Kuliner, Kerajinan	Berkembang
12	Karangasem	Muntuk, Dlingo	Alam, Kerajinan	Berkembang
13	Jipangan	Bangunjiwo, Kasihan	Budaya, Kerajinan	Berkembang
14	Kiringan	Canden, Jetis	Sentra Jamu Tradisional	Berkembang
15	Puton	Trimulyo, Jetis	Alam	Berkembang
16	Kalakijo	Guwosari, Pajangan	Budaya, Kuliner Inggung	Rintisan/Embrio
17	Mangrove	Tirtoharjo, Kretek	Alam, Konservasi Mangrove	Rintisan/Embrio
18	Laguna Depok	Parangtritis, Kretek	Outbond, Kuliner	Rintisan/Embrio
19	Ngringinan	Palbapang, bantul	Museum, Kuliner	Rintisan/Embrio
20	Mangir	Sendangsari, Pajangan	Wisata Sejarah Mataram, Kuliner	Rintisan/Embrio
21	Trimulyo	Trimulyo, Jetis	Cagar Budaya, Batik	Rintisan/Embrio
22	Jagalan	Jagalan, Banguntapan	Cagar Budaya, Kuliner	Rintisan/Embrio
23	Kampung Surocolo	Seloharjo, Pundong	Cagar Budaya, Budaya	Rintisan/Embrio
24	Kregan Kampung Gurami	Tirtomulyo, Kretek	Pertanian, Perikanan	Rintisan/Embrio

No	Nama Desa Wisata	Alamat	Potensi Wisata	Jenis Kategori
25	Juron	Pendowoharjo, Sewon	Kerajinan	Rintisan/Embrio
26	Ngembel Mbeji	Sendangsari, Pajangan	Alam, Budaya	Rintisan/Embrio
27	Gunung Cilik	Muntuk, Dlingo	Alam, Kerajinan, Budaya	Rintisan/Embrio
28	Bendo	Wukirsari, Imogiri	Alam, Kerajinan Genteng Tradisional	Rintisan/Embrio
29	Kajigelem	Bangunjiwo, Kasihan	Budaya, Gerabah	Rintisan/Embrio
30	Songgo Langit	Mangunan, Dlingo	Alam, Budaya, Kerajinan	Rintisan/Embrio
31	Goa Gajah (Lemahbang)	Mangunan, Dlingo	Alam, Goa Gajah	Rintisan/Embrio
32	Banyu Nibo Rejosari	Terong, Dlingo	Pertanian, Alam	Rintisan/Embrio
33	Guwosari Selarong	Guwosari, Pajangan	Cagar Budaya, Kerajinan	Rintisan/Embrio
34	Dewi Kaji	Gilangharjo, Pandak	Alam, Budaya	Rintisan/Embrio
35	Goa Cemara	Gadingsari, Sanden	Alam, Outbond, Konservasi Penyu	Rintisan/Embrio
36	Pucungrejo	Wukirsari, Imogiri	Kerajinan Kulit	Rintisan/Embrio
37	Imogiri	Imogiri	Budaya	Rintisan/Embrio
38	Srikemenut (wunut)	Sriharjo, Imogiri	Alam, Budaya	Rintisan/Embrio
39	Panjangrejo	Panjangrejo, Pundong	Alam, Gerabah	Rintisan/Embrio
40	Dewa Batu	Trimulyo, Jetis	Alam, Budaya	Rintisan/Embrio
41	Pandansari	Gadingsari, Sanden	Alam, Budaya	Rintisan/Embrio
42	Dewi Gumi	Guwosari, Pajangan	Alam, Budaya	Rintisan/Embrio
43	Mulyodadi	Mulyodadi, Bambanglipuro	Alam, Budaya	Rintisan/Embrio
44	Retno	Baturetno, Banguntapan	Alam, Budaya	Rintisan/Embrio
45	Mulia	Srimulyo, Piyungan	Alam, Budaya	Rintisan/Embrio
46	Carakan	Wijirejo, Pandak	Alam, Budaya	Rintisan/Embrio
47	Bumi Mataram Pleret	Pleret, Pleret	Alam, Budaya	Rintisan/Embrio

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023

Pengembangan daya tarik wisata di Kabupaten Bantul perlu untuk terus ditingkatkan, terutama di Kawasan Pantai Selatan, sehingga kunjungan wisata tidak hanya terfokus di Pantai Parangtritis dan agar penyebaran jumlah kunjungan wisatawan bisa merata dengan cara pelaksanaan promosi wisata dan event wisata ke beberapa destinasi wisata. Disamping itu juga Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata dan jaringan ekonomi kreatif sehingga memiliki standar kualitas prima dalam memberikan pelayanan pada wisatawan dengan meningkatkan sadar wisata dan sapta pesona ke semua stakeholder pariwisata dan masyarakat pada umumnya. Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan dapat dijadikan peluang pengembangan destinasi wisata dengan tetap memperhatikan ciri khas Kabupaten Bantul.

2.1.3.3.3 Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB meskipun perannya semakin menurun karena pertumbuhan di sektor non pertanian pertumbuhannya relatif lebih cepat.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Bantul sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

a. Produksi Tanaman Pangan

Komoditas tanaman pangan utama di Kabupaten Bantul adalah padi, jagung, kacang tanah dan kacang kedelai.

Tabel 2.257 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Komoditas	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi Sawah						
	Luas Panen	ha	31.182,30	29.524,00	30.077,00	29.081,90	30.336,94
	Produktivitas (GKG)	ku/ha	60,06	63,56	61,14	65,05	6,448
	Produksi (GKG)	ton	187.280,89	187.655,00	183.887,00	189.190,66	195.612,59
	Produksi beras	ton	119.859,77	120.099,20	117.687,68	121.082,02	123.627,16
2	Jagung						
	Luas Panen	ha	3.565,10	4.934,00	3.790,80	3.482,80	3.194,32
	Produktivitas	ku/ha	73,17	70,74	74,75	83,21	69,95
	Produksi (pipilan kering)	ton	26.085,84	34.903,00	28.337,00	28.979,70	22.344,27
3	Kedelai						
	Luas Panen	ha	1.213,60	909,00	603,50	646,90	482,22
	Produktivitas	ku/ha	15,52	15,90	17,00	14,90	15,73
	Produksi (wose kering)	ton	1.883,51	1.445,00	1.026,00	963,88	758,53

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan produksi padi sebesar 0,52% atau naik sebesar 1.009,48 ton dibandingkan tahun 2021. Dari produksi padi sebesar 194.615,41 ton GKG pada tahun 2021 menjadi 195.612,59 ton GKG pada tahun 2022. Peningkatan produksi padi tahun 2022 ini disebabkan kondisi iklim basah (hujan sepanjang tahun) dan bantuan benih yang tepat waktu dengan mutu baik. Selain itu, organisme pengganggu tanaman (OPT) terkendali dengan adanya kegiatan gerakan pengendalian (Gerdal) OPT di berbagai kelompok seluruh Kabupaten Bantul. Peningkatan produksi padi tersebut juga karena dukungan pemerintah berupa bantuan padi inbrida pada 194 kelompok tani dengan jumlah benih padi 30.350 kg untuk luasan 1.214 ha serta bantuan padi IP 400 pada 288 kelompok tani dengan jumlah benih 68.575 kg untuk luasan 2.743 ha.

Produksi jagung pada tahun 2022 adalah 22.344,27 ton sedangkan tahun 2021 adalah 24.163,00 ton. Produksi jagung mengalami penurunan sebesar 1.818,73 ton atau menurun 7,53%. Penurunan produksi jagung dikarenakan adanya penurunan luas panen jagung seluas 288,68 hektar. Selain tanaman padi dan jagung, komoditas yang termasuk tanaman pangan unggulan Kabupaten Bantul adalah kedelai. Produksi kedelai, pada tahun 2022 ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Penurunan produksi kedelai mencapai 21,3% atau 205,35 ton. Penurunan produksi kedelai ini disebabkan penurunan luas panen yaitu 164,38 hektar. Selain itu produktivitas kedelai juga menurun akibat hujan sepanjang tahun sehingga pertumbuhan awal kedelai terhambat akibat terlalu banyak air dan atau terendam banjir yang mengakibatkan pertumbuhan kedelai selanjutnya tidak maksimal.

b. Produksi Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran yang banyak ditanam di Kabupaten Bantul antara lain bawang merah, cabai merah, dan pisang.

Tabel 2.258 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Komoditas /uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bawang Merah						
	Luas Panen	Ha	835,00	893,00	864,00	1.645,00	1.301,00
	Produksi	Ton	7.979,80	9.427,00	9.131,70	16.900,84	11.618,83
	Produktivitas	ku/ha	95,57	105,57	105,69	102,74	89,31
2	Cabai Merah						
	Luas Panen	Ha	402,00	298,00	590,90	513,50	283,00
	Produksi	Ton	1.979,80	1.166,40	6.446,68	2.562,69	1.681,40
	Produktivitas	ku/ha	49,25	39,14	109,10	49,91	59,41
3	Pisang						
	Produksi	Ton	5.902,90	6.727,80	14.977,13	14.102,95	11.889,81

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran yang banyak ditanam di Kabupaten Bantul antara lain bawang merah, cabai merah, dan pisang. Komoditas bawang merah pada tahun 2022 mengalami penurunan produksi sebesar 31,25% dibandingkan dengan tahun 2021 atau sebesar -52.820,12 kuintal. Penurunan jumlah produksi bawang merah ini salah satunya akibat adanya penurunan luas panen. Luas panen pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 244 ha dibandingkan tahun 2021. Penurunan luas panen bawang merah sebagai akibat dari adanya pergeseran komoditas dari bawang merah menjadi tanaman pangan sebagai akibat dari hujan sepanjang tahun serta curah hujan cukup tinggi. Selain itu minat petani menanam bawang merah tahun ini terhambat karena harga bibit bawang merah sempat mencapai harga diatas Rp100.000,00/kg. Sedangkan penurunan produktivitas bawang merah sebesar -13,08 % disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga pertumbuhan tanaman tidak dapat optimal.

Produksi cabai merah tahun 2022 mengalami penurunan -8327,5 kuintal dibandingkan tahun 2021 atau penurunan sebesar -33,12%. Hal tersebut disebabkan karena curah hujan tinggi sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman kurang optimal, bahkan sebagian tanaman menjadi layu dan tidak berproduksi. Luas panen cabai merah juga mengalami penurunan sebesar -219,5 ha dibandingkan tahun 2021. Penurunan luas panen ini disebabkan adanya pergeseran komoditas cabai merah ke komoditas tanaman pangan terutama padi. Meskipun produksi dan luas

panen menurun namun produktivitas tanaman meningkat, tahun 2021 sebesar 50,03 ku/ha dan pada tahun 2022 menjadi 59,41 ku/ha. Hal ini disebabkan perawatan tanaman yang lebih baik karena potensi keuntungan yang lebih besar dan nilai ekonominya lebih tinggi.

Pada tahun 2022, produksi pisang mengalami penurunan -22131,4 kuintal dibandingkan tahun 2021, atau mengalami penurunan sebesar -15,69%. Penurunan pisang ini dipengaruhi rumpun tanaman yang semakin tua (belum dilakukan peremajaan dan pindah tanam) serta kurang optimalnya budidaya (kurang pupuk). Dinas mengembangkan pisang berlin yang mana jenis pisang ini memiliki karakter buah kecil dan berat pertundunnya tidak seberat pisang kepok kuning yang selama ini banyak dibudidayakan di Kabupaten Bantul. Akibatnya meskipun jumlah tanaman yang menghasilkan mengalami peningkatan namun produktivitas tanaman mengalami penurunan dari 0,45 ku/rumpun menjadi 0,36 ku/rumpun atau mengalami penurunan sebesar -19,34%.

c. Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul antara lain: tembakau, mete, tebu, kelapa dan kakao.

Tabel 2.259 Produktivitas Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Komoditas/ Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tembakau Rakyat						
	Luas Panen	Ha	305,00	175,00	206,00	227,00	87,00
	Produksi (Rajang kering)	Ku	2.893,00	1.321,30	1.580,13	1.825,08	650,79
	Produktivitas (Rajang kering)	ku/ha	9,49	7,55	7,67	8,04	5,56
2	Tebu						
	Luas Panen	Ha	1.022,89	1.042,67	1.096,00	996,06	611,74
	Produksi (hablur)	Ku	38.430,00	39.971,17	43.881,70	32.315,60	19.156,15
	Produktivitas (hablur)	ku/ha	37,57	38,34	40,04	32,44	31,31
3	Kelapa						
	Luas Panen	Ha	7.050,03	7.107,81	7.317,95	8.163,34	8.386,89
	Produksi (kopra)	ku	103.931,80	104.794,70	104.967,70	117.143,93	116.210,00
	Produktivitas	ku/ha	14,74	14,74	14,34	14,35	13,95

No	Komoditas/ Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
	(kopra)						
4	Kakao						
	Luas Panen	Ha	7,20	18,10	18,30	18,55	23,30
	Produksi	Ku	28,34	65,18	162,00	223,70	190,98
	Produktivitas	Ku/Ha	3,94	3,60	8,85	12,06	8,07

Sumber: Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023

Luas tanam tembakau di Kabupaten Bantul tahun 2022 mengalami penurunan dari 227 hektar pada tahun 2021 menjadi 87 hektar pada tahun 2022. Penurunan luas tanam tembakau ini disebabkan alih komoditas dari tembakau menjadi tanaman pangan dalam hal ini padi. Adanya penurunan luas tanam ini berpengaruh pada produksinya yang juga menurun. Produksi tembakau (daun kering) mengalami penurunan sebesar sebesar 69,65% dibandingkan dengan tahun 2021 atau terjadi penurunan sebesar 1.493,63 kuintal. Produksi tembakau tahun 2022 yaitu sebesar 650,79 kuintal sedangkan pada tahun 2021 sebesar 2.144,42 kuintal. Produktivitas tembakau juga mengalami penurunan yaitu dari 9.45 ku/ha pada tahun 2021 menjadi 5,56 ku/ha pada tahun 2022. Penurunan produktivitas tembakau ini disebabkan karena hujan sepanjang tahun yang mengganggu pertumbuhan tanaman sehingga produksinya kurang optimal.

Pada tahun 2022 komoditas kelapa mengalami penurunan produksi sebesar 11,60% (4.633,46 kuintal) dibandingkan tahun 2021. Penurunan produksi ini disebabkan oleh terhambatnya petani dalam memanen kelapa, curah hujan sepanjang tahun menyebabkan pohon licin sulit untuk dipanjat dan meningkatkan kerawanan kecelakaan kerja saat pemanenan.

Produksi tebu tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 40,72% atau 13.160,32 kuintal dibanding tahun 2021. Penurunan produksi tebu (gula hablur) disebabkan oleh adanya penurunan luas panen tebu sebesar 384,32 ha dibandingkan tahun 2021 yaitu dari 996,06 ha menjadi 611,74 ha. Penurunan produksi tebu ini juga disebabkan oleh penurunan produktivitasnya yaitu dari 32,44 ku/ha pada tahun 2021 menjadi 31,31 ku/ha pada tahun 2022. Faktor lain yang menyebabkan penurunan produksi tebu yaitu terjadi penurunan rendemen dan produktivitas yang disebabkan oleh hujan sepanjang tahun.

d. Produksi Benih Pertanian

Daftar Kelompok Penangkar Benih Padi di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.260 Daftar Kelompok Penangkar Benih Padi

No	Kelompok Penangkar	Alamat	Luas Tanam		
			2020	2021	2022
1	Kel. Agribisnis Penangkaran Sumber Makmur	KBD, Sumberagung	2,5	2,5	4,3
2	Kel. Agribisnis Penangkaran Sumber Rejeki	Sumber, Sumberagung	3,5	3,5	-
3	Kel. Agribisnis Penangkaran Ngudyo Makmur	Ponggok, Trimulyo	1,5	1,5	-
4	Kel. Agribisnis Penangkaran Ngudi Makmur	Gulon, Srihardono	2	-	-
5	Kel. Agribisnis Penangkaran Rukun Makmur	Ngentak, Sumberagung	4,5	-	-
6	Kel. Agribisnis Penangkaran Ngudi Lestari	Pangkah, Tirtosari	0,5	0,5	-
7	Kel. Agribisnis Penangkaran Rukun Makmur	Ngentak Blok I, Sumberagung	-	-	5,9
8	Kel. Agribisnis Penangkaran Rukun Makmur	Ngentak Blok II, Sumberagung	-	-	0,9
9	Kel. Agribisnis Penangkaran Rukun Makmur	Ngentak Blok III, Sumberagung	-	-	0,75
10	Kel. Agribisnis Penangkaran Rukun Makmur	Mindi, Sumberagung	-	-	5,1
11	Lahan BBP	Mindi, Sumberagung	-	-	1,5
	JUMLAH		14,5	11,5	18,45

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2022

Varietas yang diproduksi pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.261 Produksi Benih Padi (ton) Tahun 2020-2022

No.	Varietas	2020			2021			2022		
		BD	BP	Total	BD	BP	Total	BD	BP	Total
1	Situ Bagendit	1.725	16.815	18.540	-	2.270	2.270	-	7.060	7.060
2	Sunggal	-	22.680	22.680	395	12.030	12.425	-	-	-
3	Mekongga	1.280	20.380	21.660	-	7.000	7.000	-	2.760	2.760
4	Ciherang	-	19.160	19.160	-	7.880	7.880	840	17.130	17.970
5	Pepe	895	8.820	9.715	-	12.550	12.550	-	-	-
6	Inpari 19	595	-	595	400	5.040	5.440	-	-	-
7	Inpari 24	1.815	-	1.815	-	6.720	6.720	-	-	-

No.	Varietas	2020			2021			2022		
		BD	BP	Total	BD	BP	Total	BD	BP	Total
8	Inpari 33	-	4.740	4.740	315	12.000	12.315	-	3.200	3.200
9	Inpari Nutrizinc							640	2.440	3.080
10	Padjajaran							480	6.095	6.575
11	Cakra Buana							360	10.585	10.945
12	IR 64							1.210	-	1.210
13	Inpari 30							440	2.000	2.440
14	Inpari 32							-	2.640	2.640
15	Inpari 42							935	10.640	11.575
Jumlah		6.310	92.595	98.905	1.110	65.490	66.600	4.905	64.550	69.455

Keterangan : BD= Benih Dasar BP = Benih Pokok

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023

e. Prasarana Pertanian

Pengelolaan irigasi dilaksanakan guna mewujudkan kemanfaatan air irigasi yang efisien dan efektif untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi bagi petani.

Tabel 2.262 Panjang Irigasi Tersier (dalam meter) Tahun 2022

No.	Irigasi Tersier	Panjang Saluran Tersier (m)	Panjang Sudah Pasangan (m)	Panjang Belum Pasangan (m)
1	Kewenangan Kabupaten	25.411,22	22.429,96	2.981,25
2	Kewenangan Provinsi	145.657,24	103.600,28	42.056,96

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023

f. Produksi Komoditas Peternakan

Salah satu cakupan pertanian dalam arti luas adalah peternakan. Peternakan di Kabupaten Bantul memiliki potensi yang cukup besar meliputi ternak besar, ternak kecil, dan unggas.

Tabel 2.263 Populasi Ternak Besar (Ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Jenis ternak	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sapi Potong	58.895	62.582	66.098	73.058	68.401
2	Sapi Perah	72	68	68	68	29
3	Kerbau	206	218	217	217	169
4	Kuda	1564	1.631	1.583	1.428	1.291

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2023

Populasi sapi potong tahun 2022 mengalami penurunan 6,37% atau berkurang sebanyak 4.657 ekor dibanding tahun 2021. Penurunan populasi

juga terjadi pada sapi perah, kerbau dan kuda. Penurunan tersebut disebabkan adanya penyakit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku).

Tabel 2.264 Populasi Ternak Kecil (ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Jenis Ternak	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kambing	94.332	95.467	95.104	90.887	77.521
2	Domba	77.197	74.441	74.577	68.727	60.629
3	Babi	5.024	5.136	4.512	3.916	3.554

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023

Populasi ternak Kecil di Kabupaten Bantul didominasi oleh ternak kambing. Pada tahun 2022 terjadi penurunan populasi ternak kecil, populasi kambing turun 14,70%, populasi domba turun 11,78% dan populasi babi turun 9,24%. Penurunan tersebut disebabkan adanya penyakit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku).

Tabel 2.265 Populasi Ternak Unggas (ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Unggas	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ayam buras	829.916	966.371	975.546	977.981	981.386
2	Ayam ras petelur	759.199	765.137	765.126	766.304	764.003
3	Ayam ras pedaging	1.093.222	1.128.489	1.127.715	1.121.844	1.121.779
4	Itik	184.978	201.805	202.180	201.283	200.493

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023

Populasi ternak unggas didominasi oleh ayam ras pedaging. Secara umum pada tahun 2022 terjadi kenaikan populasi unggas. Peningkatan ini didukung oleh menurunnya kejadian penyakit menular seperti Avian Influenza. Avian Influenza atau Flu burung adalah penyakit akibat virus influenza yang menjangkiti unggas. Penyakit ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang terjadi akibat kematian unggas dalam jumlah besar.

Komoditas hasil peternakan utama yang berasal dari ternak besar, ternak kecil dan unggas tersebut di atas, meliputi daging telur dan susu. Komoditas ini mempunyai nilai gizi tinggi sehingga kebutuhan akan komoditas ini selalu meningkat. Meningkatnya kebutuhan tentu seyogyanya diiringi dengan peningkatan ketersediaannya.

Tabel 2.266 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Komoditas	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Daging	kg	14.855.725	15.088.317	15.228.523	15.510.221	15.634.165
2	Telur	Kg	7.329.945	7.789.187	7.782.977	7.914.817	7.904.014
3	Susu	Kg	102.484	80.541	82.625	83.360	39.964

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023

Kenaikan produksi daging pada tahun 2022 dipengaruhi oleh kenaikan kebutuhan daging di wilayah Kabupaten Bantul serta kenaikan pemotongan hewan kurban saat Idul Adha. Produksi telur dan susu mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021.

Produksi hasil peternakan secara umum mengalami peningkatan dari Tahun 2017 – 2022 terutama pada produksi daging dan telur. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan populasi ternak yang dilaksanakan guna mendukung swasembada daging yang dicanangkan Pemerintah Pusat dengan program UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi indukan wajib bunting) yang dilaksanakan sejak Tahun 2017 dan dilanjutkan dengan program SIKOMANDAN. Walaupun begitu, produksi susu mengalami penurunan dari tahun 2018-2022 yang disebabkan oleh menurunnya jumlah sapi perah betina yang produktif.

g. Penanganan Penyakit Ternak

Pelayanan kesehatan ternak dilaksanakan melalui UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

Tabel 2.267 Pelayanan Kesehatan Ternak UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kabupaten Bantul, Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pelayanan Kesehatan Ternak (ekor)	7.248	7.703	11.300	20.223	55.554

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023

Pelayanan kesehatan ternak pada tahun 2022 sebanyak 55.554, terdapat kasus Penyakit Mulut dan Kuku yang menjangkit banyak ternak di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.268 Jenis Penyakit Hewan Ternak Kabupaten Bantul, Tahun 2018-2022

No	Nama Penyakit	2018	2019	2020	2021	2022
1	Helminthosis	4.344	4.182	2.809	2.930	2.552
2	Avitaminosis	1.301	1.504	724	936	1.680
3	Scabies	564	723	1.451	1493	1.458
4	PMK	-	-	-	-	3.595
5	Enteritis	-	-	-	-	558
	Total	6.209	6.409	4.984	7.380	9.843

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2022

Jenis penyakit hewan ternak pada tahun 2022 sebanyak 9.843 kasus meningkat dari tahun 2021, dari jenis penyakit hewan tersebut dapat diketahui adanya kasus penyakit terbanyak yang secara berurutan disebabkan oleh cacing (Helminthosis), Avitaminosis, dan Scabies. Selain itu kasus PMK merupakan kasus terbesar yang ditangani selama tahun 2022.

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku dengan 103.548 dosis yang dilakukan selama bulan Juni sampai dengan Desember di 17 Kapanewon oleh 10 Puskesmas dan 1 Rumah Potong Hewan.

UPTD Rumah Pemotongan Hewan (RPH) merupakan Unit pelayanan masyarakat dalam menyediakan daging yang aman, sehat, utuh dan halal. Jumlah pelayanan pemotongan hewan ternak di UPTD RPH meningkat dibanding tahun 2021.

Tabel 2.269 Pelayanan Pemotongan UPT RPH Kabupaten Bantul, Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pelayanan Pemotongan (ekor)	2.620	2.249	1.553	1.008	1.028

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2023

2.1.3.3.4 Kehutanan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintah daerah kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi. Kewenangan kab/kota dalam urusan kehutanan berupa pelaksanaan pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) kab/kota. Kabupaten Bantul tidak memiliki TAHURA sehingga urusan kehutanan tidak dilaksanakan di kabupaten Bantul.

2.1.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Kewenangan urusan ESDM oleh Kabupaten ini hanya terbatas pada sub urusan energi baru terbarukan yaitu penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten. Dalam upaya menggali potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bantul telah dilakukan kajian geothermal di Parang Wedang Kapanewon Kretek menunjukkan bahwa energi panas bumi di Parang Wedang adalah 40°C, dan belum dapat dijadikan alternatif energi dikarenakan standar panas minimal energi panas bumi seharusnya 90°C.

2.1.3.3.6 Perdagangan

a. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2018-2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.270 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022
(dalam miliar rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.565,67	1.645,73	1.576,54	1.595,94	1.672,16
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	8.69%	8.64%	8.46%	8,18%	8,12%

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

b. Pasar Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.

Pasar Rakyat terdiri atas toko, kios, los, dan/atau tenda. Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, terdiri dari: Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Pasar Rakyat tipe C, Pasar Rakyat tipe D.

- Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria: a.operasional pasar harian; b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan/atau c. luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

- Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria: a.operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu; b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan/atau c. luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria : a. operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; c. dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria : a. operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu; b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan/atau c. luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.271 Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021

No	Nama Pasar	Tipe Pasar	Operasional Pasar	2020			2021			2022		
				Jumlah Pedagang			Jumlah Pedagang			Kios	Los dan Arah an	Kebu tuhan Poko k
				Kios	Los dan Ara han	Kebu tuhan Pok ok	Kios	Los dan Ara han	Kebu tuhan Pok ok			
1	Pasar Imogiri	A	Harian	99	759	142	100	815	143	100	100	578
2	Pasar Bantul	A	Harian	185	525	114	189	505	114	220	1126	588
3	Pasar Piyungan	A	Harian	84	641	78	84	693	85	702	57	276
4	Pasar Niten	A	Harian	119	450	94	122	549	100	114	692	437
5	Pasar Klitikan Niten	B	Harian	-	172	-	-	173	-	0	142	0
6	Pasar Ngipik	B	Harian	20	144	18	20	169	25	20	109	69
7	Pasar Pundong	B	Harian	-	82	51	-	261	82	46	444	173
8	Pasar Celep	B	Harian	17	139	4	17	134	5	17	142	77
9	Pasar Gatak	B	Harian	-	192	10	-	96	10	24	157	89
10	Pasar Jodog	B	Harian	23	118	15	23	120	17	30	296	120
11	Pasar Barongan	B	Harian	43	135	63	45	132	63	57	213	181
12	Pasar Pijenan	B	Harian	30	140	15	30	115	15	54	175	119
13	Pasar Dlingo	B	2x dalam 5 hari	18	170	20	34	173	20	33	159	107
14	Pasar Panasan	B	4x dalam 5 hari	24	171	28	24	187	28	24	229	109
15	Pasar Pleret	B	2x dalam 5 hari	71	497	70	71	511	70	70	464	220

No	Nama Pasar	Tipe Pasar	Operasional Pasar	2020			2021			2022		
				Jumlah Pedagang			Jumlah Pedagang					
				Kios	Los dan Arah an	Kebu tuhan Pok ok	Kios	Los dan Arah an	Kebu tuhan Pok ok	Kios	Los dan Arah an	Kebu tuhan Pok ok
16	Pasar Jejeran	B	3x dalam 5 hari	71	497	45	71	497	45	24	419	195
17	Pasar Angkruksari	B	4x dalam 5 hari	46	498	56	46	502	56	46	471	338
18	Pasar Turi	B	1x dalam 5 hari	-	432	27	-	444	27	3	435	152
19	Pasar Sorobayan	B	2x dalam 5 hari	9	138	17	9	151	17	8	397	192
20	Pasar Mangiran	B	2x dalam 5 hari	-	252	19	-	256	19	49	228	123
21	Pasar Gumulan	B	1x dalam 5 hari	-	269	3	-	269	10	0	292	100
22	Pasar Sungapan	B	2x dalam 5 hari	6	88	3	6	88	19	6	129	49
23	Pasar Semampir	B	2x dalam 5 hari	12	233	19	12	254	20	11	292	115
24	Pasar Hewan Pandak	B	2x dalam 5 hari	-	13	-	-	13	-	5	5	0
25	Pasar Hewan Imogiri	B	1x dalam 5 hari	-	-	-	-	-	-	0	0	0
26	Pasar Janten	C	Harian	-	52	-	-	52	-	0	61	0
27	Pasar Grogol	C	Harian	-	29	4	-	32	4	0	32	13
28	Pasar Jragan	C	3x dalam 5 hari	-	43	1	-	44	1	0	36	18
29	Pasar Koripan	C	2x dalam 5 hari	-	53	-	-	54	-	0	41	14
30	Pasar Bendosari	D	2x dalam 5 hari	-	23	-	-	23	-	0	7	11
31	Pasar Sangkeh	D	2x dalam 5 hari	-	4	1	-	6	1	0	4	4
32	Pasar Unggas Bantul	-	1x dalam 5 hari	12	56	-	12	56	-	0	56	0
33	Pasar Seni Gabusan	-	Harian	58	-	-	-	12	-	6	134	0
Jumlah				947	7.015	917	915	7.503		1064	9231	4475

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

Pada Tahun 2021 di Kabupaten Bantul terdapat 33 pasar dengan jumlah pedagang yang memiliki kios, los dan arahan sebanyak 8.418 pedagang. Pedagang yang menyediakan kebutuhan pokok sebesar 10,89 % dari jumlah pedagang yang ada.

Data jumlah pedagang pasar 8.418 pedagang, dari jumlah tersebut terdapat beberapa pedagang yang memiliki kepemilikan ganda baik itu kios maupun los, dalam satu lokasi pasar maupun dalam lokasi pasar yang

berbeda. Dinas Perdagangan telah melakukan validasi data pedagang berdasarkan NIK sebanyak 7.594 pedagang, sedangkan sisanya masih dalam proses input.

Terdapat beberapa pasar yang pedagangnya sama dan berpindah sesuai dengan hari pasaran/hari operasional pasar seperti Pasar Angkruksari - Pasar Turi, Pasar Pleret - Pasar Jejeran, dan Pasar Sorobayan - Pasar Gumulan - Pasar Mangiran.

a. Stabilitas Bahan Pokok Antar Waktu

Harga rata-rata sembilan bahan pokok berdasarkan Perpres No. 71 Tahun 2015, dengan mengambil sampling di Pasar Bantul, Pasar Imogiri, Pasar Niten, Pasar Piyungan dan Pasar Pijenan. Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilisasi bahan pokok antar waktu) untuk tahun 2022 adalah 11 % sama dengan tahun 2021 yaitu 11 %.

Tabel 2.272 Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2022

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Bulan												Rata-Rata
			Jan. (Rp)	Febr. (Rp)	Mar. (Rp)	Apr. (Rp)	Mei (Rp)	Juni (Rp)	Juli (Rp)	Agust. (Rp)	Sept. (Rp)	Okt. (Rp)	Nov. (Rp)	Des. (Rp)	
1	Beras														
	- Premium	Kg	9.867	9.850	9.700	9.775	9.700	9.643	9.600	9.475	10.053	10.300	10.670	11.783	10.035
	- Medium	Kg	9.154	9.150	8.989	8.967	8.939	8.943	8.850	8.783	9.187	9.450	10.333	11.025	9.314
2	Gula Pasir	Kg	13.313	13.487	13.653	13.915	13.920	13.439	13.084	12.910	12.935	12.803	13.310	13.277	13.337
3	Minyak Goreng														
	- Kemasan	Lt	19.808	16.158	20.987	24.600	24.444	23.343	19.992	18.179	17.787	17.583	17.700	17.754	19.861
	- Tanpa Merk/Sawit/Curah	Lt	19.146	17.548	18.429	19.456	16.910	15.355	13.671	12.967	12.610	12.875	13.500	14.000	15.539
4	Tepung Terigu														
	- Kemasan	Kg	9.733	9.800	9.890	10.775	11.017	11.450	11.629	12.113	12.300	12.300	12.300	12.350	11.305
	- Curah	Kg	8.467	8.554	8.597	8.813	9.011	9.710	10.025	10.150	10.297	10.458	10.400	10.400	9.573
5	Daging														
	Daging Sapi Murni														
	- Has	Kg	126.750	126.000	126.300	130.150	136.789	134.453	133.463	133.513	133.600	133.400	133.000	133.000	131.701
	- Rendang	Kg	114.896	114.167	114.139	119.792	123.889	120.978	119.792	120.347	120.944	120.903	119.444	121.528	119.235
	Daging Ayam Broiler	Kg	36.708	31.975	33.620	37.683	33.722	35.956	36.933	33.662	32.153	30.883	31.067	32.658	33.918
	Daging Ayam Kampung	Kg	65.260	64.688	65.292	69.740	73.958	73.750	73.750	73.750	72.667	71.250	68.750	70.625	70.290
6	Telur														
	- Telur Ayam Negeri	Kg	21.458	19.683	23.457	24.138	26.309	27.188	27.232	27.894	26.103	25.115	29.867	28.650	25.591
	- Telur Ayam Kampung	Butir	2.300	2.300	2.297	2.408	2.500	2.546	2.513	2.531	2.482	2.468	2.540	2.509	2.450
7	Cabe Merah														
	- Keriting	Kg	23.683	30.000	37.647	26.642	31.993	65.503	74.200	52.658	53.533	32.958	25.333	31.158	40.442
	- Besar	Kg	29.083	29.167	36.058	29.063	39.417	51.767	62.417	52.250	49.919	31.722	26.944	30.417	39.019
8	Cabai Rawit														
	- Merah	Kg	34.742	32.233	44.287	24.250	37.016	78.945	65.525	39.035	49.327	38.142	35.500	40.342	43.279
	- Hijau	Kg	39.504	31.825	32.247	36.208	37.111	57.527	56.517	43.545	32.220	21.867	38.267	51.217	39.838
9	Bawang Merah	Kg	24.867	32.467	32.047	31.612	38.289	51.084	55.583	31.800	27.647	29.408	29.733	34.067	34.884

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Bulan												Rata-Rata
			Jan. (Rp)	Febr. (Rp)	Mar. (Rp)	Apr. (Rp)	Mei (Rp)	Juni (Rp)	Juli (Rp)	Agust. (Rp)	Sept. (Rp)	Okt. (Rp)	Nov. (Rp)	Des. (Rp)	
10	Bawang Putih														
	- Cincau	Kg	24.953	24.979	26.658	29.396	24.933	21.150	20.333	20.510	20.900	20.385	18.917	21.042	22.846
	- Kating	Kg	27.908	27.883	30.873	36.933	32.411	30.253	26.592	25.558	25.200	24.908	22.600	24.375	27.958
11	Susu														
	Susu kental Manis														
	- Bendera	370 gr	10.558	10.438	10.390	10.575	10.600	10.860	10.800	11.000	11.320	11.313	11.300	11.375	10.877
	- Indomilk	370 gr	9.667	9.625	9.633	9.938	10.000	10.250	10.313	10.583	10.867	10.844	11.000	11.094	10.318
	Susu bubuk														
	- Bendera	400 gr	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000
	- Indomilk	400 gr	44.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.500
12	Garam Yodium														
	- Bata (besar)	pak	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.175	8.200	8.250	10.367	10.450	8.512
	- Halus	1/4K g	2.020	2.020	2.000	1.945	1.920	1.960	1.970	1.945	2.007	2.053	2.353	2.395	2.049
	- Krosok	Kg	2.050	2.021	2.040	2.100	2.100	2.100	2.188	2.350	2.340	2.425	3.600	3.800	2.426
13	Kacang Kedelai														
	- Eks Impor	Kg	10.717	10.895	12.033	12.500	12.261	12.621	12.875	12.819	12.860	13.338	14.173	15.441	12.711
	- Lokal	Kg	10.750	11.292	13.800	13.698	13.333	14.017	14.375	13.896	13.917	14.615	14.000	13.813	13.459
14	Kacang Tanah	Kg	28.558	28.742	29.213	29.225	29.533	27.293	26.742	28.042	28.007	27.908	27.667	27.317	28.187
15	Kacang Hijau	Kg	23.417	23.808	24.053	23.450	22.056	20.933	20.200	20.021	20.580	20.683	22.200	23.125	22.044
16	Mie Instan														
	- Goreng	Biji	2.559	2.620	2.620	2.652	2.740	2.815	2.883	2.929	2.970	2.980	2.940	2.940	2.804
	- Rebus	Biji	2.424	2.455	2.455	2.539	2.567	2.592	2.640	2.689	2.734	2.740	2.700	2.700	2.603
17	Ikan Asin Teri	Kg	59.575	59.342	57.880	55.917	54.956	53.720	49.150	50.983	51.033	50.325	51.133	51.683	53.808

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Bulan												Rata-Rata
			Jan. (Rp)	Febr. (Rp)	Mar. (Rp)	Apr. (Rp)	Mei (Rp)	Juni (Rp)	Juli (Rp)	Agust. (Rp)	Sept. (Rp)	Okt. (Rp)	Nov. (Rp)	Des. (Rp)	
18	Ikan Kembung	Kg	37.167	36.800	36.810	36.750	38.083	38.167	38.302	38.500	38.400	38.219	38.500	38.500	37.850
19	Ketela Pohon	Kg	4.600	4.683	4.760	4.700	5.033	4.980	5.067	4.825	4.800	4.800	5.000	5.000	4.854
20	Jagung Pipilan Kering	Kg	6.475	6.371	6.337	6.508	6.694	6.657	6.713	6.467	6.370	6.508	6.300	6.096	6.458
21	Tomat	Kg	12.567	11.958	7.480	6.088	7.761	13.059	12.488	6.812	4.420	5.042	17.667	15.167	10.042
22	Kol/Kobis	Kg	4.629	4.033	4.490	5.971	8.739	11.631	11.271	7.269	4.937	4.458	6.867	11.783	7.173

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

b. Nilai Ekspor

Perkembangan nilai ekspor di Kabupaten Bantul tahun 2017-2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.273 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Volume Ekspor (kg)	10.168.084,05	15.828.755,06	16.645.724,59	15.848.096,58	18.046.233,75	37.556.741,60
2	Nilai Ekspor (US\$)	79.200.365,59	206.555.464,00	151.040.882,38	122.334.070,34	158.889.210,28	116.687.461,02
3	Jumlah Negara Tujuan	59	85	79	77	62	77
4	Macam Komoditi	36	43	39	49	30	37

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2022

Nilai ekspor Kabupaten Bantul tahun 2021 mencapai US\$158.889.210,28 naik US\$36.555.139,94 dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit, wigs, dan gula kelapa, sedangkan negara tujuan ekspor utama adalah Jerman, Amerika Selatan, Australia, Inggris, dan Belanda.

c. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan

Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan mencapai 157 pelaku usaha dari 234 yang mendaftarkan usahanya. Jadi hanya 67,09 % pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

Alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertandatera sah yang berlaku untuk tahun 2021 berjumlah 8.625. Persentase Alat UTTP pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun 2020 yang mencapai Persentase 42,79 %, untuk tahun 2021 capaiannya 36,96 %. Namun capaian tersebut jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Jumlah Alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku untuk tahun 2022 berjumlah 9.035.

Capaian Persentase Alat UTTP bertanda tera yang sah berlaku sebesar 38,8 persen.

2.1.3.3.7 Perindustrian

a. Pertumbuhan Industri

Kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Bantul diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM). Lokasi dan jenis industri tersebar di Kabupaten Bantul dengan sektor industri yang ada meliputi pangan, sandang dan kulit, kerajinan, kimia dan bahan bangunan, logam dan jasa. Perkembangan sektor industri di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.274 Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022

No	Sektor Industri	2018		2019		2020		2021		2022	
		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Pangan	9.594	30.785	9.712	31.267	9.838	31.387	9.821	31.431	9.961	31.714
2	Sandang dan Kulit	973	8.175	1.092	8.228	1.197	8.298	1.384	8.663	1.499	8.909
3	Kerajinan Umum	8.346	30.074	8.574	30.875	8.707	30.927	9.039	31.386	9.165	31.667
4	Kimia dan Bahan Bangunan	3.466	30.057	3.488	30.124	3.522	30.182	3.572	30.353	3.623	30.486
5	Logam dan Jasa	1.156	3.373	1.493	3.403	1.548	3.461	1.626	3.571	1.686	3.685
	Jumlah	23.535	102.464	24.359	103.897	24.812	104.255	25.442	105.404	25.934	106.461

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

Pada sektor industri pangan, sandang dan kulit, kerajinan umum, kimia dan bahan bangunan serta logam dan jasa pada tahun 2021 terdapat 25.442 unit usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 105.404 dan pada tahun 2022 terdapat 25.934 unit usaha dan mempekerjakan 106.461 tenaga kerja. Dengan demikian terdapat kenaikan unit usaha sebesar 1,93% dan 1,00% peningkatan jumlah tenaga kerja.

Tabel 2.275 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022

Pertumbuhan Industri	5,49%	3,50%	1,86%	2,54%	1,93%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

Pertumbuhan industri pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan menurunnya ekspor produk industri karena terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina.

b. Sentra Industri

Sesuai Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 526 Tahun 2021 Tentang Sentra Industri Kabupaten Bantul Tanggal 24 Desember 2021 telah menetapkan adanya 75 Sentra Industri Di Kabupaten Bantul, yang mana terbagi dalam 5 (lima) cabang bidang industri.

Tabel 2.276 Sentra Industri Kabupaten Bantul Berdasar Cabang Bidang Industri Tahun 2022

Cabang Bidang Industri	Sentra
Pangan	26
Sandang dan Kulit	7
Kimia dan Bahan Bangunan	18
Logam & Elektronika	3
Kerajinan	21
Jumlah	75

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

Sentra IKM mampu mengisi wilayah pasar yang luas serta terbukti mempunyai ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Sentra-sentra IKM tersebut membuka kesempatan kerja sehingga berkontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Bantul.

c. Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 dan Perda DIY No. 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi DIY terdapat Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bantul yaitu:

- Kawasan Peruntukan Industri Piyungan (Lokasi Kalurahan Sitimulyo dan Kalurahan Srimulyo dengan luas 330,5 Hektar),
- Kawasan Peruntukan Industri Sedayu (Lokasi Kalurahan Argodadi dengan luas 188,33 Hektar), dan
- Kawasan Peruntukan Industri Pajangan (Lokasi Kalurahan Triwidadi dengan luas 72,46 Hektar).

Di dalam Kawasan Peruntukan Industri Piyungan telah terdapat perusahaan kawasan industri yaitu PT. Yogyakarta Isti Parama dengan diterbitkannya Izin Usaha Kawasan Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul No. 2/3402/IU/PMDN/2018 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Kawasan Industri dengan luasan 85 hektar.

d. Pertumbuhan Industri Kreatif

Industri Kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Sedangkan Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama.

Klasifikasi industri kreatif sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) sektor yang termasuk industri kreatif meliputi 17 sub sector, yaitu : (1) arsitektur, (2) desain Interior, (3) desain komunikasi visual, (4) desain produk, (5) film animasi video, (6) fotografi, (7) kriya, (8) kuliner, (9) musik, (10) fashion, (11) aplikasi, (12) pengembangan permainan, (13) penerbitan, (14) periklanan, (15) televisi radio, (16) seni pertunjukan, (17) seni rupa.

Kabupaten Bantul telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif oleh tim PMK3I Badan Ekonomi Kreatif (Bekraft) pada tiga sub sektor unggulan yaitu Kriya, Fashion, Kuliner. Tiga sub sektor unggulan digunakan sebagai subsektor potensial serta sebagai daya ungkit dalam membangun ekosistem industri kreatif.

Tabel 2.277 Data Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Unit Usaha Industri	23.535	24.359	24.812	25.442	25.934
Jumlah Unit Usaha Industri Kreatif	10.097	11.253	11.253	12.726	12.761
Cakupan Industri Kreatif	42,90 %	46,2 %	46,2 %	50,02%	49,21%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

Capaian Cakupan Industri Kreatif Kabupaten Bantul dari tahun 2018 s.d 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya di tahun 2020 cakupan industri kreatif tetap pada angka 46,2 % dikarenakan tidak ada penambahan produk baru, namun terjadi kreatifitas atau diversifikasi produk dikarenakan pandemi Covid 19.

Pada tahun 2021 cakupan industri kreatif mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang hanya 46,20 % menjadi 50,02% karena IKM memiliki strategi untuk mengembalikan perekonomiannya dengan cara meningkatkan daya saing serta memiliki keunikan pada produknya serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemasaran, disamping itu sifat struggle IKM dalam menghadapi pandemi sangat mendorong masih eksisnya keberadaan mereka dan terbentuknya Komite Ekonomi Kreatif sebagai pendorong pembangunan ekonomi dalam pengembangan kegiatan industri sebagai sektor yang potensial yang mempunyai dampak pengganda (*multiplier effects*) bagi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan industri kreatif di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 kurang optimal karena sektor kriya yang merupakan produk ekspor unggulan mengalami penurunan permintaan dari buyer sehingga menyebabkan banyak produk yang menumpuk di gudang. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi dunia yang sedang tidak stabil dan adanya perang antara Rusia dan Ukraina serta nilai tukar mata uang rupiah yang lemah. Oleh karena itu pada tahun 2022 cakupan industri kreatif mengalami penurunan dari tahun 2021 dari 50,02% menjadi 49,21%.

Konsep pembangunan Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia adalah Fokus kepada pengembangan ide dan kreativitas; Eksistensi komunitas kreatif (*bottom-up*); dan Rantai nilai kreasi produksi distribusi konsumsi konservasi. Indikator kota/kabupaten kreatif yang harus dipenuhi oleh semua kota/kabupaten yang mengajukan ke UNESCO terdiri dari 18 indikator.

Dalam mendukung tercapainya Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten Kreatif Dunia versi UNESCO ada program strategis dan terstruktur dalam

menciptakan ekosistem Kabupaten Bantul sebagai kota kreatif dunia. Hal ini didukung dengan program super prioritas jangka pendek yaitu:

1. Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif,
2. Peningkatan Daya Saing Produk Kreatif Unggulan melalui pemasaran (event yang berskala internasional) contoh : Asean Tourism Forum, JIFFINA, Inacraft, Bantul Craft and Fashion, Kongres Internasional,
3. Peningkatan Daya Saing Produk Kreatif Unggulan melalui pembinaan dan pendampingan pelaku industri kreatif.

Selanjutnya, masih diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan ekosistem kreatif dan menjalin kerjasama antar daerah baik tingkat regional maupun internasional, sehingga terbentuk jejaring ekonomi kreatif yang saling bersinergi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan bupati nomor 93 tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Surat Keputusan Bupati Bantul nomor 183 tahun 2023 tentang *Blueprint* Ekosistem Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul Tahun 2022-2027.

e. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah

IUI atau Izin Usaha Industri, adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. Dimana IUI berdasarkan pada PP Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri. Yang kemudian Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional, yang mana terkait pada perizinan usaha industri.

Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka, Ijin Usaha Industri (IUI) sudah tidak ada. Semua perizinan berusaha menggunakan sistem OSS RBA dan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

Perizinan berusaha sektor industri untuk resiko usaha menengah tinggi persyaratan perizinan berusahanya berupa NIB dan Sertifikat Standar yang terverifikasi. Resiko usaha tinggi persyaratan perizinan berusahanya berupa NIB dan Ijin yang terverifikasi. Pelaku usaha dengan resiko usaha menengah tinggi dan tinggi harus mengajukan permohonan verifikasi teknis standar kegiatan usaha sektor industri melalui akun SIINas. Pada tahun 2022 hanya terdapat 1 (satu) pengajuan permohonan verifikasi teknis perizinan berusaha perusahaan industri di akun SIINas.

Tabel 2.278 Izin Usaha Berdasar Tingkat Risiko

Tingkat Risiko	Risiko Rendah (R)	Risiko Menengah Rendah (MR)	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Risiko Tinggi (T)
Perizinan Berusaha	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

Hingga Tahun 2022 sebanyak 181 pelaku usaha sektor industri telah terdaftar di Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dengan 109 usaha sektor industri memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri yang masih berlaku.

2.1.3.3.8 Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari Pemerintah Pusat. Perkembangan yang terjadi

sekarang justru semakin menurunnya kuota/jatah transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar.

Penempatan transmigran dari tahun 2018-2022 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.279 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi	28	20	0	5	15

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2023

Adanya pandemi Covid-19 berdampak terhadap penempatan transmigran. Beberapa kegiatan penyuluhan dan pembinaan tidak dapat dilaksanakan karena menghindari kerumunan, selain itu pemberangkatan transmigran juga ditunda pada tahun 2020.

Jumlah KK transmigran pada tahun 2021 sebanyak 5 KK dengan 16 jiwa. Adapun lokasi tujuan penempatan transmigran pada tahun 2021 adalah UPT Saluandeang Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 15 KK dengan 47 jiwa yang di tempatkan di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Tabel 2.280 Jumlah Pendaftar Transmigrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Jumlah Pendaftar Transmigrasi (KK)	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatra	15	15	1	3	0
Kalimantan Timur	6	3	17	5	8
Kalimantan Barat	3	0	0	1	0
Kalimantan utara	13	5	6	4	5
Kalimantan Tengah	0	1	0	1	0
Sulawesi Selatan	3	0	4	2	6
Gorontalo	3	0	0	0	0
Sulawesi Tengah	3	0	0	0	0
Sulawesi Barat	2	2	4	2	5
Sulawesi Tenggara	3	2	2	2	3
Jumlah	51	28	34	20	27

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022, jumlah pendaftar transmigrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah 27 KK dengan tujuan transmigrasi terbanyak di Kalimantan Timur.

2.1.3.4 Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum

2.1.3.4.1 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.3.4.1.1 Sekretariat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

a. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan yang berkualitas. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja pembangunan.

Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah dimulai tahun 2012 dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang diperbarui setiap tahun. Sebagai wujud komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, telah disusun road map reformasi birokrasi tahun 2018-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bantul tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.281 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2019

No	Area Perubahan	Bobot	2018	2019
	Komponen Pengungkit			
1.	Penataan Sistem manajemen SDM	6,79	12,95	6,79
2.	Penguatan pengawasan	6,04	7,16	6,04
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	2,71	2,71	2,71
4.	Penataan dan penguatan organisasi	3,84	3,89	3,84
5.	Manajemen perubahan	3,37	3,53	3,37
6.	Penguatan akuntabilitas	4,10	4,38	4,10
7.	Penataan tatalaksana	3,47	3,47	3,47
8.	Peningkatan kualitas pelayanan public	4,33	4,52	4,33
	Total Komponen Pengungkit (A)	34,64	42,11	34,64
	Komponen Hasil			
1.	Nilai akuntabilitas kinerja	9,84	11,39	9,84
2.	Survey internal integritas organisasi	3,88	4,47	3,88
3.	Survey eksternal persepsi korupsi	6,49	6,06	6,49
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5.	Survey eksternal pelayanan public	9,60	9,33	9,60
	Total Komponen Hasil (B)	32,79	34,25	32,79
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	67,43	76,36	67,43
	Kategori		BB	BB

Sumber: Bagian Organisasi, Setda, 2023

Pada tahun 2020 pelaksanaan evaluasi berpedoman pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistic.

Tabel 2.282 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

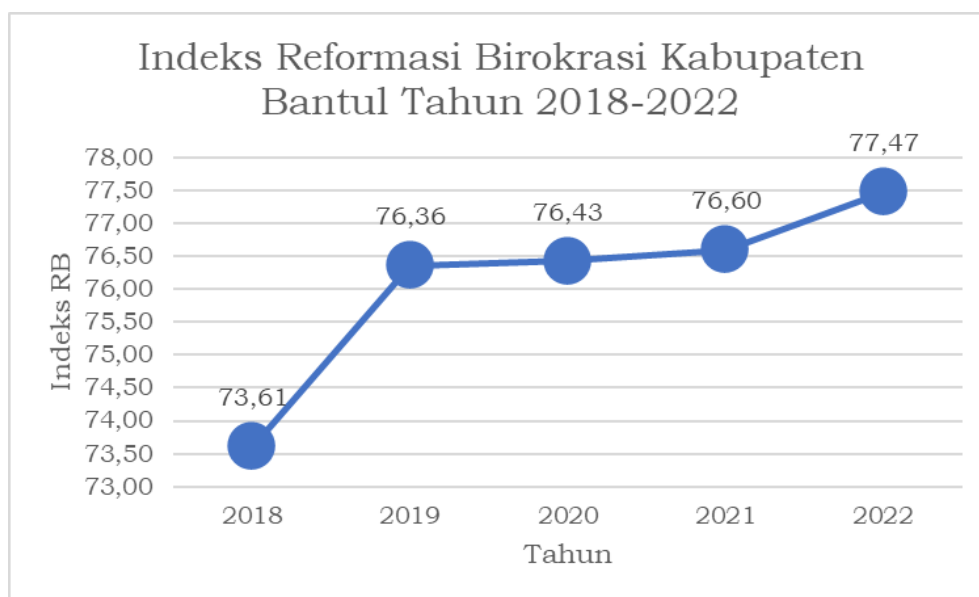
No	Area Perubahan	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
A	Komponen Pengungkit				
1.	Pemenuhan	20	14,73	14,83	15,19
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10	6,93	6,57	6,52
3.	Reform	30	20,74	20,72	22,58
	Total Komponen Pengungkit (A)	60	42,40	42,12	44,29
B	Komponen Hasil				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	10	8,73	8,66	8,81
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10	9,03	8,79	8,98
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10	8,28	8,12	8,60
4.	Kinerja Organisasi	10	6,99	8,91	6,79
	Total Komponen Hasil (B)	40	34,03	34,48	33,18
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	76,43	76,60	77,47
	Kategori		BB	BB	BB

Sumber: Bagian Organisasi, Setda, 2023

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan

meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 adalah 77,47 (BB) Kategori Baik, meningkat dari tahun 2021 yaitu 76,60 (BB). Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kategori BB memiliki interpretasi bahwa secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.



Sumber: Bagian Organisasi, Setda, 2023

Gambar 2.51 Indeks RB Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Peningkatan Indeks RB Kabupaten Bantul tahun 2022 didukung oleh peningkatan kualitas hasil antara, yaitu kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, dan pengelolaan arsip. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan oleh Kemenpan-RB pada tahun 2021 yaitu:

1. Telah melaksanakan pelantikan berdasarkan hasil penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan di lingkungan Kabupaten Bantul.
2. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada unit kerja strategis dengan mencanangkan pembangunan ZI di unit kerja Disdukcapil, DPMPT, RSUD, Disnakertrans, Kapanewon Pundong, Kapanewon Bantul dan Kapanewon Jetis.

b. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Bahwa dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 telah menghasilkan peraturan baik yang merupakan amanah dari peraturan di atasnya maupun peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang dipunyai.

Tabel 2.283 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2017-2021

Jenis	2018	2019	2020	2021	2022
Peraturan Daerah	23	16	14	11	13
Peraturan Kepala Daerah	161	132	160	191	149

Sumber, Bagian Hukum, Setda, 2022

Perda yang ditetapkan tahun 2022 sebanyak 13 Perda dengan rincian:

- a. 12 Perda ditetapkan berdasarkan propemperda tahun 2022, yang berjumlah 13 Raperda, 1 raperda dilanjutkan di tahun 2023 yaitu raperda toko swalayan dan sudah masuk di propemperda tahun 2023
- b. 1 Perda luncuran propemperda tahun 2021 yang ditetapkan pada bulan Juni tahun 2022 yaitu perda perubahan kedua atas Perda 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

c. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM) Kabupaten

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bantul diperoleh dari rata-rata nilai IKM PD pemberi layanan se-Kabupaten Bantul. Nilai IKM di Kabupaten mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan di PD Kabupaten Bantul mengalami peningkatan.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kabupaten Bantul terhadap kualitas layanan publik di semua unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, dilaksanakan survei kualitas layanan dengan pelaksana survei sebagai berikut:

- Badan dan Dinas sebanyak 28 unit kerja
- Kapanewon sebanyak 17 unit kerja

- UPT Puskesmas sebanyak 27 unit kerja

Jumlah responden yang ikut survei sebanyak 62.459 responden dengan periode survei 01 January 2022 – 31 Desember 2022. Metode survei yang digunakan adalah sebagai berikut :

- *Direct link* survei melalui No. Handphone pengguna layanan
- *QR Code* survei di masing-masing layanan
- Survei tatap muka dengan membagikan kuesioner

Hasil survei kepuasan masyarakat berupa Indeks kepuasan layanan masyarakat di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 masuk dalam kategori **”Baik”** disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.284 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat IKM	88,70	86,96	88,03	87,91	88,25

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2023

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.285 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2023

d. Inovasi Pelayanan Publik

Untuk mendorong budaya inovasi unit kerja pelayanan publik di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten secara rutin mengikuti inovasi-inovasi unit kerja pada Kompetisi inovasi pelayanan publik (Sinovik) nasional yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi. Beberapa inovasi dari Kabupaten Bantul berhasil mendapat prestasi yang bergengsi antara lain:

- 1) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2019
 - 1 Inovasi dari Kabupaten Bantul yang masuk Top 45, yaitu:
SIPERKASA (Sistem Penjemuran Karya Santosa) dibidang pertanian dengan inovasi berupa mengatasi masalah pasca panen mendukung ketahanan pangan
 - 1 Inovasi dari Kabupaten Bantul yang masuk Top 99, yaitu:
Mobil Keliling Pajak Bantul, Pelayanan Pajak Daerah Keliling berupa pelayanan PBB lebih dekat, lebih mudah, lebih murah.
- 2) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2020
 - 1 Inovasi dari Kabupaten Bantul yaitu GELIMASJIWO (Gerakan Masyarakat Peduli Sehat Jiwo) **masuk TOP 99**. Inovasi ini berupa gerakan masyarakat terpadu mengentaskan kesehatan masyarakat dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah Puskesmas Kasihan II.
- 3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2021
 - 1 Inovasi dari Kabupaten Bantul yaitu GELIMASJIWO (Gerakan Masyarakat Peduli Sehat Jiwo) **masuk TOP 45**. Inovasi ini berupa gerakan masyarakat terpadu mengentaskan kesehatan masyarakat dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah Puskesmas Kasihan II.
- 4) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten
 - Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2021 tidak diselenggarakan dikarenakan Pandemi COVID-19 yang membatasi beberapa kegiatan yang berpotensi menyebarkan virus COVID-19.
- 5) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2022
 - 1 Inovasi dari Kabupaten Bantul yaitu Bantul Seroja (Sehat Ekonomi Meningkatkan Karo Jamu) **masuk TOP 45**. Inovasi ini berupa pengembangan pelayanan kesehatan tradisional dengan memanfaatkan ramuan jamu di Kabupaten Bantul.

Sinovik yang telah dilaksanakan pada tahun 2017-2020, sejak saat pandemi sampai tahun 2022 Sinovik Kabupaten Bantul tidak dilaksanakan. Inovasi terbaik daerah sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.286 Top Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

No	Nama PD/Unit Kerja	Inovasi
Top 10 Pemenang Sinovik Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2017		
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SITUPAT, Siji Entuk Papat
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	KAPERU, KTP Baru Bagi Pengantin Baru
3	Kapanewon Piyungan	Penerbitan IUMK Jemput Bola
4	Kapanewon Bantul	GETARR, Gerakan Tanggap Renovasi Rumah
5	Puskesmas Kasihan 1	KEKEP IBU
6	Puskesmas Jetis 1	GELIAT BARONGAN
7	Puskesmas Pleret	KRIPEK PARU, Obat Mujarab Penanggulangan TBC
8	Puskesmas Bambanglipuro	Paguyuban Tresno Rogo
9	Balai Benih Pertanian	SIPERKASA (Sistem Penjemuran Karya Santosa)
10	PDAM	PDAM Bantul Siap Prima
Top 7 Pemenang Sinovik Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018		
1	Dinas Kesehatan	PSC 119 (<i>Public Safety Center</i>) 119
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	AKSI SIMPATI (Akta Kematian Sehari Jadi)
3	Kapanewon Piyungan	E-lawar (Laporan Aduan Warga)
4	Puskesmas Jetis I	GROPYOK TBC
5	Puskesmas Kasihan II	Jamah Linsek Viagra
6	Puskesmas Pleret	BADOT TERSENYUM (Buatlah Anak dan Orang Tua Tersenyum)
7	Puskesmas Piyungan	Gardu Kelola
Top 8 Pemenang Sinovik Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2019		
1	BPBD	Biss (Bantul Integreated Siren System)
2	Dinas Perhubungan	Pembayaran E-retribusi Kendaraan Bermotor.
3	Disdukcapil	Dukcapil Smart.
4	UPTD Puskesmas Sedayu I	Tante Sosialita (Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga Solusi Sehat Alami Untuk Kita)
5	UPTD Puskesmas Jetis II	Garpu Salad (Gerakan Peduli Kesehatan Sulang Kidul)
6	UPTD Puskesmas Jetis I	Sijawara Joss (Pasien Sakit Jiwa Sehat Sejahtera Jenius Olah Sampah)
7	UPTD Puskesmas Pundong	Geplak Manis Dibawa Andong (Gerakan Pemberantasan TB Bersama Warga Kec. Pundong)
8	UPTD Rumah Potong Hewan	Sijempol (Sistem Jemput Bola)
Inovasi Kabupaten Bantul Tahun 2020		
1	Dinas Kominfo	Surat Elektronik Bantul (e-Surban)
2	Dinas Kominfo	Web Site Pemkab Bantul
3	Dinas Kominfo	Portal Satu Data

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2021

2.1.3.4.1.2 Sekretariat DPRD

Target pembahasan Raperda tahun 2022 ditetapkan Propemperda dalam Keputusan DPRD Kab. Bantul Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebanyak 10 Raperda Non APBD dan 3 Raperda APBD dengan rincian sebagai tabel berikut.

Tabel 2.287 Target Raperda Tahun 2022

No	Judul Raperda	Materi Pokok	Pemrakarsa	Status	Rencana Pembahasan
1	Kabupaten Layak Anak	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Bupati	Baru	Triwulan I
2	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung	Bupati	Baru	Triwulan I
3	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPRD (Bapemperda)	Perubahan	Triwulan I
4	Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan	Penyesuaian Perda Kab. Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	DRPD (Komisi A)	Baru	Triwulan II
5	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah	Penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2018, penambahan penyertaan modal untuk Perumda Air Minum Tirta Projotamansari dan evaluasi untuk penyertaan Modal pada Perumda Aneka Dharma dan PT. BPR Bank Bantul	DRPD (Komisi B)	Baru	Triwulan II
6	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyesuaian substansi Perda Kab. Bantul Nomor 19 Tahun 2019 dengan PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DRPD (Komisi C)	Baru	Triwulan II
7	Pengelolaan Keuangan Daerah	Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah	Bupati	Baru	Triwulan II

No	Judul Raperda	Materi Pokok	Pemrakarsa	Status	Rencana Pembahasan
		Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			
8	Pertanggungjawab an Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Pertanggungjawaban APBD 2021	Bupati	Baru	Triwulan II
9	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Bupati	Baru	Triwulan III
10	Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Bupati	Baru	Triwulan III
11	Kawasan Tanpa Rokok	Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Bupati	Baru	Triwulan III
12	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Perubahan APBD	Bupati	Perubaha n	Triwulan III
13	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	APBD Murni Tahun Anggaran 2025	Bupati	Baru	Triwulan IV

Sumber data : Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, 2023

Adapun rincian raperda beserta status pembahasan dan produk hukum yang dihasilkan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.288 Produk Hukum yang Dihasilkan Tahun 2022

No	Judul Perda	Materi Pokok	Pemrakarsa	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung	Bupati	Selesai dibahas. Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tgl. 18 Agustus 2022.
2.	Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	Bupati	Selesai dibahas. Perda Nomor 4 Tahun 2022

No	Judul Perda	Materi Pokok	Pemrakarsa	Keterangan
		Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak		Tgl. 18 Agustus 2022.
3.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Bupati	Selesai dibahas. Perda Nomor 5 Tahun 2022 Tgl. 30 September 2022.
4.	Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan	Penyesuaian Perda Kab. Bantul Nomor 3 Tahun 2016 BUMDesa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	DPRD (Komisi A)	Selesai dibahas. Perda Nomor 6 Tahun 2022 Tgl. 30 September 2022.
5.	Perubahan Atas Perda Kab. Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyesuaian substansi Perda Kab. Bantul Nomor 19 Tahun 2019 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPRD (Komisi C)	Selesai dibahas. Perda Nomor 7 Tahun 2022 Tgl. 30 September 2022.
6.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah	Penyempurnaan Perda Kab. Bantul Nomor 23 Tahun 2018, penambahan penyertaan modal untuk Perumda Air Minum Tirta Projotamansari dan evaluasi untuk penyertaan modal Perumda Aneka Dharma dan PT BPR Bank Bantul	DPRD (Komisi B)	Selesai dibahas. Perda Nomor 8 Tahun 2022 Tgl. 30 September 2022.
7.	Kawasan Tanpa Rokok	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Bupati	Selesai dibahas. Perda Nomor 10 Tahun 2022 Tgl. 29 Desember 2022.
8.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Bupati	Selesai dibahas. Perda Nomor 11 Tahun 2022 Tgl. 29 Desember 2022.
9.	Penyelenggaraan Perumahan	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPRD (Bapemperda)	Selesai dibahas. Perda Nomor 12 Tahun 2022 Tgl. 29 Desember 2022.
10.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Bupati	Selesai dibahas. Perda Nomor 2 Tahun 2022

No	Judul Perda	Materi Pokok	Pemrakarsa	Keterangan
	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Daerah Tahun Anggaran 2021		
11	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Bupati	Selesai dibahas. Perda Nomor 9 Tahun 2022
12	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Bupati	Selesai dibahas. Perda Nomor 13 Tahun 2022

Sumber data : Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari ke-13 raperda (APBD dan Non APBD) yang diagendakan untuk dibahas pada tahun 2022, 12 (duabelas) raperda telah selesai dibahas dan disetujui bersama antara legislatif dan eksekutif serta telah disahkan menjadi produk hukum Kabupaten Bantul. Adapun satu raperda belum selesai dibahas pada tahun 2022 yaitu raperda “Raperda Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan” karena masih proses pembahasan di tingkat Pansus.

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yaitu “Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama” pada tahun 2022 berdasarkan rumusan “(Prosentase raperda yang disetujui Bersama tahun N dibagi Jumlah target raperda tahun N) dikali 100% mencapai 92,31%. Capaian ini di atas target yang ditetapkan sebesar 72% pada dokumen Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026.

Tabel 2.289 Persentase Raperda yang Disetujui Bersama Kabupaten Bantul, Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Raperda yang disetujui bersama	23	17	10	12	12
Jumlah target Raperda	23	14	10	12	13
Persentase Raperda yang Disetujui Bersama	100%	82%	100%	100%	92,31%

Sumber: LKJ Sekretariat DPRD Tahun 2018 s/d 2022.

2.1.3.4.2 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.3.4.2.1 Perencanaan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Bantul didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah DIY dan pemerintah pusat.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan *monev* dan evaluasi kinerja dalam penerapan *e-Government* menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

Indikator kinerja perencanaan dapat dilihat dari IKU Bappeda selaku Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Penunjang Perencanaan. Indikator kinerja semula terdiri dari 3 indikator yaitu keselarasan program kegiatan RKPD dengan RPJMD, persentase capaian rata-rata pencapaian target kinerja dan persentase program kegiatan RKPD sesuai Musrenbang digunakan pada tahun 2016, namun dengan adanya perubahan RPJMD 2016-2021, untuk tahun 2017-2021 dirumuskan menjadi 1 indikator yaitu persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah.

Pada tahun 2021 Kabupaten Bantul melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, sehingga terdapat perubahan indikator kinerja dalam rangka mendukung visi, misi dan sasaran daerah.

Tabel 2.290 Capaian Indikator Perencanaan 2018-2022

INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020
Persentase Rata-rata Pencapaian Sasaran Daerah	105,46%	107,31%	98,77%

Indikator	Satuan	Capaian		
		2020	2021	2022
Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	n/a	100	100
Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	94,5	100	100

Sumber: Bappeda, 2023

2.1.3.4.2.2 Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD DIY) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan. Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Tabel 2.291 Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah PAD	Jumlah Pendapatan Daerah	Persentase
2018	462.653.956.229,75	2.227.752.027.348,97	20,77
2019	505.929.472.001,63	2.269.539.168.277,63	22,29
2020	479.610.812.119,42	2.104.840.663.186,42	22,79
2021	491.670.724.028,10	2.235.655.701.355,10	21,99
2022*)	540.572.423.372,80	2.234.584.500.583,54	24,19

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2023

*) data masih bersifat sementara karena masih unaudit

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi PAD pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari realisasi PAD tahun 2021 karena adanya upaya-upaya:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
 - b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
 - c. Memberikan reward bagi pamong desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo.
 - d. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara self assessment.
2. Mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
3. Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
4. Meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
5. Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Gambaran keuangan Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.292 Gambaran Keuangan Kabupaten Bantul

N o	Bidang Urusan/ Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	***
2	Persentase SILPA terhadap APBD	11,41%	12,22%	10,15%	10,80%	9,67%**
3	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	-	-	-	-	-
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	31,11%	30,20%	27,09%	25,62%	29,86%**
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	18,66%	17,25%	18,23%	21,26%	19,75%**
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	47,25%	48,32%	41,96%*)	n/a	n/a
		52,75%	51,68%	58,04%*)	n/a	n/a
7	Bagi hasil kabupaten dan Kalurahan	0,82%	0,98%	0,98%	1,08%	1,17%**
8	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2023

*) Realisasi belanja termasuk belanja tidak Langsung yang berasal dari sumber Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa.

***) Angka sementara

****) Data belum rilis

Kondisi keuangan di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 secara umum dalam kategori yang baik dimana secara konsisten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan oleh BPK. Hal ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mempersiapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bantul agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah.

Selain itu persentase Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan kinerja yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan persentase SILPA yang semakin kecil dari tahun ke tahun. Kemudian alokasi belanja wajib untuk bidang pendidikan dan kesehatan juga diketahui sesuai dengan kriteria minimal. Terkait dengan bagi hasil kabupaten dan kelurahan yang mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh kenaikan realisasi PAD, kedua hal tersebut berbanding lurus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai tahun 2021 kategori rekening belanja langsung dan belanja tidak langsung berubah menjadi belanja operasi.

Tabel 2.293 Persentase Komponen Belanja terhadap Total Belanja Tahun 2021-2022

Uraian	Persentase	
	2021	2022*
BELANJA OPERASI	75,02	75,48
Belanja Pegawai	40,15	37,99
Belanja Barang dan Jasa	32,03	34,21
Belanja Hibah	2,70	2,92
Belanja Bantuan Sosial	0,13	0,36
BELANJA MODAL	12,31	9,87
BELANJA TIDAK TERDUGA	1,20	0,88
BELANJA TRANSFER	11,46	13,78
Total	100	100

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2023

Ket: *) data unaudit atau bersifat sementara

Berdasarkan data pada tabel di atas, Komponen belanja di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 didominasi oleh belanja pegawai 37,99% dan belanja

barang dan jasa 34,21%. Berikut merupakan penjelasan mengenai tiap komponen belanja.

1. Belanja Operasi; Belanja operasi terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial mengalami kenaikan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai; belanja pegawai mengalami penurunan disebabkan karena adanya ASN yang pensiun berbanding terbalik dengan penerimaan ASN.
 - b. Belanja Barang dan Jasa: belanja barang dan jasa mengalami kenaikan, dengan komponen kenaikan adalah belanja barang sebesar Rp. 16.460.749.252,00, belanja jasa sebesar Rp. 15.440.611.858,00, belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 7.865.083.578,00, belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp. 3.502.811.758,00 dan belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp. 17.684.223.341,60; sedangkan belanja barang dan jasa yang mengalami penurunan hanya belanja pemeliharaan sebesar Rp. 1.806.411.899,94 dan belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp. 3.820.881.081,00.
 - c. Belanja hibah: Sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2020 untuk Belanja Hibah dikelola oleh OPD teknis sesuai dengan urusan kewenangannya.
 - d. Belanja Bantuan Sosial: Belanja bantuan sosial mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.119.900.000,00.
2. Belanja Modal: Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal serta Aset Tetap Lainnya. Belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp. 52.496.227.236,55, dengan penurunan terbanyak adalah belanja tanah sebesar Rp. 29.926.509.073,00, diikuti belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 12.543.810.428,90, kemudian belanja gedung dan bangunan sebesar Rp. 5.887.140.615,16, selanjutnya belanja aset tetap lainnya sebesar Rp. 4.156.382.900,00 dan yang mengalami penurunan terakhir adalah belanja modal aset lainnya sebesar Rp. 42.546.454,00, sedangkan

belanja peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp. 60.162.234,51.

3. Belanja Tidak Terduga (BTT): Sebagai dasar penggunaan BTT, di Kabupaten Bantul telah diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. Rincian penggunaannya antara lain untuk: pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan, penegakan protokol kesehatan di masyarakat, mengoperasikan kembali *shelter ex RS Patmasuri* untuk karantina pasien, *screening* pasien dan operasional labkesda, penambahan ruang rawat pelayanan covid-19, pelayanan vaksinasi, pemulasaran jenazah korban kecelakaan bukit bego Imogiri. Namun penggunaan terbanyak adalah untuk insentif tenaga kesehatan.
4. Belanja Transfer: Realisasi Belanja Transfer tahun 2022 sebesar Rp 309.515.184.340,00 atau 99,73% dari anggaran sebesar Rp 310.339.184.340,00. Realisasi tahun 2022 tersebut mengalami peningkatan sebesar 17,53% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 54.269.789.249,00.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai dengan regulasi terbaru;

Penggunaan aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset (Simas) dan pengelolaan persediaan dengan SIMPERSADA;

Menjalin kerjasama dengan perwakilan BPKP DIY untuk asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan atau *coaching clinic* penyusunan neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas;

Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan, belanja , penerimaan pembiayaan dan realisasi pendapatan dan belanja dari transaksi - transaksi non RKUD (BLUD, Dana Desa dan Bosnas)

Mengikuti Diklat teknis dan *workshop* mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;

Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin realistis;

Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi melalui Simpada;

Meningkatkan koordinasi antar SKPD penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing SKPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;

Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;

Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah melalui media massa, media *online*, *leaflet*, dan lain-lain;

Menambah dan merevisi Standard Operating Procedure (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;

Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

2.1.3.4.2.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Paradigma baru manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif pengelolaan ASN secara administratif menjadi pengelolaan ASN sebagai sumber daya (aset) dalam pelaksanaan pembangunan. Perspektif ASN sebagai sumber daya diarahkan

dan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan program kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan.

Peta jalan pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan terwujudnya birokrasi yang berkelas dunia dengan *Smart ASN*, yaitu ASN yang berintegritas, nasionalisme, professional, berwawasan global, menguasai teknologi, memiliki jejaring dan berorientasi pelayanan. Sumber daya ASN memiliki peran penting dan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Data jumlah PNS di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.294 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah PNS Golongan I			Jumlah PNS Golongan II			Jumlah PNS Golongan III			Jumlah PNS Golongan IV			Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
2018	93	6	99	709	263	972	1.456	2.493	3.949	1.059	1.939	2.998	8.018
2019	86	5	91	664	360	1.024	1.446	2.754	4.200	932	1.764	2.696	8.011
2020	77	5	82	613	331	944	1.297	2.546	3.843	824	1.671	2.495	7.364
2021	64	4	68	582	399	981	1.385	2.823	4.208	706	1.437	2.143	7.400
2022	43	2	45	539	474	1.013	1.329	2.809	4.138	612	1.267	1.879	7.075

Sumber : BKPSDM Kab. Bantul, 2023

Berdasarkan data tersebut, jumlah PNS Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena dalam kurun waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bantul hanya mendapatkan formasi pengadaan CPNS di tahun 2018, 2019 dan 2020. Sementara itu PNS yang memasuki masa purna tugas setiap tahun selalu ada. Jumlah PNS yang memasuki purna tugas dan pindah tugas keluar tidak dapat diimbangi dengan penambahan dari pengadaan CPNS dan mutasi masuk. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, Kabupaten Bantul pada tahun 2022 yang berjumlah 1.013.170 penduduk (sumber BPS Kabupaten Bantul), maka persentase jumlah ASN Kabupaten

Bantul dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bantul adalah 0,69%.

1. Kompetensi Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan kecakapan para pegawai sehingga dapat bekerja sesuai tugas dan fungsinya dengan maksimal. Untuk itu diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki.

Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2022 sebanyak 1.765 orang atau sebanyak 24,22% dari jumlah total ASN. Kemudian jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural sebanyak 275 orang atau sebanyak 56,35% dari total formasi jabatan structural.

2. Jabatan PNS

Dalam Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, jabatan ASN terdiri dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam memimpin serta memotivasi aparatur sipil negara (ASN) pada instansi pemerintahan. Yang termasuk dalam jabatan pimpinan tinggi yaitu pada tingkat eselon II. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan komisi aparatur sipil negara. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama pada instansi Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 34 jabatan dari 35 formasi jabatan.

Jabatan administrasi terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana. Tahun 2022 jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah sebanyak 1.834 jabatan, yang terdiri dari 161 jabatan administrator, 293 jabatan pengawas dan 1.380 jabatan pelaksana.

Jabatan fungsional pada instansi pemerintah merupakan sekelompok jabatan yang memiliki fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada tahun 2022 sebanyak 5.207 jabatan.

3. Indeks Profesionalitas

Tabel 2.295 IKU Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2022

IKU PD	2020	2021	2022
Capaian Indeks Profesionalitas ASN	68,08 Nilai	68,5 Nilai	57,44 Nilai

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN Kabupaten Bantul di Tahun 2021 evaluasi tahun 2020 dilakukan dengan metode pengukuran secara mandiri (*self assessment*) dengan menggunakan Formulir Indeks Profesionalitas ASN yang dibagikan ke Perangkat Daerah. Hasil dari pengukuran mandiri ini kemudian diinputkan ke dalam Aplikasi SAPK BKN dan mendapatkan hasil Pengukuran Indeks IP ASN dengan Nilai 68,47.

Pada tahun 2022, berdasarkan hasil pengukuran kinerja Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Indeks Profesionalitas ASN, diperoleh hasil sebesar 57,44 dari target sebesar 69 atau pencapaian sebesar 83,25%. Pencapaian

target kinerja tersebut didukung oleh optimalisasi kinerja SDM dan ketersediaan aplikasi kepegawaian. Namun, pencapaian kinerja belum sesuai dengan target yang ditetapkan karena mengalami beberapa hambatan, yaitu :

- 1) perubahan mekanisme penilaian dari penilaian mandiri (*self assessment*) ke metode pengukuran langsung dalam sistem SAPK BKN;
- 2) perubahan kebijakan/regulasi dalam manajemen ASN (penyetaraan jabatan, pengelolaan kinerja, manajemen jabatan fungsional dan mekanisme pengukuran Indeks Profesionalitas ASN);
- 3) belum terkoneksinya secara *host to host* sistem informasi kepegawaian dengan SAPK BKN.

4. Sistem Merit

Dalam Penilaian Sistem Merit yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh Kategori I atau predikat Buruk dengan nilai 135 dengan 8 aspek yang dirinci dalam 37 indikator. Penilaian tersebut dilakukan sebagai evaluasi agar ke depan penataan sistem merit semakin baik dan mampu menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan potensi dan kompetensinya.

Tabel 2.296 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Indikator	Nilai
1	Perencanaan Kebutuhan	15
2	Pengadaan	30
3	Pengembangan Karier	12,5
4	Promosi dan Mutasi	15
5	Manajemen Kinerja	25
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	17,5
7	Perlindungan dan Pelayanan	8
8	Sistem Informasi	12

Total Nilai	135

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bantul, 2023

2.1.3.4.2.4 Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka meningkatkan daya saing antar daerah Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha mendorong dan memotivasi baik aparat pemerintah, masyarakat, swasta, maupun seluruh stakeholders yang ada untuk bersama-sama mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Program dan kegiatan mengenai Penelitian dan Pengembangan tertuang dalam kegiatan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA. SIDA merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, maupun masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah Pemerintah Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah DIY maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kondisi kultural/budaya Bantul agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan.

Kerjasama tersebut salah satunya adalah memanfaatkan program pengabdian kepada masyarakat dari berbagai unsur Perguruan Tinggi untuk mendorong pengembangan inovasi masyarakat. Hal ini penting karena program pengabdian kepada masyarakat memberikan banyak manfaat baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakat antara lain:

- mendapatkan bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah/lokasi,
- dikenalkannya pola pikir dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, khususnya di pedesaan,
- tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya pemenuhan kebutuhan lewat pemanfaatan ilmu dan pengetahuan.

Gambaran pengembangan inovasi daerah dalam kurun waktu tahun 2018-2021 sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel 2.297 Pengembangan Inovasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021

Tahun	No.	Nama Inovasi
2018	1	SIMDUK (Sistem Informasi Kependudukan)
	2	Janur Kota (Jajan Sedulur Nukono Tangga)
	3	PATEN Berhadiah
	4	Yanperum (Layanan Antar KTP Sampai Rumah)
	5	RANTAI BAJA
	6	Jetis Joss
	7	GEPLAK MANIS DIBAWA ANDONG (Gerakana Pelaksanaan Pemberantasan Tuberkulosis Bersama Warga Masyarakat Kapanewon Pundong)
	8	KUDA (Kendaraan Untuk Darurat Warga)
	9	SIJAWARA JOS (Pasien Jiwa Sehat Sejahtera Jenius Olah Sampah)
	10	SEMAKIN (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan)
2019	1	Early Warning Systems pada Sistem Pendampingan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan oleh Rumpun Bidang terhadap Perangkat Daerah di Bappeda Kabupaten Bantul
	2	PAKDE BLANGKON (Penyuluhan Kesehatan Dengan Barcode Langkah Online)
	3	MOROLEGA (Mobil Operasional Layanan Administrasi Kependudukan Efektif sekaligus Akurat)
	4	APLIKASI DUKCAPIL SMART BANTUL
	5	Sistem Pendaftaran Nomor Induk Kesenian (NIK) Seni Online "SIPESO"
	6	Ruang Milenial Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
	7	Aplikasi Surban (Surat Elektronik Bantul)
	8	KOPERASI SAHABAT SI MISKIN (PERAS HABIS)
	9	Njaba Asri (Belanja Bawa Tas Sendiri)
	10	Bebakulan
	11	SIPENTOL (Sistem Pendaftaran dan Pembayaran Non Tunai Online) E-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
	12	KASINAWA (Aplikasi Rusunawa) Pembayaran E-Retribusi Rusunawa
	13	Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIMDAN)
	14	SKM (Survei Kepuasan Masyarakat Online)
	15	INOVASI JEMPOL I-MASS (Jemput Bola IUMK Massal) Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul D.I.Yogyakarta
	16	Jelajah Potensi Lokal Kapanewon Srandakan
	17	Tim Sahabat APBDES
2020	1	RUBLIK BILIK HATI (BKPP)
	2	Aplikasi sistem pelaporan kegiatan dan assesment kebencanaan
	3	E Risalah SETWAN DPRD
	4	Pensil Bu Sita
	5	SIMPONI (Sistem Informasi Pendidikan dan Olahraga Terkini)
	6	Bantul Sinau

Tahun	No.	Nama Inovasi
	7	SITI CERIA (Sistem Terintegrasi Layanan Rekam KTP yang Cepat, Responsif, Informatif, Akurat dan Efektif)
	8	Leontin Mas
	9	KAPERU (KTP Baru untuk Pengantin Baru)
	10	AKSI SIMPATI (Akta Kematian Sehari Jadi)
	11	PENARI DESA (PEmbiNAan RIntisan DESa budayA)
	12	SIM-ELOG (Sistem Informasi Manajemen E-Logistik)
	13	Pengelolaan Surat Secara Elektronik
	14	DIVERSIFIKASI USAHA PEMBUATAN APD (MASKER DAN COVERALL)
	15	LAYANAN SATU JARI JELAJAH BANTUL
	16	E-RETRIBUSI PASAR
	17	Pasar Siaga Covid-19
	18	Robot Uji Kolong Perhubungan Bantul - ROJIKO HUBBA
	19	SI JAMBUL MANDI DI KOLAM SISTIM PINJAM BUKU SERTA LITERATUR SECARA MANDIRI OLEH KOMUNITAS, SEKOLAH & TBM
	20	PEPES ARTIS (Penilaian dan Penyusutan Arsip Untuk Instansi)
	21	SUSITARUNG (Surat Rekomendasi Tata Ruang)
	22	LANTIP (Layanan Terpadu Investasi dan Perijinan)
	23	PTSP (Pelayanan terpadu satu pintu)
	24	SIPERKASA Mendukung Ketahanan Pangan
	25	SIKAPU (Sistem Informasi Kearsipan DPUPKP)
	26	GERIMIS SENJA (Gerakan Mengatasi Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial)
	27	KENANGA (Kader siaga perlindungan Perempuan dan Anak)
	28	Pos Pelayanan Hukum
	29	GELAS BELING (Gerakan Pelaksanaan Bersih Lingkungan) BAMBANGLIPURO
	30	pasar BARTER Kec Banguntapan
	31	DLINGO PENAK (Kapanewon Dlingo Peduli Perempuan dan Anak)
	32	GERAKAN MADU MANIS (Gerakan Masyarakat Peduli Mengatasi Kemiskinan) di Kapanewon Sewon
	33	Aplikasi esurat Kapanewon Pandak
2021	1	Pengarusutamaan SDGs (Sustainable Development Goals) Dalam Perencanaan Pembangunan dengan Penyusunan draft Rencana Aksi Daerah (RAD) di Kabupaten Bantul
	2	Anjungan Mandiri Pajak Daerah
	3	Board Game Edukasi Bencana
	4	Buletin e- SEJADA : Buletin Elektronik Sejahtera Demokratis dan Agamis
	5	SIKUBIS (Sistem Informasi Konsultasi Bisnis) (UJI COBA)
	6	SIMPATIK (Sistem Informasi Manajemen Pariwisata berbasis Statistik)
	7	BANTUL PINTER (Sistem Perpustakaan Terintegrasi Berbasis Internet)
	8	PIPI ALUS (Aplikasi Sistim Pelaporan Pilar Sosial)
	9	Si Pengkuh (Sinergitas Pengurangan Angka Kemiskinan Berdasarkan Data Kewirausahaan (UMKM))
	10	BERBAGI BUNGA DERMAHA KAPANEWON BANTUL
	11	GIYAT KAMU MANTAP BUNG (baGI rakYAT KurAng MampU pinjaMAN TAnPa BUNGA)

Tahun	No.	Nama Inovasi
	12	PASEBAN (Pasukan Anak Sekolah Basmi Nyamuk) di Kapanewon Sewon
	13	ELODEA (pEmanfaatan Lahan kOsong Di kantor kEcamatan sAnden)
	14	Jum'at silaturahmi distribusi E-KTP ke warga (Jum'at si DIEWA)
	15	Gerakan Bersama Penataan Kantor "GEBER TOR" Kapanewon Pandak
	16	Layanan Warga GO 3 in One Kapanewon Piyungan

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2022

Pada tahun 2022 Kabupaten Bantul telah menetapkan inovasi melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 606 Tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi di Kabupaten Bantul Tahun 2022. Dalam Keputusan terdapat inovasi dari 66 Perangkat Daerah dan Puskesmas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.298 Inovasi Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	SIMDAN
		Sistem Penerimaan Tamu elektronik
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
2	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Digitalisasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Aplikasi Cinta Anak Bantul
		Aplikasi SEMAKIN PINTAR (Sistem Monitoring Penanggulangan Kemiskinan dan Program Ketrampilan)
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Bayar Pajak Mudah, Nggak Bikin Gerah
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	Aplikasi mutasi antar instansi pemerintah
		Diklat berbasis LMS
		Percetakan sertifikat otomatis
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Aplikasi E-Pemilos EVOSS (Electronic Voting System for Students) Pemilihan ketua OSIS SMP, dan SMA sederajat
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Board Game
8	Dinas Kebudayaan (Kudha Kabudayan) Kabupaten Bantul	PENARI DESA (Pembinaan Rintisan Desa Budaya)
		DIRECTORY KEBUDAYAAN
		GEMISETITI (gerakan memaksimalkan potensi ekonomi secara hati -hati)
		Peningkatan Informasi Cagar Budaya Pada Website Dinas Kebudayaan (KUDHA KABUDAYAN)
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	BALPIRIK (Bantul Pinter Terintegrasi Internet dan Komunitas Si Jambul Mandi di Kolam (Sistem Pinjam Buku serta Literatur secara Mandiri oleh Komunitas, Sekolah dan taman Bacaan Masyarakat)
		Pusaka Susi Jintan (Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pada Pengrajin Batik dan Petani Milenial)
		Pengrajin Batik dan Petani Milenial)
10	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	SIPENTOL (Sistem Pendaftaran Online)
		ROJIKUHUBBA (Robo Uji Kolong Perhubungan Bantul)
		E-Retribusi Terminal Kios
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	SIPO (System Perizinan Online Terintegrasi)
		PRIMA (Pembayaran Retribusi Perizinan melalui Anjungan Tunai Mandiri)
		LANTIP (Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan)
		FAMOUS (Fasilitasi Mediasi Pemohon yang Mengurus Izin)
		GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung)
		GEPLAK (Gerakan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

No	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
12	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul	SIPETARUNG (Sistem Informasi Pertanahan dan Tata Ruang)
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Profil Batik Giriloyo
		Sistem Informasi Metrologi Bantul (SiMantul)
14	Dinas Lingkungan Hidup	Bantul Bersama
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	SIMDUK-KKBPK BANTUL
		EDUKASI DIGITAL PARENTING TERPADU
16	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Sim Data "Resi Deswita (Registrasi Destinasi Wisata)"
		LAYANAN SATU JARI "JELAJAH BANTUL"
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	Akselerasi pemberdayaan petani milenial di Kab.Bantul melalui Klinik Agribisnis Keliling
		SIPERKASA Mendukung Ketahanan Pangan
		IB KADO (Inseminasi Buatan pada Kambing dan Domba)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Aplikasi E-Retribusi Kios Terminal
		Bantul Online Shop
		Aplikasi E-Pemilos
		Aplikasi Sistem Informasi Zona Kawasan Menara
		Aplikasi Pendaftaran Vaksinasi Covid-19
		Aplikasi Penanda Keistimewaan Makam Kotagede
		Aplikasi Penanda Keistimewaan Makam Imogiri
		Bantulpedia
		Aplikasi Persuratan Kabupaten Bantul (Surban)
		Portal Data Bantul
		Metadata Kabupaten Bantul
		Geoportal Kabupaten Bantul
		e-Sajada
		Citizen Journalism
		KIM Milenial
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	SIKAPITEN TNI
		SIKAPITEN POLRI
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP)
		Aplikasi Dana Insentif Kalurahan (DIKAL)
		Seleksi Tobermas (Tokoh Pemberdayaan Masyarakat)
21	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	Sigadis Pentul dalam menangani Administrasi Kegiatan
		Penilaian Angka Kredit JFT Pendidik
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	E-moneter dalam menangani monitoring Kegiatan Sekolah Ramah Anak
		PAK PILING (Pelayanan Antar Kerja Keliling)
23	Dinas Sosial Kabupaten Bantul	TANGGUL BANTUL
24	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Bantul Seroja (Sehat Ekonomi Meningkatkan karo Jamu)
		Sistem Informasi Manajemen E-Logistik (SIM E-LOG)
25	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul	WEBGIS IRIGASI
26	RSUD Panembahan Senopati	KINANTHI (Kirim Obat Tanpa Antri)
		SELASIH (Sehat Lezat Sinaji Higienis) Catering Gizi
		SRIKANDI (Sistem Registrasi Lan Informasi Kanthi Daftar Mandiri)
27	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	Barcode Arsip Kepegawaian Satpol PP
		Kader Sapta Tertib
28	Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul	Jarimas
29	Kapanewon Bambanglipuro	Gerakan "BERLIAN MAHAL"
30	Kapanewon Banguntapan	PASKAMBANG (Pasar Kamis Banguntapan)

No	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
31	Kapanewon Bantul	Berbagi Bungadermaya (Bersinergi Menghubungkan Dermawan dan Masyarakat Tidak berdaya)
		Gerobak Menua (Gerakan Ngobrol Bareng Anak dan Keluarga Mencegah Nikah Usia Anak)
32	Kapanewon Dlingo	JODIPATI (Jogo Wargo Dlingo dengan Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti)
33	Kapanewon Imogiri	Saga Ketan Mikita (Sambang Warga Ke Kelompok Tani, Usaha Mikro Kecil dan Wisata).
34	Kapanewon Jetis	ASMARA (Agen Kesehatan Mandiri Keluarga harapan)
		IBU SAY (Implementasi Budaya Satriya)
35	Kapanewon Kretek	SISI AKAL (Sistem Inovasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan)
		PESAN MAS BEJI (Pesantren Masyarakat Berbasis Masjid)
		KEMBANG SETAMAN (Kapanewon Mengembangkan Seni dan Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan)
36	Kapanewon Kretek	PILUNAKMAMIK (Pinjaman Lunak Untuk Masyarakat Miskin)
		KELAS ELING TAHAN BANTING (Kapanewon Layak Anak Sinergi Eliminasi Stunting, Tata Kelola Sampah Menjadi Tabungan Bersama Kapanewon Kasihan Menuju Trending)
37	Kapanewon Piyungan	MANUAL GAS COVID 19 (Masif Penyuluhan Keliling Cegah Selalu Covid 19)
		Panorama (Publikasi Aktif Informasi Masyarakat)
38	Kapanewon Pajangan	INARSIP (Inovasi Arsip)
39	Kapanewon Pleret	Bangkit Berjamaah (Pinjaman Modal Berbasis Masjid dan/atau Majelis Taklim)
		SEBAR CETING KARET
40	Kapanewon Pundong	SEHARUM MELATI(Selalu harus melayani sepenuh hati)
41	Kapanewon Pandak	GEBERGAS (Gerakan Berantas Gizi Buruk dan Anak Stunting) dengan cara berbagi setiap jumat 1 butir telur setiap karyawan karyawan Kapanewon Pandak
42	Kapanewon Sedayu	Jempol Landhep (Jemput Bola Layanan Difabel)
43	Kapanewon Sanden	SIPARIS KAGOL (Aplikasi Penyimpanan Arsip dan Inventaris Kapanewon Google Drive)
44	Kapanewon Sewon	Gerakan Masyarakat Peduli Mengatasi Kemiskinan (Gerakan Madu Manis)
45	Kapanewon Srandakan	Online Terlengkap Usaha Mikro (ONTEL SI UMI)
		Pojok KLA
46	Puskesmas Bambanglipuro	Paguyuban Prolanis Tresno Rogo Puskesmas Bambanglipuro (Paguyuban Pengelolaan Penyakit Kronis Tresno Rogo)
		POTENSI (Program Pengelolaan Hipertensi)
		Pandu Bumil ke Pantai (Pengelolaan Terpadu Ibu Hamil Kekurangan Energi Protein dan Anemia Terintegrasi)
		Geliat Jiwa (Gerakan Bambanglipuro Sehat Jiwa)
		Teman TB (Temukan Analisa Tangani Tuberkulosis)
		Program Ku Tau Aku Hebat (Program Peningkatan PHBS)
47	Puskesmas Banguntapan I	TILIK IBU (Tensi Ibune Cah Cilik Cilik)
		GARDU BATUK (Gerakan Terpadu Bantu Penderita Tuberculosis)
		GEMA SIAGA BU RT (Gerakan Bersama STOP Kematian Ibu dan Bayi dengan Pemantauan Bumil Risti)
		CeTing BaPak RuPaDi (Pencegahan Stunting)
		KAK GISTI (Kartu Kontrol Kapan Gigi Susu Ganti)
		PELITA BANGSA (Pelayanan Klinik Sanitasi Puskesmas Banguntapan I)
		DUDHA KEREN (Dukungan ODHA dan Kelompok Rentan)
48	Puskesmas Bantul I	DISKO KIA (Diskusi dan Koordinasi Kesehatan Ibu dan Anak)
		SABU -SABU (Sambang Ibu Hamil Sambang Ibu Nifas)
		DIMAS (Deteksi Tanda Bahaya Masa Nifas)
		DUTA MEDIASOS (Edukasi Kesehatan Melalui Media Sosial)
		Jambore Remaja Hebat
		One Stop Service Pasien Batuk
49	Puskesmas Bantul II	Karak seceting (Kader aktif konseling cegah stunting)
50	Puskesmas Dlingo I	Little Dentist
		Eling Jiwa
51	Puskesmas Imogiri I	Senja Kesturi (Sehat dengan Jamu dan Akupresure di Puskesmas Imogiri I)

No	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
		Gasing (Gerakan Atasi Stunting)
		Carang Gesing (Cegah Anah Gizi Kurang dan Stunting bersama Gizi dan Kesling)
52	Puskesmas Imogiri II	Cintai Belahan Jiwa (Cerita Indah TANpa tendensi untuk difaBEL dan orang dengan gAngguan JiWA)
		GERDU INDAH (Gerakan Terpadu Cinta Sampah)
53	Puskesmas Jetis I	NINGSITU PTM (Skrining Lansia Terpadu Penyakit Tidak Menular)
		KLASTERKU TENSI (Kelas Terpadu Khusus Hipertensi)
		PANDU HATI (Posyandu Kesehatan Jiwa)
54	Puskesmas Jetis II	GARDU SEDAP (Gerakan Dusun Sehat Gadungan Kepuh)
		CETING SENI (Cegah Stunting Sejak Dini)
		GEMAS SI CANTIK (Gerakan Minum Tablet Tambah Darah Seminggu Sekali Cegah Anemia Remaja Putri Kretek)
55	Puskesmas Kretek	PERGI LOMBA MANCING (Pemeriksaan Gigi Calon Manten Baru Manfaat Cegah Stunting)
		ASIK SERU BAHAGIA (Konsultasi Dokter Spesialis Gratis Untuk Perbaikan Pemenuhan Gizi Anak)
56	Puskesmas Kasihan I	Ceting Kencono (Cegah Stunting Kelola Bocah Kanthi Paripurno)
		Gerdu Savana (Gerakan Terpadu Sadari dan IVA Kasuhan I)
		Gelimas Jiwo (Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwa)
57	Puskesmas Kasihan II	Kolam Tamansari (Kolaborasi Menangani Masalah Gizi Balita dengan Asuhan Mandiri)
58	Puskesmas Pajangan	Kleting Kuning (Kelola Tingkatkan Gizi untuk kurangi Stunting)
		Sasak TB (Satu hasu satu suspek TB)
59	Puskemas Piyungan	Si Rian Makan Banyak
		TERRAS PENDOPO (Integrasi Pendidikan Kesehatan Pondok Pesantren)
		GARDU PANDANG (Gerakan Terpadu Penurunan Anemia Stunting)
		Dabu-Dabu (datangi Bumil Datangi Bufas)
		Pesona Bumil (Periksa Sore terencana ibu Hamil)
		Jubah Si Miftah (Jus dan Buah untuk Edukasi Minum Tablet Tambah Darah)
60	Puskesmas Pleret	LIONTIN EMAS (Layanan Calon Pengantin Terpadu untuk Mencegah Kehamilan Beresiko)
		Es Mangga (Edukasi, Skrining, dan Manajemen Gangguan Pertumbuhan Pada Balita
		AMBEGAN (Ambulans Mubeng kalurahan)
		SARASEHAN BERSAHAJA (Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Bersama Menuju Sehat Jiwa Raga)
		ONCCOM (Online Comprehenship Covid Monitoring)
		Si JULIE (Sistem Rujukan Online)
61	Puskesmas Pandak I	SIGITA
		PEKA TENSI (Pendampingan Kader Pada Penderita Hipertensi)
62	Puskesmas Pandak II	KALIGAJI (Kader Peduli Orang Dengan Gangguan Jiwa)
		POS INDAH (Posbindu PTM Ayah)
		CEMISTRI (Cegah Anemia Pada Remaja Putri)
63	Puskesmas Sanden	SIPARIS KAGOL (Aplikasi Penyimpanan Arsip dan Inventaris Kapanewon)
64	Puskesmas Srandakan	Kentong lemut
		Bakpia Seceting
65	Puskesmas Sedayu II	SEGA CEKER (Sekeuarga Cek Kesehatan Rutin)
		GEMILANG (Gemar Makan Ikan Lengkapi Gizi Seimbang)
66	Puskesmas Sewon I	CETOT TB (Cegah Temukan Obati TB/ Tuberkulosis)

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

2.1.3.4.3 Unsur Pengawasan

2.1.3.4.3.1 Inspektorat Daerah

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar.

a. Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK

Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya. Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.299 Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) KPK Tahun 2021-2022

Indikator	Satuan	2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP) KPK	Nilai	82	85,37	82,5	92,52

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul, 2023

Target nilai MCP KPK Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 sebesar 82,5% dan terealisasi sebesar 92,52%. Capaian ini melebihi target dalam RKPD Tahun 2022. Faktor Pendorong nilai MCP KPK melebihi Target pada tahun 2022, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam mengimplementasikan pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Memperkuat komitmen perangkat daerah dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data sehingga data yang tersaji adalah data yang berkualitas dan valid, serta data terkumpul tepat waktu.
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah.
4. Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah.
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim MCP KPK.

MCP KPK meliputi 8 (delapan) area intervensi yaitu manajemen APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, dan pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Tabel 2.300 Progres Keberhasilan Pemda Bantul Pada 8 (Delapan) Area Intervensi Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2022

No	Indikator/ Area Intervensi	Nilai
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	100,00
2	Pengadaan Barang dan Jasa	96,00
3	Perijinan	100,00
4	Pengawasan APIP	92,00
5	Manajemen ASN	85,00
6	Optimalisasi Pajak Daerah	75,00
7	Pengelolaan BMD	90,00
8	Tata Kelola Keuangan Desa	100,00

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada area optimalisasi pajak daerah dan manajemen aset daerah memiliki nilai terendah karena sistem

pengelolaan pajak daerah yang belum terhubung dengan sistem pada proses perizinan yang dapat menyajikan informasi-informasi yang sesuai yang dibutuhkan. Solusinya adalah mendorong agar integrasi ataupun *mirroring* aplikasi pengelolaan bersama terkait perizinan dan pajak antar BPKPAD dan DPMPSTSP dapat segera terwujud.

b. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita reformasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang pengawasan) dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.

Kondisi jumlah tenaga Aparatur Pengawasan dan rincian kebutuhannya terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.301 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Jenis Jabatan	2018			2019			2020			2021			2022		
		Jml	Kebutuhan	Kekurangan	Jml	Kebutuhan	Kekurangan	Jml	Kebutuhan	Kekurangan	Jml	Kebutuhan	Kekurangan	Jml	Kebutuhan	Kekurangan
1	Struktural															
	Inspektur	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
	Sekretaris	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
	Inspektur Pembantu	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	5	1	4	5	1
	Kasubag	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0
2	Fungsional Tertentu															
	Auditor	21	52	31	21	52	31	18	43	25	17	58	41	18	58	41
	P2UPD	6	35	29	6	35	29	11	40	29	12	48	36	11	48	36
	Auditor Kepegawaian	0	8	8	0	8	8	2	0	0	2	5	3	2	5	3
	JFT	0	4	4	0	4	4	4	6	2	4	4	0	4	4	0
3	Fungsional Umum															
	JFU	14	40	26	14	40	26	9	19	10	9	9	0	9	9	0
	Jumlah	50	108	98	50	108	98	53	117	66	53	134	81	53	134	81

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2020 Tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bantul, pada Tahun 2022 masih terdapat kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan sejumlah 81 personil.

Terkait dengan kompetensi tenaga fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah dilakukan pemetaan kompetensi terhadap pejabat fungsional yang ada. Kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan sasaran audit sejumlah 24 kompetensi yang harus didukung dengan 3 jenis diklat fungsional dan 21 jenis diklat substantif. Untuk 3 jenis diklat fungsional (JFT Pertama, JFT Muda, JFA Madya) 27 personil pejabat fungsional telah mengikuti semua, sedangkan untuk 21 jenis diklat substantif belum merata diikuti oleh pejabat fungsional dan dilakukan secara bertahap.

c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Pedoman penilaian SPIP telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP tidak hanya berguna sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP. Tingkatan atau Level Maturitas sesuai Pedoman tersebut, terdiri atas 6 tingkatan dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

Tabel 2.302 Nilai SPIP Kabupaten Bantul tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul, 2023

Berdasarkan penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nilai Maturitas SPIP Kabupaten Bantul tahun 2022 pada level 3 (Terdefinisi), artinya: Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022,
- (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan-peraturan tersebut, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak

dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.303 Realisasi Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	Eksternal/BPK			Internal (Irda Bantul dan Irda DIY)			Persen Internal dan Eksternal selesai
	Jumlah rekomendasi	Jumlah rekomendasi selesai di Tindak Lanjuti	Persen Tindak Lanjut selesai	Jumlah rekomendasi	Jumlah rekomendasi selesai di Tindak Lanjuti	Persen Tindak Lanjut selesai	
2018	62	55	88,71*	437	457	95,42	92,07*
2019	25	21	84,00*	197	190	96,45	92,23*
2020	63	63	100,00	151	123	81,46	90,73*
2021	30	30	100,00	154	143	92,86	96,43*
2022	20	15	75,00*	265	258	97,36	86,18*

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bantul, 2023

keterangan*

tanda (*) angka sementara menunggu hasil verifikasi BPK RI

Tanda bintang (*) dari tahun 2018, 2019 dan 2022 menunjukkan bahwa persentase masih tetap berjalan penghitungannya karena masih belum selesai dan masih proses tindak lanjut serta verifikasi BPK RI, bilamana sudah 100 persen berarti suatu rekomendasi sudah di selesai tindaklanjuti.

2.1.3.4.4 Unsur Kewilayahan

2.1.3.4.4.1 Kapanewon

Kapanewon dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kapanewon;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kalurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Panewu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kapanewon.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator kinerja utama Kapanewon di lingkup Kabupaten Bantul. IKM Kapanewon dari 17 Kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dilihat dari standar deviasinya menunjukkan bahwa nilai IKM antar Kapanewon cenderung mengalami fluktuasi. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan publik ditingkat Kapanewon mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun kualitasnya cenderung variatif. Dengan demikian, diperlukan adanya terobosan yang dapat memperkecil perbedaan kualitas layanan publik antar Kapanewon.

Pencapaian indikator kinerja utama Kapanewon di lingkup Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.304 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kapanewon Lingkup Kabupaten Bantul 2018-2022

No	Kapanewon	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dlingo	95,18	91,25	95,96	94,86	94,83
2	Piyungan	95,64	91,55	93,67	94,77	95,11
3	Pleret	96,83	89,73	95,82	95,19	93,35
4	Banguntapan	79,76	89,73	92,21	94,52	95,24
5	Imogiri	97,15	91,22	92,15	92,07	92,1
6	Sewon	95,38	88,51	98,48	89,95	90,5
7	Jetis	94,75	89,06	92,77	92,54	92,55
8	Pundong	97,09	90,56	93,74	94,09	95,08
9	Kretek	96,34	91,66	92,29	90,86	92,83

No	Kapanewon	2018	2019	2020	2021	2022
10	Bambanglipuro	97,38	90,18	95,73	97,02	95,72
11	Bantul	98,95	91,86	95,70	96,64	94,15
12	Kasihan	94,85	89,01	94,26	91,08	92,33
13	Sedayu	95,45	88,03	95,61	89,99	94,22
14	Pajangan	87,42	90,62	95,78	94,88	94,75
15	Pandak	84,57	92,23	92,45	92,69	94,49
16	Sanden	95,74	96,01	98,48	97,57	97,2
17	Srandakan	86,25	90,29	92,58	90,67	92,42
Rata-rata		93,45	96,17	94,13	93,49	93,93

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2023

Dari data di tabel terlihat bahwa Pada Tahun 2022, kapanewon yang memiliki nilai IKM tertinggi adalah Kapanewon Sanden (97,20) sedangkan kapanewon yang memiliki nilai IKM terendah adalah Kapanewon Sewon (90,50).

2.1.3.4.5 Unsur Pemerintahan Umum

2.1.3.4.5.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Pembinaan Politik Daerah

Pembinaan politik dalam negeri di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melibatkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Perguruan Tinggi. Pembinaan politik daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman terhadap demokrasi dan peran serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik seperti partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dilakukan kegiatan antara lain:

- 1) Pendidikan politik dengan sasaran antara lain pelajar SMA/ sederajat, kelompok rentan, purnawirawan TNI/POLRI dan masyarakat lainnya.
- 2) Bimbingan teknis penyusunan proposal, laporan, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik bagi pengurus partai politik yang mendapat suara.

- 3) Kegiatan TOT (*Training of Trainer*) dan Sosialisasi Pemilos (pemilihan OSIS) dengan sasaran pelajar SMP/ sederajat dan pelajar SMA/ sederajat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada para pelajar mengenai pentingnya demokrasi, tahapan, teknis dan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Tabel 2.305 Kegiatan Sosialisasi Pemilos (Pemilihan OSIS) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Kegiatan	Sasaran					Narasumber
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Sosialisasi	93 sekolah	99 sekolah	0 sekolah	89 sekolah	200 sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga / Balai Pendidikan Menengah Kantor Kementerian Agama KPU
2	TOT	71 Sekolah	78 sekolah	0 sekolah	89 sekolah	200 sekolah	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga / Balai Pendidikan Menengah Kantor Kementerian Agama KPU
3	Bimbingan Teknis	71 sekolah	78 sekolah	0 sekolah	89 sekolah	200 sekolah	KPU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga/ Balai Pendidikan Pemda/ Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Pelaksanaan Pemilos	71 sekolah	78 sekolah	0 sekolah	89 sekolah	200 sekolah	KPU Kantor Kementerian Agama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga/ Balai Pendidikan Pemda/ Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Monitoring Evaluasi	71 sekolah	78 sekolah	0 sekolah	89 sekolah	200 sekolah	KPU Kantor Kementerian Agama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga/ Balai Pendidikan Pemda/ Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan pembinaan politik generasi muda dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, TOT, bimbingan teknis, pelaksanaan pemilihan OSIS (pemilos) dan monitoring evaluasi yang melibatkan KPU, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Balai Pendidikan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun Pada tahun 2020 kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan protokol kesehatan.

Selain pemilih pemula yang menjadi fokus utama dengan TOT pemilos, kelompok rentan seperti kelompok difabel dan kelompok perempuan yang ada di Kabupaten Bantul juga menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendidikan Politik. Tahun 2022 sasaran kelompok difabel dan perempuan masih belum optimal dalam pelaksanaannya sehingga untuk tahun anggaran 2023 direncanakan untuk diberikan porsi yang lebih banyak. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.306 Kegiatan Pendidikan politik di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Kegiatan	Sasaran					Narasumber
	2018	2019	2020	2021	2022	
Sosialisasi	600 orang (disabilitas 5%, Perempuan 15%)	1200 orang (disabilitas 5%, Perempuan 15%)	300 orang (disabilitas 5%, Perempuan 15%)	1.650 orang (disabilitas 5%, Perempuan 20%)	1.500 orang (disabilitas 5%, Perempuan 20%)	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga /Balai Pendidikan Menengah - Kantor Kementerian Agama - KPU

b. Partisipasi Pemilih dalam PEMILU

Tabel 2.307 Persentase Pemilih yang Berpartisipasi

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pengguna Hak Pilih	-	644.079	567.557	-	-
Jumlah Pemilih	-	732.805	708.351	-	-
Persentase Pemilih yang Berpartisipasi (%)	n/a	87,89	80,12	n/a	n/a

Sumber: KPU Bantul diolah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

Keterangan : 2018, 2021 dan 2022 tidak diselenggarakan pemilu

Tahun 2018, 2021 dan 2022 tidak dilaksanakan pemilihan umum (presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD) maupun pemilihan kepala daerah sehingga tidak ada parameter yang dapat diukur.

Pada tahun 2019 partisipasi masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum mencapai 87,89%. Hal tersebut dapat dicapai karena pada tahun 2019 diselenggarakan pemilihan umum (presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD) dan kesadaran masyarakat yang mempunyai hak pilih yang tinggal di Bantul cukup tinggi sehingga dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum meskipun bukan warga Kabupaten Bantul.

Penurunan partisipasi masyarakat terjadi pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Hal tersebut disebabkan antara lain karena pemilihan kepala daerah diselenggarakan pada situasi pandemi Covid-19 dengan protokol kesehatan. Kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya pemilih yang tidak dapat mendatangi TPS karena sedang menjalani karantina akibat terkonfirmasi Covid-19. Pemilihan kepala daerah juga belum diantisipasi menggunakan sarana teknologi informasi.

Tabel 2.308 Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2020

No	Kapanewon	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pemilih	Persentase Pemilih yang Berpartisipasi
1	Srandakan	19.055	23.878	79,80
2	Sanden	20.484	24.775	82,68
3	Kretek	20.244	23.791	85,09
4	Pundong	23.282	27.380	85,03
5	Bambanglipuro	25.921	31.774	81,58
6	Pandak	32.762	39.796	82,32
7	Pajangan	23.479	27.630	84,98
8	Bantul	38.929	47.829	81,39
9	Jetis	36.822	43.826	84,02
10	Imogiri	39.819	48.052	82,87
11	Dlingo	26.557	30.950	85,81

No	Kapanewon	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pemilih	Persentase Pemilih yang Berpartisipasi
12	Banguntapan	56.875	79.168	71,84
13	Pleret	29.684	35.187	84,36
14	Piyungan	32.140	38.643	83,17
15	Sewon	56.915	72.994	77,97
16	Kasihan	56.326	76.741	73,40
17	sedayu	28.263	35.937	78,65
Jumlah		567.557	708.351	80,12

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2023

Dari tabel diatas Kapanewon yang perlu mendapatkan perhatian dalam Partisipasi Pemilih di Masyarakat dalam Pemilu antara lain:

1. Kapanewon Banguntapan
2. Kapanewon Kasihan
3. Kapanewon Sewon
4. Kapanewon Sedayu
5. Kapanewon Srandakan

Untuk mengantisipasi pelaksanaan Pemilu di Tahun 2024 kami banyak memberikan perhatian daerah-daerah tersebut untuk diberikan pendidikan politik.

Sebagai daerah perbatasan dengan Kabupaten lain tentu ini juga menjadi perhatian kita bersama dalam memberikan antisipasi terjadinya konflik dalam Pemilu.

c. Organisasi Masyarakat (Ormas)

Pada tahun 2022 jumlah keseluruhan ormas yang ada di Bantul adalah 18.

Tabel 2.309 Jumlah ormas yang terverifikasi di Kabupaten Bantul tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ormas yang terverifikasi	8 Ormas	18 Ormas	30 Ormas	40 Ormas	46 ormas
2	Jumlah ormas keseluruhan	180	180	182	183	185
3	Persentase ormas yang terverifikasi	4 %	10 %	16 %	21,85 %	24,86 %

Sumber: Bakesbangpol, 2023

Dari Data diatas dapat kami sampaikan bahwa jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bantul yang sudah terdaftar di Bakesbangpol Bantul sejumlah 185 Organisasi, dari sekian itu yang sudah terverifikasi sampai dengan tahun 2022 sebanyak 46 organisasi atau sekitar 24,86%, untuk meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bantul dalam Pembangunan dan agar terpantaunya kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Masyarakat perlu diadakan verifikasi Organisasi Kemasyarakatan. Dalam hal ini Bakesbangpol Bantul pada tahun 2023 ini telah merencanakan kegiatan tersebut dari sisa Organisasi Kemasyarakatan yang belum terverifikasi bekerjasama dengan Tim Terpadu Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Bantul yang diketuai oleh Bapak Bupati Bantul H. Halim Muslih, Tim ini akan bekerja secara maksimal sehingga dapat menghasilkan data yang valid di Kabupaten Bantul tentang Organisasi Kemasyarakatan termasuk Organisasi yang belum melaporkan keberadaannya di Bakesbangpol tetapi telah melaksanakan kegiatan di Kabupaten Bantul ini.

Tabel 2.310 Organisasi Masyarakat (Ormas) yang terverifikasi pada Tahun 2022

No	Nama	Alamat	Bidang	Pengurus	Nomor		
1	Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan (JPKP)	Jl. Parangtritis Km. 20 Karangayom / Gedangan RT.02, Panjangrejo, Pundong Bantul	Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Hukum, UMKM	1. Ketua: Surajiman 2. Sekretaris: Muh Ridwan Sayidi 3. Bendahara: Parsinah	35/Reg/Bakesbangpol/V/2022	Nomor: 01 tgl 06 Mei 2015	AHU.0001662.AH.01.07 Tahun 2015
2	Yayasan Sosial Kemanusiaan Semesta Utama	Gedongsari RT.05, Wijirejo, Pandak, Bantul, DIY	Sosial, Kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan	1. Ketua: Subaryanto, AMK 2. Sekretaris: Solihin 3. Bendahara: Jamhari	36/Reg/VII/Bakesbangpol/VIII/2022	Nomor: 15 2020	AHU.2477.AH.01.04 Tahun 2012
3	Perkumpulan ERVIVI MUSIK ISTIMEWA JOGJAKARTTA	Jl. Perintis 2 No.05 RT.02 Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, DIY	Seni dan Budaya	1. Ketua: Yohanes Jama Kolani 2. Sekretaris: Bk Budiarti 3. Bendahara: Eka Fitriani	37/Reg/VII/Bakesbangpol/X/2022	No. 42 Tgl. 22 Agustus 2002	AHU.0008777.AH.01.07 Tahun 2022

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, 2023

d. Kerukunan Antar Umat Beragama

Potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul masih ada mengingat beragamnya agama yang dianut masyarakat. Kasus intoleransi merupakan isu sensitif di masyarakat sehingga menjadi perhatian untuk penanganannya. Berikut jumlah kasus intoleransi yang terjadi pada tahun 2018-2022.

Tabel 2.311 Kasus Intoleransi Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kasus Intoleransi	1	3	0	0	0

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, 2023

Tahun 2018 terdapat satu kasus intoleransi yaitu adanya perusakan properti yang akan digunakan warga masyarakat pantai di Parangtritis dalam melaksanakan Labuhan sesaji dalam rangka sedekah laut, pelaku pengrusakan adalah kelompok masyarakat yang tidak menghendaki kegiatan tersebut terlaksana sehingga melakukan perusakan. Kasus ini diselesaikan dengan musyawarah antara pelaksana kegiatan dengan warga.

Tahun 2019 terdapat tiga kasus intoleransi yaitu

1. Penolakan warga pedukuhan Karet, Pleret, Pleret, Bantul terhadap pendatang yang mengontrak dan beragama non muslim (Kristiani). Hal ini terjadi karena ada peraturan di Pedukuhan yang tidak mengizinkan non muslim menetap di pedukuhan tersebut. Setelah dilakukan mediasi permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan adanya kesepakatan mencabut peraturan pedukuhan.
2. Penolakan warga terhadap Gereja GPDI di Sedayu, permasalahan muncul saat Gereja GPDI mengurus pemutihan IMB. Permasalahan bisa diselesaikan dengan kesepakatan tidak diadakan kegiatan peribadatan sementara di tempat tersebut dan lokasi pendirian gereja dipindahkan dengan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Pembubaran ritual keagamaan di Pedukuhan Mangir Sendangsari Pajangan Bantul. Permasalahan terjadi karena adanya kegiatan ritual yang mengundang pemeluk agama lain. Permasalahan bisa diselesaikan

dengan mediasi yang menghasilkan kesepakatan bahwa selanjutnya kegiatan tersebut tidak diijinkan mengundang pemeluk agama lain.

Tahun 2020-2022 tidak terjadi kasus intoleransi di Kabupaten Bantul. Upaya upaya badan kesbangpol Bantul dalam menekan angka Intoleransi bersama dengan Tim Penanganan Konflik sosial maupun keagamaan yang sudah ada seperti FKDM, FKUB, FPK. Bakesbangpol Bantul telah memberikan ruang bagi tokoh masyarakat maupun stakeholder di Kapanewon se kabupaten Bantul untuk melaksanakan Dialog keagamaan guna mencegah terjadinya benturan di masyarakat antar tokoh keagamaan. Selain itu kami juga rutin melakukan koordinasi kepada kalurahan maupun dusun secara tertutup dengan intelligent yang ada di tingkat Kabupaten Bantul.

Dengan kerjasama antar Intelegent yang ada di Kabupaten Bantul dapat membantu informasi dari bawah apa yang menjadi permasalahan-permasalahan sehingga tim kami bisa memberikan antisipasi agar sebuah permasalahan tidak menjadi suatu kasus yang dapat menimbulkan Intoleransi di masyarakat.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Tabel 2.312 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)
Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Bantul	15.386	15.636	15.517	15.545	16.002
D.I Yogyakarta	13.946	14.394	14.015	14.111	14.482
Nasional	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengeluaran rata-rata penduduk Kabupaten Bantul di atas DIY dan Nasional. Pada tahun 2022,

pengeluaran perkapita Kabupaten Bantul adalah Rp.16.002.000/kapita/tahun, DIY Rp.14.482.000/kapita/tahun dan Nasional Rp11.479.000/kapita/tahun.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2-280 Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No.	Jenis Pengeluaran Konsumsi	Persentase Pengeluaran Konsumsi (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Non Makanan	60,60	58,65	57,63	57,29	57,29
2	Makanan	39,40	41,35	42,47	42,70	42,70

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase pengeluaran non makanan penduduk Bantul lebih dominan dibandingkan pengeluaran makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Bantul cukup baik.

2.1.4.1.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), di mana It menunjukkan fluktuasi barang-barang yang dikonsumsi petani termasuk barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Sektor pertanian yang dicakup dalam penyusunan Nilai

Tukar Petani (NTP) meliputi lima subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat (TPR), subsektor peternakan, dan subsektor perikanan.

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Tabel 2.313 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
NTP Kabupaten Bantul	103,16	103,75	101,13	97,38	98,40
NTP D.I Yogyakarta	100,76	103,41	101,12	97,38	98,40
NTP Nasional	102,30	103,36	101,65	104,64	107,39

Sumber: BPS, 2022

Dari tabel di atas menunjukkan perkembangan NTP Kabupaten Bantul dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 NTP Kabupaten Bantul lebih dari 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi.

Tahun 2021 dan 2022 data NTP Kabupaten Bantul tidak dihitung. Untuk mengetahui NTP menggunakan NTP DI Yogyakarta. Nilai NTP tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 yaitu 98,40. Meski mengalami kenaikan, NTP Kabupaten Bantul masih di bawah NTP Nasional. $NTP < 100$, berarti harga produksinya naik lebih kecil dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi, pendapatan petani turun.

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

2.1.4.2.1 Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menentukan kebijakan bahwa *e-Government* merupakan salah satu pengungkit percepatan reformasi birokrasi, hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber Province*. Kebijakan ini berarti pemerintah Kabupaten Bantul memposisikan

urusan komunikasi dan informatika sebagai komponen terpenting untuk menuju pemerintahan berbasis elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan *e-Government* menitik beratkan pada layanan unggulan *Digital Government Services* (DGS). Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik maka kebijakan ini didukung oleh sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet yang baik.

Berkenaan dengan hal tersebut maka telah dilakukan penyajian informasi dan aplikasi *e-Gov* melalui *website*, serta 24 sistem informasi dan 68 aplikasi baik yang bersifat *intranet*, *desktop*, maupun *online* sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.314 Sistem Informasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	No.	Nama aplikasi
2018	1	Aplikasi E-Retribusi
	2	Aplikasi Kampung KB
	3	Aplikasi Pengembangan E-Lapor
	4	Aplikasi TIK
	5	Aplikasi Autentifikasi
	6	Jelajah Bantul
	7	Sigadis Pentul - SiPenTul
	8	Sistem Informasi Administrasi Puskesmas (SIAP)
	9	Sistem Informasi Manajemen Desa
	10	Survei Kepuasan Masyarakat
2019	1	eSurat Bantul
	2	Biss (Bantul Intergreated Siren System)
	3	Pembayaran E-retribusi Kendaraan Bermotor.
	4	Dukcapil Smart.
	5	Tante Sosialita (Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga Solusi Sehat Alami Untuk Kita)
	6	Garpu Salad (Gerakan Peduli Kesehatan Sulang Kidul)
	7	Sijawara Joss (Pasien Sakit Jiwa Sehat Sejahtera Jenius Olah Sampah)
	8	Geplak Manis Dibawa Andong (Gerakan Pemberantasan TB Bersama Warga Kec. Pundong)
	9	Sijempol (Sistem Jemput Bola)
2020	1	Aplikasi Kapung KB
	2	Aplikasi Pengelolaan Zakat Daerah
	3	Aplikasi Autentifikasi terpusat
	4	Aplikasi Sarana TIK
	5	Pengembangan Lapor Bantul (e-lapor)
	6	Pengembangan DGS Layanan Kesehatan
	7	Soerban (Aplikasi E-Surat Bantul)
	8	Pacoban (Pemantauan Pendetang dan Kegiatan di Kabupaten Bantul)
2021	1	Aplikasi Ikutvaksin
	2	Aplikasi Jaring Aspirasi Masyarakat
	3	Aplikasi E-Surat Bantul Mobile Based
	4	Aplikasi Bantulpedia
	5	Aplikasi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Tahun	No.	Nama aplikasi
	6	Aplikasi eRetribusi Menara Telekomunikasi
	7	Aplikasi Metadata Statistik
	8	Aplikasi Whistle Blowing System
	9	Aplikasi eAudit
	10	Aplikasi Simbersama DLH
	11	Aplikasi Bantul Online Shop
	12	Aplikasi Siapkesos Dinsos
	13	Portal Bantulkab
	14	Portal Smartcity
	15	Portal Covid-19
2022	1	Government Service Bus (GSB) Kabupaten Bantul
	2	Web Profil Perangkat Daerah (Badan, Dinas, Kapanewon, Puskesmas, dan Lembaga)
	3	Aplikasi Makam Kotagede
	4	SISBANYANKES
	5	Aplikasi Visualisasi Data Portal SDI
	6	EVOSS
	7	SIDAMESRA
	8	Jelajah Bantul
	9	Web GIS Daerah Irigasi
	10	SIMDATA PARIWISATA
	11	LeontinMAS Legalisir dukcapil
	12	Bukti Potong PPh 21
	13	Aplikasi Whistle Blowing System
	14	Aplikasi eAudit
	15	OJS (Open Journal System/ Jurnal Riset Daerah)
	16	Aplikasi Sistem Informasi Zona Kawasan Menara Telekomunikasi (Siszora)
	17	DIREKTORI KEBUDAYAAN
	18	Aplikasi Kabupaten Layak Anak (KLA)
	19	Dana Insentif Kalurahan
	20	Computer Based Test (CBT) Dikpora

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2023

Selain website dan aplikasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, juga diterapkan sarana komunikasi dan informasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, yaitu berupa pemanfaatan media telematika, seperti penggunaan aplikasi sistem informasi, SMS *center*, *website* daerah yaitu www.bantulkab.go.id, bantulbiz.com, bantulcraft.com, informasi SKPD melalui subdomain SKPD, Warung Informasi dan Teknologi (Warintek), fasilitas akses jaringan internet dan intranet SKPD dan *telecenter*.

Peningkatan pembangunan infrastruktur jaringan internet dan intranet OPD Pemerintah Kabupaten Bantul dapat dilihat dengan pembangunan jaringan *fiber optic* sepanjang 43,95 km yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, Kapanewon, dan pemerintah tingkat kalurahan serta puskesmas.

2.1.4.2.2 Partisipasi Lembaga Swasta melalui CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bentuk tanggung jawab organisasi atau perusahaan terhadap masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Kabupaten Bantul, CSR telah memberikan andil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMN, lembaga keuangan non BUMN, instansi kesehatan, instansi pendidikan, dan perusahaan umum yang ada di Kabupaten Bantul telah banyak mengalokasikan dana CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengapresiasi dan mendokumentasikan bantuan dana CSR tersebut, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Bantul setiap tahun menerbitkan buku CSR Membangun Bantul.

Pada tahun 2022 tercatat ada 45 instansi/lembaga dan perusahaan yang memberikan dana CSR kepada masyarakat Bantul, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.315 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Nama Perusahaan	Bidang Kegiatan	Jumlah
1	BANK BRI KANCA BANTUL	Sosial, Kesehatan, Lingkungan, Pendidikan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp2.467.700.000
2	RSU PKU Muhammadiyah Bantul	Sosial, Kesehatan, Pendidikan	Rp1.303.308.409
3	PT PLN UP 2 Yogyakarta	Sosial, Pendidikan, Lingkungan	Rp1.176.023.798
4	PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu	Kesehatan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp1.074.000.000
5	BANK BPD DIY CABANG BANTUL	Lingkungan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp1.049.850.000
6	PAMELLA TIGA SUPERMARKET	Sosial dan Pendidikan	Rp725.505.000
7	BMT Artha Amanah Sanden	Sosial, Kesehatan, Lingkungan, Pendidikan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp723.318.809
8	Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY	Sosial, Kesehatan, Lingkungan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp635.980.000
9	PT MADUBARU	Sosial, Kesehatan, Lingkungan, Pendidikan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp539.866.750
10	BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA	Sosial	Rp408.500.000
11	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kesehatan, pendidikan	Rp398.246.182
12	PT SURADI SEJAHTERA RAYA	Sosial, lingkungan	Rp375.684.575
13	PT. Busanaremaja Agracipta	Sosial, Kesehatan, Lingkungan	Rp236.994.940

No	Nama Perusahaan	Bidang Kegiatan	Jumlah
14	KSPPS BMT EL-BUMMI 381 BANTUL	Sosial, Pendidikan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp172.449.700
15	PT. Anggun Kreasi Garmen	Sosial, Pendidikan	Rp161.889.627
16	PT ANGKASA PURA I KANTOR YIA	Sosial	Rp160.000.000
17	Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia (Rs UII)	Kesehatan, Sosial	Rp148.400.000
18	PT SINAR KENCANA MAKMURJAYA	Sosial	Rp137.509.100
19	Mulia Toserba Bantul	Sosial	Rp130.589.400
20	PT. Busana Remaja Agracipta Giwangan	Sosial, Pendidikan, Lingkungan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp123.466.300
21	PT. Bayu Utama	Sosial	Rp120.356.500
22	PT. Ameya Livingstyle Indonesia	Kesehatan, Sosial	Rp113.687.858
23	PT. Indomarco Prismatama	Pendidikan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp112.000.000
24	PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 6	UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp67.910.000
25	KSP Adil Yogyakarta	Sosial, Pendidikan, Kesehatan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp50.709.500
26	KSPPS BMT NITI TENTREM NUGRAHA (NITEN)	Sosial	Rp49.274.286
27	KSPPS BMT Mitrama	Sosial	Rp48.773.900
28	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari	Lingkungan	Rp48.004.200
29	KSPPS BMT Assalam	Sosial, Pendidikan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp46.531.400
30	BMT INSAN SADAR USAHA	Sosial	Rp42.368.734
31	KSPPS BMT AD DA'WAH	Sosial, Pendidikan	Rp36.931.961
32	PT OUT OF ASIA	Sosial, Pendidikan	Rp33.700.000
33	KSPPS BMT MOJO BANGUN SENTOSA	Sosial, Lingkungan	Rp31.500.000
34	PT IDE STUDIO INDONESIA	Sosial	Rp31.200.000
35	PT. Telkom Indonesia	Pendidikan	Rp25.000.000
36	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI)	Lingkungan, UMKM dan Ekonomi Kreatif	Rp25.000.000
37	Rumah Sakit Santa Elisabeth	Sosial, Kesehatan	Rp20.700.000
38	PT IGP INTERNASIONAL BANTUL	Sosial	Rp17.275.000
39	Toserba dan Swalayan Purnama	Sosial	Rp16.000.000
40	GRAND ROHAN JOGJA	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	Rp14.600.000
41	PT. PRODUK REKREASI (KIDS FUN)	Sosial, Kesehatan	Rp14.137.000
42	CV. Jawa Classic Aesthetics	Sosial	Rp10.000.000
43	PT. BPR Bank Bantul	Lingkungan, Pendidikan, Kesehatan	Rp8.750.000
44	ROS IN HOTEL	Sosial, Pendidikan, Lingkungan	Rp5.450.000
45	KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH AN-NAHDLAH	Sosial	Rp5.270.770
TOTAL			Rp13.144.413.699

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2021, data sementara tercatat ada 57 instansi/lembaga dan perusahaan yang memberikan dana CSR kepada masyarakat Bantul, meningkat dari tahun 2020. Data CSR 2021 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.316 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Nama Perusahaan	Bidang Kegiatan	Jumlah
1	Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY	Sosial, Ekonomi	Rp 1.580.220.000
2	PLN UP 3 YOGYAKARTA	Sosial, Pendidikan, Lingkungan	Rp 1.565.350.000
3	PT BANK BPD DIY	Sosial, Pendidikan, Ekonomi	Rp 1.185.000.000
4	PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu	Ekonomi, Lingkungan	Rp 973.000.000
5	RS Santa Elisabeth	Pendidikan	Rp 935.000.000
6	PT MADUBARU	Sosial, Ekonomi	Rp 827.029.900
7	BMT Artha Amanah	Sosial, Pendidikan, Ekonomi	Rp 736.028.100
8	Bank BRI Kantor Cabang Bantul	Sosial, Ekonomi	Rp 449.181.818
9	RS PKU Bantul	Sosial, Pendidikan	Rp 434.931.200
10	BMT Projo Artha Sejahtera	Sosial	Rp 419.413.800
11	BANK MANDIRI KCP BANTUL	Kesehatan	Rp 200.000.000
12	GOJEK	Kesehatan	Rp 175.000.000
13	BMT EL BUMMI 381	Sosial, Pendidikan, Ekonomi	Rp 138.915.900
14	KSP Koperasi Kredit Adil Dlingo	Sosial, Lingkungan	Rp 135.245.350
15	PT SURADI SEJAHTERA RAYA	Sosial, Kesehatan, Hukum Tata Kelola	Rp 110.200.000
16	CV Jawa Classic Aesthetics Furniture & Craft	Ekonomi	Rp 110.000.000
17	PT Indomarco Prismaatama	Sosial, Pendidikan	Rp 109.929.000
18	BNI KC Yogyakarta	Sosial	Rp 102.315.000
19	PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yk	Ekonomi	Rp 100.000.000
20	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA	Sosial, Pendidikan, Lingkungan	Rp 98.552.318
21	PT Anggun Kreasi Garmen	Sosial, Pendidikan, Lingkungan	Rp 97.098.376
22	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko	Sosial, Pendidikan	Rp 93.210.000
23	BMT INSAN SADAR USAHA	Sosial, Pendidikan	Rp 86.350.000
24	PT Yogyakarta Tembakau Indonesia	Sosial, Pendidikan	Rp 85.825.500
25	PT. Busanaremajaja Agracipta	Sosial, Lingkungan	Rp 70.307.900
26	BMT Ad Da'wah	Sosial. Pendidikan	Rp 67.507.100
27	BMT NITI TENTREM NUGRAHA (NITEN)	Sosial, Pendidikan	Rp 66.514.050
28	BMT Mitrama	Sosial	Rp 63.775.400

No	Nama Perusahaan	Bidang Kegiatan	Jumlah
29	PT BPR Bank Bantul	Ekonomi, Pendidikan	Rp 55.120.000
30	BMT MOJO BANGUN SENTOSA	Sosial, Ekonomi	Rp 55.000.000
31	GRAND ROHAN JOGJA	Sosial	Rp 52.217.000
32	PT Angkasa Pura I KC YIA	Ekonomi	Rp 50.000.000
33	PT Bank KB Bukopin	Sosial	Rp 50.000.000
34	PT Ameya Livingstyle Indonesia	Sosial, Pendidikan, Lingkungan	Rp 47.290.400
35	PT ADI SATRIA ABADI	Sosial	Rp 46.200.000
36	BMT Assalam	Sosial, Pendidikan, Ekonomi	Rp 42.560.700
37	BMT Sabilul Muhtadin	Sosial	Rp 32.907.000
38	PT Sinar Kencana Makmurjaya	Sosial	Rp 27.962.500
39	PT Ide Studio Indonesia (Karpenter)	Sosial, Pendidikan	Rp 27.750.000
40	PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	Sosial, Lingkungan, Hukum tata kelola	Rp 25.557.000
41	PAMELA SUPERMARKET	Sosial, Pendidikan	Rp 20.350.000
42	Bank Mandiri Taspen Bantul	Sosial	Rp 20.000.000
43	BMT RIZQI BAROKAH	Sosial, Pendidikan	Rp 19.778.400
44	PT IGP Internasional	Kesehatan	Rp 12.431.863
45	Kamar Dagang dan Industri Kab. Bantul	Sosial	Rp 11.150.000
46	KSP Graha Mandiri	Sosial	Rp 10.000.000
47	BMT EL BUMMI 373	Sosial	Rp 7.905.500
48	Kopdit Amrih Makmur	Pendidikan	Rp 7.250.000
49	BMT Barokah	Sosial	Rp 7.113.400
50	PT Anindya Mitra Internasional	Sosial, Ekonomi	Rp 6.910.000
51	PT Cahaya Mulia Persada Nusa	Sosial	Rp 5.875.000
52	KSPS AN NAHDLAH	Sosial	Rp 4.362.015
53	BANK WOORI SAUDARA	Sosial, Pendidikan	Rp 3.550.000
54	KSU Amanah Insani Makmur	Sosial	Rp 3.000.000
55	PT Bank Panin Dubai Syariah	Sosial	Rp 2.500.000
56	Kopwan BMT An-Nisa	Sosial	Rp 2.320.000
57	KSPPS Kube Sejahtera 23	Sosial	Rp 1.000.000
TOTAL			Rp 11.673.961.490

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2022

Program CSR diarahkan untuk mendukung Program Prioritas Daerah, yaitu: pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanganan sampah, peningkatan sektor unggulan (pariwisata, industri dan pertanian) dan Kabupaten Layak Anak (KLA). Pelaksanaan CSR mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Dalam pelaksanaan CSR di Kabupaten Bantul terdapat Forum Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan Perusahaan masa bakti tahun 2020-2023 berdasarkan SK Bupati Bantul Nomor 270 tahun 2020 dan Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan SK Bupati Bantul Nomor 51 tahun 2022.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.317 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021

No	Jenis Kriminal	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus Narkoba	78	95	98	78
2	Jumlah kasus Pembunuhan	2	2	2	3
3	Jumlah Kejahatan Seksual	15	41	43	36
4	Jumlah kasus Penganiayaan	81	85	87	90
5	Jumlah kasus Pencurian	281	362	375	307
6	Jumlah kasus Penipuan	94	122	125	162
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	1
a	Total Jumlah Tindak Kriminal Tertangani Selama 1 Tahun	551	707	730	677
b	Jumlah Penduduk	939.718	949.325	954.706	956.513
	Angka Kriminalitas ((a/b) x 100) (Permendagri 18/2019)	0,055	0,074	0,076	0,071
	Angka Kriminalitas ((a/b) x 10.000) (Permendagri 86/2017)	5,86	7,45	7,65	7,08

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul diolah, 2022

Dari data di atas, pada tahun 2021 terdapat 7 tindakan kriminal tiap 10.000 penduduk, menurun dari tahun 2020. Kriminalitas didominasi kasus pencurian dan penipuan. Mulai tahun 2022 Satpol PP Kabupaten Bantul sudah tidak menghitung angka kriminalitas karena angka kriminalitas bukan

lagi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu oleh Satpol PP. Berikut merupakan Angka Kriminalitas yang dihitung dari data Polres Kabupaten Bantul.

Tabel 2.318 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2022

	Uraian	2022
a	Jumlah Kasus Kejahatan	1.577
b	Jumlah Penduduk	964.245
	Angka Kriminalitas ((a/b) x 10.000) (Permendagri 86/2017)	16,35

Sumber: Polres Kabupaten Bantul diolah, 2023

Angka kriminalitas tahun 2022 naik drastis dibandingkan tahun 2021 karena terdapat perbedaan perhitungan jenis kejahatan. Tahun 2018-2021 kejahatan yang dihitung hanya kasus narkoba, kasus pembunuhan, kejahatan seksual, kasus penganiayaan, kasus pencurian, kasus penipuan dan kasus pemalsuan uang, sedangkan pada tahun 2022 kejahatan sudah mencakup 103 jenis kejahatan.

2.1.4.3.2 Demonstrasi

Salah satu yang harus dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif adalah demonstrasi/unjuk rasa. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.319 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bidang Ekonomi	1	2	5	1	1
2	Bidang Politik	3	1	1	1	4
3	Bidang Lainnya	2	4	1	2	3
4	Mogok Kerja	6	-	2	-	-
Jumlah Demonstrasi		12	7	9	4	8

Sumber: Polres Kabupaten Bantul, 2023

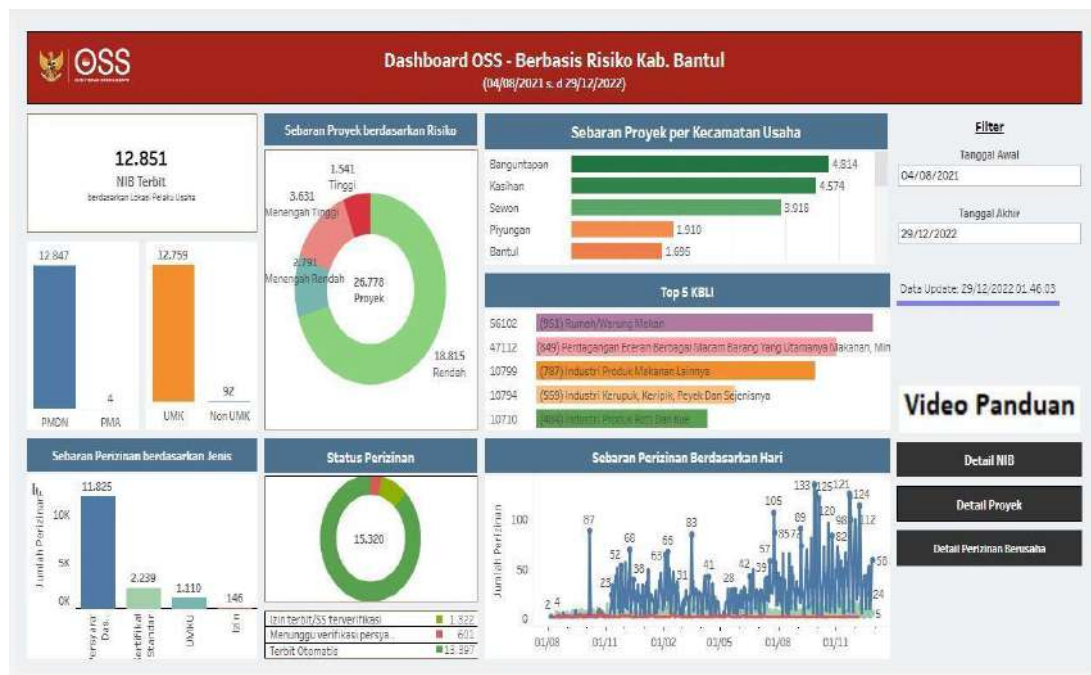
2.1.4.3.3 Kemudahan Perizinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa

penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk. Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif. Para pelaku usaha, investor dan calon investor mengurus izin usaha secara *online* tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, DPMPTSP Kabupaten Bantul selama periode 04 Agustus 2021 sampai dengan 29 Desember 2022 dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu melalui implementasi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara *Online* terdiri dari telah terbit Nomor Induk Berusaha/NIB sejumlah 12.851.



Sumber data : <https://oss.go.id>

Catatan keterangan:

1. OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Online
2. Setiap Pelaku Usaha memiliki satu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa digunakan untuk lebih dari satu kegiatan usaha

Gambar 2.52 Statistik Penerbitan Nomor Induk Berusaha/NIB (04 Agustus 2021 s.d 29 Desember 2022)

Sesuai kewenangan daerah melalui izinonline.bantulkab.go.id terbit sejumlah legalitas yang terdiri dari beberapa jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Terdapat 36 jenis izin, yaitu:

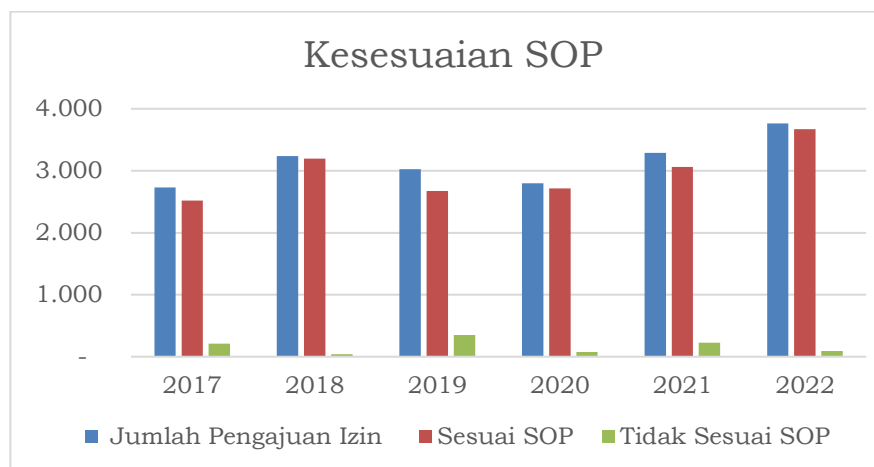
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung
3. Izin Mendirikan Rumah Sakit
4. Izin Operasional Puskesmas
5. Izin Operasional Rumah Sakit (Milik Daerah)
6. Izin Pengumpulan Uang atau Barang
7. Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi
8. Izin Praktik Ahli Teknis Elektromedis
9. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
10. Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)
11. Izin Praktik Apoteker (SIPA)
12. Izin Praktik Bidan

13. Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan
14. Izin Praktik Fisikawan Medis
15. Izin Praktik Fisioterapis
16. Izin Praktik Okupasi Terapis
17. Izin Praktik Ortosis Prostesis
18. Izin Praktik Penata Anestesi
19. Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat
20. Izin Praktik Perawat
21. Izin Praktik Perekam Medis
22. Izin Praktik Psikologi Klinis
23. Izin Praktik Radiografer
24. Izin Praktik Refraksionis Optisien
25. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
26. Izin Praktik Tenaga Gizi
27. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan
28. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
29. Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut
30. Izin Praktik Terapis Wicara
31. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Untuk Kegiatan Non Berusaha
32. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter
33. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Hewan
34. Surat Keterangan Penelitian
35. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
36. Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial

Terdapat *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang harus dipenuhi dalam penerbitan 36 jenis izin di atas. Jika sudah memenuhi SOP maka akan akan diterbitkan dan sebaliknya. Rekapitulasi penerbitan izin yang sesuai SOP sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.320 Rekapitulasi Kesesuaian SOP dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022

NO	Tahun	Jumlah Pengajuan Izin	Sesuai SOP						Tidak Sesuai SOP					
			Terbit		Ditolak		Total		Terbit		Ditolak		Total	
			Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen
1	2017	2.729	2.319	84,98	69	2,53	2.519	92,30	183	6,71	13	0,48	209	7,66
2	2018	3.236	3.058	94,50	92	2,84	3.195	98,73	25	0,77	12	0,37	41	1,27
3	2019	3.026	2.491	82,32	116	3,83	2.675	88,40	306	10,11	39	1,29	351	11,60
4	2020	2.796	2.657	95,03	59	2,11	2.716	97,14	75	2,68	5	0,18	79	2,83
5	2021	3.289	3.020	91,82	41	1,25	3.061	93,07	223	6,78	5	0,15	228	6,93
6	2022	3.764	3.660	97,24	13	0,35	3.673	97,58	90	2,39	1	0,03	91	2,42

Sumber: izinonline.bantulkab.go.idSumber: izinonline.bantulkab.go.id

Gambar 2.53 Kesesuaian SOP dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022

Data penerbitan IMB selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.321 Penetapan IMB per Satuan Bangunan Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021

No.	Kapanewon	2018	2019	2020	2021
1	Kasihan	701	504	175	7
2	Banguntapan	270	310	66	6
3	Sewon	174	242	36	15
4	Pleret	26	48	6	7
5	Bantul	106	121	154	12
6	Sedayu	141	318	317	37
7	Pajangan	116	28	366	75
8	Piyungan	49	56	342	37
9	Jetis	41	126	88	16
10	Bambanglipuro	19	14	18	18
11	Srandakan	9	17	6	319
12	Pandak	16	27	26	34
13	Imogiri	11	17	45	317
14	Kretek	8	11	11	144
15	Dlingo	12	8	18	692
16	Pundong	6	11	11	165
17	Sanden	13	4	5	324
Jumlah		1.718	1.862	1.690	2.225

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

Penerbitan IMB pada tahun 2021 terdapat peningkatan signifikan pada tiga wilayah kapanewon, yaitu Kapanewon Dlingo, Sanden, Imogiri dan Srandakan. Peningkatan ini didominasi IMB untuk rumah tinggal. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan pembangunan perumahan di tiga wilayah kapanewon tersebut.

Dalam perkembangannya pengaturan Retribusi Daerah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu perubahan nomenkalatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perubahan dalam perhitungan tarif Retribusi PBG.

2.1.4.3.4 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perijizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel 2.322 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha/Investasi di Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah
1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha;
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Kasihan Tahun 2018-2038;
9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Peraturan Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Bantul, 2022

2.1.4.4 Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas SDM yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah

pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah.

Pendidikan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja agar dapat lebih produktif. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena pendidikan baik formal maupun non formal seseorang diharapkan memiliki kemampuan untuk lebih memahami dalam mengadaptasi perubahan-perubahan di lingkungan kerja dengan lebih cepat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan baik formal maupun non formal akan berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas kerja seorang karyawan dari segi kuantitas. Karyawan yang tingkat pendidikannya tinggi akan mempunyai keterampilan dalam pelaksanaan kerja sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kerja.

Tabel 2.323 Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Belum/Tidak Sekolah	18,7	18,93	18,97	19,28	19,23
2	Belum Tamat SD	8,02	8,06	7,96	7,77	7,59
3	Tamat SD/Sederajat	20,84	20,14	19,3	18,68	18,26
4	Tamat SMP/Sederajat	14,79	14,74	14,94	14,97	15,07
5	Tamat SMA/Sederajat	27,98	28,18	28,57	28,72	28,99
6	DI/DII	0,75	0,73	0,73	0,71	0,7
7	DIII/Sarjana Muda	2,13	2,17	2,21	2,25	2,28
8	D IV/ S I	6,21	6,44	6,69	6,95	7,18
9	S II	0,52	0,56	0,59	0,62	0,65
10	S III	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2022 jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantul paling banyak adalah lulusan SMA/ Sederajat yaitu sebesar 279.556 jiwa atau 28,99%, kemudian belum/tidak sekolah menempati peringkat kedua sebesar 19,23%, dari jumlah penduduk di Kabupaten Bantul.

Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia.

2.1.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial.

Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Tabel 2.324 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bantul Tahun 2018–2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	198.537	198.900	201.101	200.543	199.973
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	91.837	94.847	91.539	92.059	94.925
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1+2)	290.374	294.965	292.640	292.602	294.898
4	Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun	649.344	654.360	662.066	663.911	669.347
5	Rasio ketergantungan (3/4)	44,72	45,08	44,20	44,07	44,06

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2023

Rasio ketergantungan di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sebesar 44,06. Hal ini menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bantul harus menanggung 44 orang penduduk yang non produktif. Rasio ketergantungan tahun 2022 turun dibandingkan tahun 2021 (44,07) dan masih termasuk kategori tinggi. Oleh sebab itu untuk mengurangi dampak rasio ketergantungan diharapkan pemerintah dapat membentuk

SDM unggul dengan meningkatkan kualitas Pendidikan mulai dari usia dini, pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat serta pemberdayaan bagi lansia.

2.2 Layanan Keistimewaan

2.2.1 Urusan Keistimewaan

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai kewenangan istimewa terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang ini. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi: 1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; 2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3. Kebudayaan; 4. Pertanahan; dan 5. Tata Ruang. Urusan keistimewaan yang melimpah ke Kabupaten/Kota di DIY meliputi empat (4) hal yaitu 1. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, 2. Kebudayaan, 3. Pertanahan dan 4. Tata Ruang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan pada Bab IV Perencanaan, Bupati/Walikota menyampaikan usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada *Paniradya Kaistimewan* pada bulan September. Penyampaian usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang dari Kabupaten/Kota berupa program dan kegiatan tahun $n+2$.

a. Urusan Kelembagaan

Pelaksanaan penugasan keistimewaan urusan kelembagaan di Kabupaten Bantul diawali pada Tahun 2019 dengan mengakomodir aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan asli yang memiliki karakteristik dan kekhususan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli. Implementasinya dengan mendesain kelembagaan yang memiliki keunikan sebagai penciri keistimewaan dengan penambahan nomenklatur keistimewaan di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) serta penggantian nomenklatur kecamatan menjadi *Kapanewon* dan desa menjadi *Kalurahan*. Penciri keunikan lainnya adalah dalam tata naskah dinas, berupa menambahkan penulisan nomenklatur perangkat daerah dan kalurahan dengan aksara Jawa pada kop surat dinas.

Pada sisi budaya kerja urusan keistimewaan bidang kelembagaan mereview budaya kerja pemerintah daerah dan internalisasi nilai-nilai keistimewaan pada ASN yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme ASN DIY termasuk di Kabupaten Bantul. SATRIYA (Selaras, Akal Budi Luhur, Teladan, Rela Melayani dan Ahli Profesional) merupakan reformasi birokrasi dalam perspektif keistimewaan dalam rangka pembaharuan sikap dan tindakan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Selain kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli, urusan kelembagaan juga mempunyai subkegiatan yang mendukung pelaksanaan keistimewaan pada semua urusan. Subkegiatan dimaksud yakni koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan. Keduanya merupakan kegiatan yang mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian keistimewaan.

Untuk tindak lanjut urusan keistimewaan ke dalam peraturan, didukung melalui subkegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi produk hukum tindak lanjut urusan keistimewaan di Kabupaten sampai

dengan di Kalurahan. Produk hukum pada Tahun 2022 yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.325 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tindak Lanjut Urusan Keistimewaan

No	Judul	Tanggal Terbit
Peraturan Daerah		
1	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan	Tanggal 12 Agustus 2019
2	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan	Tanggal 9 September 2020
3	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Tanggal 20 Juli 2020
Peraturan Kepala Daerah		
1	Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon	Tanggal 26 Desember 2019
2	Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan	Tanggal 31 Desember 2019
3	Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	Tanggal 31 Desember 2021
4	Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	Tanggal 31 Desember 2021
5	Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	Tanggal 7 Juli 2020
6	Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan	Tanggal 3 Agustus 2020
7	Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Produk Hukum Kalurahan	Tanggal 3 Agustus 2020
8	Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kalurahan	Tanggal 25 September 2020
9	Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian Lurah	Tanggal 4 Oktober 2021
10	Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	Tanggal 4 Oktober 2021
11	Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan	Tanggal 4 Oktober 2021
12	Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan	Tanggal 11 Oktober 2021
13	Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan	Tanggal 21 Juli 2022
14	Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan	Tanggal 21 Juli 2022
15	Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2022 tentang Hak Cuti Bagi Pamong Kalurahan	Tanggal 5 September 2022
16	Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan	Tanggal 25 November 2022

Sumber: Bagian Hukum, Setda Kabupaten Bantul, 2023

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kalurahan, bahwa Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang menjadi bagian dari

Kasultanan/Kadipaten. Kalurahan bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan melaksanakan tugas urusan keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan keperbihakan kepada rakyat. Untuk memperkuat kedudukan dan mengoptimalkan tugas Kalurahan, pada urusan kelembagaan terdapat subkegiatan penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan. Subkegiatan dilakukan di Bagian Tata Pemerintahan dan Kapanewon serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kegiatan yang telah dilakukan di Bagian Tata Pemerintahan dan Kapanewon adalah memperkuat fungsi sebagai koordinator Kalurahan. Sedangkan yang dilakukan di DPMK adalah meningkatkan kapasitas lembaga maupun sumber daya manusia di Kalurahan.

b. Urusan Kebudayaan

Salah satu semangat yang menjadi inti dari pelaksanaan keistimewaan adalah menjadikan filosofi budaya sebagai dasar pembangunan di segala bidang. Kebudayaan melalui rekayasa revolusi mental diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat. Pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni untuk mendukung kebudayaan istimewa merupakan salah satu strategi dalam pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bantul.

Pembangunan kebudayaan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat. Berbagai capaian yang berasal dari program-program dan kegiatan inovatif menunjukkan Urusan Kebudayaan telah memberikan manfaat langsung bagi kegiatan seni dan budaya yang sebelumnya telah tumbuh di masyarakat. Pengelolaan program-program urusan kebudayaan mendorong peningkatan kreativitas kelompok masyarakat, berkembangnya pembinaan seni dan budaya, semakin optimalnya pelestarian cagar budaya penyelenggaraan event kebudayaan

mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa spirit baru pembangunan kalurahan. Untuk mewujudkan kemandirian kalurahan diperlukan konsep yang dapat mewadahi dan mengakomodasi berbagai elemen kalurahan secara menyeluruh. Berbagai program pembangunan kalurahan yang ada di wilayah antara lain: Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), Desa Preneur, dan Desa Mandiri Pangan.

Desa/Kalurahan yang memiliki 4 predikat sekaligus sebagai Budaya, Desa Wisata, Desa Preneur dan Desa Prima Desa disebut sebagai Kalurahan Mandiri Budaya, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Kalurahan Mandiri Budaya adalah kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai nilai keistimewaan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam kebhinnekatunggalikaan.

Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2022 telah memiliki 5 (lima) Kalurahan Mandiri Budaya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.326 Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Bantul

No	Desa/kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan		Klasifikasi
1	Sabdodadi	Bantul	Keputusan Gub DIY No 364/KEP/2020	07 Desember 2020	Desa Mandiri Budaya Peringkat Utama
2	Bangunjiwo	Kasihan	Keputusan Gub DIY No 383/KEP/2021	30 November 2021	Desa Mandiri Budaya Peringkat Madya
3	Gilangharjo	Pandak	Keputusan Gub DIY No 234- KEB-2022	15 Agustus 2022	Desa Mandiri Budaya Peringkat Utama
4	Panggungharjo	Sewon			
5	Trimurti	Srandakan			

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2023

Kabupaten Bantul berupaya mendorong terbentuknya Kalurahan Mandiri Budaya melalui pembentukan Kalurahan Pamor Budaya yang merupakan Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya

1) Desa/Kalurahan Budaya

Desa/Kalurahan Budaya adalah desa yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Pembentukan Desa/Kalurahan Budaya sebagai salah satu upaya menampung segala aspirasi masyarakat dalam pengembangan, pembinaan dan pelestarian seni budaya yang berada di tingkat kalurahan. Tujuannya untuk memperkuat keberadaan kebudayaan daerah dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat tentang kebudayaan. Bidang utama dalam memperkuat dan mengapresiasi budaya adalah pada sektor Pariwisata, Pendidikan, Ekonomi dan Ketahanan Pangan. Sementara itu aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Keterlindungan Warga menjadi isu penting dalam proses pembangunan kebudayaan.

Menurut SK Gubernur DIY No.351/KEP/2021 tentang Penetapan Kalurahan/Kelurahan Budaya, di Bantul ada penambahan tujuh Desa Budaya. Penambahan tujuh Desa Budaya di Bantul, masing-masing adalah Muntuk (Dlingo), Sendangsari (Pajangan), Girirejo (Imogiri), Sriharjo (Imogiri), Srimulyo (Piyungan), Argodadi (Sedayu), dan Parangtritis (Kretek). Daftar lengkap Desa Budaya di Kabupaten Bantul ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.327 Penetapan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul

No	Kalurahan	Kapanewon	Keterangan
1	Sabdodadi*	Bantul	Sudah menjadi Desa Mandiri Budaya di Tahun 2020 Keputusan Gub DIY No 364/KEP/2020 Penetapan Desa- Kalurahan Mandiri Budaya Th 2020

2	Bangunjiwo*	Kasih	Sudah menjadi Desa Mandiri Budaya di Tahun 2021 Keputusan Gub DIY No 383/KEP/2021 tentang Penetapan Desa-Kalurahan Mandiri Budaya Th 2021
3	Gilangharjo*	Pandak	Sudah menjadi Desa Mandiri Budaya di Tahun 2022 Keputusan Gub DIY No. 234-KEB-2022 tentang Penetapan Desa-Kalurahan Mandiri Budaya Th 2022
4	Panggunharjo*	Sewon	Sudah menjadi Desa Mandiri Budaya di Tahun 2022 Keputusan Gub DIY No. 234-KEB-2022 tentang Penetapan Desa-Kalurahan Mandiri Budaya Th 2022
5	Trimurti*	Srandakan	Sudah menjadi Desa Mandiri Budaya di Tahun 2022 Keputusan Gub DIY No. 234-KEB-2022 tentang Penetapan Desa-Kalurahan Mandiri Budaya Th 2022
6	Seloharjo	Pundong	
7	Mulyodadi	Bambanglipuro	
8	Dlingo	Dlingo	
9	Selopamioro	Imogiri	
10	Sitimulyo	Piyungan	
11	Srigading	Sanden	
12	Triwidadi	Pajangan	
13	Srimulyo	Srimulyo	
14	Parangtritis	Kretek	
15	Argodadi	Sedayu	
16	Sendangsari	Pajangan	
17	Muntuk	Dlingo	
18	Girirejo	Imogiri	
19	Sriharjo	Imogiri	

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Tahun 2023

Dari 19 Desa Budaya di atas 5 desa sudah berpredikat Desa Mandiri Budaya. Adapun lima desa/kalurahan tersebut adalah Sabdodadi, Bangunjiwo, Panggunharjo, Gilangharjo, dan Trimurti. Sedang dalam pengelolaan persampahan, tiga kalurahan menjadi percontohan pengelolaan persampahan berbasis kalurahan yaitu Panggunharjo Kapanewon Sewon, Guwosari Kapanewon Pajangan, Karangtengah Kapanewon Imogiri.

Saat ini telah ditetapkan pula 12 (dua belas) Rintisan Kalurahan Budaya. Penetapan rintisan kalurahan budaya melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 686 Tahun 2020, Keputusan Bupati Bantul Nomor 486

Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 577 Tahun 2022. Rintisan Desa/Kalurahan Budaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.328 Penetapan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul

No	Kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan
1	Gadingsari	Sanden	Keputusan Bupati Bantul No 686 Tahun 2020
2	Tamantirto	Kasihani	
3	Guwosari	Pajangan	Keputusan Bupati Bantul No 486 Tahun 2021
4	Jatimulyo	Dlingo	
5	Baturetno	Banguntapan	
6	Wukirsari	Imogiri	
7	Timbulharjo	Sewon	Keputusan Bupati Bantul No 577 Tahun 2022
8	Srimartani	Piyungan	
9	Pleret	Pleret	
10	Trimulyo	Jetis	
11	Srihardono	Pundong	
12	Ringinharjo	Bantul	

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Tahun 2023

2) Desa Wisata

Desa wisata adalah sebuah kawasan kalurahan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Penduduk di kalurahan wisata memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan kalurahan wisata. Alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. Desa wisata menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat-istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang Kalurahan yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung.

Penetapan Desa Wisata melalui Keputusan Bupati Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Desa wisata adalah sebuah kawasan

kalurahan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Penduduk di kalurahan wisata memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan kalurahan wisata. Alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. Desa wisata menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat-istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang Kalurahan yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung.

Penetapan Desa Wisata melalui Keputusan Bupati Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.329 Desa Wisata di Kabupaten Bantul

No	Kalurahan	Nama Desa Wisata	Potensi Wisata	Kategori
1	Wukirsari	Wukirsari	Batik Tulis, Alam, Budaya	Mandiri
		Pucungrejo	Kerajinan kulit	Rintisan/Embrio
		Bendo	Alam, Kerajinan Genteng Tradisional	Rintisan/Embrio
2	Mangunan	Kakilangit	Alam, Budaya, Kuliner	Maju
		TTSA	Alam, Budaya, Kuliner	Maju
		Songgo Langit	Alam, Budaya, Kerajinan	Rintisan/Embrio
		Goa Gajah (Lemahbang)	Alam, Goa Gajah	Rintisan/Embrio
3	Guwosari	Kampungsantan	Kerajinan tempurung, Kuliner Ingkung	Maju
		Kalakijo	Budaya, Kuliner Ingkung, Sejarah	Rintisan/Embrio
		Guwosai Selarong	Cagar Budaya, Kerajinan	Rintisan/Embrio
		Dewi Gumi	Sejarah, Budaya	Berkembang
4	Sendangsari	Krebet	Kerajinan Batik Kayu, Alam, Budaya	Mandiri
		Mangir	Wisata Sejarah Mataram, Kuliner, Budaya	Rintisan/Embrio
		Ngembel Mbeji	Alam, Budaya	Rintisan/Embrio
5	Timbulharjo	Tembi	Kerajinan, Outbond, Alam, Budaya, Kuliner	Maju

No	Kalurahan	Nama Desa Wisata	Potensi Wisata	Kategori
6	Karangtengah	Karangtengah	Alam, Kerajinan, Budaya, Kuliner	Maju
7	Kebonagung	Kebonagung	Wisata Pendidikan Pertanian, Alam, Budaya, Kuliner	Maju
		Candran	Museum Tani, Kesenian, Alam, Budaya	Maju
8	Sabdodadi	Manding	Sentra Kerajinan Kulit, Budaya	Maju
9	Canden	Kiringan	Sentra Jamu Tradisional	Berkembang
10	Trimurti	Lopati	Kuliner, Kerajinan, Budaya	Berkembang
11	Muntuk	Karangasem	Alam, Kerajinan Bambu, Budaya	Maju
		Gunung Cilik	Alam, Kerajinan, Budaya	Rintisan/Embrio
12	Bangunjiwo	Jipangan	Budaya, Kerajinan Bambu, Alam, Budaya	Berkembang
		Kajigelem	Kerajinan Gerabah, Bambu, Wayang, Patung Batu	Rintisan/Embrio
13	Trimulyo	Puton	Alam, Budaya	Berkembang
		Trimulyo	Cagar Budaya, Batik, Alam	Rintisan/Embrio
		Dewa Batu	Riverside tubing	Rintisan/Embrio
14	Jagalan	Jagalan	Cagar Budaya, Sejarah, Kuliner	Rintisan/Embrio
15	Tirtohargo	Mangrove	Alam, Konservasi Mangrove, Budaya	Rintisan/Embrio
16	Parangtritis	Laguna Depok	Outbond, Kuliner, Alam, Budaya	Rintisan/Embrio
17	Palbapang	Ngringinan	Museum, Sejarah, Kuliner	Rintisan/Embrio
18	Seloharjo	Kampung Surocolo	Cagar Budaya, Sejarah	Rintisan/Embrio
19	Pendowoharjo	Juron	Kerajinan	Rintisan/Embrio
20	Gilangharjo	Dewi Kaji	Edukasi Ikan Hias, Alam, Budaya	Berkembang
21	Gadingsari	Goa Cemara	Alam, Outbond, Konservasi Penyu, Budaya	Berkembang
		Pandansari	Alam, Perkebunan Buah Naga	Rintisan/Embrio
22	Imogiri	Imogiri	Budaya	Rintisan/Embrio
23	Sriharjo	Srikeminut (wunut)	Alam, Budaya, Kuliner	Berkembang
24	Panjangrejo	Panjangrejo	Alam, Gerabah	Rintisan/Embrio
25	Terong	Banyu Nibo Rejosari	Air Terjun	Rintisan/Embrio
26	Mulyodadi	Mulyodadi	Ekoswisata	Rintisan/Embrio
27	Baturetno	Retno	Telaga, Kuliner	Rintisan/Embrio
28	Tirtomulyo	Kregan Kampung Gurami	Budaya, Perikanan	Rintisan/Embrio

No	Kalurahan	Nama Desa Wisata	Potensi Wisata	Kategori
29	Wijirejo	Carakan	Wisata Edukasi, Batik, Memanah	Rintisan/Embrio
30	Pleret	Bumi Mataram Pleret	Sejarah/Situs, Budaya	Berkembang
32	Srimulyo	Mulia	Alam, Budaya, Kuliner	Maju

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2023

3) Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima)

Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) merupakan sebuah kalurahan percontohan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potensi dan mengoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari instansi terkait, LSM, organisasi perempuan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk bersama-sama membangun kepedulian menurunkan kemiskinan.

Pada tahun 2022 terdapat 51 Desa Prima yang telah terbentuk, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.330 Kelompok Prima di Desa Prima Kabupaten Bantul Tahun 2009 – 2019

No	Kalurahan	Tahun Dibentuk	Nama Kelompok Desa Prima	Produk Unggulan
1	Banguntapan, Kapanewon Banguntapan	2012	Sekarningtyas	Makanan Kering
2	Sriharjo, Kapanewon Imogiri	2021	Sejahtera	Peyek Sagu, Kripik Sagu
3	Canden, Kapanewon Jetis	2022	Bangkit Bersama	Jamu Gendong
4	Gadingsari, Kapanewon Sanden	2018	Gadingsari Makmur	Peyek, Ubi Ungu
5	Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan	2013	Mukti Rejeki	Tempe, Tas Perca, Dompot Batik
6	Bangunharjo, Kapanewon Sewon	2012	Ngudi Rejeki	Bakpia, Tempe
7	Imogiri, Kapanewon Imogiri	2020	Anyelir	Snack, Cemilan Kripik
8	Timbulharjo, Kapanewon Sewon	2015	Timbul Rezeki	Kripik Gembus
9	Sumberagung, Kapanewon Imogiri	2016	Sumber Makmur	Olahan Hasil Perikanan
10	Dlingo, Kapanewon Dlingo	2021	Giri Prima Tama	Wedang Kepek Bunga, Tas, Menggleng, Emping Garut

No	Kalurahan	Tahun Dibentuk	Nama Kelompok Desa Prima	Produk Unggulan
11	Selopamioro, Kapanewon Imogiri	2021	Selomaju	Wedang Ereng-Ereng
12	Terong, Kapanewon Dlingo	2021	Sejahtera	Pangsit Daun Kelor
13	Patalan, Kapanewon Jetis	2021	Prima Niaga	Kerajinan Tas
14	Wukirsari, Kapanewon Imogiri	2021	Mandiri	Rajut, Batik Tulis, Kripik Gadung
15	Triwidadi, Kapanewon Pajangan	2021	Sumber Rejeki	Emping Melinjo, Emping Jagung, Emping Garut
16	Kebonagung, Kapanewon Imogiri	2021	Agung Mandiiri	Telur Asin, Aneka Kripik, Kembang Goyang
17	Tamanan, Kapanewon Banguntapan	2018	Wanudyotomo	Aneka Olahan Kue
18	Trimurti, Kapanewon Srandakan	2021	Murti Mandiri	Cripping. Ampas Tahu. Bakpia Pisang
19	Mulyodadi, Kalurahan Bambanglipuro	2020	Maju Mulyo	Wingko, Geplak Waluh, Onde", Telur Asin, Karamel
20	Seloharjo, Kapanewon Pundong	2021	Optimis "Seloharjo"	Bakpia
21	Panggunharjo, Kapanewon Sewon	2020	Panggung Makmur	Aneka Kue, Emping, Abon
22	Jatimulyo, Kapanewon Dlingo	2019	Prima Jati	Kue Kacang
23	Karanagtengah, Kapanewon Imogiri	2022	Ngudi Mukti	Kripik GedeboK Pisang, Criping Pisang, Aneka Bumbu Siap Saji
24	Sabdodadi, Kapanewon Bantul	2019	Dullor Subur Neco	Jusser, Okra, Kenikir
25	Srigading, Kapanewon Sanden	2019	Gadingmas	Telur Asin, Tahu Walik, Batik, Kue Kering, Olahan Gula Kelapa, KacangKacangan, Kue Basah
26	Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan	2021	Bangunjiwo	Brownies
27	Wonocatur, Banguntapan	2021	Mekar Sari	Bakpia 505, Wingko Dan Keripik Kentang 505
28	Gilangharjo Kapanewon Pandak	2019	Gilang Lestari	Jamur Crispy
29	Girirejo, Kapanewon Imogiri	2022	Mandiri Prima	
30	Muntuk, Kapanewon Dlingo	2022	Manunggal Jaya	Kerajinan Bambu, Aneka Snak
31	Srimartani, Kapanewon Piyungan	2022	Murakabi	
32	Tamantirto, Kapanewon Kasihan	2022	Srikandi	Kriik Gembus, The Daun Kelon, Peyek Kacang Ijo
33	Argodadi, Kapanewon Sedayu	2022	Permata	

No	Kalurahan	Tahun Dibentuk	Nama Kelompok Desa Prima	Produk Unggulan
34	Sendangsari, Kapanewon Pajangan	2022	Sendang Prima Sejahtera	Emping Jagung, Emping Garut, Emping Mlinjo, Kripik Kelor, Kripik Bayem, Peyek Dele, Peyek Kacang
35	Parangtritis, Kapanewon Kretek	2022	Mutiara Selatan	
36	Srimulyo, Kapanewon Piyungan	2022	Gerbang Mulyo	
37	Pleret, Kapanewon Pleret	2022	Mandiri Mulyo	
38	Gadingharjo, Kapanewon Sanden	2022	Gading Sejahtera	
39	Sidomulyo, Bambanglipuro	2022	Mayangsari	Tepung Pisang, Stik Pisang, Keripik Pisang, Dawet Daun Pisang, Pilus Atos Dan Kripik Gayam
40	Karasan, Palbapang	2022	Anggrek	Telur Asin
41	Singosaren, Banguntapan	2022	Merpati 1	Mocafa Cookies
42	Ringinharjo, Bantul	2022	Nusa Indah 1	Peyek Gempa 5,9 Sr , Dan Sprei/ Sarung Bantal
43	Kadibeso, Sabdodadi	2022	Manunggal Lestari	Emping Melinjo, Es Jus, Bros Kain Perca, Sari Jahe Instan, Dan Bakso Tusuk, Cilok, Tahu Bakso
44	Terong, Dlingo	2022	Kangen	Dokangen, Criping Pisang Kangen
45	Guwosari, Pajangan	2022	Dahlia	Aneka Kerajinan Dari Kain Flanel
46	Sendangsari Pajangan	2022	Kayen Mandiri	Emping Melinjo
47	Bawuran, Pleret	2022	Sanan 1	Snack Dan Makanan Kecil
48	Brajan Wonokromo, Pleret	2022	Lestari Jaya	Batik Prodo, Krupuk Rambak, Jamu, Nasi Box Dan Snack
49	Dingkikan, Argodadi, Sedayu	2022	Jaya Lestari	Beras Kencur Instan, Sirup Secang
50	Gunungpolo, Argorejo, Sedayu	2022	Flamboyan 1	Roti Marie Wijen, Wedang Telang
51	Bandung, Pendowoharjo, Sewon	2022	Melati Bandung	Batik Pendowo

Sumber: Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul, 2023

4) Kalurahan Preneur

Upaya untuk mendorong kehidupan wirausaha di desa adalah mengembangkan kampanye program kegiatan yang memiliki dimensi menggali potensi enterpreunerspirit pada tataran desa. Hal itu kemudian dikenal sebagai Desa/kalurahan Preneur. Desa/kalurahan Preneur menjadi salah satu respon terhadap isu kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembang potensi usaha, peningkatan semangat kewirausahaan dan kualitas SDM para pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena itu, dengan prioritas pada peningkatan softskill dari para pelaku usaha, program Desa Preneur terwujud dalam bentuk Pendidikan, Pelatihan, Fasilitasi, dan Pendampingan.

Desa/kalurahan Preneur merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga. Lembaga ekonomi desa, seperti: UMKM, koperasi, hingga BUMDES harus terlibat aktif. Mereka dapat membentuk konsorsium bagi pemasaran bersama barang dan jasa yang diproduksi warga. Strategi pemasaran diarahkan pada pembentukan sekaligus penguatan branding produk barang atau jasa yang potensial desa.

Kalurahan Preneur di Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY No. 529/kep/Bid IV/XII/2021 tentang Penetapan Desa Preneur tahun 2021 telah ditetapkan 11 Desa Preneur di Bantul.

Tabel 2.331 Desa Preneur Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Kelurahan	Status
1	Panggunharjo	Pengembangan
2	Trimurti	
3	Mulyodadi	
4	Sabdodadi	Maju
5	Gilangharjo	
6	Bangunjiwo	
7	Dlingo	Penumbuhan

8	Sriharjo	
9	Canden	
10	Triwidadi	
11	Argomulyo	
12	Sendangsari	
13	Sitimulyo	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

c. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yaitu penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui Undang-Undang. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perda 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Kondisi saat ini tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Dengan kedudukan Kasultanan dan Kadipaten masing-masing sebagai badan hukum khusus, maka penggunaannya harus mendapatkan persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah Kasultanan dan Kadipaten dilakukan

melalui proses pendaftaran. Upaya ini dimaksudkan untuk memperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun instansi atau masyarakat yang menempati tanahnya.

Tabel 2.332 Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul Tahun 2015 - 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pendaftaran Tanah Kasultanan (bidang)	400	500	395	122	0

Sumber : DPTR Kabupaten Bantul, 2023

Pendaftaran tanah kasultanan di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2015-2021 telah mampu menyelesaikan 3.434 bidang tanah *Sultan Ground*. Namun untuk tahun 2022 target 297 tidak tercapai karena terkendala waktu yang tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga tidak ada realisasi (nol).

Selain pendaftaran tanah kasultanan, upaya yang dilakukan adalah identifikasi dan pendaftaran tanah desa sebagai bagian dari tanah kasultanan. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan Peraturan Desa tentang Penggunaan Tanah Desa. Pada tahun 2021 telah diselesaikan 75 Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan.

Tabel 2.333 Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul

No.	Kalurahan	Kapanewon	Keterangan	
			Nomor Perdes/Perkal	Tanggal
1	Sumberagung	Jetis	No. 3 Tahun 2019	19 Februari 2019
2	Imogiri	Imogiri	No. 2 Tahun 2019	10 Juni 2019
3	Sidomulyo	Bambanglipuro	No. 1 Tahun 2019	30 Januari 2019
4	Potorono	Banguntapan	No. 2 Tahun 2019	18 Juni 2019
5	Terong	Dlingo	No. 3 Tahun 2019	27 Agustus 2019
6	Wonokromo	Pleret	No. 6 Tahun 2019	19 Juli 2019
7	Trimurti	Srandakan	No. 4 Tahun 2019	15 Agustus 2019
8	Mangunan	Dlingo	No. 7 Tahun 2019	10 Juli 2019

No.	Kalurahan	Kapanewon	Keterangan	
			Nomor Perdes/Perkal	Tanggal
9	Kebonagung	Imogiri	No. 4 Tahun 2019	26 Agustus 2019
10	Tirtonirmolo	Kasihani	No. 4 Tahun 2019	16 September 2019
11	Guwosari	Pajangan	No. 7 Tahun 2019	16 Agustus 2019
12	Tirtosari	Kretek	No. 3 Tahun 2019	02 Juli 2019
13	Muntuk	Dlingo	No. 2 Tahun 2019	16 September 2019
14	Sitimulyo	Piyungan	No. 13 Tahun 2019	23 September 2019
15	Argorejo	Sedayu	No. 7 Tahun 2019	10 Oktober 2019
16	Tamanan	Banguntapan	No. 7 Tahun 2019	22 Oktober 2019
17	Baturetno	Banguntapan	No. 7 Tahun 2019	24 Oktober 2019
18	Sumbermulyo	Bambanglipuro	No. 8 Tahun 2019	12 November 2019
19	Mulyodadi	Bambanglipuro	No. 11 Tahun 2019	27 November 2019
20	Triwidadi	Pajangan	No. 7 Tahun 2019	20 Desember 2019
21	Jatimulyo	Dlingo	No. 5 Tahun 2019	25 November 2019
22	Wukirsari	Imogiri	No. 11 Tahun 2019	11 Desember 2019
23	Karangtalun	Imogiri	No. 05 Tahun 2019	11 Oktober 2019
24	Pleret	Pleret	No. 8 Tahun 2019	09 Desember 2019
25	Banguntapan	Banguntapan	No. 07 Tahun 2019	01 Oktober 2019
26	Argodadi	Sedayu	No. 07 Tahun 2019	23 November 2019
27	Tirtomulyo	Kretek	No. 04 Tahun 2019	30 Oktober 2019
28	Panggungharjo	Sewon	No. 5 Tahun 2019	28 Agustus 2019
29	Girirejo	Imogiri	No.6 Tahun 2019	14 Oktober 2019
30	Parangtritis	Kretek	No. 10 Tahun 2019	10 Desember 2019
31	Srigading	Sanden	No. 2 Tahun 2019	02 Juni 2019
32	Gadingsari	Sanden	No. 1 Tahun 2020 (4)	24 Januari 2020
33	Tirtohargo	Kretek	No. 04 Tahun 2020 (4)	10 Maret 2020
34	Triharjo	Pandak	No. 06 Tahun 2020 (4)	16 Juni 2020
35	Jagalan	Banguntapan	No. 06 Tahun 2020 (4)	2 Juli 2020
36	Sriharjo	Imogiri	No. 07 Tahun 2020 (4)	5 Oktober 2020
37	Sendangsari	Pajangan	No. 9 Tahun 2020 (4)	2 Oktober 2020
38	Temuwuh	Dlingo	No. 5 Tahun 2020 (4)	12 Oktober 2020
39	Argomulyo	Sedayu	No. 9 Tahun 2020 (4)	24 Oktober 2020
40	Poncosari	Srandakan	No. 2 Tahun 2020 (4)	17 Maret 2020
41	Donotirto	Kretek	No. 7 Tahun 2020 (4)	4 November 2020
42	Panjangrejo	Pundong	No. 7 Tahun 2020 (4)	26 November 2020
43	Karangtengah	Imogiri	No. 5 Tahun 2020 (4)	25 November 2020

No.	Kalurahan	Kapanewon	Keterangan	
			Nomor Perdes/Perkal	Tanggal
44	Ngestiharjo	Kasihan	No. 10 Tahun 2020 (4)	11 Desember 2020
45	Srihardono	Pundong	No. 10 Tahun 2020 (4)	4 Desember 2020
46	Caturharjo	Pandak	No. 11 Tahun 2020 (4)	1 Desember 2020
47	Singosaren	Banguntapan	No. 6 Tahun 2020 (4)	19 November 2020
48	Trirenggo	Bantul	No. 07 Tahun 2020 (4)	4 Desember 2020
49	Murtigading	Sanden	No. 07 Tahun 2020 (4)	16 Desember 2020
50	Segoroyoso	Pleret	No. 06 Tahun 2020 (4)	16 November 2020
51	Seloharjo	Pundong	No. 7 Tahun 2020 (4)	11 November 2020
52	Bawuran	Pleret	No. 1 Tahun 2021 (4)	13 Februari 2021
53	Patalan	Jetis	No. 10 Tahun 2020 (4)	28 Desember 2020
54	Bangunjiwo	Kasihan	No. 1 Tahun 2021 (4)	25 Januari 2021
55	Tamantirto	Kasihan	No. 03 Tahun 2021 (4)	12 Maret 2021
56	Wijirejo	Pandak	No. 1 Tahun 2021 (4)	19 Februari 2021
57	Sabdodadi	Bantul	No. 3 Tahun 2021 (4)	29 Maret 2021
58	Palbapang	Bantul	No. 3 Tahun 2021 (4)	30 Maret 2021
59	Canden	Jetis	No. 03 Tahun 2020 (4)	31 Maret 2021
60	Srimulyo	Piyungan	No. 6 Tahun 2020 (4)	28 September 2020
61	Argosari	Sedayu	No. 02 Tahun 2021 (4)	22 Maret 2021
62	Trimulyo	Jetis	No. 3 Tahun 2021 (4)	31 Maret 2021
63	Wonolelo	Pleret	No. 11 Tahun 2020 (4)	30 Desember 2020
64	Gadingharjo	Sanden	No. 2 Tahun 2021 (4)	3 Maret 2021
65	Bantul	Bantul	No. 4 Tahun 2020 (4)	29 Desember 2020
66	Srimartani	Piyungan	No. 4 Tahun 2021 (4)	30 Maret 2021
67	Selopamioro	Imogiri	No. 6 Tahun 2020 (4)	16 November 2020
68	Pendowoharjo	Sewon	No. 2 Tahun 2021 (4)	29 Maret 2021
69	Timbulharjo	Sewon	No. 3 Tahun 2021 (4)	31 Maret 2021
70	Jambidan	Banguntapan	No. 01 Tahun 2021 (4)	4 Juni 2021
71	Ringinharjo	Bantul	No. 02 Tahun 2021 (4)	5 April 2021
72	Dlingo	Dlingo	No. 13 Tahun 2020 (4)	29 Desember 2020
73	Bangunharjo	Sewon	No. 3 Tahun 2021 (4)	31 Maret 2021
74	Gilangharjo	Pandak	No. 2 Tahun 2021 (4)	23 April 2021
75	Wirokerten	Banguntapan	No. 3 Tahun 2021 (4)	22 April 2021

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2023

Tanah Kasultanan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bantul dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melalui kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan dasar pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Tabel 2.334 Daftar Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Tahun 2022 Kabupaten Bantul

No	Pemohon Pemanfaat	Lokasi tanah		Luas (M ²)	Pemanfaatan	Rekomendasi	Keterangan
		Kalurahan	Kapanewon				
1	Pemerintah Kalurahan Guwosari	Guwosari	Pajangan	1,339	Pengelolaan Sampah	143/00701/DISPE RTARU 15 Februari 2022	Tanah Kalurahan
2	Pemerintah Kalurahan Guwosari	Guwosari	Pajangan	53,107	Pembangunan Wisata Edukasi, Sejarah dan Budaya	143/00702/DISPE RTARU 15 Februari 2022	Tanah Kalurahan
3	PT. Navil Natural Organik	Argodadi	Sedayu	3,500	Pembangunan Gudang, Industri Gula Merah dan Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Cokelat	188/00974/DISPE RTARU 7 Maret 2022	Tanah Kalurahan
4	PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia	Wirokerten	Banguntapan	9,327	Industri/Pabrik Rokok	143/01384/DISPE RTARU 28 Maret 2022	Tanah Kalurahan
5	Pemerintah Kalurahan Guwosari	Guwosari	Pajangan	7,808	Ruang Publik Taman Terbuka Hijau (Parkir dan Alun-Alun)	143/01467/DISPE RTARU 1 April 2022	Tanah Kalurahan
6	Pemerintah Kalurahan Segoroyoso	Segoroyoso	Pleret	2,642	Pembangunan Embung	143/01468/DISPE RTARU 1 April 2022	Tanah Kalurahan
7	Pemerintah Kabupaten Bantul	Tirtonirmolo	Kasihani	33,635	Pasar Niten dan TPST dengan Intermediate Treatment Facility (ITF)	188/01551/DISPE RTARU 7 April 2022	Tanah Kalurahan
8	Sdr. Eny Dyah Wijayanti	Bantul	Bantul	315	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	143/01654/DISPE RTARU 14 April 2022	Tanah Kalurahan
9	PT. Umbul Mataram Utama	Bantul	Bantul	1,600	Perdagangan dan Café	143/01655/DISPE RTARU 14 April 2022	Tanah Kalurahan

No	Pemohon Pemanfaat		Lokasi tanah		Luas (M ²)	Pemanfaatan	Rekomendasi	Keterangan
			Kalurahan	Kapanewon				
10	Pemerintah	Kalurahan	Bangunjiwo	Kasih	19,581	Embung, Kios, Daur Ulang Sampah (Kolektif)	143/01876/DISPE RTARU 11 Mei 2022	Tanah Kalurahan
11	Pemerintah	Kalurahan	Banguntapan	Banguntapan	1,750	Pembangunan Rumah Pilah Sampah Tipe A	143/02105/DISPE RTARU 24 Mei 2022	Tanah Kalurahan
12	Pemerintah	Kalurahan	Timbulharjo	Sewon	5,000	Pembangunan Homestay Milik Kalurahan	143/02222/DISPE RTARU 31 Mei 2022	Tanah Kalurahan
13	Pemerintah	Kalurahan	Timbulharjo	Sewon	1,200	Pembangunan Gedung Pertemuan, Ruang Olahraga dan Kegiatan Sosial	143/02223/DISPE RTARU 31 Mei 2022	Tanah Kalurahan
14	PT. Kampung Perwita	Joglo	Potorono	Banguntapan	9,300	Warung Makan dan Tempat Parkir	143/02696/DISPE RTARU 28 Juni 2022	Tanah Kalurahan
15	Kantor Trimurti	Kalurahan	Trimurti	Srandakan	2,535	Pembangunan Tempat Pemberdayaan Masyarakat/U MKM Desa Preneur (G2RT) Kalurahan Trimurti	143/02697/DISPE RTARU 28 Juni 2022	Tanah Kalurahan
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pendidikan dan	Bantul	Bantul	27,037	Lapangan Panjat Tebing, Stadion/Lapangan Dwi Windu, Lapangan Tennis dan Lapangan Olahraga SD Tegaldowo	143/03009/DISPE RTARU 18 Juli 2022	Tanah Kalurahan
17	Pemerintah	Kalurahan	Panggunharjo	Sewon	87,633	Gedung Pertemuan, Gudang, Ruko, Kampung Mataraman, Lapangan Sepak Bola, Kawasan Budaya Karangkitri	143/03010/DISPE RTARU 18 Juli 2022	Tanah Kalurahan
18	PT. Bumi Indonesia	Seduh	Tamanan	Banguntapan	1,500	Pembangunan Pondok Makan	143/03922/DISPE RTARU 7 September 2022	Tanah Kalurahan
19	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul		Bangunharjo	Sewon	1,076	Perluasan Samsat Pembantu Sewon	143/04017/DISPE RTARU 13 September 2022	Tanah Kalurahan
20	Pemerintah	Kalurahan	Tirtomulyo	Kretek	320	Pembangunan Gedung Pertemuan	143/04018/DISPE RTARU 13 September 2022	Tanah Kalurahan
21	Pemerintah	Kalurahan	Srigading	Sanden	216	Pembangunan Kios Kuliner	143/03694/DISPE RTARU 24 Agustus 2022	Tanah Kalurahan
22	Lembaga Ma'arif MWC NU Bantul	Pendidikan	Bantul	Bantul	2,141	Madrasah Ibtidaiyah	143/13695/DISPE RTARU 24 Agustus 2022	Tanah Kalurahan

No	Pemohon Pemanfaat	Lokasi tanah		Luas (M ²)	Pemanfaatan	Rekomendasi	Keterangan
		Kalurahan	Kapanewon				
23	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Bantul	Bantul	1,608	Perluasan Pembangunan Puskesmas Bantul II	143/03696/DISPE RTARU 24 Agustus 2022	Tanah Kalurahan
24	Pemerintah Kalurahan Argorejo	Argorejo	Sedayu	2,275	Pembangunan Markas Komando Polsek, Rumah Dinas Kapolsek Sedayu dan Pos Lalu Lintas	143/06090/DISPE RTARU 19 Desember 2022	Tanah Kalurahan
25	Pemerintah Kalurahan Tamanan	Tamanan	Banguntapan	9,500	Pembangunan Plant Produk Beton	143/06091/DISPE RTARU 19 Desember 2022	Tanah Kalurahan
26	Pemerintah kalurahan Ngestiharjo	Ngestiharjo	Kasihani	-	Telaga Semar Seto	143/06092/DISPE RTARU 19 Desember 2022	Tanah Kalurahan
27	Ana Rina Herbranti, ST., MT. DPUESDM DIY	Sitimulyo	Piyungan	20,303	TPA Transisi Piyungan	593/00540/TN/2022 22 Februari 2022	Tanah Kasultanan (SG)
28	Wahid, ST., SIP., MA. Takmir Mushola Al-Ijdihad	Canden	Jetis	748	Mushola Al-Ijdihad	593/00543/TN/2022 2 Maret 2022	Tanah Kasultanan (SG)
29	Rabini	Caturharjo	Pandak	30	Lahan Pertanian	593/01556/TN/2022 31 Mei 2022	Tanah Kasultanan (SG)
30	Wagiman	Caturharjo	Pandak	30	Warung Makan	593/01557/TN/2022 31 Mei 2022	Tanah Kasultanan (SG)
31	Ir. Bayu Mukti Sasongko, M.Si. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	Parangtritis	Kretek	109,700	Kawasan Konservasi Penyus	593/02179/TN/2022 19 Juli 2022	Tanah Kasultanan (SG)
32	Drs. Noviar Rahmad, M.Si. SATPOL PP DIY	Poncosari	Srandakan	800	Posko SAR Satlinmas	593/03412/TN/2022 20 Oktober 2022	Tanah Kasultanan (SG)
33	H. Agus Effendi, S.E. Yayasan Dakwah Bantul	Caturharjo	Pandak	560	Akses Jalan	593/03413/TN/2022 20 Oktober 2022	Tanah Kasultanan (SG)
34	Drs. Suparyanto, M.Hum.	Parangtritis	Kretek	4,000	Pertanian	593/03414/TN/2022 20 Oktober 2022	Tanah Kasultanan (SG)
35	Drs. Helmi Jamharis, MM. Pemerintah Kabupaten Bantul	Srihardono	Pundong	592	Pos Pemadam Kebakaran	593/02437/TN/2022 3 Agustus 2022	Tanah Kasultanan (SG)
36	Drs. Helmi Jamharis, MM. Pemerintah Kabupaten Bantul	Srigading	Sanden	850	Konservasi Penyus Samas	593/03851/TN/2022 17 November 2022	Tanah Kasultanan (SG)
37	Drs. Helmi Jamharis, MM. Pemerintah Kabupaten Bantul	Sumberagung	Jetis	4,647	Gedung Pilat Plan Pengolahan Hasil Perikanan (LPPMPHP)	593/03852/TN/2022 17 November 2022	Tanah Kasultanan (SG)
38	Pemerintah Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, MM. (DKP)	Tirtoharjo	Kretek	319,100	Konservasi Mangrove dan Pengembangan Fasilitas Pendukung	593/04145/TN/2022 9 Desember 2022	Tanah Kasultanan (SG) (Wedikengser)

No	Pemohon Pemanfaat	Lokasi tanah		Luas (M ²)	Pemanfaatan	Rekomendasi	Keterangan
		Kalurahan	Kapanewon				
39	Pemerintah Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, MM. (DKP)	Srigading	Sanden	213,300	Konservasi Mangrove dan Pengembangan Fasilitas Pendukung	593/04165/TN/2022 13 Desember 2022	Tanah Kasultanan (SG) (Wedikengser)
40	Pemerintah Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, MM. (DINSOS)	Sumberagung	Jetis	2,566	Gedung Tagana Kabupaten Bantul	593/04268/TN/2022 23 Desember 2022	Tanah Kasultanan (SG)
41	Pemerintah Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, MM. (DPUPKP)	Wukirsari	Imogiri	46,274	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	593/04281/TN/2022 26 Desember 2022	Tanah Kasultanan (SG)
42	Pemerintah Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, MM. (DKUKMPP)	Palbapang	Bantul	1,885	Outlet Koperasi Perkulakan dan Gudang	593/04285/TN/2022 27 Desember 2022	Tanah Kasultanan (SG)

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2023

d. Urusan Tata Ruang

Tata Ruang Keistimewaan merupakan kebijakan dan strategi tata ruang pada kawasan strategis DIY yang berwujud struktur ruang dan pola ruang pada tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, serta wilayah yang memiliki nilai-nilai Keistimewaan baik sebagian atau seluruhnya dan diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di DIY. Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Kewenangan Pemerintah Daerah DIY dalam urusan Tata Ruang sesuai Perdas No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi : (a) penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten, (b) penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (c) penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (d) pelaksanaan penataan ruang; (e) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang menyalahi rencana tata ruang; (f) penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang tanah kasultanan atau tanah

kadipaten; (g) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang; (h) pengendalian pemanfaatan ruang; dan (i) pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang. Penataan Ruang dilakukan dengan prinsip mengembalikan, memperbaiki, menguatkan dan mengembangkan yang akan difokuskan pada 18 kawasan keistimewaan. Terdapat beberapa aspek tata ruang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelestarian Kawasan Strategis Keistimewaan, seperti sarana dan prasarana yang saling menunjang dan harus direncanakan dengan baik. Sarana prasarana yang baik dan sesuai konteks kawasan menjadikan perkotaan Yogyakarta sebagai kawasan yang merepresentasikan nilai dasar filosofi Keistimewaan Yogyakarta. Sinergi antara aspek fisik berupa sarana prasarana dan upaya pelestarian lainnya sangat diperlukan dalam hal perencanaan kawasan strategis keistimewaan Yogyakarta ini.

Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2017-2022 telah melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis yang ada di wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.335 Produk Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Keistimewaan di Kabupaten Bantul

Tahun	Produk Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan SRS
2017	Pembangunan RTH kawasan Pleret : Pembangunan perkerasan jalan 1.141 m ² Pembangunan tempat parkir 1.626 m ²
2018	Infrastruktur pendukung di zona penyangga makan raja-raja Imogiri berupa: Identifikasi kebutuhan lahan gapuran, landmark Rencana Induk dan reviu DED Satuan Ruang Strategis Kawasan Imogiri Infrastruktur pendukung kawasan Pleret berupa : Identifikasi kebutuhan lahan lansekap taman titik nol, gapura dan miniatur kerajaan Penyusunan rencana induk dan reviu DED satuan ruang strategis kawasan kerto-Pleret
2019	Dokumen perencanaan SRS Samas-Parangtritis: RTBL kawasan Depok RTBL kawasan Pusat Wisata Parangtritis Dokumen perencanaan SRS Kotagede : RTBL kawasan Watu Gilang
2020	RTBL kawasan Giriloyo, RTBL kawasan Banyusumurup, RTBL kawasan Segoroyoso, RTBL kawasan Masjid Pathok Ngoro Babadan
2021	RTBL Perbukitan Parangtritis
2022	Rencana Induk SRS Samas - Parangtritis

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2023

2.2.2 Urusan Pemerintah Daerah yang didukung Pembiayaan Dana Keistimewaan

a. Urusan Pendidikan

Pendidikan Berbasis Budaya berupa Pembinaan Muatan Lokal dengan sasaran Lembaga/penyelenggara Pendidikan Formal dan Non formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang menyasar pada pendidik/guru serta siswa, berupa pembinaan, pelatihan dan juga lomba.

Tabel 2.336 Kegiatan Muatan Lokal Pendidikan Berbasis Budaya

No	Kegiatan	Jenjang	Sasaran
1	Lomba Jemparingan	Sekolah Dasar	Siswa
2	Lomba Ngudhar Tembang	Sekolah Dasar	Siswa
3	Pelatihan Keterampilan Tarian Tradisional Yogyakarta	PAUD	Guru
4	Pelatihan Keterampilan Memainkan Dolanan Tradisional Jawa	PAUD	Guru
5	Pelatihan MC Basa Jawa/Pranata Cara	Non Formal	Masyarakat
6	Pelatihan Rias Pengantin Gaya Yogyakarta (Paes Ageng)	Non Formal	Masyarakat
7	Pembinaan dan Pelatihan Guru Muatan Lokal Bahasa Jawa (Naskah Ber Aksara Jawa, Huruf Jawa, Digitalisasi Aksara Jawa)	Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Guru
8	Pembinaan dan Pelatihan Guru Muatan Lokal Membatik (Tulis, Cap, Pewarnaan Batik 3 Dan 4 Warna)	Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Guru

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2023

b. Urusan Kesehatan

1) Kesehatan Tradisional Terintegrasi

Pelayanan Kesehatan Tradisional merupakan salah satu upaya Kesehatan komprehensif yang dapat dipertanggungjawabkan, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akhir Tahun 2014 merupakan momentum berharga dalam pelayanan kesehatan tradisional dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang meliputi: tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jenis pelayanan kesehatan tradisional, tata cara pelayanan kesehatan tradisional, sumber daya, penelitian dan pengembangan, publikasi dan

periklanan, pemberdayaan masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administratif.

Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2013 proporsi rumah tangga yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional sebesar 30,4% dengan jenis pelayanan yang paling banyak digunakan adalah ketrampilan tanpa alat sebesar 77,8% dan ramuan sebesar 49%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional mempunyai potensi yang cukup besar dan perlu mendapat perhatian yang serius sebagai bagian dari pembangunan kesehatan daerah.

Sejak tahun 2011, Kabupaten Bantul telah melaksanakan rintisan puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer di Puskesmas Kasihan II dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2019 melalui anggaran dari Danais Dinkes DIY telah dilaksanakan pelatihan pada petugas kesehatan di 3 puskesmas yang diharapkan bisa melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional.

Sampai dengan 2022 beberapa puskesmas sudah memberikan pelayanan kesehatan tradisional berupa akupuntur, akupresur, ramuan tradisional, meditasi, asuhan mandiri ramuan dan pijat.

Tabel 2.337 Puskesmas dan Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi

Tahun	Jumlah Puskesmas Pemberi Layanan	Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional
2019	5	Akupuntur, akupresur, ramuan tradisional dan meditasi, asuhan mandiri ramuan dan pijat
2020	7	
2021	9	
2022	9	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

2) Inovasi Bantul Seroja (Sehat Ekonomi Meningkat Karo Jamu)

Bantul Seroja menjadi suatu inovasi yang dikembangkan untuk menjawab tantangan di masa pandemi Covid-19. Pada saat banyak masyarakat yang tertular, dan harus melakukan isolasi mandiri di rumah ataupun di shelter, serta pasien yang memerlukan perawatan di RSL- KC. Ramuan jamu yang di produksi dari kelompok-kelompok yang ada di padukuhan ini menjadi minuman kesehatan yang dipercaya untuk

meningkatkan imunitas masyarakat. Bantul Seroja juga menjadi suatu alternatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kelompok pembuat jamu.

Konsep kebaruan dari inovasi Bantul Seroja adalah sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan kelompok wanita tani
- b) Meningkatnya produsen ramuan jamu dan memiliki ijin Produk Industri Rumah Tangga
- c) Keamanan konsumsi ramuan jamu.
- d) Peningkatan nilai ekonomi produk ramuan jamu.
- e) Pendampingan Desa Wisata Jamu.
- f) Pengakuan terhadap budaya lokal.
- g) Peningkatan produksi pertanian tanaman obat sebagai bahan baku jamu.
- h) Pembinaan dan pemantauan terhadap Bantul Seroja dilaksanakan secara terintegrasi

Inovasi Bantul seroja bermula dari permasalahan penurunan persentase angkatan kerja perempuan dari 44,79% th 2019 menjadi 44,26% th 2020, dan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dari 3,06% th 2019 menjadi 4,06% th 2020, serta keamanan pangan PIRT minuman jamu.

Kegiatan inovasi adalah pelatihan pembuatan jamu, dan pemasarannya. Kegiatan ini didukung oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk pemasok emponempon bahan jamu, Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mendampingi kelompok perempuan melalui Desa Prima, Dinas Pariwisata mendukung Desa Wisata Jamu, TP PKK mewadahi ibu-ibu pembuat jamu, Dinas Kebudayaan mengusulkan WBTB ramuan “Wedang Uwuh” dan Dinas Kesehatan mendampingi pembuat ramuan jamu hingga memiliki PIRT. Anggota adalah produsen jamu, sedangkan tenaga kerja adalah produsen jamu dan pekerja yang direkrut oleh produsen jamu tersebut.

Sumber dana pada inovasi ini dari APBD DIY melalui DP3AP2 DIY, CSR Pertamina, dan BKK Dana Keistimewaan melalui Dinkes. Lokasi s.d tahun 2022 terdapat di 9 Kapanewon, 17 kalurahan, 21 Padukuhan, dan akan di replikasikan ke seluruh kapanewon pada tahun 2025.

Data Inovasi Bantul Seroja pada tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.338 Data Inovasi Bantul Seroja Tahun 2020 – 2022

Tahun	Puskesmas/Kapanewon	Kalurahan	Padukuhan	Anggota (Orang)	Tenaga Kerja (Orang)
2020	1) Jetis II, Jetis	Canden	Kiringan	114	290
	2) Sedayu I, Sedayu	Argomulyo	Watu	80	80
	3) Imogiri I, Imogiri	Imogiri	Dukuh	30	30
	4) Kasihan II, Kasihan	Tirtonirmolo	Padokan Lor	10	10
	5) Baguntapan II, Baguntapan	Jagalan	Bodon	10	10
Jumlah				244	420
2021	1) Jetis II, Jetis	Canden	Kiringan	114	290
		Patalan	Sulang Kidul	32	34
	2) Sedayu I, Sedayu	Argomulyo	Watu	80	80
		Argosari	Gubug	30	30
	3) Imogiri I, Imogiri	Imogiri	Dukuh	30	30
		Girirejo	Pajimatan	20	20
	4) Kasihan II, Kasihan	Tirtonirmolo	Padokan Lor	10	10
		Ngestiharjo	Sidorejo	10	10
	5) Banguntapan II, Banguntapan	Jagalan	Bodon	10	10
			Sayangan	10	10
		Singosaren	Singosaren	8	12
			Singosaren II	10	10
			Singosaren III	10	10
		Wirokerten	Kepuh Kulon	10	10
	6) Bantul II, Bantul	Sabdodadi	Manding	20	20
	7) Piyungan	Srimulyo	Ngelosari	15	15
	8) Srandakan	Trimurti	Puluhan Kidul	15	30
	9) Dlingo II, Dlingo	Muntuk	Muntuk	10	14
Jumlah				444	645
2022	1) Imogiri I	Girirejo	Pajilmatan	20	20
		Imogiri	Dukuh	30	30
	2) Jetis II	Patalan	Sulang Kidul	2	
		Canden	Kiringan	114	290
			Gadungan Kepuh		
	3) Sedayu I	Argosari	Gubug	30	30
		Argomulyo	Watu	70	70
	4) Banguntapan II	Jagalan	Sayangan	10	10
			Bodon	8	12
		Singosaren	Singosaren I	10	10
			Singosaren II	10	10
			Singosaren III	10	10

Tahun	Puskesmas/Kapanewon	Kalurahan	Padukuhan	Anggota (Orang)	Tenaga Kerja (Orang)
	5) Kasihan II	Wirokerten	Kepuh Kulon	10	10
		Ngestiharjo	Sidorejo	10	10
		Tirtonirmolo	Padokan Lor	10	10
	6) Dlingo II	Muntuk	Muntuk	4	4
		Terong	Pencitrejo		
	7) Piyungan	Srimulyo	Ngelosari	15	15
		Srimartani	Munggur		
	8) Bantul II	Sabdodadi	Manding	20	20
	9) Srandakan	Trimurti	Puluhan Kidul	15	3
Jumlah				398	564

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2023

c. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelibatan masyarakat/komunitas dalam menjaga trantibum masih perlu ditingkatkan. Kelompok Jagawarga mulai dibentuk melalui Dana Keistimewaan dengan tujuan untuk meningkatkan ketenteraman ketertiban umum di tingkat dusun.

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kelompok Jaga Warga, Kelompok Jaga Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kalurahan/Kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat padukuhan/Rukun Warga/Kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat.

Peran kelompok jaga warga sebagai bagian mitra Pemerintah dalam mewujudkan keterlindungan warga adalah:

- 1) Meningkatnya peran pranata sosial yang ada dalam masyarakat yang belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.
- 2) Meningkatnya nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat.
- 3) Meningkatnya kepedulian masyarakat untuk menguatkan pembangunan keistimewaan serta rasa persatuan dan kesatuan di lingkungannya.
- 4) Membantu mengurangi dan/atau menangani kerawanan sosial dan bencana

Kelompok Jagawarga yang sudah terbentuk sampai dengan Tahun 2022 sejumlah 648 kelompok. Sebaran Kelompok Jagawarga Sampai Dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada table di bawah ini

Tabel 2.339 Sebaran Kelompok Jagawarga Tahun 2022

No	Kapanewon	Jumlah
1	Kapanewon Srandakan	43
2	Kapanewon Sanden	39
3	Kapanewon Kretek	52
4	Kapanewon Pundong	37
5	Kapanewon Bambanglipuro	45
6	Kapanewon Pandak	28
7	Kapanewon Pajangan	21
8	Kapanewon Bantul	15
9	Kapanewon Jetis	56
10	Kapanewon Imogiri	29
11	Kapanewon Dlingo	43
12	Kapanewon Banguntapan	41
13	Kapanewon Pleret	37
14	Kapanewon Piyungan	60
15	Kapanewon Sewon	5
16	Kapanewon Kasihan	53
17	Kapanewon Sedayu	44
Jumlah		648

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2023

Periode Tahun 2020–2022 pembentukan kelompok Jagawarga menjadi kewenangan dari Kesbangpol kabupaten/kota, yang sebelumnya menjadi kewenangan dari Pemerintah DIY.

Tabel 2.340 Jumlah Kelompok Jagawarga di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022

No	Keterangan	Jumlah			
		2019	2020	2021	2022
1	Kelompok Jaga Warga	219	279	358	648
2	Padukuhan	933	933	933	933
3	Rasio Jumlah Jagawarga	23,47%	29,90%	38,37%	69,45%

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2023

d. Urusan Kelautan dan Perikanan

Indonesia mempunyai potensi yang besar, mulai dari sumberdaya alam hingga letaknya yang strategis. Salah satu misi pemerintahan pada periode pertama Presiden Joko Widodo menjabat adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Wacana membangun negara maritim sebenarnya sudah muncul pada tahun 1997, untuk membangun Indonesia baru sebagai negara bahari yang memaksimalkan laut sebagai potensi bangsa Indonesia.

Bersamaan dengan gagasan pemerintahan Presiden Jokowi yang akan menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim menargetkan Negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada hakekatnya negara maritim Indonesia merupakan pengembangan dari konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi negara maritim Indonesia perlu dijadikan pedoman dan rangsangan serta dorongan bagi bangsa kita dalam upaya pemanfaatan dan pendayagunaan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, langkah utama yang dilakukan adalah membenahi terlebih dahulu desa pesisir. Anggaran yang telah disediakan pada pos dana desa pembangunan untuk kalurahan maupun pos anggaran lainnya dapat segera dilakukan dan dalam pelaksanaannya, tidak hanya mencakup pembangunan wilayah desa pesisir secara fisik, tetapi termasuk juga pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berada di Kawasan desa pesisir.

Kabupaten Bantul memiliki 5 (lima) desa pesisir yang berada di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Kretek. Desa pesisir yang ada di Kapanewon Srandakan yakni Kalurahan Poncosari, sedangkan desa pesisir yang ada di Kapanewon Sanden antara lain Kalurahan Srigading dan Kalurahan Gadingsari. Kapanewon Kretek hanya memiliki 2 (dua) desa pesisir, yakni Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Tirtohargo.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan ke Pemerintah Kalurahan Dalam Rangka Pengembangan Desa Maritim Tahun Anggaran 2022 yang disusun oleh Pemerintah Daerah DIY, dijelaskan bahwa ruang lingkup Desa Maritim

adalah kalurahan pesisir yang berbatasan dengan laut atau kalurahan yang memiliki pantai. Pemerintah Daerah DIY melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/00566 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Maritim telah menetapkan 34 (tiga puluh empat) Kalurahan Maritim di DIY dimana 5 (lima) diantaranya ada di wilayah Kabupaten Bantul, antara lain Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Gading Sari, Kalurahan Tirtohargo dan Kalurahan Parangtritis.

Pada tahun 2022 ada 3 kalurahan di Kabupaten Bantul yang mendapatkan BKK Dana Keistimewaan ke Pemerintah Kalurahan Dalam Rangka Pengembangan Desa Maritim yaitu Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Srigading dan Kalurahan Gading Sari.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Dalam rangka menilai pencapaian pelaksanaan pembangunan baik sasaran daerah maupun sasaran perangkat daerah perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui bagaimana pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu dapat menjadi *feedback* untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja jangka menengah sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan lebih baik.

Evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, dilaksanakan untuk melihat keberhasilan dan kegagalan program pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga dapat digunakan sebagai input perencanaan periode selanjutnya, capaian tahun sebelumnya menjadi bagian penting untuk menentukan kebijakan dan perencanaan yang tepat.

2.3.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 memuat tujuan dan sasaran daerah yang dijabarkan dalam RKPD tahunan. Indikator tujuan dan indikator sasaran daerah merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan menjadi IKU Kabupaten Bantul. Capaian IKU Kabupaten Bantul tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.341 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2021	2022					OPD Pengampu	Keterangan
				Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi	Persentase Capaian RKPD (%)	Persentase Capaian RPJMD (%)		
A	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78.00	80.00	80.00	77.47	96.84	96.84	Bagian Organisasi	Surat KemenPAN no. B/963/RB.06/2022 tgl 6 Des 2022 ttg hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2022
			(BB)	(BB)	(BB)	(BB)				
1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Angka	4.0815	4.1315	4.1315	3.7840	91.59	91.59	Bag. Tata Pemerintahan	Hasil Proyeksi dengan Model linier
2	Opini Laporan Keuangan	Prediktit	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	BPKPAD	Capaian Tahun 2022 atas LKPD 2021
3	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	82	82.5	82.5	92.52	112.15	112.15	Inspektora	Surat KPK-RI No. B/1215/KSP.00/70-74/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 ttg Realisasi

N o.	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2021	2022					OPD Pengampu	Keterangan
				Targ et RPJ MD	Targ et RKP D	Realis asi	Persentase Capaian RKPD (%)	Persentase Capaian RPJMD (%)		
										Capaian MCP Tahun 2022
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,24	3.25	3.25	3.62	111.38	111.38	Diskominfo	Kemenpan melakukan evaluasi/penilaian Indeks SPBE setiap 2 tahun sekali sehingga capaian 2021 masih dipergunakan untuk realisasi tahun 2022.
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88,03	88.1	88.1	88.25	100.17	100.17	Bagian Organisasi	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2022
B	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80.28	80.63	80.63	80.69	100.07	100.07	BPS	BRS BPS No.73/12/34/Th.XXIV rilis 1 Desember 2022
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,86	74.01	74.01	73.9	99.85	99.85	BPS	BRS BPS No.73/12/34/Th.XXIV rilis 1 Desember 2022
7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.38	15.22	15.22	15.48	101.71	101.71	BPS	BRS BPS No.73/12/34/Th.XXIV rilis 1 Desember 2022
8	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	3	4	4	7	175.00	175.00	Dinas Kebudayaan	Keputusan Bupati Bantul No.592 tahun 2022 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Pamor Budaya Tahun 2022
C	Indeks Rasa Aman	Indeks	n/a	2.70	2.70		0.00	0.00	Sat Pol PP	Belum ada data
9	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	n/a	100	100	100	100.00	100.00	Satpol PP	Capaian 2022
D	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.99	3.80	3.80	5.20	136.84	136.84	BPS	Kabupaten Bantul Dalam Angka 2023

No.	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2021	2022					OPD Pengampu	Keterangan
				Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi	Persentase Capaian RKPD (%)	Persentase Capaian RPJMD (%)		
10	Rasio Gini	Angka	0,441	0,360	0,428 - 0,439	0.410	104.21	86.11	BPS	Terdapat perubahan target dari angka menjadi range/interval, tercantum dalam Perubahan RKPD Kab. Bantul Tahun 2022 (Bab III, tabel 3.1, hal. III-3). Perubahan target merupakan rekomendasi dari DIY saat fasilitasi Gubernur penyusunan perubahan RKPD 2022
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.04	3.90	4,00 - 3,00	3.97	100.75	98.21	BPS	Kabupaten Bantul Dalam Angka 2023
										Terdapat perubahan target dari angka menjadi range/interval, tercantum dalam Perubahan RKPD Kab. Bantul Tahun 2022 (Bab III, tabel 3.1, hal. III-3). Perubahan target merupakan rekomendasi dari DIY saat fasilitasi Gubernur penyusunan perubahan RKPD 2022
12	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	n/a	80	80	83.33	104.16	104.16	DKUKMP	Capaian 2022
E	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	n/a	66.12	67.26	64.71	96,21	97.87	Bappeda	Capaian 2022
13	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	n/a	73.71	75.13	75.69	100.75	102.69	DPUPKP	Capaian 2022
14	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	80	75.03	75.03	75.2	100.23	100.23	DPTR	Capaian 2022

N o.	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2021	2022					OPD Pengampu	Keterangan
				Targ et RPJ MD	Targ et RKP D	Realis asi	Persentase Capaian RKP D (%)	Persentase Capaian RPJMD (%)		
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66.87	62.76	62.75	62.84	100.14	100.13	DLH	Capaian tahun 2022
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	157.30	175.51	175.51	167.97	104.30	104.30	BPBD	Buku IRBI Tahun 2022
F	Tingkat Kemiskinan	Persen	14.04	13.37	13.37	12.27	108,23	108,23	BPS	Kabupaten Bantul Dalam Angka 2023
17	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	72.101	72.296	72.296	73.689	98.07	98.07	Dinsos	Capaian 2022
18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65.27	69.36	69.36	65.03	93,76	93,76	DP3APPK B	Data 2022
19	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	100	100	DP3APPK B	Capaian 2022

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2023.

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU Kabupaten Bantul Tahun 2022 dibandingkan dengan target Perubahan RKPD Tahun 2022 dari 6 indikator tujuan dan 19 indikator sasaran terdapat 3 indikator tujuan dan 15 indikator sasaran daerah yang memiliki persentase capaian lebih besar/sama dengan 100%, sedangkan 2 indikator tujuan dan 4 indikator sasaran daerah memiliki persentase capaian lebih kecil dari 100%, namun capaiannya termasuk dalam kategori sangat tinggi (91%-100%). Selain itu terdapat 1 indikator tujuan yang belum tersedia data realisasinya sehingga belum dapat dihitung capaiannya. Indikator tujuan yang tidak mencapai target Perubahan RKPD Tahun 2022 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, sedangkan indikator sasaran daerah yang tidak mencapai target Perubahan RKPD Tahun 2022 yaitu Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), Usia Harapan Hidup, Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator tujuan yang belum dapat dihitung capaiannya ada 1 indikator yaitu Indeks Rasa Aman.

Apabila capaian IKU Kabupaten Bantul dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021-2026 maka dari 6 indikator tujuan dan 19 indikator

sasaran terdapat 3 indikator tujuan dan 13 indikator sasaran daerah yang melampaui target dan memiliki persentase capaian lebih besar/sama dengan 100% dengan kinerja sangat tinggi, sedangkan 2 indikator tujuan dan 6 indikator sasaran daerah tidak mencapai target dan memiliki persentase capaian lebih kecil dari 100%, namun termasuk dalam kinerja sangat tinggi (91%-100%). Selain itu terdapat 1 indikator tujuan yang belum tersedia data realisasinya sehingga belum dapat dihitung capaiannya. Indikator tujuan yang tidak mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, sedangkan indikator sasaran daerah yang tidak mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), Usia Harapan Hidup, Rasio Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator tujuan yang belum dapat dihitung capaiannya ada 1 indikator yaitu Indeks Rasa Aman.

Berdasarkan uraian di atas, Indikator tujuan dan indikator sasaran daerah yang tidak mencapai target RKPD Tahun 2022 maupun target RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator tujuan reformasi birokrasi didukung oleh 5 indikator sasaran daerah yaitu Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), Opini Laporan Keuangan, Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Namun hanya 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Realisasi EPPD tahun 2022 sebesar 3,7840 atau 91,59% merupakan hasil proyeksi dengan Model Linier. Proyeksi nilai EPPD dilakukan karena belum ada penilaian dari Kemendagri dan sampai saat ini belum ada realisasi capaian nilai EPPD Tahun 2022.

2. Indikator Sasaran:

- 2.1. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Nilai EPPD dikeluarkan oleh Kepmendagri dan sampai saat ini belum ada realisasi capaian nilai EPPD Tahun 2022 sehingga dilakukan proyeksi dengan model linier dengan hasil sebesar 3,784 atau 91,59, namun jika dibandingkan dengan target pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 untuk tahun 2022 sebesar 4,1315, sehingga dapat dikatakan belum tercapai.

2.2. Usia Harapan Hidup (UHH)

Realisasi tahun 2022 sebesar 73,9 atau 99,85% dari target sebesar 74,01. Hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan Angka Kematian Bayi (AKB) cukup tinggi. Meskipun angka UHH tidak mencapai target, capaian tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 (73,89).

2.3. Rasio Gini

Realisasi sebesar 0,410 atau 86% dari target Target Rasio Gini mengalami perubahan di Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 (pada Bab III, tabel 3.1, hal. III-3) dari 0.360 menjadi range/interval (0,429-0,439) dikarenakan hasil rekomendasi dari DIY saat fasilitasi Gubernur penyusunan perubahan RKPD 2022. Namun jika dibandingkan dengan target pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 untuk tahun 2022 masih berupa angka sebesar 0,360, sehingga dapat dikatakan belum tercapai.

2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Realisasi sebesar 3,97 atau 100% dari target. Target mengalami perubahan di Perubahan RKPD Kab. Bantul Tahun 2022 (Bab III, tabel 3.1, hal. III-3) dari 3,90 menjadi range/interval (4,00–3,00) dikarenakan hasil rekomendasi dari DIY saat fasilitasi Gubernur penyusunan perubahan RKPD 2022. Namun jika dibandingkan dengan target pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 untuk tahun 2022 masih berupa angka sebesar 3,90 sehingga dapat dikatakan belum tercapai.

2.5. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

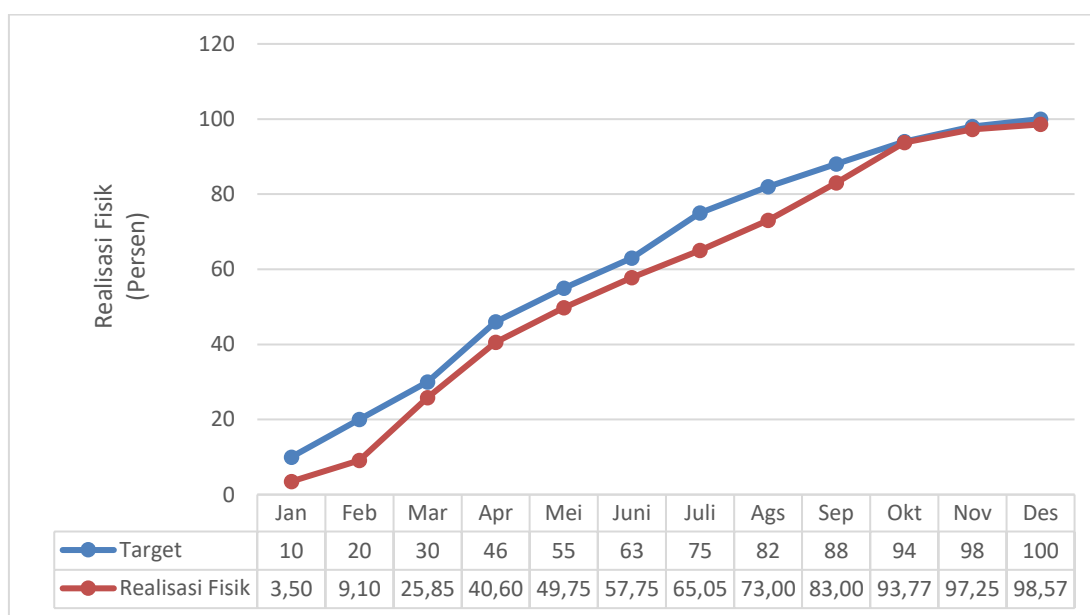
Realisasi tahun 2022 sebanyak 73.689 jiwa atau 98,07% dari target sebanyak 72.296 jiwa, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yang sebanyak 72.101 jiwa.

2.6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Realisasi tahun 2022 sebesar 65,27 atau 94,10% tidak mencapai target sebesar 69,36. Namun capaian ini masih menggunakan data realisasi tahun 2021 karena realisasi tahun 2022 belum rilis.

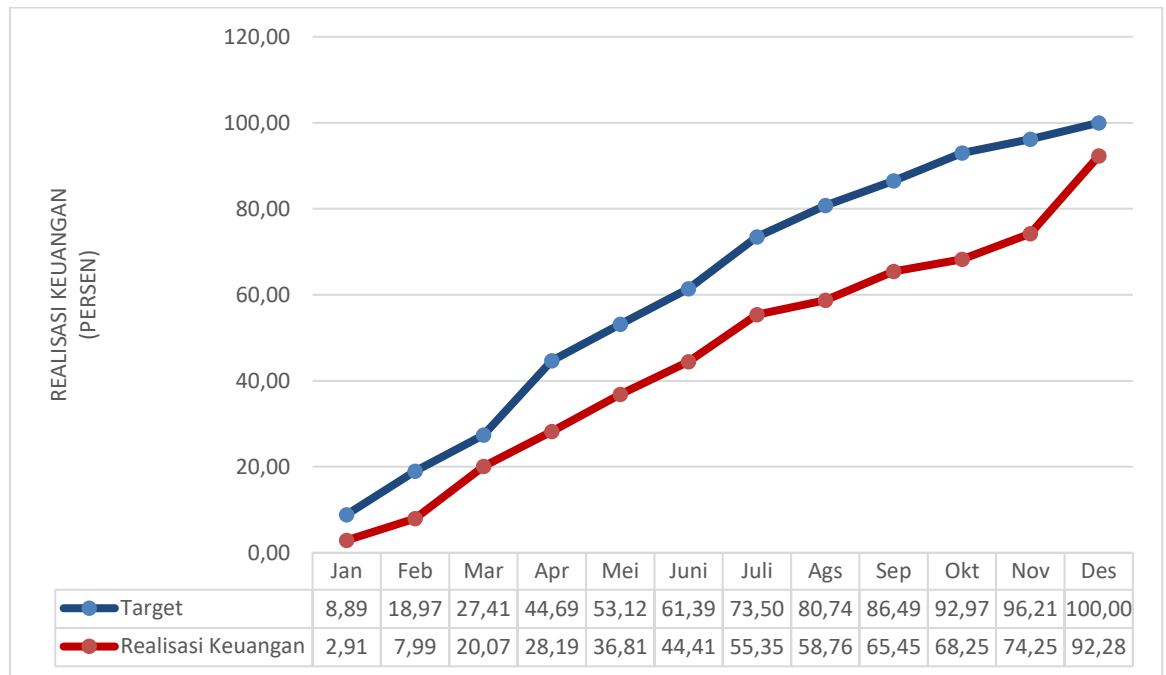
2.3.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian triwulan IV Tahun 2022, diketahui capaian fisik belanja langsung sebesar 98,57% dari target 100% sehingga terdapat deviasi fisik sebesar 1,43%. Potret target dan realisasi fisik selama tahun 2022 disajikan pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.54 Grafik target dan realisasi fisik Tahun 2022

Capaian keuangan sebesar 92,28% dari target 100% sehingga terdapat deviasi keuangan sebesar 7,72%. Potret target dan realisasi keuangan selama tahun 2022 disajikan pada grafik berikut ini.



Gambar 2.55 Grafik target dan realisasi keuangan Tahun 2022

Deviasi fisik yang cenderung masih tinggi, hal ini disebabkan antara lain:

1. Pembebasan lahan Cinomati belum dapat diselesaikan karena status lahan kehutanan, enclave dan oro-oro.
2. Gagal lelang pembangunan Rehab Ruang Kelas dan Pembangunan Laboratorium SMP.
3. Pembangunan Sarpras Destinasi Wisata (Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo) gagal dilaksanakan karena proses lelang melebihi batas waktu entri kontrak dalam aplikasi OMSPAN (gagal kontrak)
4. Sertifikasi tanah pemda, kesulitan melacak dokumen awal

Selain itu deviasi keuangan yang cenderung tinggi, hal ini disebabkan antara lain:

1. Sisa anggaran kegiatan dari efisiensi belanja di bawah SHBJ serta pengadaan barang dan jasa
2. Pembayaran listrik yang dilakukan sesuai besaran tagihan yang dikeluarkan sedangkan alokasi anggaran jauh lebih besar untuk antisipasi kenaikan TDL

3. Belanja Modal Peralatan Olahraga terkendala spesifikasi dalam pengusulan SHBJ tidak sesuai dengan kebutuhan dilapangan, jika dilakukan perubahan spesifikasi waktu pelaksanaan pengadaan tidak memungkinkan dan barang/produk2 yang sesuai dengan spesifikasi tidak mengandung TKDN dan harus import

Capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan capaian kinerja dari IKU perangkat daerah selama tahun 2021-2026, yang didasarkan dari capaian indikator sasaran perangkat daerah. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja perangkat daerah (IKU PD) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.342 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Bantul Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Akhir 2021	Target	Realisasi	Capaian	Perangkat Daerah
				2022	2022	2022	
Indikator Sasaran Daerah: Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)							
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	Persen	81,21	80.92	82.96	102.52%	SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Organisasi)
2	Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100.00%	SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Tapem)
3	Persentase rancangan perda dan perkara yang diharmonisasi	Persen	100	100	100	100.00%	SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Hukum)
4	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	Persen	100	100	100	100.00%	SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Tapem)
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	Persen	90	90	100	111.11%	SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Organisasi)
6	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100.00%	SEKRETARIAT DAERAH (Bag. PerekoSDA & Kesra)
7	Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	Persen	85	85	97.9	115.18%	SEKRETARIAT DAERAH (Bag. PK)
8	Persentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen	80	72	92.31	128.21%	SEKRETARIAT DPRD
9	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	n/a	100	100	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	95	95	100	105.26%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	nilai	68.5	69	57.44	83.25%	BKN (BKPSDM)
12	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	n/a	100	100	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13	Cakupan PD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	Persen	70	74	75.47	101.99%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	n/a	71.181	65.717	92.32%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Indikator Sasaran Daerah: Opini Laporan Keuangan							

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Akhir 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Perangkat Daerah
15	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah	n/a	6	0	100.00%	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
16	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	17	21.69	24.19	111.53%	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
Indikator Sasaran Daerah: Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK							
17	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	92	82.5	93.3	113.09%	INSPEKTORAT
18	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	100.00%	INSPEKTORAT
Indikator Sasaran Daerah: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)							
19	Index kualitas layanan informasi publik	Angka	80	83.75	83.81	100.07%	DISKOMINFO
20	Nilai Indeks Pembangunan TIK	angka	n/a	6.6	6.94	105.15%	DISKOMINFO
21	Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	2.7	2.7	2.9	107.41%	DISKOMINFO
Indikator Sasaran Daerah: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							
22	IKM Kinerja PTSP	nilai/angka	80.5	85.25	87	102.05%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	91	99.81	99.85	100.04%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	Lembaga	3	4	8	200.00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25	IKM Kapanewon	angka	90	90	94.15	104.61%	Kapanewon Bantul
26	IKM Kapanewon	angka	95	95	95.72	100.76%	Kapanewon Bambanglipuro
27	IKM Kapanewon	angka	90	90	94.53	105.03%	Kapanewon Dlingo
28	IKM Kapanewon	angka	90	90	92.10	102.33%	Kapanewon Imogiri
29	IKM Kapanewon	angka	90	90	92.55	102.83%	Kapanewon Jetis
30	IKM Kapanewon	angka	92	92	92.83	100.90%	Kapanewon Kretek
31	IKM Kapanewon	angka	90	90	92.33	102.59%	Kapanewon Kasihan
32	IKM Kapanewon	angka	92.45	90	94.49	104.99%	Kapanewon Pandak
33	IKM Kapanewon	angka	90	90	95.08	105.64%	Kapanewon Pundong
34	IKM Kapanewon	angka	90	90	93.35	103.72%	Kapanewon Pleret
35	IKM Kapanewon	angka	90	92	95.11	103.38%	Kapanewon Piyungan
36	IKM Kapanewon	angka	90	94	94.75	100.80%	Kapanewon Pajangan
37	IKM Kapanewon	angka	90	90	97.20	108.00%	Kapanewon Sanden
38	IKM Kapanewon	angka	90	90.00	93.40	103.78%	Kapanewon Srandakan

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Akhir 2021	Target	Realisasi	Capaian	Perangkat Daerah
				2022	2022	2022	
39	IKM Kapanewon	angka	90	90	90.49	100.54%	Kapanewon Sewon
40	IKM Kapanewon	angka	95	91	94.22	103.54%	Kapanewon Sedayu
41	IKM Kapanewon	angka	90	90	95.24	105.82%	Kapanewon Banguntapan
Indikator Sasaran Daerah: Usia Harapan Hidup							
42	Net Death Rate (NDR)	permil	21.7	21.5	20.4	105.12%	Rumah Sakit Panembahan Senopati
43	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	85	88.7	146.88	34.41%	Dinas Kesehatan
44	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	8	7.7	8.3	92.21%	Dinas Kesehatan
45	Case Fatality Rate Covid 19	Persen	2.75	2.75	1.13	158.91%	Dinas Kesehatan
46	Insiden Rate DBD	per 100.000 penduduk	125	125	9	192.80%	Dinas Kesehatan
47	Prevalensi stunting	Persen	9	9	6.42	128.67%	Dinas Kesehatan
Indikator Sasaran Daerah: Angka Harapan Lama Sekolah							
48	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	93.91	94	105.63	112.37%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
49	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	94.88	95	101.18	106.51%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
50	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	98.35	98.5	99.15	100.66%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
51	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	13.57	14	13.51	96.50%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
52	Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Persen	33	33	112.32	340.36%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
53	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Indeks	90	85	89.38	105.15%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
54	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	n/a	10	10	100.00%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
55	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	3.42	3.42	4.92	143.86%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Akhir 2021	Target	Realisasi	Capaian	Perangkat Daerah
				2022	2022	2022	
Indikator Sasaran Daerah:Desa /Kalurahan Pamor Budaya							
56	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Kalurahan	12	15	19	126.67%	Dinas Kebudayaan
Indikator Sasaran Daerah:Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat							
57	Persentase gangguan trantribum yang dapat di selesaikan	Persen	100	100	100	100.00%	Satuan Polisi Pamong Praja
58	Persentase Pemilih yang berpartisipasi	Persen	75	77	81.96	106.44%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
59	Jumlah intoleransi di masyarakat	Angka	0	0	0	100.00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
60	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.	Jumlah kejadian	0	0	0	100.00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Indikator Sasaran Daerah:Rasio Gini							
61	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	91.4	90.4	92.1	101.88%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
62	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	Persen	0.712	0.714	9.79	1371.15%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
63	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	0.4	0.45	1.91	424.44%	Dinas Kelautan dan Perikanan
64	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1,870,000	2,057,000	5,436,213	264.28%	Dinas Pariwisata
65	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1.00	1.25	2.03	162.40%	Dinas Pariwisata
66	Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah/org	708,750	744,188	767,234	103.10%	Dinas Pariwisata
67	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Rupiah (Miliar)	1,725.60	1,788.16	1,678.92	93.89%	Dinas Kopersai, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
68	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	persen	1.6	3.3	3.65	110.61%	Dinas Kopersai, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
69	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	1,684.64	1,824.47	2,193.86	120.25%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Indikator Sasaran Daerah:Tingkat Pengangguran Terbuka							
70	Jumlah tenaga kerja yang terserap	orang	6,500	7,500	14,230	189.73%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
71	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Kalurahan	27	33	65	196.97%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Indikator Sasaran Daerah:Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif							
72	Jumlah parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi	jumlah parameter	n/a	14	14	100.00%	Dinas Pariwisata

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Akhir 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Perangkat Daerah
73	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	70	70	70.1	100.14%	Dinas Kopersai, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
74	Pertumbuhan industri	Persen	1.8	1.9	1.93	101.58%	Dinas Kopersai, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
75	Pertumbuhan industri kreatif	Persen	0.2	0.31	0.31	100.00%	Dinas Kopersai, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Indikator Sasaran Daerah: Indeks Kualitas Infrastruktur							
76	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	78.02	78.43	78.93	100.64%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
77	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	n/a	0.4	1.7	425.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
78	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	80.01	80.37	80.46	100.11%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
79	Penduduk berakses air minum layak	Persen	82.36	83.56	83.56	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
80	Penduduk berakses sanitasi yang layak	Persen	84.83	87.86	87.86	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
81	Penanganan kawasan kumuh	Persen	92.49	10.59	44.72	422.29%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
82	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	1.83	1.83	10.7	584.70%	Dinas Perhubungan
Indikator Sasaran Daerah: Kesesuaian pemanfaatan ruang							
83	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persen	n/a	72	80	111.11%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
84	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Persen	n/a	74	76.26	103.05%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Indikator Sasaran Daerah: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup							
85	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	56	40	36.67	91.68%	Dinas Lingkungan Hidup
86	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	90	87	86.34	99.24%	Dinas Lingkungan Hidup
87	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	61.2	57	64.34	112.88%	Dinas Lingkungan Hidup
88	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	n/a	83.33	83.33	100.00%	Dinas Lingkungan Hidup
89	Capaian pengelolaan sampah	Persen	61.82	63.33	63.56	100.36%	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Akhir 2021	Target	Realisasi	Capaian	Perangkat Daerah
				2022	2022	2022	
Indikator Sasaran Daerah:Indeks Risiko Bencana							
90	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0.9	0.91	0.5	54.95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
91	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	menit	14.46	14.44	8.2	143.21%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Indikator Sasaran Daerah:Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)							
92	PPKS yang dilayani dan ditangani	Persen	100	100	100	100.00%	Dinas Sosial
Indikator Sasaran Daerah:Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)							
93	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Prevalensi	0,47	0.45	0.032	192.89%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indikator Sasaran Daerah:Kategori Kabupaten Layak Anak							
94	Nilai KLA	Angka	n/a	730	715	97.95%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul 2023

Secara umum, ringkasan kinerja capaian indikator pada sasaran perangkat daerah tersebut meliputi: 84 indikator yang memiliki persentase capaian lebih besar/sama dengan 100% (tercapai) dan 10 indikator yang memiliki persentase capaian lebih kecil dari 100% (tidak tercapai). 10 indikator yang tidak tercapai tersebut meliputi Capaian Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB, Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Ketahanan Daerah, dan Nilai KLA.

2.3.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022

Tahun 2022

Tabel 2-... Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022																											
No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13		
Sasaran 1:					Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel																						
1	4	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	Angka	83	31.371.995.600	83	8.722.171.434	83	9.562.612.748	83	1,00	9.319.921.152	100,00	97,46	83,00	18.042.092.586	100,00	57,51	Bag. Umpro				
1	4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	angka	83	80.000.000	83	10.000.000	83	10.000.000	83	1,00	9.800.000	100,00	98,00	83,00	19.800.000	100,00	24,75	Bag. Umpro				
2	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	angka	83	11.815.264.060	83	3.759.612.900	83	3.967.522.030	83	1,00	3.891.337.979	100,00	98,08	83,00	7.650.950.879	100,00	64,75	Bag. Umpro				
3	4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	10.686.151.060	100	1.792.604.300	100	2.216.169.016	100	1,00	2.153.544.521	100,00	97,17	100,00	3.946.148.821	100,00	36,93	Bag. Umpro				
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. Umum)	persen	100	1.342.548.230	100	1.781.120.100	100	1.989.690.128	100	1,00	1.910.037.170	100,00	96,00	100,00	3.691.157.270	100,00	274,94	Bag. Umpro				
	4	01	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	angka	83	5.193.699.000	83	868.939.820	83	885.837.260	83	1,00	868.028.996	100,00	97,99	83,00	1.736.968.816	100,00	33,44	Bag. Umpro				
	4	01	01	2.12	Fasilitasi Kerumahainggaan Sekretariat Daerah	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahainggaan Sekretariat Daerah	angka	83	1.790.384.000	83	95.000.000	83	75.000.000	83	1,00	74.400.000	100,00	99,20	83,00	169.400.000	100,00	9,46	Bag. Umpro				
	4	01	01	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	angka	83	463.949.250	83	414.894.314	83	418.394.314	83	1,00	412.772.486	100,00	98,66	83,00	827.666.800	100,00	178,40	Bag. Umpro				
	4	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	99.277.611.380	0	-	83	19.800.959.735	83,49	1,01	18.441.343.728	100,59	93,13	41,75	18.441.343.728	50,30	18,58	Bagian PK				
	4	01	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	681.640.700	0	-	100	102.875.700	100	1,00	90.245.000	100,00	87,72	50,00	90.245.000	50,00	13,24	Bagian PK				
	4	01	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	95.716.370.368	0	-	100	19.310.816.955	100	1,00	17.976.240.168	100,00	93,09	50,00	17.976.240.168	50,00	18,78	Bagian PK				
	4	01	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kineja pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	-	0	-	100	53.605.000	100	1,00	53.605.000	100,00	100,00	50,00	53.605.000	50,00		Bagian PK				
	4	01	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	1.355.799.411	0	-	100	176.644.160	100	1,00	168.492.500	100,00	95,39	50,00	168.492.500	50,00	12,43	Bagian PK				
	4	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	274.111.680	0	-	100	101.710.820	100	1,00	101.470.860	100,00	99,76	50,00	101.470.860	50,00	37,02	Bagian PK				
	4	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Persen	100	1.249.689.221	0	-	100	55.307.100	100	1,00	51.290.200	100,00	92,74	50,00	51.290.200	50,00	4,10	Bagian PK				
	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	capaian Nilai AKIP	angka	83	2.777.050.000	84,30	404.176.100	83	715.323.252	83,45	1,01	705.139.642	100,54	98,58	83,88	1.109.315.742	101,05	39,95	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi				
	4	01	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat	persen	100	927.840.100	100	66.236.650	100	230.584.000	100	1,00	223.891.636	100,00	97,10	100,00	290.128.286	100,00	31,27	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi				
	4	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	158	297.546.600	288	71.967.400	100	81.213.600	158	1,58	81.128.600	158,00	99,90	223,00	153.096.000	141,14	51,45	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi				
	4	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Proentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Persen	100	351.715.987	14	67.433.300	100	67.140.000	28	0,28	67.063.500	28,00	99,89	21,00	134.496.800	21,00	38,24	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi				
	4	01	01	2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian Kinerja penataan oragnisasi perangkat daerah	persen	100	1.199.947.313	100	198.538.750	100	336.385.652	90	0,90	333.055.906	90,00	99,01	95,00	531.594.656	95,00	44,30	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi				
	4	01	04		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelenbngan dan Ketatalaksanaan	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	2.875.000.000	100	272.252.000	100	554.390.000	60	0,60	553.868.046	60,00	99,91	80,00	826.120.046	80,00	28,73	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.								
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	01	04	2.01	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase Kinerja pentaan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	persen	100	1.800.000.000	100	168.984.000	100	439.030.000	4	0,04	438.689.750	4,00	99,92	52,00	607.673.750	52,00	33,76	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
	4	01	04	2.02	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	persen	56	1.075.000.000	70	103.268.000	78,6	115.360.000	56	0,71	115.178.296	71,25	99,84	63,00	218.446.296	112,50	20,32	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	770.744.500	84,3	231.071.350	83	125.252.175	83,49	1,01	124.466.500	100,59	99,37	83,90	355.537.850	101,08	46,13	Bagian Tata Pemerintahan	
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	356.672.640	100	53.557.250	100	18.680.575	100	1,00	18.645.100	100,00	99,81	100,00	72.202.350	100,00	20,24	Bagian Tata Pemerintahan	
	4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	209.561.860	100	139.125.300	100	77.951.600	100	1,00	77.691.000	100,00	99,67	100,00	216.816.300	100,00	103,46	Bagian Tata Pemerintahan	
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Persen	100	204.510.000	100	38.388.800	100	28.620.000	100	1,00	28.130.400	100,00	98,29	100,00	66.519.200	100,00	32,53	Bagian Tata Pemerintahan	
	4	01	02		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Ketersediaan Dokumen Data Pendukung LPMD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggara an Pemerintah Daerah (EPPD)	persen	100	6.742.668.450	100	1.109.395.434	100	1.161.967.620	100	1,00	1.154.589.800	100,00	99,37	100,00	2.263.985.234	100,00	33,58	Bagian Tata Pemerintahan	
	4	01	02	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Persen	100	4.428.912.600	100	1.080.332.934	100	1.070.892.620	100	1,00	1.065.190.300	100,00	99,47	100,00	2.145.523.234	100,00	48,44	Bagian Tata Pemerintahan	
	4	01	02	2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Persen	100	2.313.755.850	100	29.062.500	100	91.075.000	100	1,00	89.399.500	100,00	98,16	100,00	118.462.000	100,00	5,12	Bagian Tata Pemerintahan	
	4	01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persen	89,5	261.050.000	100	151.846.500	8,75	223.540.000	8,75	1,00	223.540.000	100,00	100,00	54,38	375.386.500	60,75	143,80	Bagian Tata Pemerintahan	
	4	01	04	2.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Persentase kelembagaan PD yang proporsional	Persen	100	261.050.000	100	151.846.500	100	223.540.000	100	1,00	223.540.000	100,00	100,00	100,00	375.386.500	100,00	143,80	Bagian Tata Pemerintahan	
	4	01	01		Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Kinerja (Bag.Hukum)	Angka	83	1.145.391.000	83,4	195.262.300	83	237.711.150	83,49	1,01	235.097.692	100,59	98,90	83,45	430.359.992	100,54	37,57	Bagian Hukum	
	4	01	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat	Persen	100	765.391.000	100	73.519.650	100	82.981.750	106,25	1,06	82.312.130	106,25	99,19	103,13	155.831.780	103,13	20,36	Bagian Hukum	
	4	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	170.000.000	100	98.171.300	100	117.269.400	100	1,00	116.643.400	100,00	99,47	100,00	214.814.700	100,00	126,36	Bagian Hukum	
	4	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan BMD	persen	100	210.000.000	100	23.571.350	100	37.460.000	100	1,00	36.142.162	100,00	96,48	100,00	59.713.512	100,00	28,44	Bagian Hukum	
	4	01	02		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	persen	100	2.271.161.000	100	533.953.000	100	785.904.000	100	1,00	776.281.500	100,00	98,78	100,00	1.310.234.500	100,00	57,69	Bagian Hukum	
	4	01	02	03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	persen	100	2.271.161.000	100	533.953.000	100	785.904.000	100	1,00	776.281.500	100,00	98,78	100,00	1.310.234.500	100,00	57,69	Bagian Hukum	
	4	01	04		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			90	2.500.000.000	88	255.047.500	88	390.000.000	88	1,00	382.672.800	100,00	98,12	88,00	637.720.300	97,78	25,51	Bagian Hukum	
	4	01	04	2.01	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			100	2.500.000.000	100	255.047.500	100	390.000.000	100	1,00	382.672.800	100,00	98,12	100,00	637.720.300	100,00	25,51	Bagian Hukum	
	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	1.943.665.400	83	219.717.520	83	436.210.664	97,05	1,17	423.329.389	116,93	97,05	90,03	643.046.909	108,46	33,08	Bag. Kesra	
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	873.608.970	100	59.680.000	100	152.326.500	96,79	0,97	147.434.043	96,79	96,79	98,39	207.114.043	98,39	23,71	Bag. Kesra	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	689.760.180	100	93.936.420	-	224.714.164	97,39		218.849.346		97,39	98,70		312.785.766	98,70	45,35	Bag. Kesra	
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	380.296.250	100	66.101.100	100	59.170.000	65	0,65	57.046.000	65,00	96,41	82,50		123.147.100	82,50	32,38	Bag. Kesra	
	4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	39.447.196.700	100	6.029.239.970	100	7.808.579.623	98,82	0,99	7.716.133.278	98,82	98,82	99,41		13.745.373.248	99,41	34,84	Bag. Kesra	
	4	01	02	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesra Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	39.447.196.700	100	6.029.239.970	100	7.808.579.623	98,82	0,99	7.716.133.278	98,82	98,82	99,41		13.745.373.248	99,41	34,84	Bag. Kesra	
	4	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	Persen	100	1.797.872.500	100	381.403.450	100	329.842.875	82,00	0,82	328.409.095	82,00	99,57	91,00		709.812.545	91,00	39,48	Bag. PerekoSDA	
	4	01	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	1.288.964.900	100	160.801.715	100	123.772.375	82,06	0,82	123.227.450	82,06	99,56	91,03		284.029.165	91,03	22,04	Bag. PerekoSDA	
	4	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	103.097.600	100	145.841.000	100	145.760.500	121,65	1,22	145.203.600	121,65	99,62	110,83		291.044.600	110,83	282,30	Bag. PerekoSDA	
	4	01	01	2.09	Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Persen	100	405.810.000	100	74.760.735	100	60.310.000	99,45	0,99	59.978.045	99,45	99,45	99,72		134.738.780	99,72	33,20	Bag. PerekoSDA	
	4	01	03		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian daerah yang ditindak lanjuti	Persen	100	1.744.008.000	100	1.566.778.150	100	530.826.000	108,0	1,08	529.074.500	108,00	99,67	104,00		2.095.852.650	104,00	120,17	Bag. PerekoSDA	
	4	01	03	2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten	Persen	100	943.295.500	100	818.278.150	100	483.051.000	107,9	1,08	481.349.500	107,89	99,65	103,94		1.299.627.650	103,94	137,78	Bag. PerekoSDA	
	4	01	03	02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	355.500.000	100	-	100	10.000.000	100,0	1,00	10.000.000	100,00	100,00	100,00		10.000.000	100,00	2,81	Bag. PerekoSDA	
	4	01	03	04	Kegiatan Pemantauan- Kebijakan Sumber daya Alam	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Sumber daya Alam	Persen	100	445.212.500	100	748.500.000	100	37.775.000	99,86763733	1,00	37.725.000	99,87	99,87	99,93		786.225.000	99,93	176,60	Bag. PerekoSDA	
	4	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	Angka	85	2.606.261.000	83	527.100.450	83	855.420.877	83	1,00	829.392.803	100,00	96,96	83,00		1.356.493.253	97,65	52,05	Bag. PBJ	
	4	01	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	875.606.400	100	124.238.975	100	219.383.723	100	1,00	218.666.574	100,00	99,67	100,00		342.905.549	100,00	39,16	Bag. PBJ	
	4	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persen	100	1.183.658.588	100	254.564.955	100	504.435.764	100	1,00	482.153.631	100,00	95,58	100,00		736.718.586	100,00	62,24	Bag. PBJ	
	4	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pemeliharaan BMD	Persen	100	546.996.012	100	148.296.520	100	131.601.390	100	1,00	128.572.598	100,00	97,70	100,00		276.869.118	100,00	50,62	Bag. PBJ	
	4	01	03		Program Perekonomian dan Pembangunan	Prosentase penyelesaian pengadaan secara elektronik	persen	100	4.234.576.400	100	650.873.207	100	579.978.938	100	1,00	577.188.832	100,00	99,52	100,00		1.228.062.039	100,00	29,00	Bag. PBJ	
	4	01	03	2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Pengelaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen		4.234.576.400	100	650.873.207	100	579.978.938	100	1,00	577.188.832	100,00	99,52	100,00		1.228.062.039		29,00	Bag. PBJ	
	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	197.745.900.285	83	30.391.787.786	84	34.129.865.343	83	0,99	32.101.327.117	98,81	94,06	83,00		62.493.114.903	97,65	31,60	Setwan	
	4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Angka	85	461.570.100	83	168.510.000	84	184.977.500	84	1,00	182.070.000	100,00	98,43	83,50		350.580.000	98,24	75,95	Setwan	
	4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Angka	85	27.095.045.910	85	4.806.144.838	84	5.385.190.287	84	1,00	5.024.399.177	100,00	93,30	84,50		9.830.544.015	99,41	36,28	Setwan	
	4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Angka	85	1.183.171.060	100	107.570.000	84	318.595.000	84	1,00	288.620.000	100,00	90,59	92,00		396.190.000	108,24	33,49	Setwan	
	4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Angka	85	13.301.189.949	85	1.695.777.358	84	2.583.106.699	82	0,98	1.976.266.041	97,62	76,51	83,50		3.672.043.399	98,24	27,61	Setwan	
	4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Angka	85	5.209.618.443	85	722.821.947	84	762.903.480	82	0,98	737.275.612	97,62	96,64	83,50		1.460.097.559	98,24	28,03	Setwan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Angka	85	9.227.688.740	100	481.294.525	84	1.216.299.325	84	1,00	640.007.440	100,00	52,62	92,00	1.121.301.965	108,24	12,15	Setwan	
	4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Angka	85	138.466.705.829	85	22.215.416.182	84	23.405.692.092	84	1,00	23.031.138.083	100,00	98,40	84,50	45.246.554.265	99,41	32,68	Setwan	
	4	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	Angka	85	2.800.910.254	85	194.252.936	84	273.100.960	83	0,99	221.550.764	98,81	81,12	84,00	415.803.700	98,82	14,85	Setwan	
	4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda dan Propempera	Persen	85	9.980.250.905	85	6.238.798.868	82	15.737.584.150	81	0,99	10.595.487.161	98,78	67,33	83,00	16.834.286.029	97,65	168,68	Setwan	
	4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persen	85	2.937.545.998	85	1.273.688.250	82	3.970.512.750	81	0,99	2.522.952.400	98,78	63,54	83,00	3.796.640.650	97,65	129,25	Setwan	
	4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	85	1.097.452.333	85	597.541.500	82	1.919.619.000	82	1,00	982.723.510	100,00	51,19	83,50	1.580.265.010	98,24	143,99	Setwan	
	4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Persen	85	2.262.378.246		405.092.000	82	2.513.497.000	82	1,00	1.488.416.700	100,00	59,22	41,00	1.893.508.700	48,24	83,70	Setwan	
	4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	85	1.517.553.460		2.490.696.500	82	3.447.195.000	81	0,99	2.981.287.160	98,78	86,48	40,50	5.471.983.660	47,65	360,58	Setwan	
	4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	Persen	85	716.737.632	85	779.086.750	82	1.085.632.800	82	1,00	998.954.600	100,00	92,02	83,50	1.778.041.350	98,24	248,07	Setwan	
	4	02	02	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	Persen	85	242.101.967	85	102.596.500	82	176.650.000	82	1,00	76.667.000	100,00	43,40	83,50	179.263.500	98,24	74,04	Setwan	
	4	02	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	85	1.206.481.269		590.097.368	82	2.624.477.600	81	0,99	1.544.483.791	98,78	58,85	40,50	2.134.583.159	47,65	176,93	Setwan	
	4	01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	2.452.741.800	75	222.697.000	95	536.250.000	95	1,00	532.100.000	100,00	99,23	85,00	754.797.000	85,00	30,77	Bappeda	
	4	01	04	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Persen	100	2.452.741.800	90	222.697.000	100	536.250.000	100	1,00	532.100.000	100,00	99,23	95,00	754.797.000	95,00	30,77	Bappeda	
	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	87,5	42.580.258.831	85,36	6.650.208.931	85,5	8.241.544.482	86	1,01	7.824.644.480	100,58	94,94	85,68	14.474.853.411	97,92	33,99	Bappeda	
	5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	215.780.875	100	39.654.350	100	26.300.000	100	1,00	26.292.400	100,00	99,97	100,00	65.946.750	100,00	30,56	Bappeda	
	5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	34.844.462.726	100	5.634.695.865	100	7.062.323.684	100	1,00	6.747.924.565	100,00	95,55	100,00	12.382.620.430	100,00	35,54	Bappeda	
	5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	613.555.000	0	-	100	109.305.000	100	1,00	109.055.000	100,00	99,77	50,00	109.055.000	50,00	17,77	Bappeda	
	5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	3.602.065.865	100	428.355.525	100	510.150.935	100	1,00	475.216.106	100,00	93,15	100,00	903.571.631	100,00	25,08	Bappeda	
	5	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Persen	100	751.766.246	0,00	-	100	112.278.000	100	1,00	87.489.000	100,00	77,92	50,00	87.489.000	50,00	11,64	Bappeda	
	5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	999.445.158	100	328.898.154	100	162.937.600	100	1,00	155.658.700	100,00	95,53	100,00	484.556.854	100,00	48,48	Bappeda	
	5	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.553.182.961	100	218.605.037	100	258.249.263	100	1,00	223.008.709	100,00	86,35	100,00	441.613.746	100,00	28,43	Bappeda	
	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALLAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Persen	100	16.078.246.708	0	1.621.557.024	100	2.041.623.564	100	1,00	1.977.976.318	100,00	96,88	50,00	3.599.533.342	50	22,39	Bappeda	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	97		0		95		0	-		-		0,00		0		Bappeda	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkara/perda	Persen	100	8.938.620.051	100	1.143.571.024	100	1.203.858.048	100	1,00	1.150.503.420	100,00	95,57	100,00	2.294.074.444	100	25,66	Bappeda	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	Persen	100	1.871.965.192	100	291.568.500	100	249.558.516	4	0,04	246.404.048	4,00	98,74	52,00	537.972.548	52	28,74	Bappeda	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	Persen	100	5.267.661.465	100	186.417.500	100	588.207.000	100	1,00	581.068.850	100,00	98,79	100,00	767.486.350	100	14,57	Bappeda	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	8.339.577.879	100	964.147.842	100	1.832.397.596	100	1,00	1.767.750.611	100,00	96,47	100,00	2.731.898.453	100	32,76	Bappeda	
						Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	100		100		100		100	1,00		100,00		100,00		100		Bappeda	
						Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100		100		100		100	1,00		100,00		100,00		100		Bappeda	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	2.512.994.309	100	333.775.215	100	360.336.564	100	1,00	332.756.807	100,00	92,35	100,00	666.532.022	100,00	26,52	Bappeda	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Persen	100	3.544.716.758	100	515.547.250	100	861.522.516	100	1,00	841.843.000	100,00	97,72	100,00	1.357.390.250	100,00	38,29	Bappeda	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	2.281.866.812	100	114.825.377	100	610.538.516	100	1,00	593.150.804	100,00	97,15	100,00	707.976.181	100,00	31,03	Bappeda	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan road map SIDA	Persen	100	1.221.973.540	78,5	238.705.500	100	280.871.532	100	1,00	275.605.414	100,00	98,13	89,25	514.310.914	89,25	42,09	Bappeda	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persen	100	444.745.312	0	0,00	100	110.145.516	100	1,00	108.846.018	100,00	98,82	50,00	108.846.018	50,00	24,47	Bappeda	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kegiatan roadmap SIDA yang terlaksana	Persen	100	777.228.228	100	238.705.500	100	170.726.016	100	1,00	166.759.396	100,00	97,68	100,00	405.464.896	100,00	52,17	Bappeda	
5	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82,65	43.541.623.877	82,43	6.455.185.819	82,43	8.786.411.363	82,64	1,00	7.554.313.887	100,25	85,98	82,54	14.009.499.706	99,86	32,17	BKPSDM	
5	03	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	95,8	67.690.296	85	6.727.500	85	10.091.000	85	1,00	10.072.000	100,00	99,81	85,00	16.799.500	88,73	24,82	BKPSDM	
5	03	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	95,8	34.321.307.081	95	5.595.478.282	95	7.039.870.790	95	1,00	5.891.822.038	100,00	83,69	95,00	11.487.300.320	99,16	33,47	BKPSDM	
5	03	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	97,4	5.910.638.742	97	296.915.410	97	689.967.591	97	1,00	679.039.092	100,00	98,42	97,00	975.954.502	99,59	16,51	BKPSDM	
5	03	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD	Persen	97,4	0	97	38.685.000	97	321.482.000	97	1,00	315.136.572	100,00	98,03	97,00	353.821.572	99,59		BKPSDM	
5	03	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.336.013.618	99	278.213.747	100	400.152.032	100	1,00	370.014.829	100,00	92,47	99,50	648.228.576	99,50	48,52	BKPSDM	

No	Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	03	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	98	1.905.974.140	98	239.165.880	98	324.847.950	100	1,02	288.229.356	102,04	88,73	99,00	527.395.236	101,02	27,67	BKPSDM	
	5	03	02		Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	83	34.814.116.440	18,07	4.263.282.774	80	1.470.180.132	97,82	1,22	1.056.917.316	122,28	71,89	57,95	5.320.200.090	69,81	15,28	BKPSDM	
						Peta Kompetensi ASN	Persen	18		84		6	5.491.562.500	17,36	2,89	5.286.489.921	289,33	96,27	50,68	5.286.489.921	281,56		BKPSDM	
						Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin	Persen	100		100		100	861.887.500	100	1,00	799.287.500	100,00	92,74	100,00	799.287.500	100,00		BKPSDM	
	5	03	02	2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keakuratan Data ASN	Persen	95	6.652.785.340	99,55	635.123.234	95	756.955.132	98	1,03	413.832.816	103,16	54,67	98,78	1.048.956.050	103,97	15,77	BKPSDM	
	5	03	02	2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional	Persen	80	3.030.126.500	65,7	540.802.250	79	713.225.000		97,6	643.084.500	123,54	90,17	81,65	1.183.886.750	102,06	39,07	BKPSDM	
	5	03	02	2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	18	22.894.923.600	117,21	2.956.558.290	6	5.491.562.500	20,45	3,41	5.286.489.921	340,83	96,27	68,83	8.243.048.211	382,39	36,00	BKPSDM	
	5	03	02	2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Persen	100	2.236.281.000	95,59	130.799.000	95	861.887.500	98	1,03	799.287.500	103,16	92,74	96,80	930.086.500	96,80	41,59	BKPSDM	
	4	01	04		Program Penyelenggaraan Krisntimesan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	90	3.346.064.000	40	188.212.800	20	354.868.000	12,16	0,61	354.845.500	60,80	99,99	26,08	543.058.300	28,98	16,23	BKPSDM	
	4	01	04	2.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase peningkatan pemahaman peserta Didlat Internalisasi	Persen	100	3.346.064.000	100	188.212.800	100	354.868.000	100	1,00	354.845.500	100,00	99,99	100,00	543.058.300	100,00	16,23	BKPSDM	
	2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	PERSEN	64	1.620.832.480	0	181.388.480	60	357.916.814	60	1,00	357.290.464	100,00	99,83	30,00	538.678.944	46,88	33,23	BIDANG KEARSIPAN	
						CAKUPAN OPD DAN DESA DENGAN PENGELOLAAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN TEKATA BAIK	pesentase	-		40		0		0					20,00				BIDANG KEARSIPAN	
	2	24	02	2.01	Pengelola an Arsip Dinamis Daerah Kabupaten /Kota	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif	PERSEN	95	1.036.160.480	0	113.380.240	74	292.178.814	74	1,00	291.936.964	100,00	99,92	37,00	405.317.204	38,95	39,12	BIDANG KEARSIPAN	
						Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	persentase	0		100		0		0					50,00					
	2	24	02	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	persen	93	584.672.000	0	68.008.240	80	65.738.000	80	1,00	65.353.500	100,00	99,42	40,00	133.361.740	43,01	22,81	BIDANG KEARSIPAN	
						Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	persentase	0		100		0		0					50,00					
	5	24	03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberdaan dan lucurluhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	persen	73	144.236.000	0	19.192.500	69	13.626.000	100	69,00	13.623.500	144,93	99,98	50,00	32.816.000	68,493	22,75	BIDANG KEARSIPAN	
						CAKUPAN ARSIP STATIS YANG DIAKUISISI	persentase	0		26		0		0					13,00					
	5	24	03	2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	persen	100	144.236.000	0	19.192.500	100	13.626.000	100	1,00	13.623.500	100,00	99,98	50,00	32.816.000	50	22,75	BIDANG KEARSIPAN	
						Capaian Kinerja Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	persentase	0		100		0		0					50,00					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	05	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	83	354.177.394.139	100	1.704.919.556	100	76.582.231.511	91,66	0,92	70.197.107.264	91,66	91,66	95,83	71.902.026.820	115,46	20,30	BPKPAD	
	05	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	502.450.000	100	74.962.500	100	76.700.000	100	1,00	75.065.000	100,00	97,87	100,00	150.027.500	100	29,86	BPKPAD	
	05	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	121.643.629.369	100	74.962.500	100	21.946.126.365	100	1,00	20.730.802.298	100,00	94,46	100,00	20.805.764.798	100	17,10	BPKPAD	
	05	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	579.570.000		438.382.500	100	543.660.000	100	1,00	397.325.000	100,00	73,08	50,00	835.707.500	50	144,19	BPKPAD	
	05	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	10.387.985.950	80	1.116.612.056	100	1.729.206.450	92,79	0,93	1.362.175.409	92,79	78,77	86,40	2.478.787.465	86,40	23,86	BPKPAD	
	05	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	32.343.750.000	80	1.116.612.056	100	12.099.590.000	100,00	1,00	11.841.058.793	100,00	97,86	90,00	12.957.670.849	90,00	40,06	BPKPAD	
	05	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	184.573.045.720	80	31.375.488.347	100	39.212.766.096	83,97	0,84	34.963.076.372	83,97	89,16	81,99	66.338.564.719	81,99	35,94	BPKPAD	
	05	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	4.146.963.100	80	693.278.827	100	974.182.600	100,00	1,00	827.604.392	100,00	84,95	90,00	1.520.883.219	90,00	36,67	BPKPAD	
	5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n- 1	Persen	100	8.080.739.710	98,96	727.006.720	100	13.438.569.532	100,00	1,00	9.283.651.662	100,00	69,08	99,48	10.010.658.382	99,48	123,88	BPKPAD	
	5	02	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Persen	100	8.080.739.710	100	727.006.720	92	13.438.569.532	100	1,09	9.283.651.662	108,70	69,08	100,00	10.010.658.382	100,00	123,88	BPKPAD	
	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	23,69	62.836.032.830	0	8.209.848.158	100	10.792.441.350	48,1	0,48	9.716.493.260	48,10	90,03	24,05	17.926.341.418	101,52	28,53	BPKPAD	
	5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Persen	100	62.836.032.830		8.209.848.158	100	10.792.441.350	48,1	0,48	9.716.493.260	48,10	90,03	24,05	17.926.341.418	24,05	28,53	BPKPAD	
	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83	63.108.661.243	78	19.507.693.638	83	10.442.922.241	88,61	1,07	9.000.932.097	106,76	86,19	83,31	28.508.625.735	100,36747	45,17	Inspektorat Daerah	
	6	01	01	2.01	Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	95	30.000.000	-	74.962.500	95	6.000.000	95	1,00	5.938.750	100,00	98,98		80.901.250		269,67	Inspektorat Daerah	
	6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	44.985.907.442	100	18.188.169.523	100	8.614.194.736	100	1,00	7.239.031.662	100,00	84,04	100,00	25.427.201.185	100	56,52	Inspektorat Daerah	
	6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian	Persen	95	3.473.368.000	95	199.109.800	95	233.873.266	95	1,00	221.097.760	100,00	94,54	95,00	420.207.560	100	12,10	Inspektorat Daerah	
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	95	8.558.840.801	95	423.500.495	95	847.734.950	95	1,00	816.940.168	100,00	96,37	95,00	1.240.440.663	100	14,49	Inspektorat Daerah	
	6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	95	527.280.000	-	-	95	65.000.000	95	1,00	64.350.000	100,00	99,00		64.350.000		12,20	Inspektorat Daerah	
	6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95	2.124.720.000	95	324.633.420	95	308.685.840	95	1,00	293.541.873	100,00	95,09	95,00	618.175.293	100	29,09	Inspektorat Daerah	
	6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Persen	95	3.408.545.000	95	297.317.900	95	367.433.449	95	1,00	360.031.884	100,00	97,99	95,00	657.349.784	100	19,29	Inspektorat Daerah	
	6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan ketataan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Persen	16	2.593.534.599	0	565.865.000	12	1.137.546.000	12	1,00	1.040.046.700	100,00	91,43	6,00	1.605.911.700	37,50	61,92	Inspektorat Daerah	
	6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	Persen	100	2.368.904.599	95	565.865.000	100	977.426.500	100	1,00	908.877.200	100,00	92,99	97,50	1.474.742.200	97,50	62,25	Inspektorat Daerah	
	6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	224.630.000	0,00	0,00	100	160.119.500	100	1,00	131.169.500	100,00	81,92	50,00	131.169.500	50	58,39	Inspektorat Daerah	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	40	9.506.186.000	0	1.168.612.000	20	1.642.467.600	20	1,00	1.610.774.600	100,00	98,07	10,00	2.779.386.600	25,00	29,24	Inspektorat Daerah	
	6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persen	90	830.028.000		-	70	65.299.000	70	1,00	63.824.000	100,00	97,74	35,00	63.824.000	38,89	7,69	Inspektorat Daerah	
	6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Persen	100	8.676.158.000	95	1.168.612.000	100	1.577.168.600	100	1,00	1.546.950.600	100,00	98,08	97,50	2.715.562.600	97,5	31,30	Inspektorat Daerah	
	2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	Angka	92	40.069.392.399	100	6.532.304.310	100	7.302.204.496	100	1,00	6.443.868.438	100,00	88,25	100,00	12.976.172.748	108,70	32,38	DisKOMINFO	
	2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	517.392.299	100	94.340.750	100	106.351.500	100	1,00	106.152.500	100,00	99,81	100,00	200.493.250	100,00	38,75	DisKOMINFO	
	2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	29.885.294.148	100	4.962.671.009	100	5.785.817.729	100	1,00	4.948.344.655	100,00	85,53	100,00	9.911.015.664	100,00	33,16	DisKOMINFO	
	2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	4.072.726.886	100	844.801.902	100	644.060.250	100	1,00	625.920.865	100,00	97,18	100,00	1.470.722.767	100,00	36,11	DisKOMINFO	
	2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.384.227.637	100	249.591.950	100	343.437.975	100	1,00	342.236.175	100,00	99,65	100,00	591.828.125	100,00	24,82	DisKOMINFO	
	2	16	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	3.209.751.429	100	380.898.699	100	422.537.042	100	1,00	421.214.243	100,00	99,69	100,00	802.112.942	100,00	24,99	DisKOMINFO	
	2	16	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	74	1.868.848.754	100	1.278.870.175	100	1.395.423.550	100	1,00	1.388.978.140	100,00	99,54	100,00	2.667.848.315	135,14	142,75	DisKOMINFO	
	2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100	1.868.848.754	100	1.278.870.175	100	1.395.423.550	100	1,00	1.388.978.140	100,00	99,54	100,00	2.667.848.315	100	142,75	DisKOMINFO	
	2	16	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	2,95	51.559.100.995		17.668.883.637	2,75	12.288.517.200	2,75	1,00	12.071.794.499	100,00	98,24	1,38	29.740.678.136	46,61	57,68	DisKOMINFO	
						Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas KOMINFO	%	100				100		100	1,00		100,00		50,00		50		DisKOMINFO	
	2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi Pemerintah	%	100	37.309.236.599		7.937.231.904	100	10.402.820.700	100	1,00	10.360.216.996	100,00	99,59	50,00	18.297.448.900	50	49,04	DisKOMINFO	
						Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	lain/sub domain/sub domain yang dimanfaatkan	416				356		356	1,00		100,00		178,00		42,79		DisKOMINFO	
	2	16	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	95	14.249.864.396	95	9.731.651.733	79	1.885.696.500	79	1,00	1.711.577.503	100,00	90,77	87,00	11.443.229.236	91,58	80,30	DisKOMINFO	
	2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	1.035.441.563	0	153.400.000	100	149.080.000	100	1,00	148.480.000	100,00	99,60	50,00	301.880.000	50	29,15	DisKOMINFO	
	2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	100	1.035.441.563	0,00	153.400.000	100	149.080.000	100	1,00	148.480.000	100,00	99,60	50,00	301.880.000	50	29,15	DisKOMINFO	
						Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	98		0,00		95		95	1,00		100,00		47,50		48,47		DisKOMINFO	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12		13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	95		0,00		67		67	1,00		100,00		33,50		35,26		Diakominfo		
						persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	95		0,00		67		67	1,00		100,00		33,50		35,26		Diakominfo		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	81	8.204.925.378	0	1.236.933.446	65	804.643.700	83,2	1,28	792.715.797	128,00	98,52	41,60	2.029.649.243	51,36	24,74	Diakominfo		
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	%	25	5.315.095.387		753.803.031	10	514.656.200	10	1,00	510.249.932	100,00	99,14	5,00	1.264.052.963	20	23,78	Diakominfo		
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	84	2.889.829.991		483.130.415	48	289.987.500	48	1,00	282.465.865	100,00	97,41	24,00	765.596.280	28,57	26,49	Diakominfo		
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	%	100	8.298.504.350	0	286.057.941	42,86	471.000.000	33,3	0,78	458.296.950	77,69	97,30	16,65	744.354.891	16,65	8,97	Diakominfo		
2	22	08	2.06		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	%	100	8.298.504.350		286.057.941	100	471.000.000	100	1,00	458.296.950	100,00	97,30	50,00	744.354.891	50,00	8,97	Diakominfo		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	89,5	52.436.147.061	87,91	6.028.936.440	88,1	6.387.636.812	88,25	1,00	5.660.354.889	100,17	88,61	88,08	11.689.291.329	98,41	22,29	DPMPITSP		
2	18	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	83	578.500.000	100	10.475.000	100	10.500.000	100	1,00	10.452.500	100,00	99,55	100,00	20.927.500	120,48	3,62	DPMPITSP		
2	18	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	angka	83	25.134.152.048	100	4.153.561.989	100	4.727.555.858	100	1,00	4.037.271.016	100,00	85,40	100,00	8.190.833.005	120,48	32,59	DPMPITSP		
2	18	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai AKIP	angka	83	1.940.400.000	100	14.350.000	100	29.800.000	100	1,00	29.050.000	100,00	97,48	100,00	43.400.000	120,48	2,24	DPMPITSP		
2	18	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP	angka	83	12.076.824.000	100	950.787.960	100	661.941.200	100	1,00	637.343.381	100,00	96,28	100,00	1.588.131.341	120,48	13,15	DPMPITSP		
2	18	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	angka	83	2.966.667.091	100	400.920.558	100	369.657.600	100	1,00	362.420.214	100,00	98,04	100,00	763.340.772	120,48	25,73	DPMPITSP		
2	18	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	angka	83	8.856.228.922	100	402.790.933	83	510.057.154	100	1,20	505.717.778	120,48	99,15	100,00	908.508.711	120,48	10,26	DPMPITSP		
2	18	01	2.13		Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	angka	83	883.375.000	100	96.050.000	100	78.125.000	100	1,00	78.100.000	100,00	99,97	100,00	174.150.000	120,48	19,71	DPMPITSP		
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100	2.324.310.580	100	520.635.740	100	499.752.144	100	1,00	497.848.694	100,00	99,62	100,00	1.018.484.434	100	43,82	DPMPITSP		
2	18	04	2.01		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	Dokumen	55	2.324.310.580	3751	520.635.740	55	499.752.144	55	1,00	497.848.694	100,00	99,62	1903,00	1.018.484.434	3460	43,82	DPMPITSP		
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan	Persen	100	540.321.120	100	78.637.500	100	99.136.016	100	1,00	98.387.516	100,00	99,24	100,00	177.025.016	100,00	32,76	DPMPITSP		
2	18	06	2.01		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota	Jenis	2	540.321.120	2	78.637.500	2,00	99.136.016	2	1,00	98.387.516	100,00	99,24	2,00	177.025.016	100,00	32,76	DPMPITSP		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	83	56.842.710.199	80	464.994.990	84	10.639.707.519	84	1,00	9.603.416.422	100,00	90,26	82,00	10.068.411.412	98,80	17,71	Diadukapil		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	12	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	83	3.731.740.269	80	464.994.990	100	490.045.504	84	0,84	489.918.400	84,00	99,97	82,00	954.913.390	98,80	25,59	Diadukcapil	
	2	12	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	angka	83	38.783.711.942	14	6.239.517.210	83	7.402.190.610	0	-	6.428.838.842	-	86,85	7,00	12.668.356.052	8,43	32,66	Diadukcapil	
	2	12	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai AKIP	angka	83	623.708.724		182.305.000	100	53.857.500	0	-	53.857.500	-	100,00	0,00	236.162.500	0,00	37,86	Diadukcapil	
	2	12	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP	angka	83	9.346.598.594		1.470.980.540	83	1.855.352.736	0	-	1.799.830.187	-	97,01	0,00	3.270.810.727	0,00	34,99	Diadukcapil	
	2	12	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	angka	83	1.020.467.465		552.893.750	83	118.209.000	0	-	116.354.000	-	98,43	0,00	669.247.750	0,00	65,58	Diadukcapil	
	2	12	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	angka	83	914.608.350	12	211.936.835	83	235.517.048	0	-	231.549.070	-	98,32	6,00	443.485.905	7,23	48,49	Diadukcapil	
	2	12	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	angka	83	2.421.874.855	14	409.526.448	83	484.535.121	0	-	483.068.423	-	99,70	7,00	892.594.871	8,43	36,86	Diadukcapil	
	2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kepemilikan Dokumen Adminduk	persen	99,81	3.701.752.264	100	565.935.320	99,81	682.176.602	1,00	0,01	679.143.518	1,00	99,56	50,50	1.245.078.838	50,60	33,63	Diadukcapil	
	2	12	02	2.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan Dokumen Adminduk	persen	99,81	3.701.752.264	25000	565.935.320	99,81	682.176.602	1,00	0,01	679.143.518	1,00	99,56	12500,50	1.245.078.838	12524,30	33,63	Diadukcapil	
	2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	96	2.524.526.542	100	442.076.790	192	374.975.317	1,99	0,01	373.474.728	1,04	99,60	50,99	815.551.518	53,12	32,31	Diadukcapil	
	2	12	03	2.01	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	persen	96	2.057.780.506	5000	352.370.180	96	318.311.405	0,99	0,01	317.311.046	1,04	99,69	2500,50	669.681.226	2604,68	32,54	Diadukcapil	
	2	12	03	2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Prosentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	96	466.746.036	3500	89.706.610	96	56.663.912	0,9948	0,01	56.163.682	1,04	99,12	1750,50	145.870.292	1823,43	31,25	Diadukcapil	
	2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Diadukcapil	persen	99,5	2.719.000.285	0	625.716.580	99,5	651.859.048	99,5	1,00	651.108.548	100,00	99,88	49,75	1.276.825.128	50	46,96	Diadukcapil	
	2	12	04	2.01	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemandaitan dan Penyajian Database Kependudukan	Prosentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Diadukcapil	persen	99,5	1.320.328.635		148.209.860	99,5	399.376.542	99,5%	0,01	399.276.382	1,00	99,97	0,50	547.486.242	0,5	41,47	Diadukcapil	
	2	12	04	2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Diadukcapil	persen	99,5	1.398.671.650		477.506.720	99,5	252.482.506	99,5%	0,01	251.832.166	1,00	99,74	0,50	729.338.886	0,5	52,15	Diadukcapil	
	2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Diadukcapil	persen	100	531.447.664	100	91.805.610	100	63.872.409	100	1,00	62.029.082	100,00	97,11	100,00	153.834.692	100	28,95	Diadukcapil	
	2	12	05	2.01	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Prosentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Diadukcapil	persen	100	531.447.664	12	91.805.610	100	63.872.409	100	1,00	62.029.082	100,00	97,11	56,00	153.834.692	56	28,95	Diadukcapil	
	4	1			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	0	0	0	0	100	16.000.000	100	1	16.000.000	100,00	100,00	50	16.000.000			Kapanewon Bantul	
					Adat, seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	0,00	0	-	100	16.000.000	100	1,00	16.000.000	100,00	100,00	50,00	16.000.000	50		Kapanewon Bantul	
	4	1	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Perencanaan & Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kapanewon Bantul	
	4	1	04	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kapanewon Bantul	
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	90	17.339.550.600	85	2.355.887.885	86	2.782.411.856	100	1,16	2.673.334.690	116,28	96,08	92,50	5.029.222.575	102,78	29,00	Kapanewon Bantul	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	persen	100	78.000.000	100	2.250.000	100	3.000.000	100	1,00	3.000.000	100,00	100,00	100,00	5.250.000	100,00	6,73	Kapanewon Bantul	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	12.602.583.040	100	1.862.374.203	100	2.351.634.693	100	1,00	2.249.887.678	100,00	95,67	100,00	4.112.261.881	100,00	32,63	Kapanewon Bantul	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	1.012.758.320	100	113.166.200	100	105.429.064	100	1,00	102.518.864	100,00	97,24	100,00	215.685.064	100,00	21,30	Kapanewon Bantul	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	964.492.000	100	26.200.000	100	26.492.000	100	1,00	26.127.098	100,00	98,62	100,00	52.327.098	100,00	5,43	Kapanewon Bantul	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	979.239.600	100	142.468.039	100	157.730.080	100	1,00	154.702.250	100,00	98,08	100,00	297.170.289	100,00	30,35	Kapanewon Bantul	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	1.702.477.640	100	209.429.443	100	138.126.019	100	1,00	137.098.800	100,00	99,26	100,00	346.528.243	100,00	20,35	Kapanewon Bantul	
	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	94	212.224.000	90	22.451.000	90	72.849.000	90	1,00	71.349.000	100,00	97,94	90,00	93.800.000	95,74	44,20	Kapanewon Bantul	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	100	151.604.000	100	10.650.000	100	61.029.000	100	1,00	59.529.000	100,00	97,54	100,00	70.179.000	100,00	46,29	Kapanewon Bantul	
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen	95	60.620.000	100	11.801.000	100	11.820.000	100	1,00	11.820.000	100,00	100,00	100,00	23.621.000	105,26	38,97	Kapanewon Bantul	
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	352.600.000	100	81.630.000	195	80.200.000	195	1,00	76.500.000	100,00	95,39	147,50	158.130.000	147,5	44,85	Kapanewon Bantul	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kahurahan	persen	100	260.000.000	100	81.630.000	100	57.500.000	100	1,00	53.800.000	100,00	93,57	100,00	135.430.000	100	52,09	Kapanewon Bantul	
	7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	95	92.600.000	-	-	95	22.700.000	95	1,00	22.700.000	100,00	100,00	47,50	22.700.000	50	24,51	Kapanewon Bantul	
	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketenteraman dan ketertiban kapanewon	persen	100	98.000.000	100	15.200.000	100	19.600.000	100	1,00	18.700.000	100,00	95,41	100,00	33.900.000	100	34,59	Kapanewon Bantul	
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	persen	100	98.000.000	100	15.200.000	100	19.600.000	100	1,00	18.700.000	100,00	95,41	100,00	33.900.000	100	34,59	Kapanewon Bantul	
	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	844.753.440	100	66.655.000	100	104.325.000	100	1,00	102.850.000	100,00	98,59	100,00	169.505.000	100	20,07	Kapanewon Bantul	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	844.753.440	100	66.655.000	100	104.325.000	100	1,00	102.850.000	100,00	98,59	100,00	169.505.000	100	20,07	Kapanewon Bantul	
	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	-	-	-	-	100	13.750.000	100	1,00	13.750.000	100,00	100,00	50,00	13.750.000			Kap. Bambanglipuro	
	2	22	08	2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi	Persen					100	13.750.000	100	1,00	13.750.000	100,00	100,00	50,00	13.750.000			Kap. Bambanglipuro	
	4	01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Bambanglipuro	
	4	01	04	206	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Bambanglipuro	
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	17.143.410.270	79,59	2.601.984.008	80	2.867.171.453	80	1,00	2.749.840.872	100,00	95,91	79,80	5.351.824.880	94,99	31,22	Kap. Bambanglipuro	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	77.700,00	100	2.625.000	100	825.000	100	1,00	825.000	100,00	100,00	100,00	3.450.000	100		Kap. Bambanglipuro	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	13.289.084.133	100	2.082.299.927	100	2.373.735.783	100	1,00	2.258.870.544	100,00	95,16	100,00	4.341.170.471	100	32,67	Kap. Bambanglipuro	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	1.693.079.626	100	212.644.150	95	151.831.580	95	1,00	151.406.580	100,00	99,72	97,50	364.050.730	97,5	21,50	Kap. Bambanglipuro	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	300.911.400	0	-	100	11.010.000	100	1,00	11.010.000	100,00	100,00	50,00	11.010.000	50	3,66	Kap. Bambanglipuro	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	846.382.400	100	147.332.240	95	144.375.864	95	1,00	143.908.722	100,00	99,68	97,50	291.240.962	97,5	34,41	Kap. Bambanglipuro	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	1.013.952.711	100	157.082.691	100	185.393.226	100	1,00	183.820.026	100,00	99,15	100,00	340.902.717	100,00	33,62	Kap. Bambanglipuro	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Angka	95	482.437.500	100	31.800.000	95	41.632.500	95	1,00	41.632.500	100,00	100,00	97,50	73.432.500	102,63	15,22	Kap. Bambanglipuro	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Persen	100	431.937.500	100	26.050.000	100	38.342.500	100	1,00	38.342.500	100,00	100,00	100,00	64.392.500	100,00	14,91	Kap. Bambanglipuro	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	95	50.500.000	100	5.750.000	95	3.290.000	95	1,00	3.290.000	100,00	100,00	97,50	9.040.000	102,63	17,90	Kap. Bambanglipuro	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	94	857.886.000	90	98.059.250	90	136.733.750	100	1,11	136.733.750	111,11	100,00	95,00	234.793.000	101,06	27,37	Kap. Bambanglipuro	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Persen	94	529.986.000	90	98.059.250	90	65.361.000	100	1,11	65.361.000	111,11	100,00	95,00	163.420.250	101,06	30,83	Kap. Bambanglipuro	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	100	327.900.000			90	71.372.750	90	1,00	71.372.750	100,00	100,00	45,00	71.372.750	45	21,77	Kap. Bambanglipuro	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	734.307.000	100	138.444.750	100	95.678.500	100	1,00	95.678.500	100,00	100,00	100,00	234.123.250	100,00	31,88	Kap. Bambanglipuro	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	734.307.000		138.444.750	100	95.678.500	100	1,00	95.678.500	100,00	100,00	50,00	234.123.250	50	31,88	Kap. Bambanglipuro	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	131.000.000	100	12.360.000	100	5.000.000	100	1,00	5.000.000	100,00	100,00	100,00	17.360.000	100	13,25	Kap. Bambanglipuro	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	131.000.000		12.360.000	100	5.000.000	100	1,00	5.000.000	100,00	100,00	50,00	17.360.000	50	13,25	Kap. Bambanglipuro	
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang Berkualitas	persen	-	-	-	-	100	18.500.000	100	1,00	18.500.000	100,00	100,00	50,00	18.500.000			Kap. Dingo	
2	22	08	2.09		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	persen	-	-	-	-	100	18.500.000	100	1,00	18.500.000	100,00	100,00	50,00	18.500.000			Kap. Dingo	
4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persen	persen	100	264.160.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	17,15	Kap. Dingo	
4	01	04	2.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	persen		100	264.160.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	17,15	Kap. Dingo	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	angka	100	16.482.502.550	80	2.622.485.048	85	2.816.873.697	82,98	0,98	2.705.350.160	97,62	96,04	81,49	5.327.835.208	81,49	32,32	Kap. Dingo	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Angka	100	50.000.000	79	4.250.000	85,00	4.250.000	93	1,09	4.250.000	109,41	100,00	86,00	8.500.000	86	17,00	Kap. Dingo	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	12.097.625.944	100	1.918.035.257	100	2.310.402.761	100	1,00	2.202.815.346	100,00	95,34	100,00	4.120.850.603	100	34,06	Kap. Dingo	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	angka	90	1.362.714.734	80	272.391.750	85,00	150.452.902	82	0,96	149.952.802	96,47	99,67	81,00	422.344.552	90	30,99	Kap. Dingo	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah		100	324.000.000			100	34.700.000	100	1,00	34.699.000	100,00	100,00	50,00	34.699.000	50	10,71	Kap. Dingo	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	angka	100	1.404.276.072	80	238.301.191	80	159.708.480	83	1,04	157.634.658	103,75	98,70	81,50	395.935.849	81,5	28,20	Kap. Dingo	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	1.243.885.800	100	189.506.850	100	157.359.554	100	1,00	155.998.354	100,00	99,13	100,00	345.505.204	100,00	27,78	Kap. Dingo	
	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	429.990.000	100	33.962.500	100	57.970.000	100	1,00	57.955.000	100,00	99,97	100,00	91.917.500	100,00	21,38	Kap. Dingo	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persen	100	289.000.000	95	21.000.000	95	49.975.000	100	1,05	49.960.000	105,26	99,97	97,50	70.960.000	97,5	24,55	Kap. Dingo	
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	angka	100	140.990.000	90	12.962.500	90	7.995.000	100	1,11	7.995.000	111,11	100,00	95,00	20.957.500	95	14,86	Kap. Dingo	
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persen	100	1.021.977.500	85	73.100.000	100	85.150.000	100	1,00	81.020.000	100,00	95,15	92,50	154.120.000	92,5	15,08	Kap. Dingo	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persen	100	641.897.500	85	73.100.000	85	52.650.000	100	1,18	52.630.000	117,65	99,96	92,50	125.730.000	92,5	19,59	Kap. Dingo	
	7	01	03	2.03	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	100	380.080.000			100	32.500.000	100	1,00	28.390.000	100,00	87,35	50,00	28.390.000	50	7,47	Kap. Dingo	
	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	799.174.000	100	31.400.000	100	95.825.000	100	1,00	95.055.000	100,00	99,20	100,00	126.455.000	100,00	15,82	Kap. Dingo	
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	799.174.000	100	31.400.000	100	95.825.000	100	1,00	95.055.000	100,00	99,20	100,00	126.455.000	100,00	15,82	Kap. Dingo	
	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	140.670.000	100	12.712.500	100	15.025.000	100	1,00	15.025.000	100,00	100,00	100,00	27.737.500	100,00	19,72	Kap. Dingo	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persen	100	140.670.000	100	12.712.500	100	15.025.000	100	1,00	15.025.000	100,00	100,00	100,00	27.737.500	100,00	19,72	Kap. Dingo	
	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang Berkualitas	Persen	100	23.000.000	0	-	100	23.000.000	100	1,00	23.000.000	100,00	100,00	50,00	23.000.000	50,00	100,00	Kap. Imogiri	
	2	22	08	2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Persen	100	23.000.000	0		100	23.000.000	100	1,00	23.000.000	100,00	100,00	50,00	23.000.000	50	100,00	Kap. Imogiri	
	4	01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Angka	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Imogiri	
	4	01	04	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	309.460.000	-		100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Imogiri	
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82	17.185.361.331	80,7	2.701.666.229	81,43	2.905.104.095	81	0,99	2.776.317.468	99,47	95,57	80,85	5.397.983.697	98,60	31,41	Kap. Imogiri	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	43.350.000	75	5.100.000	85	5.100.000	100	1,18	5.100.000	117,65	100,00	87,50	10.200.000	87,5	23,53	Kap. Imogiri	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	13.272.384.835	100	2.040.769.848	100	2.364.311.034	91,37858238	0,91	2.240.473.906	91,38	94,76	95,69	4.281.243.754	95,6892912	32,26	Kap. Imogiri	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	99	1.437.836.096	100	300.589.000	95	172.027.932	99,14006291	1,04	170.548.600	104,36	99,14	99,57	471.137.600	100,575789	32,77	Kap. Imogiri	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah	Persen	100	254.600.000	-	-	100	3.500.000	100	1,00	3.500.000	100,00	100,00	50,00	3.500.000	50	1,37	Kap. Imogiri		
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	732.651.200	100	184.106.915	100	130.603.280	97,91420859	0,98	127.879.168	97,91	97,91	98,96	311.986.083	98,9571043	42,58	Kap. Imogiri		
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	1.444.539.200	100	171.100.466	95	229.561.849	99,67500915	1,05	228.815.794	104,92	99,68	99,84	399.916.260	99,8375046	27,68	Kap. Imogiri		
	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	persen	100	452.200.000	60	44.700.000	95	57.360.000	100	1,05	57.360.000	105,26	100,00	80,00	102.060.000	80	22,57	Kap. Imogiri		
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100	360.400.000	52	41.100.000	100	50.560.000	100	1,00	50.560.000	100,00	100,00	76,00	91.660.000	76	25,43	Kap. Imogiri		
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	persen	100	91.800.000	75	3.600.000	100	6.800.000	100	1,00	6.800.000	100,00	100,00	87,50	10.400.000	87,5	11,33	Kap. Imogiri		
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	1.409.122.500	75	152.600.000	95	177.825.000	100,00	1,05	177.675.000	105,26	99,92	87,50	330.275.000	87,5	23,44	Kap. Imogiri		
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	persen	100	876.840.000	95	111.100.000	100	111.415.000	100	1,00	111.415.000	100,00	100,00	97,50	222.515.000	97,5	25,38	Kap. Imogiri		
	7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	100	532.282.500	45	41.500.000	100	66.410.000	99,77	1,00	66.260.000	99,77	99,77	72,39	107.760.000	72,39	20,24	Kap. Imogiri		
	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	724.750.000	70	23.600.000	95	40.500.000	100	1,05	40.500.000	105,26	100,00	85,00	64.100.000	85	8,84	Kap. Imogiri		
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	724.750.000	70	23.600.000	95	40.500.000	100	1,05	40.500.000	105,26	100,00	85,00	64.100.000	85	8,84	Kap. Imogiri		
	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	361.600.000	30	20.125.000	100	15.400.000	100	1,00	15.400.000	100,00	100,00	65,00	35.525.000	65	9,82	Kap. Imogiri		
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	361.600.000	30	20.125.000	100	15.400.000	100	1,00	15.400.000	100,00	100,00	65,00	35.525.000	65	9,82	Kap. Imogiri		
	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang Berkualitas	Persen	100	-	0	-	100	19.000.000	100	1,00	19.000.000	100,00	100,00	50,00	19.000.000	50		Kap. Jetis		
	2	22	08	2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Persen	100		0		100	19.000.000		1	0,01	19.000.000	1,00	100,00	0,50	19.000.000	0,50		Kap. Jetis	
	4	01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	82,28	0,82	45.300.000	82,28	100,00	41,14	45.300.000	41,14	14,64	Kap. Jetis		
	4	01	04	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Jetis		
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	angka	82	17.010.205.610	80	2.488.178.933	85	2.743.814.173	529,12	6,22	2.577.523.956	622,49	93,94	304,56	5.065.702.889	371,414634	29,78	Kap. Jetis		
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Angka	100	362.074.000	79	7.225.000	85	7.225.000	82,28	0,97	7.225.000	96,80	100,00	80,64	14.450.000	80,64	3,99	Kap. Jetis		
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	85	12.078.216.610	90	2.053.017.219	100	2.258.502.459	82,28	0,82	2.095.334.525	82,28	92,78	86,14	4.148.351.744	101,341176	34,35	Kap. Jetis		
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	angka	100	1.258.404.869	80	110.241.610	85	147.693.610	82,28	0,97	145.327.450	96,80	98,40	81,14	255.569.060	81,14	20,31	Kap. Jetis		
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	783.606.000	100	5.400.000	100	25.100.000	100	1,00	25.100.000	100,00	100,00	100,00	30.500.000	100	3,89	Kap. Jetis		
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	angka	100	1.309.668.916	90	149.847.664	80	142.847.664	82,28	1,03	142.598.181	102,85	99,83	86,14	292.445.845	86,14	22,33	Kap. Jetis		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	1.218.235.215	100	162.447.440	100	162.445.440	100	1,00	161.938.800	100,00	99,69	100,00	324.386.240	100,00	26,63	Kap. Jetis	
	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persen	94	138.225.000	90	25.475.000	92	25.475.000	100	1,09	25.475.000	108,70	100,00	95,00	50.950.000	101,06	36,86	Kap. Jetis	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	100	76.100.000	95	11.350.000	95	11.350.000	100	1,05	11.350.000	105,26	100,00	97,50	22.700.000	97,50	29,83	Kap. Jetis	
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	angka	100	62.125.000	90	14.125.000	90	14.125.000	92,55	1,03	14.125.000	102,83	100,00	91,28	24.187.500	91,28	38,93	Kap. Jetis	
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persen	95	775.651.000	85	127.565.000	100	163.435.000	100	1,00	163.435.000	100,00	100,00	92,50	291.000.000	97,37	37,52	Kap. Jetis	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kahurahan	persen	100	496.565.000	85	127.565.000	85	129.415.000	100	1,18	129.415.000	117,65	100,00	92,50	256.980.000	92,50	51,75	Kap. Jetis	
	7	01	03	2.03	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	100	279.086.000	92		100	34.020.000	100	1,00	34.020.000	100,00	100,00	96,00	34.020.000	96,00	12,19	Kap. Jetis	
	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	651.137.500	100	116.087.500	100	124.587.500	100	1,00	124.587.500	100,00	100,00	100,00	240.675.000	100,00	36,96	Kap. Jetis	
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	100	651.137.500	100	116.087.500	100	124.587.500	100	1,00	124.587.500	100,00	100,00	100,00	240.675.000	100,00	36,96	Kap. Jetis	
	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	36.000.000	100	5.250.000	100	5.250.000	100	1,00	5.250.000	100,00	100,00	100,00	10.500.000	100,00	29,17	Kap. Jetis	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persen	100	36.000.000	100	5.250.000	100	5.250.000	100	1,00	5.250.000	100,00	100,00	100,00	10.500.000	100,00	29,17	Kap. Jetis	
	2	22	08		PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	-	0	-	100	16.500.000	100	1,00	16.500.000	100,00	100,00	50,00	16.500.000	50		Kap. Kretek	
	2	22	08	2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100				100	16.500.000	100	1,00	16.500.000	100,00	100,00	50,00	16.500.000	50		Kap. Kretek	
	4	01	04		PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKAR TA URUSAN KELEMBAG AAN DAN KETATALAK SANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.270.000	100,00	99,93	50,00	45.270.000	50	14,63	Kap. Kretek	
	4	01	04	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	309.460.000			100	45.300.000	100	1,00	45.270.000	100,00	99,93	50,00	45.270.000	50	14,63	Kap. Kretek	
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	100	16.344.934.520	80,16	2.687.989.731	85	2.917.978.967	85	1,00	2.734.509.364	100,00	93,71	82,58	5.422.499.095	82,58	33,18	Kap. Kretek	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	62.000.000	88,5	6.300.000	100	10.000.000	100	1,00	10.000.000	100,00	100,00	94,25	16.300.000	94,25	26,29	Kap. Kretek	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadmnitrasian Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	13.000.089.520	80,16	2.059.690.186	100	2.456.890.091	100	1,00	2.276.803.662	100,00	92,67	90,08	4.336.493.848	90,08	33,36	Kap. Kretek	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	persen	100	1.437.070.544	80,16	291.874.000	100	187.032.500	100	1,00	185.961.000	100,00	99,43	90,08	477.835.000	90,08	33,25	Kap. Kretek	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	persen	-	340.000.000	-	-	100	750.000	100	1,00	750.000	100,00	100,00	50,00	750.000		0,22	Kap. Kretek	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	756.774.476	100	263.298.311	100	140.314.396	100	1,00	138.845.570	100,00	98,95	100,00	402.143.881	100,00	53,14	Kap. Kretek	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	748.999.980	100	66.827.234	100	122.991.980	100	1,00	122.149.132	100,00	99,31	100,00	188.976.366	100,00	25,23	Kap. Kretek	
	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90	618.700.000	90	47.757.500	90	96.950.000	90	1,00	96.937.500	100,00	99,99	90,00	144.695.000	100,00	23,39	Kap. Kretek	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persen	100	415.250.000	95	37.557.500	100	78.500.000	100	1,00	78.487.500	100,00	99,98	97,50	116.045.000	97,5	27,95	Kap. Kretek	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	angka	100	203.450.000	100	10.200.000	100	18.450.000	100	1,00	18.450.000	100,00	100,00	100,00	28.650.000	100	14,08	Kap. Kretek	
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	95	1.095.000.000	85	75.434.500	95	136.750.000	95	1,00	136.735.000	100,00	99,99	90,00	212.169.500	94,7368421	19,38	Kap. Kretek	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persen	100	708.000.000	85	75.434.500	100	90.000.000	100	1,00	89.985.000	100,00	99,98	92,50	165.419.500	92,5	23,36	Kap. Kretek	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	persen	100	387.000.000	0	-	100	46.750.000	100	1,00	46.750.000	100,00	100,00	50,00	46.750.000	50	12,08	Kap. Kretek	
	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	926.000.000	100	84.685.000	100	73.000.000	100	1,00	72.991.000	100,00	99,99	100,00	157.676.000	100	17,03	Kap. Kretek	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	95	926.000.000	100	84.685.000	95	73.000.000	95	1,00	72.991.000	100,00	99,99	97,50	157.676.000	102,631579	17,03	Kap. Kretek	
	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	95	50.000.000	100	4.025.000	95	4.000.000	95	1,00	4.000.000	100,00	100,00	97,50	8.025.000	102,631579	16,05	Kap. Kretek	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persen	100	50.000.000	100	4.025.000	100	4.000.000	100	1,00	4.000.000	100,00	100,00	100,00	8.025.000	100,00	16,05	Kap. Kretek	
	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas	Persen	100	16.250.000	0	-	100	16.250.000	100	1,00	16.250.000	100,00	100,00	50,00	16.250.000	50	100,00	Kap. Kasihan	
	2	22	08	2.09		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persen	100	16.250.000	0	-	100	16.250.000	100	1,00	16.250.000	100,00	100,00	50,00	16.250.000	50	100,00	Kap. Kasihan	
	4	01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Kasihan	
	4	01	04	2.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persen	100	309.460.000	0	-	90	45.300.000	90	1,00	45.300.000	100,00	100,00	45,00	45.300.000	45	14,64	Kap. Kasihan	
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	89	17.445.772.035	80	2.412.857.253	85	3.181.916.132	85	1,00	3.082.763.351	100,00	96,88	82,50	5.495.620.604	92,6966292	31,50	Kap. Kasihan	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	95	60.000.000	1	5.000.000	95	9.000.000	95	1,00	9.000.000	100,00	100,00	48,00	14.000.000	50,5263158	23,33	Kap. Kasihan	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	13.100.646.030	100	1.885.291.666	100	2.529.142.196	100	1,00	2.439.775.732	100,00	96,47	100,00	4.325.067.398	100,00	33,01	Kap. Kasihan	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	95	904.777.068	85	273.252.700	95	137.431.854	95	1,00	137.342.466	100,00	99,93	90,00	410.595.166	94,74	45,38	Kap. Kasihan	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	95	1.402.327.605	7	79.006.300	95	91.451.000	95	1,00	91.441.000	100,00	99,99	51,00	170.447.300	53,68	12,15	Kap. Kasihan	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95	968.278.000			95	182.125.600	95	1,00	173.138.047	100,00	95,07	47,50	173.138.047	50,00	17,88	Kap. Kasihan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	95	1.009.743.332	100	170.306.587	95	232.765.482	95	1,00	232.066.106	100,00	99,70	97,50	402.372.693	102,63	39,85	Kap. Kasihan	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	565.786.997	100	70.122.000	100	88.500.000	100	1,00	88.460.000	100,00	99,95	100,00	158.582.000	100,00	28,03	Kap. Kasihan	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	90	377.191.427	0	50.122.000	90	72.500.000	90	1,00	72.500.000	100,00	100,00	45,00	122.622.000	50	32,51	Kap. Kasihan	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Angka	90	188.595.570	100	20.000.000	90	16.000.000	90	1,00	15.960.000	100,00	99,75	95,00	35.960.000	105,56	19,07	Kap. Kasihan	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	93	813.482.875	100	57.428.250	90	57.591.500	90	1,00	57.591.500	100,00	100,00	95,00	115.019.750	102,15	14,14	Kap. Kasihan	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	90	542.322.125	100	57.428.250	90	35.516.500	90	1,00	35.516.500	100,00	100,00	95,00	92.944.750	105,56	17,14	Kap. Kasihan	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	82	271.160.750	0	-	82	22.075.000	82	1,00	22.075.000	100,00	100,00	41,00	22.075.000	50	8,14	Kap. Kasihan	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	93	416.759.471	100	51.635.630	90	32.850.000	90	1,00	32.520.000	100,00	99,00	95,00	84.155.630	102,150538	20,19	Kap. Kasihan	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	90	416.759.471	100	51.635.630	90	32.850.000	90	1,00	32.520.000	100,00	99,00	95,00	84.155.630	105,555556	20,19	Kap. Kasihan	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	616.570.652	100	1.230.000	90	10.500.000	90	1,00	10.500.000	100,00	100,00	95,00	11.730.000	99	1,90	Kap. Kasihan	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	90	616.570.652	100	1.230.000	90	10.500.000	90	1,00	10.500.000	100,00	100,00	95,00	11.730.000	105,56	1,90	Kap. Kasihan	
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas	persen	-	-	-	-	100	15.250.000	100	1	15.250.000	100,00	100,00	50	15.250.000			Kap. Pandak	
2	22	08	2.09		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	event	-	-	-	-	1	15.250.000	1	1	15.250.000	100,00	100,00	1	15.250.000			Kap. Pandak	
4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN.	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Pandak	
4	01	04	2.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Pandak	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	83	17.425.863.665	80	2.915.851.122	80	2.971.178.155	80	1,00	2.849.750.336	100,00	95,91	80,00	5.765.601.458	96,39	33,09	Kap. Pandak	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	53.765.000	100	2.587.500	90	5.725.000	90	1,00	5.725.000	100,00	100,00	95,00	8.312.500	95	15,46	Kap. Pandak	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	100	13.316.552.665	100	2.217.080.000	100	2.494.127.125	100	1,00	2.375.164.872	100,00	95,23	100,00	4.592.244.872	100,00	34,49	Kap. Pandak	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	95	934.197.728	95	180.101.700	95	124.791.647	95	1,00	124.356.800	100,00	99,65	95,00	304.458.500	100,00	32,59	Kap. Pandak	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	persen	98	707.550.000	95	99.259.000	95	49.500.000	95	1,00	49.045.700	100,00	99,08	95,00	148.304.700	96,94	20,96	Kap. Pandak	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	95	1.101.794.745	95	201.152.172	95	161.576.552	95	1,00	161.087.564	100,00	99,70	95,00	362.239.736	100,00	32,88	Kap. Pandak	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.09	Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan barang milik daerah	persen	95	1.312.003.527	95	215.670.750	95	135.457.831	95	1,00	134.370.400	100,00	99,20	95,00	350.041.150	100,00	26,68	Kap. Pandak	
	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	94	264.900.000	89	9.350.000	90	73.872.500	90	1,00	73.872.500	100,00	100,00	89,50	83.222.500	95,21	31,42	Kap. Pandak	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	persen	90	170.850.000	85	-	85	58.922.500	85	1,00	58.922.500	100,00	100,00	85,00	58.922.500	94,44	34,49	Kap. Pandak	
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	persen	90	94.050.000	92	9.350.000	92	14.950.000	92	1,00	14.950.000	100,00	100,00	92,00	24.300.000	102,22	25,84	Kap. Pandak	
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	88	1.213.390.000	82	53.329.000	82	142.160.000	82	1,00	141.980.500	100,00	99,87	82,00	195.309.500	93,18	16,10	Kap. Pandak	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	persen	88	631.980.000	82	4.094.000	82	69.350.000	82	1,00	69.170.500	100,00	99,74	82,00	73.264.500	93,18	11,59	Kap. Pandak	
	7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	88	581.410.000	82	49.235.000	82	72.810.000	92	1,12	72.810.000	112,20	100,00	87,00	122.045.000	98,86	20,99	Kap. Pandak	
	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	88	698.400.000	80	21.150.000	82	76.575.000	82	1,00	76.575.000	100,00	100,00	81,00	97.725.000	92,05	13,99	Kap. Pandak	
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	persen	88	698.400.000	80	21.150.000	82	76.575.000	82	1,00	76.575.000	100,00	100,00	81,00	97.725.000	92,05	13,99	Kap. Pandak	
	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	persen	100	82.360.000	82	18.450.000	82	6.310.000	82	1,00	6.310.000	100,00	100,00	82,00	24.760.000	82	30,06	Kap. Pandak	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	82.360.000	82	18.450.000	82	6.310.000	82	1,00	6.310.000	100,00	100,00	82,00	24.760.000	82	30,06	Kap. Pandak	
	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas	persen	100	-	0	-	100	14.750.000	100	1,00	14.750.000	100,00	100,00	50,00	14.750.000	50		Kap. Pundong	
	2	22	08	2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	persen	100	-	0	-	100	14.750.000	100	1,00	14.750.000	100,00	100,00	50,00	14.750.000	50			
	4	01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Pundong	
	4	01	04	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Pundong	
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	90	16.412.624.431	85	2.788.412.825	80	2.917.821.504	80	1,00	2.647.705.335	100,00	90,74	82,50	5.436.118.160	91,67	33,12	Kap. Pundong	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	90	18.445.000	80	1.020.000	80	1.445.000	80	1,00	1.445.000	100,00	100,00	80,00	2.465.000	88,89	13,36	Kap. Pundong	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	90	12.995.160.506	85	2.084.999.048	85	2.472.108.024	85	1,00	2.206.282.202	100,00	89,25	85,00	4.291.281.250	94,44	33,02	Kap. Pundong	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	90	914.674.125	85	297.663.286	100	84.826.988	100	1,00	84.611.988	100,00	99,75	92,50	382.275.274	102,78	41,79		
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	90	202.850.000	95	-	100	26.409.000	100	1,00	26.409.000	100,00	100,00	97,50	26.409.000	108,33	13,02	Kap. Pundong	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	90	1.460.904.000	85	218.471.658	100	152.961.280	100	1,00	150.959.815	100,00	98,69	92,50	369.431.473	102,78	25,29	Kap. Pundong	
	7	01	01	2.09	Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	90	820.590.800	100	186.258.833	100	180.071.212	100	1,00	177.997.330	100,00	98,85	100,00	364.256.163	111,11	44,39	Kap. Pundong	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	95	161.207.957	90	17.367.500	90	50.442.500	90	1,00	50.272.500	100,00	99,66	90,00	67.640.000	94,74	41,96	Kap. Pundong	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	95	93.984.875	100	10.525.000	85	37.720.000	85	1,00	37.550.000	100,00	99,55	92,50	48.075.000	97,37	51,15	Kap. Pundong	
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	angka	85	67.223.082	90	6.842.500	85	12.722.500	85	1,00	12.722.500	100,00	100,00	87,50	19.565.000	102,94	29,10	Kap. Pundong	
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	86	1.140.223.492	90	62.925.000	80	178.401.000	80	1,00	178.308.500	100,00	99,95	85,00	241.233.500	98,84	21,16	Kap. Pundong	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	persen	86	718.619.492	90	62.925.000	80	114.304.500	80	1,00	114.212.000	100,00	99,92	85,00	177.137.000	98,84	24,65	Kap. Pundong	
	7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	86	421.604.000	90	-	90	64.096.500	90	1,00	64.096.500	100,00	100,00	90,00	64.096.500	104,651163	15,20	Kap. Pundong	
	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	91	901.842.778	100	8.602.500	87	143.967.500	87	1,00	138.712.500	100,00	96,35	93,50	147.315.000	102,747253	16,33	Kap. Pundong	
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	91	901.842.778	90	8.602.500	87	143.967.500	87	1,00	138.712.500	100,00	96,35	88,50	147.315.000	97,2527473	16,33	Kap. Pundong	
	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	79.121.848	100	5.612.500	96	4.790.000	96	1,00	4.790.000	100,00	100,00	98,00	10.402.500	98	13,15	Kap. Pundong	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengusan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	79.121.848	90	5.612.500	90	4.790.000	90	1,00	4.790.000	100,00	100,00	90,00	10.402.500	90	13,15	Kap. Pundong	
	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	-	0	-	100	15.250.000	100	1,00	15.250.000	100,00	100,00	50,00	15.250.000	50		Kap. Pleret	
	2	22	08	2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja pembinaan kelembagaan adat dan Tradisi	Persen	0	-	0	-	100	15.250.000	100	1,00	15.250.000	100,00	100,00	50,00	15.250.000			Kap. Pleret	
	4	01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Pleret	
	4	01	04	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Pleret	
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	angka	82	16.836.541.004	79,87	2.484.399.631	80	2.764.035.467	81,08	1,01	2.691.493.136	101,35	97,38	80,48	5.175.892.767	98,14	30,74	Kap. Pleret	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	55.500.000	100	7.000.000	100	7.500.000	100	1,00	7.500.000	100,00	100,00	100,00	14.500.000	100,00	26,13	Kap. Pleret	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Persen	100	12.917.801.004	100	1.882.271.619	100	2.248.271.487	100	1,00	2.177.588.494	100,00	96,86	100,00	4.059.860.113	100,00	31,43	Kap. Pleret	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	1.045.384.000	100	178.368.750	90	155.634.116	90	1,00	154.995.000	100,00	99,59	95,00	333.363.750	95	31,89	Kap. Pleret	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	100	367.571.000	100	78.215.000	100	30.521.000	100	1,00	30.500.000	100,00	99,93	100,00	108.715.000	100	29,58	Kap. Pleret	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	995.490.000	100	123.582.270	100	132.650.864	100	1,00	132.042.342	100,00	99,54	100,00	255.624.612	100	25,68	Kap. Pleret	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan BMD	persen	100	1.454.795.000	100	214.961.992	100	189.458.000	100	1,00	188.867.300	100,00	99,69	100,00	403.829.292	100	27,76	Kap. Pleret	
	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	391.992.500	100	35.415.000	90	37.850.000	90	1,00	37.850.000	100,00	100,00	95,00	73.265.000	95	18,69	Kap. Pleret	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapawon	persen	100	268.992.500	100	19.915.000	100	23.175.000	100	1,00	23.175.000	100,00	100,00	100,00	43.090.000	100	16,02	Kap. Peret	
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapawon	persen	100	123.000.000	100	15.500.000	100	14.675.000	100	1,00	14.675.000	100,00	100,00	100,00	30.175.000	100	24,53	Kap. Peret	
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	929.887.500	100	102.315.000	90	149.925.000	90	1,00	147.425.000	100,00	98,33	95,00	249.740.000	95	26,86	Kap. Peret	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kahurahan	persen	100	626.742.500	100	91.295.000	90	90.312.500	90	1,00	90.312.500	100,00	100,00	95,00	181.607.500	95	28,98	Kap. Peret	
	7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	100	303.145.000	100	11.020.000	90	59.612.500	90	1,00	57.112.500	100,00	95,81	95,00	68.132.500	95	22,48	Kap. Peret	
	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	785.475.000	100	70.550.000	90	99.255.000	90	1,00	99.255.000	100,00	100,00	95,00	169.805.000	95	21,62	Kap. Peret	
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	capaian kinerja penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	785.475.000	100	70.550.000	90	99.255.000	90	1,00	99.255.000	100,00	100,00	95,00	169.805.000	95	21,62	Kap. Peret	
	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	178.015.000	100	14.550.000	100	8.300.000	100	1,00	8.300.000	100,00	100,00	100,00	22.850.000	100	12,84	Kap. Peret	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	178.015.000	100	14.550.000	100	8.300.000	100	1,00	8.300.000	100,00	100,00	100,00	22.850.000	100	12,84	Kap. Peret	
	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	0	-	0	-	100	17.500.000	100	1,00	17.500.000	100,00	100,00	50,00	17.500.000			Kap. Pyungan	
	2	22	08	2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persen	0	-	0	-	100	17.500.000	100	1,00	17.500.000	100,00	100,00	50,00	17.500.000			Kap. Pyungan	
	4	01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Pyungan	
	4	01	04	2.01	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Pyungan	
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	86	16.407.555.420	80	2.767.617.520	82	3.076.649.413	81,47	0,99	2.842.547.950	99,35	92,39	80,74	5.610.165.470	93,88	34,19	Kap. Pyungan	
	7	01	01	2.01	Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	106.500.000	100	6.400.000	100	6.500.000	100	1,00	6.500.000	100,00	100,00	100,00	12.900.000	100	12,11	Kap. Pyungan	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	12.471.274.420	100	2.153.121.998	100	2.496.630.866	100	1,00	2.269.193.906	100,00	90,89	100,00	4.422.315.904	100	35,46	Kap. Pyungan	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	1.477.635.152	100	249.879.180	100	186.150.602	100	1,00	185.622.300	100,00	99,72	100,00	435.501.480	100	29,47	Kap. Pyungan	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	100	444.700.000	100	67.483.000	100	47.997.000	100	1,00	47.997.000	100,00	100,00	100,00	115.480.000	100	25,97	Kap. Pyungan	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	1.077.372.560	100	140.460.856	100	154.084.064	100	1,00	148.207.444	100,00	96,19	100,00	288.668.300	100	26,79	Kap. Pyungan	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	830.073.288	100	150.272.486	100	185.286.881	100	1,00	185.027.300	100,00	99,86	100,00	335.299.786	100	40,39	Kap. Pyungan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	522.072.500	100	33.870.000	100	57.132.500	100	1,00	57.132.500	100,00	100,00	100,00	91.002.500	100	17,43	Kap. Pyungan	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100	389.987.500	100	22.875.000	100	45.047.500	100	1,00	45.047.500	100,00	100,00	100,00	67.922.500	100	17,42	Kap. Pyungan	
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Persen	100	132.085.000	100	10.995.000	100	12.085.000	100	1,00	12.085.000	100,00	100,00	100,00	23.080.000	100	17,47	Kap. Pyungan	
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	830.032.500	100	96.402.500	100	120.090.000	100	1,00	120.090.000	100,00	100,00	100,00	216.492.500	100	26,08	Kap. Pyungan	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100	708.202.500	100	96.402.500	100	80.915.000	100	1,00	80.915.000	100,00	100,00	100,00	177.317.500	100	25,04	Kap. Pyungan	
	7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	Persen	100	121.830.000		-	100	39.175.000	100	1,00	39.175.000	100,00	100,00	50,00	39.175.000	50	32,16	Kap. Pyungan	
	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	880.000.000	100	24.875.000	100	40.850.000	100	1,00	40.850.000	100,00	100,00	100,00	65.725.000	100	7,47	Kap. Pyungan	
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	880.000.000	100	24.875.000	100	40.850.000	100	1,00	40.850.000	100,00	100,00	100,00	65.725.000	100	7,47	Kap. Pyungan	
	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	145.515.000	100	31.425.000	100	8.015.000	100	1,00	8.015.000	100,00	100,00	100,00	39.440.000	100	27,10	Kap. Pyungan	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	145.515.000	100	31.425.000	100	8.015.000	100	1,00	8.015.000	100,00	100,00	100,00	39.440.000	100	27,10	Kap. Pyungan	
	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	16.250.000	0	-	100	16.250.000	100	1,00	16.250.000	100,00	100,00	50,00	16.250.000	50	100,00	Kap. Pajangan	
	2	22	08	2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	16.250.000	0	-	100	16.250.000	100	1,00	16.250.000	100,00	100,00	50,00	16.250.000	50	100,00	Kap. Pajangan	
	4	01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Pajangan	
	4	01	04	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	309.460.000		-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Pajangan	
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	angka	82	16.099.123.811	79,52	2.893.038.465	100	3.043.346.973	80,94	0,81	2.861.370.067	80,94	94,02	80,23	5.754.408.532	97,84	35,74	Kap. Pajangan	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	88.375.000	100	7.645.000	100	9.375.000	100	1,00	9.375.000	100,00	100,00	100,00	17.020.000	100	19,26	Kap. Pajangan	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadmi nistrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	12.197.895.311	79,53	2.208.833.529	80	2.521.782.219	100	1,25	2.353.085.217	125,00	93,31	89,77	4.561.918.746	89,77	37,40	Kap. Pajangan	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	1.293.884.566	79,53	171.897.000	80	181.942.056	100	1,25	181.007.450	125,00	99,49	89,77	352.904.450	89,765	27,27	Kap. Pajangan	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	100	444.059.000	0	-	100	36.909.000	100	1,00	36.567.500	100,00	99,07	50,00	36.567.500	50	8,23	Kap. Pajangan	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	1.012.284.436	100	188.970.436	100	163.570.080	100	1,00	158.273.600	100,00	96,76	100,00	347.244.036	100	34,30	Kap. Pajangan	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	1.062.625.498	100	315.692.500	100	129.768.618	100	1,00	123.061.300	100,00	94,83	100,00	438.753.800	100	41,29	Kap. Pajangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6x100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	92	592.351.500	100	17.062.500	88	54.850.000	100	1,14	53.845.500	113,64	98,17	100,00	70.908.000	108,70	11,97	Kap. Pujangan	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	persen	92	418.112.500	100	8.287.500	88	46.075.000	100	1,14	45.070.500	113,64	97,82	100,00	53.358.000	108,70	12,76	Kap. Pujangan	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persen	92	174.239.000	90	8.775.000	88	8.775.000	100	1,14	8.775.000	113,64	100,00	95,00	17.550.000	103,26	10,07	Kap. Pujangan	
	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	persen	92	753.508.000	100	67.045.000	88	71.587.500	100	1,14	71.529.500	113,64	99,92	100,00	138.574.500	108,70	18,39	Kap. Pujangan	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	persen	92	483.783.000	100	67.045.000	88	40.862.500	100	1,14	40.804.500	113,64	99,86	100,00	107.849.500	108,70	22,29	Kap. Pujangan	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	92	269.725.000	0	-	88	30.725.000	100	1,14	30.725.000	113,64	100,00	50,00	30.725.000	54,35	11,39	Kap. Pujangan	
	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	92	413.210.000	100	7.162.500	87	18.710.000	100	1,15	18.672.500	114,94	99,80	100,00	25.835.000	108,70	6,25	Kap. Pujangan	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	92	413.210.000	100	7.162.500	87	18.710.000	100	1,15	18.672.500	114,94	99,80	100,00	25.835.000	108,70	6,25	Kap. Pujangan	
	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100	672.747.000	100	22.085.000	100	97.249.000	100	1,00	97.246.500	100,00	100,00	100,00	119.331.500	100	17,74	Kap. Pujangan	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	92	672.747.000	100	22.085.000	88	97.249.000	100	1,14	97.246.500	113,64	100,00	100,00	119.331.500	108,70	17,74	Kap. Pujangan	
	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	18.500.000	0	-	100	18.500.000	100	1,00	18.500.000	100,00	100,00	50,00	18.500.000	50	100,00	Kap. Sanden	
	2	22	08	2.09		Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	18.500.000	0	-	100	18.500.000	100	1,00	18.500.000	100,00	100,00	50,00	18.500.000	50	100,00	Kap. Sanden	
	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Sanden	
	4	01	04	2.06		Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan keistimewaan	persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Sanden	
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	16.478.777.047	91,92	2.386.364.734	100	2.740.723.837	100	1,00	2.661.540.647	100,00	97,11	95,96	5.047.905.381	112,89	30,63	Kap. Sanden	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah kpanewon Sanden	angka	100	151.548.390	100	2.100.000	100	3.280.000	100	1,00	3.279.500	100,00	99,98	100,00	5.379.500	100,00	3,55	Kap. Sanden	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	persen	85	12.409.631.447	89,69	1.696.418.896	80	2.215.185.379	80	1,00	2.138.091.891	100,00	96,52	84,85	3.834.510.787	99,82	30,90	Kap. Sanden	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	95	1.413.191.917	95,67	162.608.950	80	165.185.599	80	1,00	164.719.000	100,00	99,72	87,84	327.327.950	92,46	23,16	Kap. Sanden	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pemenuhan barang milik daerah	persen	100	297.738.000	99,27	13.550.000	80	20.738.000	80	1,00	20.738.000	100,00	100,00	89,64	34.288.000	89,64	11,52	Kap. Sanden	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	1.117.669.200	97,89	295.339.930	80	166.840.080	80	1,00	165.657.677	100,00	99,29	88,95	460.997.607	88,95	41,25	Kap. Sanden	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah	persen	100	1.088.998.093	99,62	216.346.958	100	169.494.779	100	1,00	169.054.579	100,00	99,74	99,81	385.401.537	99,81	35,39	Kap. Sanden	
	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	angka	94	353.797.500	99,95	68.492.000	90	70.975.000	90	1,00	70.975.000	100,00	100,00	94,98	139.467.000	101,04	39,42	Kap. Sanden	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	100	257.000.000	100	41.622.000	90	61.900.000	90	1,00	61.900.000	100,00	100,00	95,00	103.522.000	95,00	40,28	Kap. Sanden	
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kapanewon	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Kapanewon	persen	94	96.797.500	99,93	26.870.000	90	9.075.000	90	1,00	9.075.000	100,00	100,00	94,97	35.945.000	101,03	37,13	Kap. Sanden	
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	84	818.384.900	89,91	23.797.500	80	118.883.760	80	1,00	118.883.750	100,00	100,00	84,96	142.681.250	101,14	17,43	Kap. Sanden	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyrakat desa	persen	85	504.172.500	89,81	18.997.500	80	55.070.000	80	1,00	55.070.000	100,00	100,00	84,91	74.067.500	99,89	14,69	Kap. Sanden	
	7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	persen	100	314.212.400	100	4.800.000	80	63.813.760	80	1,00	63.813.750	100,00	100,00	90,00	68.613.750	90	21,84	Kap. Sanden	
	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	91	548.000.000	99,78	28.072.500	87	69.441.000	87	1,00	68.641.000	100,00	98,85	93,39	96.713.500	102,63	17,65	Kap. Sanden	
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	100	548.000.000	99,78	28.072.500	100	69.441.000	100	1,00	68.641.000	100,00	98,85	99,89	96.713.500	99,89	17,65	Kap. Sanden	
	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	283.000.000	99,85	35.685.000	100	21.500.000	100	1,00	21.475.000	100,00	99,88	99,93	57.160.000	99,93	20,20	Kap. Sanden	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	100	283.000.000	99,95	35.685.000	100	21.500.000	100	1,00	21.475.000	100,00	99,88	99,98	57.160.000	99,98	20,20	Kap. Sanden	
	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	100	-	0	-	100	12.750.000	100	1,00	12.750.000	100,00	100,00	50,00	12.750.000	50,00		Kap. Srandakan	
	2	22	08	2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Yogyakarta	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Event	100	-			1	12.750.000	1	1,00	12.750.000	100,00	100,00	0,50	12.750.000	0,5		Kap. Srandakan	
	4	01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	245.300.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	18,47	Kap. Srandakan	
	4	01	04	2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	245.300.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	18,47	Kap. Srandakan	
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	16.378.576.032	89	2.160.597.018	85	2.685.048.998	83,19	0,98	2.258.196.252	97,87	84,10	86,10	4.418.793.270	101,29	26,98	Kap. Srandakan	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	42.900.000	85	4.600.000	85	7.400.000	83,19	0,98	7.400.000	97,87	100,00	84,10	12.000.000	98,94	27,97	Kap. Srandakan	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	12.210.685.032	80	1.657.303.857	85	2.266.058.387	83,19	0,98	1.847.989.815	97,87	81,55	81,60	3.505.293.672	95,99	28,71	Kap. Srandakan	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	1.055.336.960	85	79.349.500	85	111.526.571	83,19	0,98	110.911.201	97,87	99,45	84,10	190.260.701	98,94	18,03	Kap. Srandakan	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	496.400.000	85	133.254.180	85	16.700.000	83,19	0,98	16.594.500	97,87	99,37	84,10	149.848.680	98,94	30,19	Kap. Srandakan	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	928.804.436		128.561.161	85	150.914.436	83,19	0,98	144.632.936	97,87	95,84	41,60	273.194.097	48,94	29,41	Kap. Srandakan	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85	1.644.449.604	85	157.528.320	85	132.449.604	83,19	0,98	130.667.800	97,87	98,65	84,10	288.196.120	98,94	17,53	Kap. Srandakan	
	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	245.750.000	100	42.500.000	100	75.512.500	100	1,00	75.512.500	100,00	100,00	100,00	118.012.500	100	48,02	Kap. Srandakan	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	201.750.000	100	35.500.000	100	67.512.500	91,11	0,91	67.512.500	91,11	100,00	95,56	103.012.500	95,56	51,06	Kap. Srandakan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	44.000.000	100	7.000.000	100	8.000.000	100	1,00	8.000.000	100,00	100,00	100,00	15.000.000	100	34,09	Kap. Srandakan	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	95	815.625.000	95	80.190.000	95	154.101.250	95	1,00	153.850.750	100,00	99,84	95,00	234.040.750	100	28,69	Kap. Srandakan	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	95	549.125.000	95	80.190.000	95	94.783.750	94,75	1,00	94.533.250	99,74	99,74	94,87	174.723.250	99,87	31,82	Kap. Srandakan	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	95	266.500.000	0	-	95	59.317.500	95	1,00	59.317.500	100,00	100,00	47,50	59.317.500	50	22,26	Kap. Srandakan	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	728.125.000	100	121.273.000	100	128.750.000	100	1,00	128.378.000	100,00	99,71	100,00	249.651.000	100,00	34,29	Kap. Srandakan	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	728.125.000	100	121.273.000	100	128.750.000	99,71106796	1,00	128.378.000	99,71	99,71	99,86	249.651.000	99,86	34,29	Kap. Srandakan	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	52.672.000	100	21.150.000	100	9.242.000	100	1,00	9.242.000	100,00	100,00	100,00	30.392.000	100,00	57,70	Kap. Srandakan	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	52.672.000	100	21.150.000	100	9.242.000	100	1,00	9.242.000	100,00	100,00	100,00	30.392.000	100,00	57,70	Kap. Srandakan	
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	100	-	0	-	100	18.750.000	100	1,00	18.750.000	100,00	100,00	50,00	18.750.000	50,00		Kap. Sewon	
2	22	08	2.09		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	100	-			100	18.750.000	100	1,00	18.750.000	100,00	100,00	50,00	18.750.000	50		Kap. Sewon	
4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Sewon	
4	01	04	2.04		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja perencanaan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Sewon	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	Angka	92	18.296.211.971	90	3.005.257.123	90	3.155.240.369	90	1,00	3.025.724.118	100,00	95,90	90,00	6.030.981.241	97,83	32,96	Kap. Sewon	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kap. Sewon	Angka	100	39.072.500	100	5.000.000	90	5.472.500	90	1,00	5.472.500	100,00	100,00	95,00	10.472.500	95	26,80	Kap. Sewon	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	90	14.351.290.063	90	2.228.437.762	90	2.590.862.539	90	1,00	2.472.191.148	100,00	95,42	90,00	4.700.628.910	100	32,75	Kap. Sewon	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	1.551.537.734	100	330.241.350	90	180.213.750	90	1,00	179.868.950	100,00	99,81	95,00	510.110.300	95	32,88	Kap. Sewon	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	376.272.672	0	-	90	36.900.000	90	1,00	33.800.000	100,00	91,60	45,00	33.800.000	45	8,98	Kap. Sewon	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	939.878.000	100	223.446.786	90	183.575.600	90	1,00	180.622.230	100,00	98,39	95,00	404.069.016	95	42,99	Kap. Sewon	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	1.038.161.002	100	218.131.225	90	158.215.980	90	1,00	153.769.290	100,00	97,19	95,00	371.900.515	95	35,82	Kap. Sewon	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	92	305.347.000	100	24.050.000	90	87.025.000	90	1,00	87.025.000	100,00	100,00	95,00	111.075.000	103,26087	36,38	Kap. Sewon	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	persen	92	225.847.000	100	12.100.000	90	78.325.000	90	1,00	78.325.000	100,00	100,00	95,00	90.425.000	103,26087	40,04	Kap. Sewon	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen	100	79.500.000	90	11.950.000	90	8.700.000	90	1,00	8.700.000	100,00	100,00	90,00	20.650.000	90	25,97	Kap. Sewon	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5	6		7		8			9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	92	759.389.152	100	37.825.000	88	79.225.000	88	1,00	79.225.000	100,00	100,00	94,00	117.050.000	102,173913	15,41	Kap. Sewon			
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kaurahan	persen	85	455.500.000	100	37.825.000	85	52.115.000	85	1,00	52.115.000	100,00	100,00	92,50	89.940.000	108,823529	19,75	Kap. Sewon			
	7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	91	303.889.152	0	-	91	27.110.000	91	1,00	27.110.000	100,00	100,00	45,50	27.110.000	50	8,92	Kap. Sewon			
	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketenraman dan ketertiban umum	persen	100	943.016.268	100	24.330.000	100	108.300.000	100	1,00	105.750.000	100,00	97,65	100,00	130.080.000	100	13,79	Kap. Sewon			
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketertnman dan ketertiban umum	persen	100	943.016.268	100	24.330.000	100	108.300.000	100	1,00	105.750.000	100,00	97,65	100,00	130.080.000	100	13,79	Kap. Sewon			
	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	403.328.000	0	-	100	9.850.000	100	1,00	9.850.000	100,00	100,00	50,00	9.850.000	50	2,44	Kap. Sewon			
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	403.328.000	0	-	100	9.850.000	100	1,00	9.850.000	100,00	100,00	50,00	9.850.000	50	2,44	Kap. Sewon			
	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100	100	-	0	-	100	16.500.000	100	1,00	16.500.000	100,00	100,00	50,00	16.500.000	50		Kap. Seddayu			
	2	22	08	2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	-			100	16.500.000	100	1,00	16.500.000	100,00	100,00	50,00	16.500.000	50		Kap. Seddayu			
	4	01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Seddayu			
						Tingkat peneragan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	persen	85		0		0		0			100,00	0,00		0	14,64	Kap. Seddayu				
	4	01	04	2.01	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	309.460.000			100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Kap. Seddayu			
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	100	17.890.723.753	81,25	2.802.620.886	85	2.925.014.074	82	0,96	2.822.017.275	96,47	96,48	81,63	5.624.638.161	81,63	31,44	Kap. Seddayu			
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	74.400.000	100	5.097.500	100	6.567.500	100	1,00	6.567.500	100,00	100,00	100,00	11.665.000	100	15,68	Kap. Seddayu			
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	100	13.415.764.753	100	2.095.400.709	100	2.434.812.497	100	1,00	2.343.027.083	100,00	96,23	100,00	4.438.427.792	100	33,08	Kap. Seddayu			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	1.717.484.788	100	349.322.200	100	151.004.975	100	1,00	149.661.598	100,00	99,11	100,00	498.983.798	100	29,05	Kap. Seddayu			
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	461.860.000			100	34.900.000	100	1,00	34.900.000	100,00	100,00	50,00	34.900.000	50	7,56	Kap. Seddayu			
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	913.279.920	100	187.147.321	100	123.035.824	100	1,00	114.691.014	100,00	93,22	100,00	301.838.335	100	33,05	Kap. Seddayu			
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	1.307.934.292	100	165.653.156	100	174.693.278	100	1,00	173.170.080	100,00	99,13	100,00	338.823.236	100	25,91	Kap. Seddayu			
	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90	188.650.000	100	32.800.000	90	67.170.500	100	1,11	67.150.000	111,11	99,97	100,00	99.950.000	111,11	52,98	Kap. Seddayu			
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	90	116.650.000	100	14.000.000	90	58.770.500	100	1,11	58.750.000	111,11	99,97	100,00	72.750.000	111,11	62,37	Kap. Seddayu			
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen	90	72.000.000	100	18.800.000	90	8.400.000	100	1,11	8.400.000	111,11	100,00	100,00	27.200.000	111,11	37,78	Kap. Seddayu			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	90	369.000.000	100	62.600.000	100	113.512.500	100	1,00	113.512.500	100,00	100,00	100,00	176.112.500	111,111111	47,73	Kap. Seddayu	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen	90	212.000.000	100	62.600.000	90	54.450.000	100	1,11	54.450.000	111,11	100,00	100,00	117.050.000	111,111111	55,21	Kap. Seddayu	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	90	157.000.000			90	59.062.500	100	1,11	59.062.500	111,11	100,00	50,00	59.062.500	55,555556	37,62	Kap. Seddayu	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	343.850.000	100	40.000.000	100	136.490.000	100	1,00	133.865.000	100,00	98,08	100,00	173.865.000	100	50,56	Kap. Seddayu	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	343.850.000	100	40.000.000	100	136.490.000	100	1,00	133.865.000	100,00	98,08	100,00	173.865.000	100	50,56	Kap. Seddayu	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	768.000.000	100	10.000.000	100	5.200.000	100	1,00	5.200.000	100,00	100,00	100,00	15.200.000	100	1,98	Kap. Seddayu	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	768.000.000	100	10.000.000	100	5.200.000	100	1,00	5.200.000	100,00	100,00	100,00	15.200.000	100	1,98	Kap. Seddayu	
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	100	-	0	-	100	19.250.000	100	1,00	19.250.000	100,00	100,00	50,00	19.250.000	50		Banguntapan	
2	22	08	2.09		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	100	-	0	-	100	19.250.000	1	0,01	19.250.000	1,00	100,00	0,50	19.250.000	0,5		Banguntapan	
4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN****)	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100	309.460.000	0	-	100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Banguntapan	
4	01	04	2.06		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan	Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	309.460.000			100	45.300.000	100	1,00	45.300.000	100,00	100,00	50,00	45.300.000	50	14,64	Banguntapan	
7	01	01			PROGRAM PENUNDAK URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	89	15.345.130.344	93,89	3.119.500.246	85	3.282.098.348	89	1,08	3.162.080.173	104,71	96,34	91,45	6.281.580.419	102,75	40,94	Banguntapan	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	77.600.000	100	5.100.000	100	7.800.000	100	1,00	7.800.000	100,00	100,00	100,00	12.900.000	100	16,62	Banguntapan	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	100	10.697.047.144	93,33	2.414.891.406	100	2.743.197.508	100	1,00	2.632.901.979	100,00	95,98	96,67	5.047.793.385	96,665	47,19	Banguntapan	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	1.590.276.900	98,96	306.285.750	100	154.589.920	100	1,00	151.670.975	100,00	98,11	99,48	457.956.725	99,48	28,80	Banguntapan	
7	01	01	2.07		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen		670.640.000			100	9.000.000	100	1,00	9.000.000	100,00	100,00	50,00	9.000.000		1,34	Banguntapan	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjangurusan pemerintah daerah	persen	100	919.516.800	91,08	194.368.561	100	159.155.080	100	1,00	154.671.189	100,00	97,18	95,54	349.039.750	95,54	37,96	Banguntapan	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	1.390.049.500	97,47	198.854.529	100	208.355.840	100	1,00	206.036.030	100,00	98,89	98,74	404.890.559	98,735	29,13	Banguntapan	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	angka	95	344.500.000	99,94	39.074.900	91	57.750.000	91	1,00	57.662.500	100,00	99,85	95,47	96.737.400	100,494737	28,08	Banguntapan	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	persen	100	207.500.000	100	27.837.500	100	45.350.000	100	1,00	45.350.000	100,00	100,00	100,00	73.187.500	100	35,27	Banguntapan	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	persen	100	137.000.000	99,89	11.237.400	100	12.400.000	100	1,00	12.312.500	100,00	99,29	99,95	23.549.900	99,945	17,19	Banguntapan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	96	762.806.500	90,71	108.797.500	92	141.528.150	92	1,00	141.480.000	100,00	99,97	91,36	250.277.500	95,1614583	32,81	Banguntapan	
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	persen	100	545.344.000	90,71	108.797.500	100	76.015.650	100	1,00	75.992.500	100,00	99,97	95,36	184.790.000	95,355	33,89	Banguntapan	
7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	100	217.462.500	0	-	100	65.512.500	100	1,00	65.487.500	100,00	99,96	50,00	65.487.500	50	30,11	Banguntapan	
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	98	846.600.400	100	25.487.500	95	137.725.000	95	1,00	135.325.000	100,00	98,26	97,50	160.812.500	99,4897959	19,00	Banguntapan	
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	persen	100	846.600.400	100	25.487.500	100	137.725.000	100	1,00	135.325.000	100,00	98,26	100,00	160.812.500	100	19,00	Banguntapan	
7	01	04				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	persen	100	73.473.900	98,12	1.962.500	100	9.000.000	100	1,00	9.000.000	100,00	100,00	99,06	10.962.500	99,06	14,92	Banguntapan	
7	01	04	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	73.473.900	98,12	1.962.500	100	9.000.000	100	1,00	9.000.000	100,00	100,00	99,06	10.962.500	99,06	14,92	Banguntapan	
JUMLAH ANGGARAN UNTUK SASARAN 1:									100	1.568.842.140.175	100	194.347.427.687	100	318.883.868.582	100		290.017.654.307	100,00	90,95	100	484.285.081.994	100,0	31		-
Sasaran 2:		Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi																						0	
1	02	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	83,5	899.644.134.783	81,17	199.678.321.397	82,15	215.879.537.575	76	0,93	211.566.047.280	92,51	98,00	78,585	411.241.368.677	94,11	45,71	RSUD PS	
							Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	82		80		80		80	1,00		100,00	95,49	80		97,56	35,74	RSUD PS	
1	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	195.061.348.783	100	37.066.841.575	100	34.183.323.887	100	1,00	32.640.772.181	100,00	95,49	100	69.707.613.756	100,00	35,74	RSUD PS	
1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	%	100	704.582.786.000	99,51	162.608.479.822	100	181.696.213.688	100	1,00	178.925.275.099	100,00	98,47	99,755	341.533.754.921	99,76	48,47	RSUD PS	
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	501.852.596.495	84,75	107.621.915.453	84	87.555.859.988	85,01	1,01	80.065.218.508	101,20	91,44	84,88	187.687.133.961	100,45	37,40	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	2.325.682.880	100	284.803.330	100	495.612.112	100	1,00	491.901.264	100,00	99,25	100	776.704.594	100,00	33,40	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	persen	100	488.940.860.175	100	105.268.842.167	100	84.304.967.504	100	1,00	76.870.473.770	100,00	91,18	100	182.139.315.937	100,00	37,25	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	3.123.121.740	100	498.395.530	100	692.917.320	100	1,00	688.438.171	100,00	99,35	100	1.186.833.701	100,00	38,00	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	3.208.931.700	100	632.355.005	100	997.572.512	100	1,00	960.020.936	100,00	96,24	100	1.592.375.941	100,00	49,62	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	persen	100	4.254.000.000	100	937.519.421	100	1.064.790.540	100	1,00	1.054.384.367	100,00	99,02	100	1.991.903.788	100,00	46,82	Dinas Kesehatan	
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan UKP UKM	indeks	100	117.253.005.969	100	139.259.622.819	100	37.811.782.882	80	0,80	33.963.674.053	80,00	89,82	90	173.223.296.872	90,00	147,73	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	indeks	1	29.414.849.763		95.540.339.604	1	17.908.739.664	1	1,00	16.464.275.683	100,00	91,93	0,5	112.004.615.287	50,00	380,78	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	indeks	1	85.246.850.426		43.269.016.215	1	19.672.924.154		0,8	17.270.577.724	80,00	87,79	0,4	60.539.593.939	40,00	71,02	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	aplikasi	2	1.945.420.500	2	20.454.500	2	103.000.000	2	1,00	103.000.000	100,00	100,00	2	123.454.500	100,00	6,35	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	02	02	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin	RS	7	645.885.280	7	429.812.500	3	127.119.064	3	1,00	125.820.646	100,00	98,98	5	555.633.146	71,43	86,03	Dinas Kesehatan		
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMK	indeks	100	1.780.754.220	100	9.205.360.363	100	400.571.798	100	1,00	394.805.270	100,00	98,56	100	9.600.165.633	100,00	539,11	Dinas Kesehatan		
	1	02	03	2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek	persen	1900	845.754.220	100	103.549.910	100	150.571.798	100	1,00	147.256.520	100,00	97,80	100	250.806.430	5,26	29,65	Dinas Kesehatan		
	1	02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK sesuai Standar	persen	100	935.000.000	100	9.101.810.453	100	250.000.000	100	1,00	247.548.750	100,00	99,02	100	9.349.359.203	100,00	999,93	Dinas Kesehatan		
	1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks sediaan farmasi, alikes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	indeks	100	4.188.733.000	100	644.938.791	100	717.874.500	100	1,00	608.226.650	100,00	84,73	100	1.253.165.441	100,00	29,92	Dinas Kesehatan		
	1	02	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persen	100	1.326.089.000	100	47.925.000	100	86.218.000	100	1,00	70.318.000	100,00	81,56	100	118.243.000	100,00	8,92	Dinas Kesehatan		
	1	02	04	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan	persen	100	170.850.000	100	156.187.500	100	197.890.000	100	1,00	193.090.000	100,00	97,57	100	349.277.500	100,00	204,44	Dinas Kesehatan		
	1	02	04	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan	sertifikat	77	1.395.745.000	69	322.409.291	77	291.114.500	77	1,00	234.029.500	100,00	80,39	73	556.438.791	94,81	39,87	Dinas Kesehatan		
	1	02	04	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Stiker pembinaan yang diterbitkan	sticker	179	660.452.000	59	5.000.000	179	5.000.000	179	1,00	5.000.000	100,00	100,00	119	10.000.000	66,48	1,51	Dinas Kesehatan		
	1	02	04	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar	sampel	75	635.597.000	75	113.417.000	75	137.652.000	75	1,00	105.789.150	100,00	76,85	75	219.206.150	100,00	34,49	Dinas Kesehatan		
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	60	4.752.164.600	100	437.882.250	100	1.199.211.696	100	1,00	1.097.376.546	100,00	91,51	100	1.535.258.796	166,67	32,31	Dinas Kesehatan		
	1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah LP/LS	Persen	100	1.285.089.600	100	164.828.500	100	364.674.496	100	1,00	347.919.346	100,00	95,41	100	512.747.846	100,00	39,90	Dinas Kesehatan		
	1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS	Persen	0,8	975.675.000	75	200.163.750	75	361.347.200	75	1,00	360.409.700	100,00	99,74	75	560.573.450	9.375,00	57,45	Dinas Kesehatan		
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA	100	2.491.400.000	100	72.890.000	100	473.190.000	100	1,00	389.047.500	100,00	82,22	100	461.937.500	100,00	18,54	Dinas Kesehatan		
	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	63	10.749.050.000	33,33	1.761.270.574	63	580.000.000	63	1,00	579.549.830	100,00	99,92	48,165	2.340.820.404	76,45	21,78	Dinas Kesehatan		
	2	22	08	2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional	Persen	100	10.749.050.000	100	1.761.270.574	100	580.000.000	100	1,00	579.549.830	100,00	99,92	100	2.340.820.404	100,00	21,78	Dinas Kesehatan		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,50	948.145.120	84,75	181.802.112	85	181.802.112		85	1,00	181.800.348	100,00	100,00	84,875	363.602.460	38,35	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	948.145.120	100	181.802.112	100	181.802.112	100	1,00	181.800.348	100,00	100,00	100	363.602.460	100,00	38,35	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Jamkesda	persen	100	185.650.755.263	100	36.837.150.240	100	36.599.663.356	100	1,00	36.419.751.593	100,00	99,51	100	73.256.901.833	100,00	39,46	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda	persen	100	185.650.755.263	100	36.837.150.240	100	36.599.663.356	100	1,00	36.419.751.593	100,00	99,51	100	73.256.901.833	100,00	39,46	Dinas Kesehatan	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	85	928881680	0	0	85	178202112	85	1	178202112	100,59	100,00	43	178202112	50,30	19,18	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	928.881.680			100	178.202.112	100	1,00	178.202.112	100,00	100,00	50	178.202.112	50,00	19,18	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Labkesda	persen	100	3.000.000.000	0	-	100	1.321.166.402	100	1,00	1.044.031.544	100,00	79,02	50	1.044.031.544	50,00	34,80	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	3.000.000.000			100	1.321.166.402	100	1,00	1.044.031.544	100,00	79,02	50	1.044.031.544	50,00	34,80	Dinas Kesehatan	
					PUSKESMAS SRANDAKAN														0	-				
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	9.405.448.000	84,75	2.030.664.007	84,5	2.476.810.872	85,01	1,01	1.899.686.617	100,60	76,70	84,88	3.930.350.624	100,45	41,79	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100		100		100	1,00		100,00		100	100,00		Dinas Kesehatan		
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	675.448.000	100	138.164.092	100	146.630.080	100	1,00	146.629.450	100,00	100,00	100	284.793.542	100,00	42,16	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas	persen	22050	8.730.000.000	100	1.892.499.915	100	2.330.180.792	100	1,00	1.753.057.167	100,00	75,23	100	3.645.557.082	0,45	41,76	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	100	3.335.000.000	100	339.307.686	100	825.576.420	100	1,00	819.702.052	100,00	99,29	100	1.159.009.738	100,00	34,75	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.335.000.000	100	339.307.686	100	825.576.420	100	1,00	819.702.052	100,00	99,29	100	1.159.009.738	100,00	34,75	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	1	-	1	122.110.822	1	58.870.240	1	1,00	29.780.640	100,00	50,59	1	151.891.462	100,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM sesuai Standar	persen			100	122.110.822	100	58.870.240	100	1,00	29.780.640	100,00	50,59	100	151.891.462			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	100	-	0	-	100	18.650.000	100	1,00	18.650.000	100,00	100,00	50	18.650.000	50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyandu memiliki kader tersertifikasi						100	18.650.000	100	1,00	18.650.000	100,00	100,00	50	18.650.000			Dinas Kesehatan	
					PUSKESMAS SANDEN														0	-			Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	12.196.858.400	84,75	2.102.128.254	85,01	2.520.609.331	85,01	1,00	2.031.468.883	100,00	80,59	84,88	4.133.597.137,00	100,45	33,89	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	550.358.400	100	108.395.440	100	117.304.064	100	1,00	117.304.064	100,00	100,00	100	225.699.504	100,00	41,01	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	11.646.500.000	100	1.993.732.814	100	2.403.305.267	100	1,00	1.914.164.819	100,00	79,65	100	3.907.897.633	100,00	33,55	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.335.000.000	1	118.602.750	1	816.145.370	1	1,00	814.051.611	100,00	99,74	1	932.654.361	100,00	27,97	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.335.000.000	100	118.602.750	100	816.145.370	100	1,00	814.051.611	100,00	99,74	100	932.654.361	100,00	27,97	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	0,00	-	0	-	1	61.620.540	1	1,00	41.653.040	100,00	67,60	0,5	41.653.040			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM sesuai Standar	persen					100	61.620.540	100	1,00	41.653.040	100,00	67,60	50	41.653.040			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	0	-	100	25.510.000	100	1,00	25.510.000	100,00	100,00	50	25.510.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumbu Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	25.510.000	100	1,00	25.510.000	100,00	100,00	50	25.510.000			Dinas Kesehatan	
					PUSKESMAS KRETEK														0		-		Dinas Kesehatan	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	13.295.268.800	84,75	1.828.331.091	85	2.452.650.786	85,01	1,00	1.774.139.890	100,01	72,34	84,88	3.602.470.981	100,45	27,10	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	425.268.800	100	95.754.240	100	87.978.048	100	1,00	87.978.048	100,00	100,00	100	183.732.288	100,00	43,20	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	12.870.000.000	100	1.732.576.851	100	2.364.672.738	100	1,00	1.686.161.842	100,00	71,31	100	3.418.738.693	100,00	26,56	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.771.000.000	1	266.519.490	1	908.875.794	1	1,00	744.738.441	100,00	81,94	1	1.011.257.931	100,00	26,82	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.771.000.000	100	266.519.490	100	908.875.794	100	1,00	744.738.441	100,00	81,94	100	1.011.257.931	100,00	26,82	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	0	-	0	-	100	27.713.400	100	1,00	21.411.000	100,00	77,26	50	21.411.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM sesuai Standar	persen					100	27.713.400	100	1,00	21.411.000	100,00	77,26	50	21.411.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	0	-	100	9.195.000	100	1,00	8.855.000	100,00	96,30	50	8.855.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembiinan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	NA					100	7.835.000	100	1,00	7.835.000	100,00	100,00	50	7.835.000			Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berasumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	1.360.000	100	1,00	1.020.000	100,00	75,00	50	1.020.000			Dinas Kesehatan	
					PUSKESMAS PUNDONG														0	-			Dinas Kesehatan	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	15.570.358.400	84,75	2.320.173.747	85	2.998.312.410	85,01	1,00	2.214.516.832	100,01	73,86	84,88	4.534.690.579		29,12	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	550.358.400	100	108.181.032	100	117.304.064	100	1,00	117.303.560	100,00	100,00	100	225.484.592	100,00	40,97	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	15.020.000.000	100	2.211.992.715	100	2.881.008.346	100	1,00	2.097.213.272	100,00	72,79	100	4.309.205.987	100,00	28,69	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.335.000.000	1	169.255.000	1	749.239.194	1	1,00	747.132.050	100,00	99,72	1,00	916.387.050	100,00	27,48	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.335.000.000	100	169.255.000	100	749.239.194	100	1,00	747.132.050	100,00	99,72	100	916.387.050	100,00	27,48	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	0	-	0	-	100	48.121.500	100	1,00	48.121.500	100,00	100,00	50	48.121.500			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM sesuai Standar	persen					100	48.121.500	100	1,00	48.121.500	100,00	100,00	50	48.121.500			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	0	-	100	10.725.000	100	1,00	10.725.000	100,00	100,00	50	10.725.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.01	Aktivikasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		persen					100	10.725.000	100	1,00	10.725.000	100,00	100,00	50	10.725.000			Dinas Kesehatan	
					PUSKESMAS BAMBANGLIPURO														0	-			Dinas Kesehatan	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	13.828.012.294	84,75	2.369.812.131	85	3.209.532.358	85,01	1,00	2.651.995.447	100,01	82,63	84,88	5.021.807.578	100,45	36,32	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	550.358.400	100	132.186.606	100	117.304.064	100,00	1,00	117.304.064	100,00	100,00	100	249.490.670	100,00	45,33	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	13.277.653.894	100	2.237.625.525		3.092.228.294	81,97		2.534.691.383		81,97	90,98486822	4.772.316.908	90,98	35,94	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.715.720.400	1	303.217.900	1	1.043.261.700	1,00	1,00	852.255.328	100,00	81,69	1	1.155.473.228	100,00	31,10	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.715.720.400	100	303.217.900	100	1.043.261.700	81,69	0,82	852.255.328	81,69	81,69	90,84571148	1.155.473.228	90,85	31,10	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	0	-	0	-	100	29.801.400	100,00	1,00	1.293.900	100,00	4,34	50	1.293.900			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM sesuai Standar	persen					100	29.801.400	4,34	0,04	1.293.900	4,34	4,34	2,170871167	1.293.900			Dinas Kesehatan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purna mandiri	persen	0	-	0	-	100	21.940.000	100	1,00	19.215.000	100,00	87,58	50	19.215.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	NA					100	11.850.000	100,00	1,00	11.850.000	100,00	100,00	50	11.850.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	10.090.000	72,99	0,73	7.365.000	72,99	72,99	36,49653122	7.365.000			Dinas Kesehatan	
						PUSKESMAS PANDAK I														0	-			Dinas Kesehatan	
	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	10.172.628.656	84,75	1.773.197.903	85	2.003.539.128	85,01	1,00	1.722.799.382	100,01	85,99	84,88	3.495.997.285	100,45	34,37	Dinas Kesehatan	
							Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100		100		0	-		-		50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	550.358.400	100	108.395.440	100	117.304.064	100,00	1,00	117.304.064	100,00	100,00	100	225.699.504	100,00	41,01	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	9.622.270.256	100	1.664.802.463	100	1.886.235.064	85,12	0,85	1.605.495.318	85,12	85,12	92,5581983	3.270.297.781	92,56	33,99	Dinas Kesehatan	
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.325.000.000	1	436.823.920	1	779.551.012	1,00	1,00	738.163.351	100,00	94,69	1	1.174.987.271	100,00	35,34	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.325.000.000	100	436.823.920	100	779.551.012	94,69	0,95	738.163.351	94,69	94,69	97,34541676	1.174.987.271	97,35	35,34	Dinas Kesehatan	
	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	0	-	0	-	1	57.215.332	1	1,00	26.297.128	100,00	45,96	0,5	26.297.128			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM sesuai Standar	persen					100	57.215.332	45,96	0,46	26.297.128	45,96	45,96	22,98084017	26.297.128			Dinas Kesehatan	
	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purna mandiri	persen	0	-	0	-	100	25.280.000	100	1,00	25.280.000	100,00	100,00	50	25.280.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							100	11.800.000	100	1,00	11.800.000	100,00	100,00	50	11.800.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	13.480.000	100	1,00	13.480.000	100,00	100,00	50	13.480.000			Dinas Kesehatan	
						PUSKESMAS PANDAK II														0	-			Dinas Kesehatan	
	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	8.211.531.396	84,75	1.417.601.594	85	1.658.911.701	85,01	1,00	1.354.105.842	100,01	81,63	84,88	2.771.707.436	100,45	33,75	Dinas Kesehatan	
							Cakupan pelayanan Puskesmas	persen			100				0					50			Dinas Kesehatan		
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	300.179.200	100	54.472.596	100	58.652.032	100,00	1,00	58.652.032	100,00	100,00	100	113.124.628	100,00	37,69	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	7.911.352.196	100	1.363.128.998	100	1.600.259.669	80,95	0,81	1.295.453.810	80,95	80,95	90,47636253	2.658.582.808	90,48	33,60	Dinas Kesehatan	
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.325.000.000	0	542.043.534	1	778.641.844	1,00	1,00	778.302.256	100,00	99,96	0,5	1.320.345.790	50,00	39,71	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.325.000.000	100	542.043.534	100	778.641.844	99,96	1,00	778.302.256	99,96	99,96	99,97819357	1.320.345.790	99,98	39,71	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	0	-	0	-	1	7.680.000	1	1,00	7.680.000	100,00	100,00	0,5	7.680.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM sesuai Standar	persen					100	7.680.000	100	1,00	7.680.000	100,00	100,00	50	7.680.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	-	0	-	100	8.775.000	100	1,00	8.775.000	100,00	100,00	50	8.775.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							100	7.625.000	100	1,00	7.625.000	100,00	100,00	50	7.625.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	1.150.000	100	1,00	1.150.000	100,00	100,00	50	1.150.000			Dinas Kesehatan	
					PUSKESMAS BANTUL I														0	-			Dinas Kesehatan	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	11.945.323.355	84,75	1.920.527.635	85	2.300.345.260	85,01	1,00	1.754.540.712	100,01	76,27	84,88	3.675.068.347	100,45	30,77	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	558.213.440	100	54.426.952	100	58.652.032	100,00	1,00	58.652.032	100,00	100,00	100	113.078.984	100,00	20,26	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	11.387.109.915	100	1.866.100.683	100	2.241.693.228	75,65	0,76	1.695.888.680	75,65	75,65	87,82606511	3.561.989.363	87,83	31,28	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.325.000.000	1	505.542.500	1	793.941.200	1,00	1,00	701.302.574	100,00	88,33	1	1.206.845.074	100,00	36,30	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.325.000.000	100	505.542.500	100	793.941.200	88,33	0,88	701.302.574	88,33	88,33	94,16590133	1.206.845.074	94,17	36,30	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	-	-	0	40.924.442	0,00	19.112.900	0,00		13.600.000		71,16	0	54.524.442			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM sesuai Standar	persen	-		100	40.924.442	-	19.112.900	71,16		13.600.000		71,16	85,57806508	54.524.442			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	0	-	100	29.137.500	100	1,00	23.587.500	100,00	80,95	50	23.587.500			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							100	15.262.500	100	1,00	15.262.500	100,00	100,00	50	15.262.500			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	13.875.000	60,00	0,60	8.325.000	60,00	60,00	30	8.325.000			Dinas Kesehatan	
					PUSKESMAS BANTUL II														0	-			Dinas Kesehatan	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	8.175.589.600	84,75	1.398.671.500	85	1.621.401.310	85,01	1,00	1.415.077.135	100,01	87,27	84,88	2.813.748.635	100,45	34,42	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	175.089.600	100	26.890.273	100	29.326.016	100,00	1,00	29.326.016	100,00	100,00	100	56.216.289	100,00	32,11	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	8.000.500.000	100	1.371.781.227	100	1.592.075.294	87,04	0,87	1.385.751.119	87,04	87,04	93,52	2.757.532.346	93,52	34,47	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.335.000.000	1	109.575.000	1	1.035.090.920	1,00	1,00	1.022.080.827	100,00	98,74	1,00	1.131.655.827	100,00	33,93	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.335.000.000		109.575.000	100	1.035.090.920	99	0,99	1.022.080.827	98,74	98,74	49,37	1.131.655.827	49,37	33,93	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	0	-	1	73.058.323	1	51.240.140	1	1,00	27.016.640	100,00	52,73	1,00	100.074.963			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK sesuai Standar	persen			100	73.058.323	-	51.240.140	52,73		27.016.640		52,73	76,36	100.074.963			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	100	1.000.000	100	16.020.000	100	1,00	16.020.000	100,00	100,00	100,00	17.020.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	NA			100		100	4.875.000	100	1,00	4.875.000	100,00	100,00	100,00	4.875.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA			100	1.000.000	100	11.145.000	100	1,00	11.145.000	100,00	100,00	100,00	12.145.000			Dinas Kesehatan	
					PUSKESMAS JETIS I														0					
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	10.937.925.831	84,75	1.863.472.238	85	2.358.201.842	85,01	1,00	2.119.672.182	100,01	89,89	84,88	3.983.144.420	100,45	36,42	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	425.268.800	100	95.764.302	100	87.978.048	67,06	0,67	59.000.704	67,06	67,06	83,53149186	154.765.006	83,53	36,39	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	10.512.657.031	100	1.767.707.936	100	2.270.223.794	90,77	0,91	2.060.671.478	90,77	90,77	95,38476523	3.828.379.414	95,38	36,42	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	4.328.000.000	1	192.255.000	1	1.054.004.620	1,00	1,00	974.400.317	100,00	92,45	1	1.166.655.317	100,00	26,96	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	4.328.000.000	100	192.255.000	100	1.054.004.620	92,45	0,92	974.400.317	92,45	92,45	96,22372134	1.166.655.317	96,22	26,96	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	0	-	0	-	1	28.512.540	1,00	1,00	20.404.180	100,00	71,56	0,5	20.404.180			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK sesuai Standar	persen					100	28.512.540	71,56	0,72	20.404.180	71,56	71,56	35,78106335	20.404.180			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	0	13.450.000	100	10.887.500	100	1,00	6.725.000	100,00	61,77	50	20.175.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0		0		100	6.725.000	100	1,00	6.725.000	100,00	100,00	50	6.725.000			Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6 Rp		7 Rp		8 Rp		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12=11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA	-		-	13.450.000	-	4.162.500	-		-	-	-	0	13.450.000			Dinas Kesehatan	
					PUSKESMAS JETIS II														0	-			Dinas Kesehatan	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	7.068.379.200	84,75	1.250.778.727	85	1.608.944.262	85,01	1,00	1.538.940.138	100,01	95,65	84,88	2.789.718.865	100,45	39,47	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	300.179.200	100	54.443.139	100	58.652.032	100,00	1,00	58.652.032	100,00	100,00	100	113.095.171	100,00	37,68	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	6.768.200.000	100	1.196.335.588	100	1.550.292.230	95,48	0,95	1.480.288.106	95,48	95,48	97,74222812	2.676.623.694	97,74	39,55	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.678.832.000	1	98.496.950	1	871.998.920	1,00	1,00	828.332.088	100,00	94,99	1	926.829.038	100,00	25,19	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.678.832.000	100	98.496.950	100	871.998.920	94,99	0,95	828.332.088	94,99	94,99	97,49616479	926.829.038	97,50	25,19	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	0	-	0	-	1	14.740.140	1	1,00	14.740.140	100,00	100,00	0,5	14.740.140			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM sesuai Standar	persen					100	14.740.140	100	1,00	14.740.140	100,00	100,00	50	14.740.140			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	0	-	100	3.700.000	100	1,00	3.700.000	100,00	100,00	50	3.700.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	3.700.000	100	1,00	3.700.000	100,00	100,00	50	3.700.000			Dinas Kesehatan	
					PUSKESMAS IMOIRI I														0	-			Dinas Kesehatan	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	9.019.884.235	84,75	2.086.178.544	85	2.724.186.787	85,01	1,00	2.243.236.704	100,01	82,35	84,88	4.329.415.248	100,45	48,00	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	425.268.800	100	81.439.674	100	87.978.048	100	1,00	87.977.346	100,00	100,00	100	169.417.020	100,00	39,84	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	8.594.615.435	100	2.004.738.870	100	2.636.208.739	100	1,00	2.155.259.358	100,00	81,76	100	4.159.998.228	100,00	48,40	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	4.245.000.000	1	253.265.443	1	1.266.024.120	1	1,00	1.238.434.326	100,00	97,82	1	1.491.699.769	100,00	35,14	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	100	4.245.000.000	100	253.265.443	100	1.266.024.120	100	1,00	1.238.434.326	100,00	97,82	100	1.491.699.769	100,00	35,14	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	0	-	0	-	1	28.853.040	1	1,00	28.853.040	100,00	100,00	0,5	28.853.040			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM sesuai Standar	persen					100	28.853.040	100	1,00	28.853.040	100,00	100,00	50	28.853.040			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	0	-	0	1.312.500	0		-	-	-	0	-			Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	05	2.01	Advokasi pemberdayaan , kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota	LP dan atau LS yang bemitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Dokumen	0	-	0	-	0	1.312.500	0		-	0	-	0	-			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA							0		-	0	-	0	-			Dinas Kesehatan	
					IMOGIRI II												0	-						
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	10.728.853.829	84,75	1.822.586.523	85	1.988.278.721	85,01	1,00	1.863.241.075	100,01	93,71	84,88	3.685.827.598	100,45	34,35	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100		0		0				100,00	50		50,00	32,10	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	175.089.600	100	26.872.480	100	29.326.016	100	1,00	29.326.016	100,00	100,00	100	56.198.496	100,00	32,10	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	10.553.764.229	100	1.795.714.043	100	1.958.952.705	100	1,00	1.833.915.059	100,00	93,62	100	3.629.629.102	100,00	34,39	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	100	3.835.000.000	100	109.705.500	100	801.765.794	1	0,01	784.433.768	1,00	97,84	50,5	894.139.268	50,50	23,32	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.835.000.000	100	109.705.500	100	801.765.794	100	1,00	784.433.768	100,00	97,84	100	894.139.268	100,00	23,32	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	1	-	1	-	1	27.873.400	1	1,00	27.713.400	100,00	99,43	1	27.713.400	100,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK sesuai Standar	persen						27.873.400	0		27.713.400		99,43	0	27.713.400			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	0	-	100	9.015.000	100	1,00	9.015.000	100,00	100,00	50	9.015.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	9.015.000	100	1,00	9.015.000	100,00	100,00	50	9.015.000			Dinas Kesehatan	
					DLINGO I												0	-					Dinas Kesehatan	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	8.562.012.240	84,75	1.431.608.328	85,00	1.754.935.904	85	1,00	1.364.632.484	100,00	77,76	84,875	2.796.240.812	100,44	32,66	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100										0			-		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	675.448.000	100	135.790.400	100	146.630.080	100	1,00	146.627.740	100,00	100,00	100	282.418.140	100,00	41,81	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	7.886.564.240	100	1.295.817.928	100	1.608.305.824	100	1,00	1.218.004.744	100,00	75,73	100	2.513.822.672	100,00	31,87	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.362.000.000	1	102.990.500	1	806.144.020	1	1,00	683.505.514	100,00	84,79	1	786.496.014	100,00	23,39	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.362.000.000	100	102.990.500	100	806.144.020	100	1,00	683.505.514	100,00	84,79	100	786.496.014	100,00	23,39	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	0	-	0	-	1	28.553.040	1	1,00	28.553.040	100,00	98,96	0,5	28.553.040			Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDMk sesuai Standar	persen					100	28.853.040	100	1,00	28.553.040	100,00	98,96	50	28.553.040			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	0	-	100	7.400.000	100	1,00	7.400.000	100,00	100,00	50	7.400.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Beresumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	7.400.000	100	1,00	7.400.000	100,00	100,00	50	7.400.000			Dinas Kesehatan	
					DLINGO II												0	-					Dinas Kesehatan	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	6.654.111.600	84,75	1.112.125.750	85	1.497.275.109	85,01	1,00	1.318.649.735	100,01	88,07	84,88	2.430.775.485	100,45	36,53	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	175.089.600	100	26.946.558	100	29.326.016	100	1,00	29.325.890	100,00	100,00	100	56.272.448	100,00	32,14	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	6.479.022.000	100	1.085.179.192	100	1.467.949.093	100	1,00	1.289.323.845	100,00	87,83	100	2.374.503.037	100,00	36,65	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	4.245.000.000	1	192.862.500	1	996.366.620	1	1,00	956.474.154	100,00	96,00	1	1.149.336.654	100,00	27,08	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	4.245.000.000	100	192.862.500	100	996.366.620	100	1,00	956.474.154	100,00	96,00	100	1.149.336.654	100,00	27,08	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMk	indeks	0	-	0	-	1	28.853.040	1	1,00	28.853.040	100,00	100,00	0,5	28.853.040			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDMk sesuai Standar	persen					100	28.853.040	100	1,00	28.853.040	100,00	100,00	50	28.853.040			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	0	-	100	16.418.450	100	1,00	16.418.450	100,00	100,00	50	16.418.450			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Beresumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	16.418.450	100	1,00	16.418.450	100,00	100,00	50	16.418.450			Dinas Kesehatan	
					PLERET												0	-					Dinas Kesehatan	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	14.952.878.400	85	2.456.639.173	85	3.344.804.898	85	1,00	2.747.616.137	100,00	82,15	85	5204255310	100,44	34,80	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100	-			-					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	550.358.400	100	108.226.290	100	117.304.064	100	1,00	117.303.560	100,00	100,00	100	225.529.850	100,00	40,98	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	14.402.520.000	100	2.348.412.883	100	3.227.500.834	100	1,00	2.630.312.577	100,00	81,50	100	4.978.725.460	100,00	34,57	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.520.000.000	1	345.405.670	1	759.794.494	1	1,00	755.320.198	100,00	99,41	1	1.100.725.868	100,00	31,27	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.520.000.000	100	345.405.670	100	759.794.494	100	1,00	755.320.198	100,00	99,41	100	1.100.725.868	100,00	31,27	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMk	indeks	0	-	0	-	1	49.519.300	1	1,00	34.985.300	100,00	70,65	0,5	34.985.300			Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase SDMK sesuai Standar	persen					100	49.519.300	100	1,00	34.985.300	100,00	70,65	50	34.985.300			Dinas Kesehatan			
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	0	-	100	15.000.000	100	1,00	15.000.000	100,00	100,00	50	15.000.000			Dinas Kesehatan			
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	15.000.000	100	1,00	15.000.000	100,00	100,00	50	15.000.000			Dinas Kesehatan			
					HYUNGUN														0							
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	12.850.158.400	84,75	2.448.493.579	85	3.156.055.426	85,01	1,00	2.533.878.138	100,01	80,29		4.982.371.717		38,77	Dinas Kesehatan			
						Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan			
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	550.358.400	100	108.346.952		117.304.064	100		117.303.560		100,00	100	225.650.512	100,00	41,00	Dinas Kesehatan			
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	12.299.800.000	100	2.340.146.627	100	3.038.751.362	100	1,00	2.416.574.578	100,00	79,53	100	4.756.721.205	100,00	38,67	Dinas Kesehatan			
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	865.000.000	1	634.588.363	1	1.013.814.060	1	1,00	812.526.920	100,00	80,15	1	1.447.115.283	100,00	167,30	Dinas Kesehatan			
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	865.000.000	100	634.588.363	100	1.013.814.060	100	1,00	812.526.920	100,00	80,15	100	1.447.115.283	100,00	167,30	Dinas Kesehatan			
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMK	indeks	0	-	0	-	1	36.980.640	1	1,00	36.952.480	100,00	99,92	0,5	36.952.480			Dinas Kesehatan			
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase SDMK sesuai Standar	persen					100	36.980.640	100	1,00	36.952.480	100,00	99,92	50	36.952.480			Dinas Kesehatan			
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	0	-	100	13.887.500	100	1,00	13.687.500	100,00	98,56	50	13.687.500			Dinas Kesehatan			
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	13.887.500	100	1,00	13.687.500	100,00	98,56	50	13.687.500			Dinas Kesehatan			
					BANGUNTAPAN I														0		-		Dinas Kesehatan			
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	10.331.122.982	84,75	2.053.076.135	85	2.412.264.201	85,01	1,00	2.019.522.309	100,01	83,72	84,88	4.072.598.444	100,45	39,42	Dinas Kesehatan			
						Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan			
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	175.089.600	100	27.547.855	100	29.326.016	100	1,00	29.326.016	100,00	100,00	100	56.873.871	100,00	32,48	Dinas Kesehatan			
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	10.156.033.382	100	2.025.528.280	100	2.382.938.185	100	1,00	1.990.196.293	100,00	83,52	100	4.015.724.573	100,00	39,54	Dinas Kesehatan			
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.481.000.000	1	111.481.600	1	784.800.800	1	1,00	741.548.661	100,00	94,49	1	853.030.261	100,00	24,51	Dinas Kesehatan			
151	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.481.000.000	100	111.481.600	100	784.800.800	100	1,00	741.548.661	100,00	94,49	100	853.030.261	100,00	24,51	Dinas Kesehatan			
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMK	indeks	0	-	0	-	1	28.435.360	1	1,00	28.435.360	100,00	100,00	0,5	28.435.360			Dinas Kesehatan			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK sesuai Standar	persen					100	28.435.360	100	1,00	28.435.360	100,00	100,00	50	28.435.360			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	0	-	100	2.062.500	100	1,00	2.062.500	100,00	100,00	50	2.062.500			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.01	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	2.062.500	100	1,00	2.062.500	100,00	100,00	50	2.062.500			Dinas Kesehatan	
					BANGUNTAPAN II														0	-			Dinas Kesehatan	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	8.246.068.800	84,75	1.555.234.772	85	1.720.013.768	85,01	1,00	1.550.008.247	100,01	90,12	84,88	3.105.243.019	100,45	37,66	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	425.268.800	100	86.650.114	100	87.978.048	100	1,00	87.978.048	100,00	100,00	100	174.628.162	100,00	41,06	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	7.820.800.000	100	1.468.584.658	100	1.632.035.720	100	1,00	1.462.030.199	100,00	89,58	100	2.930.614.857	100,00	37,47	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.841.000.000	1	558.775.614	1	871.098.300	1	1,00	701.535.720	100,00	80,53	1	1.260.311.334	100,00	32,81	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.841.000.000	100	558.775.614	100	871.098.300	100	1,00	701.535.720	100,00	80,53	100	1.260.311.334	100,00	32,81	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMK	indeks	0	-	0	-	1	16.712.000	1	1,00	7.000.000	100,00	41,89	0,5	7.000.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK sesuai Standar	persen					100	16.712.000	100	1,00	7.000.000	100,00	41,89	50	7.000.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	0	-	100	5.229.250	100	1,00	3.622.250	100,00	69,27	50	3.622.250			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	5.229.250	100	1,00	3.622.250	100,00	69,27	50	3.622.250			Dinas Kesehatan	
					BANGUNTAPAN III														0	-			Dinas Kesehatan	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	4.353.179.200	84,75	876.150.152	85	946.456.677	85,01	1,00	830.117.167	100,01	87,71	84,88	1.706.267.319	100,45	39,20	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	300.179.200	100	54.444.986	100	58.652.032	100	1,00	54.350.024	100,00	92,67	100	108.795.010	100,00	36,24	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	4.053.000.000	100	821.705.166	100	887.804.645	100	1,00	775.767.143	100,00	87,38	100	1.597.472.309	100,00	39,41	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.738.000.000	1	82.664.500	1	826.323.844	1	1,00	792.285.510	100,00	95,88	1	874.950.010	100,00	23,41	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.738.000.000	100	82.664.500	100	826.323.844	100	1,00	792.285.510	100,00	95,88	100	874.950.010	100,00	23,41	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMK	indeks	0	-	0	-	1	13.600.000	0	-	13.600.000	-	100,00	0	13.600.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK sesuai Standar	persen					100	13.600.000	0	-	13.600.000	-	100,00	0	13.600.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	0	-	100	7.377.500	100	1,00	7.377.500	100,00	100,00	50	7.377.500			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	dokumen					1	3.300.000	100	100,00	3.300.000	10.000,00	100,00	50,00	3.300.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKEM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	4.077.500	0	-	4.077.500	-	100,00	0	4.077.500			Dinas Kesehatan	
					SEWON I									0		-			0	-			Dinas Kesehatan	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	13.975.620.063	84,75	2.440.013.033	85	3.119.906.124	85,01	1,00	2.662.470.155	100,01	85,34	84,88	5.102.483.188	100,45	36,51	Dinas Kesehatan	
						Cakupan Pelayanan Puskesmas	persen	100		100									50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	550.358.400	100	108.981.280	100	117.304.064	100	1,00	117.302.192	100,00	100,00	100	226.283.472	100,00	41,12	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	13.425.261.663	100	2.331.031.753	100	3.002.602.060	100	1,00	2.545.167.963	100,00	84,77	100	4.876.199.716	100,00	36,32	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	4.073.844.080	1	357.855.660	1	998.532.520	1	1,00	989.953.825	100,00	99,14	1	1.347.809.485	100,00	33,08	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	4.073.844.080	100	357.855.660	100	998.532.520	100	1,00	989.953.825	100,00	99,14	100	1.347.809.485	100,00	33,08	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMK	indeks	0	-	0	-	1	45.461.640	1	1,00	19.782.640	100,00	43,52	0,5	19.782.640			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK sesuai Standar	persen					100	45.461.640	100	1,00	19.782.640	100,00	43,52	50	19.782.640			Dinas Kesehatan	
					SEWON II														0	-			Dinas Kesehatan	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	10.625.953.052	84,75	1.877.699.063	85	2.128.546.306	85,01		1.989.769.766		93,48		3.867.468.829		36,40	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	425.268.800	100	81.985.020	84	87.978.048	84	1,00	87.975.648	100,00	100,00	92	169.960.668	92,00	39,97	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	10.200.684.252	100	1.795.714.043	84	2.040.568.258	100	1,19	1.901.794.118	119,05	93,20	100	3.697.508.161	100,00	36,25	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	4.246.000.000	1	65.930.000	1	953.577.600	1	1,00	919.767.600	100,00	96,45	1	985.697.600	100,00	23,21	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	4.246.000.000	100	65.930.000	100	953.577.600	100	1,00	919.767.600	100,00	96,45	100	985.697.600	100,00	23,21	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	0	-	0	-	1	48.793.900	1	1,00	44.793.900	100,00	91,80	0,5	44.793.900			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM sesuai Standar	persen					100	48.793.900	100	1,00	44.793.900	100,00	91,80	50	44.793.900			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Slaga purnama mandiri	persen	0	-	0	-	100	5.100.000	100	1,00	5.100.000	100,00	100,00	50	5.100.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	5.100.000	100	1,00	5.100.000	100,00	100,00	50	5.100.000			Dinas Kesehatan	
					KASIHAN I									0		-								
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	14.750.448.000	84,75	2.540.950.324	85	3.111.059.072	85,01	1,00	2.696.886.486	100,01	86,69	84,88	5.237.836.810	100,45	35,51	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	675.448.000	100	135.943.368	100	146.630.080	100	1,00	142.327.944	100,00	97,07	100	278.271.312	100,00	41,20	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	14.075.000.000	100	2.405.006.956	100	2.964.428.992	100	1,00	2.554.558.542	100,00	86,17	100	4.959.565.498	100,00	35,24	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.585.000.000	1	99.810.500	1	917.093.120	1	1,00	814.367.970	100,00	88,80	1	914.178.470	100,00	25,50	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.585.000.000	100	99.810.500	100	917.093.120	100	1,00	814.367.970	100,00	88,80	100	914.178.470	100,00	25,50	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	0	-	0	-	1	57.374.540	1	1,00	41.720.900	100,00	72,72	0,5	41.720.900			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM sesuai Standar	persen					100	57.374.540	100	1,00	41.720.900	100,00	72,72	50	41.720.900			Dinas Kesehatan	
					KASIHAN II																			
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	8.511.379.200	84,75	1.742.995.785	85	2.146.757.288	85,01	1,00	1.689.092.814	100,01	78,68	84,88	3.432.088.599	100,45	40,32	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	300.179.200	100	54.436.160	100	2.146.757.288	100	1,00	1.689.092.814	100,00	78,68	100	1.743.528.974	100,00	580,83	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	8.211.200.000	100	1.688.559.625			0		-			50	1.688.559.625	50,00	20,56	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	4.247.000.000	1	82.627.500	1	893.487.850	1	1,00	829.458.614	100,00	92,83	1	912.086.114	100,00	21,48	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	4.247.000.000	100	82.627.500	100	893.487.850	100	1,00	829.458.614	100,00	92,83	100	912.086.114	100,00	21,48	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMk	indeks	0	-	0	-	1	70.792.100		1,00	11.135.000	100,00	15,73	0,5	11.135.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDMk sesuai Standar	persen						70.792.100		0	11.135.000		15,73	0	11.135.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	0	-	100	7.990.000	100	1,00	7.990.000	100,00	100,00	50	7.990.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	05	20.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berasumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	7.990.000	100	1,00	7.990.000	100,00	100,00	50	7.990.000			Dinas Kesehatan	
					PAJANGAN														0	-			Dinas Kesehatan	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,50	13.315.878.200	84,75	2.232.142.848	85	2.703.865.870	85,01		2.218.178.125		82,04		4.450.320.973		33,42	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	550.358.400	100	108.272.320	100	117.304.064	100	1,00	117.304.064	100,00	100,00	100	225.576.384	100,00	40,99	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	12.765.519.800	100	2.123.870.528	100	2.586.561.806	100	1,00	2.100.874.061	100,00	81,22	100	4.224.744.589	100,00	33,09	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.335.000.000	1	126.145.600	1	826.341.344	1	1,00	764.604.651	100,00	92,53	1	890.750.251	100,00	26,71	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.335.000.000	100	126.145.600	100	826.341.344	100	1,00	764.604.651	100,00	92,53	100	890.750.251	100,00	26,71	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMk	indeks	0	-	0	-	1	28.881.500	1	1,00	15.000.000	100,00	51,94	0,5	15.000.000			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDMk sesuai Standar	persen					100	28.881.500	100	1,00	15.000.000	100,00	51,94	50	15.000.000			Dinas Kesehatan	
					SEDAYU I														0	-			Dinas Kesehatan	
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	8.414.858.400	84,75	1.552.735.467	85	1.936.598.550	85,01	1,00	1.567.666.629	100,01	80,95	84,88	3.120.402.096	100,45	37,08	Dinas Kesehatan	
						Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	550.358.400	100	108.313.360	100	117.304.064	100	1,00	117.304.064	100,00	100,00	100	225.617.424	100,00	40,99	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	7.864.500.000	100	1.444.422.107	100	1.819.294.486	100	1,00	1.450.362.565	100,00	79,72	100	2.894.784.672	100,00	36,81	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.335.000.000	1	81.214.150	1	716.633.320	1	1,00	661.384.710	100,00	92,29	1	742.598.860	100,00	22,27	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.335.000.000	100	81.214.150	100	716.633.320	100	1,00	661.384.710	100,00	92,29	100	742.598.860	100,00	22,27	Dinas Kesehatan	
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMk	indeks	0	-	0	-	1	27.284.940	1	1,00	27.284.940	100,00	100,00	0,5	27.284.940			Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDMk sesuai Standar	persen					100	27.284.940	100	1,00	27.284.940	100,00	100,00	50	27.284.940			Dinas Kesehatan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9/8 x 100%	11 = 7 + 9	12=11/6 x100%	12	13												
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	0	-	100	15.485.000	100	1,00	15.485.000	100,00	100,00	50	15.485.000			Dinas Kesehatan		
	1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS						100	3.975.000	100	1,00	3.975.000	100,00	100,00	50	3.975.000			Dinas Kesehatan		
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					100	11.510.000	100	1,00	11.510.000	100,00	100,00	50	11.510.000			Dinas Kesehatan		
					SEDAYU II												0	-					Dinas Kesehatan		
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,5	7.539.114.231	84,75	1.298.850.788	85	1.553.580.310	85,01	1,00	1.404.697.029	100,01	90,42	84,88	2.703.547.817	100,45	35,86	Dinas Kesehatan		
						Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		100				0					50		50,00		Dinas Kesehatan		
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	300.179.200	100	54.487.116	100	58.652.032	100	1,00	58.652.032	100,00	100,00	100	113.139.148	100,00	37,69	Dinas Kesehatan		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	7.238.935.031	100	1.244.363.672	100	1.494.928.278	100	1,00	1.346.044.997	100,00	90,04	100	2.590.408.669	100,00	35,78	Dinas Kesehatan		
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	3.325.000.000	1	197.702.900	1	712.233.216	1	1,00	669.425.810	100,00	93,99	1	867.128.710	100,00	26,08	Dinas Kesehatan		
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	3.325.000.000	100	197.702.900	100	712.233.216	100	1,00	669.425.810	100,00	93,99	100	867.128.710	100,00	26,08	Dinas Kesehatan		
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMK	indeks	0	-	0	-	1	27.504.504	1	1,00	27.444.504	100,00	99,78	0,5	27.444.504			Dinas Kesehatan		
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK sesuai Standar	persen					100	27.504.504	100	1,00	27.444.504	100,00	99,78	50	27.444.504			Dinas Kesehatan		
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	0	-	-	-	100	3.225.000	100	1,00	3.225.000	100,00	100,00	50	3.225.000			Dinas Kesehatan		
	1	02	05		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Dokumen					1	3.125.000	1	1,00	3.125.000	100,00	100,00	0,5	3.125.000			Dinas Kesehatan		
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	NA					1	100.000	1	1,00	100.000	100,00	100,00	0,5	100.000			Dinas Kesehatan		
JUMLAH ANGGARAN UNTUK SASARAN 2:									100	2.110.474.462.374	#REF!	552.163.312.407	6.241	468.954.598.484	#VALUE!		440.373.310.052		93,91		992.536.622.459		47		-
SASARAN 3: Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan																									
	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	82	6.450.395.622	0	305.818.572.681	82	322.921.950.075	82	1,00	298.293.466.214	100,00	92,37	41	604.112.038.895	50	9.365,50	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	758.140.300		948.545.120	100	1.085.114.500	100	1,00	945.200.500	100,00	87,11	50	1.893.745.620	50	249,79	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	348.902.400		296.276.092.310	100	316.551.795.473	100	1,00	292.650.375.072	100,00	92,45	50	588.926.467.382	50	#####	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	1.752.866.951		3.982.228.591	100	1.190.396.900	100	1,00	1.098.301.910	100,00	92,26	50	5.080.530.501	50	289,84	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD	persen	100	-		-	100	126.940.000		100	1,00	110.550.750	100,00	87,09	50	110.550.750	50		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
	1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	2.900.399.506		3.425.515.570	100	2.907.576.349	100	1,00	2.676.242.870	100,00	92,04	50	6.101.758.440	50	210,38	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	690.086.465		1.186.191.090	100	1.060.126.853	100	1,00	812.795.112	100,00	76,67	50	1.998.986.202	50	289,67	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	persen	100	93.472.311.964	100	311.078.277.612	100	182.883.327.188	100	1,00	173.628.795.322	100,00	94,94	100	484.707.072.934	100	518,56	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	persen	100	40.380.983.276		176.648.060.591	100	94.119.818.441	100	1,00	91.159.129.584	100,00	96,85	50	267.807.190.175	50	663,20			
	1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	persen	100	22.251.358.448		107.967.398.900	100	58.837.126.922	100	1,00	55.529.644.371	100,00	94,38	50	163.497.043.271	50	734,77	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	1	01	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	persen	100	25.652.400.000		21.525.227.237	100	25.776.656.825	100	1,00	23.026.825.969	100,00	89,33	50	44.552.053.206	50	173,68	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	persen	100	5.187.570.240		4.937.590.884	100	4.149.725.000	100	1,00	3.913.195.398	100,00	94,30	50	8.850.786.282	50	170,62	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	1	01	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF	persen	0	-	0	2.096.257.050	100	1.699.005.120	100	1,00	1.516.640.603	100,00	89,27	50	3.612.897.653			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	1	01	03	2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	dokumen		-		1.795.034.310	1	1.276.060.000		1	1,00	1.195.729.603	100,00	93,70	0,5	2.990.763.913			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
	1	01	03	2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF yang ditetapkan	dokumen		-		301.222.740	1	422.945.120		1	1,00	320.911.000	100,00	75,88	0,5	622.133.740			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
	1	01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	persen	83	220.810.642.120	0	220.273.594.812	66	220.700.232.694	66	1,00	192.313.910.646	100,00	87,14	33	412.587.505.458	39,7590361	186,85	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	1	01	04	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	guru	8339	220.810.642.120		220.273.594.812	8339	220.700.232.694	8339	1,00	192.313.910.646	100,00	87,14	4169,5	412.587.505.458	50	186,85	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	84	4.831.340.478		2.378.398.360	80	1.734.157.000	80	1,00	1.499.606.700	100,00	86,47	40	3.878.005.060	47,6190476	80,27	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	2	19	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	dokumen	1	4.540.924.654		2.209.763.000	1	1.534.157.000	1	1,00	1.299.606.700	100,00	84,71	0,5	3.509.369.700	50	77,28	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	2	19	02	2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	290.415.824		168.635.360	1	200.000.000	1	1,00	200.000.000	100,00	100,00	0,5	368.635.360	50	126,93	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga	mendali	130	11.750.081.966	0	12.102.922.982	55	10.896.558.556	55	1,00	10.195.360.410	100,00	93,56	27,5	22.298.283.392	21,15	189,77	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	2	19	03	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	853.053.362		1.690.605.445	1	972.641.256	1	1,00	448.567.960	100,00	46,12	0,5	2.139.173.405	50	250,77	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2	19	03	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	2.257.410.720		3.592.001.220	1	1.647.474.500	1	1,00	1.522.842.950	100,00	92,43	0,5	5.114.844.170	50	226,58	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
	2	19	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	dokumen	1	1.067.811.868		807.928.320	1	750.000.000	1	1,00	750.000.000	100,00	100,00	0,5	1.557.928.320	50	145,90	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
	2	19	03	2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	dokumen	1	4.485.623.736		5.800.132.717	1	7.120.000.000	1	1,00	7.120.000.000	100,00	100,00	0,5	12.920.132.717	50	288,03	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
	2	19	03	05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	dokumen	1	3.086.182.280		212.255.280	1	406.442.800	1	1,00	353.949.500	100,00	87,08	0,5	566.204.780	50	18,35	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
	2	19	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPERAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif	organisasi	18	643.010.720	0	252.953.040	18	500.000.000	18	1,00	500.000.000	100,00	100,00	9	752.953.040	50	117,10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
	2	19	04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	dokumen	1	643.010.720		252.953.040	1	500.000.000	1	1,00	500.000.000	100,00	100,00	0,5	752.953.040	50	117,10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	persen	5	2.590.000.000	0	-	4	688.727.000	4	1,00	671.332.600	100,00	97,47	2	671.332.600	40	25,92	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
	2	22	08	2.10	Pendidikan Berbasis Budaya	Kurikulum Mulok yang disusun	buah	10	2.590.000.000		-	2	688.727.000	2	1,00	671.332.600	100,00	97,47	1	671.332.600	10	25,92	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
	2	23	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI AKIP	Angka	80	35.070.882.761	80	5.321.214.311	80	6.122.256.204	82,52	1,03	5.448.742.782	103,15	89,00	81,26	10.769.957.093	101,58	30,71	Dispursip				
	2	23	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	94	15.900.000	100	1.450.000	94	1.200.000	100	1,06	1.200.000	106,38	100,00	100	2.650.000	106,38	16,67	Dispursip				
	2	23	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	persen	94	31.342.018.171	100	4.587.250.837	94	5.355.006.490	100	1,06	4.688.579.846	106,38	87,56	100	9.275.830.683	106,38	29,60	Dispursip				
	2	23	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	persen	94	759.626.236	100	147.270.128	94	146.547.152	98	1,04	144.074.427	104,26	98,31	99	291.344.555	105,32	38,35	Dispursip				
	2	23	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	persen	94	1.179.361.920	100	228.915.884	94	233.464.128	100	1,06	231.423.090	106,38	99,13	100	460.338.974	106,38	39,03	Dispursip				
	2	23	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah han Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	persen	94	1.773.976.434	100	356.327.462	94	386.038.434	100	1,06	383.465.419	106,38	99,33	100	739.792.881	106,38	41,70	Dispursip				
	2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI	PERSEN	19,95	4.334.602.700	7,61	338.795.400	10,08	917.453.836	10	0,99	909.636.368	99,21	99,15	8,81	1.248.431.768	44,14	28,80	Dispursip				
	2	23	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan	unit	65	4.334.602.700	0	338.795.400	17	917.453.836	17	1,00	909.636.368	100,00	99,15	8,5	1.248.431.768	13,08	28,80	Dispursip				
JUMLAH ANGGARAN UNTUK SASARAN 3:								100	379.953.268.331	19	859.660.986.248	60	749.063.667.673	60	1,00	684.977.491.645	100,41	91,44	39	1.544.638.477.893	39	407		-			
SASARAN 4:					Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah																						
	2	22	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82	26.066.244.811	85	4.402.426.873	81	5.024.559.048	85,36	1,05	4.844.055.191	105,38	96,41	85,18	9.246.482.064	103,88	35,47					
	2	22	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	174.542.600	100	95.626.100	100	87.972.600	200	2,00	87.907.500	200,00	99,93	150	183.533.600	150	105,15	Diabud				
	2	22	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	95	20.779.173.890	95	3.460.614.197	95	4.132.075.048	190	2,00	3.964.863.608	200,00	95,95	142,5	7.425.477.805	150	35,74	Diabud				
	2	22	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	1.001.754.816	100	-	100	2.867.500	200	2,00	2.867.500	200,00	100,00	150	2.867.500	150	0,29	Diabud				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	22	01	2.08	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	205.820.000	95	10.650.000	95	49.170.000	190	2,00	49.065.000	200,00	99,79	142,5	59.715.000	142,5	29,01	Diabud		
	2	22	01	2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1.018.008.281	95	213.028.575	95	135.396.876	190	2,00	131.602.250	200,00	97,20	142,5	344.630.825	142,5	33,85	Diabud		
	2	22	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.682.887.160	95	379.246.826	95	424.108.960	190	2,00	416.056.019	200,00	98,10	142,5	795.302.845	142,5	47,26	Diabud		
	2	22	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95	1.204.058.064	95	243.261.175	95	192.968.064	190	2,00	191.693.314	200,00	99,34	142,5	434.954.489	150	36,12	Diabud		
	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN****)	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persaen	90,44	23.076.829.015	0,54	1.099.977.293	61,03	1.425.000.000	62,13	1,02	1.407.242.828	101,80	98,75	31,33	2.507.220.121	34,65	10,86	Diabud		
						Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	132	30.355.109.550		3.391.126.480	18	3.300.000.000	18	1,00	3.244.355.824	100,00	98,31	9	6.635.482.304	6,82	21,86	Diabud		
						Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	1215	94.610.110.260		33.350.504.547	219	10.338.510.000	219	1,00	9.776.414.032	100,00	94,56	109,5	43.126.918.579	9,01	45,58	diabud		
	2	22	08	2.01	Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****)	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa	Jenis	11	30.355.109.550	n/a	3.391.126.480	11	3.300.000.000	11	1,00	154.176.543.000	100,00	4.672,02		157.567.669.480		519,08	Diabud		
	2	22	08	2.04	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan	Rekomendasi	110	22.527.938.815	N/A	1.099.977.293	22	1.425.000.000	22	1,00	96.360.339.375	100,00	6.762,13		97.460.316.668		432,62	Diabud		
	2	22	08	2.05	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****)	Peningkatan Event Budaya di Taman Budaya Bantul	Kali	14	2.200.000.000	0	26.051.141.750	2	685.000.000	2	1,00	57.816.203.625	100,00	8.440,32	1	83.867.345.375	7,14285714	3.812,15	Diabud		
	2	22	08	2.06	Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan****)	Pemenuhan Sarana Prasarana	Jenis	7	14.592.527.500	0	-	1	2.776.610.000	1	1,00	38.544.135.750	100,00	1.388,17	0,5	38.544.135.750	7,14285714	264,14	Diabud		
	2	22	08	2.09	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kali	1151	77.627.082.760	N/A	7.299.362.797	211	6.876.900.000	211	1,00	19.272.067.875	100,00	280,24		26.571.430.672		34,23	Diabud		
JUMLAH ANGGARAN UNTUK SASARAN 4:								100	174.108.293.636	-	42.244.035.193	-	20.088.069.048			19.272.067.875		95,94	-	61.516.103.068	-	35		-	
SASARAN 5:					Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis																				
	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	24.693.351.548	78	8.446.097.018	79	9.228.818.542	78	0,99	8.047.916.951	98,73	87,20	78	16.494.013.969	93,9759036	66,80	Satpol PP Bantul		
	1	05	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	155.145.852	100	31.412.500	100	25.402.500	100	1,00	25.130.000	100,00	98,93	100	56.542.500	100	36,44	Satpol PP Bantul		
	1	05	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	17.199.552.659	100	6.873.037.638	100	7.776.424.715	100	1,00	6.627.218.906	100,00	85,22	100	13.500.256.544	100	78,49	Satpol PP Bantul		
	1	05	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	1.049.432.385	100	248.181.250	100	195.815.000	100	1,00	190.907.200	100,00	97,49	100	439.088.450	100	41,84	Satpol PP Bantul		
	1	05	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	1.431.141.592	100	402.634.350	100	408.308.523	100	1,00	403.259.550	100,00	98,76	100	805.893.900	100	56,31	Satpol PP Bantul		
	1	05	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	2.158.176.427	100	304.410.180	100	361.165.184	100	1,00	354.982.494	100,00	98,29	100	659.392.674	100	30,55	Satpol PP Bantul		
	1	05	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	2.699.902.633	100	586.421.100	100	461.702.620	100	1,00	446.418.801	100,00	96,69	100	1.032.839.901	100	38,25	Satpol PP Bantul		
	1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	14.557.075.405	100	2.957.535.674	100	3.104.826.789	98	0,98	3.055.633.193	98,00	98,42	99	6.013.168.867	99	41,31	Satpol PP Bantul		
	1	05	02	2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran karnitribas yang ditindaklanjuti	Persen	100	11.738.232.908	100	2.472.660.341	100	2.272.595.030	100	1,00	2.232.778.205	100,00	98,25	100	4.705.438.546	100	40,09	Satpol PP Bantul		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	05	02	2.02	Kegiatan Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelaksanaan Perda yang ditandatangani	Persen	100	2.818.842.497	100	484.875.333	100	832.231.759	100	1,00	822.854.988	100,00	98,87	100	1.307.730.321	100	46,39	Satpol PP Bantul	
	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Persen	27,22	9.600.000.000	27,22	-	29,37	561.550.000	69	2,35	554.666.750	234,93	98,77	48,11	554.666.750	176,74504	5,78	Satpol PP Bantul	
	2	22	08	2.09	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan	Pedukuhan	262	9.600.000.000	262	-	25	561.550.000	25	1,00	554.666.750	100,00	98,77	143,5	554.666.750	54,7709924	5,78	Satpol PP Bantul	
	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	angka	89	3.803.876.555	83	2.466.814.524	80	2.945.074.105	80	1,00	2.943.365.655	100,00	99,94	81,5	5.410.180.179	91,5730337	142,23	Keshanggol	
	8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan Penganggaran evaluasi kerja perangkat daerah	persen	100	50.000.000	11	14.400.000	4	18.500.000	4	1,00	18.500.000	100,00	100,00	7,5	32.900.000	7,5	65,80	Keshanggol	
	8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	persen	100	2.873.876.555	14 & 12	2.066.847.583	100	2.456.629.406	100	1,00	2.456.629.406	100,00	100,00		4.523.476.989		157,40	Keshanggol	
	8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengelolaan Adm Umum	persen	100	275.000.000	85	87.737.750	100	149.102.664	100	1,00	149.103.000	100,00	100,00	92,5	236.840.750	92,5	86,12	Keshanggol	
	8	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	persen	100	100.000.000	100	70.413.000	100	4.200.000	100	1,00	4.200.000	100,00	100,00	100	74.613.000	100	74,61	Keshanggol	
	8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum	persen	100	185.000.000	100	106.184.191	100	121.586.240	100	1,00	121.173.349	100,00	99,66	100	227.357.540	100	122,90	Keshanggol	
	8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum	persen	100	320.000.000	100	121.232.000	100	195.055.795	100	1,00	193.759.900	100,00	99,34	100	314.991.900	100	98,43	Keshanggol	
	8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan	persen	100	450.000.000	100	409.014.300	100	526.282.000	100	1,00	510.176.750	100,00	96,94	100	919.191.050	100	204,26	Keshanggol	
	8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	persen	100	450.000.000	100	409.014.300	100	526.282.000	100	1,00	510.176.750	100,00	96,94	100	919.191.050	100	204,26	Keshanggol	
	8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMERANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	persen	100	2.500.000.000	100	2.323.920.900	100	2.394.288.400	100	1,00	2.395.378.400	100,00	100,05	100	4.719.299.300	100	188,77	Keshanggol	
	8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik	Persentase masyarakat dalam kegiatan demokrasi	persen	100	2.500.000.000	76	2.323.920.900	100	2.394.288.400	100	1,00	2.395.378.400	100,00	100,05	88	4.719.299.300	88	188,77	Keshanggol	
	8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan pembinaan Ormas	persen	95	168.049.000	90	39.798.500	90	61.000.000	90	1,00	61.000.000	100,00	100,00	90	100.798.500	94,74	59,98	Keshanggol	
	8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pembinaan Ormas	persen	95	168.049.000	76	39.798.500	90	61.000.000	90	1,00	61.000.000	100,00	100,00	83	100.798.500	87,37	59,98	Keshanggol	
	8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama	persen	100	400.000.000	100	467.990.999	100	604.754.232	100	1,00	583.402.750	100,00	96,47	100	1.051.393.749	100	262,85	Keshanggol	

No	Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kerukunan antar umat beragama	persen	100	400.000.000	100	467.990.999	100	604.754.232	100	1,00	583.402.750	100,00	96,47	100	1.051.393.749	100	262,85	Keshangpol		
	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD	persen	100	280.000.000	100	245.311.500	100	297.658.000	100	1,00	290.392.600	100,00	97,56	100	535.704.100	100	191	Keshangpol		
	8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan bahan kewaspadaan dini berkaitan dengan permintaan OPD	persen	38	280.000.000	49	245.311.500	7	297.658.000	7	1,00	290.392.600	100,00	97,56	28	531.286.500	73,6842105	189,75	Keshangpol		
JUMLAH ANGGARAN UNTUK SASARAN 5:								100	56.452.352.508	86	17.356.483.415	86	19.724.252.068	91	0,12	18.441.933.049	104,71	93,50	89	35.798.416.464	89	63		#REF!	
SASARAN 6:					Terwujudnya pemerataan pendapatan																				
	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	angka	84	26.164.319.517	97	26.429.868.675	97	27.117.565.808	97	1,00	23.495.854.323	100,00	86,64	97	49.925.722.998	115,47619	190,82	DKPP		
						Cakupan peningkatankapasitas sumber daya aparatur	%	100		89		89		0	-		-		44,5		44,5		DKPP		
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100		98		98		0	-		-		49		49		DKPP		
	3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	104.089.250			84	91.916.250	0	-	90.624.500	-	98,59	0	90.624.500	0	87,06	DKPP		
	3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	23.896.289.156	100	23.951.639.567	100	24.443.409.879	100	1,00	20.967.845.986	100,00	85,78	100	44.919.485.553	100	187,98	DKPP		
	3	27	01	2.06	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	390.605.841	100	301.437.950	100	541.933.993	100	1,00	488.152.210	100,00	90,08	100	789.590.160	100	202,14	DKPP		
	3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	232.702.000	100	732.162.000	100	546.482.000	100	1,00	519.224.500	100,00	95,01	100	1.251.386.500	100	537,76	DKPP		
	3	27	01	2.08	3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	762.734.600	100	737.387.483	100	650.314.600	100	1,00	603.750.655	100,00	92,84	100	1.341.138.138	100	175,83	DKPP		
	3	27	01	2.09	3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	777.898.670	100	707.241.675	100	843.509.086	100	1,00	826.256.472	100,00	97,95	100	1.533.498.147	100	197,13	DKPP		
	2	09	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PrsentaseLumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	14,28	2.900.000	0	-	14,28	2.900.000	14	0,98	2.900.000	98,04	100,00	7	2.900.000	49,0196078	100,00	DKPP		
	2	09	02	2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional	Unit	1	2.900.000			1	2.900.000	1	1,00	2.900.000	100,00	100,00	0,5	2.900.000	50	100,00	DKPP		
	2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Pangan Pokok,	Ton,	475	614.496.016	475	364.107.120	475	936.711.016	475	1,00	941.091.016	100,00	100,47	475	1.305.198.136	100	212,40	DKPP		
						Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang dikonsumsi	Kelompok	9		9		9		9	1,00		100,00		9		100		DKPP		
	2	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Bahan Pangan Pokok	%	100	199.291.016	100	70.932.120	100	231.491.016	100	1,00	231.481.016	100,00	100,00	100	302.413.136	100	151,74	DKPP		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja PengelolaanCadangan Pangan	%	100	117.325.000	100	3.975.000	100	114.125.000	100	1,00	112.625.000	100,00	98,69	100	116.600.000	100	99,38	DKPP	
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Persentase ketersediaan pangan	%	149	300.000			100	300.000	100	1,00	300.000	100,00	100,00	50	300.000	33,557047	100,00	DKPP	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase ketersediaan pangan	%	149	297.580.000	100	289.200.000	100	590.795.000	100	1,00	596.685.000	100,00	101,00	100	885.885.000	67,114094	297,70	DKPP	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang dikonsumsi	Kelompok	9	201.462.000	9	13.150.000	9	304.762.000	9	1,00	304.762.000	100,00	100,00	9	317.912.000	100	157,80	DKPP	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Capaian Kinerja Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	%	100	32.237.000	100	6.775.000	100	27.987.000	100	1,00	27.987.000	100,00	100,00	100	34.762.000	100	107,83	DKPP	
2	09	04	2.02		2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penanganan Kerawanan Pangan	%	100	169.225.000	100	6.375.000	100	276.775.000	100	1,00	276.775.000	100,00	100,00	100	283.150.000	100	167,32	DKPP	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	%	100	28.175.000	0	-	100	28.175.000	100	1,00	27.325.000	100,00	96,98	50	27.325.000	50	96,98	DKPP	
2	09	05	2.01		Plaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	%	100	28.175.000			100	28.175.000	100	1,00	27.325.000	100,00	96,98	50	27.325.000	50	96,98	DKPP	
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KESUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	%	37	235.000.000	0	-	37	235.000.000	37	1,00	233.841.035	100,00	99,51	18,5	233.841.035	50	99,51	DKPP	
2	22	08	2.08		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	%	37	235.000.000			37	235.000.000	37	1,00	233.841.035	100,00	99,51	18,5	233.841.035	50	99,51	DKPP	
1	03	13			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			0	100.000.000	0	-	100	98.095.150	100	1,00	98.095.150	100,00	100,00	50	98.095.150		98,10	DKPP	
1	03	13	2.01		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				100.000.000			100	98.095.150	100	1,00	98.095.150	100,00	100,00	50	98.095.150		98,10	DKPP	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Padli (GKG)	Ton	65,7	2.598.882.286	66	1.379.021.646	65,7	2.752.034.889	66,00	1,00	2.566.795.733	100,46	93,27	66	3.945.817.379	100,456621	151,83	DKPP	
						Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	%	47		47		47		47	1,00		100,00		47		100		DKPP	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Capaian Kinerja Pengelolaan Sarana Pertanian	%	100	1.410.129.238	100	621.489.266	100	1.977.431.841	100	1,00	1.831.485.885	100,00	92,62	100	2.452.975.151	100	173,95	DKPP	
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Capaian kinerja penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	%	100	1.188.753.048	100	757.532.380	100	774.603.048	100	1,00	735.309.848	100,00	94,93	100	1.492.842.228	100	125,58	DKPP	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	ha	3000	6.500.350.000	3000	4.468.138.178	3000	5.573.900.000	3000	1,00	4.415.649.339	100,00	79,22	3000	8.883.787.517	100	136,67	DKPP	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	100	74.625.000	100	34.670.000	100	115.375.000	100	1,00	115.049.500	100,00	99,72	100	149.719.500	100	200,63	DKPP	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	100	6.418.025.000	100	4.433.468.178	100	5.450.825.000	100	1,00	4.415.649.339	100,00	81,01	100	8.849.117.517	100	137,88	DKPP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
								6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%				12
1	2				3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	
	3	27	03	2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Persen	100	7.700.000			100	7.700.000	100	1,00	7.700.000	100,00	100,00	50	7.700.000	50	100,00	DKPP		
	3	27	04		3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan pelayanan kesehatan ternak	Ekor	6800	2.245.583.756	6800	509.027.120	6800	2.345.314.032	6800	1,00	2.275.279.614	100,00	97,01	6800	2.784.306.734	100	123,99	DKPP		
						Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	Ekor	6000		6000		6000		6000	1,00		100,00		6000		100		DKPP		
	3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wahab Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Kinerja PengelaaanKesehatan Hewan danTernak	%	100	1.386.440.516	100	28.602.500	100	1.741.462.266	100	1,00	1.684.167.434	100,00	96,71	100	1.712.769.934	100	123,54	DKPP		
	3	27	04	2.02	Pengawasan Pemastukan dan Pengeluhan Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Kinerja Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	%	100	404.777.224	100	480.424.620	100	153.500.000	100	1,00	149.636.000	100,00	97,48	100	630.060.620	100	155,66	DKPP		
						Capaian Kinerja Pelayanan Pemotongan Ternak	%	100		100		100		100	1,00		100,00		100		100		DKPP		
	3	27	04	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	ersentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100	451.866.016			100	447.851.766	100	1,00	438.976.180	100,00	98,02	50	438.976.180	50	97,15	DKPP		
	3	27	04	2.05	3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menula	%	100	2.500.000			100	2.500.000	100	1,00	2.500.000	100,00	100,00	50	2.500.000	50	100,00	DKPP		
	3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktivitas Padi (GKG)	%	65,7	70.000.000	66	42.904.000	65,7	298.730.000	66	1,00	297.138.000	100,46	99,47	66	340.042.000	100,456621	485,77	DKPP		
	3	27	05	2.01	Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Capaian KinerjaPengendalian OPT	%	100	70.000.000	100	42.904.000	100	298.730.000	100	1,00	297.138.000	100,00	99,47	100	340.042.000	100	485,77	DKPP		
	3	27	06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	%	100	2.700.000	0	-	100	2.700.000	100	1,00	2.700.000	100,00	100,00	50	2.700.000	50	100,00	DKPP		
	3	27	06	2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	%	100	2.000.000			100	2.000.000	100	1,00	2.000.000	100,00	100,00	50	2.000.000	50	100,00	DKPP		
	3	27	06	2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	%	100	700.000			100	700.000	100	1,00	700.000	100,00	100,00	50	700.000	50	100,00	DKPP		
226	3	27	07		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Peningkatan Kemampuan KelembagaanKelas Kelompok Tani	kelompok	38	1.158.684.048	38	914.713.423	38	2.928.604.464	38	1,00	-	100,00	-	38	914.713.423	100	78,94	DKPP		
	3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Capaian Kinerja PengelolaanPenyuluhan danKelembagaan Pertanian	%	100	1.158.684.048	100	914.713.423	100	2.928.604.464	100	1,00	2576976418	100,00		100	#VALUE!	100		DKPP		
286	3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Ton	837	529.950.240	850,73	203.016.460	829	348.584.370	841,37	1,01	347.242.870	101,49	99,62	846,05	550.259.330	101,081243	103,83	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	3	25	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	Persen	50	5.000.000	0	-	50	1.000.000	50	1,00	1.000.000	100,00	100,00	25	1.000.000	50	20,00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	3	25	03	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	5	105.000.000	0	79.554.800	5	167.609.250		9,19	1,84	167.466.750	183,80	99,91	4,595	247.021.550	91,9	235,26	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Capaian Kinerja Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persen	100		100		0		0					50		50		Dinas Kelautan dan Perikanan		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	25	03	2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Persen	100	209.975.120	0	123.461.660	100	179.975.120	100	1,00	178.776.120	100,00	99,33	50	302.237.780	50	143,94	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Capaian Kinerja Pengelolaan TPI	Persen	100	209.975.120	100		0		0					50		50	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	13.046,00	2.133.888.880	12.853,28	724.445.610	12.805,00	1.252.350.032	13.482,00	1,05	1.242.052.914	105,29	99,18	13167,6385	1.966.498.524	100,932382	92,16	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3	25	04	2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan rekomendasi usaha perikanan	Rekomendasi	1	20.050.000	0	-	1	2.050.000	1	1,00	2.050.000	100,00	100,00	0,5	2.050.000	50	10,22	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidayaan ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	Pembudidayaan	140	781.231.880	0	281.013.500	140	1.145.110.500	160	1,14	1.139.137.650	114,29	99,48	80	1.420.151.150	57,1428571	181,78	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Capaian Kinerja Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan	Persen	100		100				0					50		50		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	Persen	5	1.332.607.000		443.432.110	5	105.189.532	4.998	1,00	100.865.264	99,96	95,89	2.499	544.297.374	49,98	40,84	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran peraturan	Persen	5	79.900.000	0	-	5	271.816.343	5	1,00	271.816.343	100,00	100,00	2,5	271.816.343	50	340,20	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3	25	05	2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah pelanggaran peraturan	Persen	5	79.900.000	0	-	5	271.816.343	5	1,00	271.816.343	100,00	100,00	2,5	271.816.343	50	340,20	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase produksi perikanan yang diolah	Persen	5	306.950.000	0	406.335.800	2	1.018.347.673	2,26	1,13	1.006.749.616	112,83	98,86	1,128250544	1.413.085.416	22,57	460,36	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Cakupan produksi perikanan tangkap	Ton			12801				0					6400,5				Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3	25	06	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	unit	2	5.050.000	0	-	2	28.081.016	2	1,00	27.159.416	100,00	96,72	1	27.159.416	50	537,81	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3	25	06	2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaku usaha yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Unit	5	145.000.000		185.339.800	5	989.316.657	5	1,00	978.640.200	100,00	98,92	2,5	1.163.980.000	50	802,74	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembinaan Mutu danKeamanan Produk Perikanan	Persen	0		100				0					50				Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3	25	06	2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Nelayan dan Pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan	Orang	10	156.900.000		220.996.000	10	950.000	0	-	950.000	-	100,00	0	221.946.000	0	141,46	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	5.222.459.236	0	-	84	4.066.220.195	84	1,00	3.797.744.015	100,00	93,40	42	3.797.744.015	50	72,72	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3	25	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	105.145.709			100	25.666.000	100	1,00	25.627.250	100,00	99,85	50	25.627.250	50	24,37	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3	25	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	2.508.116.555			100	2.801.272.981	100	1,00	2.551.212.199	100,00	91,07	50	2.551.212.199	50	101,72	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3	25	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	12.000.000			100	4.000.000	100	1,00	4.000.000	100,00	100,00	50	4.000.000	50	33,33	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3	25	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	475.255.412			100	257.829.088	100	1,00	250.592.451	100,00	97,19	50	250.592.451	50	52,73	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3	25	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja penyediaan pengadaan barang milik daerah	Persen	100	139.675.140			100	176.035.000	100	1,00	171.298.731	100,00	97,31	50	171.298.731	50	122,64	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12		13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3	25	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	1.164.969.187			100	355.596.820	100	1,00	353.641.234	100,00	99,45	50	353.641.234	50	30,36	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	3	25	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	817.297.233			100	445.820.306	100	1,00	441.372.150	100,00	99,00	50	441.372.150	50	54,00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	2	02	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Desa Wisata	persen	90	199.326.500	100	194.986.500	33,33	980.000.000	33,33	1,00	977.419.850	100,00	99,74	66,665	1.172.406.350	74,0722222	588,18	Diapar		
	2	02	08	2.08	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata	persen	100	199.326.500	100	194.986.500	100	980.000.000	99,74	1,00	977.419.850	99,74	99,74	99,87	1.172.406.350	99,87	588,18	Diapar		
	3	26	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	7.933.399.358	84	7.551.856.531	80	9.341.869.345	80	1,00	8.553.503.846	100,00	91,56	82	16.105.360.377	98,7951807	203,01	Diapar		
	3	26	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	105.129.242	100	105.020.858	100	53.593.032	100	1,00	53.592.780	100,00	100,00	100	158.613.638	100	150,87	Diapar		
	3	26	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	persen	100	6.309.791.878	100	6.011.462.667	100	6.899.931.724	100	1,00	6.282.694.147	100,00	91,05	100	12.294.156.814	100	194,84	Diapar		
	3	26	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	0	-	-	-	100	25.983.266	100	1,00	25.983.140	100,00	100,00	50	#VALUE!			Diapar		
	3	26	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	916.665.077	100	890.463.900	100	1.086.095.100	100	1,00	962.493.148	100,00	88,62	100	1.852.957.048	100	202,14	Diapar		
	3	26	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	0	-	-	-	100	493.685.000	100	1,00	479.216.300	100,00	97,07	50	#VALUE!			Diapar		
	3	26	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	209.524.040	100	203.920.062	100	254.872.112	100	1,00	250.203.771	100,00	98,17	100	454.123.833	100	216,74	Diapar		
	3	26	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	392.289.121	100	340.989.044	100	527.709.111	100	1,00	499.320.560	100,00	94,62	100	840.309.604	100	214,21	Diapar		
	3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	persen	90	6.268.544.220	0	6.086.966.363	2,71	20.724.850.391	2,71	1,00	6.427.624.465	100,00	31,01	1,355	12.514.590.828	1,51	199,64	Diapar		
	3	26	02	2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	persen	100	2.467.214.530	100	2.383.347.741	28,57	2.226.191.108	28,57		2.173.363.184		97,63		4.556.710.925		184,69	Diapar		
	3	26	02	2.02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata	persen	0	-	-	-	4,35	3.035.325.493	4,35		2.987.293.146		98,42		#VALUE!			Diapar		
	3	26	02	2.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	persen	100	3.771.329.690	100	3.673.618.622	26	14.542.465.470	0	-	347.361.141	-	2,39	50	4.020.979.763	50,00	106,62	Diapar		
	3	26	02	2.04	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Jumlah Perizinan Ijin Usaha Pariwisata	persen	100	30.000.000	100	30.000.000	7,41	920.868.320	0		919.606.994		99,86	50	949.606.994	50,00	3165,36	Diapar		
	3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	persen	90	1.244.561.860	0	1.237.714.998	2	1.970.365.380	2	1,00	1.929.664.298	100,00	97,93	1	3.167.379.296	1,11111111	254,50	Diapar		
	3	26	03	2.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	persen	100	1.244.561.860	100	1.237.714.998	2	1.970.365.380	2	1,00	1.929.664.298	100,00	97,93	51	3.167.379.296	51	254,50	Diapar		
	3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	CBT	3	1.099.778.940	0	1.045.188.024	2	1.331.744.782	2	1,00	1.331.646.800	100,00	99,99	1	2.376.834.824	33,3333333	216,12	Diapar		
	3	26	05	2.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	persen	100	1.099.778.940	100	1.045.188.024	100	1.331.744.782	112	1,12	1.331.646.800	112,00	99,99	106	2.376.834.824	106	216,12	Diapar		
	2	18	01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai AKIP	Angka	85	12.523.604.256	84,99	6.028.936.440	85	6.387.636.812	86,1	1,01	5.660.354.889	101,29	88,61	85,545	11.689.291.329	100,641176	93,34	DPMD/PTSP Kab Bantul		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	18	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Persen	100	152.000.000	100	10.475.000		10.500.000	100		10.452.500		99,55	100	20.927.500	100	13,77	DPMPTSP Kab Bantul	
	2	18	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Persen	100	5.098.435.128	100	4.153.561.989		4.727.555.858	100		4.037.271.016		85,40	100	8.190.833.005	100	160,65	DPMPTSP Kab Bantul	
	2	18	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	475.200.000	100	14.350.000	100	29.800.000	100	1,00	29.050.000	100,00	97,48	100	43.400.000	100	9,13	DPMPTSP Kab Bantul	
	2	18	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	3.425.400.200	100	950.787.960	100	661.941.200	100	1,00	637.343.381	100,00	96,28	100	1.588.131.341	100	46,36	DPMPTSP Kab Bantul	
	2	18	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	668.603.798	100	400.920.558		369.657.600	100		362.420.214		98,04	100	763.340.772	100	114,17	DPMPTSP Kab Bantul	
	2	18	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	2.503.965.130	100	402.790.933		510.057.154	100		505.717.778		99,15	100	908.508.711	100	36,28	DPMPTSP Kab Bantul	
	2	18	01	13	Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Persen	100	200.000.000	100	96.050.000	100	78.125.000	100	1,00	78.100.000	100,00	99,97	100	174.150.000	100	87,08	DPMPTSP Kab Bantul	
	2	18	02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	100	236.500.000	100	276.566.000	100	321.130.000	100	1,00	317.910.800	100,00	99,00	100	594.476.800	100	251,36	DPMPTSP Kab Bantul	
	2	18	02	2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang/Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Dokumen	1	128.500.000	-	221.200.000	100	221.200.000	99,64	1,00	220.412.500	99,64	99,64	50	441.612.500	4982	343,67	DPMPTSP Kab Bantul	
	2	18	02	2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Peta Potensi	2	108.000.000		55.366.000	2	99.930.000	0	-	97.498.300	-	97,57	0	152.864.300	0	141,54	DPMPTSP Kab Bantul	
	2	18	03		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	Persen	17,79	473.038.000	12	153.432.500	8,3	152.010.000	7,07	0,85	134.935.000	85,18	88,77	9,535	288.367.500	53,5975267	60,96	DPMPTSP Kab Bantul	
	2	18	03	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	Persen	100	473.038.000	4 dokumen	153.432.500	100	152.010.000	100	1,00	134.935.000	100,00	88,77		288.367.500		60,96	DPMPTSP Kab Bantul	
	2	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	100	430.237.000	100	247.287.516	100	422.704.600	100	1,00	382.074.930	100,00	90,39	100	629.362.446	100	146,28	DPMPTSP Kab Bantul	
	2	18	05	2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	Perusahaan	10	430.237.000	4	247.287.516	8	422.704.600	57	7,13	382.074.930	712,50	90,39	30,5	629.362.446	305	146,28	DPMPTSP Kab Bantul	
	2	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	84	11.705.987.817	82	8.003.789.542	80	9.690.179.632	82	1,03	8.718.017.601	102,50	89,97	82	16.721.807.143	97,6190476	142,85	Dianakertrans	
	2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	80.360.449		65.285.161	85	61.331.940	97	1,14	61.161.940	114,12	99,72	48,5	126.447.101	48,5	157,35	Dianakertrans	
	2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	8.269.338.057		6.464.517.021	85	7.568.442.891	100	1,18	6.624.432.423	117,65	87,53	50	13.088.949.444	50	158,28	Dianakertrans	
	2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	1.742.835.696		681.622.051	87	1.109.543.157	100	1,15	1.102.597.115	114,94	99,37	50	1.784.219.166	50	102,37	Dianakertrans	
	2	07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian pengadaan barang milik daerah	Persen	100	346.575.000			85	29.075.000	100	1,18	26.100.000	117,65	89,77	50	26.100.000	50	7,53	Dianakertrans	
	2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Persen	100	483.543.592		319.198.709	86	376.401.192	100	1,16	362.139.423	116,28	96,21	50	681.338.132	50	140,91	Dianakertrans	
	2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengadaan barang milik daerah	Persen	100	783.335.023		473.166.600	83	545.385.452	100	1,20	541.586.700	120,48	99,30	50	1.014.753.300	50	129,54	Dianakertrans	
	2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	22,5	1.464.100.000	0	714.088.060	18,5	2.503.440.410	19	1,03	2.483.668.310	102,70	99,21	9,5	3.197.756.370	42,22	218,41	Dianakertrans	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Persen	85	399.300.000		293.388.455	80	1.880.324.410	80	1,00	1.864.367.750	100,00	99,15	40	2.157.756.205	47,06	540,38	Dianakertrans	
	2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	Persen	51,5	465.850.000		150.478.400	47,5	319.108.000	47,5	1,00	315.794.350	100,00	98,96	23,75	466.272.750	46,12	100,09	Dianakertrans	
	2	07	03	2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Persen	73	66.550.000			73	30.000.000	73	1,00	30.000.000	100,00	100,00	36,5	30.000.000	50,00	45,08	Dianakertrans	
	2	07	03	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	30	532.400.000		270.221.205	30	274.008.000	30	1,00	273.506.210	100,00	99,82	15	543.727.415	50,00	102,13	Dianakertrans	
	2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	Persen	62	8.845.471.000	0	21.158.295.305	54	37.759.909.622	56	1,04	36.973.092.956	103,70	97,92	28	58.131.388.261	45,1612903	657,19	Dianakertrans	
	2	07	04	2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/kota	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	orang	3750	8.372.332.105		20.828.450.305	3200	37.420.978.090	3393	1,06	36.644.330.516	106,03	97,92	1696,5	57.472.780.821	45,24	686,46	Dianakertrans	
	2	07	04	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja	orang	5500	408.446.614		324.632.500	4000	291.749.032	4000	1,00	289.675.340	100,00	99,29	2000	614.307.840	36,3636364	150,40	Dianakertrans	
	2	07	04	2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Persen	55	64.692.281		5.212.500	50	47.182.500	50	1,00	39.087.100	100,00	82,84	25	44.299.600	45,4545455	68,48	Dianakertrans	
	2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	39	975.000.001	0	360.436.116	35	465.252.160	37	1,06	464.014.060	105,71	99,73	18,5	824.450.176	47,4358974	84,56	Dianakertrans	
	2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	Persen	58	386.058.282		207.492.616	50	115.637.500	50	1,00	115.367.500	100,00	99,77	25	322.860.116	43,1034483	83,63	Dianakertrans	
	2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Persen	23	588.941.719		152.943.500	20	349.614.660	20	1,00	348.646.560	100,00	99,72	10	501.590.060	43,4782609	85,17	Dianakertrans	
					UPTD BLK												0		-				Dianakertrans	
	2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	22,5	1.885.900.000		1.360.743.401	18,5	1.757.882.410	18,5	1,00	1.741.939.030	100,00	99,09	9,25	3.102.682.431	41,1111111	164,52	Dianakertrans	
	2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Persen	85	1.885.900.000		1.360.743.401	83	1.757.882.410	80	0,96	1.741.939.030	96,39	99,09	40	3.102.682.431	47,0588235	164,52	Dianakertrans	
	2	10	11		PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase ketersediaan bidang tanah kahurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	Persen	100	3.500.000.000	0	-	100	526.250.000	100	1,00	521.903.650	100,00	99,17	50	521.903.650	50	14,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kahurahan	
	2	10	11	2.01	Pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Capaian Kinerja Perencanaan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	%	100	3.500.000.000			100	526.250.000	100	1,00	521.903.650	100,00	99,17	50	521.903.650	50	14,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kahurahan	
	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	5.296.516.037	0	-	83	6.282.890.346	80	0,96	5.281.931.032	96,39	84,07	40	5.281.931.032	48,1927711	99,72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kahurahan	
	2	13	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	236.309.473			83	68.347.032	100	1,20	68.321.780	120,48	99,96	50	68.321.780	50	28,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kahurahan	
	2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	95	17.497.290			100	4.635.573.819	100	1,00	3.647.159.506	100,00	78,68	50	3.647.159.506	52,6315789	20.844,14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kahurahan	
	2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	89	1.739.705.435			85	648.665.525	85	1,00	639.824.857	100,00	98,64	42,5	639.824.857	47,752809	36,78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kahurahan	
	2	13	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	94	1.676.421.820			90	26.074.880	90	1,00	25.971.250	100,00	99,60	45	25.971.250	47,8723404	1,55	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kahurahan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	13	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	371.582.020			100	293.804.560	100	1,00	293.166.788	100,00	99,78	50	293.166.788	50	78,90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalahuran	
	2	13	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	94	1.255.000.000			90	610.424.530	90	1,00	607.486.851	100,00	99,52	45	607.486.851	47,8723404	48,41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalahuran	
	2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA	cakupan Pelaksanaan Penataan Desa	Persen	100	700.000.000	0	-	75	15.115.000	100	1,33	15.115.000	133,33	100,00	50	15.115.000	50	2,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalahuran	
	2	13	02	2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kalahuran yang menyelenggara kan Penataan Desa	Kalahuran	75	700.000.000			75	15.115.000	75	1,00	15.115.000	100,00	100,00	37,5	15.115.000	50	2,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalahuran	
	2	13	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pendampingan Kerjasama Desa	Persen	100	200.000.000	0	-	100	22.451.000	100	1,00	22.201.000	100,00	98,89	50	22.201.000	50	11,10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalahuran	
	2	13	03	2.01	Facilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa	Persen	100	200.000.000			75	22.451.000	75	1,00	22.201.000	100,00	98,89	37,5	22.201.000	37,5	11,10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalahuran	
	2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalahuran yang Baik	Persen	100	20.374.141.135	0	-	100	4.875.570.046	100	1,00	4.834.081.350	100,00	99,15	50	4.834.081.350	50	23,73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalahuran	
	2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalahuran yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100	20.374.141.135			80	4.875.570.046	80	1,00	4.834.081.350	100,00	99,15	40	4.834.081.350	40	23,73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalahuran	
	2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalahuran	Persen	100	5.168.197.409	0	-	100	2.537.571.472	100	1,00	2.536.626.306	100,00	99,96	50	2.536.626.306	50	49,08	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalahuran	
	2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Terlibat didalam Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	5.168.197.409			80	2.537.571.472	0	-	2.536.626.306	-	99,96	0	2.536.626.306	0	49,08	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalahuran	
	4	01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentasi Kalahuran yang Melaksanakan Urusan Kelembagaan	Persen	66,7	6.258.352.500	0	-	100	1.176.354.500	100	1,00	1.107.520.500	100,00	94,15	50	1.107.520.500	74,96	17,70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalahuran	
	4	01	04	2.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kalahuran yang melaksanakan urusan kelembagaan	kal	75	6.258.352.500			100	1.176.354.500	100	1,00	1.107.520.500	100,00	94,15	50	1.107.520.500	66,67	17,70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalahuran	
	2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang berizin	Persen	70	736.976.000	80	197.582.556	50	873.564.832	46,7	0,93	852.332.846	93,40	97,57	63,35	1.049.915.402	90,5	142,46	DKUKMPP	
	2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Prodatsan, Komitran, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan	Usaha mikro yang diberdayakan	Unit	296	736.976.000	100	197.582.556	296	873.564.832	320	1,08	852.332.846	108,11	97,57	210	1.049.915.402	70,95	142,46	DKUKMPP	
	2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	80	420.988.000	40	233.924.764	60	728.773.632	60	1,00	721.477.846	100,00	99,00	50	955.402.610	62,50	226,94	DKUKMPP	
	2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Unit Usaha	180	420.988.000	100	233.924.764	180	728.773.632	205	1,14	721.477.846	113,89	99,00	152,5	955.402.610	84,72	226,94	DKUKMPP	
	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemasaran pada Desa Preneur	Persen	17,33	2.537.000.000	0	-	8	773.115.000	7,69	0,96	670.461.000	96,15	86,72	3,85	670.461.000	22,19	26,43	DKUKMPP	
						CapaianRintisan Desa Prentur	Persen	10,67				10,67		10,67	1,00		99,97		5,33		49,98		DKUKMPP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2	22	08	2.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Pasar Rakyat Bercajar Budaya yang direvitalisasi	Persen	80	2.200.000.000		-	16	400.000.000	17	1,06	300.921.000	106,25	75,23	8,5	300.921.000	10,625	13,68	DKUKMPP				
	2	22	08	2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pendampingan Desa/Kalurahan Preatur	Kalurahan		337.000.000		-	7	373.115.000	8	1,14	369.540.000	114,29	99,04	4	369.540.000		109,66	DKUKMPP				
	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPK	%	100	2.773.672.217	0	1.672.596.248	85,97	5.142.964.674	85,97	1,00	4.662.521.337	100,00	90,66	42,985	6.335.117.585	42,985	228,40	DKUKMPP				
	3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	2	2.773.672.217	100	1.672.596.248	2	5.142.964.674	2	1,00	4.662.521.337	100,00	90,66	51	6.335.117.585	2550	228,40	DKUKMPP				
	3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah lain Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	%	100	57.000.000	100	40.227.500	100	279.236.016	100	1,00	277.704.048	100,00	99,45	100	317.931.548	100	557,77	DKUKMPP				
	3	31	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin IUI yang Diterbitkan	Izin	10	57.000.000	100	40.227.500	10	279.236.016	1	0,10	277.704.048	10,00	99,45	50,5	317.931.548	505	557,77	DKUKMPP				
JUMLAH ANGGARAN UNTUK SASARAN 6:								100	150.974.042.989	562	91.816.329.936	590	166.276.058.664	607	1,03	138.579.536.848	102,77	83,34	585	230.395.866.784	585	153		-			
Sasaran 7:					Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik																						
	1	03	10		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	77,47	198.739.656.658	75,66	75.279.884.233	75,83	61.989.618.993	75,66	1,00	49.466.387.056	99,78	79,80	75,66	124.746.271.289	97,7	62,8	DPUPKP				
	1	03	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	km	498,83	198.739.656.658		75.279.884.233	473,53	61.989.618.993	472,47	1,00	49.466.387.056	99,78	79,80	236,235	124.746.271.289	47,4	62,8	DPUPKP				
						Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	%			100				0					50				DPUPKP				
	1	03	07		Program Pengembangan Permukiman	Tingkat kemandahan infrastruktur permukiman (jalan desa)	Persen	82,67	114.060.198.983	0	13.418.193.259	81,84	25.561.781.329	82,51	1,01	21.357.759.816	100,82	83,55	41,255	34.775.953.075	49,9	30,5	DPUPKP				
	1	03	07	2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan stragetis daerah	Persen	464,19	114.060.198.983		13.418.193.259	0	25.561.781.329	104		21.357.759.816		83,55	52	34.775.953.075	11,2	30,5	DPUPKP				
	1	03	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai AKIP	Angka	84	67.316.416.069	0	3.668.309.003	83	18.844.284.729	85,56	1,03	17.087.717.640	103,08	90,68	42,78	20.756.026.643	50,9	30,8	DPUPKP				
	1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	2.406.144.202	100	686.509.840	100	808.004.803	100	1,00	755.374.930	100,00	93,49	100	1.441.884.770	100,0	59,9	DPUPKP				
	1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja keuangan	Persen		37.933.380.049		100	11.679.103.460	100	10.543.501.379	100	1,00	10.543.501.379	100,00	90,28	50	10.543.501.379		27,79	DPUPKP			
	1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi perkantoran	Jenis	7	4.839.090.000	100	919.178.298	7	1.737.887.934	7	1,00	1.533.754.054	100,00	88,25	53,5	2.452.932.352	764,29	50,69	DPUPKP				
	1	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan sarana prasarana perkantoran	Jenis	2	9.540.141.433			2	2.427.700.000	2	1,00	2.187.484.700	100,00	90,11	1	2.187.484.700	50	22,93	DPUPKP				
	1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang perkantoran	Jenis	8	5.022.060.100		815.225.900	3	865.201.988	3	1,00	809.621.246	100,00	93,58	1,5	1.624.847.146	18,75	32,35	DPUPKP				
	1	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Jenis	4	7.575.600.285		1.247.394.965	4	1.326.386.544	4	1,00	1.257.981.331	100,00	94,84	2	2.505.376.296	50	33,07	DPUPKP				
	1	03	08		Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Persen	50	190.972.237.491	85	9.911.557.360	10	14.619.685.668	10	1,00	13.781.107.398	100,00	94,26	47,5	23.692.664.758	95	12,41	DPUPKP				
	1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB	%	100	190.972.237.491	100	9.911.557.360	100	14.619.685.668	100	1,00	13.781.107.398	100,00	94,26	100	23.692.664.758	100	12,41	DPUPKP				
	1	03	11		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	74,84	4.721.245.470	80	633.266.580	74,84	806.319.164	0	-	682.818.648	-	84,68	40	1.316.085.228	53,45	27,88	DPUPKP				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	03	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	orang	150	1.734.642.102	100	437.993.620	90	291.234.916	90	1,00	223.272.916	100,00	76,66	95	661.266.536	63,33	38,12	DPUPKP	
	1	03	11	2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Data dan informasi data konstruksi	Jenis	6	924.401.800	1	195.272.960	6	297.704.248	6	1,00	244.307.432	100,00	82,06	3,5	439.580.392	58,33	47,55	DPUPKP	
	1	03	11	2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	proyek	0	2.062.201.568			0	217.380.000	0		215.238.300		99,01	0	215.238.300		10,44	DPUPKP	
	1	03	03		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Persen	100	38.799.095.108	100	9.785.308.240	100	9.337.513.032	100	1,00	8.725.318.382	100,00	93,44	100	18.510.626.622	100	47,71	DPUPKP	
	1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Persen	100	38.799.095.108	100	9.785.308.240	100	9.337.513.032	100	1,00	8.725.318.382	100,00	93,44	100	18.510.626.622	100	47,71	DPUPKP	
	1	03	04		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	Persen	100	4.124.650.000	0	-	22,67	771.899.850	22,67	1,00	628.767.000	100,00	81,46	11,335	628.767.000	11,335	15,24	DPUPKP	
	1	03	04	2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyediaan infrastruktur persampahan	unit		4.124.650.000		17	771.899.850	17	1,00	628.767.000	100,00	81,46	8,5	628.767.000		15,24	DPUPKP		
	1	03	05		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	100	26.836.236.222	100	5.144.623.000	87,86	9.122.014.644	87,86	1,00	8.753.676.692	100,00	95,96	93,93	13.898.299.692	93,93	51,79	DPUPKP	
	1	03	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen		26.836.236.222		5.144.623.000	100	9.122.014.644	100	1,00	8.753.676.692	100,00	95,96	50	13.898.299.692		51,79	DPUPKP	
	1	03	06		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan pengembangan sistem drainase lingkungan	Persen	100	24.156.174.808	100	3.137.190.000	3,97	4.619.167.631	3,97	1,00	3.741.914.800	100,00	81,01	51,985	6.879.104.800	51,985	28,48	DPUPKP	
	1	03	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang drainase lingkungan tertangani	m		24.156.174.808		3.137.190.000	1748	4.619.167.631	1748	1,00	3.741.914.800	100,00	81,01	874	6.879.104.800		28,48	DPUPKP	
	1	03	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Persen	0	66.804.060.787	0	18.822.614.545	82,4	17.639.466.273	81,87	0,99	12.535.478.684	99,36	71,06	40,935	31.358.093.229		46,94	DPUPKP	
						Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Persen				30		48,38	1,61		161,27		24,19				DPUPKP		
	1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Ha		34.853.239.508		6.875.493.800	300	7.012.429.657	353,69	1,18	4.746.280.700	117,90	67,68	176,845	11.621.774.500		33,34	DPUPKP	
	1	03	02	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Persen		31.950.821.279		11.947.120.745	82	10.627.036.616	82,08	1,00	7.789.197.984	100,10	73,30	41,04	19.736.318.729		61,77	DPUPKP	
	1	04	02		Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	20.190.863.429	48	2.305.914.035	100	3.902.370.374	100	1,00	3.169.696.086	100,00	81,22	74	5.475.610.121	74	27,12	DPUPKP	
	1	04	02	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Capaian kinerja pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	Persen		393.426.442			100	328.300.000	100	1,00	190.723.000	100,00	58,09	50	190.723.000		48,48	DPUPKP	
	1	04	02	2.02	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Capaian kinerja pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Persen		17.597.245.907		2.186.513.135	100	3.221.098.342	100	1,00	2.678.194.254	100,00	83,15	50	4.864.707.389		27,64	DPUPKP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	04	02	2.06	Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Capaian kinerja penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Persen	12	2.200.191.080		119.400.900	100	352.972.032	100	1,00	300.778.832	100,00	85,21	50	420.179.732	416,67	19,10	DPUPKP	
	1	04	03		Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	52,95	26.706.085.054	0	-	10,59	9.196.818.458	7,6	0,72	8.990.795.750	71,77	97,76	3,8	8.990.795.750	7,18	33,67	DPUPKP	
	1	04	03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Capaian Kinerja Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persen		26.706.085.054		-	100	929.610.000	100	1,00	906.269.250	100,00	97,49	50	906.269.250		3,39	DPUPKP	
	1	04	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Capaian kinerja peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha	Persen	3				100	8.267.208.458	100	1,00	8.084.526.500	100,00	97,79	50	8.084.526.500	1666,67		DPUPKP	
	1	04	04		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni	Persen	100	10.084.832.515	0	-	99,18	340.000.000	99,25	1,00	340.000.000	100,07	100,00	49,625	340.000.000	49,625	3,37	DPUPKP	
	1	04	04	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persen		10.084.832.515			100	340.000.000	100	1,00	340.000.000	100,00	100,00	50	340.000.000		3,37	DPUPKP	
	1	04	05		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persen	100	1.699.130.100	0	-	100	189.825.000	100	1,00	181.765.000	100,00	95,75	50	181.765.000	50	10,70	DPUPKP	
	1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Capaian kinerja penyelenggaraan PSU Perumahan	Persen		1.699.130.100			100	189.825.000	100	1,00	181.765.000	100,00	95,75	50	181.765.000		10,70	DPUPKP	
	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	81,5	7.967.301.353	85	6.777.947.157	80,5	8.058.320.847	80,5	1,00	7.293.638.746	100,00	90,51	82,75	14.071.585.903	101,53	176,62	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	75.400.000	100	81.399.000	100	52.080.000	100	1,00	51.942.500	100,00	99,74	100	133.341.500	100	176,85	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	6.693.639.353	100	5.414.933.036	100	6.179.780.144	100	1,00	5.435.524.630	100,00	87,96	100	10.850.457.666	100	162,10	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persen	100	11.000.000	100	174.750.000	100	117.575.000	100	1,00	117.575.000	100,00	100,00	100	292.325.000	100	2.657,50	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	129.402.000	100	109.629.500	100	430.222.813	100	1,00	423.869.736	100,00	98,52	100	533.499.236	100	412,28	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	749.620.200	100	493.161.094	100	786.991.700	100	1,00	774.513.164	100,00	98,41	100	1.267.674.258	100	169,11	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Persen	100	308.239.800	100	504.074.527	100	491.671.190	100	1,00	490.213.716	100,00	99,70	100	994.288.243	100	322,57	Dinas Perhubungan	
	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	30,43	14.128.890.000	0	17.635.525.350	30,43	20.143.450.722	30,43	1,00	19.975.931.628	100,00	99,17	15,215	37.611.456.978	50	266,20	Dinas Perhubungan	
						Kinerja lalu lintas Kabupaten	Angka	0,3		0		0,3		0,3	1,00		100,00		0,15		50		Dinas Perhubungan	
	2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	Persen	31,02	9.382.939.250	44	12.661.813.200	13,92	15.501.135.000	13,92	1,00	15.394.359.600	100,00	99,31	28,96	28.056.172.800	93,36	299,01	Dinas Perhubungan	
	2	15	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	Persen	50	286.000.000	81,25	368.585.800	40	942.480.000	40	1,00	934.859.131	100,00	99,19	60,625	1.303.444.931	121,25	455,75	Dinas Perhubungan	
	2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Persen	8,5	1.389.870.130	87,5	2.660.598.950	6,5	917.827.597	6,5	1,00	911.361.775	100,00	99,30	47	3.571.960.725	552,94	257,00	Dinas Perhubungan	
	2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Persen	62,74	2.672.134.300	16	1.430.994.900	47,61	2.195.285.000	47,61	1,00	2.152.404.122	100,00	98,05	31,805	3.583.399.022	50,69	134,10	Dinas Perhubungan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi	Persen	20	153.878.880	81,25	152.327.500	20	47.580.000	20	1,00	47.580.000	100,00	100,00	50,625	199.907.500	253,125	129,91	Dinas Perhubungan	
	2	15	02	2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek	Angka	25	196.044.960	81,25	264.405.000	25	529.143.125	25	1,00	525.369.500	100,00	99,29	53,125	789.774.500	212,5	402,85	Dinas Perhubungan	
	2	15	02	2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek	Angka	0,28	48.022.480		96.800.000	0,28	10.000.000	0,28	1,00	9.997.500	100,00	99,98	0,14	106.797.500	50	222,39	Dinas Perhubungan	
	1	03	12		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	persen	70,4	7.182.829.950	100	151.486.460	70	1.641.348.889	70	1,00	1.587.403.614	100,00	96,71	85	1.738.890.074	120,74	24,21	Diapertaru	
	1	03	12	2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota	Capaian kinerja Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota	persen	100	3.522.659.000	100	72.158.000	100	846.413.250	100	1,00	804.141.850	100,00	95,01	100	876.299.850	100	24,88	Diapertaru	
	1	03	12	2.02	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	capaian kinerja Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	persen	100	785.000.000		-	100	94.698.875	100	1,00	94.648.750	100,00	99,95	50	94.648.750	50	12,06	Diapertaru	
	1	03	12	2.04	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota	Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota	persen	100	2.875.170.950	100	79.328.460	100	700.236.764	100	1,00	688.613.014	100,00	98,34	100	767.941.474	100	26,71	Diapertaru	
	1	03	13		Program Penyelenggaraan Sistemewisan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	persen	90	1.600.000.000	100	245.431.500	90	308.551.500	90	1,00	308.551.500	100,00	100,00	95	553.983.000	105,55556	34,62	Diapertaru	
	1	03	13	2.01	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian kinerja Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	2	1.600.000.000	100	245.431.500	1	308.551.500	1	1,00	308.551.500	100,00	100,00	50,5	553.983.000	2525	34,62	Diapertaru	
	2	10	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	86	32.633.335.030	100	5.366.365.301	82	6.109.708.086	82	1,00	5.588.501.179	100,00	91,47	91	10.954.866.480	105,81	33,57	Diapertaru	
	2	10	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	90.900.000		-	100	7.600.000	100	1,00	7.600.000	100,00	100,00	50	7.600.000	50	8,36	Diapertaru	
	2	10	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah	persen	100	26.528.056.800	100	4.604.441.898	100	5.328.384.575	100	1,00	4.923.750.527	100,00	92,41	100	9.528.192.425	100	35,92	Diapertaru	
	2	10	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	159.923.120		-	100	30.464.416	100	1,00	30.464.416	100,00	100,00	50	30.464.416	50	19,05	Diapertaru	
	2	10	01	2.06	Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	1.615.090.785	100	205.704.450	100	337.035.976	100	1,00	231.373.990	100,00	68,65	100	437.078.440	100	27,06	Diapertaru	
	2	10	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	2.242.644.400	100	127.878.700	100	40.600.000	100	1,00	39.741.600	100,00	97,89	100	167.620.300	100	7,47	Diapertaru	
	2	10	01	2.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	1.055.293.600	100	189.461.870	100	163.786.496	100	1,00	155.411.696	100,00	94,89	100	344.873.566	100	32,68	Diapertaru	
	2	10	01	2.09	Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	941.426.325	100	238.878.383	100	201.836.623	100	1,00	200.158.950	100,00	99,17	100	439.037.333	100	46,64	Diapertaru	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2	10	04		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen	100	60.000.000	0	-	100	313.500.000	100	1,00	313.480.000	100,00	99,99	50	313.480.000	50	522,47	Dispartu				
	2	10	04	2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	60.000.000	-	-	100	313.500.000	100	1,00	313.480.000	100,00	99,99	50	313.480.000	50	522,47	Dispartu				
	2	10	10		Program Penatgunaan Tanah	Legalitas penatgunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	persen	90	35.986.090.620	65	371.736.210	90	473.786.916	90	1,00	274.122.890	100,00	57,86	77,5	645.859.100	86,11	1,79	Dispartu				
	2	10	10	2.01	Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota	Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	35.986.090.620	65	371.736.210	100	473.786.916	100	1,00	274.122.890	100,00	57,86	82,5	645.859.100	82,5	1,79	Dispartu				
	2	10	11		Program Penyelenggaraan Ketistimewaan yogyakarta Urusan Pertanahan	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	persen	64,89	41.950.133.500	95	3.036.582.195	33,03	5.241.633.000	33,03	1,00	3.951.452.100	100,00	75,39	64,015	6.988.034.295	98,65	16,66	Dispartu				
	2	10	11	2.01	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	capaian kinerja kegiatan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	persen	90	41.950.133.500	95	3.036.582.195	90	5.241.633.000	90	1,00	3.951.452.100	100,00	75,39	92,5	6.988.034.295	102,78	16,66	Dispartu				
JUMLAH ANGGARAN UNTUK SASARAN 7:								100	936.719.463.147	52	175.691.934.428	69	219.231.065.105	65	0,95	188.736.284.609	95,01	86,09	58	364.428.219.037	58	39		#REF!			
Sasaran 8:					Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas																			0			
	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai AKIP	Angka	84	73.927.497.574	82,38	12.720.699.989	83	14.174.058.554	83,11	1,00	13.179.155.104	100,13	92,98	82,745	25.899.855.093	98,51	35,03	DLH				
						Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen			100		0		0				50									
						Capaian Nilai Kinerja	Angka			95		0		0				47,5									
	2	11	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	86.800.000	100	12.552.500	100	10.712.500	100	1,00	10.712.500	100,00	100,00	100	23.265.000	100	26,80	DLH				
	2	11	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Persen	100	53.717.644.334	100	9.745.598.533	100	10.997.363.596	100	1,00	10.049.206.046	100,00	91,38	100	19.794.804.579	100	36,85	DLH				
	2	11	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		100	2.647.014.898	100	333.394.150	100	507.977.733	100	1,00	507.799.500	100,00	99,96	100	841.193.650	100	31,78	DLH				
	2	11	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	persen	100	304.932.434	100	-	100	60.881.355	100	1,00	60.531.000	100,00	99,42	100	60.531.000	100	19,85	DLH				
	2	11	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	3.598.891.520	100	663.279.479	100	578.590.288	100	1,00	534.198.130	100,00	92,33	100	1.197.477.609	100	33,27	DLH				
	2	11	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	13.572.214.388	100	1.965.875.327	100	2.018.533.082	100	1,00	2.016.707.928	100,00	99,91	100	3.982.583.255	100	29,34	DLH				
	2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	100	1.737.795.740	12,55	170.259.353	14,29	383.287.932	14,29	1,00	380.910.706	100,00	99,38	13,42	551.170.059	13,42	31,72	DLH				
	2	11	02	2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Persen	100	1.737.795.740	86	170.259.353	100	383.287.932	100	1,00	380.910.706	100,00	99,38	93	551.170.059	93	31,72	DLH				
	2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	persen	90	10.410.237.000	66,5	1.036.687.757	70	4.189.538.251	70	1,00	3.683.873.914	100,00	87,93	68,25	4.720.561.671	75,83	45,35	DLH				
	2	11	03	2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	persen	80	8.812.494.760	60	777.960.037	65	4.084.538.251	65	1,00	3.579.618.315	100,00	87,64	62,5	4.357.578.352	78,125	49,45	DLH				
	2	11	03	2.02	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Cakupan Uji Kualitas Lingkungan	Persen	100	1.597.742.240	100	258.727.720	100	105.000.000	100	1,00	104.255.599	100,00	99,29	100	362.983.319	100	22,72	DLH				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	persen	38	13.100.864.560	43,25	3.400.164.378	30	1.666.156.048	64,34	2,14	1.346.956.615	214,47	80,84	53,795	4.747.120.993	141,57	36,24	DLH	
2	11	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH kawasan perkotaan	persen	0	13.100.864.560	43,25	3.400.164.378	14	1.666.156.048	14,81	1,06	1.346.956.615	105,79	80,84	29,03	4.747.120.993		36,24	DLH	
						Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	Persen	100	-	100	-	100	-	100	1,00	-	100,00		100	-	100		DLH	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Kelompok	100	95.175.000	172	14.830.000	31,35	14.675.000	138	4,40	14.675.000	440,19	100,00	155	29.505.000	155	31,00	DLH	
2	11	05	2.01		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cakupan Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	Persen	100	95.175.000	100	14.830.000	100	14.675.000	100	1,00	14.675.000	100,00	100,00	100	29.505.000	100	31,00	DLH	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	persen	34	301.900.000	12,55	17.700.000	16,67	31.900.000	17	1,02	31.765.000	101,98	99,58	14,775	49.465.000	43,4558824	16,38	DLH	
2	11	06	2.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan	persen	100	301.900.000	100	17.700.000	100	31.900.000	100	1,00	31.765.000	100,00	99,58	100	49.465.000	100	16,38	DLH	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	persen	5	574.820.500	172	265.140.000	5	125.720.500	5	1,00	123.900.500	100,00	98,55	88,5	389.040.500	1770	67,68	DLH	
2	11	08	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Pendidikan (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	lembaga	25	574.820.500	20	265.140.000	20	125.720.500	27	1,35	123.900.500	135,00	98,55	23,5	389.040.500	94	67,68	DLH	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional	penghargaan	5	205.310.000	43,25	25.700.000	1	20.185.000	1	1,00	20.157.500	100,00	99,86	22,125	45.857.500	442,5	22,34	DLH	
2	11	09	2.01		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Cakupan penghargaan bidang lingkungan hidup	persen	100	205.310.000	4	25.700.000	100	20.185.000	100	1,00	20.157.500	100,00	99,86	52	45.857.500	52	22,34	DLH	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	persen	100	124.950.000	100	59.975.000	100	193.700.000	100	1,00	193.682.500	100,00	99,99	100	253.657.500	100	203,01	DLH	
2	11	10	2.01		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Aduan		100	124.950.000	100	59.975.000	100	193.700.000	100	1,00	193.682.500	100,00	99,99	100	253.657.500	100,00	203,01	DLH	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	50,07	24.180.204.040	172	1.645.828.279	42,42	8.090.351.564	44	1,04	7.856.485.240	103,72	97,11	108	9.502.313.519	215,70	39,30	DLH	
2	11	11	2.01		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	persen	22,81	24.180.204.040	10	1.645.828.279	26	8.090.351.564	19,83	0,76	7.856.485.240	76,27	97,11	14,915	9.502.313.519	65,39	39,30	DLH	
						Persentase Cakupan Area Pelayanan	persen	45	-	100	-	41,89	-	41,89	1,00	-	100,00		70,945	-	157,66		DLH	
JUMLAH ANGGARAN UNTUK SASARAN 8:								100	124.658.754.414	88	19.356.984.756	39	28.889.572.849	54	1,36	26.831.562.079	136,32	92,88	71	46.188.546.835	71	37	DLH	-
Sasaran 9:				Terwujudnya penurunan risiko bencana																				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Angka	83	38.161.852.000	80,79	5.006.444.157	81	10.208.155.991	80	0,99	9.644.659.548	98,77	94,48	80,395	14.651.103.705	96,8614458	38,39	BPBD	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	05	01	2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	96	232.625.000		53.983.680	95	14.625.000	95	1,00	13.935.000	100,00	95,28	47,5	67.918.680	49,4791667	29,20	BPBD	
						Nilai Evaluasi Kinerja	Angka			85				0		-			42,5	-			BPBD	
	1	05	01	2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	99	467.340.000		3.625.390.147	95	4.545.313.477	94	0,99	4.061.790.016	98,95	89,36	47	7.687.180.163	47,4747475	1.644,88	BPBD	
						Nilai Evaluasi Kinerja	Persen			85				0					42,5				BPBD	
	1	05	01	2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Persen	98	1.178.650.000		103.957.120	95	301.130.001	95	1,00	295.411.700	100,00	98,10	47,5	399.368.820	48,4693878	33,88	BPBD	
						Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen			70				0					35				BPBD	
	1	05	01	2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	97	2.201.320.348		218.583.724	95	285.575.756	94	0,99	282.900.550	98,95	99,06	47	501.484.274	48,4536082	22,78	BPBD	
						Nilai Evaluasi Kinerja	Angka			85				0					42,5				BPBD	
	1	05	01	2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Capaian Kinerja Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	8.192.275.000		-	95	204.475.000	95	1,00	200.550.750	100,00	98,08	47,5	200.550.750	49,4791667	2,45	BPBD	
	1	05	01	2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	97	21.927.910.586		184.715.108	95	3.905.922.432	95	1,00	3.873.475.135	100,00	99,17	47,5	4.058.190.243	48,9690722	18,51	BPBD	
						Nilai Evaluasi Kinerja	Angka			85				0					42,5				BPBD	
	1	05	01	2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	97	3.961.731.066		819.814.378	95	951.114.325	94	0,99	916.596.397	98,95	96,37	47	1.736.410.775	48,4536082	43,83	BPBD	
						Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen			70				0					35				BPBD	
	1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	45	15.308.727.000	0	10.460.660.430	25	2.943.512.670	25	1,00	2.738.568.095	100,00	93,04	12,5	13.199.228.525	27,78	86,22	BPBD	
						Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100		0		100		100	1,00		100,00		50		50		BPBD	
						Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100		0		100		100	1,00		100,00		50		50		BPBD	
						Indeks Pemulihan Pascabencana	Angka	65		0		-		0					0		0		BPBD	
						Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	Sekolah	0		2		0		0					1				BPBD	
	1	05	03	2.01	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen	75	892.000.000		724.724.160	50	828.565.000	50	1,00	802.768.000	100,00	96,89	25	1.527.492.160	33,3333333	171,24	BPBD	
						Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kebencanaan	Persen			88				0					44				BPBD	
	1	05	03	2.02	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	80	11.515.961.000		8.392.789.610	59	1.699.254.000	59	1,00	1.557.203.000	100,00	91,64	29,5	9.949.992.610	36,875	86,40	BPBD	
						Persentase Ketersediaan Logistik Prabencana dan tanggap darurat Bencana	Persen			85				0					42,5				BPBD	
	1	05	03	2.03	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	1.299.800.000		1.330.144.160	100	236.189.170	100	1,00	208.202.595	100,00	88,15	50	1.538.346.755	50	118,35	BPBD	
						Persentase Ketersediaan Logistik Prabencana dan tanggap darurat Bencana	Persen			85				0					42,5				BPBD	
	1	05	03	2.04	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	75	1.600.966.000		13.002.500	90	179.504.500	90	1,00	170.394.500	100,00	94,92	45	183.397.000	60	11,46	BPBD	
						Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kebencanaan	Persen			88				0					44				BPBD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1		2	3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
	1	05	04			100	2.977.530.000		2.201.156.340	100	573.930.000	100	1,00	565.646.919	100,00	98,56	50	2.766.803.259	50	92,92	BPBD	
								86				0					43				BPBD	
	1	05	04	2.01		89	1.818.580.000		2.189.333.840	86	403.930.000	85	0,99	397.531.919	98,84	98,42	42,5	2.586.865.759	47,752809	142,25	BPBD	
								86				0					43				BPBD	
	1	05	04	2.02		75	165.000.000		-	65	25.000.000	50	0,77	23.575.000	76,92	94,30	25	23.575.000	33,333333	14,29	BPBD	
	1	05	04	2.04		90	717.750.000		11.822.500	80	125.000.000	75	0,94	124.910.000	93,75	99,93	37,5	136.732.500	41,6666667	19,05	BPBD	
								86				0					43				BPBD	
	1	05	04	2.05		100	276.200.000		-	100	20.000.000	100	1,00	19.630.000	100,00	98,15	50	19.630.000	50	7,11	BPBD	
JUMLAH ANGGARAN UNTUK SASARAN 9:						100	56.448.109.000	81	17.668.260.927	69	13.725.598.661	68	1,00	12.948.874.562	99,51	94,34	75	30.617.135.489	25	18		-
Sasaran 10:		Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)																			0	
	1	06	01			82	6.233.360.966	96,94	5.918.188.639	82	7.961.850.401	84,35	1,03	7.182.899.738	102,87	90,22	90,645	13.101.088.377	110,54	210,18	Dinas Sosial	
	1	06	01	2.01		80	209.064.585	100	152.839.247	80	329.132.020	80	1,00	329.104.373	100,00	99,99	90	481.943.620	112,50	230,52	Dinas Sosial	
	1	06	01	2.02		12	4.766.324.140	99	4.793.788.571	12	4.794.087.540	12	1,00	4.351.591.075	100,00	90,77	55,5	9.145.379.646	462,50	191,87	Dinas Sosial	
	1	06	01	2.05		100	2.125.000	100	4.642.500	100	12.130.000	100	1,00	12.130.000	100,00	100,00	100	16.772.500	100,00	789,29	Dinas Sosial	
	1	06	01	2.06		100	379.604.341	96,5	393.076.050	100	1.725.743.587	100	1,00	1.426.617.440	100,00	82,67	98,25	1.819.693.490	98,25	479,37	Dinas Sosial	
	1	06	01	2.08		100	265.350.476	100	230.943.167	100	359.040.366	100	1,00	349.816.875	100,00	97,43	100	580.760.042	100	218,87	Dinas Sosial	
	1	06	01	2.09		12	610.892.424	100	342.899.104	12	741.716.888	12	1,00	713.639.975	100,00	96,21	56	1.056.539.079	466,67	172,95	Dinas Sosial	
	1	06	02			30	780.224.459	0	991.361.237	30	874.024.259	30	1,00	873.920.398	100,00	99,99	15	1.865.281.635	50	239,07	Dinasos	
	1	06	02	2.02		5	12.450.000		14.490.000	5	12.450.000	5	1,00	12.450.000	100,00	100,00	2,5	26.940.000	50	216,39	Dinasos	
	1	06	02	2.03		25	767.774.459		976.871.237	25	861.574.259	25	1,00	861.470.398	100,00	99,99	12,5	1.838.341.635	50	239,44	Dinasos	
	1	06	04			70	8.824.840.865	0	10.683.404.828	70	8.466.370.445	70	1,00	8.401.423.098	100,00	99,23	35	19.084.827.926	50,00	216,26	Dinas Sosial	

No	Kode				Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KP	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13
						Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	persen	70				70		100	1,43		142,86		50		71,43		Dinas Sosial	
	1	06	04	2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis di luar panti sosial	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	persen	70	8.824.840.865		10.683.404.828	70	8.466.370.445	70	1,00	8.401.423.098	100,00	99,23	35	19.084.827.926	50	216,26	Dinas Sosial	
	1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	persen	55	3.963.778.471	0	5.309.927.990	55	6.985.614.091	54	0,98	6.943.201.818	98,18	99,39	27	12.253.129.808	49,09	309,13	Dinas Sosial	
	1	06	05	2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	persen	100	3.963.778.471		5.309.927.990	100	6.985.614.091	99,96	1,00	6.943.201.818	99,96	99,39	49,98	12.253.129.808	49,98	309,13	Dinas Sosial	
	1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persen	100	464.082.095	0	349.420.500	100	667.507.095	80	0,80	640.690.730	80,00	95,98	40	990.111.230	40,00	213,35	Dinas Sosial	
	1	06	06	2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	persen	100	91.791.500		119.145.500	100	324.391.500	97	0,97	304.711.500	97,00	93,93	48,5	423.857.000	48,5	461,76	Dinas Sosial	
	1	06	06	2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	persen	60	372.290.595		230.275.000	60	343.115.595	58,5	0,98	335.979.230	97,50	97,92	29,25	566.254.230	48,75	152,10	Dinas Sosial	
	1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketisetaikawasan sosial	persen	60	172.001.330	100	230.583.020	60	172.001.330	60	1,00	172.001.126	100,00	100,00	80	402.584.146	133,33	234,06	Dinasos	
	1	06	07	2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	persen	70	172.001.330	100	230.583.020	70	172.001.330	70	1,00	172.001.126	100,00	100,00	85	402.584.146	121,43	234,06	Dinasos	
JUMLAH ANGGARAN UNTUK SASARAN 10:								100	20.438.288.186	197	23.482.886.214	66	25.127.367.621	63	0,95	24.214.136.908	95,30	96,37	22	47.697.023.122	22	39		-
Sasaran 11:		Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak																						
	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian desa prima	Persen	37,33	815.000.000	0	-	37,33	502.650.000	37,33	1,00	477.885.000	100,00	95,07	18,665	477.885.000	50	58,64	DP3PPKB	
	2	22	08	2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian desa prima	Persen		815.000.000				502.650.000	0		477.885.000		95,07	0	477.885.000		58,64	DP3PPKB	
						rekomendasi dan pendampingan desa prima	Desa	4			11		11	1,00		-	100,00		5,5	-	137,5			
	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	75	615.640.000	0	14.647.000	62	21.250.000	62	1,00	21.250.000	100,00	100,00	31	35.897.000	41,333333	5,83	DP3PPKB	
	2	08	02	2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	75	307.820.000		14.647.000		10.625.000	0		10.625.000		100,00	0	25.272.000	0	8,21	DP3PPKB	
						Perangkat Daerah yang melakukan analisa Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing- masing perangkat daerah	rangkat Daerah	45	307.820.000			25	10.625.000	25	1,00	10.625.000	100,00	100,00	12,5	10.625.000	27,777778	3,45		
	2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	10 penduduk	26	1.834.049.702	0	485.273.480	35	1.318.788.600	59	1,69	1.260.795.816	168,57	95,60	29,5	1.746.069.296	113,461538	95,20	DP3PPKB	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2			3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	08	03	2.01	Pencapaian Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	lembaga	60	112.940.428		40.672.500		150.450.000	0		146.950.000		97,67	0	187.622.500	0	166,13	DP3PPKB	
					Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Lembaga	55	112.940.428			40	150.450.000	40	1,00	146.950.000	100,00	97,67	20	146.950.000	36,36364	130,11		
2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian lembaga yang menyediakan layanan rujukan (UPT)	lembaga	5	781.109.274		374.960.230		497.681.800	0		472.185.408		94,88	0	847.145.638	0	108,45	DP3PPKB	
					Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	Lembaga	11	781.109.274			7	497.681.800	7	1,00	472.185.408	100,00	94,88	3,5	472.185.408	31,81818	60,45		
2	08	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	lembaga	60	45.950.298		69.640.750	60	22.525.000	60	1,00	22.525.000	100,00	100,00	30	92.165.750	50	200,58	DP3PPKB	
2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	11	788.000.000	0	37.834.291	7	7.850.000	7	1,00	7.850.000	100,00	100,00	3,5	45.684.291	31,81818	5,80	DP3PPKB	
2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kerangka Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	85	394.000.000		37.834.291		7.850.000	0		7.850.000		100,00	0	45.684.291	0	11,59	DP3PPKB	
					Update Data Pilah gender	Dokumen	1	394.000.000			1		1	1,00		100,00		0,5		50	-		
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak	Kalahuran	75	900.000.000	0	-	15	483.833.745	15	1,00	477.497.325	100,00	98,69	7,5	477.497.325	10	53,06	DP3PPKB	
2	08	06	2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nongovernment, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	Persen	20	282.641.500		-	10	127.050.000	65,6	6,56	124.550.000	656,00	98,03	32,8	124.550.000	164	44,07	DP3PPKB	
2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	Kegiatan	85	617.358.500		-	3	356.783.745	3	1,00	352.947.325	100,00	98,92	1,5	352.947.325	1,76470588	57,17	DP3PPKB	
2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	959.000.000	100	463.227.056	100	869.967.975	100	1,00	819.561.081	100,00	94,21	100	1.282.788.137	100	133,76	DP3PPKB	
2	08	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Persen	100	891.000.000		463.227.056	100	767.661.975	100	1,00	717.255.081	100,00	93,43	50	1.180.482.137	50	132,49	DP3PPKB	
2	08	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	Lembaga	1	68.000.000			1	102.306.000	1	1,00	102.306.000	100,00	100,00	0,5	102.306.000	50	150,45	DP3PPKB	
2	14	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83	6.785.390.727	83	6.484.479.904	83	6.013.055.545	83	1,00	5.132.816.884	100,00	85,36	83	11.617.296.788	100	171,21	DP3PPKB	
2	14	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	100	22.000.000		86.170.190		87.100.548	0		86.071.044		98,82	0	172.241.234	0	782,91	DP3PPKB	
					Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100				84		100	1,19		119,05		50		50			
2	14	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	100	5.202.890.727		4.823.368.036		4.943.788.478	0		4.117.322.774		83,28	0	8.940.690.810	0	171,84	DP3PPKB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
1	2					3	4	5	6		7		8			9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12	13	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100					85		100	1,18		117,65		50		50					
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	100	578.997.970		528.275.850		304.677.444	0			283.764.660		93,14	0		812.040.510	0	140,25	DP3PPKB		
						Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100				85			100	1,18		117,65		50		50					
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	100	200.252.030		339.385.923		283.941.048	0			276.777.338		97,48	0		616.163.261	0	307,69	DP3PPKB		
						Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100				100			100	1,00		100,00		50		50					
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83	781.250.000	83	707.279.905		393.548.027	0			368.881.068		93,73	41,5		1.076.160.973	50	137,75	DP3PPKB		
						Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100				100			100	1,00		100,00		50		50					
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Dokumen		194.700.000		109.820.000		335.634.950	0			302.651.350		90,17	0		412.471.350		211,85	DP3PPKB		
						Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	Angka	1,62		0		1,66			1,67	1,01		100,60		0,835		51,5432099					
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Dokumen		44.500.000		16.320.000		19.307.500	0			19.307.500		100,00	0		35.627.500		80,06	DP3PPKB		
						Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Bulan	12				12			12	1,00		100,00		6		50					
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Dokumen		150.200.000		93.500.000		316.327.450	0			283.343.850		89,57	0		376.843.850		250,89	DP3PPKB		
						Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	Persen	100				100			100	1,00		100,00		50		50					
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	77,2	4.127.300.000	73,73	5.903.495.665	77,2	7.344.291.134	73,5	0,95		6.539.876.924	95,21	89,05	73,615		12.443.372.589	95,36	301,49	DP3PPKB		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen		2.250.000.000		2.139.872.865		2.047.192.384	0			2.004.438.774		97,91	0		4.144.311.639		184,19	DP3PPKB		
						Cakupan Pelaksanaan Kegiatan KIE	Persen	80				80			80	1,00		100,00		40		50					
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen		1.352.000.000		834.789.500		897.038.000	0			888.755.500		99,08	0		1.723.545.000		127,48	DP3PPKB		
						Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	Persen	100				100			100	1,00		100,00		50		50					
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen		325.000.000		2.073.016.300		3.482.785.750	0			2.729.557.650		78,37	0		4.802.573.950		1.477,72	DP3PPKB		
						Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Persen	90				90			90	1,00		100,00		45		50					

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Ket.
1	2				3	4	5	6		7		8		9			10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		12		13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	KU	KF	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	14	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemaknaan kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen		200.300.000		855.817.000		917.275.000	0		917.125.000		99,98	0	1.772.942.000		885,14	DP3PPKB		
						Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	Persen	80				80		80	1,00		100,00		40		50				
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen	85,5	1.750.076.000	0	-	83	4.566.320.000	83	1,00	4.030.655.000	100,00	88,27	41,5	4.030.655.000	48,5380117	230,31	DP3PPKB		
2	14	04	201		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen		1.052.500.000				4.552.097.500	0		4.016.432.500		88,23	0	4.016.432.500		381,61	DP3PPKB		
						Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	Persen	100				100		100	1,00	-	100,00		50	-	50				
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen		697.576.000				14.222.500	0		14.222.500		100,00	0	14.222.500		2,04	DP3PPKB		
						Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	Persen	100				100		100	1,00	-	100,00		50	-	50				
JUMLAH ANGGARAN UNTUK SASARAN 11:								100	11.983.765.702	174	7.014.297.492	46	15.450.586.404	49	1,05	13.938.022.496	104,87	90,21	111	20.952.319.988	111	175			

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.4.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah.

Pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 memiliki tema "Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas". Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Penguatan Produk Unggulan
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- c. Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi
- d. Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana
- e. Penguatan Reformasi Birokrasi,
- f. Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada.

Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas diuraikan sebagai berikut:

1) Penguatan Produk Unggulan

Kabupaten Bantul terkenal dengan produk unggulan yang bernilai seni kreatif. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan Kabupaten Kreatif menuju Kota Kreatif Dunia (UCCN) dengan pengembangan jejaring ekonomi kreatif. Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif sebagai pendorong pembangunan ekonomi dalam pengembangan kegiatan industri sebagai sektor yang potensial yang mempunyai dampak pengganda (multiplier effects) bagi pertumbuhan ekonomi. Indikator kota/kabupaten kreatif yang harus dipenuhi oleh semua kota/kabupaten yang mengajukan ke UNESCO terdiri dari 18 indikator. Dalam mendukung tercapainya Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten Kreatif Dunia versi UNESCO beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- a. produk unggulan belum semua berdaya saing dan berorientasi ekspor;

- b. belum optimalnya kolaborasi antara OPD dan stakeholder terkait;
- c. eksistensi komunitas kreatif belum optimal;
- d. belum luasnya jejaring ekonomi kreatif

2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kabupaten Bantul memiliki penduduk yang relatif banyak, tahun 2020-2024 merupakan puncak bonus demografi. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul dapat menentukan kebijakan pembangunan manusia dengan menangkap peluang adanya bonus demografi khususnya kebijakan pendidikan, kesehatan dan Kebudayaan. Kendala dalam pelaksanaannya antara lain:

a. Pendidikan

Pada tahun 2022 jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantul paling banyak adalah lulusan SMA/Sederajat yaitu sebesar 279.556 jiwa atau 28,99%. kemudian belum/tidak sekolah menempati peringkat kedua sebesar 19,23%, dari jumlah penduduk di Kabupaten Bantul. Hal ini perlu menjadi perhatian bahwa lulusan SMA/Sederajat akan melanjutkan ke jenjang berikutnya atau melangkah ke dunia kerja, Kualitas lulusan SMA/Sederajat masih belum memadai dalam pemenuhan kebutuhan lapangan usaha.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan, dari 9,35 tahun pada tahun 2018 menjadi 9,59 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat. Angka ini juga menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bantul bersekolah sampai tamat setingkat Sekolah Menengah Pertama. Hal ini selaras dengan angka putus sekolah yang cukup tinggi sebesar 0,03% pada jenjang SD/MI dan 0,04% pada jenjang SMP/Mts.

b. Kesehatan

Angka Kematian Bayi meningkat pada tahun 2022 tercatat 8,30 per 1000 kelahiran hidup (90 kematian) dibanding tahun 2021

sebesar 5,40 per 1.000 kelahiran hidup (63 kematian). Hal ini perlu menjadi perhatian pada pelayanan kesehatan terhadap bayi dan balita yang belum memadai. Selain itu kemungkinan peningkatan AKB disebabkan kenaikan angka Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Pada Tahun 2022 KTD di Bantul sebanyak 224 kasus meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya 167 kasus. Hal ini menunjukkan pelayanan kesehatan terhadap usia sekolah dan usia produktif belum optimal.

Prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 8,36% menurun tahun 2022 menjadi 6,42% karena intervensi program percepatan penurunan stunting. Apabila dilihat dari determinan masalah penyebab stunting di Kabupaten Bantul terbanyak adalah keluarga miskin sebesar 47,29% dan pengasuhan anak kepada campuran sebesar 30,03%. Kemiskinan masih menjadi penyebab terbesar stunting di Kabupaten Bantul

c. Kebudayaan

Perkembangan jaman menunjukkan kepedulian dan etika generasi muda dalam menghargai budaya daerah dan toleransi sangat kurang. Salah satunya yaitu masih banyaknya kasus kejahatan yang melibatkan remaja. Sepanjang tahun 2022, 104 remaja Bantul terlibat dalam kejahatan jalanan.

3) Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi

Terbangunnya infrastruktur khususnya layanan publik sangat berperan terhadap peningkatan dan perkembangan ekonomi. Kondisi jalan yang rusak dan saluran irigasi yang belum memadai merupakan salah satu contoh. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sebagai prasarana distribusi barang dan jasa. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 150,90 km, sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan di Kabupaten Bantul bisa dalam kondisi mantap. Demikian pula saluran irigasi,

luas sawah sepanjang daerah irigasi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,46% (6.946,82 ha) di tahun 2022. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa belum semua daerah irigasi memiliki saluran irigasi kualitas baik dan teraliri dengan baik. Selain itu sarana prasarana publik pada destinasi wisata sebagai lokomotif perekonomian juga belum memadai. Pengembangan Desa Wisata dapat dijabarkan dalam 3 tahap yaitu Rintisan, Berkembang, Maju dan Mandiri. Kategori rintisan menggambarkan sarana dan prasarana wisata masih terbatas. Desa Wisata di Kabupaten Bantul tahun 2022 sebanyak 47 Desa Wisata dengan kategori Maju sebanyak 10 desa wisata, kategori Berkembang sebanyak 5 desa wisata dan sisanya sebanyak 32 desa wisata termasuk kategori Rintisan/Embrio.

4) Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana

a. Kondisi TPAS Regional Piyungan yang sudah *overload* menyebabkan sampah menjadi permasalahan di Kabupaten Bantul sehingga Pemerintah Daerah dalam penanganannya mencanangkan Bantul Bersih Sampah 2025. Pengelolaan sampah diawali dari sumbernya yaitu rumah tangga dan hal ini telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sedangkan arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sampah yang masuk ke TPAS Regional Piyungan pada tahun 2022 rata-rata sebesar 743 ton/hari (39% berasal dari Kabupaten Sleman, 25% dari Kabupaten Bantul, dan 36% dari Kota Yogyakarta). Sampai dengan hingga 30 Oktober 2022 sel sampah TPAS Regional Piyungan eksisting (Zona B) hanya dapat menampung sampah dengan elevasi 124mdpl. Selanjutnya sampah yang masuk ke TPAS Regional Piyungan akan ditampung di Zona Transisi 1. Timbulan

sampah di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sebesar 644.819,13 m³ dengan volume sampah yang tertangani sebesar 63,56% atau sebesar 409.826,99 m³.

Neraca pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul tahun 2022 menunjukkan bahwa dari potensi timbunan sampah 160.382,71 ton/tahun, jumlah sampah yang dikelola sebesar 101.885,34 ton/tahun (63,53%) dan jumlah sampah yang tidak terkelola sebesar 58.497,37 ton/tahun (36,47%) dengan capaian pengurangan sampah dari target 26% (41.699,50 ton/tahun) tercapai 19,80% (31.757,49 ton/tahun); sedangkan untuk penanganan sampah dari target 73% (117.079,38 ton/tahun) tercapai 43,73% (70.127,86 ton/tahun) (Laporan Jakstrada, 2022).

Permasalahan pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Bantul antara lain:

- 1) Keterlibatan *stakeholder* baik lingkup Instansi, Perguruan Tinggi maupun lembaga kemasyarakatan belum optimal;
 - 2) Kurangnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah
 - 3) Peran dan kapasitas Kelompok Pengelola Sampah (BUMKal, TPS 3R dan Pelanggan Sampah) belum optimal
 - 4) Belum adanya fasilitas dan sarana prasarana pengelolaan sampah (Pembangunan *Intermediate Treatment Facility* (ITF)).
- b. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Pada Tahun 2022 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 12,27% atau lebih rendah 1,77% dibandingkan tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan dengan tingkat kemiskinan DIY dan Nasional, tingkat kemiskinan di Bantul relatif lebih tinggi Pemerintah Pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrim mencapai nol persen pada tahun 2024. Kemiskinan ekstrim Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 2,59% atau sebanyak 27.510 orang, berada dalam urutan ketiga di atas Kota Yogyakarta

dan Kabupaten Sleman. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bantul masih menjadi permasalahan termasuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan bantuan sosial bagi warga miskin melalui program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH).

- c. Capaian Nilai Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah 167,97 yang tergolong kategori tinggi, meningkat dari tahun 2021 sebesar 157,30%. Kenaikan ini disebabkan kenaikan frekuensi bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan kenaikan bencana khususnya longsor. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, berupa serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana). Pembentukan SPAB dan Kaltana di Kabupaten Bantul belum optimal, tahun 2022 baru sebanyak 33 SPAB dan 42 Kaltana

5) Penguatan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi, maka perlu dilakukan modernisasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TIK). Keterbukaan Informasi saat ini menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam pemenuhan akses informasi dibutuhkan sarana prasarana komunikasi dan informasi yang memadai untuk memfasilitasi pelayanan dan transaksi elektronik di Perangkat Daerah, maupun pelayanan publik lainnya. Saat ini masih terdapat 4 Puskesmas dan 48 Kalurahan yang belum terkoneksi *fiber optic* di Kabupaten Bantul. Panjang sambungan *fiber optic* pada tahun 2022 sepanjang 244,5 km meningkat dari tahun 2021 sepanjang 226,99 km.

6) Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilukada

Sesuai amanat pada Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Dalam rangka pilkada serentak tahun 2024, Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemda secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing dengan tahapan pilkada serentak sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 41 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 54 tahun 2019.

Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, menjelaskan peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu. Pemerintah daerah juga mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, literasi, edukasi kepada masyarakat, dan melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

2. Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan sasaran pembangunan daerah.

Permasalahan yang berhubungan sasaran daerah adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Permasalahan dalam sasaran ini antara lain jangkauan pelayanan publik secara digital belum bisa diakses seluruh kalurahan secara

maksimal, dari 75 kalurahan baru menjangkau 45 kalurahan yang terkoneksi dengan fiber optik.

2. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.
Permasalahan dalam mencapai indikator sasaran usia harapan hidup Bantul adalah karena masih tingginya kematian bayi (8,30 per 1.000 kelahiran hidup atau 90 bayi), yang disebabkan keterbatasan sarana prasarana di rumah sakit untuk kegawatdaruratan neonatal.
3. Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan.
Permasalahan dalam mencapai sasaran: adalah terbatasnya jumlah pendidik yang bersertifikasi di semua jenjang (46,25%) dan sarana prasarana sekolah.
4. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya.
Permasalahan dalam mencapai sasaran antara lain potensi budaya belum dikembangkan secara optimal.
5. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis.
Permasalahan dalam mencapai kehidupan yang harmonis diantaranya masih terdapat kejahatan jalanan oleh remaja.
6. Terwujudnya pemerataan pendapatan.
Permasalahan belum terjadinya pemerataan pendapatan karena masih terdapat penduduk menganggur (24.875 orang) dan terjadinya kesenjangan pembangunan di perkotaan dan perdesaan (Gini ratio Bantul 0,410).
7. Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik
Permasalahan sarana prasarana publik belum memadai antara lain infrastruktur jalan masih terdapat jalan di Bantul kondisi belum mantap (24,16%), dari 1.196 km. Infrastruktur sektor pertanian, tingkat kecukupan air irigasi belum optimal karena masih terdapat 18,13% saluran irigasi primer dan sekunder dalam belum kondisi rusak.
8. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas.

Permasalahan lingkungan hidup adalah indeks kualitas air menurun dari 56 menjadi 36,67. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terjadi pencemaran yang disebabkan antara lain pembuangan sampah di sungai.

9. Terwujudnya penurunan risiko bencana.

Permasalahan dalam mencapai sasaran: masih tingginya kejadian bencana, khususnya bencana longsor di Kapanewon, Imogiri, Pajangan.

10. Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Permasalahan perlindungan PPKS adalah belum semua tertangani dengan baik.

11. Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak.

Permasalahan dalam mencapai sasaran: Pernikahan dini meningkat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah diuraikan berdasarkan hasil capaian kinerja penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

Tabel 2.344 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80.63					INDIKATOR TUJUAN
	Umur Harapan Hidup	Tahun	74.01					IKU PEMDA
	Net Death Rate (NDR)	permil	21.5	20.4	Melampaui		1. tersedianya tim Hospital Disaster Plan (HDP) dalam penanganan covid-19, peningkatan kapasitas SDM; 2. pembangunan jejaring kemitraan dengan rumah sakit mitra dan Puskesmas; 3. inovasi layanan serta tercapainya target standar pelayanan minimal.	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	88.7	146.88	Belum Tercapai	1. Prasarana (USG) yang belum terpenuhi di semua puskesmas 2. Pemanfaatan buku Kesehatan Ibu Anak yang belum optimal 3. Masalah pembiayaan bagi ibu melahirkan warga berdomisili di Bantul yang ber KTP di luar Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Faktor Sosial yang menyebabkan permasalahan dalam penanganan ibu hamil dengan komplikasi 5. Keterlambatan dalam mengambil keputusan. keterlambatan dalam mengidentifikasi faktor resiko dan kegawatdaruratan		Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	7.7	8.3	Belum Tercapai	1. Keterbatasan sarana prasarana di Rumah Sakit untuk kegawatdaruratan neonatal 2. Keterlambatan Identifikasi komplikasi pada pertumbuhan perkembangan janin		

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
						3. Kemampuan tenaga kesehatan yang tidak merata di fasilitas kesehatan primer dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal		
	Case Fatality Rate Covid 19	%	2,75	1.13	melampaui		1. Adanya regulasi terkait Covid 19 di tingkat nasional maupun kabupaten 2. Tercukupinya fasilitas tempat tidur di Rumah Sakit Rujukan 3. Tercukupinya reagen PCR dan Rapid Antigen	
	Insiden Rate DBD	per 100.000 penduduk	125	9	melampaui		1. Dukungan dan komitmen kepala daerah serta stakeholder dalam upaya penangan DBD 2. Terobosan teknologi terbaru dari World Mosquito Program dalam upaya penangan DBD 3. Peran serta komprehensif dari kader, pamong desa dan lapisan masyarakat dalam program WoW Mantul 4. Dukungan diagnosa dan tatalaksana di Fasyankes	
	Prevalensi stunting	%	9	6.42	melampaui		1. Komitmen yang kuat dari masyarakat, lintas sektor, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah sakit dalam Penanganan stunting 2. Konvergensi 1000 Hari Pertama Kehidupan oleh lintas sektor dalam penanganan stunting berjalan baik 3. Adanya inovasi dalam penanganan stunting	
	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	15.35					IKU PEMDA
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	94	105.63	melampaui		1. BOP PAUD sebesar Rp 630.000,00 per siswa per tahun 2022 yang diberikan dalam dua tahap	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
							2. pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD sebanyak 3 unit 3. Penyediaan alat praktik dan peraga 4. Mengoptimalkan penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	95	101.18	melampaui		1. Rehabilitasi Gedung SMP sebanyak 7 sekolah dan laboratorium sebanyak 6 unit 2. Penyaluran BOSDA dan Hibah SMP Swasta, MTs Negeri dan MTs Swasta serta pencatatan BOSNAS 47 SMP Negeri. 3. pembinaan dan penyelenggaraan lomba FLSSN, KOSN, KSN, GSI dan KKD 4. pemberian insentif bagi GTT/PTT dan Guru Tetap Yayasan/Pegawai Tetap Yayasan, penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan bagi guru ASN, pengembangan aplikasi SI GADIS PENTUL	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	98.5	99.15	melampaui		1. Rehabilitasi Gedung SMP sebanyak 7 sekolah dan laboratorium sebanyak 6 unit 2. Penyaluran BOSDA dan Hibah SMP Swasta, MTs Negeri dan MTs Swasta serta pencatatan BOSNAS 3. pembinaan dan penyelenggaraan lomba FLSSN, KOSN, KSN, GSI dan KKD 4. pemberian insentif bagi GTT/PTT dan Guru Tetap Yayasan/Pegawai Tetap Yayasan, penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan	

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
							bagi guru ASN, pengembangan aplikasi SI GADIS PENTUL	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	14	13.51	Belum Tercapai	1. Masih kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal 2. Belum optimal Pemberian Bantuan Operasional Kesetaraan 3. Penyelenggaraan PKBM, dan pemberdayaan tutor kejar paket		
	Peningkatan prestasi olahraga	medali	10	10	Sesuai		1. Mencari bibit-bibit pelajar berprestasi 2. mengikuti berbagai macam kompetisi olahraga	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	3.42	4.92	melampaui		1. Koordinasi organisasi kepemudaan kabupaten/ kota dan pemberian hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia/ KNPI 2. Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan pemuda, serta seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten	
	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan	persen	33	112.32	melampaui		1. Peran Bunda Literasi dalam berbagai event di perpustakaan 2. Partisipasi masyarakat dalam mendukung ketersediaan bahan Pustaka melalui hibah buku. 3. Adanya kerjasama dengan pemangku kepentingan serta masyarakat dalam upaya untuk ikut mempromosikan perpustakaan. 4. Partisipasi pengunjung dalan pengisian kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	5					IKU PEMDA
	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Desa/ Kalurahan	15	19	melampaui		Persiapan pemenuhan persyaratan kenaikan status menjadi	Dinas Kebudayaan

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
							Desa/Kalurahan Budaya di tahun mendatang	
	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	kalurahan	33	65	melampaui		Pendampingan Dan Pengembangan Desa Prima	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Presentase gangguan trantribum yang dapat di selesaikan	persen	100	100	Sesuai (=)		1. Melaksanakan Operasi dan Patroli dalam rangka Penegakan Perda; 2. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder;	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	77	81.96	Melampaui		1. Menambah cakupan kegiatan Pendidikan politik bagi masyarkat 2. Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan dan Difabel.	
	Jumlah Intoleransi di masyarakat	Angka	0	0	Sesuai		1. Adanya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga Toleransi Antar Umat Beragama 2. Adanya Koordinasi yang baik dengan Mitra Bakesbangpol seperti Intelegen,FKUB,FKDM,FPK dan Ormas/LSM.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.	Jumlah kejadian	0	0	Sesuai		1. Pelatihan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 2. Pemantauan & pembinaan satuan keamanan di masyarakat 3. Pemberdayaan perangkat desa	
	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.8					INDIKATOR TUJUAN
	Pemerataan Pendapatan/ Gini Ratio	Angka	0,36					IKU PEMDA
	Skor PPH	Angka	90.4	92.1	Melampaui			Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	%	0.714	9.79	Melampaui			
	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	%	0.45	1.91	Melampaui			

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2,057,000	5,436,213	Melampaui			Dinas Pariwisata
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,25	2.03	Melampaui			
	Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah/org	744,188	767,234	Melampaui			
	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	persen	70	70.1	Melampaui		Pembinaan usaha mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	persen	3.3	3.65	Melampaui			
	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Rupiah (Miliar)	1,788.16	1,678.92	Belum Tercapai			Dinas Perdagangan
	Nilai Realisasi Investasi	nilai/ angka	1,824.47	2,193.86	Melampaui			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	Tingkat pengangguran	Persen	3.9					IKU PEMDA
	Jumlah tenaga kerja yang terserap	orang	7.500	14.230	Melampaui			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Kabupaten kreatif	Jumlah pemenuhan komponen	6					IKU PEMDA
	Pertumbuhan industri kreatif	persen	0.31	0.31	Sesuai			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	Angka Kemiskinan	persen	13.37					INDIKATOR TUJUAN
	Persentase Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	50					IKU PEMDA
	PPKS yang ditangani dan dilayani	persen	100	100	Sesuai		1. Perencanaan dan pengadaan kebutuhan buffer stock yang tepat dan cermat berdasarkan analisis kebutuhan dan sasaran 2. pemenuhan kebutuhan alat bantu untuk PPKS 3. Razia PPKS Jalanan yang akan dikembalikan kepada keluarga, sehingga bisa dilakukan edukasi kepada PPKS maupun keluarga	Dinas Sosial,

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
							4. bimbingan dan edukasi kepada keluarga dari klien PPKS 5. pemenuhan kebutuhan operasional Shelter Kesejahteraan Sosial 6. Pemenuhan kebutuhan klien PPKS 7. Pelatihan penanganan klien PPKS 8. Pemulasaran jenazah terlantar. 9. penjangkauan klien PPKS, pelatihan penanganan PPKS untuk Tim Reaksi Cepat Bidang Rehabilitasi Sosial dan pemberian layanan oleh Pekerja Sosial 10. layanan rujukan PPKS 11. Kerkjasama dengan mitra LKS dan instansi terkait	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95.5					INDIKATOR TUJUAN
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks						IKU PEMDA
	Prevalensi Kekerasan terhadap Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Rasio	0,45	0,032	Melampaui		1. Regulasi perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan 2. Penyelenggaraan digital parenting terpadu 3. Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul 4. Pembentukan forum perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 5. Pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang kabupaten bantul periode tahun 2022-2024 6. Data pilah gender 7.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya					IKU BUPATI
	Nilai KLA	Angka	730	715	Belum tercapai	1. Partisipasi lembaga, dunia usaha, mitra & masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak belum optimal		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	2.5	2.05	Melampaui		Ketersediaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), komitmen dan kemitraan dengan fasilitas kesehatan dan Jejaringnya dalam melaksanakan pelayanan KB, koordinasi dan komitmen yang baik dari berbagai mitra dan kelompok kegiatan.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
	Indeks Pembinaan Keluarga Berencana	angka	63.4	63.4				
	Indeks Advokasi dan Pengendalian Penduduk	Angka	60.24	60.24				
	Cakupan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat	persen	52.21	52.21				
II	Aspek Pelayanan Umum							
A	Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
1	Pendidikan							
	Persentase capaian SPM Pendidikan	persen	100%	100%	Sesuai		1. Rehabilitasi Gedung PAUD, SD, dan SMP dan laboratorium 2. Penyaluran BOSDA dan BOSNAS sekolah Swasta dan Negeri Pembinaan dan penyelenggaraan lomba FLSSN, KOSN, KSN, GSI dan KKD	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan PNF	persen	100%	100%	Sesuai		1. Penguatan kurikulum dan materi pembelajaran bagi Lembaga PAUD 2. pendampingan penyusunan bahan ajar bagi semua guru PAUD dan Tutor Pendidikan non formal/ kesetaraan selama tahun pelajaran	

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=) Melampaui (>)			
	kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	persen	66%	66%	sesuai		1. Penguatan kurikulum dan materi pembelajaran bagi Lembaga PAUD 2. pendampingan penyusunan bahan ajar bagi semua guru PAUD dan Tutor Pendidikan non formal/ kesetaraan selama tahun pelajaran 3. penilaian kinerja kepala sekolah	
	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	persen	4.18%	4.18%	sesuai		Penguatan mata pelajaran Bahasa Jawa, Membatik, Tata Nilai Budaya Jawa bagi sekolah Negeri dan swasta.	
2	Kesehatan							
	Net Death Rate (NDR)	permil	21.5	20.4	Melampaui		1. tersedianya tim Hospital Disaster Plan (HDP) dalam penanganan covid-19, peningkatan kapasitas SDM; 2. pembangunan jejaring kemitraan dengan rumah sakit mitra dan Puskesmas; 3. inovasi layanan serta tercapainya target standar pelayanan minimal	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Indeks pemenuhan UKP UKM	indeks	1 indeks	1 indeks	sesuai		1. Perubahan status laoratorium kesehatan lingkungan menjadi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah 2. Pelaksanaan Uji fungsi dan training penggunaan USG	Dinas Kesehatan
	indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	1 indeks	1 indeks	sesuai		1. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan 2. Penjaringan Calon Tenaga Kesehatan Teladan, 3. Persiapan Uji Kompetensi Jabfung Kesehatan, 4. Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Kesehatan,	
	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	indeks	1 indeks	1 indeks	sesuai		1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
							2. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar	
	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	persen	100 persen	100 persen	Sesuai		Kampanye kesehatan dan sosialisasi promosi kesehatan	
	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	persen	33%	33%	Sesuai		Pengembangan taman Toga percontohan, produksi jamu dengan binaan puskesmas, dan pengembangan pijat tumbuh kembang balita.	
	Cakupan Pelayanan Jamkesda	persen	100%	100%	Sesuai		Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	Uptd Jamkesda
	Cakupan Pelayanan Labkesda	persen	100%	100%	Sesuai		Pembangunan gedung Labkesda.	Uptd Labkesda
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Srandakan
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Sanden
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Kretek
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Pundong
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Bambanglipuro
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Pandak I
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Pandak II
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Bantul I

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Bantul II
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Jetis I
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Jetis II
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Imogiri I
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Imogiri II
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Dlingo I
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Dlingo II
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Pleret
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Piyungan
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Banguntapan I
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Banguntapan II
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam	Puskesmas Banguntapan III

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
							pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Sewon I
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Sewon II
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Kasihan I
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Kasihan II
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Pajangan
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Sedayu I
	Indeks capaian SPM	indeks	1 indeks	1 indeks	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan untuk benkontribusi dalam pengadaan reagen untuk pemenuhan SPM Kesehatan	Puskesmas Sedayu II
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	persen	75.83%	75,84%	Melampaui	Pembebasan lahan jalan Cinomati belum dapat dilaksanakan karena status tanah kehutanan, enclave dan oro-oro.	Kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Tingkat kemantapan infrastruktur permukiman (jalan desa)	persen	81.03%	82,51%	Melampaui		Kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jalan	
	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	persen	0.40%	1.7	Melampaui			
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	72.84	92,95	Melampaui		Antusiasme pekerja untuk memiliki sertifikat keahlian	
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir	persen	30	39,58	Melampaui		Rehababilitas embung.	

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali 100%)							
	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	persen	82.40%	82,32%	belum Tercapai	Rehabilitasi belum mencakup semua daerah irigasi rusak		
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	persen	83,56%	97,03%*	melampaui		Penambahan sambungan rumah pada jaringan perpipaan kawasan perkotaan dan perdesaan	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	persen	100	100%	sesuai		Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman dan SPALD-T Skala Kota	
	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	persen	3.97%	NA				
	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai aturan	persen	86%	75,20%	belum Tercapai	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan tentang pemanfaatan ruang		
	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	persen	90%	90%	sesuai		Tersusunnya dokumen rencana induk satuan ruang strategis pantai Samas-Parangtritis	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	persen	100%	100%	sesuai		Tidak terjadi bencana yang membutuhkan rehabilitasi rumah pada Tahun 2021, 2022	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	persen	10.59%	52,04%.	melampaui	Terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani	Bersinergi dan berkolaborasi dengan KOTAKU, Forkom BKM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase rumah layak huni	persen	99.18%					

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	persen	100%	100%	Sesuai		Tersedianya tempat pemakaman.	
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	persen	100%	100%	Sesuai		Tersusunnya dokumen rencana induk satuan ruang strategis pantai Samas-Parangtritis	
5	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat							
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	100 persen					Satuan Polisi Pamong Praja
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	846.001 orang	846.001 orang	Sesuai		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	977.757 orang	977.757 orang	Sesuai		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan bencana	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	3.380 orang	3.380 orang	Sesuai		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan bencana	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100 persen	100 persen	Sesuai		Simulasi penanganan kebakaran, pemadaman dan pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	
6	Urusan Sosial							
	Capaian Desa Prima	persen	37%					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS	persen	60%	60%	Sesuai		Koordinasi dan Sinkronisasi	
	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	persen	70 Persen	70 Persen	Sesuai		Ketersediaan selter, boga sehat, layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti.	
	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	persen	55	54	Belum tercapai	Pengelolaan multidata di Puskesmas-SLRT belum optimal		
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	persen	100%	97%	Belum tercapai			

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota							
	cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	persen	75%	75%	Sesuai		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa, Monumen Soeharto, Segoroyoso, Pleret, Monumen Jenderal Sudirman Parangtritis, Kretek, Monumen Brimob Sedayu	
B	Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
1	Tenaga Kerja							
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	persen	18,5 Persen	22.5 persen	Melampaui		Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, pemagangan/ On The Job Training (OJT), pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	persen	54 Persen	54,43 Persen	Melampaui		Pembekalan kepada tenaga kerja baru dan pembekalan pengurus BKK untuk bisa melakukan pelayanan antar kerja.	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	persen	35 Persen	36,4 Persen	Melampaui		Sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan membina Lembaga Kerjasama Bipartit.	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	62 persen	62 persen	Sesuai		Bimtek PPRG bagi aparat kalurahan, pendampingan dan pengembangan Desa Prima.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	persen	100 Persen	100 Persen	Sesuai		Sosialisasi one stop service pelayanan UPTD PPA dan sosialisasi pencegahan pernikahan dini.	
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	7 persen	7 persen	Sesuai		Kebijakan kesetaraan gender.	
	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	Kecamatan dan Kalurahan	17 kecamatan	17 kecamatan	Sesuai		Koordinasi, sinkronisasi program prioritas Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak	

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
			26 Kalurahan	75 kalurahan	Melampaui		Koordinasi, sinkronisasi program prioritas Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak	
	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kalurahan	75 Kalurahan				Layanan Pengaduan Masyarakat, koordinasi dan sinkronisasi, penguatan jejaring antar lembaga.	
3	Ketahanan Pangan							
	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	persen	37%	31%	belum tercapai			
	Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	unit	1 unit	1 unit	Sesuai		Pembinaan dan penguatan kelembagaan	
	Persentase ketersediaan pangan	persen	149 Persen					
	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	Desa	1 Desa	1 Desa	Sesuai		Pembinaan dan penguatan kelembagaan	
	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	persen	100%	70%	Belum tercapai	Beberapa sayuran tidak lolos uji Organofosfat, Organoklorin dan Karbamat.		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
4	Pertanahan							
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen	100%	100%	Sesuai		Sosialisasi penanganan permasalahan pertanahan.	
	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	persen	90%	90%	Sesuai		Koordinasi dengan Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah Pemda, tanah warga, inventarisasi tanah desa.	
	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	persen	33.03%	33.03%	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan dan Kantor Pertanahan.	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
5	Lingkungan Hidup							
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	14,29 persen	14,29 persen	Sesuai		Koordinasi dengan Ditjen PDLKWS KLHK, P3EJ, BPKH XI dalam penyusunan dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).	
	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	persen	70 persen	70 persen	Sesuai		Pemantauan kualitas air, kualitas udara, sosialisasi serta pembangunan IPAL Terpadu Kawasan Industri Piyungan.	
	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	persen	30 persen	64,34 persen	Melampaui		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kebersihan jalan serta pemeliharaan RTH.	Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	persen	31,35 persen	137,5 persen	Melampaui		Sosialisasi pengelolaan limbah B3 dan pendampingan	

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
							penyusunan rincian teknis penyimpanan limbah B3.	
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	persen	16,67 persen	16,67 persen	Sesuai			
	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	persen	5 persen	5 persen	Sesuai			
	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	persen	1 penghargaan	1 penghargaan	Sesuai			
	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	persen	100 persen	100 persen	Sesuai			
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	42,42 Persen	43,73 persen	Melampaui		Bersih lingkungan zerowaste wisata, Gerakan Bantul Bersama	
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil							
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	persen	99.81%	99.85%	Melampaui		Koordinasi dengan kalurahan dan instansi terkait dalam integrasi layanan.	
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	persen	96%	99.49%	Melampaui		Inovasi pelayanan	
	Prosentase Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna	persen	90%	90%	Sesuai			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	persen	100%	100%	Sesuai			
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Desa	persen	100%	100%	Sesuai			
	Persentase peningkatan status desa mandiri	persen	100%	100%	Sesuai			Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Desa
	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa	persen	100%	100%	Sesuai		Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna.	
	persentase ketersediaan bidang tanah desa	persen	16%	16%	Sesuai		Koordinasi dengan kalurahan dan Kantor Pertanahan.	

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	berdasarkan hasil inventarisasi.							
	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	persen	100%	100%	Sesuai		Peningkatan kapasitas pamong dan lembaga kemasyarakatan kalurahan, peran lurah sebagai pemangku keistimewaan.	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Sesuai			
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	77.20	73.50	Melampaui		Pembinaan kampung KB, pembuatan ILM program KB, Forum Kampung KB.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Desa
	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	persen	83%	83%	Sesuai		Pengadaan BKB kit stunting, kit siap nikah anti stunting, pendampingan calon pengantin, pendampingan ibu hamil, dan pendampingan ibu melahirkan.	
9	Perhubungan							
	Rasio Konektivitas Kabupaten	angka	30.43	38,46	Melampaui		Penyediaan perlengkapan jalan, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan.	
	V/C Rasio	angka	0,30 angka	0,30 angka	sesuai			
10	Komunikasi dan Informatika							
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	persen	70	99.10	Melampaui		Kebijakan dan implementasi SPBE, kolaborasi antarperangkat daerah	
	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	persen	43	33,33	Belum tercapai			Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	angka	1.29	1.29	Sesuai			
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100	100	Sesuai			

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
11	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
	Persentase UMKM yang berizin	persen	50 persen	30,9 persen	Belum tercapai	UMKM belum semua meleak teknologi informasi dan ketersediaan anggaran untuk memfasilitasi perijinan		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian
	Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	persen	60 persen	60 persen	Sesuai		Pembinaan UMKM, tersedianya Bantul Online Shop	
	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	persen	2,5 persen	5,7 persen	Melampaui		Fasilitasi perijinan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, updating data perizinan koperasi	
	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	persen	70,23 persen	76,09 persen	Melampaui		Apresiasi koperasi berprestasi, patuhnya koperasi terhadap peraturan perundangan	
	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	persen	59,52 persen	62,15 persen	Melampaui		178 Kesehatan KSP/ USP/ KSPPS/ USPPS kategori sehat	
	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	persen	60 persen	71 persen	Melampaui		Sosialisasi perkoperasian, pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas perkoperasian	
	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	persen	5 persen	18 persen	Melampaui		Fasilitas kemitraan koperasi, dan Penguatan Koperasi	
12	Penanaman Modal							
	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	persen	100 persen	100 persen	Sesuai		Raperbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	persen	4.08 persen	28,49 persen	Melampaui		Perda Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun. 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, bentuk pemberian insentif berupa pengurangan pajak	

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
							daerah, pengurangan retribusi daerah, pemberian bantuan modal dan atau peralatan kerja kepada UMKM	
	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	persen	100	100 persen	Sesuai		Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Online serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten melalui izinonline.bantulkab.go.id .	
	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persen	100%	100 persen	Sesuai		Kunjungan langsung kepada pelaku usaha, mengadakan kegiatan pekan LKPM.	
	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	persen	100%	100 persen	Sesuai		Kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pengembangan aplikasi dan pemeliharaan database, koordinasi penyelenggaraan PTSP terkait upaya inovasi, pengelolaan dan pengukuran mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	
13	Kepemudaan dan Olahraga							
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	80 persen	80 persen	Sesuai			Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
	Organisasi Pramuka yang aktif	organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	Sesuai		Penyaluran hibah ke Pramuka Kabupaten Bantul	
	Jumlah prestasi Olahraga	angka	2	2	Sesuai		Juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah,	
14	Statistik							
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	persen	100 persen	100 persen	Sesuai			Dinas Komunikasi Dan Informatika
15	Persandian							
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	100	100	Sesuai		Asesmen atas aplikasi yang akan dirilis, deteksi dini terhadap kerentanan sistem elektronik serta penanganan terhadap gangguan yang	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
16	Kebudayaan						terjadi.	
	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	61	62,13	Melampaui		Penetapan 20 cagar budaya, Kajian Warisan Budaya Benda, dan pengembangan cagar budaya dan warisan budaya.	Dinas Kebudayaan
	Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	18	18	Sesuai		Kompetisi Kebahasaan dan Sastra, Kompetisi Kebahasaan dan Sastra.	
	Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	219	222	Melampaui		Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya untuk 7 (tujuh) desa, Gelar Budaya Jogja	
17	Perpustakaan							
	Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi	Persen	10,08	10,49	Melampaui		Pembinaan perpustakaan, Pelatihan dan Pengelolaan Perpustakaan, dan Pembinaan Perpustakaan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Kearsipan							
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)	persen	60	60	Sesuai		Sosialisasi Arsip kepada Masyarakat, Reward Pengawasan Kearsipan Internal, Sosialisasi Arsip Keluarga/ Pengelolaan Arsip Ormas dan Orpol/ Pengelolan Arsip Kalurahan, dan Pengelolaan Arsip Statis.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	persen	69	69	Sesuai		Pendataan Arsip dalam Proses Pemusnahan	
C	Layanan Urusan Pilihan							
1	Kelautan dan Perikanan							
	Cakupan kalurahan Bahari	persen	8	8	Sesuai			Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
	Produksi perikanan tangkap	ton	829	841,37	Melampaui		Pengembangan kapasitas nelayan, bimbingan teknis penangkapan ikan	
	Produksi perikanan budidaya	ton	12.805	13.124,88	Melampaui		Pendampingan kepada kelompok budidaya aktif, Pelatihan Perikanan Budidaya, Sarasehan Perikanan Budidaya,	

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
							Sosialisasi Perikanan Budidaya dan Temu Lapang Perikanan Budidaya	
	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	persen	5	6,7	Melampaui		Adanya peran Pokmaswas dalam pengawasan	
	Prosentase produksi perikanan yang diolah	persen	2	2,6	Melampaui		Sosialisasi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), sosialisasi alih teknologi dan informasi (ati) hasil perikanan, pelatihan pasca panen hasil perikanan	
2	Pariwisata							
	Cakupan Desa Wisata	persen	33,3	33,3	Sesuai		Peningkatan gerakan sadar wisata dan sapta pesona 10 desa.	Dinas Pariwisata
	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	persen	2.71	2.71	Sesuai		Pelatihan kebersihan, pentas seni di desa wisata	
	Cakupan Promosi Pariwisata	persen	2	2	Sesuai		Pameran pariwisata, pembuatan kalender wisata, pembuatan video klip pariwisata.	
	Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Community Based Tourism (CBT)	2 CBT	2 CBT	Sesuai		Penguatan kelembagaan pokdarwis/desa wisata, Temu saka pariwisata.	
3	Pertanian							
	Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	persen	100	100	Sesuai		Pendampingan kepada kelompok penerima kegiatan RJI, irigasi permompaan dan embung.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
	Ketersediaan sarana peternakan	persen	100	100	Sesuai		Penambahan populasi sapi	
	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	persen	100	100	Sesuai		Pembinaan dan pengawasan	
	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	persen	100	100	Sesuai		Pertemuan pelestarian itik turi dan pemurnian kambing bligon,	
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	100	100	Sesuai		Pengendalian penyakit hewan dan zoonosis	
	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	persen	100	100	Sesuai		Pengadaan bahan pengendali OPT berupa bahan non kimia/organik (pengadaan agensi pengendali hayati)	

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	persen	100	100	Sesuai		Fasilitasi petani/gabungan kelompok tani untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).	
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	6,8	6,8	Sesuai		Kondisi iklim basah (hujan sepanjang tahun) dan bantuan benih yang tepat waktu dengan mutu baik	
4	Kehutanan							
	-							
5	Energi dan Sumber Daya Mineral							
	-	-	-					-
6	Perdagangan							
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	persen	51	68,4	Melampaui		Pemberian surat keterangan izin usaha perdagangan sebanyak 32 surat keterangan	Dinas Perdagangan
	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dimodernisasi	persen	2	2	Sesuai		Pembangunan atau rehabilitasi pasar rakyat	
	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bapak antar waktu)	persen	7	11,8	Melampaui		Melaksanakan pemantauan harga barang kebutuhan pokok setiap hari dan stok barang kebutuhan pokok setiap minggu di 5 (lima) pasar pantauan	
	Nilai ekspor	Juta US\$	80 juta US\$	108,77	Melampaui		Memfasilitasi 6 UKM/IKM yang berpotensi ekspor mengikuti pameran produk ekspor	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	27	38,80	Melampaui		Tera dan tera ulang untuk 9035 UTTP	
	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	persen	25	25	Sesuai		Promosi BOS (Bantul Online Shop), kurasi produk UMKM	
	Jumlah desa/kalurahan preneur	Desa	8	8	Sesuai		Pelatihan kuliner di Desa Preneur,	
7	Perindustrian							
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	persen	85,97	85,97	Sesuai		Dokumen Naskah Akademik RPIK dan Masterplan KIHT Sedayu-Pajangan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	100	100	Sesuai		Melakukan verifikasi teknis permohonan melalui akun Siinas dan menerbitkan Berita Acara verifikasi	
8	Transmigrasi							
	Persentase Penempatan Transmigrasi	persen	74	74	Sesuai		Penyuluhan, pengarahan dan memberikan pelatihan kepada calon transmigrasi. Pemindahan dan penempatan transmigran	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
D	Layanan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan							
	Prosentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	persen	100	100	Sesuai		Koordinasi, desk keterisian data, validasi data	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pemerintahan
	Persentase Rancangan Perda menjadi Perda	persen	100	92	Belum tercapai	Peraturan perundang-undangan dari pusat yang cepat berubah		Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	persen	100	100	Sesuai			Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa (RKPDDes APBDes) tepat waktu	persen	92	92	Sesuai			Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	persen	100	100	Sesuai		Komitmen pimpinan	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian
	Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	persen	90	90	Sesuai			Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan
	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan dengan metode tender	persen	80	99,42	Melampaui		Identifikasi kebutuhan barang dan jasa, desk identifikasi, dan FGD manajemen kontrak	Sekretariat Daerah - Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	persen	82	82	Sesuai		Koordinasi	Sekretariat DPRD
E	Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
1	Penunjang Perencanaan							
	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	persen	100	100	Sesuai		Konsultasi public, forum lintas perangkat daerah, musyawarah perencanaan pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase capaian program keistimewaan urusan kelembagaan dan tata laksana yang berkualitas	persen	95	95	Sesuai		Pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan	
	Persentase kesesuaian perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	persen	100	100	Sesuai		Desk perencanaan, pengendalian, koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan.	
	Persentase penelitian yang menjadi rumusan kebijakan pembangunan daerah	persen	100	100	Sesuai		Rekomendasi hasil penelitian menjadi salah satu masukan kebijakan pembangunan	
2	Penunjang Keuangan							
	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	90	90	Sesuai		Pendampingan terhadap perangkat daerah penerima dana keistimewaan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sesuai		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, konsultasi dan pendampingan.	
	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sesuai		Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pengolahan data akuntansi, neraca daerah akhir tahun	
	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	persen	89	86,56	Belum tercapai		Efisiensi anggaran, sisa lelang.	
	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	persen	100	100	Sesuai		Perencanaan kebutuhan barang milik daerah, penyusunan RKBMD dan RKPMD	
	Persentase Realisasi PAD	persen	100	97,83	Belum tercapai	Verifikasi piutang pajak PBB P2 belum dapat terlaksana karena banyak data pendukung yang masih perlu pencermatan		

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
3	Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	persen	20	12,2	Belum tercapai	Perbedaan standarisasi harga barang dan jasa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Daerah DIY		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	persen	83	97,82	Melampaui		Komitmen dan kerjasama tim yang terjalin secara solid serta koordinasi dan kerja sama yang antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemda D.I Yogyakarta	
	Peta Kompetensi ASN	persen	6	17,36	Melampaui		Koordinasi dan kerjasama yang baik antara internal badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan perangkat daerah	
	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	persen	100	100	Sesuai		Kerjasama yang baik dari internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan peran aktif dari semua perangkat daerah, adanya komitmen dari pembina kepegawaian untuk meningkatkan kinerja ASN	
4	Penunjang Pengawasan							
	Meningkatnya ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	persen	12	12	Sesuai		Membangun aplikasi e-audit dari perencanaan sampai dengan tindaklanjut	
	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	persen	20	20	Sesuai		Adanya komitmen pimpinan yang tinggi	
F	Kewilayahan							
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	angka	95 Angka	95 Angka	Sesuai			Kapanewon Bambanglipuro
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	90%	90%	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100%	100%	Sesuai			

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90 persen	90 persen	Sesuai			Kapanewon Kasihan
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	90 Persen	90 Persen	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	90 persen	90 persen	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90 persen	90 persen	Sesuai			Kapanewon Sewon
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	80 persen	80 persen	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100 persen	100 persen	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen				
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	88 persen	88 persen	Sesuai			Kapanewon Pajangan
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	88 persen	88 persen	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	87 persen	87 persen	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90 persen	90 persen	Sesuai			Kapanewon Pundong
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	80 persen	80 persen	Sesuai			

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	87 persen	87 persen	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90 persen	90 persen	Sesuai			Kapanewon Jetis
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	80 persen	80 persen	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100 persen	100 persen	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	angka	90 persen	90 persen	Sesuai			Kapanewon Sanden
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	80 persen	80 persen	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	87 persen	87 persen	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	95 persen	95 persen	Sesuai			Kapanewon Imogiri
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	95 persen	95 persen	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	95 persen	95 persen	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90 persen	90 persen	Sesuai			Kapanewon Pleret

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	90 persen	90 persen	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	90 persen	90 persen	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90 persen	90 persen	Sesuai			Kapanewon Bantul
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100%	100%	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100%	100%	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen	Sesuai			
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100%	100%	Sesuai			Kapanewon Dlingo
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	persen	0%	0%	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100 persen	100 persen	Sesuai			
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100 persen	100 persen	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100 persen	100 persen	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen	Sesuai			
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100%	100%	Sesuai			Kapanewon Banguntapan

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	persen	0%	0%	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90 Angka	90 Angka	Sesuai			
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	90 Persen	90 Persen	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	90 persen	90 persen	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen	Sesuai			
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100%	100%	Sesuai			Kapanewon Srandakan
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	persen	0%	0%	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90%	90%	Sesuai			
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	95%	95%	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	95%	95%	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90%	90%	Sesuai			Kapanewon Kretek
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	80%	80%	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	87%	87%	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen	Sesuai			

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100%	100%	Sesuai			Kapanewon Pandak
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	persen	0%	0%	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	89 persen	89 persen	Sesuai			
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	82 persen	82 persen	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	82 persen	82 persen	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen	Sesuai			
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100%	100%	Sesuai			Kapanewon Sedayu
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	persen	0%	0%	Sesuai			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	90 Nilai	90 Nilai	Sesuai			
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100 persen	100 persen	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100 persen	100 persen	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen	Sesuai			
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100%	100%	Sesuai			Kapanewon Piyungan
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	persen	0%	0%	Sesuai			

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	92 Angka	92 Angka	Sesuai			
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100 persen	100 persen	Sesuai			
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100 persen	100 persen	Sesuai			
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	0 persen	0 persen	Sesuai			
G	Penunjang Pemerintahan Umum							
	Percentase pemilih yang berpartisipasi	persen	75					
	Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan	persen	100	100	Sesuai			
	Cakupan Pembinaan Ormas	persen	12,95	12,95	Sesuai			
	Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama	persen	100	100	Sesuai			
	Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD	jumlah	1	1	Sesuai			
	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	persen	29,37	69,45	Melampaui			
III	Aspek Daya Saing							
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,00 (BB)					TUJUAN
	Opini BPK	predikat	WTP					IKU PEMDA
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	Sesuai		Dokumen keuangan dipublikasikan di website	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	21.69	24.19	Melampaui		Peningkatan pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang syah	
	Nilai EKPPD	Angka	41.315					IKU PEMDA
	Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD	persen	100	100	Sesuai			
	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	persen	90	90	Sesuai			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	persen	100	100	Sesuai		Koordinasi dan kolaborasi	
	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	nilai	69	57,44	Belum tercapai	Perubahan mekanisme penilaian dari penilaian mandiri		Badan Kepegawaian,

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
						(self assessment) ke metode pengukuran langsung dalam sistem SAPK BKN, perubahan kebijakan/regulasi dalam manajemen ASN		Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal A	persen	85	85	Sesuai			Sekretariat Daerah
	Persentase Raperda yang Disetujui Bersama	persen	80	82	Melampaui			
	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	persen	74	75,47	Melampaui		Kesadaran perangkat daerah untuk mengelola arsipnya sesuai aturan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Nilai SKM	Angka	88.1					IKU PEMDA
	IKM Kinerja PTSP	nilai/angka	85.25	87	Melampaui			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	persen	99.81	99.85	Melampaui		Inovasi layanan untuk meningkatkan cakupan kinerja layanan,	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	lembaga	3	4	Melampaui		Tersedianya buku agregat kependudukan	
	IKM Kapanewon	angka	90	94.15	Melampaui			Kapanewon Bantul
	IKM Kapanewon	angka	95	95.72	Melampaui			Kapanewon Bambanglipuro
	IKM Kapanewon	angka	90	94.53	Melampaui			Kapanewon Dlingo
	IKM Kapanewon	angka	90	92.10	Melampaui			Kapanewon Imogiri
	IKM Kapanewon	angka	90	92.55	Melampaui			Kapanewon Jetis
	IKM Kapanewon	angka	92	92.83	Melampaui			Kapanewon Kretek
	IKM Kapanewon	angka	90	92.33	Melampaui			Kapanewon Kasihan
	IKM Kapanewon	angka	90	94.49	Melampaui			Kapanewon Pandak
	IKM Kapanewon	angka	90	95.08	Melampaui			Kapanewon Pundong
	IKM Kapanewon	angka	90	93.35	Melampaui			Kapanewon Pleret
	IKM Kapanewon	angka	92	95.11	Melampaui			Kapanewon Piyungan

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	IKM Kapanewon	angka	94	94.75	Melampaui			Kapanewon Pajangan
	IKM Kapanewon	angka	90	97.20	Melampaui			Kapanewon Sanden
	IKM Kapanewon	angka	90.00	93.40	Melampaui			Kapanewon Srandakan
	IKM Kapanewon	angka	90	90.49	Melampaui			Kapanewon Sewon
	IKM Kapanewon	angka	91	94.22	Melampaui			Kapanewon Sedayu
	IKM Kapanewon	angka	90	95.24	Melampaui			Kapanewon Banguntapan
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.25					IKU PEMDA
	Index kualitas layanan informasi publik	Angka	83.75	83.81	Melampaui		Kolaborasi antar perangkat daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai Tata kelola SPBE	angka	2.7	2.9	Melampaui		Kebijakan SPBE yang lengkap serta telah disahkan, dan pengelolaan inovasi proses bisnis	
	Nilai Indeks Pembangunan TIK	angka	6.6	6.94	Melampaui		Rekomendasi teknis pada proses pembangunan aplikasi di seluruh perangkat daerah, membangun Government Service Bus (GSB) sebagai media integrasi aplikasi	
	Nilai Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	82,5					IKU PEMDA
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	persen	82.5	93.3	Melampaui			Inspektorat
	Kapabilitas APIP	level	3	3	Sesuai			
	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	86.17					TUJUAN
	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	75.13					IKU PEMDA
	Tingkat Kemantapan Jalan	persen	78.43	78.93	Melampaui		Komitmen SDM pelaksana mengikuti perencanaan kegiatan (periodisasi) secara tepat waktu dan tersedianya Dana DAK	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Interpretasi 2022	Permasalahan*	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan/Solusi	PD Penanggung Jawab Utama
					Belum Tercapai (<)			
					Sesuai (=)			
					Melampaui (>)			
	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	persen	0.4	1.7	Melampaui			
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen	80.37	80.46	Melampaui			
	Penduduk berakses air minum layak	persen	83.56	83.56	Sesuai			
	Penduduk berakses sanitasi yang layak	persen	87.86	87.86	Sesuai			
	Penanganan kawasan kumuh	persen	10.59	44.72	Melampaui			
	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	%	1.83	10.7	Melampaui			Dinas Perhubungan
	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75.03					IKU PEMDA
	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	72	80	Melampaui			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	persen	74	76.26	Melampaui			
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	62.75					IKU PEMDA
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	40	36.67	Belum tercapai			Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	Angka	87	86.34	Belum tercapai			
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	57	64.34	Melampaui			
	Indeks Risiko Bencana	Indeks	131.02					IKU PEMDA
	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0.91	0.5	Belum tercapai	Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan pengembangan sistem pemulihan bencana belum optimal		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	menit	14.44	8.20	Melampaui		Kesiapsiagaan personal, kendaraan dan system operasi	

Sumber: dari berbagai sumber Tahun 2023 (diolah)

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kerangka ekonomi dan keuangan menggambarkan secara umum kondisi dan analisis statistik serta karakteristik perekonomian dan keuangan tahun anggaran sebelumnya dan prediksi perekonomian tahun anggaran berjalan. Bab ini membahas tantangan dan prediksi perekonomian Kabupaten Bantul Tahun 2024 serta kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bantul tahun 2024 mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan RKP 2024 dan RKPD DIY tahun 2024. Penyelarasan juga disesuaikan dengan kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan.

3.1.1 Kondisi dan Arah Perekonomian Nasional

3.1.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Saat ini ekonomi global dinilai sedang tidak baik-baik saja. Hal itu terlihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang mengalami koreksi ke bawah. Untuk tahun 2022, proyeksi dari *World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF)* hanya 3,2 persen dan tahun depan pertumbuhan ekonomi dunia juga diperkirakan akan semakin melemah di angka 2,7 persen. Dengan inflasi yang cenderung tinggi dan pertumbuhan

ekonomi yang menurun, ini memberikan sinyal bahwa situasi ekonomi dunia cukup tertekan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada tahun 2022 berhasil tumbuh 5,31 persen dibanding tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*). Perekonomian domestik tahun 2022 berhasil tumbuh berkat tingginya pertumbuhan pada triwulan IV-2022 yang naik 5,01 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka pre-Covid-19, yang rata-rata sebesar 5 persen sebelum pandemi. Meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi Covid-19 pada tahun 2020, perekonomian nasional terus menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat.

Dari sisi *demand*, mayoritas komponen pengeluaran pada kuartal IV-2022 tumbuh kuat. Didukung *windfall* komoditas unggulan, ekspor mampu tumbuh *double digit* mencapai 14,93 persen (*yoy*). Sementara itu, impor tumbuh 6,25 persen (*yoy*) dengan didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Kontributor utama dari PDB [produk domestik bruto) adalah konsumsi. Sektor konsumsi ini tumbuh 4,48 persen *yoy*. Dari investasi atau PMTB (pembentukan modal tetap bruto) itu tumbuh 3,33 persen dan konsumsi rumah tangga sebesar 5,7 persen. Meski demikian, konsumsi pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar -4,77 persen *yoy*.

Dari sisi *supply*, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di triwulan IV-2022. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99 persen (*yoy*) diikuti oleh sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 13,81 persen (*yoy*) yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64 persen (*yoy*).

Beberapa *leading indicators* menunjukkan prospek cerah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan kinerja ekonomi global. Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023, tercermin dari IKK [indeks keyakinan konsumen] yang masih tinggi menggambarkan optimisme ekonomi Indonesia ke depan yang masih bisa lebih kuat lagi.

Indikator sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang masih positif meski melambat, *yield* obligasi pemerintah yang melandai, nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menguat, dan rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB dalam level aman.

3.1.1.2 Arahan Perekonomian Nasional

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,7 - 6%;
- 2) Tingkat kemiskinan 6,0 - 7,0%;
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54;
- 4) Indeks Gini 0,360 - 0,374;
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,6 - 4,3%;
- 6) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,3%.

Terdapat 6 *Major Project* RPJMN 2020-2024 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

- 1) MP 1 - 10 Destinasi Pariwisata Prioritas
- 2) MP 4 - Industri 4.0 di 6 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronika, Kimia dan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- 3) MP 17 - Pembangunan *Science Techno Park*
- 4) MP 18 - Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*
- 5) MP 19 – Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh/ MP Perlinsos
- 6) MP 20 – Transformasi Digital

3.1.2 Kondisi dan Arahana Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta

3.1.2.1 Kondisi Perekonomian DIY

Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2022 mencapai Rp43,28 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp28,99 triliun.

Perekonomian DIY selama 2022 tumbuh sebesar 5,15 persen (c-to-c). Semua lapangan usaha tumbuh positif, dan yang tertinggi dicapai lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 18,26 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri sebesar 8,33 persen.

Perekonomian DIY triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 tumbuh sebesar 5,53 persen (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 15,85 persen, diikuti konstruksi sebesar 14,60 persen, dan jasa keuangan 13,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 7,03 persen.

Dibanding triwulan III-2022 perekonomian DIY tumbuh sebesar 3,00 persen (q-to-q). Lapangan usaha yang tumbuh tinggi adalah jasa lainnya, diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan. Dari sisi pengeluaran, terutama didorong oleh pertumbuhan konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto.

Struktur ekonomi DIY tahun 2022 didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan, informasi dan komunikasi, pertanian, konstruksi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum dengan kontribusi sebesar 52,01 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan kontribusi 61,63 persen, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto 32,57 persen, dan pengeluaran konsumsi pemerintah 14,60 persen.

3.1.2.2 Arahana Perekonomian DIY

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY Tahun 2022-2027, adalah: **“Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”**

Ada tiga komponen yang saling terkait dan menjadi prioritas dari visi tersebut. Ketiga hal itu adalah: (i) Reformasi Kalurahan, (ii) Kawasan Selatan, dan (iii) Teknologi Informasi, yang akan menjadi penopang terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja. Selanjutnya, apabila diposisikan, bahwa untuk mewujudkan Pancamulia Manusia Jogja, maka Kawasan Selatan akan diletakkan sebagai subyek prioritas pembangunan, melalui cara pandang atau jalan Reformasi Kalurahan, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Target indikator ekonomi makro yang akan dicapai Provinsi DIY pada tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,16-5,66%;
- 2) Tingkat Kemiskinan 11,26%;
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka 3,35-3,65%;
- 4) Indeks Gini 0,346;
- 5) Indeks Pembangunan Manusia 81,43.

3.1.3 Kondisi dan Arahana Perekonomian Kabupaten Bantul

3.1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara/daerah. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu membawa kondisi perekonomiannya relatif lebih baik.

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022, Target Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

Uraian	Capaian					Target RKP	Proyeksi RKP
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,47%	5,53%	-1,65%	4,99%	5,20%	3,97%	5,27%-5,66%

Sumber: BPS Kabupaten Bantul (diolah), 2023

Proyeksi LPE tahun 2024 menggunakan *model polinomial derajat 2* dan *model double exponensial smoothing* yaitu melihat kecenderungan perkembangan data 10 tahun terakhir dengan mengecualikan data tahun 2020 sebagai data *outlier*. Hasil proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi pada 2024 mencapai 5,27%-5,66% lebih baik dari target tahun 2024 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 4,48%. Hal ini disebabkan capaian LPE pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2021 dan 2022 semakin membaik melebihi target yang telah ditetapkan.

Beberapa sektor ekonomi berhasil mencapai kondisi normal, permintaan masyarakat juga menunjukkan perkembangan membaik. Meningkatnya daya beli masyarakat, kunjungan wisatawan ke Bantul yang meningkat, pelajar dan mahasiswa sudah aktif kembali, dan faktor lain yang menyebabkan peningkatan permintaan masyarakat.

3.1.3.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah.

Tabel 3.2 Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022, Target Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

Uraian	Capaian					Target RKP	Proyeksi RKP
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan	13,43%	12,92%	13,50%	14,04%	12,27%	12,90%	10,99%-11,50%

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Proyeksi Tingkat Kemiskinan tahun 2024 menggunakan *model logaritmik dan model eksponensial* dengan melihat perkembangan data tahun 2015-2022 tanpa menyertakan data tahun 2020 dan 2021. Hasil proyeksi Tingkat Kemiskinan pada tahun 2024 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu 10,99%-11,50% dengan pertimbangan kondisi perekonomian yang semakin membaik pasca pandemi Covid 19. Proyeksi ini lebih baik dari target tahun 2024 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 12,50%.

Idealnya besaran nilai tingkat kemiskinan adalah sekecil mungkin yang artinya sangat sedikit penduduk yang dikategorikan miskin. Maka perlu dilakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara konsisten untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Presiden RI Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023.

Tabel 3.3 Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022

Uraian	2021	2022
Tingkat Kemiskinan Ekstrem Bantul	2,65	2,59
Tingkat Kemiskinan Ekstrem DIY	2,63	2,41
Tingkat Kemiskinan Ekstrem Nasional	2,14	2,04

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Strategi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan:

- mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
- meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
- mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
- pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan

e. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi tersebut didukung dengan kegiatan:

- Peningkatan jumlah sasaran penerima Boga Sehat untuk lansia dan difabel.
- Pemberian alat bantu difabel.
- Perbaikan RTLH dan jambanisasi.
- Peningkatan keterampilan wirausaha.
- Padat karya.

Kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh. Untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, perlu melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bantul dengan diterbitkannya SK Bupati Kab. Bantul Nomor 131 Tahun 2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bantul. Penerbitan SK ini dengan maksud agar program penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi tepat sasaran.

Program khusus yang menjadi ikon di Bantul dalam penanganan kemiskinan adalah Program Boga Sehat. Program boga sehat merupakan pemberian makanan sesuai dengan standar nilai gizi tertentu untuk meningkatkan derajat kesehatan yang layak dengan sasaran lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas berat yang sudah ada sejak tahun 2019 untuk 11 Kapanewon dan 53 Kalurahan. Dasar hukum pelaksanaan boga sehat terdapat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Boga Sehat. Pada tahun 2024 terdapat penambahan cakupan pelaksanaan boga sehat menjadi seluruh kapanewon dan kalurahan di Kabupaten Bantul.

3.1.3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak.

Tabel 3.4 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022, Target Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

Uraian	Capaian					Target RKPD	Proyeksi RKPD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia	79,45	80,01	80,01	80,28	80,69	81,09	81,00-81,50

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 menggunakan *model Polinomial Derajat 2* dan *model double exponensial smoothing*. Nilai IPM 2024 diproyeksikan akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi 81,00-81,50, namun di bawah target tahun 2024 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 81,54, dengan pertimbangan capaian tahun 2022 masih 80,69.

Perlu upaya meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat yang semakin membaik, dengan meningkatkan usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah. Disisi lain tingkat kemiskinan yang menurun.

3.1.3.4 Rasio Gini

Besarnya ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat dengan besarnya nilai Indeks Gini (Koefisien Gini). Nilai Indeks Gini berkisar dari angka nol sampai dengan 1 ($0 \leq \text{Indeks Gini} \leq 1$). Semakin mendekati angka 1 maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut semakin besar.

Tabel 3.5 Capaian Rasio Gini Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022,
 Target Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

Uraian	Capaian					Target RKPD	Proyeksi RKPD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Gini	0,448	0,422	0,418	0,441	0,410	0,350	0,346-0,394

Sumber: BPS, 2023

Proyeksi Rasio Gini tahun 2024 menggunakan *model Polinomial Derajat 3*. Nilai Rasio Gini 2024 diproyeksikan akan mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi 0,346-0,394. Nilai ini lebih tinggi dari target tahun 2024 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 0,332 dengan pertimbangan capaian tahun 2022 masih 0,410.

Perlu upaya dari pemerintah agar angka indeks gini dapat ditekan lebih rendah dari nilai prediksinya, sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat dapat teratasi dan tidak mengarah pada tingkat ketimpangan tinggi (nilai Indeks Gini lebih besar dari 0,5). Salah satu Upaya adalah dengan penguatan tiga sektor ekonomi unggulan yaitu Pertanian dalam arti luas, Industri, dan Pariwisata.

3.1.3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

 Tabel 3.6 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022,
 Target Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

Uraian	Capaian					Target RKPD	Proyeksi RKPD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,72%	3,06%	4,06%	4,04%	3,97%	3,50%	3,35%-3,65%

Sumber: BPS Kabupaten Bantul (diolah), 2023

Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 menggunakan Model *Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)*. Nilai TPT 2024 diproyeksikan akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi 3,35%-3,65% dari angkatan kerja. Nilai ini lebih tinggi dari target tahun 2024 dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 3,40% dengan pertimbangan capaian tahun 2022 sudah mencapai 3,97%.

Idealnya jumlah pengangguran diupayakan menjadi seminimal mungkin. Maka dari itu diperlukan kebijakan khusus yang dapat diupayakan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Bantul, sehingga diperlukan identifikasi terkait determinan pengangguran di Kabupaten Bantul. Hal ini sebagai masukan bagi pengambil kebijakan dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.

3.1.3.6 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2024

Kerangka ekonomi makro tahun 2024 meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan, IPM, Indeks Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Target indikator ekonomi makro dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Uraian	Arahan DIY Target 2024	Proyeksi RKPD 2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,16-5,66%	5,27%-5,66%
2	Tingkat Kemiskinan	12,50%	10,99%-11,5%
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,43	81,00-81,50
4	Indeks Gini	0,346	0,346-0,394
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,35-3,65%	3,35%-3,65%

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Proyeksi ekonomi makro tahun 2024 pada tabel di atas merupakan hasil proyeksi dari capaian tahun 2018 sampai dengan 2022 dan arahan DIY.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2024 yang tertuang dalam Dokumen RPJMD 2021-2026 adalah:

- 1) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian melalui kebijakan peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian serta pengembangan agrobisnis dan agrowisata,

- 2) Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dengan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- 3) Melindungi produk lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran dengan modernisasi pasar rakyat/ tradisional
- 4) Meningkatkan kualitas UMKM dengan peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro,
- 5) Meningkatkan pertumbuhan industri dengan pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif.
- 6) Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif dengan peningkatan dan pengembangan sumberdaya ekonomi kreatif.

Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul dan menjawab isu strategis pada Tahun 2024 difokuskan pada penguatan tiga sektor ekonomi unggulan yaitu Pertanian dalam arti luas, Industri, dan Pariwisata. Hal ini dilakukan melalui upaya-upaya:

1) Percepatan penyediaan infrastruktur

Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Hal tersebut dilakukan melalui:

- a) Meningkatkan kualitas jalan, irigasi, jaringan Teknologi dan Informasi.
- b) Membangun sarana dan prasarana fasilitas ekonomi publik
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa.

2) Pengembangan sektor ekonomi potensial

Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter wilayah. Upaya pengembangan sektor ekonomi potensial memerlukan adanya keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

3) Percepatan sektor pertanian

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian dan perikanan. Dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a) Memperkuat kelembagaan petani/peternak
 - b) Meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian, melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan pengembangan benih tanaman pangan pada komoditas bawang merah, cabai, dan kedelai.
 - c) Meningkatkan kualitas dan kesehatan ternak melalui pelatihan budidaya yang ASUH, penyediaan obat-obatan dan vaksin bagi ternak.
 - d) Mengembangkan Sistem Pertanian Terintegrasi.
 - e) Memperkuat jaringan pemasaran produk pertanian.
 - f) Meningkatkan produksi perikanan pada komoditas lele.
- 4) Percepatan sektor industri
- Mendorong berkembangnya sektor industri kreatif dan berdaya saing tinggi, dilakukan upaya:
- a) Meningkatkan kualitas produk lokal oleh usaha mikro melalui peningkatan kapasitas SDM.
 - b) Meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas usaha mikro dan industri kecil dengan pendampingan untuk memastikan jaminan produk, keamanan, dan standar.
 - c) Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan integrasi usaha mikro dan industri kecil ke perekonomian digital melalui pengembangan *e-smart* industri kecil dan digitalisasi usaha mikro.
 - d) Meningkatkan nilai ekspor industri kerajinan.
 - e) Mengembangkan infrastruktur fisik (Kawasan Industri, Kawasan Peruntukan Industri dan Sentra Industri).
- 5) Percepatan sektor pariwisata
- a) Mengembangkan sektor pariwisata dilakukan dengan strategi pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) dan penguatan atraksi, akses dan amenities. Hal tersebut diaplikasikan pada destinasi

unggulan pariwisata tematik, seperti wisata bahari, sejarah, religi, dan tradisi seni budaya.

- b) Mengembangkan konsep wisata yang mengedepankan *experience* atau pengalaman wisatawan, memadukan wisata kuliner dengan *view* keindahan alam
 - c) Meningkatkan layanan publik seperti transportasi, keamanan dan kenyamanan wisatawan dan masyarakat serta *hospitality* (keramahan-tamahan) di semua ekosistem pariwisata.
 - d) Berperan aktif dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang siap dan sesuai dengan 4 aspek CHSE adalah *Cleanliness* (kebersihan), *Health* (kesehatan), *Safety* (keamanan), dan *Environment Sustainability* (kelestarian lingkungan).
 - e) Memperkuat *branding* dan promosi wisata di daerah dengan mengoptimalkan teknologi dan *e-commerce*.
- 6) Pencapaian Kabupaten Bantul menuju Kota Kreatif Dunia.

Jaringan Kota Kreatif Dunia versi UNESCO atau *UNESCO Creative Cities Network* (UCCN) akan dicapai dengan upaya peningkatan kolaborasi antar *stakeholder*. Berbagai potensi industri kerajinan telah berkembang di hampir seluruh wilayah Bantul, maka Kabupaten Bantul mem-branding sebagai *City of Crafts and Folk Art*.

Program jangka pendek dilaksanakan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 berupa pengembangan lokus dan infrastruktur kreatif, kapasitas SDM, dan penguatan *positioning product* Kabupaten Bantul di tingkat internasional. Pencapaian program jangka pendek melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, komunitas, pelaku usaha, media, dan lembaga keuangan yang saling bersinergi satu dengan lainnya.

3.1.3.7 Inovasi Pembangunan Tahun 2024

Pemenuhan kebutuhan pangan akan mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketahanan pangan dan gizi hendaknya tidak hanya

berorientasi pada sektor pangan dan pertanian yang berada di hulu serta kesehatan dan gizi di hilirnya, tetapi melibatkan aspek yang lebih luas. Ketahanan pangan dan gizi dapat dicapai melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu, terukur dan berkelanjutan.

Di Indonesia prevalensi balita stunting pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan sebanyak 2,8% yaitu dari 24,4% menjadi 21,6%. Penurunan ini juga terjadi di Kabupaten Bantul, pada tahun 2021 prevalensi balita stunting sebesar 19,1% menurun menjadi 14,9% di tahun 2022. Target akhir RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026 prevalensi balita stunting adalah 7 %. Target ini masih jauh dari capaian pada tahun 2022. Untuk itu diperlukan upaya intervensi program yang lebih banyak lagi.

Inovasi Bantul dalam rangka penurunan prevalensi balita stunting adalah dengan pemberian konsumsi **Telur Bahagia** bagi balita stunting. Telur Bahagia dihasilkan dari Budidaya Ayam Petelur *Cage-Free* (tidak dikandangkan) dengan memberi makanan yang kaya mineral Selenium. Budidaya Ayam Petelur *Cage-Free* akan dikembangkan dengan melibatkan warga miskin dan Kelompok Wanita Tani di pekarangan sekitar tempat tinggalnya. Dengan inovasi Telur Bahagia diharapkan angka prevalensi balita stunting dan kemiskinan Kabupaten Bantul menurun.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah.

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan di tempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang merupakan salah satu faktor penting dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penentuan kebijakan keuangan daerah diperlukan gambaran kondisi keuangan daerah yang meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

3.2.1 Kemampuan Keuangan Daerah

3.2.1.1 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah.

Kapasitas Fiskal juga menjadi pertimbangan dalam pemberian pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Selain itu, kapasitas fiskal daerah juga menjadi pertimbangan untuk mengusulkan pemerintah daerah sebagai penerima hibah sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 991), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Terdapat perbedaan formulasi dan pengelompokkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah pada kedua PMK tersebut di atas.

Tabel 3.8 Kategori Fiskal Daerah dalam PMK

PMK Nomor 116/PMK.07/2021	PMK Nomor 193/PMK.07/2022																								
Formula: $IKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{(\sum KFD_{kabupaten/kota})/n}$ Keterangan: $IKFD_{kabupaten/kota-i}$ = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota $KFD_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota $\sum KFD_{kabupaten/kota}$ = Total Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota n = 508 (lima ratus delapan) daerah kabupaten/kota	Formula: $RKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{Belanja Pegawai_{kabupaten/kota-i}}$ Keterangan: $RKFD_{kabupaten/kota-i}$ = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota $KFD_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota $Belanja Pegawai_{kabupaten/kota-i}$ = Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota																								
<table> <tr> <th>Rentang IKFD</th><th>Kategori KFD</th></tr> <tr> <td>$IKFD < 0,530$</td><td>Sangat rendah</td></tr> <tr> <td>$0,530 \leq IKFD < 0,727$</td><td>Rendah</td></tr> <tr> <td>$0,727 \leq IKFD < 1,053$</td><td>Sedang</td></tr> <tr> <td>$1,053 \leq IKFD < 1,838$</td><td>Tinggi</td></tr> <tr> <td>$IKFD \geq 1,838$</td><td>Sangat tinggi</td></tr> </table>	Rentang IKFD	Kategori KFD	$IKFD < 0,530$	Sangat rendah	$0,530 \leq IKFD < 0,727$	Rendah	$0,727 \leq IKFD < 1,053$	Sedang	$1,053 \leq IKFD < 1,838$	Tinggi	$IKFD \geq 1,838$	Sangat tinggi	<table> <tr> <th>Rentang RKFD</th><th>Kategori KFD</th></tr> <tr> <td>$RKFD < 1,171$</td><td>Sangat rendah</td></tr> <tr> <td>$1,171 \leq RKFD < 1,504$</td><td>Rendah</td></tr> <tr> <td>$1,504 \leq RKFD < 1,838$</td><td>Sedang</td></tr> <tr> <td>$1,838 \leq RKFD < 2,171$</td><td>Tinggi</td></tr> <tr> <td>$2,171 \leq RKFD$</td><td>Sangat tinggi</td></tr> </table>	Rentang RKFD	Kategori KFD	$RKFD < 1,171$	Sangat rendah	$1,171 \leq RKFD < 1,504$	Rendah	$1,504 \leq RKFD < 1,838$	Sedang	$1,838 \leq RKFD < 2,171$	Tinggi	$2,171 \leq RKFD$	Sangat tinggi
Rentang IKFD	Kategori KFD																								
$IKFD < 0,530$	Sangat rendah																								
$0,530 \leq IKFD < 0,727$	Rendah																								
$0,727 \leq IKFD < 1,053$	Sedang																								
$1,053 \leq IKFD < 1,838$	Tinggi																								
$IKFD \geq 1,838$	Sangat tinggi																								
Rentang RKFD	Kategori KFD																								
$RKFD < 1,171$	Sangat rendah																								
$1,171 \leq RKFD < 1,504$	Rendah																								
$1,504 \leq RKFD < 1,838$	Sedang																								
$1,838 \leq RKFD < 2,171$	Tinggi																								
$2,171 \leq RKFD$	Sangat tinggi																								
Kabupaten Bantul mempunyai nilai 1,487	Kabupaten Bantul mempunyai nilai 1,444																								
Kategori: Tinggi	Kategori: Rendah																								

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan RI.

3.2.1.2 Kemandirian Fiskal

Kemandirian Fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah tanpa tergantung bantuan dari luar termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian Fiskal daerah akan menghasilkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai IKF maka semakin tinggi kemandirian Fiskal suatu daerah. Penghitungan IKF menggunakan formula Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Berikut disajikan klasifikasi kondisi kemandirian fiskal daerah.

Tabel 3.9 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah

Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum Mandiri
$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju Kemandirian
$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
$0,75 \leq IKF < 1,00$	Sangat Mandiri

Sumber: Perhitungan Sampurna (2018) dalam laporan reviu BPKRI, 2022

Nilai IKF Kabupaten Bantul pada tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Nilai IKF	Kategori
2018	462.653.956.229	2.227.752.027.349	0,21	Belum mandiri
2019	505.929.472.001	2.269.539.168.278	0,22	Belum mandiri
2020	479.610.812.119	2.210.246.133.186	0,22	Belum mandiri
2021	491.670.724.028	2.235.655.701.355	0,22	Belum mandiri
2022	540.572.423.373	2.260.577.439.195	0,24	Belum mandiri

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2023

Nilai Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten Bantul selama lima tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018, nilai IKF sebesar 0,21, selanjutnya pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,22 hingga tahun 2022 menjadi 0,24. Nilai tersebut masih dalam kategori “belum mandiri”, artinya sangat tergantung dengan dana transfer dalam membiayai belanja daerah.

3.2.1.3 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

 Tabel 3.11 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2018-2022

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN (Rp.Juta)	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (Rp.Juta)	TOTAL PENERIMAAN (Rp.Juta)	TOTAL BELANJA (Rp.Juta)	PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Rp.Juta)	TOTAL PENGELUARAN (Rp.Juta)	KEMAMPUAN MENDANAI BELANJA DAERAH
1	2	3	4=(2+3)	5	6	7=(5+6)	8=(4:7)
2018	2.227.752	256.630	2.484.382	2.165.652	39.573	2.205.225	1,127
2019	2.269.539	296.985	2.566.524	2.283.585	48.892	2.332.477	1,100
2020	2.210.246	238.679	2.448.925	2.199.124	11.599	2.210.723	1,108
2021	2.235.656	244.577	2.480.233	2.226.674	13.141	2.239.815	1,107
2022	2.260.577	259.029	2.519.606	2.272.475	31.500	2.303.975	1,094

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2023

Selama periode tahun 2018-2022, kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Bantul sudah cukup baik yang ditandai dengan angka kemampuan mendanai belanja daerah selama periode tersebut selalu

berada di atas angka 1 yang berarti total penerimaan daerah selalu melebihi total pengeluaran daerah.

3.2.1.4 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan, dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan secara tepat.

Kapasitas riil keuangan adalah kemampuan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan (pendapatan *earmark*) dan belanja tertentu.

Perhitungan kapasitas fiskal dilakukan untuk memprediksi ketersediaan dana yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul pada program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024 yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.12 Perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

Uraian	TARGET RPJMD Tahun 2024
	(Rp. Juta)
Pendapatan Daerah	2.214.198
Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Peraturan Daerah)	-
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	146.647
Total Penerimaan	2.360.845
Dikurangi	-
Belanja Wajib Mengikat	2.037.671
Pengeluaran Pembiayaan	25.000
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	298.174
Persentase	12,63%

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Keterangan: belum memasukkan DAK fisik

Persentase proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Bantul masih relatif kecil, pada tahun 2024 sebesar 12,63%. Hal ini disebabkan adanya pemilu serentak pada tahun 2024.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain diantaranya:

- 1) Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan dari Luar Negeri;
- 2) Optimalisasi dana CSR sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah;
- 3) Upaya merintis kerjasama pemerintah dengan Perguruan Tinggi, badan usaha/swasta.

3.2.2 Analisa Keuangan Daerah

Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, dan neraca daerah. Realisasi pelaksanaan APBD tahun 2020-2022 akan menjadi evaluasi untuk memproyeksikan anggaran tahun 2024.

Tabel 3.13 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

No			Uraian (Permendagri 13 Tahun 2006)	Realisasi Tahun 2020 (Rp.Juta)	Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2021 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1			2	3	4	5	6	7
1			PENDAPATAN DAERAH		PENDAPATAN DAERAH			
1	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH	479.611	PENDAPATAN ASLI DAERAH	491.671	540.572	0,06
1	1	1	Pajak Daerah	200.826	Pajak Daerah	203.758	252.857	0,12
1	1	2	Retribusi Daerah	30.466	Hasil Retribusi Daerah	27.769	42.179	0,18
1	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.138	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	20.053	20.840	- 0,09
1	1	4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	223.181	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	240.091	224.696	0,003
1	2		DANA PERIMBANGAN	1.541.371	PENDAPATAN TRANSFER	1.656.162	1.712.038	0,05
				1.354.922	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.235	1.469.252	0,04
				186.449	Pendapatan Transfer Antar Daerah	261.927	242.786	0,14
1	3		LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	83.860	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	87.823	7.967	- 0,69
1	3	1	Pendapatan Hibah	83.860	Pendapatan Hibah	6.167	6.725	- 0,72
					Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81.656	22	- 0,98
					Pendapatan yang tidak bisa dikelompokkan		1.220	
			JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.104.841	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.235.656	2.260.577	0,04

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah),2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun Pendapatan Daerah adalah 0,04%, dengan rincian rata-rata Pertumbuhan Asli Daerah (PAD) 0,06%, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer 0,05%, dan rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -0,69%.

Tabel 3.14 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

No			Uraian (Permendagri 13 Tahun 2006)	Realisasi Tahun 2020 (Rp.Juta)	Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2021 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1			2	3	4	5	6	7
2			BELANJA DAERAH		BELANJA DAERAH			
2	1		Belanja Tidak Langsung	1.170.874	Belanja Operasi	1.670.459	1.721.577	0,21
2	1	1	Belanja Pegawai	799.455	Belanja Pegawai	894.085	853.342	- 0,04
					Belanja Barang dan Jasa	713.171	768.495	0,15
2	1	2	Belanja Hibah	84.738	Belanja Hibah	60.212	91.629	0,04
2	1	3	Belanja Bantuan Sosial	760	Belanja Bantuan Sosial	2.991	8.110	2,27
					Belanja Transfer	255.245	309.515	0,10
2	1	4	Belanja Bagi Hasil	22.872	Belanja Bagi Hasil	26.103	26.103	0,07
2	1	5	Belanja Bantuan Keuangan	161.478	Belanja Bantuan Keuangan	229.142	283.412	0,32
2	1	7	Belanja Tidak Terduga	101.572	Belanja Tidak Terduga	26.691	19.684	- 0,56
2	2		Belanja Langsung	922.845				
2	2	1	Belanja Pegawai	126.114				
2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	580.329				
2	2	3	Belanja Modal	216.402	Belanja Modal	274.279	221.698	0,01
			JUMLAH BELANJA DAERAH	2.093.719	Jumlah Belanja Daerah	2.226.674	2.272.475	0,04

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun Belanja Daerah adalah 0,04%. Dengan rincian rata-rata pertumbuhan Belanja Operasi 0,21%, Belanja Transfer 0,10%, Belanja Tidak Terduga -0,56% dan Belanja Modal 0,01%.

Tabel 3.15 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

No			Uraian (Permendagri 13 Tahun 2006)	Realisasi Tahun 2020 (Rp.Juta)	Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2021 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1			2	3	4	5	6	7
3			PEMBIAYAAN DAERAH		PEMBIAYAAN			
3	1		Penerimaan Pembiayaan		Penerimaan Pembiayaan			
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	234.048	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	238.201	240.504	0,01
3	1	3	Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	713	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.747	18.363	4,07
3	1	4	Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah	3.918	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.629	162	- 0,80

No			Uraian (Permendagri 13 Tahun 2006)	Realisasi Tahun 2020 (Rp.Juta)	Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)	Realisasi Tahun 2021 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1			2	3	4	5	6	7
			JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	238.679	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	244.577	259.029	0,04
3	2		Pengeluaran Pembiayaan		Pengeluaran Pembiayaan			
3	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	8.001	Penyertaan Modal Daerah	12.341	31.500	0,98
3	2	5	Pengeluaran Dana Bergulir	3.598	Pemberian Pinjaman Daerah	800	0	- 1,00
			JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.599	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.141	31.500	0,65
			SURPLUS /(DEFISIT) PEMBIAYAAN	227.080	SURPLUS /(DEFISIT) PEMBIAYAAN	231.436	227.529	0,001
			Selisih Lebih Tahun Anggaran Berkenaan	238.201	Selisih Lebih Tahun Anggaran Berkenaan	240.418	215.632	- 0,05

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun Penerimaan Pembiayaan adalah 0,04%, lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan 0,65%.

Tabel 3.16 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2021 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET				
ASET LANCAR				
KAS	238.201.393.766,17	240.503.861.658,33	215.631.865.732,74	-4,86%
Kas Di Kas Daerah	200.803.065.465,07	193.368.116.811,73	186.937.014.179,24	-3,51%
Kas Di Bendahara Pengeluaran	577.835.200,00	64.990.196,00	39.974,00	-99,17%
Kas Di Bendahara Penerimaan	114.418.736,00	111.276.500,00	212.692.566,00	36,34%
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	29.197.443.270,10	45.745.324.646,60	28.290.251.443,50	-1,57%
Kas di Pengelola Dana Bergulir			20.000,00	
Kas di Bendahara BOS	7.508.631.095,00	1.214.153.504,00	191.847.570,00	-84,02%
Piutang	63.139.859.320,17	89.811.088.207,77	67.183.625.670,65	3,15%
Piutang Pajak	130.486.662.478,99	140.875.161.976,19	149.648.052.721,50	7,09%
Piutang Retribusi	1.229.028.166,85	1.937.392.583,85	1.737.998.367,85	18,92%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di				
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	55.014.174.114,87	74.501.657.507,87	63.838.312.888,00	7,72%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat				
Piutang Transfer Antar Daerah		5.709.166.800,47	1.745.092.380,00	-44,71%
Piutang Lainnya	14.829.776.773,75	10.875.947.879,00	10.707.993.879,00	-15,03%
Penyisihan Piutang	-40.184.397.341,12	-144.088.238.539,61	- 160.493.824.565,70	99,85%
Belanja Dibayar Dimuka	1.353.626.878,84	657.111.322,31	552.101.334,28	-36,14%
Persediaan	62.671.691.152,79	60.367.722.354,00	41.025.618.885,38	-19,09%
Jumlah Aset Lancar	373.132.656.181,72	391.339.783.542,41	324.393.211.623,04	-6,76%
Investasi Jangka Panjang				
Investasi Nonpermanen				

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2021 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Pinjaman Jangka Panjang				
Investasi dalam SUN				
Investasi Nonpermanen lainnya				
Jumlah Investasi nonpermanen	-	-		
Investasi Permanen				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	201.398.147.561,17	203.992.913.215,88	216.419.085.966,95	3,66%
Investasi Permanen Lainnya	159.601.719.393,81	175.962.819.034,35	180.180.711.776,12	6,25%
Jumlah Investasi Permanen	360.999.866.954,98	379.955.732.250,23	396.599.797.743,07	4,81%
Jumlah Investasi Jangka Panjang	360.999.866.954,98	379.955.732.250,23	396.599.797.743,07	4,81%
Aset Tetap				
Tanah	528.259.669.252,00	574.701.276.878,00	580.066.622.548,00	4,79%
Peralatan dan Mesin	857.132.572.729,50	944.028.237.113,99	1.000.515.263.647,17	8,04%
Gedung dan Bangunan	1.347.477.527.787,88	1.394.672.601.555,26	1.439.700.383.132,31	3,37%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.418.835.722.267,21	2.574.516.256.456,05	2.675.873.393.387,26	5,18%
Aset Tetap Lainnya	74.559.439.255,28	79.576.885.504,48	82.030.138.609,96	4,89%
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-		
Akumulasi Penyusutan	-2.489.343.832.341,61	-2.731.082.314.804,04	2.935.485.232.100,56	8,59%
Jumlah Aset Tetap	2.736.921.098.950,26	2.836.412.942.703,75	2.842.700.569.224,14	1,91%
Dana Cadangan				
Dana Cadangan				
Jumlah Dana Cadangan				
Aset Lainnya				
Tagihan Penjualan Angsuran				
Tagihan Jangka Panjang	15.311.414,00	15.311.414,00	15.311.414,00	0,00%
TGR				
Aset Tak berwujud	24.725.518.327,43	25.046.927.422,43	24.175.510.060,43	-1,12%
Aset Lain-lain				
Aset lain yang dibatasi penggunaannya	1.501.519.876,00	1.910.304.396,00	1.893.318.146,00	12,29%
Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud	-14.783.929.409,70	-16.208.789.124,40	16.333.937.538,00	5,11%
Jumlah Aset Lainnya	11.458.420.207,73	10.763.754.108,03	9.750.202.082,43	-7,75%
JUMLAH ASET	3.482.512.042.294,68	3.618.472.212.604,41	3.573.443.780.672,68	1,30%
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
Utang Bunga				
Bagian Lancar Utang Jangka panjang				
Pendapatan Diterima Dimuka	1.920.229.253,27	1.362.983.135,40	932.423.864,37	-30,32%
Utang Belanja	36.850.544.830,30	48.749.001.437,76	45.045.037.924,87	10,56%
Utang Jangka Pendek Lainnya				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	38.770.774.083,57	50.111.984.573,16	45.977.461.789,24	8,90%
Kewajiban Jangka Panjang				
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan				
Utang Dalam Negeri-Obligasi				

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2021 (Rp.Juta)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Premium (diskonto) obligasi				
Utang Jangka Panjang Lainnya				
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				
JUMLAH KEWAJIBAN	38.770.774.083,57	50.111.984.573,16	45.977.461.789,24	8,90%
EKUITAS				
Ekuitas	3.443.741.268.211,12	3.568.360.228.031,25	3.527.466.318.883,44	1,21%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.482.512.042.294,68	3.618.472.212.604,41	3.573.443.780.672,68	1,30%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun Aset adalah 1,30%, rata-rata pertumbuhan Kewajiban 8,9% dan rata-rata pertumbuhan Ekuitas 1,21%.

3.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024

Pada tahun 2024, merupakan kondisi pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sudah berjalan normal sehingga perputaran roda perekonomian sudah dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Tahun 2024 dengan asumsi perekonomian sudah membaik, maka dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu disusun kerangka pendanaan daerah yang matang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah

b) Pendapatan transfer

c) Lain-lain Pendapatan yang sah

Terhitung Tahun 2021 perhitungan Pendapatan Daerah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan

Belanja daerah terdiri dari:

a) Belanja Operasi

b) Belanja Modal

c) Belanja Tidak Terduga

d) Belanja Transfer

3) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari:

a) Penerimaan pembiayaan

b) Pengeluaran pembiayaan daerah

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Belanja Daerah antara lain:

1) Belanja daerah diarahkan pada:

a) Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan;

b) Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur;

c) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;

d) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;

e) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik;

f) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Menciptakan Kemandirian Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;

- g) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
 - h) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat (public interest);
 - i) Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro (bottom up);
 - j) Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja;
 - k) Menjamin terlaksananya program kegiatan skala besar dan prioritas.
- 2) Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka belanja diprioritaskan pada:
- a) Prioritas I: diperuntukan Belanja wajib dan mengikat serta belanja untuk pemenuhan penerapan pelayanan dasar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Prioritas II: Untuk Belanja yang berkaitan dengan program sasaran yang menjadi unggulan kepala daerah serta mempunyai daya ungkit tinggi pada capaian visi/misi daerah.
 - c) Prioritas III: Belanja yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya seperti belanja hibah, bantuan sosial.
Pengalokasian dana pada prioritas III dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Alokasi anggaran wajib (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) sering disebut sebagai *mandatory spending*. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
 - b) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

- c) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- d) Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

3.2.3.1 Pendapatan Daerah Tahun 2024

a. Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya yang dilakukan dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran, dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Tabel 3.17 Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

No	Uraian (Permendagri 13 Tahun 2006)		Tahun 2020 (%)	Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)
1	2		3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH			PENDAPATAN DAERAH		
1	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22,79	PENDAPATAN ASLI DAERAH	21,99	23,91
1	1	1 Pajak Daerah	9,54	Pajak Daerah	9,11	11,19
1	1	2 Retribusi Daerah	1,45	Hasil Retribusi Daerah	1,24	1,87
1	1	3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,19	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,90	0,92
1	1	4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10,60	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10,74	9,94
1	2	DANA PERIMBANGAN	73,23	PENDAPATAN TRANSFER	74,08	75,73
			64,37	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	62,36	64,99
			8,86	Pendapatan Transfer Antar Daerah	11,72	10,74
1	3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,98	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,93	0,35
1	3	1 Pendapatan Hibah	3,98	Pendapatan Hibah	0,28	0,30
				Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3,65	0,001
						0,05

No	Uraian (Permendagri 13 Tahun 2006)	Tahun 2020 (%)	Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	100,00	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	100,00	100,00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa komponen Pendapatan Daerah terbesar adalah dari Pendapatan Transfer, diikuti Pendapatan Asli Daerah dan terkecil dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Persentase Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah meningkat dari tahun ke tahun sebaliknya Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang cenderung menurun.

b. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Tabel 3.18 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022

Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)	APBD Perubahan Tahun 2022 (Rp. Juta)	Realisasi APBD Tahun 2022 (Rp. Juta)	Selisih (3-2)	Kinerja
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	520.854	540.572	19.718	Over Target
Pajak Daerah	234.088	252.857	18.769	Over Target
Hasil Retribusi Daerah	49.690	42.179	-7.511	Under Target
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	23.707	20.840	-2.867	Under Target
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	213.369	224.696	11.328	Over Target
PENDAPATAN TRANSFER	1.702.969	1.712.038	9.069	Over Target
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.485.869	1.469.252	-16.617	Under Target
Pendapatan Transfer Antar Daerah	217.100	242.786	25.686	Over Target
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.000	7.967	747	Over Target
Pendapatan Hibah	6.000	6.725	725	Over Target
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	22	22	Over Target
Pendapatan yang tidak bisa dikelompokkan	0	1.220	1.220	Over Target
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.229.823	2.260.577	29.534	Over Target

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2023

Keterangan kinerja realisasi pendapatan:

- Melampaui target pendapatan atau over target (OT),
- Tidak mencapai target yang ditetapkan atau under (UT),
- Mencapai target yang ditetapkan atau equal (E).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah melampaui target pendapatan atau *over target*.

c. Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bantul tetap berupaya untuk lebih mengoptimalkan potensi PAD melalui:

- 1) Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
 - b) Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
 - c) Memberikan *reward* bagi pamong desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo.
 - d) Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara *self assessment*.
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
- 3) Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- 4) Meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;

- 5) Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengamanatkan adanya restrukturisasi dan integrasi pajak daerah serta retribusi, yang dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun tetap menjaga penerimaan PAD. Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yaitu restrukturisasi dan integrasi pajak daerah dimana pajak daerah yang dulunya ada 16 jenis menjadi 14 jenis pajak, maka pajak perlu didorong sehingga transparansi pembagian pajak daerah antara provinsi dengan kabupaten bisa lebih baik, dan penguatan lokal *taxing power* dapat terwujud.

Beberapa jenis penerimaan pajak daerah yang dapat didorong peningkatan realisasinya pada tahun mendatang terutama:

- 1) Pajak Hotel sebenarnya masih punya potensi yang cukup tinggi untuk berkembang di Kabupaten Bantul seiring dengan berkembangnya wilayah DIY termasuk Bantul sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Sejauh ini hanya ada dua hotel berbintang yang dipungut pajak hotel, sedangkan hotel lain masih berstatus melati. Potensi lain dari pajak hotel yang dapat lebih diintensifkan adalah rumah kos;
- 2) Pajak Restoran sejauh ini yang banyak dipungut adalah dari catering yang melayani kegiatan-kegiatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul, sedangkan restoran dan rumah makan lainnya perlu diintensifkan pemungutannya;

- 3) Pajak reklame masih dapat dikembangkan lagi dengan penentuan spot-spot reklame yang layak dan penguatan koordinasi dengan pihak terkait tata ruang wilayah daerah karena adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu;
- 4) Pajak parkir masih bisa dikembangkan, mengingat setiap tahun jumlah kendaraan meningkat.

Pajak sebenarnya masih memiliki potensi yang besar seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat terutama di sektor perdagangan. Meskipun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Belum optimalnya fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan pendapatan Daerah.
- 2) Sistem pengawasan pemungutan pajak dan retribusi belum optimal sehingga perlu ditingkatkannya sistem pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Sistem administrasi pencatatan penerimaan/pembayaran daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi belum seluruhnya bisa diterapkan pada pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- 4) Potensi obyek pajak dan obyek retribusi belum sepenuhnya bisa dikembangkan dengan optimal.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- 1) Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
 - b) Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;

- c) Menerapkan transaksi non tunai;
 - d) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - e) Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
- 2) Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah:
- a) Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing;
 - b) Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan/peremajaan.

Pos retribusi daerah yang dominan di Kabupaten Bantul dan terkait erat dengan pulihnya perekonomian daerah diharapkan akan kembali memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, yaitu: retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pelayanan pasar, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi perngujian kendaraan bermotor serta retribusi parkir.

Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pengelolaan Kekayaan Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- 2) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan
- 3) Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain;
- 4) Mengoptimalkan pendapatan BLUD.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024 yang bersumber dana DAK fisik dan non fisik belum diperhitungkan.

Berdasarkan penjelasan dalam Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukan penghitungan kembali dan penyesuaian dengan kondisi tahun rencana. Hasil analisis proyeksi pendapatan RKPD tahun rencana secara keseluruhan kemudian dibandingkan dengan proyeksi pendapatan tahun rencana di RPJMD. Dari perbandingan tersebut akan diketahui selisihnya, terjadi penambahan/pengurangan, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19 Penyandingan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

URAIAN	Realisasi APBD Tahun 2022 (Rp.Juta)	APBD Tahun 2023 (Rp. Juta)	Proyeksi RPJMD Tahun 2024 (Rp.Juta)	Proyeksi RKPD Tahun 2024 (Rp.Juta)	Selisih (Rp. Juta)
1	2	3	4	5	(5-4)
PENDAPATAN DAERAH	2.260.577	2.283.955	2.214.398	1.957.502	(256.896)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	540.572	551.994	535.634	559.906	24.271
Hasil Pajak Daerah	252.857	237.088	259.003	245.000	(14.003)
Hasil Retribusi Daerah	42.179	69.682	41.654	69.682	28.028
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.840	28.707	25.728	28.707	2.979

URAIAN	Realisasi APBD Tahun 2022 (Rp.Juta)	APBD Tahun 2023 (Rp. Juta)	Proyeksi RPJMD Tahun 2024 (Rp.Juta)	Proyeksi RKPD Tahun 2024 (Rp.Juta)	Selisih (Rp. Juta)
1	2	3	4	5	(5-4)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	224.696	216.516	209.250	216.516	7.266
PENDAPATAN TRANSFER	1.712.038	1.725.961	1.678.563	1.391.597	(286.967)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.469.252	1.492.977	1.402.550	1.146.551	(255.999)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	242.786	232.985	276.013	245.046	(30.967)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.967	6.000	-	6.000	6.000
Pendapatan Hibah	6.725	6.000	-	6.000	6.000

3.2.3.2 Belanja Daerah Tahun 2024

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perencanaan belanja daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Tabel 3.20 Penyandingan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

URAIAN	Realisasi APBD Tahun 2022 (Rp.Juta)	APBD Tahun 2023 (Rp. Juta)	Proyeksi RPJMD Tahun 2024 (Rp.Juta)	Proyeksi RKPD Tahun 2024 (Rp.Juta)	Selisih (Rp. Juta)
1	2	3	4	5	(5-4)
BELANJA	2.272.475	2.406.377	2.335.845	2.133.206	(202.519)
BELANJA OPERASI	1.721.577	1.812.705	1.788.862	1.571.400	(217.341)
Belanja Pegawai	853.342	931.368	1.009.872	736.923	(272.949)
Belanja Barang dan Jasa	768.495	806.291	706.480	749.857	43.377
Belanja Hibah	91.629	70.019	66.510	78.852	12.342
Belanja Bantuan Sosial	8.110	5.027	6.000	5.767	(233)
BELANJA MODAL	221.698	230.168	194.602	245.548	50.947
BELANJA TIDAK TERDUGA	19.684	24.076	20.000	24.076	4.076
BELANJA TRANSFER	309.515	339.428	332.382	292.181	(40.201)

URAIAN	Realisasi APBD Tahun 2022 (Rp. Juta)	APBD Tahun 2023 (Rp. Juta)	Proyeksi RPJMD Tahun 2024 (Rp. Juta)	Proyeksi RKPD Tahun 2024 (Rp. Juta)	Selisih (Rp. Juta)
1	2	3	4	5	(5-4)
Belanja Bagi Hasil	26.103	30.677	30.066	30.677	611
Belanja Bantuan Keuangan	283.412	308.750	302.316	261.504	(40.812)
Surplus (Defisit)	(11.897)	(122.422)	(121.447)	(175.704)	(54.376)
				(8,98)	

Alokasi belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah dengan memperhatikan kebijakan daerah untuk mendukung prioritas daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD, serta memperhatikan kebutuhan belanja daerah yang bersifat wajib mengikat dan *earmarked* sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang mengikat, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan;
2. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan belanja pegawai ASN dan pemberian gaji ke-13 serta tunjangan hari raya dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangannya (*acress* maksimal 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangannya), kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, tambahan penghasilan pegawai, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan dan kematian;
3. Belanja prioritas kedua adalah belanja wajib pelayanan dasar pada urusan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan dari pajak daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan pajak daerah, belanja yang harus disediakan untuk layanan masyarakat yang terkait dengan perolehan pajak, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal sebesar 10% dari total penerimaan pajak daerah. Selanjutnya sisanya dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya;

5. Penerimaan dari retribusi daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan obyek retribusi baik fisik maupun non fisik, belanja untuk pengelolaan penerimaan retribusi, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal sebesar 10% dari total penerimaan retribusi daerah. Selanjutnya juga dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya;
6. Penerimaan dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja Badan Layanan Umum Daerah;
7. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Belanja Bantuan Keuangan diarahkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran daerah yaitu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan infrastruktur perdesaan dan fasilitas umum;
9. Pemerintah Daerah mengalokasikan 50% dari realisasi penerimaan pajak rokok untuk program Jaminan Kesehatan Nasional bagi warga miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI);
10. Belanja yang bersumber dari dana transfer disesuaikan dengan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Prioritas penggunaan dana transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak; dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka mengurangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. penggunaan DBH pajak bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan daerah sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU); untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) disesuaikan dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasional layanan publik.

Pada penyusunan RKPD ini tidak memasukkan DAK fisik dan non fisik.

- 11. Belanja yang bersumber dari dana penyesuaian otonomi khusus disesuaikan peruntukannya sesuai peraturan yang berlaku:
 - a. Dana Insentif Daerah (DID); digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang mendukung pencapaian kinerja atas kategori DID sesuai dengan jumlah alokasi yang diterima.
 - b. Dana Desa; digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
- 12. Belanja yang bersumber dari BKK DIY untuk Penugasan Keistimewaan digunakan pada Urusan Kelembagaan, Kebudayaan, Tata Ruang dan Pertanahan.
- 13. Belanja prioritas Daerah meliputi:
 - a. Pemenuhan Penerapan Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - b. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA).
 - c. Peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan.

- d. Pengurangan kemiskinan melalui pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat.
 - e. Pengembangan 3 sektor unggulan yaitu sektor pertanian, pariwisata dan industri.
 - f. Bantul sebagai Kabupaten Kreatif Dunia UCCN.
 - g. Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul BERSAMA).
 - h. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi dan informasi.
 - i. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada tahun 2024.
 - j. Penyusunan dokumen perencanaan RPJPD tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2030.
14. Pemenuhan *mandatory spending* pada RKPD 2024 sebagai berikut:
- a. Alokasi anggaran pendidikan mencapai 30,35%, telah memenuhi amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
 - b. Alokasi anggaran kesehatan mencapai 29,13%, telah memenuhi amanat UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - c. Alokasi anggaran infrastruktur daerah mencapai 30,61%, merupakan infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Anggaran ini berada di OPD DPUPKP, Dinas Perhubungan, Diskominfo dan BPKPAD khusus belanja BKK untuk infrastruktur.
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD) mencapai 9,70%.
15. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP). Ruang Lingkup dan Prioritas Sasaran Bantuan Keuangan PPBMP adalah bidang yang merupakan kewenangan Kalurahan meliputi: bidang Pendidikan Anak Usia Dini formal dan non formal, bidang Kesehatan, bidang lingkungan hidup.

Terdapat 933 pedukuhan di Kabupaten Bantul, masing-masing padukuhan mendapatkan dana PPBMP sebesar Rp 50.000.000,-

3.2.3.3 Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2023, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah dapat dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.21 Penyandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

URAIAN	Realisasi APBD Tahun 2022 (Rp.Juta)	APBD Tahun 2023 (Rp. Juta)	Proyeksi RPJMD Tahun 2024 (Rp.Juta)	Proyeksi RKPD Tahun 2024 (Rp.Juta)	Selisih (Rp. Juta)
1	2	3	4	5	(5-4)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	259.029	158.922	158.647	212.204	53.557
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	240.504	147.922	146.647	201.204	54.557
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.363				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	162	11.000	12.000	11.000	(1.000)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.500	36.500	37.000	36.500	(500)
Penyertaan Modal	31.500	25.500	25.000	25.500	500
Pemberian Pinjaman Daerah	-	11.000	12.000	11.000	(1.000)

URAIAN	Realisasi APBD Tahun 2022 (Rp.Juta)	APBD Tahun 2023 (Rp. Juta)	Proyeksi RPJMD Tahun 2024 (Rp.Juta)	Proyeksi RKPD Tahun 2024 (Rp.Juta)	Selisih (Rp. Juta)
1	2	3	4	5	(5-4)
Pembiayaan Netto	227.529	122.422	121.647	175.704	54.057

BUMD Bantul terdiri dari 3 Perusahaan yaitu: PT BPR Bank Bantul, Perumdam Tirta Projotamansari dan Perumda Aneka Dharma. Perkembangan BUMD tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

1) PT. BPR Bank Bantul

Perusahaan ini bergerak di bidang aktivitas keuangan yang mencakup aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Kinerja pada Tahun 2022 menunjukkan kondisi yang baik yakni: *Return on Asset* (ROA) sebesar 1,69%, *Loan Debt Ratio* (LDR) sebesar 82,47% dan *Cash Ratio* sebesar 9,93% serta *Ratio Modal* (CAR) sebesar 22,80%.

- a) *Return On Asset* (ROA) sebesar 1,69% menunjukkan bahwa kemampuan Bank Bantul dalam menghasilkan laba sudah baik, karena besarnya sudah melebihi standar terbaik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yaitu sebesar 1,5%. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.
- b) *Loan Debt Ratio* (LDR) sebesar 82,47% menunjukkan kemampuan Bank Bantul dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sudah cukup baik, batas minimal LDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 78% dan maksimal 110%. Sehingga nilai LDR dari Bank Bantul tersebut sudah termasuk nilai LDR yang sehat.
- c) *Cash Ratio* sebesar 9,93% menunjukkan kemampuan Bank Bantul dalam melunasi kewajiban yang harus segera di bayar dengan harta yang likuid yang dimiliki bank tersebut sudah sangat bagus. Nilai cash ratio yang ideal adalah 1, jika cash ratio menunjukkan angka

9,93 berarti perusahaan memiliki aset kas yang cukup untuk membayar kewajibannya 9,93 kali lipat.

- d) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 22,80% menunjukkan kemampuan Bank Bantul dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank sudah baik, karena seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Sehingga Rasio Modal Bank Bantul sudah masuk kriteria sehat.

2) Perumda Tirto Projotamansari

Perusahaan ini bergerak dalam penyelenggaraan penyediaan air minum dan air bersih bagi masyarakat. Perumda Air Minum Tirta Prajatamansari membentuk 3 (tiga) unit wilayah yang membawahi 15 (lima belas) Sub Unit PDAM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

- 3) Perumda Aneka Dharma bergerak di bidang usaha sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 adalah: Perdagangan Umum; Pelayanan Jasa; Pertanian; Perindustrian; Pertambangan; Peternakan; dan Pariwisata.

Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2024 diarahkan sebagai berikut:

- 1) Proyeksi alokasi untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp25.500.000.000,00. Proyeksi tersebut disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang penyertaan modal dengan mempertimbangkan keuangan daerah, adapun rincian penyertaan modal sebagai berikut:

a) Bank BPD DIY	Rp13.200.000.000,00.
b) PT. BPR Bank Bantul	Rp4.500.000.000,00.
c) Perumdam Tirto Projotamansari	Rp6.000.000.000,00.
d) Perumda Aneka Dharma	Rp1.800.000.000,00.

- 2) Kebijakan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- 3) Penguatan pengelolaan dana bergulir; dan
- 4) Menjaga agar keuangan daerah dan apabila terdapat defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

3.2.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Non APBD Kabupaten

Tingginya kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, sedangkan kemampuan pendanaan APBD terbatas sehingga tidak semua program-program dapat dibiayai oleh APBD Kabupaten Bantul. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan alternatif lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya dengan skema Kerjasama Pemerintah dan pelaku usaha melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP)/*Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, dan merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. TSLP/CSR lebih diarahkan untuk program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, pengentasan kemiskinan, pemulihan dan/atau peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup, dan program strategis yang selaras dengan prioritas program pemerintah daerah.

Capaian TSLP/CSR Kabupaten Bantul tahun 2018-2022 dan target tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.22 Capaian TSLP/CSR Kabupaten Bantul Tahun 2019-2022,
Target Tahun 2023 dan 2024

Uraian	Capaian					Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TSLP/CSR (Rp.Juta)	6.378	8.875	9.886	11.673	13.144	9.685	10.513

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

Capaian TSLP/CSR dari tahun 2019-2022 terus meningkat dan telah melebihi target tahun 2024 dalam RPJMD 2021-2026. CSR memiliki dampak yang baik bagi perusahaan dan masyarakat. CSR berperan dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, UKM dan ekonomi kreatif.

- Kegiatan pada bidang sosial berupa pembagian paket sembako, bantuan ke panti asuhan, boga sehat, bantuan masjid, donator/sponsor kegiatan kemasyarakatan, khitanan massal, santunan yatim/piatu, duafa dan difabel.
- Kegiatan bidang kesehatan berupa bantuan mobil ambulan, alat kesehatan, alat fitness outdoor, penyuluhan kesehatan, kegiatan donor darah, pemeriksaan/scrining kesehatan, penyediaan prokes Covid-19 dan vaksinasi.
- Kegiatan bidang Pendidikan berupa bantuan operasional/sapras sekolah, bantuan computer bagi sekolah, beasiswa yatim/piatu, duafa, peduli guru honorer, renovasi sekolah, sekolah ramah anak.
- Kegiatan bidang lingkungan berupa program bersih sampah, bantuan jalan, bantuan jembatan, bantuan irigasi, jambanisasi, lantainisasi, program sekolah sungai, kegiatan penghijauan dan kebersihan, penyediaan air bersih, sumur resapan, tamanisasi dan gapura, usaha pertanian perikanan, kegiatan konservasi
- Kegiatan bidang UKM dan ekonomi kreatif berupa pelatihan produk UKM, pemberian modal UKM, pembangunan area/taman kuliner, bantuan sapras kuliner.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran merupakan rumusan penjabaran dari tujuan organisasi secara lebih spesifik dan terukur dengan fokus utama pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi, sementara prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah dan memiliki daya ungkit yang besar bagi kinerja pembangunan daerah. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan selama periode tertentu.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2024 disusun berdasarkan capaian kinerja pembangunan tahun 2022, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program unggulan Perangkat Daerah yang relevan dengan pencapaian target sasaran pembangunan daerah. Elemen-elemen utama program unggulan memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, pagu pendanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab. Program yang disusun dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu, anggaran, kapasitas, dan sumberdaya yang dimiliki.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, sedangkan sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan, dengan kata lain tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai sementara sasaran merupakan

tindakan spesifik dan langkah terukur yang perlu diambil untuk mencapai tujuan.

Perumusan tujuan dan sasaran mengacu pada Visi dan Misi dalam RPJMD. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Secara filosofis Visi tersebut merupakan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Untuk mewujudkan Visi disusunlah Misi yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan meliputi:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan

sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Masing-masing misi sebagaimana diuraikan di atas memiliki tujuan yang merupakan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya.
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas.
4. Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan.
5. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat

Penyusunan RKPD Tahun 2024 mengacu pada arah kebijakan RPJMD tahun 2021 – 2026 dengan penekanan pada “Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Iptek untuk Pemeraataan Pembangunan.”

Pelaksanaan Misi dalam rangka mewujudkan Visi bupati tersebut harus selaras dan sinkron dengan sasaran pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan capaian sasaran daerah ditentukan oleh indikator kinerja sasaran. Untuk mewujudkan sasaran daerah dilakukan serangkaian

program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah diukur dengan indikator kinerja Perangkat Daerah yang juga harus sinkron dengan indikator sasaran daerah. Sinkronisasi indikator sasaran daerah dengan indikator kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Sinkronisasi Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Bantul dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4.2315	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kabupaten	Persen	88	Sekretariat Daerah
					Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	Sekretariat Daerah
					Persentase Rancangan Perda dan Perkada yang diharmonisasi	Persen	100	Sekretariat Daerah
					Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	Persen	100	Sekretariat Daerah
					Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	Persen	94	Sekretariat Daerah
					Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Persen	100	Sekretariat Daerah
					Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	Persen	85	Sekretariat Daerah
					Persentase Raperda yang disetujui bersama	Persen	76	Sekretariat DPRD
					Persentase Raperda yang dibahas bersama	Persen	86	Sekretariat DPRD
					Tingkat keselarasan program RKPd dengan RPJMD	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Persentase indikator sasaran RPJMD yang	Persen	96	Badan Perencanaan

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi			Pembangunan Daerah
					Persentase perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Capaian tingkat pelestarian situs warisan geologi (Geoheritage)	Persen	50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi	Persen	96	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Capaian Indeks Profesionalitas ASN	nilai	71	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
					Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	60	
					Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
					Peta kompetensi ASN	Persen	12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
					Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Persen	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
					Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDA	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Cakupan PD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	Persen	85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	71	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah	5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
					Persentase pengelolaan keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	85	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
					Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
					Penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
					Persentase realisasi / serapan belanja APBD terhadap anggaran belanja APBD	Persen	90	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	100	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
					Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	22,69	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
					Persentase realisasi PAD	Persen	100	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	83,5	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	84,5	Inspektorat Daerah
					Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	Inspektorat Daerah
					Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	44,44	Inspektorat Daerah
					Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Persen	14	Inspektorat Daerah
					Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Risiko	Persen	30	Inspektorat Daerah
		Indeks SPBE	Indeks	3,3	Index kualitas layanan informasi publik	Angka	84,25	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi	Persen	72	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten			
					Nilai Indeks Pembangunan TIK	Angka	7,2	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	Persen	71,43	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,8	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Tingkat kematangan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	2,9	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	75	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88,4	IKM kinerja PTSP	Nilai/angka	85,75	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100	Dinas Penanaman Modal dan

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
								Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perijinan dan non perijinan	Persen	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Rata-rata cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persen	99,83	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data	Lembaga	8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	99,83	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	96,2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase validasi data administrasi kependudukan	Persen	99,7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase pemanfaatan Profil Kependudukan oleh lembaga pengguna/ masyarakat	Persen	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					IKM kapanewon	Angka	91	Kapanewon Bantul
					Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Kapanewon Bantul
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan	Persen	83	Kapanewon Bantul

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul			
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	92	Kapanewon Bantul
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	Kapanewon Bantul
					Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	100	Kapanewon Bantul
					Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Kapanewon Bantul
					IKM kapanewon	Angka	95	Kapanewon Banglilipuro
					Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Kapanewon Banglilipuro
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Banglilipuro
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	95	Kapanewon Banglilipuro
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	92	Kapanewon Banglilipuro
					Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	100	Kapanewon Banglilipuro
					Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Kapanewon Banglilipuro
					IKM kapanewon	Angka	91	Kapanewon Dlingo
					Persentase perencanaan dan pengendalian	Persen	100	Kapanewon Dlingo

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					urusan keistimewaan yang berkualitas			
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Dlingo
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Kapanewon Dlingo
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	Kapanewon Dlingo
					Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	100	Kapanewon Dlingo
					Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Kapanewon Dlingo
					IKM kapanewon	Angka	91	Kapanewon Imogiri
					Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Kapanewon Imogiri
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Imogiri
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Persen	97	Kapanewon Imogiri
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	97	Kapanewon Imogiri
					Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	97	Kapanewon Imogiri

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Kapanewon Imogiri
					IKM kapanewon	Angka	92	Kapanewon Jetis
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Jetis
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Jetis
					Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	Kapanewon Jetis
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	94	Kapanewon Jetis
					Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	100	Kapanewon Jetis
					Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Kapanewon Jetis
					IKM kapanewon	Angka	94	Kapanewon Kretek
					Persentase perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Kretek
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Kretek
					Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	91	Kapanewon Kretek

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	83	Kapanewon Kretek
					Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	89	Kapanewon Kretek
					Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Kapanewon Kretek
					IKM kapanewon	Angka	91	Kapanewon Kasihan
					Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Kapanewon Kasihan
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Kasihan
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	Kapanewon Kasihan
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	91	Kapanewon Kasihan
					Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	91	Kapanewon Kasihan
					Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Kapanewon Kasihan
					IKM kapanewon	Angka	91	Kapanewon Pandak
					Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Kapanewon Pandak

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Pandak
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	92	Kapanewon Pandak
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	86	Kapanewon Pandak
					Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	86	Kapanewon Pandak
					Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Kapanewon Pandak
					IKM kapanewon	Angka	91	Kapanewon Pundong
					Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Kapanewon Pundong
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Pundong
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	Kapanewon Pundong
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	83	Kapanewon Pundong
					Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	89	Kapanewon Pundong

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Kapanewon Pundong
					IKM kapanewon	Angka	92	Kapanewon Pleret
					Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Kapanewon Pleret
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Pleret
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	95	Kapanewon Pleret
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	95	Kapanewon Pleret
					Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	95	Kapanewon Pleret
					Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Kapanewon Pleret
					IKM kapanewon	Angka	94	Kapanewon Piyungan
					Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Kapanewon Piyungan
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Piyungan
					Cakupan penyelenggaraan	Persen	94	Kapanewon Piyungan

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					pemerintahan dan pelayanan public			
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	Kapanewon Piyungan
					Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	100	Kapanewon Piyungan
					Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Kapanewon Piyungan
					IKM kapanewon	Angka	95	Kapanewon Pajangan
					Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Kapanewon Pajangan
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Pajangan
					Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	Kapanewon Pajangan
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	90	Kapanewon Pajangan
					Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	90	Kapanewon Pajangan
					Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Kapanewon Pajangan
					IKM kapanewon	Angka	92	Kapanewon Sanden
					Persentase perencanaan dan pengendalian	Persen	100	Kapanewon Sanden

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					urusan keistimewaan yang berkualitas			
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Sanden
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	92	Kapanewon Sanden
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	82	Kapanewon Sanden
					Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	89	Kapanewon Sanden
					Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Kapanewon Sanden
					IKM kapanewon	Angka	91	Kapanewon Srandakan
					Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Srandakan
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Srandakan
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	92	Kapanewon Srandakan
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	96	Kapanewon Srandakan
					Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	96	Kapanewon Srandakan

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Kapanewon Srandakan
					IKM kapanewon	Angka	91	Kapanewon Sewon
					Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Kapanewon Sewon
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Sewon
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	Kapanewon Sewon
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	90	Kapanewon Sewon
					Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	100	Kapanewon Sewon
					Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Kapanewon Sewon
					IKM kapanewon	Angka	93	Kapanewon Sedayu
					Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Kapanewon Sedayu
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Sedayu
					Cakupan penyelenggaraan	Persen	92	Kapanewon Sedayu

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					pemerintahan dan pelayanan publik			
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	Kapanewon Sedayu
					Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	100	Kapanewon Sedayu
					Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Kapanewon Sedayu
					IKM kapanewon	Angka	91	Kapanewon Banguntapan
					Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Kapanewon Banguntapan
					Tingkat penerapan budaya pemerintahan satriya pada asn di kabupaten bantul	Persen	83	Kapanewon Banguntapan
					Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	Kapanewon Banguntapan
					Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	94	Kapanewon Banguntapan
					Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	96	Kapanewon Banguntapan
					Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Kapanewon Banguntapan
2.	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,01	Net Death Rate (NDR)	Premil	20,5	Rumah Sakit Panembahan Senopati

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	Angka	82,90	Rumah Sakit Panembahan Senopati
					Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	81	Rumah Sakit Panembahan Senopati
					Bed Occupation Rate (BOR)	Persen	69	Rumah Sakit Panembahan Senopati
					Turn Over Interval (TOI)	Hari	2	Rumah Sakit Panembahan Senopati
					Bed Turn Over (BTO)	Kali	50	Rumah Sakit Panembahan Senopati
					Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	72,6	Dinas Kesehatan
					Angka Kematian bayi	Per 100.000 kelahiran hidup	6,9	Dinas Kesehatan
					Case Fatalilty Rate Covid 19	Persen	2,25	Dinas Kesehatan
					Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks	1	Dinas Kesehatan
					Indeks sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minum sesuai standar dibagi dengan yang diawasi.	Indeks	1	Dinas Kesehatan
					Cakupan pelayanan jamkesda	Persen	100	UPTD Jamkesda
					Cakupan pelayanan labkesda	Persen	100	UPTD Labkesda

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	Angka	84,30	27 Puskesmas
					Cakupan pelayanan puskesmas	Persen	100	27 Puskesmas
					Insiden Rate DBD	Per 100.000 kelahiran hidup	115	Dinas Kesehatan
					Prevalensi stunting	Persen	8	Dinas Kesehatan
					Indeks kapasitas sumberdaya manusia kesehatan	Indeks	1 indeks	Dinas Kesehatan
					Cakupan Desa Siaga Purnama Mandiri	Kalurahan	50 Kalurahan	Dinas Kesehatan
					Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	48 Persen	Dinas Kesehatan
					Indeks capaian SPM	Indeks	1 indeks	27 Puskesmas
3.	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Angka Harapan lama sekolah	Tahun	15,25	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	94,25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	95,25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	98,7	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	14,25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Persentase capaian SPM Pendidikan	Persen	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Persen	75	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	Persen	4,78	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Persen	34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Indeks	86	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Persen	14,02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Peningkatan prestasi olahraga	Persen	23	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Jumlah prestasi Olahraga	Medali	80	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	3,44	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	82	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Organisasi Pramuka yang aktif	Organisasi	18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
4.	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	6	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Kalurahan	21	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
					Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	75,74	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
					Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	76	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
					Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	691	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
5.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100	Persentase gangguan trantribum yang dapat di selesaikan	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase pembentukan kelompok Jagawarga	Persen	66,88	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase pemilih yang berpartisipasi	Persen	77	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Cakupan kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Jumlah intoleransi di masyarakat	Angka	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Cakupan pembinaan Ormas	Persen	28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Kerukunan antar umat beragama	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.	Jumlah Kejadian	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Cakupan lokasi yang di prakondisi	Persen	25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini	Angka	0,325	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	91	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Cakupan pengembangan Desa Mandiri Pangan	Persen	48	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	57,14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	153	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pertumbuhan produksi sektor pertanian	persen	0,714	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Persentase ketersediaan sarana pertanian	Persen	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Ketersediaan sarana peternakan	Persen	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Persen	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Cakupan sumber bibit ternak yang terlindungi	Persen	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Produksi daging	Ton	15.713	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persen	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	6,32	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	0,55	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Persen	60	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Produksi perikanan tangkap	Ton	833	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Produksi perikanan budidaya	Ton	12.878	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Persen	5	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Persentase produksi perikanan yang diolah	Persen	2	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2,488,970	Dinas Pariwisata
					Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,75	Dinas Pariwisata
					Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah/org	820,476	Dinas Pariwisata
					Cakupan Desa Wisata	Persen	36	Dinas Pariwisata
					Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	Dinas Pariwisata
					Cakupan peningkatan destinasi pariwisata	Persen	3,13	Dinas Pariwisata

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Cakupan peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	2	Dinas Pariwisata
					Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Rupiah (Miliar)	1.913,28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	53	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dimodernisasi	Persen	4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Persen	6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Nilai ekspor	Juta US\$	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	Persen	32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Persen	15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	3,3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	2,5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	75,25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	65,48	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Persen	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	2.290,35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	12,79	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persen	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	3,4	Jumlah tenaga kerja yang terserap	Orang	9.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	20,5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	Persen	58	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	37	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Persentase penempatan transmigrasi	Persen	90	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Kalurahan	53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
					Cakupan pelaksanaan penataan kalurahan	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
					Cakupan pelaksanaan pendampingan kerjasama antar kalurahan	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
					Cakupan pelaksanaan administrasi pemerintahan kalurahan yang baik	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
					Cakupan pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kalurahan	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
					Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	Persen	56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
					Persentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	Persen	50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
		Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	100	Jumlah parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi	Jumlah parameter	18	Dinas Pariwisata
					Cakupan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	35	Dinas Pariwisata

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	CBT	2	Dinas Pariwisata
					Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase UMKM yang berizin	Persen	60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Capaian Rintisan Desa Preneur	Persen	13,33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Capaian pemasaran pada Desa Preneur	Persen	40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Pertumbuhan industri	Persen	2,1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Pertumbuhan industri kreatif	Persen	0,56	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
								Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	95,32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten	Persen	0,22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
7.	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	76,40	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	79,25	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Tingkat kemantapan infrastruktur permukiman (jalan desa)	Persen	81,85	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
								Kawasan Permukiman
					Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	76,65	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	0,5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	Persen	90	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Gedung pemerintah yang laik fungsi	Persen	30	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	75,84	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	81,09	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di	Persen	40	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					WS kewenangan Kabupaten			
					Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Persen	84,2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Penduduk berakses air minum layak	Persen	85,19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Persen	85,19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Penduduk berakses sanitasi yang layak	Persen	93,92	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	Persen	28	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan	Persen	91,92	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					pengolahan air limbah domestik yang layak			Kawasan Permukiman
					Cakupan pengembangan sistem drainase lingkungan	Persen	5,23	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Penanganan kawasan kumuh	Persen	31,77	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	31,77	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase rumah layak huni	Persen	99,6 Persen	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul	Persen	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					sesuai peraturan perundang-undangan			
					Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	5,49	Dinas Perhubungan
					Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	Dinas Perhubungan
					Rasio konektivitas kabupaten	Persen	30,43	Dinas Perhubungan
					Kinerja lalu lintas Kabupaten	Angka	0,30 angka	Dinas Perhubungan
		Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,07	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persen	73	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Persen	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Persen	70,2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan	Persen	90	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
					Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Persen	77	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
								Mandala Sarta Tata Sasana)
					Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
					Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	Persen	90	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
					Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	44,74	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
8.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,42	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	41.00	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88.00	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	61.00	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup
					Cakupan penanganan sumber pencemaran air dan udara	Persen	80	Dinas Lingkungan Hidup
					Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	34	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Persen	5	Dinas Lingkungan Hidup
					Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional	Penghargaan	1	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase ketaatan kegiatan/usaha	Persen	75	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	85,71	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	34,84	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Persen	25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Cakupan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Persen	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Capaian pengelolaan sampah	Persen	67,65	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	45,87	
9.	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	164,55	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,93	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Persentase warga negara yang memperoleh	Persen	100	

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					layanan informasi rawan bencana			
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	35	
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	
					Indeks pemulihan pascabencana	Persen	100	
					Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	menit	< 15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	
10.	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	71,380	PPKS yang dilayani dan ditangani	Persen	100	Dinas Sosial
					Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Persen	75	Dinas Sosial
					Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	75	Dinas Sosial

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Persen	70	Dinas Sosial
					Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Persen	70	Dinas Sosial
					Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	100	Dinas Sosial
					Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Persen	80	Dinas Sosial
11.	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	72,66	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Prevalensi	0,41	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Capaian Desa Prima	Persen	40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
								Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	69	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Rasio kekerasan terhadap perempuan	Angka	0.00031	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Persen	9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Utama	Nilai KLA	Angka	890	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
								Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Cakupan desa layak anak	Kalurahan	45	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	
					Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	2,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)Z12Z12`	Angka	1.64	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	Persen	77,2	Dinas Pemberdayaan

No.	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target 2024	Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Outcome)	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
					(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen	84,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2021–2026

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah merupakan serangkaian program yang secara khusus berkaitan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan, dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, memperhatikan arah kebijakan dalam RPJMD 2021-2026, memperhatikan isu-isu strategis pembangunan, baik nasional, regional DIY maupun Kabupaten Bantul Tahun 2023, serta memperhatikan tema dan prioritas pembangunan nasional dan DIY tahun 2024. Identifikasi isu strategis nasional, regional (DIY) dan daerah (Bantul) tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah:



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2023 diolah

Gambar 4.1 Identifikasi Isu Strategis

Tema dan prioritas Nasional, DIY serta Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4-2 Sinergitas Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul Tahun 2024

	NASIONAL	DIY	KABUPATEN BANTUL
A. TEMA			
	Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis sektor unggulan	Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Iptek untuk Pemerataan Pembangunan
B. PRIORITAS			
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1 Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	3 Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan
2	Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2 Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	4 Peningkatan kualitas SDM	1 Peningkatan kualitas SDM
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2 Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	5 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	4 Pengelolaan lingkungan hidup dan resiko bencana
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	6 Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan	5 Pemantapan layanan publik berbasis Teknologi Informasi
			6. Sukses penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada

Penentuan prioritas dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat lebih fokus sehingga upaya pencapaian tujuan dapat efektif dan efisien.

Penjabaran masing-masing prioritas sebagaimana uraian berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu daerah, karena SDM yang berkualitas akan mampu memenangkan persaingan di era revolusi industri. Todaro (2000) dalam Afid Nurkholis: Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia mengungkapkan bahwa sumber daya manusia dapat diukur melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi pendidikan seseorang atau semakin banyak mengikuti pelatihan maka kemampuan dan keterampilan yang dimiliki semakin tinggi pula, sementara pendidikan tinggi tanpa adanya tubuh yang sehat tidak akan menaikkan produktifitas. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sementara dari sisi kesehatan dapat dilihat dari angka harapan hidup.

Data pada Bab 2 menunjukkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul tahun 2022 adalah sebesar 9,59 tahun sedikit lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 9,57 tahun atau setara dengan setingkat Sekolah Menengah Pertama, sementara harapan lama sekolah adalah sebesar 15,48 tahun, mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 15,38 tahun, atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma III. Meski mengalami peningkatan tetapi angka rata-rata lama sekolah masih belum mendekati angka harapan lama sekolah. Dari sektor Kesehatan Umur Harapan Hidup tahun 2022 menunjukkan angka 73,90. Lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 73,89 Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor antara lain Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Prevalensi HIV /AIDS, dan Angka Kesakitan (Incidence Rate/ IR) DBD.

2. Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan.

Kondisi infrastuktur sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena merupakan prasarana distribusi barang dan jasa yang ada di masyarakat. Infrastruktur dapat berupa jalan dan

jembatan, jaringan irigasi, internet dan lainnya. Peningkatan infrastruktur perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus menarik minat investor.

Data pada Bab 2 menunjukkan tahun 2022 panjang jalan di Kabupaten Bantul dalam kondisi mantap adalah sepanjang 473,57 km (75,84%) sementara jalan dalam kondisi belum mantap adalah sepanjang 150,90 km (24,16%) dari total 624,47 km.

Kondisi jaringan irigasi primer yang berfungsi baik pada tahun 2022 adalah sepanjang 79.626,00 m (82,32%), sementara kondisi jaringan irigasi sekunder berfungsi baik adalah 114.710,70 m (81,43%). Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, oleh karena itu harus dipastikan dalam kondisi baik agar produksi pangan dapat terpenuhi meski areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan yang ada.

Selanjutnya terkait jaringan internet/intranet, pembangunan infrastruktur jaringan Fiber Optic (FO) sampai tingkat Pemerintah Desa sepanjang 144,6 km akan terus dimantapkan untuk membantu mendorong peningkatan dan pemberdayaan ekonomi desa, selain itu pembangunan titik wifi public yang terkoneksi internet selama 24 jam juga diperbanyak agar bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak masyarakat. Data menunjukkan sampai saat ini baru terbangun sebanyak 51 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tersebar di Kabupaten Bantul yang telah terfasilitasi wifi, jumlah ini tentu belum mencukupi jika dibanding dengan jumlah Kelurahan yang sebanyak 75.

3. Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan

Ekonomi inklusif merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Bentuk program dan kegiatan yang dilakukan berupa penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan,

pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal utamanya UMKM, penyediaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang tidak mampu bekerja, peningkatan pelayanan publik dasar serta dukungan kebijakan publik yang memadahi. Data pada Bab 2 menunjukkan jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Bantul adalah 86.833. Banyaknya jumlah UMKM belum diimbangi dengan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tahun 2022 cakupan Pembinaan yang dilakukan baru sejumlah 410 pelaku UMKM atau berkisar 0,5%. Dari jumlah yang telah dibina tersebut yang mampu naik kelas baru berjumlah 287 atau 70,1%

4. Pengelolaan lingkungan hidup dan resiko bencana

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH merupakan bahan informasi pada proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator untuk mengukur IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Capaian IKLH Kabupaten Bantul tahun 2022 adalah sebesar 62,84 mengalami penurunan dari tahun 2021 yang sebesar 66,87. Kondisi ini perlu penanganan segera agar kualitas lingkungan hidup menjadi baik Kembali.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian selain pengelolaan lingkungan hidup adalah pengelolaan resiko bencana. Bantul merupakan daerah yang memiliki banyak potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, serta tsunami, namun sebagian masyarakatnya masih belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait pengelolaan resiko bencana.

Data tahun 2023 menunjukkan nilai Indeks Resiko Bencana tahun 2022 adalah 167,97 yang tergolong kategori tinggi, lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 157,30. Nilai ini tidak sebanding dengan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang dilakukan berdasar penilaian

terhadap 71 indikator, nilai IKD baru sebesar 0,5 masuk dalam kategori sedang.

5. Pemantapan layanan publik berbasis Teknologi Informasi

Era perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat memberi peluang kepada pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. SPBE akan membawa dampak besar bagi masyarakat pengguna layanan, dengan memunculkan berbagai inovasi layanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, capaian indeks SPBE Kabupaten Bantul sebesar 3,62 (sangat baik) dari skala 5. Nilai ini berlaku juga untuk tahun 2022 karena penilaian evaluasi SPBE dilaksanakan 2 tahun sekali.

Meski demikian permasalahan terkait integrasi berbagai macam aplikasi yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah masih belum seluruhnya terintegrasi, oleh karena itu upaya untuk pengintegrasian masih harus terus dilakukan mengingat Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE agar SPBE menjadi terpadu sehingga tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah

6. Sukses penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada

Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD Dan DPRD akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024, sementara Pilkada serentak diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024.

Berdasar pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya berbagai macam permasalahan yang ada diantaranya adalah validasi data pemilih,

pendistribusian logistik, politik uang, beban tugas KPPS, penyebaran hoax, teknis persiapan Pemilu, partisipasi pemilih, transparansi, dan masalah masa kampanye. Untuk mencegah terjadinya berbagai masalah agar penyelenggaraan Pemilu berlangsung sesuai aturan yang ada maka perlu dilakukan persiapan yang cukup.

Disamping penentuan prioritas tersebut, pada tahun 2024 Kabupaten Bantul juga akan lebih fokus pada pengembangan pengelolaan lahan pasir di sepanjang pantai selatan, pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif dan implementasi konsep THIS di beberapa Kawasan tertentu sebagaimana uraian berikut:

A. Pengembangan Pertanian Lahan Pasir

Kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di wilayah DIY setiap tahun sangat tinggi, yaitu di kisaran 150-250 hektar. Hal ini dapat dilihat dari luas lahan teknis yang semula sebesar 57.000 hektar saat ini tersisa sebesar 55.000 hektar. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu alternatif yang ditempuh oleh pemerintah DIY adalah dengan mengoptimalkan potensi lahan pasir pantai terutama yang berada di wilayah selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.

Bentang lahan pasir pantai di DIY sebagaimana disebutkan di atas adalah sepanjang 110 km yang mencakup Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul dengan potensi lahan pasir pantai seluas sekitar 3.450 hektar. Lahan pasir pantai tersebut merupakan lahan marginal karena memiliki keterbatasan kemampuan menahan air yang disebabkan karena porositas tinggi serta rendahnya kandungan unsur hara dan bahan organik, selain itu kondisi perbedaan suhu yang ekstrim pada malam dan siang hari serta udara yang sangat kering diindikasikan dapat menstimulasi meningkatnya penguapan air ke udara (evaporasi), kondisi ini berakibat tingkat kesuburan tanah menjadi rendah.

Kabupaten Bantul yang potensi lahan pasirnya terbentang dari Kapanewon Srandakan hingga Kapanewon Kretek juga telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengoptimalkan potensi lahan pasir pantai selatan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga yang ada di masyarakat diantaranya:

1. Pemanfaatan pompa air menggunakan tenaga listrik

Permasalahan utama dalam pengelolaan pertanian lahan pasir adalah ketersediaan air bagi pertumbuhan tanaman secara optimal. Sistem penyiraman tanaman tradisional dengan menggunakan gembor memerlukan tenaga kerja yang banyak, energi, dan waktu yang lama sehingga tidak efektif dan memerlukan biaya yang besar. Untuk mengatasi hal tersebut petani di kawasan pantai Samas, Sanden, Bantul bekerjasama dengan PLN lewat program Electrifying Agriculture melakukan penyiraman tanaman dengan menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan cara ini lahan yang dulu kering sekarang sudah bisa memproduksi aneka tanaman hortikultura.

(<https://www.krjogja.com/berita-lokal>)

Berdasar data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dalam perkembangannya sampai saat ini jumlah petani di sepanjang pantai Parangtriti baik petani lahan sawah maupun lahan pasir yang telah memanfaatkan listrik PLN untuk irigasi berjumlah 801 orang, sementara untuk sepanjang pantai Samas dan sekitarnya berjumlah 300 orang.

2. Kerjasama dengan CV. INDMIRA

CV.Indmira adalah perusahaan berbasis teknologi yang telah melakukan penelitian dan pengembangan agrokomplek (pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan) dan rehabilitasi lingkungan. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 1985 berkedudukan di Jl. Kaliurang km. 16,3 Pakem, Sleman, Yogyakarta.

Kerjasama yang telah dilakukan antara Indmira Group dengan petani bawang merah yang berada di lokasi Pantai Baru, Srandakan, Bantul berupa Program Pertanian Terintegrasi (*Integrated Farming*), program ini mengintegrasikan pertanian dari hulu hingga hilir sehingga dapat mengontrol kualitas produk sejak dari budidaya hingga proses pasca panen. Dalam proses budidaya dilakukan substitusi pupuk dengan komposisi 25% pupuk anorganik dan 75% pupuk organik, setelah panen dilakukan proses pengeringan sekaligus observasi dari tim riset Indmira untuk mengamati penyusutan yang terjadi.

(<https://indmira.com/pertanian-terintegrasi-indmira-bersama-petani-bawang-merah>)

Selain kerjasama sebagaimana diuraikan di atas beberapa program kegiatan berikut juga mempunyai potensi yang besar untuk dikerjasamakan dengan pihak lain, diantaranya adalah:

1. Inovasi irigasi kabut di lahan pasir.

Irigasi kabut adalah sistem pengairan tanaman dengan menggunakan air yang dipompa ke dalam selang yang telah dipasang nozzle. Dari lubang kecil-kecil pada *nozzle* tersebut air akan memancar ke atas yang kemudian menjadi seperti kabut sehingga dapat menyirami tanaman. Fungsi penyemprotan hanya untuk melembabkan kembali tanah dan udara di sekitar lahan pertanian. Teknik irigasi kabut dilakukan untuk efisiensi dalam mengolah lahan pertanian terutama bagi jenis lahan yang sulit menahan air.

2. Sistem budidaya tanaman secara polikultur (bawang merah, cabai, ubi ungu, buah naga, sayuran)

Polikultur adalah pola pertanian dengan banyak jenis tanaman pada satu bidang lahan yang tersusun dan terencana dengan menerapkan aspek lingkungan yang lebih baik. Beberapa keuntungan dari sistem tanam ini adalah dapat mengurangi serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dapat memutus siklus OPT, hidup Hama/Penyakit

(H/P) karena sistem ini dibarengi dengan rotasi tanaman, menambah kesuburan tanah, memperoleh hasil panen yang beragam.

3. Pengembangan kelompok ternak di lahan pasir (bebek turi, domba, sapi)

Keberadaan ternak di wilayah pesisir dalam mendukung pengembangan usaha pertanian dinilai cukup strategis dan masih perlu mendapat perhatian. Beberapa penelitian menunjukkan pemanfaatan pupuk organik dari limbah kandang ternak mampu meningkatkan produksi tanaman di lahan pasir pantai dan perbaikan lingkungan. Usaha pemanfaatan limbah kandang ternak untuk tanaman dan pemanfaatan sisa tanaman untuk pakan tersebut merupakan rangkaian daur ulang dalam sistem usahatani terpadu yang dapat menerapkan metode *low external input sustainable agriculture* (LEISA) untuk meminimalkan biaya produksi. (<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/8281>)

Uraian di atas menunjukkan usaha peternakan terintegrasi dengan usaha pertanian lebih menguntungkan karena pemakaian pupuk organik akan menaikkan kesuburan tanah dan mengurangi pemakaian pupuk anorganik sehingga dapat menekan biaya produksi dan menaikkan produksi tanaman.

4. Pengembangan kelompok pengolah dan pemasar ikan

Tangkapan ikan hasil nelayan di Kabupaten Bantul baru berkisar 1.000 ton per tahun, hal ini disebabkan karena tidak dimilikinya Pelabuhan, sehingga pendaratan perahu baru dilakukan di empat lokasi titik pendaratan yang masing-masing ada Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Keempat lokasi tersebut adalah pantai Depok, pantai Samas, pantai Goa Cemara, dan pantai Pandansimo. Jumlah kunjungan wisata di empat lokasi tersebut cukup besar sehingga hasil tangkapan ikan belum mampu memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung. Untuk mencukupi kebutuhan ikan terpaksa didatangkan dari luar daerah seperti Cilacap dan Semarang, selain itu hasil tangkapan nelayan juga kurang beragam sehingga

kurang mendukung dalam hal variasinya seperti tidak ada cumi, kerang dll.

Tingginya jumlah wisatawan di empat lokasi tersebut disamping memerlukan jumlah ikan yang cukup juga kemampuan memasak para pemilik warung makan, karena pada umumnya tujuan utama wisatawan berkunjung adalah ingin menikmati suasana pantai sekaligus menikmati olahan ikan segar hasil tangkapan nelayan.

B. Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan konsep pekonomian yang lebih menekankan ide, gagasan dan kreatifitas seseorang atau kelompok sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Ada 17 sub sektor jenis ekonomi kreatif yaitu arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film animasi video, fotografi, kerajinan, kuliner atau makanan, musik, aplikasi, pengembangan permainan, penerbitan, periklanan, TV dan radio, seni pertunjukkan, dan seni rupa. (Ekonomi Kreatif, Akselerator ekonomi Indonesai dalam <http://hmjie.fekon.unand.ac.id>)

Sektor ekonomi kreatif sangat berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mengurangi tingkat pengangguran.

Kabupaten Bantul pada Tahun 2017 telah ditetapkan oleh Barekraf RI sebagai salah satu Kabupaten Kreatif Indonesia dengan kriya sebagai sub sektor unggulan. Sebagai tindak lanjut penetapan tersebut telah diupayakan pengembangan ekonomi kreatif melalui berbagai macam program dan kegiatan menuju pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Kreatif Dunia versi Unesco Creative Cities Network (UCCN). Untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan kajian Kabupaten Kreatif Bantul yang akan menghasilkan dokumen cetak biru (*blueprint*) Ekosistem Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul. Dokumen cetak biru menjadi panduan operasional program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasaran pekerjaan Kajian Kabupaten Kreatif adalah :

- a. Mengidentifikasi program-program kerja OPD yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
- b. Mengidentifikasi dan memetakan potensi, kendala, dan permasalahan dalam membentuk sinergi program antar OPD;
- c. Membuat pemodelan *platform* kolaborasi *hexahelix* (kolaborasi *akademia, business, agregator, government, community*, dan *media* untuk bergerak bersama) dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kegiatan OPD;
- d. Menganalisis integrasi *Key Performance Indicator* bagi OPD dalam pencapaian program-program dan kegiatan;
- e. Menyusun Dokumen *Blueprint* Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul sesuai dengan *Roadmap* Kabupaten Kreatif Kabupaten Bantul.

Dasar pertimbangan pencapaian Kabupaten Kreatif adalah:

1. Tumbuh dan berkembangnya Kabupaten Bantul sebagai sebuah embrio ekosistem ekonomi kreatif (ekraf) yang sangat potensial untuk dikembangkan. terutama di bidang kriya (craft). Hal ini dibuktikan dengan keunggulan daya saing produk kriya local Kabupaten Bantul yang mampu menembus pasar global (Eropa, Amerika Utara, Australia, Asia, Afrika). Beberapa produk kriya dengan jenama local tersebut diantaranya adalah Timbul Raharjo, Java Wood and Steel, Palem Craft, Tashinda, Kayu Manis, Cocon Asia, Tvintage, Ride One Gallery, Indorisakti, Panelindo, Kharisma, Décor Asia, dan Pulung Gembol Jati.
2. Adanya potensi kolaborasi *hexahelix* dari enam pemangku kepentingan yaitu akademisi, pelaku bisnis, komunitas kreatif, pemerintah, media, dan lembaga keuangan yang diharapkan mampu membentuk jejaring kerja kolaboratif dari hulu hingga

hilir, dimulai dari proses kreasi produk, proses produksi, distribusi, konsumsi, hingga proses konservasi.

3. Adanya potensi menjadi bagian dari jejaring kota-kota kreatif dunia dalam sebuah ekosistem besar dibawah koordinasi UCCN.

C. Implementasi konsep THIS

Implementasi pendekatan perencanaan dengan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan Tematik dimaksudkan fokus pelaksanaan pembangunan pada satu pokok permasalahan/tema, Holistik dimaksudkan perencanaan pembangunan yang komprehensif dari hulu sampai hilir, Integratif dimaksudkan melibatkan berbagai *stakeholders* dalam pengembangan suatu pokok permasalahan/tema dan Spasial dimaksudkan pelaksanaan pembangunan fokus pada suatu daerah atau wilayah tertentu.

Sejalan dengan pendekatan THIS yang dilaksanakan Bappenas, Kabupaten Bantul juga menerapkan pendekatan THIS pada:

1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP).
Implementasi konsep THIS pada KSPP di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
 - a. Tematik:
Pengembangan Kawasan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
 - b. Holistik:
Dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh unsur dan aspek dari hulu hingga gilir.
 - c. Integratif:
Melibatkan berbagai stakeholder yaitu pertanian hortikultura dan peternakan (DKPP), perikanan (DKP) dan didukung dengan penanganan jalan dan rehabilitasi jaringan irigasi (DPUPKP), serta pembangunan RPH (DKPP).
 - d. Spasial:

Dikembangkan di Kawasan pantai selatan (Kapanewon Kretek, Sanden dan Srandakan), Imogiri, Pleret, Sewon, Pandak, dan Pajangan.

2. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

a. Tematik:

Pengembangan agrowisata untuk pengentasan kemiskinan dan menggali potensi unggulan

b. Holistik:

Memadukan berbagai potensi ekonomi wilayah (pertanian, industri dan pariwisata)

c. Integratif:

Melibatkan berbagai Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya

d. Spasial:

Dikembangkan di Kawasan Bantul Timur (Kapanewon Jetis, Imogiri, Pleret, Dlingo)

3. Pencegahan dan Penurunan Stunting dengan Telur Bahagia

a. Tematik:

Budidaya Ayam Petelur Cage-Free untuk Produksi Telur Fungsional Kaya Selenium dalam rangka Penurunan Stunting dan Pengurangan Permasalahan Kemiskinan di Kabupaten Bantul.

b. Holistik:

Perencanaan yang komprehensif dari hulu sampai hilir, perencanaan (Bappeda), penganggaran dan pelaksanaan (DKPP, DPMKad (dana padukuhan), DP3PPKB, Dinkes, Dikpora), *Corporate Social Responsibility* (CSR), Perguruan Tinggi (UGM dengan hasil risetnya).

c. Integratif:

- Pemanfaatan teknologi untuk memodifikasi pakan yang memiliki kandungan cukup lengkap tapi mudah didapatkan, sehingga memudahkan peternak dalam pengelolaannya. Model ini akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat miskin serta pengembangan produk local.
- Melibatkan berbagai stakeholder diantaranya:
 - Hulu: DKPP (produksi telur, kegiatan pekarangan oleh KWT);
 - Hilir: DPMKal (keg posyandu), DP3PPKB (penanganan balita), Dinkes (kesehatan balita), Dikpora (PAUD)
 - *Coorporate Social Responsibility* (CSR)
 - Perguruan Tinggi: UGM (hasil riset dan pendampingan)

d. Spasial:

Dikembangkan di kawasan Bantul Timur, Bantul Barat dan Pansela yaitu wilayah yang warganya masih memiliki pekarangan untuk budidaya ayam bahagia serta memiliki tingkat kemiskinan dan stunting tinggi.

Selanjutnya untuk melaksanakan prioritas pembangunan tersebut maka disusun sasaran Perangkat Daerah (PD). Masing-masing PD merencanakan program kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran. Keberhasilan setiap sasaran daerah yang telah ditetapkan ditentukan oleh keberhasilan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh PD sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan fungsi PD. Rencana program yang diselenggarakan oleh PD selain merupakan program prioritas juga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Interkoneksi Pendekatan Rancangan Prioritas dan sasaran Kabupaten Bantul dengan sasaran dan program prioritas Perangkat Daerah tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Interkoneksi Pendekatan Prioritas dan Sasaran Kabupaten Bantul dengan sasaran dan program prioritas Perangkat Daerah tahun 2024

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1. Peningkatan kualitas SDM	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	1. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		2. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar		
		3. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
		Meningkatnya prestasi olahraga	Program Pengembangan Kapasitas	

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Daya Saing Keolahragaan	
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	UPTD Jamkesda

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Kesehatan Masyarakat	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	UPTD Labkesda
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27 Puskesmas
		Meningkatnya pembudayaan masyarakat sehat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
			Program Pemenuhan	27 Puskesmas

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
1. Peningkatan kualitas SDM	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
1. Peningkatan kualitas SDM	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
			Program Perlindungan Khusus Anak	
		Kelahiran penduduk terkendali	Program Pengendalian Penduduk	
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
1. Peningkatan kualitas SDM	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Menurunnya angka kematian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Panembahan Senopati
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1. Peningkatan kualitas SDM	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penyelenggaraan Jalan	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
			Program Penataan Bangunan Gedung	
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Penyediaan Air Minum	
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Program Pengembangan Perumahan	
			Program Kawasan Permukiman	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	
2. Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Dinas Perhubungan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
2. Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	
		Meningkatnya kualitas	Program Penyelesaian	

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		penatagunaan tanah	Sengketa Tanah Garapan	
			Program Penatagunaan Tanah	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	
3. Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.		Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
			Program Pengolahan dan Pemasaran	

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Hasil Perikanan	
3. Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya jaringan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya kualitas pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Program Pemasaran Pariwisata	
3. Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		Meningkatnya produksi pertanian	Program Penyelenggaraan	

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
3. Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Program Pelayanan Izin	

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Usaha Simpan Pinjam	
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
			Program Penilaian Kesehatan KSP/SP	
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
		Meningkatnya kualitas UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Program Pengembangan UMKM	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
3. Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
3. Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
3. Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Program Penanganan Bencana	
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
4. Pengelolaan lingkungan hidup dan resiko bencana	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Lingkungan Hidup	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
			Program Pembinaan dan	

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan	
4. Pengelolaan lingkungan hidup dan resiko bencana	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
5. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
		Pengembangan aplikasi dan statistik	Program Aplikasi Informatika	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
5. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Satuan Polisi Pamong Praja

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
5. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
5. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Urusan Pertanahan Program Penyelenggara an Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksana an	
5. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
5. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	Program Penyelenggaraan Keistimewaan	Kapanewon

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		pada masyarakat	Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksana an	
			Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	
5. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Program Penyelenggara an Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksana an	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya kondusifitas masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
		Meningkatnya kondusifitas masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan	

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
5. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya profesionalisme ASN	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Program Kepegawaian Daerah	
5. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Inspektorat Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
5. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah - Bagian Umum dan Protokol
				Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
				Sekretariat Daerah - Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan
				Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
				Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Program Perekonomian	Sekretariat Daerah -

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			dan Pembangunan	Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA
				Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan
				Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
5. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
5. Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD

PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
6.Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber : Bappeda Bantul, 2023, diolah,

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kewilayahan

Hasil forum kewilayahan yang dilaksanakan oleh DIY dan Kabupaten Bantul menyepakati program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sinkronisasi Dukungan Program/Kegiatan DIY-Bantul

No	Program Prioritas	Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBN		Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBD DIY		Dukungan Program/Kegiatan Kabupaten Bantul	
A.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS						
1	Pembangunan dan Pengembangan TPA Regional Piyungan	Peningkatan jalan (termasuk drainase) Ruas Yogyakarta-Simpang Piyungan	DPUPKP	Peningkatan jalan (termasuk drainase) Ruas Sampakan-Singosaren	DPUPKP	Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Drainase, pengelolaan Air minum dan Air limbah, Perbaikan RTLH	DPUPKP
		RPPJ dan Lampu Penerangan Jalan di Ruas Jalan Nasional Jogja-Wonosari	Dishub	Peningkatan jalan (termasuk drainase) Ruas Ngablak-Bawuran	DPUPKP	Lampu dan Rambu Jalan	Dishub
		Keterpaduan Penanggulangan Kemiskinan di Desa : - Bimtek Fasilitator Keterpaduan Penanggulangan Kemiskinan di Desa - Replikasi Desa Model Keterpaduan Penanggulangan Kemiskinan di Desa	DPMK	Peningkatan jaringan perpipaan air minum di Banyakan 3	DPUPKP	Penguatan dan Dukungan Sarpras untuk Balai Kalurahan dalam Pelaksanaan Keistimewaan - DAIS 2024	DPMK
		Konvergensi pencegahan stunting di desa - Bimtek fasilitator pencegahan stunting di	DPMK	Lampu, rambu, dan flashing lamp di ruas jalan Sampakan	Dishub	Pelatihan Terpadu Kader Posyandu	DPMK

No	Program Prioritas	Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBN		Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBD DIY		Dukungan Program/Kegiatan Kabupaten Bantul	
		desa - Replikasi Desa Model Konvergensi Pencegahan Stunting di desa					
		Desa Peduli Kesehatan - Bimtek fasilitator Desa Peduli Kesehatan - Replikasi Desa Desa Peduli Kesehatan	DPMK	Penyiapan Lahan Rehabilitasi TPA Piyungan Dalam Bentuk Taman Kehat	DLH	Pengelolaan sampah tingkat kalurahan	DPMK
		Revitalisasi Pasar Desa	DPMK			Fasilitasi Pengelolaan BUMKAL dan BUMKALMA	DPMK
		Pengembangan Desa Wisata	DPMK			Fasilitasi bantuan BKK, P2MK, PPBMP, DD, ADD, DiKal, dan BLT DD kepada kalurahan	DPMK
		Penguatan BUMDES dan BUMKALMA	DPMK			Pemberdayaan Kelompok P2W-KSS	DPMK
		Penyiapan Lahan Rehabilitasi TPA Piyungan Dalam Bentuk Taman Kehat	DLH			Peningkatan Kapasitas PKK Kalurahan	DPMK
		Sarpras dan obat Program	Dinkes	Obat esensial	Dinkes	Peningkatan Kapasitas LKK, LPMK, LPM	DPMK
				Alat kesehatan RSUD Saras Sdyatma	Dinkes	Bimtek Program global gotong royong	DPMK
				Jambanisasi	Dinkes	Penguatan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan pelatihan pembenihan ikan air tawar	DKP
						Pelatihan pengolahan dan pemasaran ikan	DKP
						Penatausahaan tanah SG PAG, fasilitasi pemanfaatan tanah SG PAG - DAIS 2024	DPTR
						Rehabilitasi lahan - DAIS 2024	DLH
						pengelolaan sampah (kalurahan Potorono dan	DLH

No	Program Prioritas	Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBN		Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBD DIY		Dukungan Program/Kegiatan Kabupaten Bantul	
						Bantul) - untuk penyelesaian sampah perkotaan berupa TPST - DAIS 2024	
						Peningkatan Sarpras Desa Wisata di Kalurahan Srimulyo	Dispar
						Pelatihan petani dan Pelatihan Taruna Tani	DKPP
						Pelayanan kesehatan dan obat	Dinkes
B.	PROGRAM PENATAAN/PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS						
1	Penataan Kawasan Sumbu Filosofi	Rehabilitasi/Perkuatan Tebing Sungai Celeng di Kapanewon Imogiri	DPUPKP	Penanganan banjir sekitar panggung krapyak	DPUPKP	Rehabiltasi Jalan Ruas Bawuran Wonolelo - DAIS 2024	DPUPKP
		Rehabilitasi/Perkuatan Tebing Sungai Oyo di Kapanewon Imogiri	DPUPKP	Peningkatan jalan Ruas Patuk-Dlingo	DPUPKP	Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Drainase, pengelolaan Air minum dan Air limbah, Perbaikan RTLH	DPUPKP
		Keterpaduan Penanggulangan Kemiskinan di Desa : - Bimtek Fasilitator Keterpaduan Penanggulangan Kemiskinan di Desa - Replikasi Desa Model Keterpaduan Penanggulangan Kemiskinan di Desa	DPMK	Pembangunan Jembatan Karangsemut (Ruas Yogyakarta - Barongan)	DPUPKP	Rehabilitasi sekolah di SMP N 3 PLERET, SD N Karanggayam Pleret	Dinas Dikpora

No	Program Prioritas	Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBN		Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBD DIY		Dukungan Program/Kegiatan Kabupaten Bantul	
		Konvergensi pencegahan stunting di desa - Bimtek fasilitator pencegahan stunting di desa - Replikasi Desa Model Konvergensi Pencegahan Stunting di desa	DPMK	Peningkatan jalan (termasuk drainase) Ruas Yogyakarta Barongan	DPUPKP	Penatausahaan tanah SG PAG, fasilitasi pemanfaatan tanah SG PAG - DAIS 2024	DPTR
		Desa Peduli Kesehatan - Bimtek fasilitator Desa Peduli Kesehatan - Replikasi Desa Desa Peduli Kesehatan	DPMK	Peningkatan jalan (termasuk drainase) Ruas Imogiri - Dodogan	DPUPKP	Lampu dan Rambu Jalan	Dishub
		Revitalisasi Pasar Desa	DPMK	Pembangunan RTLH di Imogiri (Girirejo, Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, Selopamioro, Sriharjo)	DPUPKP	Penguatan dan Dukungan Sarpras untuk Balai Kalurahan dalam Pelaksanaan Keistimewaan - DAIS 2024	DPMK
		Pengembangan Desa Wisata	DPMK	Pengembalian flora fauna khas daerah dalam Bentuk Taman Kehati - DLH	DLH	Pelatihan Terpadu Kader Posyandu	DPMK
		Penguatan BUMDES dan BUMKALMA	DPMK	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	DLH	Pengelolaan sampah tingkat kalurahan	DPMK
				Peningkatan Jalan Menuju Kawasan Destinasi Wisata (Jalan Bantul, Jalan Parangtritis, jalan Imogiri Barat, Jalan Imogiri Timur)	Dispar	Fasilitasi Pengelolaan BUMKAL dan BUMKALMA	DPMK
		Sarpras dan obat Program	Dinkes	Obat esensial	Dinkes	Fasilitasi bantuan BKK, P2MK, PPBMP, DD, ADD, DiKal, dan BLT DD kepada kalurahan	DPMK
				Alat kesehatan RSUD Saras Sdyatma	Dinkes	Pemberdayaan Kelompok P2W-KSS	DPMK

No	Program Prioritas	Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBN		Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBD DIY		Dukungan Program/Kegiatan Kabupaten Bantul	
				Jambanisasi	Dinkes	Peningkatan Kapasitas PKK Kalurahan	DPMK
						Peningkatan Kapasitas LKK, LPMK, LPM	DPMK
						Bimtek Program global gotong royong	DPMK
						Penguatan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan pelatihan pembenihan ikan air tawar	DKP
						Pelatihan pengolahan dan pemasaran ikan	DKP
						Pemulihan ekosistem wilayah - DAIS 2024	DLH
						Pengembangan Kampung Proklam - DAIS 2024	DLH
						Pendataan Keanekaragaman Hayati dan penyusunan buku kehati	DLH
						Penyusunan Master Plan Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kalurahan (Muntuk, Girirejo)	Dispar
						Peningkatan Sarpras Desa Wisata di Kalurahan (Terong, Wukirsari)	Dispar
						Penataan Sarpras Kawasan Destinasi Wisata Kalurahan (Wukirsari, Bawuran, Segoroyoso)	Dispar
						Pelatihan Budidaya Tanaman	DKPP
						Pelayanan kesehatan dan obat	Dinkes

No	Program Prioritas	Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBN		Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBD DIY		Dukungan Program/Kegiatan Kabupaten Bantul	
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Peningkatan jalan Ruas Yogyakarta - Bts Kota Bantul	DPUPKP	Penyusunan Masterplan Drainase di Sleman-Kota Yogyakarta-Bantul	DPUPKP	Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Drainase, pengelolaan Air minum dan Air limbah, Perbaikan RTLH	DPUPKP
		Rehabilitasi/Perkuatan Tebing Sungai Bedog di Kapanewon Kasihan dan Bantul	DPUPKP	Peningkatan jalan Ruas Yogyakarta - Dongkelan	DPUPKP	Penatausahaan tanah SG PAG, fasilitasi pemanfaatan tanah SG PAG - DAIS 2024	DPTR
		Rehabilitasi/Perkuatan Tebing Sungai Winongo di Kapanewon Sewon	DPUPKP	Perluasan jaringan perpipaan air limbah (SR SPALD Terpusat Skala Kota) di Kapanewon Banguntapan Kasihan dan Sewon	DPUPKP	Lampu dan Rambu Jalan	Dishub
		Rehabilitasi/Perkuatan Tebing Sungai Gajah Wong di Kapanewon Banguntapan dan Pleret	DPUPKP	Penataan Kawasan Kumuh di Kalurahan Argodadi dan Guwosari	DPUPKP	Penguatan dan Dukungan Sarpras untuk Balai Kalurahan dalam Pelaksanaan Keistimewaan - DAIS 2024	DPMK
		Optimalisasi Talang air DI Pendowo di Jembatan BIBIS	DPUPKP	Pengembalian flora fauna khas daaerah dalam Bentuk Taman Kehati	DLH	Pelatihan Terpadu Kader Posyandu	DPMK
		Peningkatan jalan (termasuk drainase) Jl. Majapahit (Ringroad Janti ke selatan)	DPUPKP	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	DLH	Pengelolaan sampah tingkat kalurahan	DPMK
		Peningkatan jalan (termasuk drainase) Jl. Ahmad Yani (Ringroad/Terminal Giwangan ke Barat)	DPUPKP	Pengembalian flora fauna khas daaerah dalam Bentuk Taman Kehati - DLH	DLH	Fasilitasi Pengelolaan BUMKAL dan BUMKALMA	DPMK
		Peningkatan jalan (termasuk drainase) Jl. Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH (Ringroad Druwo ke Barat)	DPUPKP	Pembangunan IPAL Industri di Kabupaten Bantul	DLH	Fasilitasi bantuan BKK, P2MK, PPBMP, DD, ADD, DiKal, dan BLT DD kepada kalurahan	DPMK

No	Program Prioritas	Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBN		Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBD DIY		Dukungan Program/Kegiatan Kabupaten Bantul	
		Peningkatan jalan (termasuk drainase) Jl. Brawijaya (Ringroad Madukismo ke Barat)	DPUPKP	Mitigasi Perubahan Iklim melalui Program Kampung Iklim di Kabupaten Bantul	DLH	Pemberdayaan Kelompok P2W-KSS	DPMK
		Peningkatan jalan (termasuk drainase) Ruas Simpang Kweden - Bakulan	DPUPKP	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul	DLH	Peningkatan Kapasitas PKK Kalurahan	DPMK
		Peningkatan jalan (termasuk drainase) Ruas Bantul - Simpang Kweden	DPUPKP	Pembangunan Hutan Kota di Kabupaten Bantul (Tegaldowo dan Trirenggo)	DLH	Peningkatan Kapasitas LKK, LPMK, LPM	DPMK
		Penataan Kawasan Kumuh di Kalurahan Banguntapan dan Bangunjiwo	DPUPKP	Rehabilitasi Flora dan Fauna Khas Bantul berupa Taman Kehati (Pundong, Piyungan, Pleret, Pajangan)	DLH	Bimtek Program global gotong royong	DPMK
		Pembangunan RTLH di Kapanewon Banguntapan (SINGOSAREN 25, WIROKERTEN 20)	DPUPKP			Penguatan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan pelatihan pembenihan ikan air tawar	DKP
		Pembangunan RTLH di Kapanewon Kasihan (Bangunjiwo 20, Ngestiharjo 20)	DPUPKP			Pelatihan pengolahan dan pemasaran ikan	DKP
		Halte 2 unit di Depan Kesbang dan di depan Balai Kalurahan Pendowoharjo di ruas jalan Nasional (Jalan Bantul)	Dishub			Pemulihan ekosistem wilayah - DAIS 2024	DLH
		Keterpaduan Penanggulangan Kemiskinan di Desa : - Bimtek Fasilitator Keterpaduan Penanggulangan Kemiskinan di Desa - Replikasi Desa Model	DPMK			Pengembangan Kampung Proklam - DAIS 2024	DLH

No	Program Prioritas	Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBN		Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBD DIY		Dukungan Program/Kegiatan Kabupaten Bantul	
		Keterpaduan Penanggulangan Kemiskinan di Desa					
		Konvergensi pencegahan stunting di desa - Bimtek fasilitator pencegahan stunting di desa - Replikasi Desa Model Konvergensi Pencegahan Stunting di desa	DPMK			Pemulihan ekosistem wilayah	DLH
		Desa Peduli Kesehatan - Bimtek fasilitator Desa Peduli Kesehatan - Replikasi Desa Desa Peduli Kesehatan	DPMK			Pengendalian pencemaran lingkungan	DLH
		Revitalisasi Pasar Desa	DPMK			Pencegahan Kerusakan Lingkungan, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	DLH
		Pengembangan Desa Wisata	DPMK			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	DLH
		Penguatan BUMDES dan BUMKALMA	DPMK			Konservasi SDA dan Kehati	DLH
		Pembangunan IPAL Industri di Kabupaten Bantul	DLH			Penyusunan Master Plan Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kalurahan (Pendowoharjo, Jagalan)	Dispar
		Mitigasi Perubahan Iklim melalui Program Kampung Iklim di Kabupaten Bantul	DLH			Penataan Sarpras Kawasan Destinasi Wisata Kalurahan (Jagalan, Singosaren, Baturetno)	Dispar
		Pembangunan Hutan Kota di Kabupaten Bantul (Tegaldowo dan Trirenggo)	DLH			Pelatihan Budidaya Tanaman	DKPP
		Rehabilitasi Flora dan Fauna Khas Bantul berupa	DLH			Rehabilitasi jaringan Irigasi Tersier	DKPP

No	Program Prioritas	Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBN		Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBD DIY		Dukungan Program/Kegiatan Kabupaten Bantul	
		Taman Kehati (Pundong, Piyungan, Pleret, Pajangan)					
		Sarpras dan obat Program	Dinkes	Obat esensial	Dinkes	Pelatihan Taruna Tani	DKPP
				Alat kesehatan RSUD Saras Sdyatma	Dinkes	Pelayanan kesehatan dan obat	Dinkes
3	Pengembangan Kawasan Pantai Samas-Parangtritis	Rehabilitasi/Perkuatan Tebing Sungai Winongo di Kapanewon Kretek	DPUPKP	Peningkatan jalan (termasuk drainase) Ruas Yogyakarta Bakulan (Parangtritis)	DPUPKP	Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Drainase, pengelolaan Air minum dan Air limbah, Perbaikan RTLH	DPUPKP
		Peningkatan jalan (termasuk drainase) Ruas Bakulan - Kretek - DPUPKP	DPUPKP	Pembangunan RTLH di Kretek (Parangtritis, Tirtohargo, Tirtosari)	DPUPKP		
		Pembangunan RTLH di Kapanewon Kretek (Tirtomulyo 20)	DPUPKP	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kesiapsiagaan Bencana: EWS Tsunami, Rambu Evakuasi, Papan Informasi, Radio Rig, Kabel, Antena, HT	BPBD	Sarpras kesiapsiagaan bencana (kawasan selatan) - DAIS 2024	BPBD
		Flashing Lamp (warning light) di depan Terminal Parangtritis	Dishub	Flashing lamp dan rambu di selatan TPR Samas	Dishub	Penatausahaan tanah SG PAG, fasilitasi pemanfaatan tanah SG PAG - DAIS 2024	DPTR
		Rambu dan LPJU di sepanjang JJLS	Dishub	Fasilitasi Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) bagi nelayan perikanan tangkap laut	DKP	Lampu dan Rambu Jalan	Dishub
		RPPJ di S-3 Grogol	Dishub	Konservasi gumuk pasir	DLH	Penguatan dan Dukungan Sarpras untuk Balai Kalurahan dalam Pelaksanaan Keistimewaan - DAIS 2024	DPMK
		Keterpaduan Penanggulangan	DPMK	Peningkatan Jalan Menuju Kawasan	Dispar	Pelatihan Terpadu Kader Posyandu	DPMK

No	Program Prioritas	Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBN		Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBD DIY		Dukungan Program/Kegiatan Kabupaten Bantul	
		Kemiskinan di Desa : - Bimtek Fasilitator Keterpaduan Penanggulangan Kemiskinan di Desa - Replikasi Desa Model Keterpaduan Penanggulangan Kemiskinan di Desa		Destinasi Wisata (Jalan Samas, Jalan Parangtritis, Jalan Srandakan)			
		Konvergensi pencegahan stunting di desa - Bimtek fasilitator pencegahan stunting di desa - Replikasi Desa Model Konvergensi Pencegahan Stunting di desa	DPMK	Tindak Lanjut Penataan Kawasan Gumuk Pasir Parangkusumo	Dispar	Pengelolaan sampah tingkat kalurahan	DPMK
		Desa Peduli Kesehatan - Bimtek fasilitator Desa Peduli Kesehatan - Replikasi Desa Desa Peduli Kesehatan	DPMK	1. FGD Pengelola Desa Wisata dengan stakeholder terkait	Dispar	Fasilitasi Pengelolaan BUMKAL dan BUMKALMA	DPMK
		Revitalisasi Pasar Desa	DPMK	2. Pendataan Kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata di Kabupaten Bantul	Dispar	Fasilitasi bantuan BKK, P2MK, PPBMP, DD, ADD, DiKal, dan BLT DD kepada kalurahan	DPMK
		Pengembangan Desa Wisata	DPMK	3. Pelatihan Pemanfaatan TIK bagi Pengelola Desa Wisata	Dispar	Pemberdayaan Kelompok P2W-KSS	DPMK
		Penguatan BUMDES dan BUMKALMA	DPMK	4. Lomba Desa Wisata	Dispar	Peningkatan Kapasitas PKK Kalurahan	DPMK
		Lampu Penerangan JJLS	Dispar	5. Lomba Pokdarwis	Dispar	Peningkatan Kapasitas LKK, LPMK, LPM	DPMK
				6. Pembinaan Desa Wisata	Dispar	Bimtek Program global gotong royong	DPMK
					Dispar	Penguatan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	DKP

No	Program Prioritas	Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBN		Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBD DIY		Dukungan Program/Kegiatan Kabupaten Bantul	
						dan pelatihan pembenihan ikan air tawar	
				1. Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf sub sektor Kriya dan Kuliner	Dispar	Pelatihan pengolahan dan pemasaran ikan	DKP
				2. Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf sub sektor Seni Pertunjukan dan Fashion	Dispar	Konservasi SDA dan Kehati	DLH
					Dispar	Peningkatan Sarpras Destinasi Wisata di Kalurahan Gading Sari	Dispar
				1. Temu Pelaku Ekraf Kriya	Dispar	Penataan Sarpras Kawasan Destinasi Wisata Kalurahan Srigading	Dispar
				2. Temu Pelaku Ekraf Kuliner	Dispar	Pelatihan Taruna Tani	DKPP
				3. Temu Pelaku Ekraf Seni Pertunjukan	Dispar		
				4. Temu Pelaku Ekraf Fashion	Dispar		
				5. Identifikasi dan Pendataan 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantul	Dispar		
				6. Pembuatan Aplikasi Profil Ekraf Kabupaten Bantul	Dispar		
		Sarpras dan obat Program	Dinkes	Obat esensial	Dinkes	Pelayanan kesehatan dan obat	Dinkes
				Alat kesehatan RSUD Saras Sdyatma	Dinkes		
				Jambanisasi	Dinkes		
4	Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY	Optimalisasi DI Pendowo di Kapanewon Bambanglipuro dan Sanden	DPUPKP	Peningkatan jalan (termasuk drainase) Ruas	DPUPKP	Pembangunan Taman Budaya- DAIS 2024	DPUPKP

No	Program Prioritas	Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBN		Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBD DIY		Dukungan Program/Kegiatan Kabupaten Bantul	
				Srandakan - Poncosari - Pandansimo			
		Pembangunan RTLH di Srandakan (Trimurti 20)	DPUPKP	Peningkatan jalan (termasuk drainase) Ruas Palbapang - Samas	DPUPKP	Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Drainase, pengelolaan Air minum dan Air limbah, Perbaikan RTLH	DPUPKP
		Rambu dan LPJU di sepanjang jalan JJLS	Dishub	Optimalisasi DI Pijenan di Kapanewon Bambanglipuro Sanden dan Pandak - DPUPKP	DPUPKP	Rehabilitasi sekolah di SMPN 1 Panjanglejo, SMPN 1 Pundong, SMP N 2 Kretek, SD Glagahan, SD Kembang Songo, SD Dayu Sanden	Dinas Dikpora
		Deliniator dan marka di sepanjang jalan JJLS	Dishub	Pembangunan RTLH di Bambanglipuro (Mulyodadi, Sumbermulyo)	DPUPKP	Penatausahaan tanah SG PAG, fasilitasi pemanfaatan tanah SG PAG - DAIS 2024	DPTR
		Keterpaduan Penanggulangan Kemiskinan di Desa : - Bimtek Fasilitator Keterpaduan Penanggulangan Kemiskinan di Desa - Replikasi Desa Model Keterpaduan Penanggulangan Kemiskinan di Desa	DPMK	Pembangunan RTLH di Sanden (Gadingsari, Murtigarding)	DPUPKP	Lampu dan Rambu Jalan	Dishub
		Konvergensi pencegahan stunting di desa - Bimtek fasilitator pencegahan stunting di desa - Replikasi Desa Model Konvergensi Pencegahan Stunting di desa	DPMK	Pembangunan RTLH di Srandakan (Poncosari, Trimurti)	DPUPKP	Penguatan dan Dukungan Sarpras untuk Balai Kalurahan dalam Pelaksanaan Keistimewaan - DAIS 2024	DPMK

No	Program Prioritas	Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBN		Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBD DIY		Dukungan Program/Kegiatan Kabupaten Bantul	
		Desa Peduli Kesehatan - Bimtek fasilitator Desa Peduli Kesehatan - Replikasi Desa Desa Peduli Kesehatan	DPMK	Fasilitasi Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) bagi nelayan perikanan tangkap laut	DKP	Pelatihan Terpadu Kader Posyandu	DPMK
		Revitalisasi Pasar Desa	DPMK	Pengembangan alas bakau Baros (penyiapan lahan, penanaman, pemasangan barrier)	DLH	Pengelolaan sampah tingkat kalurahan	DPMK
		Pengembangan Desa Wisata	DPMK	Pengembalian flora fauna khas daerah di kawasan alas bakau	DLH	Fasilitasi Pengelolaan BUMKAL dan BUMKALMA	DPMK
		Penguatan BUMDES dan BUMKALMA	DPMK	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	DLH	Fasilitasi bantuan BKK, P2MK, PPBMP, DD, ADD, DiKal, dan BLT DD kepada kalurahan	DPMK
		Konservasi kawasan mangrove Baros Tirtohargo Bantul (penyiapan lahan, penanaman, pemasangan barrier)	DLH	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau pada Rest Area Srandakan	DLH	Pemberdayaan Kelompok P2W-KSS	DPMK
		Tindak Lanjut Pembangunan Kelok 18	Dispar	Tindak Lanjut Usulan KEK Pariwisata Samas - Parangtritis	Dispar	Peningkatan Kapasitas PKK Kalurahan	DPMK
		Sarpras dan obat Program	Dinkes	Obat esensial	Dinkes	Peningkatan Kapasitas LKK, LPMK, LPM	DPMK
				Alat kesehatan RSUD Saras Sdyatma	Dinkes	Bimtek Program global gotong royong	DPMK
				Jambanisasi	Dinkes	Penguatan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan pelatihan pembenihan ikan air tawar	DKP
						Pelatihan pengolahan dan pemasaran ikan	DKP
						alas bakau - DAIS 2024	DLH

No	Program Prioritas	Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBN		Usulan Dukungan Program/Kegiatan APBD DIY		Dukungan Program/Kegiatan Kabupaten Bantul	
						Pemulihan ekosistem wilayah - DAIS 2024	DLH
						Pengembangan Kampung Proklam - DAIS 2024	DLH
						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - DAIS 2024	DLH
						Pendataan Keanekaragaman Hayati dan penyusunan buku kehati	DLH
						Pelatihan Olahan Pangan	DKPP
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	DKPP
						Pemberian Alat Mesin Pertanian	DKPP
						Pelayanan kesehatan dan obat	Dinkes
C	PROGRAM STRATEGIS LAINNYA YANG DIPRIORITASKAN						
	Pengembangan Jogjakarta Smart Province	Pengembangan Desa Cerdas	DPMK	Pengembangan Desa Cerdas	DPMK	Updating data SDG's	DPMK

4.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM merupakan sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang terdiri dari:

1. SPM Pendidikan;
2. SPM Kesehatan;
3. SPM Pekerjaan Umum;
4. SPM Perumahan Rakyat;
5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- dan
6. SPM Sosial.

Ketentuan penerapan SPM di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan jenis dan indikator pelayanan dasar yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
I. SPM PENDIDIKAN			
1. Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun
2. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun
3. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun
II. SPM KESEHATAN			
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
4. Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
III. SPM PEKERJAAN UMUM			
1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun
IV. SPM PERUMAHAN RAKYAT			
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun
V. SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun
2. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	100%	Setiap tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
terhadap bencana	Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun
VI. SPM SOSIAL			
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut menyatakan bahwa

rencana pemenuhan pelayanan dasar harus dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi: RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Rencana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 mengacu pada:

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Rencana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rencana Pemenenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
TOTAL RENCANA PEMENUHAN SPM				132.765.322.121	
SPM BIDANG PENDIDIKAN				98.965.327.440	
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA				98.965.327.440	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
1.01.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	77.024	36.444.200.000
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1	10.000.000
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	2	56.675.000
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah uang Kelas Baru yang bertambah	Ruang	2	201.850.000
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	11	1.472.875.000
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1	54.925.000
1.01.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	647.117.220
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	41.069	20.799.869.380
1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket	1	1.275.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	paket	1	892.500
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	2.120	2.125.000
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	94	425.000
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	umlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket	94	425.000
1.01.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	1	108.200.000
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	106.200.000
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Unit	1	212.500.000
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	425	265.700.000
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada	Orang	1	10.000.000
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	1.295	17.000.000
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket	1	16.962.500
1.01.02.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	ruang	1	10.000.000
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahn	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	10.000.000
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket	1	110.000.000
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	paket	1	10.000.000
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
1.01.04.2.01	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	11	37.818.892.000
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	5	577.218.840
SPM BIDANG KESEHATAN					302.615.000
DINAS KESEHATAN					302.615.000
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
1.2.2.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.02.02.2.02.001	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15.388	25.000.000
1.02.02.2.02.002	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15.388	25.000.000
1.02.02.2.02.003	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14.656	12.200.000
1.02.02.2.02.004	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	57.381	25.000.000
1.02.02.2.02.005	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	121.590	30.000.000
1.02.02.2.02.006	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	758.691	19.215.000
1.02.02.2.02.007	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	136.579	39.000.000
1.02.02.2.02.008	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	89.737	24.700.000
1.02.02.2.02.009	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	30.463	24.962.50
1.02.02.2.02.010	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	2.990	42.850.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.02.02.2.02.011	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	11.786	34.950.000
1.02.02.2.02.012	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	16.787	24.700.000
SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM					13.195.126.740
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN					13.195.126.740
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
1.03.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
1.03.03.2.01.023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lambaga	5	97.835.000
1.03.03.2.01.024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	100	106.400.000
1.03.03.2.01.025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	4	372.400.000
1.03.03.2.01.026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	5	816.450.000
1.03.03.2.01.027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa	5	189.500.000
1.03.03.2.01.029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	6.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.03.03.2.01.030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit	1	45.000.000
1.03.03.2.01.032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1000	1.140.000.000
1.03.03.2.01.033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	5	451.500.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
1.03.05.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1.03.05.2.01.018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi	Unit	1	2.807.500.000
1.03.05.2.01.019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit	1	9.000.000
1.03.05.2.01.020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	m ³ /hari	1	7.000.000
1.03.05.2.01.021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	m ³ /hari	5	10.000.000
1.03.05.2.01.024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	Unit	1	1.950.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit	1	325.000.000
1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	m ³ /hari	5	10.000.000
1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	m ³ /hari	5	10.000.000
1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Unit	1	10.000.000
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	100	10.000.000
1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Desa	4	85.400.000
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Penyelenggara	8	138.550.000
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	m ³ /hari	20	5.000.000
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	1	10.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2	1.699.746.740
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	200	2.500.000.000
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	150	15.845.000
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	4	367.000.000
SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT					942.387.500
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN					942.387.500
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
1.04.02.2.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	5.000.000
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1	5.000.000
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	1	5.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.04.02.2.01.006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	1	5.000.000
1.04.02.2.01.007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	115.000.000
1.04.02.2.01.008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	5.000.000
1.04.02.2.01.009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5.000.000
1.04.02.2.01.010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	5.000.000
1.04.02.2.02	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
1.04.02.2.02.001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	100	10.000.000
1.04.02.2.02.004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	20	5.000.000
1.04.02.2.02.006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen	1	5.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.04.02.2.02.007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	30	5.000.000
1.04.02.2.02.008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	30	5.000.000
1.04.02.2.02.009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	orang	30	5.000.000
1.04.02.2.02.010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	orang	30	5.000.000
1.04.02.2.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
1.04.02.2.03.001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	10	513.137.500
1.04.02.2.03.004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	10	204.250.000
1.04.02.2.03.006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	3	5.000.000
1.04.02.2.03.007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	1	5.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.04.02.2.03.008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	3	5.000.000
1.04.02.2.03.009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	3	5.000.000
1.04.02.2.03.010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	3	5.000.000
1.04.02.2.03.011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	3	5.000.000
1.04.02.2.03.012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1	5.000.000
SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					9.216.761.817
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					5.964.901.817
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
1.05.02.2.01.003	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Dokumen	12	5.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.05.02.2.01.004	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	405.950.820
1.05.02.2.01.005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1600	169.050.000
1.05.02.2.01.006	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	2	4.930.000
1.05.02.2.01.008	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1	5.025.000
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	12	4.062.763.340
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	laporan	150	420.360.720

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	12	5.005.000
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	30	5.625.000
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	197.550.000
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	532.805.937
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	145.836.000
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	12	5.000.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					3.251.860.000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.05.03.2.01.003	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen	1	250.000.000
1.05.03.2.01.004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	250	50.000.000
1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
1.05.03.2.02.006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	16	200.000.000
1.05.03.2.02.008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	75	100.000.000
1.05.03.2.02.010	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	200	100.000.000
1.05.03.2.02.012	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	20	20.000.000
1.05.03.2.02.014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	250.000.000
1.05.03.2.02.015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	75	347.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	kawasan	4	60.000.000
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	12	24.000.000
1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
1.05.03.2.03.0001	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/ wabah Zoonosis prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1	5.000.000
1.05.03.2.03.0002	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	9.750.000
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	950	238.775.000
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	950	250.000.000
1.05.03.2.03.0010	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen	Dokumen	1	6.475.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
		Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu			
1.05.03.2.03.001	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1	174.400.000
1.05.03.2.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
1.05.03.2.04.001	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	2	10.000.000
1.05.03.2.04.002	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	10.000.000
1.05.03.2.04.003	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	5.000.000
1.05.03.2.04.004	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	10.000.000
1.05.03.2.04.005	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	20.000.000
1.05.03.2.04.008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	orang	30	40.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi Penanganan pasca bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	5	10.000.000
1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain: lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	lembaga	5	10.000.000
1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dokumen	2	80.000.000
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	10.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.05.04.2.01.002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	160.000.000
1.05.04.2.01.003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	12	20.000.000
1.05.04.2.01.004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2.000.000
1.05.04.2.01.005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	1	5.000.000
1.05.04.2.01.007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakara	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	orang	30	50.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.05.04.2.01.008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	desa/kelurahan	5	5.000.000
1.05.04.2.01.017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	unit	85	350.000.000
1.05.04.2.01.018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	dokumen	1	5.000.000
1.05.04.2.02	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				
1.05.04.2.02.001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	dokumen	1	5.000.000
1.05.04.2.02.002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	dokumen	60	18.000.000
1.05.04.2.04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.05.04.2.04.001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	orang	80	20.000.000
1.05.04.2.04.002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	desa/kelurahan	3	68.960.000
1.05.04.2.04.003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	dokumen	8	150.000.000
1.05.04.2.05	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				
1.05.04.2.05.001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	1	37.500.000
1.05.04.2.05.002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	dokumen	1	5.000.000
1.05.04.2.05.004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	laporan	20	15.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.05.04.2.05.005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	unit	10	45.000.000
SPM BIDANG SOSIAL					10.143.103.624
DINAS SOSIAL					10.143.103.624
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
1.6.4.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
1.06.04.2.01.001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	892	8.452.007.520
1.06.04.2.01.002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	50	37.800.000
1.06.04.2.01.003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	40	144.000.000
1.06.04.2.01.004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	5	17.750.000
1.06.04.2.01.005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	100	307.287.760

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.06.04.2.01.006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	20	31.875.000
1.06.04.2.01.007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	50	80.851.600
1.06.04.2.01.008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	50	109.783.224
1.06.04.2.01.009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	50	44.437.500
1.06.04.2.01.010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	20	550.754.590
1.06.04.2.01.011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	20	65.722.680
1.06.04.2.01.012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	10	10.000.000
1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
1.6.6.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota				

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2024	
				K	Rp
1.06.06.2.01.001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	151.717.250
1.06.06.2.01.002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	50	11.484.000
1.06.06.2.01.003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	Unit	1	89.864.000
1.06.06.2.01.004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	4	19.177.500
1.06.06.2.01.005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	15	18.591.000

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

4.5 Keistimewaan

Kewenangan urusan keistimewaan tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwa DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai kewenangan istimewa tersebut tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang di atas. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY. Sementara kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi: 1. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; 2. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3. kebudayaan; 4. pertanahan; dan 5. tata ruang. Urusan keistimewaan yang melimpah ke Kabupaten/Kota di DIY meliputi empat (4) hal yaitu kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan pada Bab IV Perencanaan menyatakan bahwa usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota paling lambat bulan Juni, berupa program dan kegiatan tahun $n+2$. TAPD melakukan harmonisasi dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan BKK Dana Keistimewaan kemudian menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan program dan kegiatan BKK Dana Keistimewaan kepada Bupati di bulan Agustus. Bupati menyampaikan usulan program dan kegiatan BKK Dana Keistimewaan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada *Paniradya Kaistimewan* di bulan September.

Perencanaan Keistimewaan Tahun 2024 telah diawali sejak tahun 2022. Rekapitulasi usulan BKK Dana Keistimewaan per urusan tahun

2024 sesuai Berita Acara Nomor 918/03852 Tanggal 20 Maret 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4-7 Usulan BKK Dana Keistimewaan per Urusan di Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Urusan	Perangkat Daerah	Anggaran
1	Kelembagaan		5.359.560.000
		Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul	1.011.060.000
		Bagian Hukum Setda Kab. Bantul	287.000.000
		Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	261.000.000
		Bappeda Kab. Bantul	700.000.000
		BPKPAD Kab. Bantul	250.000.000
		BKPSDM Kab. Bantul	652.500.000
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul	1.403.000.000
		Inspektorat Kab. Bantul	200.000.000
		Seluruh Kapanewon di Kab. Bantul (17 Kapanewon)	595.000.000
2	Kebudayaan		67.551.542.900
		Dinas Kebudayaan	23.542.189.100
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	200.000.000
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	350.000.000
		Dinas Kesehatan	1.572.200.000
		Satuan Polisi dan Pamong Praja	786.000.000
		Dinas Pariwisata	1.450.000.000
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	300.000.000
		Dinas Kelautan dan Perikanan	586.215.000
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	268.936.800
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	270.752.000
		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan	500.000.000
		Dinas Komunikasi dan Informasi	1.025.250.000
		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	35.000.000.000
		Seluruh Kapanewon di Kab. Bantul (17 Kapanewon)	1.700.000.000
3	Pertanahan		8.622.618.000
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	8.122.618.000
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	500.000.000
4	Tata Ruang		16.519.618.000
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kab. Bantul	846.500.000
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kab. Bantul	2.126.827.000

No	Urusan	Perangkat Daerah	Anggaran
		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul	5.065.791.000
		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul	7.880.500.000
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul	600.000.000
TOTAL			98.053.338.900

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

Sementara itu rincian program, kegiatan dan anggaran pada 4 urusan keistimewaan yang diusulkan untuk tahun anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4-8 Anggaran Keistimewaan Urusan Kelembagaan Berdasarkan Program dan Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN
				Tolok Ukur Kinerja	Target	
	KABUPATEN BANTUL					5.359.560.000
I	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BANTUL					1.011.060.000
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keistimewaan	1 dokumen	200.000.000
2	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1. Jumlah PD dengan tingkat implementasi Budaya Pemerintahan berkategori baik 2. Jumlah inovasi yang didampingi 3. Raperbup Pakaian Dinas	1. 10 PD dari 54 PD 2. 4 (empat) inovasi 3. 1 Raperbup	811.060.000
II	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BANTUL					287.000.000
3	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	1. Jumlah Fasilitasi penyusunan produk hukum tindak lanjut pelaksanaan keistimewaan 2. Sosialisasi produk hukum tindak lanjut pelaksanaan keistimewaan	1. 4 dokumen 2. 400 orang	200.000.000
4			Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah dokumen Hasil Pengawasan produk hukum Kalurahan	1 Dokumen	87.000.000
III	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. BANTUL					261.000.000
5	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Kapanewon yang berkinerja baik	7 Kapanewon dari 17 Kapanewon	261.000.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN
				Tolok Ukur Kinerja	Target	
IV	BAPPEDA KAB. BANTUL					700.000.000
6	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1. Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2024 2. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2025 3. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026 4. Dokumentasi hasil perencanaan program dan kegiatan keistimewaan tahun 2024	1. 2 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen 4. 1 Laporan	500.000.000
7			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan tahun 2023 tahap akhir 2. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan tahun 2024 per tahapan 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	1. 1 laporan 2. 2 laporan 3. 4 laporan	200.000.000
V	BKPAD KAB. BANTUL					250.000.000
8	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	4 Laporan	250.000.000
VI	BKPSDM KAB. BANTUL					652.500.000
9	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Penyelenggaran Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota	Jumlah ASN Eselon IV Kabupaten Bantul yang mengikuti Internalisasi keistimewaan	90 orang	652.500.000
VII	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KAB. BANTUL					1.403.000.000
10	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren	1. Peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan keistimewaan di 75 Kalurahan 2 tematik 2. Kompensasi Pengganti Lungguh	1. 150 orang 2. 12 bulan 3. 12 bulan 4. 750 orang	1.403.000.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN
				Tolok Ukur Kinerja	Target	
	Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Urusan Keistimewaan	dan Kalurahan/Kelurahan	bagi Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti dan Jagalan 3. Kompensasi Pengganti Pengarembag bagi Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti dan Jagalan 4. Forum Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kalurahan (LPMK, Posyandu, PKK, Karang Taruna, Ketua RT)		
VIII	INSPEKTORAT KAB. BANTUL					200.000.000
11	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	1. Laporan Review Dokumen Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2024 2. Laporan per triwulan	1. 1 Laporan 2. 4 laporan	200.000.000
IX	KAPANEWON KAB. BANTUL (17 kapanewon)					595.000.000
12	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1. Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2024 2. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2026 3. Dokumen hasil moneyv pelaksanaan kegiatan dana keistimewaan tahun 2023	1. 2 Dokumen per kapanewon 2. 1 Dokumen per kapanewon 3. 1 dokumen per kapanewon	595.000.000

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

Tabel 4-9 Anggaran Keistimewaan Urusan Kebudayaan Berdasarkan Program dan Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2024

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN	KETERANGAN
				Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja		
	KABUPATEN BANTUL					67.551.542.900	
I	DINAS KEBUDAYAAN					23.542.189.100	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Peringatan Peristiwa Sejarah	3 kali	2.655.565.500	
				LCC Sejarah Tingkat Kabupaten / Propinsi Kajian Sejarah Lokal Publikasi Sejarah Lawatan Sejarah FGD Sejarah	2 kali 2 dokumen 2 kali 10 kali 5 kali		
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten dan Propinsi Pembinaan Sastra Pawiyatan Pranatacara Gelar Sastra	9 jenis lomba 300 orang 500 orang 1 kali	2.607.320.000	
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	LCC Museum Sosialisasi Museum Wajib Kunjung Museum Fasilitasi Komunitas Museum Promosi Museum	2 kali 600 orang 900 orang 11 kali 5 kali	1.697.418.000	
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan warisan Budaya	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Penetapan Cagar Budaya Sosialisasi CB	20 rekomendasi 375 orang	1.371.349.300	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN	KETERANGAN
				Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja		
				Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya Jelajah Situs FGD Pengelola CB Fasilitasi Forum Pelestari CB dan WB Papanisasi Cagar Budaya Bimtek pemeliharaan Objek Cagar Budaya	400 orang 120 orang 60 orang 4 kali 20 CB 65 orang		
5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan warisan Budaya	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya Workshop WBTB Nyantrik (Pelatihan seni budaya kepada Sang Maestro) Revitalisasi Karya Budaya	10 desa 150 orang 35 orang 1 Karya	1.006.965.000	
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan warisan Budaya	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Kajian Warisan Budaya Tak Benda	2 dokumen	210.002.300	
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Pengadaan Gamelan Rintisan Desa Budaya	5 set	1.685.690.000	
8	Program Penyelenggaraan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan			600.000.000	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN	KETERANGAN
				Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja		
	Keistimewaan Urusan Kebudayaan		n Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya Festival Rintisan Desa Budaya Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya	5 desa 1 kali 1 dokumen		
9	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Lomba Lukis Kyoto-DIY Workshop dan Lomba Film Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal: Fasilitasi Sanggar Seni (Lomba Cipta Karya Seni) Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul	1 kali 1 kali 15 komunitas 1 kali 12 kali	1.487.668.000	
10	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa	3 kali 1 kali	1.250.000.000	
11	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Penghargaan Seniman Budayawan Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	5 orang 5 orang	300.400.000	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN	KETERANGAN
				Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja		
				Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	5 orang		
12	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Pentas Seni Pawai Seni Pasar Seni	6 kali 2 kali 1 kali	500.000.000	
13	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Yogyakarta	Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY Pengiriman Sendratari ke DIY Pengiriman Festival Teater ke DIY Pengiriman Festival Wayang Wong ke DIY Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten Festival Teater Tingkat Kabupaten Festival Karawitan Tingkat Kabupaten Festival Keroncong Tingkat Kabupaten Mataram Culture Fest Festival Jathilan Tingkat Kabupaten Festival Langen Carita Tingkat Kabupaten	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	3.000.000.000	
14	Program Penyelenggaraan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Publikasi Media Televisi	7 kali	300.000.000	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN	KETERANGAN
				Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja		
	Keistimewaan Urusan Kebudayaan			pemeliharaan Directory Kebudayaan	1 paket		
				Publikasi Melalui Media Cetak	3 kali		
15	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	240 orang	107.030.000	
16	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang	2 kali	386.947.000	
				Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten	1 kali		
				Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY	1 kali		
17	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Pentas Wayang Kulit	8 kali	3.285.634.000	
				Fasilitasi Pentas Kelompok Seni	80 kali		
				Event Ceremonial	12 kali		
				Pentas Pendopo	11 kali		
				Parasamya			
				Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul)	52 kali		
				Pentas Selasa Wagen	11 Kali	2 kali	
				Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN	KETERANGAN
				Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja		
				santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional			
18	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Upacara Adat Tradisi Merti Dusun	25 kali 20 kali	1.090.200.000	
II	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					200.000.000	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pendidikan Berbasis Budaya	Pembinaan Muatan Lokal	Penyelenggaraan Sekolah karakter khas Yogyakarta	2 Sekolah	200.000.000	
III	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					350.000.000	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Pembentukan dan Pembinaan Desa Prima	10 Desa	350.000.000	
IV	DINAS KESEHATAN					1.572.200.000	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi Dusun dengan pengembangan asuhan mandiri kesehatan tradisional	12 Puskesmas 23 Dusun	1.572.200.000	
V	SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA					786.000.000	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN	KETERANGAN
				Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Jagawarga	Terbentuknya kelompok Jaga Warga	262 dusun	786.000.000	
VI	DINAS PARIWISATA					1.450.000.000	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal Dan Potensi Budaya	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Festival Segoro Kidul Bantul Bumi Mataram Peningkatan Sadara Wisata dan Sapta Pesona Pentas seni di objek wisata	9 event 1 kegiatan 6 desa wisata 2 kegiatan	1.450.000.000	Simphony Gumuk Pasir, Njlajah Bantul Milang Kori, Keroncong Pesisiran, Festival Lampion, Festival Kuliner, Festival Bergodo Mbantul Festival Bumi Mataram Imogiri Peningkatan Gerakan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di 6 desa wisata Pentas seni di obyek wisata Goa Selarong dan kawasan pantai wilayah barat
VII	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					300.000.000	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Lumbung Mataraman	pembentukan lumbung mataraman	5 kwt	300.000.000	
VIII	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					586.215.000	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Budaya Bahari	Pengembangan Workshop Pembuatan Perahu Fiber (Kasko) Pengembangan Pengolahan Ikan	1 kegiatan 3 kegiatan	586.215.000	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN	KETERANGAN
				Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja		
IX	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					268.936.800	-
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan warisan Budaya	Tata kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Fasilitasi Forum Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Fasilitasi Pengelola situs warisan geologi (geoheritage)	1 Laporan 1 Laporan	268.936.800	
X	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					270.752.000	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Terbentuknya Kader Pembauran Budaya Istimewa	200 orang	270.752.000	
XI	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					500.000.000	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Pelatihan keterampilan Produk Unggulan Bantul	11 jenis	500.000.000	Pelatihan Keterampilan Dengan Inovasi Produk Sesuai Potensi Setempat Pelatihan Pemasaran Produk (Pelatihan Pemasaran Digital) Pelatihan Tata Kelola Kewirausahaan Pelatihan Kemasan Pelatihan IKM Makanan Pelatihan Sangkar Ayam Pelatihan IKM Perca Kayu Pelatihan IKM Gerabah Pelatihan Inovasi Produk, Diversifikasi Produk IKM Jamu Pelatihan Packaging, Branding, NIB, dan Legalitas IKM Jamu

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN	KETERANGAN
				Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja		
							Manajemen Pengelolaan Usaha, Keuangan, Produk, dan Pasar IKM Jamu
XII	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI					1.025.250.000	-
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan kebudayaan	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY berbasis Digital	Jaringan internet untuk Padukuhan	7 padukuhan	1.025.250.000	Pendukung Kegiatan pembangunan jaringan wifi 7 padukuhan Pemeliharaan jaringan Pembangunan Fiber Optik 5 Km Pemel CCTV + Wifi Makan Raja Pemel Penanda
XII I	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					35.000.000.000	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Pembangunan Taman Budaya Tahap I	1 Unit	35.000.000.000	
XIV	KAPANEWON SRANDAKAN					100.000.000	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1 event	100.000.000	
XV	KAPANEWON SANDEN					100.000.000	-
1	Program Penyelenggaraan		Gelar Budaya Jogja			100.000.000	-

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN	KETERANGAN
				Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja		
	Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1 event		
XVI	KAPANEWON KRETEK					100.000.000	-
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	- Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	- 1 event	100.000.000	-
XVI I	KAPANEWON PUNDONG					100.000.000	-
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1 event	100.000.000	
XVI II	KAPANEWON BAMBANGLIPURO					100.000.000	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1 event	100.000.000	
XI X	KAPANEWON PANDAK					100.000.000	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1 event	100.000.000	
XX	KAPANEWON PAJANGAN					100.000.000	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1 event	100.000.000	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN	KETERANGAN
				Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja		
XX I	KAPANEWON BANTUL					100.000.000	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1 event	100.000.000	
XX II	KAPANEWON JETIS					100.000.000	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1 event	100.000.000	
XX III	KAPANEWON IMOGIRI					100.000.000	-
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1 event	100.000.000	-
XX IV	KAPANEWON DLINGO					100.000.000	-
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1 event	100.000.000	-
XX V	KAPANEWON BANGUNTAPAN					100.000.000	-
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1 event	100.000.000	
XX VI	KAPANEWON PLERET					100.000.000	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN	KETERANGAN
				Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja		
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1 event	100.000.000	
XX VII	KAPANEWON PIYUNGAN					100.000.000	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1 event	100.000.000	
XX VIII	KAPANEWON SEWON					100.000.000	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1 event	100.000.000	
XX IX	KAPANEWON KASIHAN					100.000.000	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1 event	100.000.000	
XX X	KAPANEWON SEDAYU					100.000.000	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan	1 event	100.000.000	

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

Tabel 4-10 Anggaran Keistimewaan Urusan Pertanahan Berdasarkan Program dan Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN
				TOLOK UKUR KINERJA	TARGET	
	KABUPATEN BANTUL					8.622.618.000
I	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL					8.122.618.000
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				5.772.618.000
1			Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	Pembuatan Patok Tanah Kalurahan	8.000 patok	1.324.745.000
				Pemasangan patok bidang Tanah Kalurahan	1.000 bidang	
				Penyusunan Sket Bidang Tanah Kalurahan	1.000 bidang	
				Tersedianya 1.500 Peta Bidang Tanah Kalurahan	1.500 bidang	2.515.000.000
				Pendaftaran Sertipikat Tanah Kalurahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	750 bidang	1.161.736.000
Pendaftaran Pencatatan Perubahan Data Sertifikat Tanah Kalurahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul			271 bidang	671.137.000		
2		Pengawasan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul	25 kalurahan	100.000.000	
					2.350.000.000	
3			Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah kasultanan dan Tanah Kadipaten	Fasilitasi Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah	20 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN
				TOLOK UKUR KINERJA	TARGET	
				Kalurahan di Kabupaten Bantul		
4			Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Fasilitasi rekomendasi Bupati / Kepala DPTR untuk penanganan permasalahan Tanah Kalurahan	5 Kalurahan	250.000.000
				Konsolidasi Tanah Tutupan di Kalurahan Parangtritis	1000 bidang	2.000.000.000
II	DINAS PEMBERDAYAAN DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL					500.000.000
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				500.000.000
5			Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penegasan Batas Kalurahan a. Pembuatan peta batas kalurahan b. Berita Acara kesepakatan c. Pembuatan pilar batas kalurahan d. Pemasangan pilar batas kalurahan	11 Kalurahan di 3 Kapanewon (Kapanewon Kasihan, Pajangan dan Sedayu)	500.000.000
				Peraturan Bupati Penegasan Batas Wilayah di 3 Kapanewon	1 Peraturan Bupati	

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

Tabel 4-11 Anggaran Keistimewaan Urusan Tata Ruang Berdasarkan Program dan Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN
				TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA	
KABUPATEN BANTUL						16.519.618.000
I	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KAB. BANTUL					846.500.000
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen Audit Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Raja-Raja Imogiri Dokumen Audit Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kerto-Pleret	1 dokumen 1 dokumen	596.500.000
2		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang	Penetapan RDTR Bantul Timur	1 dokumen	250.000.000
II	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB. BANTUL					2.126.827.000
3	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Perluasan bongkar ratoon	50 Ha	1.430.692.000
				Pengembangan benih Bawang Merah	5 Ha	696.135.000
III	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BANTUL					5.065.791.000
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis	Konservasi alas bakau	2 lokasi (Baros dan Tirtohargo)	696.142.000
5			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Negro	Pengelolaan sampah	2 lokasi (Potorono dan kalurahan bantul)	4.369.649.000
IV	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BANTUL					7.880.500.000
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Terbangunnya Jl. Bawuran - Wonolelo	1,75 KM	7.880.500.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN		ANGGARAN
				TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA	
V	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BANTUL					600.000.000
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kesiapsiagaan Bencana: -EWS Tsunami -Rambu Evakuasi -Papan Informasi -Radio Rig, Kabel, Antena -HT	'-2 paket - 50 unit - 5 unit - 8 set - 24 unit	600.000.000

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

4.6 Pokok Pikiran DPRD Bantul

4.6.1 Pendahuluan

DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam memangku jabatannya, pimpinan dan anggota DPRD berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihannya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 104 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pula sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil kegiatan reses atau penjangkaran aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Selain Pokok-pokok pikiran DPRD dari hasil pelaksanaan reses anggota DPRD juga berasal dari rangkuman penyampaian aspirasi masyarakat melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat. Kepentingan dan aspirasi masyarakat yang merupakan pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dijadikan bahan perumusan kegiatan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Oleh karena itu maka selalu diupayakan tercapainya hubungan yang sinergis antara Pemerintah daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan DPRD yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah (*legislasi*), fungsi

penganggaran (*budgeting*) dan fungsi pengawasan (*controlling*). Sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas serta meningkatkan akuntabilitas dalam pembangunan daerah, maka dilaksanakan forum konsultasi publik yang merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2024.

4.6.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan DPRD Kab. Bantul Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib;

4.6.3 Maksud Dan Tujuan

Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Bantul. Pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan disusunnya Pokok-pokok Pikiran DPRD yaitu :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun Anggaran 2024;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2024
3. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Kabupaten Bantul melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2024. Sehingga program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) dalam mengoptimalkan partisipasinya dalam membangun Daerah
4. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD.
6. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

4.6.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2024

Memperhatikan permasalahan yang masih dihadapi dan isu-isu strategis yang ada dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 dan hasil pelaksanaan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD masih dijumpai beberapa permasalahan baik di bidang pemerintahan, perekonomian, infrastruktur, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2024 yang meliputi peningkatan sumber daya manusia, pemenuhan pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah ekonomi, peningkatan daya saing daerah, mitigasi bencana dan integrasi antar wilayah. Adapun hal ini

dijabarkan pokok-pokok pikiran DPRD diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkualitas.
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko Bencana. Dalam hal ini diperlukan alokasi anggaran, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur Dan Pengelolaan Risiko Bencana tersebut.
3. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan pengendalian pemanfaatan lahan, diversifikasi pangan, pengembangan produk unggulan, penyediaan dan pemanfaatan pertanian pangan berkelanjutan.
4. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah kabupaten.
5. Upaya menurunkan jumlah masyarakat tidak mampu tidak hanya sebatas mengurangi jumlahnya. Upaya ini membutuhkan ketersediaan sumberdaya dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran, menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan bagi masyarakat tidak mampu sehingga mampu memanfaatkan berbagai peluang dan mampu berkontribusi secara optimal dalam proses pembangunan.
6. Tingginya angka kemiskinan yang berkepanjangan akan membawa dampak serius dalam peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul. Untuk itu sebagai upaya pengentasan maupun pengurangan angka kemiskinan tersebut diantaranya dilakukan dengan :
 - a. pelayanan kesehatan bagi warga miskin.
 - b. pemberian makanan sehat bagi warga miskin absolut.

- c. penanganan Rumah Tidak Layak Huni.
 - d. kewirausahaan bagi keluarga miskin.
 - e. bantuan dana dan pendampingan graduasi dari Program Keluarga Harapan.
7. Proses pembangunan ditujukan untuk mencapai kemajuan bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Prioritas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
 8. Pembangunan kawasan pedesaan menjadi fokus utama dikarenakan desa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan terwujudnya lingkungan yang bersih, tertata dan mampu meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan serta mampu meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian, dan mengembangkan SDM unggul.
 9. Permasalahan di bidang perekonomian diantaranya belum optimalnya hasil implementasi pelatihan dan pemberdayaan UMKM, masih rendahnya UKM yang bermitra dengan industry, masih minimnya produk local yang beredar di pasar modern, dan belum terpenuhinya sarana prasarana produksi pertanian.
 10. Kebutuhan air bersih semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan kawasan resapan air justru semakin berkurang dengan alih fungsi lahan. Perlunya upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak terus dilakukan seiring peningkatan jumlah penduduk

Demikian garis besar pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2024, Adapun untuk lebih rinci berupa pokok-pokok pikiran DPRD per kegiatan akan disampaikan dikemudian dalam input SIPD.

4.6.5 Saran Dan Masukan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka DPRD menyampaikan masukan terhadap penyusunan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Bidang pembangunan antara lain peningkatan jalan lingkungan, perbaikan jalan, perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu, penyediaan sarana prasarana air bersih, drainase, penerangan jalan umum.
2. Bidang Pendidikan, Kesehatan dan ketenagakerjaan diantaranya yaitu menyediakan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan baru melalui padat karya.
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergisitas, koordinasi, dan sinkronisasi dari masing-masing pelaku pembangunan.
4. Landasan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan PD yang bertanggungjawab serta memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur pada tingkat capaiannya. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran yaitu alokasi belanja;
- b. Menentukan keluaran/ *output* setiap kegiatan;
- c. Menghitung alokasi pagu dari setiap *output* kegiatan untuk setiap program;
- d. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah *output* kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya;
- e. Menghitung alokasi pagu PD berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab PD.

Rekapitulasi kebutuhan pendanaan per PD di Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Menurut Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	17.379.145.855
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	57.502.140.683
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.954.684.837
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	430.578.216.857
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.697.130.463
6	Sekretariat Daerah	50.414.988.222
7	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	29.939.425.575
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.513.191.960
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.540.253.933
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	42.978.031.682
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.894.584.019
12	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	33.102.073.404

No	Perangkat Daerah	Pagu
13	Dinas Lingkungan Hidup	44.330.477.626
14	Dinas Pariwisata	15.912.933.087
15	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	193.188.429.602
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	18.934.170.097
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10.895.929.503
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.194.507.781
19	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	442.029.768.450
20	Dinas Perhubungan	29.883.997.695
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.995.753.231
22	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	17.836.979.103
23	Dinas Sosial	23.303.355.839
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	29.595.649.953
25	Inspektorat Daerah	12.770.261.629
26	Kapanewon Bambanglipuro	3.635.979.220
27	Kapanewon Banguntapan	4.149.899.395
28	Kapanewon Bantul	3.451.421.332
29	Kapanewon Dlingo	3.894.547.740
30	Kapanewon Imogiri	3.781.060.527
31	Kapanewon Jetis	3.360.142.329
32	Kapanewon Kasihan	4.012.474.049
33	Kapanewon Kretek	3.951.676.538
34	Kapanewon Pajangan	3.803.416.017
35	Kapanewon Pandak	3.644.249.598
36	Kapanewon Piyungan	3.996.810.351
37	Kapanewon Pleret	3.427.190.340
38	Kapanewon Pundong	3.696.743.848
39	Kapanewon Sanden	3.396.194.770
40	Kapanewon Sedayu	3.773.124.907
41	Kapanewon Sewon	3.804.472.880
42	Kapanewon Srandakan	3.598.100.374
43	Dinas Kesehatan	223.675.997.029
44	RSUD Panembahan Senopati	187.183.142.687
45	Satuan Polisi Pamong Praja	16.296.072.746
46	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	49.306.887.916
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	17.379.145.855
	Grand Total	2.133.205.685.679

Kebutuhan pendanaan per program, kegiatan dan subkegiatan pada Perangkat Daerah Tahun 2024 di sajikan secara rinci pada table dibawah ini:

Tabel 5.2 Kebutuhan Pendanaan per Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.053.136.018.131,00							6.271.638.651.440,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			427.868.762.881,00							3.290.198.421.646,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	82	324.299.098.561,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			758.357.731.378,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)	100	945.847.680,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab Bantul, Tlirenggo, Kec. Bantul)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	1.772.480.600,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.00	360.625.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab Bantul	4.00	1.199.480.860,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.00	392.225.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab Bantul	3.00	316.799.740,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.00	192.997.680,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	3.00	256.200.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	319.556.241.869,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	751.966.712.136,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37100.00	318.953.130.869,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	ASN pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	37100	749.873.297.736,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.00	603.111.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Bendahara BOS/BOSDA dan Pengelola BMD pada Sekolah Negeri, Pengelola Keuangan Dinas, Pengurus Barang Sekolah Negeri, Tenaga Non ASN Administrasi Perkantoran pada Sub Bagian Keuangan dan Aset, Unit internal Dinas Dikpora, Unit internal Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	5.00	2.093.414.400,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah (Dokumen)	1	12.750.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		1	30.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.00	12.750.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Administrasi Kepegawaian	1	30.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	1.191.913.839,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	2.108.232.671,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.00	36.967.627,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Komponen instalasi listrik	10	26.980.061,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00	254.406.100,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	12	285.002.190,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.00	236.320.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	12	577.319.500,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.00	107.896.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2	336.345.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10.00	8.000.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2	18.200.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

[illegible]

[illegible]



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.00	66.844.007,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	4	163.875.465,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Capaian SPM Pendidikan (%)	100	65.173.553.480,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			131.304.802.548,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Persentase SPM Pendidikan Sekolah Dasar (%)	100	39.709.775.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	41.313.957.444,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1.00	5.000.000,00	(SD penerima DAK Fisik, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Tersedianya biaya pendukung DAK Fisik	6.00	100.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.00	5.000.000,00	(SD Penerima DAK Fisik, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Tersedianya Biaya penunjang untuk pengadaan TIK DAK	1.00	93.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	77024.00	36.444.200.000,00	(Seluruh SD/MI di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Biaya personil peserta didik Sekolah Dasar diterima oleh peserta didik	58590	38.885.765.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	360.00	481.110.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Siswa	250	1.078.705.360,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.00	10.000.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah Dasar	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	399.00	28.000.000,00	(Seluruh SD di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Legalitas Satuan Pendidikan SD dan satuan pendidikan aktif yang siap PPDB	365.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	399.00	135.000.000,00	(Seluruh SD di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	365.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	40.00	10.000.000,00	(Koordinator Bendahara BOS, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Koordinator dapat mengimbaskan informasi keseluruhan SD secara benar	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	396.00	805.140.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Siswa dan Sekolah Dasar Di Kabupaten Bantul	1.00	123.487.084,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2.00	56.675.000,00	(Kapanewon Piyungan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya pengadaan tas siswa sekolah dasar pada SD terdampak TPA Piyungan	1.00	93.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2.00	201.850.000,00	(2 SD dan SD penerima DAK Fisik, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Pemenuhan unsur keamanan warga sekolah dasar, Tersedianya biaya penunjang sehingga Pembangunan DAK dapat terlaksana	3.00	200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	11.00	1.472.875.000,00	(11 SD yang tersebar di wilayah Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Biaya penunjang rehabilitasi , Penataan landscape SD, Rehabilitasi Gedung SD Lemah Rubuh Imogiri, Rehabilitasi Gedung SD pada 3 SD, Rehabilitasi SD Sawit Sewon, Rehabilitasi Sedang Gedung Bangunan Sekolah Dasar	2.00	600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.00	54.925.000,00	(SD Penerima DAK Fisik, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Tersedianya biaya penunjang DAK fisik sehingga rehabilitasi ruang kelas DAK dapat terlaksana	4.00	100.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP (%)	100	23.282.566.600,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	63.770.974.864,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.00	3.850.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4.00	647.117.220,00	(DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Gedung Bangunan Sekolah Menengah Pertama yang Direhabilitasi, Gedung Bangunan Sekolah Menengah Pertama yang Telah Direhabilitasi, Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	1.00	314.800.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.00	1.725.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.00	15.400.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	94.00	425.000,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah	1	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.00	425.000,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah	0.00	-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.00	2.150.000,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	4.00	462.575.000,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah	1.00	300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	41069.00	20.799.869.380,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Orang, Siswa	24790.00	61.946.664.624,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.00	1.275.000,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	1.00	892.500,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	500.00	720.000.000,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	siswa	500	952.470.240,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	2120.00	2.125.000,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Pendidik	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	94.00	19.700.000,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Satuan Pendidikan	95	37.040.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	94.00	57.900.000,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Satuan Pendidikan	95	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	94.00	425.000,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	95.00	545.000.000,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	satuan pendidikan	95.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	94.00	425.000,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	94.00	425.000,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	94.00	425.000,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah	1.00	60.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2.00	437.500,00	(Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah	1	30.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD (%)	100	1.716.721.880,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM		100	25.899.870.240,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1.00	108.200.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Satdik Paud	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.00	106.200.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	TK N 2 Kretek	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	1.00	60.000.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Lembaga Kabupaten Bantul	1.00	60.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	425.00	265.700.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	7 TK Negeri	450	135.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket)	4.00	27.500.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	4 Satdik PAUD	1.00	100.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)	450.00	135.000.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM		1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.00	10.000.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM		1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1295.00	17.000.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	SATDIK PAUD	1295	497.470.240,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1295.00	446.506.880,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	1306 Satdik PAUD	1295	24.887.400.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	300.00	311.152.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik PAUD (TK dan Non Formal), Pendidik TK dan PAUD (Formal dan Nonformal), Pokja Ibu PAUD, Satuan PAUD (TK dan Nonformal), Satuan Pendidikan PAUD (TK atau NonFormal), Satuan Pendidikan PAUD (TK dan Nonformal), TK Negeri	600.00	110.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.00	212.500.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	TK Negeri Pandak	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.00	16.962.500,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	4 (empat) Satuan Pendidikan PAUD di Piyungan	1.00	60.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Capaian Persentase SPM Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%)	100	464.490.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	320.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1.00	10.000.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Satdik Kesetaraan	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1.00	10.000.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Satdik Kesetaraan	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	27.00	10.000.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Satdik Kesetaraan	27.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1350.00	70.800.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Satuan Pendidikan Non Formal dan kesetaraan	27.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	24.00	223.690.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Masyarakat , Masyarakat Buta Aksara, Pendidik KB dan TPA SKB Bantul, Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan, Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan , Tutor Pendidikan Kesetaraan, Tutor, Pengelola, Pamong Pendidikan Kesetaraan	1.00	140.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.00	110.000.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Satdik Kesetaraan	1.00	110.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.00	10.000.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Satdik Kesetaraan	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.00	10.000.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Satdik Kesetaraan	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.00	10.000.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Satdik Kesetaraan	1.00	10.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, Paud dan Pnf Sesuai SPM (%)	75	38.396.110.840,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			2.400.535.887.720,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (*)	8.339	38.396.110.840,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		0.00	2.400.535.887.720,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	11.00	37.818.892.000,00	(DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PAUD, SD SMP SE KABUPATEN BANTUL, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	GTT/PTT/GTY/PTY PAUD, TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SLB, guru dan tenaga kependidikan PAUD, TK, SD, SMP, Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD, TK, SD, SMP Negeri dan Swasta, Guru PNSD TK, SD, SMP, guru TK, SD, SMP, Kepala sekolah dan guru TK, SD, SMP, Kepala sekolah SD, SMP, Kepala sekolah TK, SD, SMP, Kepala TK, SD, SMP NEGERI, Koordinator wilayah bidang pendidikan di kapanewon, guru PNSD yang tidak mendapat TPG dan TAMSIL APBN, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PAUD, TK, SD, SMP Negeri dan Swasta	12.00	2.399.478.477.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	5.00	577.218.840,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Guru dan tenaga kependidikan PAUD, TK, SD, SMP, Kepala sekolah TK, SD, SMP, Pendidik PAUD, Pengawas TK, SD, SMP, Penilik PAUD dan DIKMAS, Tenaga kependidikan PAUD, TK, SD, SMP, Tenaga non ASN Bidang PTK	12.00	1.057.410.720,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			409.286.939.716,00							971.646.088.597,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30	347.432.933.579,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			771.868.794.020,00	Puskesmas Srandakan
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Imogiri II
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Bantul II
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Sedayu II
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84,30									Puskesmas Jetis I
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Sedayu I
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Jetis II
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84,30									Puskesmas Imogiri I
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Pajangan
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Dlingo I
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84,30									Puskesmas Sanden
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Dlingo II
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Pleret



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Kretek
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Piyungan
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Banguntapan I
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Pundong
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Banguntapan II
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	82,9									RSUD Panembahan Senopati
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Banguntapan III
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Bambanglipuro
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Sewon I
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									UPTD Labkesda
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Sewon II
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Pandak I
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Kasihan I
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Dinas Kesehatan
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Kasihan II
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Pandak II
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									Puskesmas Bantul I
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84.30									UPTD Jamkesda



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
			Capaian SPM Rumah Sakit (%)	81								RSUD Panembahan Senopati	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (Persentase)	100	425.684.020,00	(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	100	4.196.000.000,00	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	16	145.521.520,00	(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	16	1.674.000.000,00	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	37	250.000.000,00	(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	37	1.920.000.000,00	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	30.162.500,00	(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	4	602.000.000,00	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	130.132.203.557,00	(Kabupaten Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	100	419.462.456.000,00	RSUD Panembahan Senopati	
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (Persentase)	100		(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				100		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	490.00	129.906.828.557,00	(RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	470.00	418.447.456.000,00	RSUD Panembahan Senopati	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1100.00		(Dinas Kesehatan Kab. Bantul, KAB. BANTUL)				1100.00		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.00	215.375.000,00	(Dinas Kesehatan Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	1	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	10.000.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Lintas Sektor	1	15.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)	100	893.784.200,00	(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	13.587.400.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	58.999.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinkes, DINKES	1	44.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	162.000.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan, Dinkes, DINKES	1	114.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	60.000.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DINKES	1	112.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DINKES	1	15.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.125.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DINKES	1	2.400.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	596.660.200,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DINKES, dINKES, PUSKESMAS, Dinkes, puskesmas, DINKES, PUSKESMAS, DINKES, PUSKESMAS, LINTAS SEKTOR, Dinkes, UPTD, Masyarakat, Perusahaan, Dinkes, TPP dengan SLHS	1	13.300.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100	6.959.881.082,00	(UPTD Jamkesda, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	31.174.780.640,00	UPTD Jamkesda
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Pajangan, Pajangan)					100		Puskesmas Pajangan
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Dinas Kesehatan
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Srandakan, Srandakan)					100		Puskesmas Srandakan
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Sanden, Sanden)					100		Puskesmas Sanden



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Kretek, Kretek)					100		Puskesmas Kretek
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Pundong, Pundong)					100		Puskesmas Pundong
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Bambanglipuro, Bambanglipuro)					100		Puskesmas Bambanglipuro
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Pandak I, Pandak)					100		Puskesmas Pandak I
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Pandak II, Pandak)					100		Puskesmas Pandak II
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Bantul I, Bantul)					100		Puskesmas Bantul I
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Bantul II, Bantul)					100		Puskesmas Bantul II
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Jetis 1, Jetis)					100		Puskesmas Jetis I
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Jetis II, Patalan, Kec. Jetis)					100		Puskesmas Jetis II
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Imogiri I, Imogiri, Kec. Imogiri)					100		Puskesmas Imogiri I
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Imogiri II, Imogiri)					100		Puskesmas Imogiri II
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Dlingo I, Dlingo)					100		Puskesmas Dlingo I
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Dlingo II, Dlingo)					100		Puskesmas Dlingo II
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Pleret, Pleret)					100		Puskesmas Pleret
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Piyungan, Piyungan)					100		Puskesmas Piyungan
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Banguntapan 1, Banguntapan)					100		Puskesmas Banguntapan I
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Banguntapan II, Banguntapan)					100		Puskesmas Banguntapan II
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Banguntapan III, Banguntapan)					100		Puskesmas Banguntapan III
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Sewon I, Timbulharjo, Kec. Sewon)					100		Puskesmas Sewon I
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Sewon II, Sewon)					100		Puskesmas Sewon II
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Kasihan I, Kasihan)					100		Puskesmas Kasihan I



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.02.01.2.08.0001		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Kasihan II, Kasihan)					100		Puskesmas Kasihan II
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Sedayu I, Sedayu)					100		Puskesmas Sedayu I
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Sedayu II, Sedayu)					100		Puskesmas Sedayu II
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Persentase)	100		(UPTD Labkesda, KAB. BANTUL)					100		UPTD Labkesda
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	11.600.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinkes	1	12.000.000,00	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	2	54.000.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinkes	2	55.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.00	61.844.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinkes	2.00	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	6.832.437.082,00	(UPTD Puskesmas Sewon II, Sewon)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Tenaga Non ASN	12	31.057.780.640,00	Puskesmas Sewon II
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD PUSKESMAS KASIHAN II, Kasihan)				Tenaga Non ASN	12		Puskesmas Kasihan II
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD PUSKESMAS PAJANGAN, Pajangan)				Gaji Non ASN, Tenaga Non ASN	12		Puskesmas Pajangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD PUSKESMAS SEDAYU I, Sedayu)				JURU MASAK, TENAGA ADMINISTRASI KEUANGAN, TENAGA KESEHATAN, TENAGA NON ASN, TENAGA SUPIR	12		Puskesmas Sedayu I
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD PUSKESMAS SEDAYU II, Sedayu)				GAJI NON ASN, GAJI TENAGA NON ASN, Tenaga Non ASN, TENAGA NON ASN	12		Puskesmas Sedayu II



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD JAMKESDA, KAB. BANTUL)				Tenaga Non ASN	12		UPTD Jamkesda
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPT. Puskesmas Banguntapan II, Banguntapan)				gaji non ASN, Tenaga Kesehatan Non ASN, Tenaga Kesehatan Non ASN , Tenaga non ASN, Tenaga Non ASN	12		Puskesmas Banguntapan II
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPT Puskesmas Banguntapan III, Banguntapan, Kec. Banquntapan)				Pegawai Non ASN, Tenaga non ASN	12		Puskesmas Banguntapan III
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD PUSKESMAS SEWON I, Sewon)				GAJI NON ASN, TENAGA NON ASN	12		Puskesmas Sewon I
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD Puskesmas Kasihan I, Kasihan)				TENAGA NON ASN	12		Puskesmas Kasihan I
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD LABKESDA, KAB. BANTUL)				Tenaga non PNS	12		UPTD Labkesda
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)				Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Lintas Sektor, Dinas Kesehata, Puskesmas dan Lintas Sektor, Dinkes, Dinkes, UPTD	12		Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD PUSKESMAS SRANDAKAN, Srandakan)				TENAGA NON ASN	12.00		Puskesmas Srandakan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD Puskesmas Sanden, Sanden)				Tenaga Non ASN	12.00		Puskesmas Sanden
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD Puskesmas Kretek, Kretek)				Tenaga Non ASN	12.00		Puskesmas Kretek
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD Puskesmas Pundong, Pundong)				Tenaga Non ASN, Tenaga Non ASN (Eks BOK)	12.00		Puskesmas Pundong
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(Sumbermulyo, Bambanglipuro)				Tenaga Non ASN	12.00		Puskesmas Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD Puskesmas Pandak I, Pandak)				Gaji Tenaga Non ASN, Tenaga Non ASN	12.00		Puskesmas Pandak I
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD Puskesmas Pandak II, Pandak)				Tenaga Non ASN	12.00		Puskesmas Pandak II
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD Puskesmas Bantul I, Bantul)				Tenaga Non ASN	12.00		Puskesmas Bantul I



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD PUSKESMAS BANTUL II, Bantul)				TENAGA NON ASN, TENAGA NON ASN ex BOK, TENAGA NON NAKES ex BOK	12.00		Puskesmas Bantul II
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD Puskesmas Jetis I, Jetis)				Tenaga Non ASN	12.00		Puskesmas Jetis I
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD Puskesmas Jetis II, Jetis)				Tenaga non ASN, Tenaga Non ASN	12.00		Puskesmas Jetis II
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD PUSKESMAS IMOGIRI I, Imogiri, Kec. Imogiri)				TENAGA NON ASN	12.00		Puskesmas Imogiri I
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD Puskesmas Imogiri II, Imogiri)				Pegawai Non ASN (Tenaga Administrasi), Pegawai Non ASN (Tenaga Kesehatan), Tenaga Non ASN	12		Puskesmas Imogiri II
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD PUSKESMAS DLINGO I, Dlingo)				TENAGA JURU CUCI, TENAGA KEAMANAN, TENAGA NON ASN, TENAGA NON ASN EKS BOK, TENAGA SUPIR	12.00		Puskesmas Dlingo I
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD Puskesmas Dlingo II, Dlingo)				TENAGA NON ASN	12		Puskesmas Dlingo II
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD Puskesmas Pleret, Pleret)				Tenaga Non ASN, Tenaga NON ASN	12		Puskesmas Pleret
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD Puskesmas Piyungan, Piyungan)				Tenaga Non ASN	12		Puskesmas Piyungan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(UPTD PUSKESMAS BANGUNTAPAN I, Banguntapan)				TENAGA NON ASN	12		Puskesmas Banguntapan I
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD (Persentase)	100	1.021.901.920,00	(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM		100	5.970.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	33	583.447.300,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinkes, Dinkes, puskesmas, Dinkes, Puskesmas, Dinkes, UPTD	33	4.480.000.000,00	Dinas Kesehatan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	88.460.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinkes	6	90.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	349.994.620,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinkes, Dinkes, UPTD	5	1.400.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100	207.999.478.800,00	(UPTD Puskesmas Kasihan I, Kasihan)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM		100	297.478.157.380,00	Puskesmas Kasihan I
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Pandak II, Pandak)					100		Puskesmas Pandak II
			Cakupan Pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Srandakan, Srandakan)					100		Puskesmas Srandakan
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Sanden, Sanden)					100		Puskesmas Sanden
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Kretek, Kretek)					100		Puskesmas Kretek
			Cakupan pelayanan BLUD (Unit Kerja)	1		(UPTD Puskesmas Pundona, Pundona)					100		Puskesmas Pundong
			Cakupan Pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Bambanglipuro, Bambanglipuro)					100		Puskesmas Bambanglipuro
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Pandak I, Pandak)					100		Puskesmas Pandak I
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Sewon II, Sewon)					100		Puskesmas Sewon II
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Sewon I, Timbulharjo, Kec. Sewon)					100		Puskesmas Sewon I
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Banguntapan III, Banguntapan)					100		Puskesmas Banguntapan III
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Banguntapan II, Banguntapan)					100		Puskesmas Banguntapan II
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Banguntapan 1, Banguntapan)					100		Puskesmas Banguntapan I
			Cakupan Pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Piyungan, Piyungan)					100		Puskesmas Piyungan
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Pleret, Pleret)					100		Puskesmas Pleret
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Dlingo II, Dlingo)					100		Puskesmas Dlingo II
			Cakupan pelayanan BLUD (Unit Kerja)	1		(UPTD Puskesmas Dlingo I, Dlingo)					0		Puskesmas Dlingo I
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Imogiri II, Imogiri)					100		Puskesmas Imogiri II
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Imogiri I, Imogiri, Kec. Imogiri)					100		Puskesmas Imogiri I



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Jetis II, Jetis)					100		Puskesmas Jetis II
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Jetis 1, Jetis)					100		Puskesmas Jetis I
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Bantul II, Bantul)					100		Puskesmas Bantul II
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Bantul I, Bantul)					100		Puskesmas Bantul I
			Cakupan Pelayanan BLUD (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		RSUD Panembahan Senopati
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Sedayu I, Sedayu)					100		Puskesmas Sedayu I
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Pajangan, Pajangan)					100		Puskesmas Pajangan
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Kasihan II, Kasihan)					100		Puskesmas Kasihan II
			Cakupan pelayanan BLUD (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Sedayu II, Sedayu)					100		Puskesmas Sedayu II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00	207.999.478.800,00	(UPTD Puskesmas Pleret, Pleret)	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berlaku Sains	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat dan Puskesmas , Pegawai Non ASN	1	297.478.157.380,00	Puskesmas Pleret
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD Puskesmas Piyungan, Piyungan)				Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Non ASN BLUD	1		Puskesmas Piyungan
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD PUSKESMAS BANGUNTAPAN I, Banguntapan)				Puskesmas MASYARAKAT DAN PUSKESMAS, PEGAWAI NON ASN BLUD	1		Puskesmas Banguntapan I
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPT Pusk. Banguntapan II, Banguntapan)				Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Kesehatan Non ASN BLUD	1		Puskesmas Banguntapan II
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPT Puskesmas Banguntapan III, Banguntapan, Kec. Banguntapan)				Puskesmas dan Masyarakat, Tenaga non ASN BLUD	1		Puskesmas Banguntapan III
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD PUSKESMAS SEWON I, Sewon)				Puskesmas MASYARAKAT DAN PUSKESMAS	1		Puskesmas Sewon I
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD Puskesmas Sewon II, Sewon)				MASYARAKAT, MASYARAKAT , TENAGA NON ASN BLUD	1		Puskesmas Sewon II
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD Puskesmas Kasihan I, Kasihan)				Puskesmas dan Masyarakat , TENAGA NON ASN	1		Puskesmas Kasihan I
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD PUSKESMAS KASIHAN II, Kasihan)				Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Non ASN BLUD	1		Puskesmas Kasihan II
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD Puskesmas Pajangan, Pajangan)				MASYARAKAT DAN PUSKESMAS , TENAGA NON ASN BLUD PUSKESMAS PAJANGAN	1		Puskesmas Pajangan
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD PUSKESMAS SEDAYU I, Sedayu)				BARANG DAN JASA BLUD, MODAL PERALATAN DAN MESIN BLUD, TENAGA NON ASN PEGAWAI BLUD	1		Puskesmas Sedayu I



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		(UPTD PUSKESMAS SEDAYU II, Sedayu)				MASYARAKAT, MASYARAKAT , TENAGA NON ASN	1		Puskesmas Sedayu II
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	35		(RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, Tirirenggo, Kec. Bantul)				Pasien. Pengunjung dan Karyawan Rumah Sakit	35		RSUD Panembahan Senopati
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD PUSKESMAS SRANDAKAN, Srandakan)				MASYARAKAT DAN PUSKESMAS, TENAGA NON ASN BLUD	1.00		Puskesmas Srandakan
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD Puskesmas Sanden, Sanden)				Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Non ASN BLUD	1.00		Puskesmas Sanden
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD Puskesmas Kretek, Kretek)				Masyarakat dan puskesmas, Masyarakat dan Puskesmas, Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kretek, Tenaga Non ASN BLUD	1.00		Puskesmas Kretek
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD Puskesmas Pundong, Pundong)				Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Non ASN BLUD	1.00		Puskesmas Pundong
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(Sumbermulyo, Bambanglipuro)				Perorangan dan Masyarakat, Tenaga Non ASN BLUD	1.00		Puskesmas Bambanglipuro
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD Puskesmas Pandak I, Pandak)				Fasilitas Kesehatan untuk Masyarakat atau Pasien dan Puskesmas, Pegawai, Masyarakat, dan Lintas Sektor, Tenaga Non ASN BLUD	1.00		Puskesmas Pandak I
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD Puskesmas Pandak II, Pandak)				Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Non ASN BLUD	1.00		Puskesmas Pandak II
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD Puskesmas Bantul I, Bantul)				Puskesmas, Puskesmas dan Masyarakat, Tenaga Non ASN BLUD	1.00		Puskesmas Bantul I
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD PUSKESMAS BANTUL II, Bantul)				PUSKESMAS DAN MASYARAKAT, TENAGA NON ASN - BLUD	1.00		Puskesmas Bantul II
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD Puskesmas Jetis I, Jetis)				Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Non ASN BLUD	1.00		Puskesmas Jetis I
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD Puskesmas Jetis II, Jetis)				Masyarakat, Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga non ASN BLUD	1.00		Puskesmas Jetis II



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD PUSKESMAS IMOGIRI I, Imogiri)				MASYARAKAT DAN PUSKESMAS, MASYARAKAT DAN PUSKESMAS	1		Puskesmas Imogiri I
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD Puskesmas Imogiri II, Imogiri)				Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Non ASN BLUD	1		Puskesmas Imogiri II
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD PUSKESMAS DLINGO 1, Dlingo)				MASYARAKAT DAN PUSKESMAS	1		Puskesmas Dlingo I
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.00		(UPTD PUSKESMAS DLINGO II, Dlingo)				MASYARAKAT DAN PUSKESMAS	1		Puskesmas Dlingo II
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR) (%)	69	61.172.469.777,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			191.281.011.617,00	RSUD Panembahan Senopati
			Indeks capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Sewon I
			Indeks capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Sewon II
			Indeks capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Kasihan I
			Indeks capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Kasihan II
			Indeks Capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Sedayu I
			Indeks capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Sedayu II
			Cakupan Pelayanan Jamkesda (%)	100									UPTD Jamkesda
			Cakupan pelayanan Labkesda (Persentase)	100									UPTD Labkesda
			Indeks Capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Pajangan
			Indeks Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Indeks)	1									Dinas Kesehatan
			Indeks capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Srandakan
			Indeks capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Sanden
			Indeks capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Kretek
			Indeks capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Pundong
			Indeks capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Bambanlipuro
			Indeks Capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Pandak I
			Indeks capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Pandak II
			Indeks capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Bantul I
			Indeks capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Bantul II
			Indeks capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Jetis I
			Indeks capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Jetis II
			Indeks capaian SPM (Indeks)	1									Puskesmas Imogiri II



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Indeks capaian SPM (Indeks) Indeks capaian SPM (Indeks) Indeks capaian SPM (Indeks) Indeks Capaian SPM (Indeks) Indeks capaian SPM (Indeks) Indeks capaian SPM (Indeks) Indeks capaian SPM (Indeks) Turn Over Interval (TOI) (Hari) Indeks Capaian SPM (Indeks) Bed Turn Over (BTO) (Hari)	1 1 1 1 1 1 1 2 1 50								Puskesmas Dlingo I Puskesmas Dlingo II Puskesmas Pleret Puskesmas Piyungan Puskesmas Banquntapan I Puskesmas Banguntapan II Puskesmas Banquntapan III RSUD Panembahan Senopati Puskesmas Imogiri I RSUD Panembahan Senopati	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP (Indeks) pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan (%)	1 96	16.769.895.100,00	(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL) (RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, Tirrenggo, Kec. Bantul)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM		1 97	28.515.320.000,00	Dinas Kesehatan RSUD Panembahan Senopati
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1.00	13.818.864.100,00	(RS Saras Adyatma, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat	1	14.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	15.000.000,00	(RSUD Panembahan Senopati, Tirrenggo, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Pasien dan Pengunjung Pasien	1	17.496.000,00	RSUD Panembahan Senopati
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	2	200.000.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Puskesmas Pundong dan Masyarakat	2	200.000.000,00	Dinas Kesehatan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL	DAERAH					
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	4	327.000.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Puskesmas dan Masyarakat	4	324.496.000,00	Dinas Kesehatan	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.00		(RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, Tirirenggo, Kec. Bantul)				pasien rumah sakit	1.00		RSUD Panembahan Senopati	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	170.00	100.000.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Puskesmas dan masyarakat	170	100.000.000,00	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1	2.259.031.000,00	(RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, Tirirenggo, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Pasien rumah sakit	3.00	13.823.328.000,00	RSUD Panembahan Senopati	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	40.00		(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)				Non ASN, Obat ED, Puskesmas	40		Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	324.00	50.000.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	puskesmas	324	50.000.000,00	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM (Persentase)	100	44.025.439.477,00	(UPTD Puskesmas Banguntapan 1, Banguntapan)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM		100	159.005.461.217,00	Puskesmas Banguntapan I
				Cakupan pelayanan UKM (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Kasihan II, Kasihan)					100		Puskesmas Kasihan II
				Cakupan pelayanan UKM (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Kasihan I, Kasihan)					100		Puskesmas Kasihan I
Cakupan pelayanan UKM (Laporan)				1		(UPTD Puskesmas Sewon II, Sewon)					1		Puskesmas Sewon II	
Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				100		(UPTD Puskesmas Sewon I, Timbulharjo, Kec. Sewon)					100		Puskesmas Sewon I	
Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				100		(UPTD Puskesmas Banguntapan III, Banguntapan)					100		Puskesmas Banguntapan III	
Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				100		(UPTD Puskesmas Banguntapan II, Banguntapan)					100		Puskesmas Banguntapan II	
Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				100		(UPTD Puskesmas Sanden, Sanden)					100		Puskesmas Sanden	
Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				100		(UPTD Puskesmas Sedayu I, Sedayu)					100		Puskesmas Sedayu I	
Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				100		(UPTD Puskesmas Sedayu II, Sedayu)					100		Puskesmas Sedayu II	
Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				100		(UPTD Puskesmas Srandakan, Srandakan)					100		Puskesmas Srandakan	
Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP (Indeks)				1		(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)					1		Dinas Kesehatan	
Cakupan pelayanan UKM (Persentase)				100		(UPTD Puskesmas Pandak II, Pandak)					100		Puskesmas Pandak II	
Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Labkesda (Persentase)				100		(UPTD Labkesda, KAB. BANTUL)					100		UPTD Labkesda	
Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda (Persentase)				100		(UPTD Jamkesda, KAB. BANTUL)					100		UPTD Jamkesda	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
	1.02.02.2.02.0001		Cakupan Pelayanan UKM (Persentase)	100		(UPTD Puskesmas Kretek, Kretek)				100	Puskesmas Kretek		
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)	100						Puskesmas Pundong			
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)	100						Puskesmas Bambanglipuro			
			Cakupan Pelayanan UKM (Persentase)	100						Puskesmas Pandak I			
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)	100						Puskesmas Bantul I			
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)	100						Puskesmas Bantul II			
			Cakupan Pelayanan UKM (Persentase)	100						Puskesmas Jetis I			
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)	100						Puskesmas Jetis II			
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)	100						Puskesmas Imogiri I			
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)	100						Puskesmas Imogiri II			
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)	100						Puskesmas Dlingo I			
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)	100						Puskesmas Dlingo II			
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)	100						Puskesmas Pleret			
			Cakupan Pelayanan UKM (Persentase)	100						Puskesmas Piyungan			
			Cakupan pelayanan UKM (Persentase)	100						Puskesmas Pajangan			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15388.00						25.000.000,00	(Dinas Kesehatan Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	15388.00	25.000.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DINKES, Puskesmas, RS, Jejaring, Lintas Program, DINKES, Puskesmas, RS, Jejaring, Lintas Program, Lintas Sektor, UPTD, Dinkes	15388	75.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	14656.00	12.200.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan, Puskesmas, PMB, RS, DINKES, Puskesmas, RS, Jejaring, Lintas Program	14656.00	48.800.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	57381.00	25.000.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DINKES dan Puskesmas, DINKES, Puskesmas, RS, Jejaring, Lintas Program	57381.00	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	121590.00	30.000.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DINKES, Puskesmas, dan Sekolah, DINKES, Puskesmas, Lintas Program, Lintas Sektoral, DINKES, puskesmas, sekolah, DINKES, Puskesmas, Sekolah, DINKES, Puskesmas, Sekolah, Lintas Sektoral	121590.00	210.000.000,00	Dinas Kesehatan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	758691.00	19.215.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Puskesmas, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinkes	758691.00	115.290.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	136579.00	39.000.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DINKES dan Puskesmas, DINKES, Puskesmas, Lintas Sektoral, Posyandu dan Lansia, Puskesmas, Dinkes	136579.00	195.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	89737.00	24.700.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Klinik, Lintas sektor, Puskesmas, Rumah Sakit	89737.00	98.800.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30463.00	24.962.500,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas, Puskesmas, Dinas Kesehatan	30463.00	74.887.500,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	2990.00	42.850.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Lintas Sektor, Lintas Program, masyarakat di wilayah Kalurahan Wukirsari Kap. Imogiri dan Kalurahan Triharjo Kap. Pandak, puskesmas, Puskesmas	2990.00	214.250.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	11786.00	34.950.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Masyarakat, Dinas Kesehatan , Puskesmas, Rumah Sakit, OPD, LSM, Dinkes, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit	11786.00	174.750.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	16787.00	24.700.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, OPD, Dinkes, ODHIV, LSM, Puskesmas, Rumah Sakit	16787.00	98.800.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.00	216.920.000,00	(Dinas Kesehatab, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinkes, Dinkes, Puskesmas, Dinkes, Puskesmas, dan Lintas Sektor, Puskesmas, Dinkes, PSC	1.00	2.169.200.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.00	207.800.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DINKES dan Puskesmas, DINKES, Puskesmas, dan Balita Malnutrisi, Tenaga Non ASN	1	623.400.000,00	Dinas Kesehatan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.00	82.194.600,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinkes, Dinkes, puskesmas, lintas sektor, Lintas sektor, dinkes, Lintas sektor, Dinkes, OPD, puskesmas	1	1.068.529.800,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	65.00	553.762.500,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	masyarakat, Masyarakat, Puskesmas, Puskesmas , TSL Puskesmas, UPTD, Masyarakat MASYARAKAT	65.00	6.930.300.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00	640.490.000,00	(UPTD PUSKESMAS DLINGO I, Dlingo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		1	4.262.840.000,00	Puskesmas Dlingo I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)				Dinas kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinkes, Dinkes, puskesmas, Dinkes, Puskesmas, Dinkes, Puskesmas, Lintas Sektor, Masyarakat, puskesmas, lintas sektor, Puskesmas	1		Dinas Kesehatan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD PUSKESMAS SRANDAKAN, Srandakan)				Masyarakat	1.00		Puskesmas Srandakan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD Puskesmas Sanden, Sanden)				Perorangan dan Masyarakat	1.00		Puskesmas Sanden
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD Puskesmas Kretek, Kretek)				masyarakat dan puskesmas, Masyarakat dan Puskesmas	1.00		Puskesmas Kretek
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD Puskesmas Pundong, Pundong)				Masyarakat dan Puskesmas	1.00		Puskesmas Pundong
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(Sumbermulyo, Bambanglipuro)				Perorangan dan Masyarakat	1.00		Puskesmas Bambanglipuro
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD Puskesmas Pandak I, Pandak)				Masyarakat	1.00		Puskesmas Pandak I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD Puskesmas Pandak II, Pandak)				Masyarakat	1.00		Puskesmas Pandak II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD Puskesmas Bantul I, Bantul)				Masyarakat	1.00		Puskesmas Bantul I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD PUSKESMAS BANTUL II, Bantul)				PUSKESMAS DAN MASYARAKAT	1.00		Puskesmas Bantul II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD Puskesmas Jetis I, Jetis)				MASYARAKAT	1.00		Puskesmas Jetis I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD Puskesmas Jetis II, Jetis)				Masyarakat	1.00		Puskesmas Jetis II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD PUSKESMAS IMOGIRI I, Imogiri)				MASYARAKAT	1		Puskesmas Imogiri I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD Puskesmas Imogiri II, Imogiri)				Masyarakat	1		Puskesmas Imogiri II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD PUSKESMAS DLINGO II, Dlingo)				MASYARAKAT	1		Puskesmas Dlingo II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD Puskesmas Pleret, Pleret)				Masyarakat dan Puskesmas	1		Puskesmas Pleret
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD Puskesmas Piyungan, Piyungan)				Masyarakat Wilayah Piyungan	1		Puskesmas Piyungan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD PUSKESMAS BANGUNTAPAN I, Banguntapan)				MASYARAKAT	1		Puskesmas Banguntapan I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPT Puskesmas Banguntapan II, Banguntapan)				Masyarakat	1		Puskesmas Banguntapan II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPT Puskesmas Banguntapan III, Banguntapan, Kec. Banguntapan)				Masyarakat	1		Puskesmas Banguntapan III



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.02.02.2.02.0019		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD PUSKESMAS SEWON I, Sewon)				MASYARAKAT	1		Puskesmas Sewon I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD Puskesmas Sewon II, Sewon)				Masyarakat	1		Puskesmas Sewon II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD Puskesmas Kasihan I, Kasihan)				Masyarakat	1		Puskesmas Kasihan I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD PUSKESMAS KASIHAN II, Kasihan)				Masyarakat	1		Puskesmas Kasihan II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD PUSKESMAS PAJANGAN, Pajangan)				Masyarakat	1		Puskesmas Pajangan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.00		(UPTD PUSKESMAS SEDAYU I, Sedayu)				MASYARAKAT WILAYAH PUSKESMAS SEDAYU I, MASYARAKAT WILAYAH SEDAYU I	1		Puskesmas Sedayu I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	2		(UPTD PUSKESMAS SEDAYU II, Sedayu)				MASYARAKAT	2		Puskesmas Sedayu II
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.00	12.600.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinkes, Puskesmas	1	12.600.000,00	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1404.00	80.111.340,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan, Lintas Sektor, puskesmas, Puskesmas, Tenaga Non ASN	1404.00	721.002.060,00	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	317.606.340,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinkes, masyarakat , Masyarakat, Pegawai Non ASN, petugas fogging, Puskesmas, Puskesmas , Puskesmas untuk screning , Puskjesmas , Rumah sakit dan Puskesmas	1	6.669.733.140,00	Dinas Kesehatan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	60000.00	24.774.651.300,00	(UPTD JAMKESDA, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Masyarakat , Rumah Sakit, Puskesmas dan Praktek Bidan Mandiri	60000	74.998.953.900,00	UPTD Jamkesda
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	7.00	49.125.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat	7	49.125.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	17.00	7.391.511.637,00	(RS Saras Adyatma, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat	17	7.391.511.637,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00	5.625.000.000,00	(UPTD PUSKESMAS SEDAYU I, Sedayu)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat yang berkunjung di puskesmas , MASYARAKAT YANG BERKUNJUNG DI PUSKESMAS SEDAYU I, MASYARAKAT YANG BERKUNJUNG KE PUSKESMAS SEDAYU I	2	18.800.000.000,00	Puskesmas Sedayu I
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2		(UPTD PUSKESMAS SEDAYU II, Sedayu)				MASYARAKAT	2		Puskesmas Sedayu II
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.00		(UPTD PUSKESMAS DLINGO I, Dlingo)				MASYARAKAT DAN PUSKESMAS, PUSKESMAS	1		Puskesmas Dlingo I
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD PUSKESMAS DLINGO II, Dlingo)				PUSKESMAS DAN MASYARAKAT	2		Puskesmas Dlingo II
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD Puskesmas Pleret, Pleret)				Masyarakat dan Puskesmas	2		Puskesmas Pleret
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD Puskesmas Piyungan, Piyungan)				Masyarakat, Masyarakat , Masyarakat dan Puskesmas	2		Puskesmas Piyungan
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD PUSKESMAS BANGUNTAPAN I, Banguntapan)				MASYARAKAT, PEGAWAI DAN PUSKESMAS	2		Puskesmas Banguntapan I
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12.00		(Banguntapan)				Masyarakat, Masyarakat dan Puskesmas	12		Puskesmas Banguntapan II
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPT Puskesmas Banguntapan III, Banguntapan, Kec. Banguntapan)				Masyarakat, Puskesmas, Puskesmas dan Masvarakat	2		Puskesmas Banguntapan III



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD PUSKESMAS SEWON I, Sewon)				MASYARAKAT, Masyrakat	2		Puskesmas Sewon I
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD PUSKESMAS SEWON II, Sewon)				MASYARAKAT DAN PUSKESMAS SEWON II	2		Puskesmas Sewon II
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD Puskesmas Kasihan I, Kasihan)				Masyarakat	2		Puskesmas Kasihan I
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD PUSKESMAS KASIHAN II, Kasihan)				Masyarakat, Puskesmas dan Masyarakat	2		Puskesmas Kasihan II
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD PUSKESMAS PAJANGAN, Pajangan)				Masyarakat dan Puskesmas Pajangan	2		Puskesmas Pajangan
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD PUSKESMAS IMOIRI I, Imogiri)				PEGAWAI DAN PUSKESMAS, PUSKESMAS DAN MASYARAKAT	2		Puskesmas Imogiri I
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD Puskesmas Jetis II, Jetis)				Masyarakat, Masyarakat , Masyarakat dan Puskesmas	2.00		Puskesmas Jetis II
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD Puskesmas Jetis I, Jetis)				PUSKESMAS, Puskesmas dan Masyarakat, PUSKESMAS DAN MASYARAKAT	2.00		Puskesmas Jetis I
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD PUSKESMAS BANTUL II, Bantul)				PUSKESMAS, PUSKESMAS DAN MASYARAKAT	2.00		Puskesmas Bantul II
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.00		(UPTD Puskesmas Bantul I, Bantul)				Ibu Hamil, Masyarakat	1.00		Puskesmas Bantul I
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD Puskesmas Pandak II, Pandak)				Masyarakat dan Puskesmas	2.00		Puskesmas Pandak II
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD Puskesmas Pandak I, Pandak)				Masyarakat, Masyarakat dan Puskesmas, Tenaga Non ASN	2.00		Puskesmas Pandak I
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(Sumbermulyo, Bambanglipuro)				Perorangan Dan Masyarakat, PERORANGAN DAN MASYARAKAT	2.00		Puskesmas Bambanglipuro
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.00		(UPTD Puskesmas Pundong, Pundong)				Masyarakat dan Masyarakat, Masyarakat dan Puskesmas	1.00		Puskesmas Pundong
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD Puskesmas Kretek, Kretek)				masyarakat dan puskesmas, masyarakat dan puskesmas	2.00		Puskesmas Kretek
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD Puskesmas Sanden, Sanden)				Masyarakat dan Puskesmas, Mayarakat dan Puskesmas, Perorangan dan Masyarakat, Puskesmas	2.00		Puskesmas Sanden
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD PUSKESMAS SRANDAKAN, Srandakan)				Masyarakat dan Puskesmas	2.00		Puskesmas Srandakan
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	2.00		(UPTD Puskesmas Imogiri II, Imogiri)				Masyarakat, Puskesmas	2		Puskesmas Imogiri II



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	40000.00	2.151.838.000,00	(UPTD JAMKESDA, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	-, PKK, PPK, LP/LS, Internal Jamkesda, Rumah Sakit dan Puskesmas , UPTD Jamkesda, UPTD Jamkesda Bantul	40000	21.218.380.000,00	UPTD Jamkesda
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12.00		(UPTD LABKESDA, KAB. BANTUL)				Masyarakat , UPTD Labkesda, UPTD Labkesda bantul, UPTD Labkesda Bantul, UPTD Labkesda dan	12		UPTD Labkesda
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	15.00	111.512.500,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	masyarakat Dinkes , Puskesmas, Dinkes, Puskesmas, FKTP/Klinik	15	2.341.762.500,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.00	1.043.266.880,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinkes, Dinkes, Puskesmas, dan Lintas Sektor, PMI	1.00	9.389.401.920,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	425	14.550.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik	425	29.100.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	425	24.800.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinkes, Puskesmas, Rumah Sakit, Dinkes, Puskesmas, Rumah Sakit, ODHIV, LSM	425	99.200.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	425	24.800.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Puskesmas, Puskesmas dan RS, SKPD terkait dan Puskesmas	425	99.200.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	9.00	375.321.880,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan, Puskesmas	9	750.643.760,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan (Aplikasi)	2	197.116.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		2	1.600.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.00	197.116.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinkes, Dinkes dan UPTD	1	1.600.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin (Unit)	5	180.019.200,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		5	2.160.230.400,00	Dinas Kesehatan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	6.00	180.019.200,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Peningkatan kualitas SDM	Dinkes, Dinkes dan Lintas Sektor, Dinkes, Puskesmas, dan Lintas Sektor	6	2.160.230.400,00	Dinas Kesehatan
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan (Indeks)	1	297.446.520,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			5.400.557.600,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek (Orang)	1.800	120.746.520,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Peningkatan kualitas SDM		1.800	629.657.600,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	140.00	120.746.520,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan, Dinkes dengan RS,Klinik,Puskesmas, Nakes, Tenaga Non ASN	140	629.657.600,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK sesuai Standar (Persentase)	100	176.700.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Peningkatan kualitas SDM		100	4.770.900.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	290.00	176.700.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinkes, Dinkes, Puskesmas, Dinkes, Puskesmas dan Lintas Sektor, Dinkes, Puskesmas, UPT Jamkesda, UPT Labkesda, RSSA, Dinkes, Puskesmas, UPT Jamkesda, UPT Labkesda, RSSA, PSC, Dinkes, RSSA, Puskesmas, Jamkesda dan Labkesda, Dokter Internship atau Dokter Gigi Internship, Jabfung Kesehatan, Klinik, RS Swasta, Apotek, Organisasi Profesi, Puskesmas, Puskesmas, RS Pemerintah, UPT Jamkesda, UPT Labkesda, Puskesmas, RSPS, Tenaga Kesehatan Teladan, Puskesmas, Tenaga Kesehatan Teladan, Puskesmas, Tenaga Kesehatan Teladan, Dinkes, Dinkes DIY, RS, Dinkes, Dinkes DIY, Tenaga Kesehatan Teladan, Tim Kredensial Tenaga Kesehatan, Tim Penguji Uji Kompetensi Jabfung Kesehatan	290	4.770.900.000,00	Dinas Kesehatan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makan Minum Sesuai Standar Dibagi dengan yang Diawasi. (Indeks)	1	104.587.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			284.300.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Persentase)	100	23.325.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	131.250.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1	23.325.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Apotek,toko obat, alkes, optikal, UMOT, Dinas Kesehatan, Fasyankes,Nakes, Organisasi Profesi	1	131.250.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan (Persentase)	100	51.712.500,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	116.800.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	60.00	51.712.500,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Industri Rumah Tangga	60	116.800.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan (Dokumen)	73	13.300.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		73	20.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	25.00	13.300.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Penanggung jawab TPP	25	20.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Stiker pembinaan yang diterbitkan (Dokumen)	119	5.000.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		119	5.000.000,00	Dinas Kesehatan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	119.00	5.000.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Penjamah Makanan	119	5.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar (Sampel)	75	11.250.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		75	11.250.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	26.00	11.250.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	IRTP	26	11.250.000,00	Dinas Kesehatan
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Purnama Mandiri (Desa/Kelurahan)	50	279.502.340,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			2.811.425.360,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS (Persentase)	100	58.086.340,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	232.345.360,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	42.00	58.086.340,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Institusi Pendidikan , Institusi Pendidikan yang Berkerjasama, Puskesmas dan Lintas Sektor, Tenaga Non ASN	42	232.345.360,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS (Persentase)	77	37.416.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		77	187.080.000,00	Dinas Kesehatan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.00	37.416.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinkes,puskesmas, OPD, Dinkes, Puskesmas, dinkes	1	187.080.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupateri/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi (Persentase)	100	184.000.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM		100	2.392.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.00	184.000.000,00	(Dinas Kesehatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	masyarakat di wilayah bawuran pleret, wonokromo pleret, seloharjo pundong, panggungharjo sewon, masyarakat di wilayah iroyudan guwosari pajangan, masyarakat di wilayah karangtalun imogiri, masyarakat di wilayah triwidadi pajangan, selopamioro imogiri, girirejo imogiri, puskesmas, Puskesmas, puskesmas, lintas sektor	1	2.392.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			147.120.119.141,00							1.811.525.805.372,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84	17.794.726.180,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			32.855.035.370,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (%)	100	444.550.000,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	5.576.068.520,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	248.400.000,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	-, ASN DPUPKP, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Tenaga Non ASN -, ASN DPUPKP	6	3.124.300.320,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	11	196.150.000,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		11	2.451.768.200,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja keuangan (%)	100	13.321.457.680,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN DPUPKP	100	14.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	13.072.000.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	13.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	14	249.457.680,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		14	1.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi perkantoran (Jenis)	7	1.910.525.948,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN DPUPKP	7
1.03.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	24.603.150,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	4	21.799.500,00		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	273.418.800,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	9	656.700.000,00		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	185.551.000,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	12	493.168.000,00		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	39	21.000.000,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	39	57.600.000,00		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300	754.752.998,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	300	1.202.238.000,00		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	454.900.000,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	1	630.900.000,00		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	196.300.000,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	3	1.327.800.000,00		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan sarana aparatur (Jenis)	2	132.800.000,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN DPUPKP, DPUPKP	2	376.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	132.800.000,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		14	376.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran (Jenis)	3	604.191.952,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet	3	3.535.441.350,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	39.000.000,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		48	45.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	565.191.952,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Arsip DPUPKP, DPUPKP, Tenaga Non ASN DPUPKP	12	3.490.441.350,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran (Jenis)	4	1.381.200.600,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kendaraan Dinas/Operasional, Kendaraan Dinas/Operasional di DPUPKP, Kendaraan Dinas/Operasional DPUPKP	4	4.377.320.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	61	663.862.600,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		65	2.200.050.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	14.00	166.428.000,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Alat berat di Dinas PUPKP, Alat Berat di Dinas PUPKP, Pemakaian Alat Berat, Tabung APAR, Truk Trailer di Dinas PI IKP DPUPKP	14.00	1.329.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	32	9.850.000,00	(DPUPKP Kab. bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	AC dan Jaringannya, ASN DPUPKP, Komputer dan Personal Komputer	32	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	250	141.060.000,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		250	347.520.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.00	400.000.000,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Gedung Kantor DPUPKP	6.00	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	<i>Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kabupaten (%)</i> <i>Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik (%)</i>	40	20.698.613.284,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			79.397.277.097,00	<i>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman</i> <i>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman</i>
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Ha)</i>	400	6.025.086.500,00			(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)</i>	150	282.623.750,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota , Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan	150	1.569.747.096,00	<i>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman</i>
	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	<i>Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Titik)</i>	2	60.513.750,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur untuk kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Honorarium kegiatan, Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku , Pemeliharaan sumur air baku	2	186.755.709,00	<i>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman</i>
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	<i>Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi (KM)</i>	0.45	3.865.799.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Bangunan perkuatan tebing yang dipelihara, Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	0.50	16.422.559.475,00	<i>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman</i>
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)</i>	5	1.348.475.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	5	1.414.464.662,00	<i>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman</i>
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)</i>	6.00	467.675.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Perencanaan teknis afvour, tebing sungai, dan embung, Perencanaan teknis embung, afvour, dan tebing sungai	5	975.350.000,00	<i>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman</i>
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Daerah Irigasi yang ditingkatkan (%)</i>	86	14.673.526.784,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		88	58.828.400.155,00	<i>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman</i>



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	2	6.792.350.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Peningkatan Jaringan irigasi Permukaan	1.00	19.214.698.632,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.00	5.114.987.048,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Honorarium Tenaga Non ASN, Pemeliharaan mendesak jaringan irigasi, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan rutin jaringan irigasi, Penunjang kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan , Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.00	32.958.005.955,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	4	1.675.110.216,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4	4.210.141.968,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	10	1.091.079.520,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Penyusunan E-Paksi, Inventarisasi Aset Irigasi, dan Inventarisasi gorong-gorong di wilayah Kab. Bantul, Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang akan disusun, Perencanaan teknis irigasi, Tenaga Non ASN, Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10	2.445.553.600,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten yang Layak (%)	85,19	3.225.085.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			3.733.785.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih (%)	100	3.225.085.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		100	3.733.785.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	5.00	97.835.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	5.00	98.835.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	100.00	106.400.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100.00	110.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	4	372.400.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4	375.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	5.00	816.450.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5	820.450.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)	5.00	189.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	desa terdampak TPST Piyungan, KDN, Kompensasi Dampak Negatif (KDN)	5.00	571.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.00	6.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Pemeliharaan SPAM	1	8.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	1.00	45.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1000.00	1.140.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Rumah Tangga yang tersambung Sambungan Rumah SPAM	1000	1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	5.00	451.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	5	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pemenuhan Prasarana Penanganan Persampahan/TPS3R (%)	28	1.775.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			675.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Persampahan (Unit)	21	1.775.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		23	675.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (Ton/hari)	1	700.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Pembangunan Workshop	1	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	2	1.000.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	ITF Pasar Niten	2	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	2	75.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2	75.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik yang Layak (%)	91,92	9.970.041.740,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			13.231.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak (%)	91.92	9.970.041.740,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		93.95	13.231.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi (Unit)	1.00	2.807.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Rumah Tangga yang belum terlayani Sambungan Rumah	1	2.907.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	1.00	9.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	IPLT	1	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi (M ³ /Hari)	1.00	7.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	SPALD Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	1.00	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	5.00	10.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	IPLT	5	12.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit)	1.00	1.950.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Rumah tangga yang belum memiliki akses air limbah domestik	1	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	1.00	325.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Hibah Sekber Kartamantul	1	350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (M ³ /Hari)	5.00	10.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	SPALD Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	5	12.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	5.00	10.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	SPALD Terpusat Skala Perkotaan	5	12.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	1.00	10.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	SPALD Terpusat Skala Permukiman	1	12.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	100.00	10.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Rumah Tangga	100.00	12.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Desa)	4.00	85.400.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	4	90.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya (Penyelenggara)	8.00	138.550.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Kelompok Masyarakat	8	140.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)	20.00	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	IPLT	20	7.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1.00	10.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1	12.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2.00	1.699.746.740,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Lingkungan Sanitasi, SPALD Terpelihara, Tenaga Non ASN Sanitasi	2	5.250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)	200.00	2.500.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	100	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	150.00	15.845.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	160	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	4.00	367.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Gambar Teknis Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	4	375.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan (%)	5,23	7.680.753.402,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			29.231.338.742,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase lingkungan tertangani (M)	1.968	7.680.753.402,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		2.018	29.231.338.742,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	3000	5.551.054.402,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		3000	28.429.590.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	500	560.049.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	500	503.049.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	4	1.569.650.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Dokumen Detail Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang di Kabupaten Bantul	5	298.699.742,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung Pemerintah yang Laik Fungsi (%)	30	12.661.050.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			34.203.403.546,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB (%)	100	12.661.050.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Bangunan Gedung yang terpelihara	100	34.203.403.546,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	7.00	198.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		7	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1	86.400.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		1	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	12.056.450.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		6	33.575.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	2000	320.200.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		2000	278.403.546,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	100	103.809.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota (%)	100	103.809.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		100	150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	103.809.500,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	dokumen perencanaan	1	150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	76,65	59.672.274.165,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			1.603.220.021.326,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap (Km)	476.09	59.672.274.165,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		483.83	1.603.220.021.326,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1	443.787.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Jalan Kabupaten, Jalan Kabupaten Bantul	1	3.942.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	5	1.209.468.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Jalan dan Jembatan Kabupaten Bantul, Jalan Kabupaten Bantul, Jembatan Kabupaten Bantul, Tenaga Non ASN, Tim Pengarah dan Penanggungjawab Kegiatan	5	2.494.175.600,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya (KM)	3	1.119.550.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Jalan dan Jembatan Kabupaten Bantul, Jalan Kabupaten Bantul, Jembatan Kabupaten Bantul	3	1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	60	1.399.518.493,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Jembatan Kabupaten Bantul	60	16.000.446.532,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1	316.950.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Jalan dan Jembatan Kabupaten Bantul	1	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	15	49.319.878.663,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	-, Jalan Kabupaten Bantul, Tenaga Non ASN	15	1.564.217.059.200,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	12	5.863.120.669,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Jalan Kabupaten Bantul, Tenaga Non ASN	12	15.165.839.994,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
10.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	75,84	1.138.802.860,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			2.568.444.291,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi (Orang)	150	613.561.340,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		150	931.553.211,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3.00	62.550.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	3.00	181.553.211,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	150	551.011.340,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Masyarakat, Pekerja Konstruksi, Penyelenggara Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Peserta pelatihan tenaga terampil konstruksi	150	750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Data Konstruksi (Jenis)	6	339.671.520,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		6	572.641.080,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL	DAERAH					
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	10.00	339.671.520,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi, Masyarakat, Standar Harga dan Barang/Jasa Bidang Konstruksi	10.00	572.641.080,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi (Paket)	100	185.570.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Mutu Beton dan Aspal, Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota, Profil Bina Jasa Konstruksi	100	1.064.250.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	100.00	113.900.000,00	(DPUPKP Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		100.00	914.250.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	3.00	71.670.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		Lembaga Jasa Konstruksi	3.00	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang (%)	70,20	846.636.010,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			3.080.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota (%)	100	263.200.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Dokumen perencanaan penataan ruang	0		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	87.873.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		0.00			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.00	175.327.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		0.00			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota (%)	100	175.043.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Dokumen Pemanfaatan Ruang	100	230.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1	116.191.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		1	170.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.00	58.852.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pembangunan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	dokumen pemanfaatan ruang	1.00	60.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	408.393.010,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		100	2.850.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.00	241.201.080,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Data tanah kalurahan dan sultan ground, OPD dan masyarakat, OPD, Kapanewon, Kalurahan, dan Dukuh, Sipetarung, Tenaga Administrasi	1.00	1.500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat (Dokumen)	1.00	167.191.930,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Masayarak dan OPD, Masyarakat dan OPD, OPD	3.00	1.350.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
12.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (%)	100	11.553.327.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			9.180.000.000,00	Dinas Perhubungan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Cakupan Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (%)	90									Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (%)	100									Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (%)	100									Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Cakupan Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (%)	100									Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (%)	100									Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian kinerja kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (Dokumen)	1	250.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		0	-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang (Dokumen)	1.00	250.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Dokumen perencanaan tata ruang	0	-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten (Persentase)	100	10.706.827.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		00	8.180.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten (%)	100		(KAB. BANTUL)					100		Dinas Perhubungan
			Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (%)	100		(Srandakan, Sanden, Kretek, KAB. BANTUL)					100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.03.13.5.02.0010		Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten (Persentase)	100		(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)				Masyarakat Kab. Bantul	100		Dinas Lingkungan Hidup
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (Dokumen)	1.00	650.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		1.00	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	1.03.13.5.02.0012		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (Dokumen)	1		(Srandakan, Sanden, Kretek, KAB. BANTUL)			Aparatur dan Masyarakat di kawasan rawan bencana tsunami Masyarakat	0.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret (Dokumen)	1.00	10.006.827.000,00	(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	1.00	7.880.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.13.5.02.0019		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret (Dokumen)	1.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)			Kelompok Tani, Kelompok Tebu	0.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro (Dokumen)	1.00	50.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	1.00	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Cakupan pengendalian pemanfaatan penataan Ruang Satuan Ruang Strategis (%)	100	596.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	100	1.000.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
	1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang (Dokumen)	1.00	596.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	1.00	1.000.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
	1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			15.692.082.971,00						62.553.296.730,00	
	1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana (%)	100	4.417.455.501,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		7.119.687.619,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi (Jenis)	2	150.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	2	110.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	lahan yang potensial untuk relokasi	1	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Rumah Korban Bencana	1	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Rumah Korban Bencana Kabupaten	1	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Ketersediaan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	115.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Penerima Bantuan	1	75.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	lahan yang potensial untuk relokasi	1	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	lahan yang potensial untuk relokasi	1	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	lahan yang potensial untuk relokasi	1	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi (Jenis)	1	40.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		2	40.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	100.00	10.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Masyarakat terdampak bencana	101.00	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	20.00	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Masyarakat terdampak bencana	21.00	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	1.00	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Masyarakat terdampak bencana	2.00	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang)	30.00	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	30.00	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	30.00	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Masyarakat terdampak bencana	30.00	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	30.00	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah	30.00	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	30.00	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah	30.00	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi (Unit)	10	752.387.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		10	1.635.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	10	513.137.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Rumah Korban Bencana, Stakeholder Penanganan Kebencanaan Kabupaten Bantul, Tenaga lapangan	10	600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	10	204.250.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Masyarakat Terkena Bencana Kabupaten, Stakeholder Kebencanaan	10	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	3	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	lahan yag potensial untuk relokasi	3	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.00	5.000.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	lahan yang potensial untuk relokasi	1.00	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	3	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	lahan yang potensial untuk relokasi	3	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	3	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pembangunan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	lahan yang potensial untuk relokasi	3	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03.0010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	3	5.000.000,00	(Kabupaten bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pembangunan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	lahan yang potensial untuk relokasi	3	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	3	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pembangunan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	lahan yang potensial untuk relokasi	3	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.00	5.000.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pembangunan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	lahan yang potensial untuk relokasi	1.00	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Laporan pengelolaan rumah susun (Dokumen)	1	3.295.032.821,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pembangunan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Penghuni Rusunawa	1	3.734.687.619,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	12	3.295.032.821,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pembangunan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		12	3.734.687.619,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan (Dokumen)	12	180.035.180,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pembangunan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		12	1.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	4	180.035.180,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Konsultansi, Personil Non ASN, Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Verifikasi Perizinan Perumahan	4	1.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani (%)	31,77	3.311.385.650,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			28.465.546.051,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya (Kawasan)	3	3.311.385.650,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		3	28.465.546.051,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	190	775.655.650,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Masyarakat penerima RTLH, Masyarakat Penerima RTLH, Pemangku kebijakan Penyelenggaraan Rumah Tidak Layak Huni, Penyedia Jasa Konsultansi, Tenaga Pendamping lapangan	195	19.570.179.255,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	2	1.035.730.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Kawasan Permukiman Kumuh, Penyedia Jasa Konsultansi, Tim Pelaksana Kegiatan	2	7.395.366.796,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	75	1.500.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Masyakarat	75	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni (%)	99,6	3.280.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			24.939.513.060,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh (Unit)	110	3.280.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		120	24.939.513.060,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	110	3.280.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Masyarakat Penerima RTLH	120	24.939.513.060,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	100	4.683.241.820,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			2.028.550.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan PSU (Jenis)	1	4.683.241.820,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		1	2.028.550.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	100.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasandan Perencanaan, Ruas Jalan , Tenaga Non ASN, Tim Pelaksana Koordinasi Kegiatan, Tim Teknis Perencanaan dan Pengawasan	1	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	1	4.327.391.820,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		1	1.728.550.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1	255.850.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		1	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			29.864.757.583,00							65.415.680.095,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	82	20.647.995.766,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			36.093.929.023,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	81									Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	96	50.402.500,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			96	132.648.074,00
			Capaian kinerja perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Satuan Polisi Pamong Praja



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	21.877.500,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADAN)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Aparatur BPBD	7	33.334.524,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				ASN Satpol PP, Pejabat Struktural Satpol PP	4.00		Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.00	28.525.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Anggota Satpol PP	1.00	99.313.550,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)			Aparatur BPBD	5		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Angka)	97	12.839.440.512,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		98	17.794.802.682,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50.00	11.009.109.792,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	ASN Satpol PP	50.00	12.080.067.812,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29.00		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)			ASN BPBD	30.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	88.680.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	PPTK, PPK-SKPD, Bendahara, Pengurus Barang	12	5.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.00	1.731.150.720,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	ASN Satpol PP, Non ASN, SRI (Satlinmas Rescue Istimewa)	3.00	5.704.734.870,00	Satuan Polisi Pamong Praja



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	21	10.500.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Sekretariat dan PPTK	21	5.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Angka)	97	691.990.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	Anggota Satpol PP, Pejabat Pengadaan <			



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	29.967.400,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	10	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	91	136.315.208,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Puhlik	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	19	434.636.643,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Anggota Satpol PP, Satpol PP	12.00		Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	1	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	10.400.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	12	20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	21	46.690.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	21	40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12.00	28.750.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Puhlik	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Pengunjung	21.00	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	40		(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)				BPBD	40		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	457.977.300,00	(Dalam dan Luar Wilayah Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Puhlik	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	60	1.270.083.966,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				1, Anggota Linmas, Anggota satpol PP, Anggota Satpol PP, Anggota Satpol PP , Masyarakat	12.00		Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	13.611.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Puhlik	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	12	8.450.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Anggota Satpol PP	12.00		Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2.550.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	1	3.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Alat)	97	133.555.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	BPBD	98	260.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	18.405.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	10	60.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	10.00		Satuan Polisi Pamong Praja					
		1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	115.150.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	10	200.000.000,00
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			2.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	2.00						Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Angka)	97	4.639.519.728,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		97	11.705.937.544,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.05.01.2.08.0001		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				BPBD	100		Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	5.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		12	5.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	26.200.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	12	55.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	361.885.056,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	Anggota satpol PP, Anggota Satpol PP, Non ASN	12.00	2.352.568.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	4.246.434.672,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	12.00	9.292.869.344,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Angka)	97	1.556.827.118,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	BPBD	97	3.140.811.889,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	140.140.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		5	80.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	52.00 38	1.104.300.280,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL) (BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Anggota Satpol PP, Anggota Satpol PP BPBD	52.00 45	2.734.925.480,00	Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	5.625.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	10	6.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	128.00	231.840.000,00	(BPBD, Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	128	216.903.700,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50.00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Anggota Satpol PP	50.00		Satuan Polisi Pamong Praja			
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	74.921.838,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Anggota Satpol PP	1.00	102.982.709,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	(BPBD dan Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, KAB. BANTUL)		BPBD	10		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%)	100	5.964.901.817,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			21.980.751.072,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti (%)	100	5.083.709.880,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		100	14.950.223.352,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	12.00	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	Masyarakat	12.00	500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.00	405.950.820,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	Anggota Linmas, Anggota SAR dan Rescue Satpol PP, Anggota SAR Wilayah III dan IV, Anggota Satlinmas, Anggota Satlinmas Rescue Istimewa, Anggota Satpol PP dan Satlinmas, Petugas Pemberdayaan Linmas	12.00	4.077.963.830,00	Satuan Polisi Pamong Praja



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1600	169.050.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	Anggota Satlinmas Rescue Istimewa, Anggota Satpol PP dan Satlinmas, Masyarakat	100.00	374.723.085,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	2.00	4.930.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP	2.00	500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	18.00	5.025.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	Satpol PP	12.00	1.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	12.00	4.062.763.340,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	Anggota Satpol PP, TNI, dan Polri, Satpol PP, Sat Pol PP, Satpol PP, TNI, POLRI, Sat Pol PP, TNI, POLRI	12.00	7.611.927.477,00	Satuan Polisi Pamong Praja



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	100.00	420.360.720,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	Masyarakat Kabupaten Bantul, Satpol PP, Dinas Instansi Terkait, Satpol PP kab. Bantul, Satpol PP, TNI, Polri, Satpop PP, TNI, Polri	12.00	2.866.636.960,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	12.00	5.005.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publiik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	Warma Masyarakat	12.00	500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	30.00	5.625.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	Anggota Satpol PP	30.00	15.972.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju (%)	100	876.191.937,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		100	7.030.027.720,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	12.00	197.550.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	Anggota Penegakan Peraturan Daerah, Tim operasi cukai, Tokoh masyarakat, warga masyarakat, pengusaha vape/tembakau iris, penjual toko kelontong, pamong desa, Warga masyarakat, dinas, Warga masyarakat, pelajar, pamong desa, karang taruna	12.00	85.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	12.00	532.805.937,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	Anggota Sat Pol PP, Anggota Sat Pol PP dan Instansi Terkait	12.00	6.627.978.195,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	12.00	145.836.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	OPD, masyarakat, , Warga masyarakat, Warga masyarakat	12.00	317.049.525,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan pembinaan PPNS (%)	100	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		100	500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	12.00	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	PPNS Se Kabupaten Bantul	2.00	500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

V-69



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokumen)	1.00	250.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	0.00	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	250	50.000.000,00	(Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana	500	121.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Persentase)	70	1.101.000.000,00	(BPBD, Wilayah Rawan Bencana, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Aparatur dan Masyarakat di Kasawan Rawan Bencana, Satuan Pendidikan di Kawasan Rawan Bencana TRC BPBD, TRC Multi Sektor	75	3.260.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)	16	200.000.000,00	(Wilayah Rawan Bencana, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		16	1.050.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	75	100.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		28.00	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)	200	100.000.000,00	(Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		200	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	20	20.000.000,00	(Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana	100	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokumen)	1	250.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kabupaten Bantul	0.00	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	75	347.000.000,00	(Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD, Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana	100	1.500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	4.00	60.000.000,00	(Kawasan Rawan Bencana, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Aparatur dan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana	10	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (lanoran)	12	24.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	12	110.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	100	684.400.000,00	(BPBD, Wilayah Kejadian Bencana, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		100	830.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	5.000.000,00	(Lokasi Kejadian, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Korban Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1	5.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	9.750.000,00	(BPBD; Lokasi Bencana, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD dan Stakeholder Penanggulangan Bencana	1	20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	950	238.775.000,00	(Lokasi Kejadian Bencana, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD dan Korban Bencana	950	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	950	250.000.000,00	(Lokasi Kejadian Bencana, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD dan Korban Bencana	950	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1	6.475.000,00	(BPBD, Lokasi Bencana, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD dan Korban Bencana	1	5.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1	174.400.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD dan Stakeholder PB	1	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (%)	85	195.000.000,00	(BPBD Bantul, Palbapang, Kec. Bantul)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		87	308.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	2	10.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	2	20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah (Dokumen)	1	10.000.000,00	(BPBD, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	FPRB Kabupaten	1	20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1	5.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD dan Stakeholder PB	1	8.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	12	10.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	12	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1	20.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD dan Instansi Terkait	1	30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	30	40.000.000,00	(BPBD, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Tim Penyusun Jitupasna dan R3P	30	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan (Kegiatan)	5	10.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	6	15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	5	10.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Dunia Usaha, LSM, Perguruan Tinggi	5	15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	2	80.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	2	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	971.460.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			2.822.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (%)	87	607.000.000,00	(Kawasan Rawan Kebakaran, Tempat Kejadian, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		87	1.752.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1	10.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	1	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	160.000.000,00	(BPBD, Pos Sektor Pemadam dan Penyelamatan, Srandakan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Korban Kebakaran	12	180.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	12	20.000.000,00	(Lokasi Kejadian, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12	30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2.000.000,00	(Lokasi Kejadian, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Korban	1	2.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1	5.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	1	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	30	50.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	50	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	5	5.000.000,00	(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kalurahan	5	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penangguluan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	85	350.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	100	1.400.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1	5.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD dan Stakeholder	1	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Capaian Kinerja Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran (%)	67	23.000.000,00	(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		70	30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Pengelola Gedung	1	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	60	18.000.000,00	(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	60	20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran (%)	84	238.960.000,00	(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		86	860.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	80	20.000.000,00	(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Masyarakat	100	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	3	68.960.000,00	(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kalurahan di Kawasan Rawan Kebakaran, Relawan	5	360.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	8	150.000.000,00	(Kawasan Rawan Kebakaran, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kalurahan, Kalurahan di Kawasan Rawan Bencana	10	400.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia (%)	100	102.500.000,00	(Lokasi Kejadian, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		100	180.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1	37.500.000,00	(Lokasi Kejadian, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	1	40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)	1	5.000.000,00	(BPBD, Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	1	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	20	15.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	50	30.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	10	45.000.000,00	(BPBD, Palbapang, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	BPBD	10	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			23.303.355.839,00							70.299.359.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	83	7.759.017.952,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			10.147.693.920,00	Dinas Sosial



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	80	489.378.470,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		80	1.050.961.920,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.00	212.472.990,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	data PPKS dan PSKS, Data Urusan Sosial, OPD di Kabupaten Bantul, Perencanaan OPD, Perwakilan SDM PKH, TKPK, TKSK, LKS, Peksos, Tagana, Renja dan Renstra, Tenaga Administrasi	6	724.596.328,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.00	276.905.480,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	data PPKS dan PSKS, Data Sosial, Kegiatan Dinas Sosial, LKJ dan LKPJ, LPPD dan SPM, Perwakilan SDM PKH, TKPK, dan TKSK, Petugas Pendata Wilayah (10 Orang x 2 Kali), petugas pendata PPKS dan PSKS kalurahan dan Kapanewon	5.00	326.365.592,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (Bulan)	12	5.496.313.746,00	(kabupaten bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		12	4.911.648.093,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	5.172.988.908,00	(Kab. bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	ASN Dinas Sosial	32	4.477.026.550,00	Dinas Sosial



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	141.960.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	ASN Dinas Sosial	1	107.808.611,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	181.364.838,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Admin Bidang, Administrator Pelaporan Akuntansi dan Perbendaharaan, Akuntansi SKPD	4	326.812.932,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100	7.163.500,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Pegawai Dinas Sosial	100	1.852.392,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	7.163.500,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	1.852.392,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	100	765.885.287,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Sosial	100	1.868.832.110,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	221.476.867,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		7	73.725.206,00	Dinas Sosial



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	38.758.500,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Alat Tulis Kantor (ATK), Cinderamata, Dokumen Dinas Sosial	3	56.094.141,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	7.800.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pegawai dan pengguna layanan Dinas Sosial	2	4.816.219,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	489.271.100,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pegawai Dinas Sosial, Pegawai Dinas Sosial, Pengguna fasilitas pelayanan, Tamu Dinas Sosial	4	1.728.899.431,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	5.578.770,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Arsip SKPD	2	3.444.690,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	3.000.050,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pegawai Dinas Sosial	2	1.852.423,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah (%)	100	316.002.337,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		100	518.989.833,00	Dinas Sosial
			capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.250.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Benda Pos	1	2.624.222,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	54.851.780,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Operasional Kantor, Tagihan Air Dinas Sosial, Tagihan Listrik Dinas Sosial, Tagihan Telepon Dinas Sosial	2	148.813.240,00	Dinas Sosial



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	44.000.035,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Alat kebersihan, Alat Tulis Kantor, Bahan Komputer	2	74.095.689,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	211.900.522,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Administrator kepegawaian (1 Orang) Administrator Keseekretariatian (1) dan Persuratan Tenaga Pengamanan Kantor (4 Orang, ATK, Bahan Komputer, dan Obat-Obatan, Sampah Dinas Sosial	12	293.456.682,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bulan)	12	684.274.612,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		12	1.795.409.572,00	Dinas Sosial



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21.00	598.979.300,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Bahan Bakar dan Pelumas untuk kendaraan dinas , Kendaraan Dinas	22.00	920.648.208,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.00	68.185.750,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Laptop, Pemeliharaan mesin potong rumput, Pendingin ruangan di Dinas Sosial, Peralatan Dapur Umum, Personal Komputer	4.00	133.804.465,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	17.109.562,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dapur Dinas Sosial, Dinas Sosial	2	740.956.899,00	Dinas Sosial
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Psks yang Mampu Menangani PPKS (%)	75	1.162.861.780,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			7.186.582.808,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang (Kelompok)	40	23.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		40	5.615.102,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.00	23.500.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat umum dan pelaku usaha di Kabupaten Bantul.	1.00	5.615.102,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja (%)	90	1.139.361.780,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		90	7.180.967.706,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75.00	272.819.300,00	(seluruh kalurahan di Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Sekretariat IPSM Kapanewon, terkait Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	75.00	134.521.458,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	17.00	250.151.350,00	(17 Kapanewon di Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	17.00	670.968.805,00	Dinas Sosial



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	50.00	115.520.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH Graduasi mandiri, KPM PKH Graduasi, penyuluh sosial masyarakat (Pensosmas), Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas), Pilar - pilar kesejahteraan sosial dan masyarakat	50.00	634.598.460,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	60	489.892.280,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	amggota LK2S, anggota LK2S, Anggota LK2S, Karang Taruna, Karang Taruna di Kabupaten Bantul, Karang Taruna Kabupaten Bantul, Lansia, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), LKS di Kabupaten Bantul, Masyarakat, Masyarakat dan pilar - pilar kesejahteraan sosial, Masyarakat di Kabupaten Bantul, Pelajar Anggota Forlanza, Pengunjung Bantul Expo, Pengurus Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS), Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Tenaga non ASN, WKSBM	60	5.723.235.275,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat)	12.00	10.978.850,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), sekretariat Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	12.00	17.643.708,00	Dinas Sosial
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani (%)	75	10.079.566.574,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			29.609.872.687,00	Dinas Sosial



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			<i>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM) (%)</i>	75									<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<i>cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS (%)</i>	65	9.852.269.874,00	<i>(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)</i>		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		66	29.347.050.711,00	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>	892.00	8.452.007.520,00	<i>(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)</i>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	<i>Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) , Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Paket permakanan boga sehat</i>	900	13.876.109.692,00	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>	50.00	37.800.000,00	<i>(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)</i>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	<i>Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)</i>	50.00	7.435.853,00	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>	40.00	144.000.000,00	<i>(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)</i>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	<i>Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) Disabilitas</i>	40.00	10.622.646,00	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>	5.00	17.750.000,00	<i>(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)</i>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	<i>Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akan direunifikasi</i>	5.00	16.067.286,00	<i>Dinas Sosial</i>
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</i>	100.00	307.287.760,00	<i>(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)</i>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	<i>5 orang tenaga keamanan, Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak, Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) Disabilitas, pendamping ppks</i>	100.00	2.427.193.448,00	<i>Dinas Sosial</i>



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20.00	31.875.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)	20.00	26.530.062,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50.00	80.851.600,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS), tenaga Non ASN administrasi shelter	50.00	184.179.590,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50.00	109.783.224,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS), Penyediaan tenaga non ASN Kebersihan shelter	50.00	162.913.048,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50.00	44.437.500,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS), Tenaga Pendataan	50.00	291.069.846,00	Dinas Sosial



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20.00	550.754.590,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Jenazah terlantar, Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS), Perawat Shelter Kessos, Shelter Kessos, TRC dan Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)	20.00	12.022.713.612,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20.00	65.722.680,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS), tenaga non ASN (PEKSOS) di shelter kessos	20.00	314.115.860,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10.00	10.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)	10.00	8.099.768,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya (%)	75	227.296.700,00	(Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		76	262.821.976,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20.00	227.296.700,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) Disabilitas, Pendamping ODGJ, PPKS ODGJ dan lainnya, Tenaga Administrasi Non ASN di Shelter Kesejahteraan Sosial	20.00	262.821.976,00	Dinas Sosial



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial (%)	70	3.260.876.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			20.052.278.390,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial (%)	100	3.260.876.600,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		100	20.052.278.390,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	50000.00	507.943.470,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	KK miskin ekstrim, Operator SIKS dn SIDAMESRA, Pendamping TKPK	50000.00	2.975.693.169,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	100.00	476.399.680,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pendamping TKPK, Puskesmas , Puskesmas desa, Puskesmas, TKPK, TKSK, Operator, Lurah, Panewu, TKPK, TKSK, Pendamping PKH	100.00	3.822.871.185,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	100.00	1.789.525.320,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Buruh Tani dan Buruh Pabrik Tembakau, Peserta sosialisasi/bimek/pelati han, SDM PKH, Tenaga Non ASN	100	11.143.616.772,00	Dinas Sosial



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200.00	487.008.130,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	KPM PKH, Tenaga Non ASN, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) , WRSE	200.00	2.110.097.264,00	Dinas Sosial
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten (%)	100	705.696.150,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.285.493.400,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dasar korban bencana sosial (%)	85	290.833.750,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		85	178.810.623,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100.00	151.717.250,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Korban bencana	100.00	36.182.961,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50.00	11.484.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Korban bencana	50.00	6.593.441,00	Dinas Sosial



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1.00	89.864.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Anggota TAGANA	1.00	118.865.397,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4	19.177.500,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Tagana dan Pelajar Sekolah	4	9.075.424,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15.00	18.591.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Anggota Tagana	15	8.093.400,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kesiapsiagaan Bencana (%)	80	414.862.400,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		80	2.106.682.777,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	36.00	106.304.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kalurahan, Tagana dan anggota KSB	36	367.020.729,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	137.00	308.558.400,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Anggota Tagana, Non Anggota TAGANA, Tagana, Tim petugas logistik dan koordinator kapanewon	137.00	1.739.662.048,00	Dinas Sosial
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial (%)	80	335.336.783,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.017.437.795,00	Dinas Sosial
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen (%)	100	335.336.783,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		100	1.017.437.795,00	Dinas Sosial
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.00	51.652.155,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Gedung TMP Kusuma Bangsa Bantul	1	19.385.531,00	Dinas Sosial



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1.00	223.734.628,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Taman makam pahlawan, Taman makam Pahlawan , Tenaga Non ASN	1	962.834.838,00	Dinas Sosial
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	12.00	59.950.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Siswa - siswi SMP se Kabupaten Bantul	12	35.217.426,00	Dinas Sosial



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			309.380.108.936,00							2.108.148.860.935,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			29.045.799.049,00							248.043.835.141,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	82	10.875.474.039,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			29.258.014.957,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat daerah (Persentase)	100	177.666.930,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	153.067.522,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.00	72.666.930,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	kinerja pegawai, Tenaga NON ASN	2	141.491.272,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.00	105.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	kinerja pegawai, laporan Kinerja	3	11.576.250,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (Persentase)	100	8.337.856.480,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	16.523.838.114,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	728.00	8.100.005.210,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	ASN	728	16.264.137.634,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12.00	143.101.750,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pengelola Keuangan	12	133.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12.00	94.749.520,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Realisasi Keuangan, Tenaga NON ASN	12	126.700.480,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (Persentase)	100	1.131.269.827,00	(kab bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	8.944.128.964,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	17.00	15.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	sarpras	17	16.177.809,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25.00	162.598.260,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	sarpras kantor, Sarpras Pendukung kegiatan, Sarpras Pendukung Kegiatan, Tenaga NON ASN	25	1.255.597.120,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20.00	38.440.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	sarpras kantor	20	39.954.269,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30.00	27.237.567,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	pendukung kegiatan	30	36.367.498,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.00	3.900.000,00	(Kab bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Bahan Bacaan	2	3.600.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	65.00	876.444.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	ASN, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah, Konsumsi Hari jadi Kab. Bantul, Makan Minum Jamuan Tamu, Pendukung kegiatan, Pendukung perjalanan dinas	48	7.584.782.268,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12.00	7.650.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	SPBE	12	7.650.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian pengadaan barang milik daerah (Persentase)	100	174.750.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	2.251.025.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21.00	174.750.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	sarpras kantor, Sarpras Kantor	6	2.251.025.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja penyediaan jasa penunjang (Persentase)	100	352.952.316,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	605.087.184,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL	DAERAH					
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	96.000.000,00	(kab. bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Penyediaan listrik dan telpon kantor	12	96.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	256.952.316,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Tenaga Kemanan Non ASN, tenaga non asn	12	509.087.184,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan BMD (Persentase)	100	700.978.486,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kendaraan Dinas	100	780.868.173,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28.00	354.558.486,00	(Kaba. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		20	430.868.173,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	88.00	41.420.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		sarpras kantor	30	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.00	305.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		Gedung Dinas , Gedung Kantor, Sarpras Kantor	3	300.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	20.5	3.065.692.550,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			12.118.500.000,00
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	20.5									Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster (Persentase)	83	1.867.434.100,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		84	10.560.000.000,00	UPTD BLK	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	420.00	1.867.434.100,00	(Kab bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pencari kerja, penganggur, Setengah penganggur dan warga miskin, penganggur, setengah penganggur, dan warga miskin, Penganggur, setengah penganggur dan wraga miskin, tenaga kerja tembakau atau keluarganya	480.00	10.560.000.000,00	UPTD BLK
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi (Persentase)	49.5	688.372.930,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		50.5	895.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	5.00	688.372.930,00	(kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	pengangguran, setengah Penganggur dan warga miskin	5.00	895.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan (Persentase)	73	63.810.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		73	60.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	4.00	63.810.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	LPK	3	60.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang menerapkan Program Peningkatan Produktivitas (Persentase)	1.4	79.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		2.9	163.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	10.00	79.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Perusahaan, IKM, UKM	5	163.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Persentase)	30	367.075.520,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		30	440.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	7.00	367.075.520,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	IKM	5	440.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten (%)	58	13.795.930.360,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		200.896.633.934,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota (Orang)	3550	13.305.121.520,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		3700	199.198.409.356,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2500	282.350.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	BKK SMK, HRD Perusahaan, Pencari kerja, penganggur, setengah penganggur, Tenaga Kerja	2500	142.966.690,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	1900	320.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	angkatan kerja, penganggur dan setengah penganggur, Siswa kelas 3 SMK	760.00	99.555.750,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	40	100.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Tenaga kerja disabilitas	60.00	172.355.892,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	3324	12.602.771.520,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	penganggur, setengah penganggur dan warga miskin	1900.00	198.783.531.024,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja (Orang)	4080	444.383.840,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		5000	1.643.225.814,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Teraftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	3200	249.583.840,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Data BKK, Pencaker, penganggur dan setengah penganggur, Tenaga NON ASN	3400	1.369.354.845,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	500	194.800.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	penganggur dan setengah penganggur, warga miskin	200.00	273.870.969,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CPMI, PMI dan PMI purna yang mendapatkan fasilitasai penempatan , pelatihan dan pemberdayaan (Persentase)	52	46.425.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		54	54.998.764,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	40.00	46.425.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	PMI Purna	40	54.998.764,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	37	1.308.702.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.770.686.250,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan sarana hubungan industrial (Persentase)	55	599.677.100,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		56	2.751.193.750,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	150.00	118.495.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	perusahaan, Perusahaan	200	1.423.687.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	5.00	104.499.600,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Perusahaan, Tenaga NON ASN	5	189.643.750,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	6.00	376.682.500,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pekerja , perusahaan, Perusahaan, tenaga kerja	6	1.137.862.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih yang terfasilitasi (Persentase)	85	709.025.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		90	3.019.492.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	20.00	190.625.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dewan Pengupahan Kabupaten, Pengusaha, Perusahaan, Perusahaan dan pekerja	20	1.295.437.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	25.00	99.050.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	AMHI, perusahaan, Perusahaan, Perusahaan dan pekerja, Perusahaan dan tenaga kerja	20	972.405.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	100.00	354.600.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Perusahaan, Perusahaan dan tenaga kerja	100	467.184.375,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1.00	64.750.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	dewan pengupahan, Perusahaan, Perusahaan dan tenaga kerja	1	284.465.625,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.402.176.411,00							7.709.220.188,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	69	466.881.109,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			895.798.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah (Perangkat Daerah)	45	83.000.000,00	(Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		45	495.640.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	45	83.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Perangkat Daerah dan Kapanewon Kabupaten Bantul	45	495.640.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat (%)	75	265.881.109,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		80	200.158.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Organisasi)	50	265.881.109,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Kelompok Desa Prima, Organisasi Masyarakat	52	200.158.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan (%)	69	118.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		72	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	15	49.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	17	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	50	63.162.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	55	90.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	5.837.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Perempuan Kabupaten Bantul	1	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk)	0,00031	574.348.652,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			2.026.422.188,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Lembaga)	50	40.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		50	111.138.188,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	40.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan, LSM, Masyarakat Kabupaten Bantul	1	111.138.188,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan (Lembaga)	9	430.348.652,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		10	1.894.034.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)	130	290.719.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten Bantul yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	140	823.800.584,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	6	139.629.652,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan, Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten Bantul, UPTD PPA	6	1.070.233.416,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPO (Lembaga)	50	104.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		50	21.250.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	104.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan, LSM, Masyarakat Kabupaten Bantul	1	21.250.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga (%)	9	80.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			588.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan analisis dan data gender dan anak (Dokumen)	1	80.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		1	588.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	80.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul, SKPD Kabupaten Bantul	1	588.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
4.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Desa Layak Anak (Desa/Kelurahan)	45	405.840.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			1.707.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak (%)	15	110.608.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Lembaga Mitra P3A	17	565.283.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi)	35	110.608.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		50	565.283.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak (Lembaga)	50	295.231.750,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		Forum Anak Kabupaten Bantul, Kalurahan Dlingo dan Kalurahan Triharjo	55	1.141.717.000,00
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	176.060.750,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	1		880.717.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	70.450.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	1		126.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	48.721.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	135.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
5.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten (%)	100	875.106.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			2.492.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak (%)	100	300.796.450,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	1.691.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)	160	186.285.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Anak Korban Kekerasan Kabupaten Bantul, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kabupaten Bantul, Rumah Aman	160	753.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Orang)	150	114.511.450,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Anak Korban Kekerasan, Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Kabupaten Bantul, Korban kekerasan, Pendamping KKPA Kabupaten Bantul	160	938.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak (Lembaga)	1	574.309.950,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		1	801.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK (Kegiatan)	10	376.135.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Lembaga Penyedia Layanan AMPK, Masyarakat Kabupaten Bantul	15	164.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Orang)	100	46.025.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas SDM	Satgas PPA Kabupaten Bantul, Tokoh Masyarakat dan Forum Anak Kabupaten Bantul	65.00	135.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	1	152.149.450,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan kualitas SDM	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten Bantul, Masyarakat Kabupaten Bantul	1	502.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1.323.073.840,00							6.259.750.000,00	
1.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan yang Berfungsi dengan Baik (%)	57.14	13.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional (Unit)	3	13.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		3	20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	3	13.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Lumbung Pangan	3	20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras dan Atau Jagung Sesuai Kebutuhan) (%)	153	1.131.323.840,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.616.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya (%)	100	186.323.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	353.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan (Unit)	18	4.750.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Gapoktan	18	12.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	18	5.950.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Gapoktan	18	22.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	12	145.450.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Gapoktan, Lumbung Pangan dan Masyarakat, Pedagang dan Masyarakat , Pedagang Pasar dan Gapoktan	12	189.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	30.173.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Tenaga Harian Lepas	1	130.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) (%)	100	175.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	3.540.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	70	171.400.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat, Pejabat Pengadaan	70	3.500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara (Ton)	155	1.900.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat	155	5.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	155	1.700.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat	155	35.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target konsumsi pangan (poin)	91.8	770.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kelompok Wanita Tani, Pelaku Usaha Pangan, Penyuluh Pertanian Lapangan, , Masyarakat Kabupaten Bantul	92	1.723.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	50.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	4	720.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		4	1.623.750.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan (%)	20	145.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			501.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan (Dokumen)	1	36.530.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat Kabupaten Bantul	1	60.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2	36.530.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		2	60.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan desa rentan rawan pangan (%)	100	108.970.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Desa Mandiri Pangan, Masyarakat Kabupaten Bantul	100	441.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	94.670.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		3	435.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	14.300.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat Kabupaten Bantul	1	6.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman Dikonsumsi (%)	100	32.750.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			122.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)	100	32.750.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	122.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	17.750.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku usaha pangan, Kelompok Wanita Tani, Masyarakat, penyuluh pertanian lapangan, pelaku usaha pangan, PMHP	2.00	36.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	1	15.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Penyuluh pertanian lapangan, Pelaku usaha pangan, Kelompok Wanita Tani, penyuluh pertanian lapangan, pelaku usaha pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian	3.00	86.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			16.540.033.593,00							80.380.083.001,00	
1.	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84	7.510.813.753,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			13.765.104.001,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	38.425.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		100	50.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.00	23.425.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	4.00	30.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.00	15.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	4.00	20.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	6.173.258.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	11.188.974.644,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	588.00	5.926.537.820,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul	588.00	10.448.974.644,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12.00	212.120.180,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Pembayaran Tenaga Honor Keuangan, Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Barang Dan Kepegawaian DPTR Bantul, Penyusunan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	720.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22.00	34.600.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran	22.00	20.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	54.248.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	60.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.10.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7	54.248.840,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	ASN, Pegawai non ASN	7	60.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	100	612.153.415,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	1.493.249.912,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	4.999.720,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Gedung Kantor	6	5.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	175.332.855,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Persediaan Kantor, Sarana dan Prasarana Kantor	3	478.049.912,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	23.420.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Gedung Kantor	3	30.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	31.158.500,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	ASN, Instansi lainnya	4	41.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	1.500.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Pelayanan publik	12	1.200.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	39.323.840,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Pegawai non ASN, tamu front office, tamu kunjungan kerja, Tenaga Non ASN pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	12	128.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48	295.003.500,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	ASN, ASN dan non ASN, Pegawai ASN dan non ASN	48	800.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	41.415.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	ASN	1	10.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	276.809.128,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	653.754.880,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	23.400.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Lingkungan Kantor, Telkom	12	57.600.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	24.750.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Sarana dan Prasarana Kantor	6	40.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	228.659.128,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Gedung Kantor, Media Cetak, Tenaga non ASN, Tenaga Non ASN pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	12	556.154.880,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	355.919.370,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	319.124.565,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	335.923.600,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		17	300.384.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	19.995.770,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		2	18.740.565,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
2.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi (%)	100	4.404.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			10.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	4.404.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pemerintah Desa dan Masyarakat Kabupaten Bantul	100	10.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5	4.404.500,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		5	10.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
3.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Legalitas Penatagunaan Tanah (Tanah Pemda, Tanah SG, Tanah Desa, Tanah Warga yang Dikonsolidasikan) (%)	90	402.197.340,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			20.930.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	402.197.340,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda), Tanah SG, Tanah kalurahan, Tanah warga yang dikonsolidasikan	100	20.930.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	47	268.523.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		46	20.540.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	133.674.340,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		3	390.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
4.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Ketersediaan Bidang Tanah Kalurahan Berdasarkan Hasil Inventarisasi (%) Cakupan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (%)	56 44,74	8.622.618.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		45.674.979.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
													Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (%)	90	6.272.618.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		90	45.152.704.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan) (Desa/Kelurahan)	15		(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Tirirenggo Bantul, KAB. BANTUL)				15		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat (Dokumen)	1.00	6.172.618.000,00	(Kapanewon Kasihan (Kal. Bangunjiwo, Tirtonirmolo, Tamantirto, Ngestiharjo)Kapanewon Sedayu (Kal.Argodadi, Argorejo, Argosari, Argomulyo)Kapanewon Pajangan (Kalurahan Triwidadi, Sendangsari, Guwosari), KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Masyarakat 11 kalurahan, Masyarakat di 11 kalurahan, Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	1.00	44.802.704.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat (Dokumen)	3		(Bantul, KAB. BANTUL)			Tanah Kasultanan	3		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (Dokumen)	1	100.000.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Masyarakat Kabupaten Bantul	1	350.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (%)	100	2.350.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	522.275.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten (Dokumen)	1	100.000.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1	122.275.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa (Berita Acara)	5	2.250.000.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Pemerintah Desa dan Masyarakat di Kabupaten Bantul, Tanah Tutupan yang belum terdaftar di Kabupaten Bantul	5	400.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			44.230.477.626,00							353.136.189.055,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	83,5	19.104.868.126,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			31.047.009.655,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	16.912.500,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		100	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	9.900.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul	3	15.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	7.012.500,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	DLH Bantul	4	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	100	12.298.428.051,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	ASN DLH Bantul	100	10.946.944.575,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	104	12.170.553.051,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		104	10.824.169.575,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	121.500.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		Kab. Bantul	4	116.400.000,00
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22	6.375.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul	22	6.375.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian pengelolaan retribusi daerah (%)	100	6.375.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul	100	6.375.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12	6.375.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		12	6.375.000,00	Dinas Lingkungan Hidup



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor (%)	100	3.400.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	ASN di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	100	3.400.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	3.400.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		2	3.400.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	100	694.650.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	100	1.341.600.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	12.000.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		10	13.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	199.650.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		3	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	23	37.000.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		25	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	120.000.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		10	260.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	6.000.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul	12	6.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4.000.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul	4	4.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	252.600.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul	12	415.200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	3.400.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Arsiparis DLH	4	3.400.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	60.000.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul	1	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	2.422.834.880,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		100	4.742.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	1.710.000.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	DLH Kab. Bantul, Kab. Bantul	12	360.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	51.940.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	DLH dan UPTD DLH	4	42.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	660.894.880,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	DLH, DLH Bantul, Kab. Bantul	12	4.340.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (%)	100	3.662.267.695,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		100	13.981.690.080,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	106.627.500,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kendaraan Dinas DLH Bantul	10	180.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	85	3.190.828.800,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Kendaraan Dinas Operasional Lapangan, Peralatan Operasional TPST Modalan dan ITF Niten, TPST Modalan dan ITF Niten	85	13.564.950.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	41.350.000,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	DLH Bantul	4	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL	DAERAH					
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	323.461.395,00	(DLH Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	DLH UPTD DLH Bantul, RTH/Taman DLH Bantul	3	156.740.080,00	Dinas Lingkungan Hidup	
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	85,71	761.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul	100	170.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (%)	100	358.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			170.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.00	105.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			170.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokuman)	1.00	253.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			0	-	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (%)	100	403.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			100	-	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	403.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul	0.00	-	Dinas Lingkungan Hidup	
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara (%)	80	2.421.478.952,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		100	19.635.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan	
			Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara (%)	80									Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan uji kualitas lingkungan (%)	100	1.982.178.952,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			18.140.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan	
			Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan (%)	70		(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)					75		Dinas Lingkungan Hidup	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Cakupan uji kualitas lingkungan (%) Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	100 4		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL) (Kab. Bantul, KAB. BANTUL)				Bangunan IPAL Piyungan, kab. bantul, Kab. Bantul, Sungai Opak, Tenaga Teknis IPAL Piyungan	100 4		Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	91.925.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul	1	140.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2	318.465.440,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	DLH , Kab Bantul, Kab. Bantul	2	3.000.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	75	25.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		100	120.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1.00	25.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul, Masy. Kab. Bantul	2.00	120.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	40	414.300.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		45	1.375.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	2	414.300.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul, Masyarakat sekitar TPA Piyungan	2	1.375.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan (%) Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan (%)	34 34	6.481.341.113,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			70.761.600.000,00	UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman (%)	100	6.481.341.113,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		100	70.761.600.000,00	UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
								NASIONAL					DAERAH	
	2.11.04.2.01.0001		Persentase RTH Kawasan Perkotaan (%)	16		(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)				Kab. Bantul	17		Dinas Lingkungan Hidup	
			Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)			100			Dinas Lingkungan Hidup		
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1	136.425.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	1		500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup		
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	3.19	5.650.141.113,00	(kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		3.49	64.000.000.000,00	UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	3.19		(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)					3.49		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	170	171.940.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		Kab. Bantul	170	1.161.600.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	3	522.835.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		DLH Bantul, kab. bantul, Kab. Bantul, Masyarakat Kab. Bantul	3	5.100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan Pentaatan Pengelolaan Limbah B3 (%)	34,84	169.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			37.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3 (%)	100	169.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		100	37.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	161.500.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul	1	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	4	7.500.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul	4	7.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ijin Lingkungan (%)	25	109.455.760,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul	100	76.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup (%)	100	109.455.760,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			76.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	12	77.455.760,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			48.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	36.00	21.250.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			16.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	1.00	10.750.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			12.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan dan Institusi Lingkungan Hidup (%)	5	139.873.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Forum Bimtek Adiwiyata, Forum Green Pesantren, Forum Titik Pantau Adipura	23	372.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup (Lembaga)	22	139.873.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			372.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	30.725.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			72.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	50	90.668.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			240.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL	DAERAH					
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	12	18.480.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Forkom LH, Forum JPSM, Saka Kalpataru	13	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional (Penghargaan)	1	43.995.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana				100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (%)	100	43.995.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		100		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophii yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	3	43.995.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Forum Kalpataru, Forum Sekolah Adiwiyata	3	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup (%)	100	53.275.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			45.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Aduan (%)	100	53.275.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		100	45.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	1.00	41.375.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Masyarakat Kab. Bantul	1.00	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	1	11.900.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul	12	15.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani (%)	45,87	14.946.190.175,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana			230.892.079.400,00	UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan
			Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani (%)	45,87									Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang berkurang (%)	21.78	14.946.190.175,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		22.37	230.892.079.400,00	Dinas Lingkungan Hidup



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA (Persentase) Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	43.69 112	 1.261.291.860,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL) (Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	 Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul	44.59 120	 36.300.000.000,00	UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	55.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul	1	180.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	50	4.989.902.675,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	DLH Bantul, ITF Niten, Kab. Bantul, TPST Modalan	50	109.120.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1	80.750.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul	1	65.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	34400	8.494.028.140,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Kab. Bantul, Tenaga Non ASN, Tenaga Non ASN , Tenaga Non ASN UPTD KPP , UPTD Kab. Bantul	35600	85.177.079.400,00	UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	22677.00	65.217.500,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	Masyarakat Kab. Bantul	23490	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			11.540.253.933,00							22.930.385.661,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	83,50	10.147.085.153,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			17.056.217.668,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	151.235.000,00	(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	1.543.555.349,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.00	12.835.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Disdukcapil Kab.Bantul	8	23.718.498,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	7.350.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Disdukcapil Kab.Bantul	1	39.930.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.00	18.742.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Disdukcapil Kab.Bantul	3	92.773.063,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.00	112.307.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Disdukcapil Kab.Bantul	3	1.387.133.788,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	100	7.623.047.410,00	(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Karyawan Disdukcapil Kab.Bantul	100	7.858.329.273,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57	7.085.687.410,00	(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		57	7.467.470.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	523.950.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		12	298.086.210,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	13.410.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		12	92.773.063,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	15.587.500,00	(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Disdukcapil Kab.Bantul, Disdukcapil Kab/Kota se-DIY	100	151.669.588,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	115	8.625.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		115	100.609.600,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	115	6.962.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		115	51.059.988,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	100	1.449.004.983,00	(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Disdukcapil Kab.Bantul	100	3.524.856.292,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.00	11.743.050,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		2	13.251.037,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1.151.100.933,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		5	2.674.779.564,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	15.119.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		1	31.959.772,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		1	9.101.318,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	2.800.000,00	(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		1	3.388.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	50	34.940.000,00	(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		50	98.127.975,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	157.507.000,00	(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Disdukcapil Kab.Bantul	60	518.767.506,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	9.732.000,00	(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Arsip Disdukcapil Bantul	3	9.053.220,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	61.062.500,00	(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Disdukcapil Bantul, Disdukcapil Kab.Bantul	1	166.427.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan (%)	100	147.630.000,00	(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	2.002.289.850,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	26	147.630.000,00	(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transter Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Alat Perekaman KTP-EL, Alat Perekaman KTP-EL , Disdukcapil Bantul, Peralatan Layanan Disdukcapil Kab.Bantul, Peralatan Pelayanan Disdukcapil Kab.Bantul	27	2.002.289.850,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian KinerjaPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	97	408.390.648,00	(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		98	841.623.775,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	10	4.200.000,00	(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Disdukcapil Kab.Bantul	10	36.868.700,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	13.500.000,00	(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Disdukcapil Kab.Bantul	12	66.749.650,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	390.690.648,00	(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Penyediaan Tenaga Penjaga Malam dan Satpam Non ASN, Tenaga Administrasi Non ASN Sekretariat Disdukcapil Kab.Bantul, Tenaga Kebersihan Non ASN, Tenaga Pelayanan Umum Non ASN, Tenaga Sopir Non ASN	12	738.005.425,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD (%)	97	352.189.612,00	(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		98	1.133.893.541,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	184.860.100,00	(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kendaraan Dinas Disdukcapil Bantul, Kendaraan Dinas Disdukcapil Kab.Bantul	21	908.834.751,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	89.910.000,00	(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Peralatan Kantor Disdukcapil Kab.Bantul	40	125.766.190,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	77.419.512,00	(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Gedung Bangunan Disdukcapil Kab.Bantul	1	99.292.600,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (%)	99,83	703.179.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			2.223.982.409,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2	703.179.750,00	(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		2	2.223.982.409,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2	144.586.520,00	(Disdukcapil Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat, Petugas Kalurahan, Tenaga Pelayanan Non ASN	2	468.566.598,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2	231.581.450,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat, Tenaga Pelayanan Non ASN	2	1.082.780.736,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	12	177.499.200,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Tenaga Pelayanan Non ASN	12	212.826.113,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	2	149.512.580,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat, MasyarakatDisdukcapil Kab.Bantul, Tenaga Pelayanan Non ASN Disdukcapil	2	459.808.962,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%)	96,2	312.603.160,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.446.893.394,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (Dokumen)	28.735	296.900.060,00	(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		30.445	1.346.065.224,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	27900	186.203.200,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Disdukcapil Kab.Bantul, Dokumen Pemohon Layanan Pencatatan Sipil, Masyarakat Dokumen Pencatatan Sipil Kab.Bantul, Tenaga Pelayanan Umum Disdukcapil Bantul	28000	940.966.752,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	31000	110.696.860,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat, Tenaga Pelayanan Umum Disdukcapil Kab.Bantul	32000	405.098.472,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Data Nikah,TalakCeraai,Rujuk (NTCR) yang tersinkronisasi (Laporan)	12	15.703.100,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat	12	100.828.170,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	12	15.703.100,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		12	100.828.170,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan (%)	99,7	361.682.770,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.963.795.412,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan (Dokumen)	3	222.929.720,00	(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Lembaga Pengguna, Tenaga Pelayanan Umum Disdukcapil Bantul	3	924.344.187,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	3	74.662.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		3	157.186.893,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	12	148.266.880,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		12	767.157.294,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Publikasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Adminduk melalui 2 Media (Jenis)	2	138.753.050,00	(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Lembaga Pengguna, Lembaga Pengguna dan Masyarakat, Masyarakat	2	1.039.451.225,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2	25.681.300,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		2	402.177.279,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	4	82.036.750,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		4	613.585.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	12	31.035.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		12	23.688.046,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/Masyarakat (%)	100	15.703.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			239.496.778,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan (%)	100	15.703.100,00	(Disdukcapil Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	239.496.778,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1	15.703.100,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Disdukcapil Kab.Bantul, Masyarakat	1	239.496.778,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			17.031.170.097,00							88.502.604.037,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84	8.104.971.517,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			7.576.233.452,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)	100	66.000.000,00	(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	56.000.000,00	(Kompleks Pemda Bantul II Manding, Trirenggo, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul	6	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	19.00	10.000.000,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul	19.00	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (Persentase)	93	5.068.109.370,00	(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		94	3.526.115.533,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30.00	5.068.109.370,00	((Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl.Lingkar Timur Manding Trirenggo B, Trirenggo, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Bantul	30.00	3.526.115.533,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)	87	1.624.611.065,00	(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		55	2.536.926.079,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12.00	694.003.065,00	((Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl.Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul	10.00	466.319.715,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	901.633.000,00	(75 kalurahan/17 kapanewon/ dan DIY, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN dan PHL DPMK Bantul, ASN, PHL, dan mitra DPMK Bantul, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul, Peserta rapat koordinasi , Tamu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul	1	2.055.606.364,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	28.975.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	SPBE DPMK Bantul	1	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persentase)	92	223.300.000,00	(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		93	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.00	-	(Komplek PerkantoranTerpadu Pemda II, Jl.Lingkar Timur MandingTrirenggo Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	DPMK Bantul	2.00	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.00	223.300.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	DPMK Bantul	1.00	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	510.141.952,00	(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	953.191.840,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	50.090.000,00	((Komplek PerkantoranTerpadu Pemda II, Jl.Lingkar Timur MandingTrirenggo Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	460.051.952,00	((Komplek PerkantoranTerpadu Pemda II, Jl.Lingkar Timur MandingTrirenggo Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	DPMK Bantul, Masyarakat , Pengelola Keuangan DPMK, Tenaga PHL DPMK Bantul	1	928.191.840,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	92	612.809.130,00	(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		93	260.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	391.309.130,00	((Komplek PerkantoranTerpadu Pemda II, Jl.Lingkar Timur MandingTrirenggo Bantul, Trirenggo, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kendaraan dinas operasional DPMK Kab Bantul	12	220.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	221.500.000,00	(220.000.000, Trirenggo, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Gedung DPMK Bantul	1	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan (%)	100	154.887.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			560.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kalurahan yang menyelenggarakan Penataan Desa (Desa/Kelurahan)	75	154.887.500,00	(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kalurahan	75	560.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	75.00	154.887.500,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		75.00	560.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan (%)	100	71.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bumdes, Bumdesma	100	135.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa (Persentase)	100	71.500.000,00	(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publiik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	135.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	17.00	71.500.000,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		17	135.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik (%)	100	6.186.661.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	13.380.475.690,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa (Persentase)	100	6.186.661.650,00	(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	13.380.475.690,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	75.00	43.650.000,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kalurahan	75.00	60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	75.00	21.561.000,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kalurahan	75.00	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	75.00	321.089.200,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kalurahan, Tenaga Administrasi, Tim	75.00	600.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	75.00	1.900.000.000,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publiik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Lurah dan Pamong Kalurahan, Pamong Kalurahan	75.00	5.244.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	75.00	33.800.000,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kalurahan	75.00	60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.00	481.072.450,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bumdes/ Bumdesma, Kalurahan, Pengelola Bumdes/ Bumdesma, Tenaga Non ASN	2.00	3.776.475.690,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	1.00	329.688.000,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Lurah	1.00	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	1.00	65.000.000,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pamong Kalurahan	1.00	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasitai Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1.00	46.451.500,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kalurahan	1.00	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	75.00	45.000.000,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPD	75.00	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (Dokumen)	6.00	2.027.749.500,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publiik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kalurahan, Masyarakat, Masyarakat, Kalurahan, Kalurahan, Tokoh Masyarakat, Kader, Pamaskarta	6.00	3.150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	17.00	871.600.000,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tirirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kalurahan	17.00	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan (%)	100	2.513.149.430,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			66.850.894.895,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (Jenis)	5	2.513.149.430,00	(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Tirirenggo Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		5	66.850.894.895,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1.00	760.000.000,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tirirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu, Kalurahan, Karang Taruna, Posyandu, Posyandu, KPM	1.00	44.485.894.895,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	3.00	349.100.000,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tirirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	LPM, Masyarakat, Tokoh Masyarakat	3.00	5.700.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1.00	720.700.000,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tirirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat, Masyarakat, Kader, Pelaku Pasar, Palaku Pasar, Masyarakat, Pasar Desa, Masyarakat, Pelaku Pasar, Masyarakat	1.00	2.880.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1.00	149.400.000,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tirirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat, Penemu TTG, Penemu TTG	1.00	960.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1.00	533.949.430,00	(Komplek Perkantoran Pemda 2 Jln. Lingkar Timur Manding, Tirirenggo, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kader, Kader, Masyarakat, Masyarakat, Kader, Masyarakat, Kader PKK, PKK Kabupaten, PKK Kalurahan, PKK Kapanewon	1.00	12.825.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.143.753.092,00							18.315.133.307,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	83	6.668.055.987,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			8.896.765.757,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	116.594.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	41.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	101.594.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas P3APPKB, Tenaga Non ASN DP3APPKB	7	38.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	15.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB	5	3.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	100	5.566.348.478,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	5.259.117.727,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	5.425.788.478,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Pegawai ASN DP3APPKB	32	5.159.117.727,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	130.560.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Pejabat Pengelola Keuangan DP3APPKB	1	92.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22	10.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB	22	8.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	100	331.419.400,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	1.454.495.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	6.196.600,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas P3APPKB	1.00	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	97.992.800,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Balai KB DP3APPKB, DP3APPKB	14.00	220.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	15.510.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB	3.00	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5.090.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB	2	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2.400.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB	2	4.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	45.100.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB	1	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	155.052.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB, Masyarakat Kabupaten Bantul	1	1.035.495.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1.802.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB	1	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2.275.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB	1	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	235.823.472,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB dan UPTD PPA Kabupaten Bantul	100	290.504.060,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.00	9.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		1.00	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	20.100.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		1	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	206.723.472,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Tenaga Non ASN DP3APPKB	1	200.504.060,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	417.870.637,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	1.851.648.970,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	62.569.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas P3APPKB	2	180.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	90	177.975.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Kendaraan Dinas Operasional DP3APPKB	97	1.360.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	57	7.050.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB	10.00	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	19	170.276.637,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Gedung Kantor dan UPTD PPA DP3APPKB Kabupaten Bantul	19	301.648.970,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)) (Angka)	1,64	67.970.355,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul	12	168.100.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan (Bulan)	12	22.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			43.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	12	22.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			43.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan (%)	100	45.470.355,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Kader Pengolah Data	100	124.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (Dokumen)	3	40.400.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		3	31.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	2.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		DP3APPKB	1	22.500.000,00



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana (Laporan)	1	3.070.355,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB	1	70.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	77,2	1.290.679.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			7.969.490.260,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE (%)	80	252.674.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		80	1.719.102.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	1	7.100.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB	1	460.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	1	4.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Balai Balai Penyuluhan Bangsa Kencana Kabupaten Bantul	1	120.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1	19.190.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Kampung KB Kabupaten Bantul	1	140.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	200.384.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB, Tenaga ASN DP3APPKB	1	589.102.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1.00	2.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB	1.00	342.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	3.00	20.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Pengurus Kampung KB	6.00	67.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB (%)	100	478.973.750,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	5.660.288.660,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	34	385.029.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Genre (GENerasi beREncana) Kabupaten Bantul, Kader IMP, Koordinator PPKBD dan Sub PPKBD, Pasngan Usia Subur Kabupaten Bantul, PPKBD Kabupaten Bantul, Sub PPKBD Kabupaten Bantul	34	5.160.288.660,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	12	93.944.250,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul	12	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB (%)	90	481.781.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		90	290.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12	176.538.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB, Tenaga Non ASN (PLKB)	12	34.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	750	50.225.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Akseptor	800	61.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	1	153.788.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Akseptor KB, Tenaga Non ASN (PLKB)	1	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	1	2.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB	1	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	2.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Praktek Bidan Mandiri (PMB)	1	13.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	17	67.350.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	IMP, KB Lestari, PLKB, UPPKA Kampung KB	17	72.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	50	29.880.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Akseptor	65	65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja (%)	80	77.250.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		80	300.099.100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	25	32.600.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul	35	249.399.100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	47	44.650.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Kampung KB Kabupaten Bantul	47	50.700.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Kelompok Tribina (%)	84,5	117.047.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			1.280.777.290,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R (%)	100	43.075.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	641.870.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	1	43.075.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	GenRe Kabupaten Bantul, Kampung KB Kabupaten Bantul, UPPKA Kabupaten Bantul	1	641.870.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya (%)	100	73.972.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	638.907.290,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Organisasi)	4	19.850.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Kampung KB Kabupaten Bantul	4	127.900.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1	15.572.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Kader IMP Kabupaten Bantul, Sekolah Siaga Kependudukan Kabupaten Bantul	1	315.007.290,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (Laporan)	1	38.550.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DP3APPKB, Forum UPPKA	1	196.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			29.883.997.695,00							215.360.007.911,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	81	7.820.893.745,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Dinas Perhubungan		16.505.977.486,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	95.124.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		100	75.400.000,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.00	17.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	2.00	4.400.000,00



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.00	78.124.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	3.00	71.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	100	6.108.300.642,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		100	13.370.254.706,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	51.00	5.984.740.642,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	PNS Dinas Perhubungan Bantul	51.00	13.255.694.706,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.00	103.560.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Pengguna Anggaran, Bendahara, Pengelola Keuangan, Pembantu Pengurus Barang, PPTK Dinas Perhubungan	3.00	103.560.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.00	20.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	ASN Subag Program dan Keuangan	5.00	11.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)	100	149.278.550,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		100	10.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.00	29.337.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Semua ASN dan Non ASN	5.00	5.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100.00	119.941.050,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Semua ASN dan Non ASN	100.00	5.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	100	411.443.000,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		100	537.282.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.00	9.300.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	8.00	2.662.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00	170.624.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Semua ASN dan Non ASN, Semua ASN dan Non ASN	4.00	229.500.000,00	Dinas Perhubungan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	19.00	16.879.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	19.00	20.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9.00	37.890.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	9.00	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20.00	22.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	20.00	10.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	58.00	106.598.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	58.00	165.120.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.00	15.275.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan	Arsip Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	4.00	5.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12.00	32.375.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	12.00	5.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (%)	100	534.871.648,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan		100	1.351.950.780,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.00	77.704.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	1.00	90.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.00	44.400.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	1.00	82.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.00	40.440.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan	Dinas Perhubungan kabupaten Bantul	3.00	103.467.110,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.00	372.327.648,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan	Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	5.00	1.076.483.670,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD (%)	100	521.875.905,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan		100	1.161.090.000,00	Dinas Perhubungan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20.00	107.225.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	20.00	300.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14.00	306.387.300,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	14.00	801.090.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.00	108.263.605,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten bantul, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	2.00	60.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten (%)	30,43	22.063.103.950,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan			198.854.030.425,00	Dinas Perhubungan
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (Angka)	0,30									Dinas Perhubungan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai (%)	22.46	17.153.671.950,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		26.74	147.517.121.125,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	950.00	14.524.884.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Cermin Tikungan, LPJU di Kabupaten Bantul, Penerangan Jalan Umum, Pengolah Data Perlengkapan Jalan; Surveyor Perlengkapan Jalan; Surveyor Penerangan Kampung Umum, Perlengkapan Jalan dan PKU	950.00	146.311.068.750,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	800.00	2.628.787.950,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Perlengkapan Jalan (LPJU)	800.00	1.206.052.375,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C (%)	45	762.409.000,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		50	3.640.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	4.00	762.409.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Fasilitas Angkutan, Fasilitas Halte, Fasilitas Toilet Terminal, Penyewa Kios Terminal, Perlengkapan Toilet, Terminal, Terminal , Terminal dan Halte, Terminal Imogiri, Terminal Tipe C	4.00	3.640.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor (%)	52.5	945.280.000,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		53.8	1.263.518.300,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	10584.00	104.596.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	wajib uji kendaraan bermotor	11113.00	78.928.300,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	10000.00	396.734.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	wajib uji kendaraan bermotor	10000.00	720.736.500,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.00	17.750.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	wajib uji kendaraan bermotor	2.00	66.550.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan)	1.00	151.100.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	dinas perhubungan kabupaten bantul	1.00	66.550.000,00	Dinas Perhubungan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	10.00	253.800.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	dinas perhubungan kabupaten bantul	10.00	312.785.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	4.00	21.300.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	wajib uji pengujian kendaraan bermotor	4.00	17.968.500,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota (%)	55.17	2.564.768.000,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		58.95	43.478.083.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	4.00	734.208.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Bidang Lalu Lintas, Masyarakat Kabupaten Bantul, Pengelola Parkir Kab Bantul, Pengelola Parkir Kabupaten Bantul, Pengguna Jalan	4.00	3.328.564.800,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.00	133.675.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Bidang Lalu Lintas, Masyarakat Pengguna Jalan Kabupaten Bantul, Pelajar Kabupaten Bantul, Pengelola dan Juru Parkir Kabupaten Bantul, Seluruh Pegawai Non ASN Dinas Perhubungan Kab Bantul	3.00	33.275.000,00	Dinas Perhubungan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	163.00	1.441.722.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Bidang Lalu Lintas, Masyarakat Pengguna APILL, Masyarakat Pengguna APILL, Rambu dan Flashing, Masyarakat Pengguna Flashing, Masyarakat Pengguna Flashing Lamp, Masyarakat Pengguna Road Barrier, Masyarakat Pengguna Sarana dan Prasarana Marka, Masyarakat Pengguna Sarana dan Prasarana Marka , Masyarakat Pengguna Sarana dan Prasarana Pita Penggaduh, Masyarakat Pengguna Sarana dan Prasarana Rambu, Masyarakat Pengguna Sarana dan Prasarana Rambu- Rambu Lalu Lintas, Masyarakat Pengguna Sarana dan Prasarana Zona Selamat Sekolah, Masyarakat Pengguna Traffic Cone, Masyarakat Pengguna Zebra Cross	163.00	36.300.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	3.00	255.163.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Bidang Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Lalu Lintas Kabupaten Bantul, Pengelola Parkir Kabupaten Bantul, Pengguna Jalan	3.00	3.816.243.200,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi (%)	39.5	431.581.000,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		41.7	1.787.769.600,00	Dinas Perhubungan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.00	431.581.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Angkutan Sungai Dengan Tujuan Tertentu, Angkutan Umum, Angkutan Umum Publik, Awak Angkutan Umum, Kendaraan Sebagai Wahana Wisata, Pengguna Angkutan Bus Anak Sekolah, Pengguna Angkutan Umum, Pengumpulan Data Angkutan , Pengunjung Sungai Wisata Opak, Penumpang Angkutan Lebaran H- dan H+, Terminal Parangtritis	3.00	1.787.769.600,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan umum orang dalam trayek yang beroperasi di Kabupaten Bantul (%)	56.5	195.394.000,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		56.5	1.123.881.600,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.00	195.394.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Angkutan Bus Anak Sekolah, Kendaraan Bermotor Sebagai Wahana Wisata, Masyarakat Kabupaten Bantul, Operator Angkutan Umum, Pengumpul Data Angkutan	2.00	1.123.881.600,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek (Angka)	0.28	10.000.000,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		0.28	43.656.800,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit)	1.00	10.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	Penyewa Kios Terminal	1.00	43.656.800,00	Dinas Perhubungan
2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			22.900.496.159,00							58.968.766.759,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	89	8.796.658.309,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			15.683.041.753,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	94.845.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	751.943.346,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12.00	31.900.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Perangkat Daerah Kab. Bantul	2.00	60.221.700,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.00	62.945.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kounikasi dan Informatika	7.00	691.721.646,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	100	7.163.241.250,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	11.963.846.608,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	47	6.993.921.250,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika	47	11.838.646.608,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	154.020.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	115.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	15.300.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	18	10.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	10.200.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	10.200.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	100	5.100.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	4.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12.00	5.100.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.00	4.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	99.955.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	283.208.340,00	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12.00	99.955.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Fungsional Prakom kab Bantul, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informstika	12.00	283.208.340,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	100	534.946.490,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	1.058.532.928,00	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	12.530.760,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	13	13.587.308,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.00	57.500.000,00	(Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.00	247.090.266,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7	23.539.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	46.101.332,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	33	66.978.604,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	33	162.088.222,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	29.705.693,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	96.112.714,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	5.400.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	6.457.334,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	20.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	9.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	289.442.433,00	(Seluruh Indonesia, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	372.195.752,00	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	10.200.000,00	(Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	5.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12.00	19.650.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.00	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	338.399.564,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	593.582.272,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	15.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	68.313.218,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	36.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	54.800.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.00	107.430.728,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	232.599.564,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan informatika	12.00	381.838.326,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	549.971.005,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	1.022.928.259,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17.00	320.031.005,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.00	419.741.400,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	186.00	128.190.000,00	(Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	186.00	503.470.290,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	101.750.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	99.716.569,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten (%)	72	2.900.265.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			20.811.522.135,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan (%)	100	2.900.265.850,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	20.811.522.135,00	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)	12.00	554.562.500,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kalurahan, Masyarakat, Netizen	12.00	3.649.343.715,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	12.00	878.525.850,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Generasi Muda, Masyarakat	12.00	12.390.612.705,00	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	87.812.500,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat, PPID, PPID Kalurahan, PPID Pembantu, PPID Perangkat Daerah	12	444.196.218,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	(Dokumen) Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Dokumen)	12	1.379.365.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	admin media sosial, Admin Media sosial, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) , KIM, Masyarakat, Pewarta Bantul	12	4.327.369.497,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE (Angka)	2.9	11.203.572.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		22.474.202.871,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo (%)	100								Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi (%)	100	3.312.865.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kab.Bantul, Kab. Bantul	100	14.983.865.986,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan (Domain)	386	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	401	Dinas Komunikasi dan Informatika							
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	1	3.312.865.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		1	14.983.865.986,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	89	7.890.707.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		95	7.490.336.885,00	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Unit)	1.00	5.356.225.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kab. Bantul	1.00	983.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)	3.00	778.885.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transter Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aplikasi layanan Publik , Aplikasi Layanan Publik	5.00	1.155.687.764,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Layanan)	3.00	350.230.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aplikasi Layanan Publik	5.00	387.932.050,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	286.415.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dewan Smart City Kab. Bantul, Kab. Bantul, Perangkat Daerah Kab. Bantul	1	835.950.423,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	(Dokumen) Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1.00	843.952.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Desa Wisata Kalurahan Pleret , Kab. BantulDestinasi wisata Wukirsari, Kalurahan Wukirsari, Desa Wisata Karangbendo,Banguntapan Bantul, Kab. Bantul, Menara Telekomunikasi kab. Bantul	1.00	3.631.016.648,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dokumen)	1	275.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transter Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kab. Bantul, Perangkat Daerah Kab. Bantul	1	496.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			21.269.994.253,00							675.934.137.363,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	82	19.662.156.243,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			668.685.481.963,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan,penganggaran dan evaluasi (%)	100	33.339.370,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	46.888.954,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	23.139.370,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Penyusunan dokumen perencanaan DKUKMPP	9	37.924.506,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9.00	10.200.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Unsur pelaksana dan pengampu program/kegiatan/sub kegiatan di lingkungan unit kerja	9.00	8.964.448,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	100	15.644.659.055,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	15.778.690.428,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	118.00	15.460.859.055,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	ASN di lingkungan DKUKMPP	148.00	15.589.660.094,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12.00	178.800.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pengelola keuangan, barang dan kepegawaian	12.00	177.360.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	23.00	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Bendahara Bidang, Pelaksana kegiatan dan pengampu program/keg/sub kegiatan serta lurah pasar di lingkungan DKUKMPP	23.00	11.670.334,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	100	40.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	33.200.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	33.00	40.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pengelola pendapatan /retribusi dari pasar di kabupaten bantul, dana bergulir, r	33.00	33.200.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian (%)	100	167.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	ASN DKUKMPP, Karyawan DKUKMPP, Kepegawaian DKUKMPP, Pegawai DKUKMPP	100	413.437.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4.00	167.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		3.00	413.437.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)	100	1.632.848.077,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		Pegawai Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul	100	640.521.689.873,00
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12.00	23.771.215,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	12.00		25.625.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12.00	456.339.362,00	(kabupaten bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	ATK Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian, ATK Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan UsahaMikro, ATK Pemberdayaan dan Kerjasama Industri, ATK Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, ATK Pembinaan dan Pengawasan Berusaha, ATK Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, ATK Pengembangan Usaha Mikro, ATK Pengendalian Barang Pokok dan Penting, ATK Promosi dan Kemitraan, ATK Sarana Prasarana dan Sumberdaya Industri, ATK Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan, ATK untuk Sekretariat, Bahan Komputer Koperasi Sektor Riil, Bahan Komputer Operasional Pasar (33 pasar), Bahan Komputer Pemantauan Bapok, Bahan Komputer Peringatan Hari Koperasi, Bahan Komputer Tinta Toner Sekretariat, Bahan Koputer Sarana Prasarana dan Kerumahtanggaan DKUKMPP, Pasar di Kabupaten Bantul	12	624.909.862.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12.00	140.609.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kerumahtanggaan DKUKMPP, Pasar di Kabupaten Bantul	12.00	117.679.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12.00	87.188.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kerumahtanggaan DKUKMPP	12.00	46.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12.00	1.200.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kerumahtanggaan DKUKMPP	12.00	1.200.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12.00	27.155.000,00	(Kabupaten bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Tamu Dinas KUKMPP	10.00	16.500.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	940.00	850.930.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Narasumber Bimtek Penyusunan Laporan Data Industri semesteran dan pengisian IKI melalui aplikasi SIINas, Narasumber Sosialisasi fasilitasi sertifikasi TKDN IK melalui Aplikasi SIINas, Panitia/Peserta Pelatihan Ecoprint di Sewon**, Pegawai DKUKMPP, Pelaksana Diversifikasi Koperasi Sektor Rili, Pelaksana Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pelaksana Koperasi Award, Pelaksana Pembinaan dan pengawasan berusaha, Pelaksana Pembinaan dan Penguatan Koperasi, Pelaksana Pembubaran Koperasi, Pelaksana Pengawasan Koperasi, Pelaksana Penumbuhan Koperasi, Pelaksana/Peserta Pengawasan dan Pengendalian Izin Industri, Pelaksana/Peserta Promosi dan Kemitraan, Personil Pelayanan Kepada Masyarakat, Personil Arsip DKUKMPP	1350.00	15.366.143.200,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1000.00	32.355.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1000.00	11.480.173,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	15.00	13.300.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Peserta Rapat Koordinasi PPID, Tim PPID	15.00	27.200.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	1.347.591.353,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	kerumahtanggaan DKUKMPP, Kerumahtanggaan DKUKMPP, Kesekretariatan DKUKMPP, Masyarakat Umum	100	5.158.771.448,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	56.100.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		12.00	242.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	65.000.000,00	(Kabupaten bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		12.00	124.582.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	276.00	1.226.491.353,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		263.00	4.792.188.948,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	796.218.388,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	kendaraan perorangan dinas/dinas jabatan, Kendaraan perorangan dinas/jabatan di lingk dkukmpp, Operasional kendaraan perorangan dinas/kendaraaan jabatan	100	6.732.803.760,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	49.00	369.999.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		41.00	1.520.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.00	143.025.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		8.00	2.838.803.760,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.00	283.193.888,00	(Kabupate4n Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Bangunan Gedung Dekranasda, Bangunan gedung kantor di lingkungan DKUKMPP, Bangunan kantin DKUKMPP, Gedung/bangunan kantor, Gedung Kantor DKUKMPP, Lingkungan Bangunan kantor, Lingkungan Kantor DKUKMPP/Pasar, Ruang dapur kantor DKUKMPP	3.00	2.374.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten (%)	2.5	44.934.840,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			62.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	44.934.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	62.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.00	44.934.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Koperasi di Kabupaten Bantul	2.00	62.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan yang Dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten (%)	75,25	103.892.340,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			500.272.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi (%)	98	103.892.340,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		98	500.272.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	225.00	103.892.340,00	(Kabupaten bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Koperasi kabupaten Bantul, Masyarakat, Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah	230.00	500.272.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten (%)	65,48	49.996.340,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Koperasi Kabupaten Bantul	96	52.500.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	96	49.996.340,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			52.500.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	220.00	49.996.340,00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	52.500.000,00
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten (%)	60	146.154.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	SDM Bidang Koperasi, SDM Koperasi, Siswa SMP dan SMA, SMA/SMK se-Kabupaten Bantul	100	749.300.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota (%)	100	146.154.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			749.300.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	100.00	146.154.500,00		(Kabupaen bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	749.300.000,00
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi dalam Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Standarisasi, dan Kemitraan (%)	5	267.777.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.779.070.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi, dan kemitraan (%)	100	267.777.400,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat yang belum menjadi anggota koperasi	100	1.779.070.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	60.00	17.490.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		60.00	22.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	195.00	250.287.400,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		Koperasi di Kabupaten Bantul, Koperasi yang berminat melakukan pengembangan usaha, Koperasi yang berminat mengembangkan manajemen usaha, Koperasi yang masih relatif baru di Kabupaten Bantul, Koperasi yang sudah melakukan pengembangan usaha, Tenaga Non ASN	153.00	1.757.070.000,00
7.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Berizin (%)	60	587.003.170,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	UMKM Se Kabupaten Bantul		1.877.543.900,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan usaha mikro yang diberdayakan (%)	100	587.003.170,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	1.877.543.900,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	25.00	71.185.000,00	(Kabupaten bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		30.00	84.820.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	50.00	25.837.500,00	(Kabupaten bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	UMKM Se Bantul, UMKM Se Kabupaten Bantul	50.00	124.403.400,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	125.00	208.440.250,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Difabel Kabupaten Bantul, Pelaku UMKM Yang Terdampak Tempat Pembuangan Akhir , UMKM Se Kabupaten Bantul	80.00	808.054.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	35.00	18.741.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	UMKM Se Bantul	35.00	58.746.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	35.00	240.451.920,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Tenaga NON ASN , Tim Admin SIDAKUI , UMKM Se Kabupaten Bantul, UMKM Se Kabupaten Bantul	35.00	741.520.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	20.00	22.347.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	UMKM Se Kabupaten Bantul	32.00	60.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	70	408.079.420,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.227.969.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Cakupan usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan usaha (%)	100	408.079.420,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	2.227.969.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	350.00	285.216.920,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Tenaga Non ASN, UMKM se Kabpaten Bantul, UMKM se Kabupaten Bantul, UMKM Se Kabupaten Bantul	350	1.904.381.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	115.00	122.862.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	UMKM Kalurahan Pendowoharjo, UMKM se Kabupaten Bantul, UMKM Se Kabupaten Bantul	115	323.587.500,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			7.194.507.781,00							31.579.283.266,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	85	6.257.663.101,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			26.500.340.766,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (%)	100	13.100.000,00	(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	139.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6.000.000,00	(Semua wilayah di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN dan Non ASN beserta OPD dalam Penyelenggaraan PTSP	6	118.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12.00	4.500.000,00	(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN dan Non ASN beserta OPD Penyelenggara PTSP	12.00	4.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.00	2.600.000,00	(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN dan Non ASN beserta OPD Penyelenggara PTSP	4.00	17.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	100	4.935.915.858,00	(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	10.201.900.256,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	4.845.555.858,00	(Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN OPD	32	10.117.800.256,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	90.360.000,00	(Tirenggo Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pengelola Keuangan	4	84.100.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	13.700.000,00	(Tlirenggo Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	475.200.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	60	13.700.000,00	(Tlirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Internal OPD dan ASN OPD Tim Teknis	300	475.200.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	100	595.188.600,00	(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	5.654.120.600,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.776.100,00	(Tirirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pegawai dan Pengguna Layanan OPD	2	374.385.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	294.532.500,00	(Tirirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pegawai dan Pengguna Layanan OPD	5	1.000.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	22.128.000,00	(Tirirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pegawai dan Pengguna Layanan OPD	2	652.080.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	72.182.000,00	(Tirirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Stakeholder dan Pengguna layanan OPD	5.00	745.422.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6	6.600.000,00	(Tirirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pengguna layanan OPD	6	7.986.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	13.750.000,00	(Tirirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Tamu OPD	12	30.246.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12.00	158.577.500,00	(Luar dan Dalam Wilayah Kabupaten Bantul, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN dan Non ASN beserta Personil OPD Teknis	12	2.760.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.00	9.342.500,00	(Trirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN dan Non ASN OPD	5	42.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.00	7.300.000,00	(Trirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN dan Non ASN OPD, ASN dan Non ASN OPD	7	42.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	309.954.693,00	(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	2.913.759.390,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12.00	2.190.000,00	(Trirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pengelola Penatausahaan Keuangan OPD	12	2.649.900,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	33.600.000,00	(Trirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN dan Non ASN beserta Personil OPD Penyelenggara PTSP, ASN dan Non ASN beserta Personil Penyelenggara PTSP, Pengguna Layanan OPD	12	119.790.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	41.279.693,00	(Trirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN dan Non ASN beserta Personil Penyelenggara PTSP	12	84.700.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	232.885.000,00	(Trirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pegawai Non ASN/Tenaga Administrasi pada Sekretariat OPD, Pegawai Non ASN /Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan OPD, Pegawai Non ASN/Tenaga Keamanan OPD, Pegawai Non ASN/Tenaga Kebersihan OPD, Pejabat Pengadaan	12	2.706.619.490,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	311.678.950,00	(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	6.515.860.520,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14.00	150.654.300,00	(Trirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pengguna layanan dan penyelenggara PTSP, Pengguna layanan dan Penyelenggara PTSP, Pengguna Layanan dan Penyelenggara PTSP	14.00	2.400.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	122.00	23.730.000,00	(Trirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pengguna layanan dan penyelenggara PTSP	122.00	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	137.294.650,00	(Tlirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pengguna layanan dan penyelenggara PTSP, Pengguna layanan dan Penyelenggara PTSP, Pengguna Layanan OPD	1.00	3.615.860.520,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (%)	100	78.125.000,00	(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	600.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.18.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	12.00	78.125.000,00	(Tlirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pegawai DPMPSTP , Steakholder Terkait	12.00	600.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Capaian Kinerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	100	112.779.250,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			596.530.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota (Dokumen)	1	51.666.750,00	(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	468.270.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	39.816.750,00	(Tlirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	ASN dan Non ASN Internal OPD, Pelaku Usaha, Pelaku Usaha dan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	418.660.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	1	11.850.000,00	(Tlirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Usaha	1	49.610.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi (Peta)	2	61.112.500,00	(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Stakeholder	2	128.260.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	47.562.500,00	(Semua Wilayah di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	67.155.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	13.550.000,00	(Semua Wilayah di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	61.105.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota (%)	12,79	312.116.180,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.370.067.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah (%)	100	312.116.180,00	(Luar DIY, Luar Wilayah)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Stakeholder, Tenaga Operator Komputer Non ASN	100	1.370.067.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	268.916.180,00	(Luar DIY, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		2	1.186.752.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2	43.200.000,00	(Semua Wilayah di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Stakeholder	2	183.315.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pelayanan Perizinan dan Informasi (%)	100	256.196.940,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.209.879.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal (Dokumen)	3.000	256.196.940,00	(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		3.000	1.209.879.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	6.000.000,00	(Tirirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Stakeholder	4	33.880.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1700.00	138.228.400,00	(Semua wilayah, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Non ASN, Stakeholder	1800	228.690.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	850	24.275.000,00	(Semua Wilayah di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Stakeholder Terkait	900	866.481.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2000	87.693.540,00	(Semua Kecamatan di Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Non ASN, Stakeholder	2100	80.828.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	100	73.141.130,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.082.570.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (Perusahaan)	8	73.141.130,00	(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		8	1.082.570.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	8	10.412.500,00	(Semua Wilayah di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Usaha	8	432.337.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	238	19.304.750,00	(Ttirenggo Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Usaha, Stakeholder terkait	240	440.181.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	28	43.423.880,00	(Semua Wilayah di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Jasa Tenaga Operator Non ASN, Stakeholder, Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30	210.052.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Aplikasi Sim dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan (%)	100	182.611.180,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			819.896.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota (Jenis)	2	182.611.180,00	(Semua Kecamatan di Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		2	819.896.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2	182.611.180,00	(Ttirenggo, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Steakholder Terkait, Tenaga Non ASN Kearsipan, Tenaga Pelayanan	2	819.896.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			13.961.005.569,00							36.892.781.292,00	
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	82	1.384.739.560,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			8.719.963.760,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Ekonomi Mandiri (Persentase)	81	1.184.739.560,00	(KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		82	8.429.547.936,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	34.00	735.019.200,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemuda Kabupaten Bantul	250	600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	<i>Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan (Orang)</i>	150.00	449.720.360,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	<i>Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemuda dan Pelajar Kabupaten Bantul, Pemuda/Pemudi Kabupaten Bantul, Pemuda/Pemudi Kalurahan , Santri dan Santriwan di Kabupaten Bantul, Santri dan Santriwan Muda di Kabupaten Bantul</i>	250	7.829.547.936,00	<i>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</i>
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya Organisasi Kepemudaan yang aktif (Organisasi)</i>	20	200.000.000,00	(KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		21	290.415.824,00	<i>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</i>
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)</i>	1.00	200.000.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	<i>Pemuda Bantul</i>	1.00	290.415.824,00	<i>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</i>
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	<i>Jumlah Prestasi Olahraga (Medali)</i>	80	12.276.266.009,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			27.529.806.812,00	<i>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</i>
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kegiatan Olahraga yang terlaksana (Kegiatan)</i>	10	186.216.880,00	(KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		11	1.706.106.724,00	<i>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</i>
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)</i>	2.00	186.216.880,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	<i>Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Bantul, Stadion Sultan Agung dan Stadion Dwi Windu</i>	1	1.706.106.724,00	<i>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</i>
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Capaian Prestasi Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Medali)</i>	65	2.001.276.880,00	(KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		66	13.544.464.320,00	<i>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</i>



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan (Orang)	200.00	2.001.276.880,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Atlet PEPARPEDA yang meraih medali, Atlet Peraih Medali di POPDA, Pelajar Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul, Siswa/Siswi Penyandang Disabilitas Kabupaten Bantul	1000	13.544.464.320,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Organisasi Keolahragaan yang aktif (Cabang Olahraga (Cabor))	49	9.964.050.729,00	(KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Organisasi Olahraga, Pegawai Non ASN	50	11.106.871.208,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Organisasi)	2.00	9.964.050.729,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM		2.00	11.106.871.208,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Capaian Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga (%)	40	124.721.520,00	(KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Pemerintah Kabupaten Bantul, Warga Kabupaten Bantul	41	1.172.364.560,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen)	1.00	124.721.520,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM		1	1.172.364.560,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang Aktif (Organisasi)	18	300.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			643.010.720,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang aktif (Organisasi)	18	300.000.000,00	(KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM		19	643.010.720,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	1.00	300.000.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Organisasi Kepramukaan di Bantul	1	643.010.720,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			400.387.500,00							959.125.004,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	100	400.387.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			959.125.004,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang dapat berbagi pakai (%)	97	400.387.500,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		98	959.125.004,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)	2	290.675.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kab. Bantul, Masyarakat , Perangkat Daerah kab. Bantul	2	752.390.628,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)	190	109.712.500,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kab. Bantul	210	206.734.376,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			1.568.450.360,00							6.886.752.886,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	75	1.568.450.360,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			6.886.752.886,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal (%)	100	980.552.440,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	5.046.703.206,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	45	980.552.440,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aset Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul, Pengelola Pusat Data dan Keamanan Informasi , Perangkat Daerah, Pusat Data Pemerintah, Seluruh Masyarakat Kabupaten Bantul	45	5.046.703.206,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (%)	72	587.897.920,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		84	1.840.049.680,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)	45	587.897.920,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Jaringan Telekomunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Kab. Bantul, Masyarakat, Perangkat Daerah	45	1.840.049.680,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			73.948.778.747,00							243.607.946.704,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	81,30	6.397.236.475,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM			5.927.608.184,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	80.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM		100	55.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10.00	14.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Perencanaan Dinas Kebudayaan	10.00	15.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	22.00	66.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Desa/Kalurahan berpredikat Desa Budaya, Desa Prima, Desa Preneur dan Desa Wisata, Dinas Kebudayaan	22.00	40.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	95	4.979.883.621,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		95	4.319.861.944,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35.00	4.844.683.621,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		40.00	4.182.361.944,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	118.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		12	119.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	21	17.200.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		21	18.500.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	1.600.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	DinasKebudayaan	100	4.400.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	1.600.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		12	4.400.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	25.750.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	100	24.200.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	25.750.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM		2	24.200.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	183.209.464,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	100	256.500.240,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.992.450,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM		1	3.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	15.923.820,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	2	20.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	14.998.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	2	15.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	17.133.694,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	2	13.650.240,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	3.400.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	2	3.500.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	10	16.250.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	10	11.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	109.211.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	190	190.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	3.300.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	1	350.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	129.300.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM		100	90.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	88.400.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan Bantul	1	90.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.00	40.900.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	0.00	-	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	769.234.368,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM		100	903.600.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	14.600.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	12	14.900.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	23.690.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	4	22.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14.00	730.944.368,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	14.00	866.700.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95	228.259.022,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM		95	274.046.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	171.585.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	7	212.626.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	3.475.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	30	2.420.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	4.910.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	2	6.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	10.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	2	3.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	38.289.022,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	2	50.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
2.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya (%)	90	67.551.542.272,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan		237.680.338.520,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)	100								Kapanewon Kretek	
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (Persentase)	100								Kapanewon Bantul	
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)	100								Kapanewon Pandak	
			Cakupan Pembinaan Kelembagaan adat dan tradisi (%)	100								Kapanewon Imogiri	
			Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi (Persentase)	100								Kapanewon Dlingo	
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (Persentase)	100								Kapanewon Piyungan	
			Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Budaya Berbasis Digital (%)	71.43								Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan (%)	48								Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Capaian Desa Prima (%)	40								Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
			Persentase Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi (%)	48								Dinas Kesehatan	
			Capaian Rintisan Desa Preneur (%)	13.33								Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			Capaian Lembaga Pendidikan Berbasis Budaya (%)	4,78								Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
			Bahasa Sastra yang Dilestarikan (*)	76								Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
			Kalurahan Bahari yang Direvitalisasi (%)	60								Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Cakupan Desa Wisata (%)	36								Dinas Pariwisata	
			Cakupan Lokasi yang di Prakondisi (%)	25								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (Persentase)	100									Kapanewon Pundong
			Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage) (%)	50									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)	100									Kapanewon Banguntapan
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan seni (Persentase)	100									Kapanewon Sewon
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)	100									Kapanewon Sedayu
			Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi (Persentase)	100									Kapanewon Sanden
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)	100									Kapanewon Pajangan
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)	100									Kapanewon Pleret
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)	100									Kapanewon Kasihan
			Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi (%)	100									Kapanewon Jetis
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)	100									Kapanewon Bambanglipuro
			Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)	75,74									Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga (%)	66,88									Satuan Polisi Pamong Praja
			Capaian Pemasaran pada Desa Preneur (%)	40									Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)	100									Kapanewon Srandakan
			Seni, Adat Tradisi yang Dilestarikan (*)	691									Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)	100									Kapanewon Srandakan
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa (Jenis)	11	6.960.303.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM		11	33.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan (Dokumen)	9.00	2.655.565.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	Pelajar,Guru, Komunitas pecinta sejarah, Sejarawan, Seniman, Budayawan, Pelaku Wisata, Masyarakat umum, ASN., Pelajar, Guru, Komunitas pecinta sejarah, Sejarawan, Seniman, Budayawan, Pelaku Wisata, Masyarakat Umum, ASN., Pelajar, Guru, Komunitas pecinta sejarah, Sejarawan, Seniman, Budayawan, Pelaku Wisata, Masyarakat Umum, ASN.	9	9.900.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra (Laporan)	7	2.607.320.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	Pelajar, guru, sastrawan dan masyarakat di Kabupaten Bantul	42	16.200.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola (Unit)	15	1.697.418.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Komunitas Museum, Instansi ASITA, HPI, Pelaku Wisata, Instansi Pemerintah, Guru, Pelajar, Pecinta dan Pemerhati Museum, Seniman, Budayawan, Masyarakat, Komunitas Museum, Instansi ASITA, HPI, Pelaku Wisata, Instansi Pemerintah, Guru, Pelajar , Pecinta dan Pemerhati Museum, Seniman, Budayawan	15	7.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan (Objek)	22	2.857.253.400,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM		22	47.542.250.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Capaian luasan yang terkonsevasi di dalam zona inti (%)	50		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					70		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola (Objek)	20	1.640.286.100,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	Objek Warisan Budaya / Cagar Budaya, Masyarakat Pengelola Warisan Budaya Cagar Budaya, Pelajar di Kabupaten Bantul	20	37.307.250.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
								NASIONAL	DAERAH						
	2.22.08.5.02.0002		Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola (Objek)	2		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Perangkat daerah dan masyarakat, Perangkat Daerah dan masvarakat Objek Warisan Budaya Tak Benda, Masyarakat Pelaku dan Pelestari Warisan Budaya Tak Benda, Pelajar di Kabupaten Bantul	2		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan (Objek)	8	1.006.965.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM		8	10.000.000.000,00		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
		2.22.08.5.02.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi (Objek)	2	210.002.300,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Peningkatan kualitas SDM	2		235.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya (%)	100	35.000.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana		Kelompok budaya, masyarakat	100	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan (Objek)	1	35.000.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	1	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pemenuhan Sarana Prasarana (Jenis)	1	2.710.940.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			Peningkatan kualitas SDM	1	15.832.564.500,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Capaian kinerja pembangunan sistem informasi (%)	100		(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)				100		Dinas Komunikasi dan Informatika			



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL	DAERAH					
	2.22.08.5.04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun (Objek)	3	1.025.250.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kawasan SRS Kab.Bantul, Kawasan SRS Kab. Bantul, Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede, Padukuhan Kab. Bantul	5	14.232.564.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.22.08.5.04.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya (Unit)	5	1.685.690.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	Rintisan Desa Budaya	5	1.600.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan (%)	100	3.908.415.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas SDM		100	13.265.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan (Persentase)	40	(Desa Maritim, KAB. BANTUL)	80					Dinas Kelautan dan Perikanan			
			Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata (Persentase)	100	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	100					Dinas Pariwisata			
			Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional (Persentase)	100	(Dinas Kesehatan Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	100					Dinas Kesehatan			
	2.22.08.5.06.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman (Laporan)	2	300.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kelompok Wanita Tani	2	2.340.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.22.08.5.06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.00	1.450.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, Pejabat Pengadaan Barang Jasa, Terlaksananya kegiatan Festival Segoro Kidul, Terlaksannya kegiatan Festival Segoro Kidul, Terselenggaranya kegiatan Festival Segoro Kidul	2.00	10.675.000.000,00	Dinas Pariwisata	
	2.22.08.5.06.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional (Unit)	13	1.572.200.000,00		Dana Keistimewaan DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Saino	Peningkatan kualitas SDM	masyarakat, puskesmas	0.00	-	Dinas Kesehatan	
	2.22.08.5.06.0005	Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan (Objek)	2	586.215.000,00	(Desa Maritim, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat Desa Maritim	2	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Presentase Adat dan Tradisi yang dilaksanakan (%)	100	15.914.630.372,00	(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilikada		100	115.550.524.020,00	Kapanewon Srandakan
				Lokasi yang diprakondisi (%)	25	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	33					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Persentase kegiatan ada tradisi yang dilaksanakan (%)	100		(Kapanewon Pundong, Pundong)					100		Kapanewon Pundong
			Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)	100		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)					100		Kapanewon Banguntapan
			Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)	100		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Pleret
			Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)	100		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)					100		Kapanewon Pajangan
			Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (Persentase)	100		(Kapanewon Sanden, Sanden)					100		Kapanewon Sanden
			Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)	100		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)					100		Kapanewon Sedayu
			Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan (Desa)	4		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					4		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Pendampingan Desa/kalurahan Preanur (Desa/Kelurahan)	7		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					4		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya (Kali)	234		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					234		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
								NASIONAL	DAERAH											
			Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)	100		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				100		Kapanewon Piyungan								
			Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (Persentase)	100		(Kapanewon Dlingo, KAB. BANTUL)				100		Kapanewon Dlingo								
			Presentase Kegiatan Adat dan Tradisi yang dilaksanakan (%)	100		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				100		Kapanewon Imogiri								
			Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)	100		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				100		Kapanewon Pandak								
			Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)	100		(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)				100		Kapanewon Bantul								
			Prosentase adat seni dan tradisi yang dilaksanakan (%)	100		(Kapanewon Kretek, Kretek)				100		Kapanewon Kretek								
			Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)	100		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				100		Kapanewon Bambanglipuro								
			Persentase Kegiatan Adat dan Tradisi yang Dilaksanakan (%)	100		(Kapanewon Jetis, Jetis)				100		Kapanewon Jetis								
			Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)	100		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				100		Kapanewon Kasihan								
			persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan (%)	100		(Kapanewon Sewon, Sewon)				100		Kapanewon Sewon								
			Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan (%)	66.88		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				100		Satuan Polisi Pamong Praja								
			Presentase Adat dan Tradisi yang dilaksanakan (%)	100		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				100		Kapanewon Srandakan								
			2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya		Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya (Laporan)				5		950.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Masyarakat Umum	5	2.960.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
						Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya (Laporan)				1		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Kelompok Desa Prima Kabupaten Bantul	1		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
			2.22.08.5.07.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni		Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina (Lembaga)				12		1.487.668.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan, Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Umum, Masyarakat Umum	12	9.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2.22.08.5.07.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya (Laporan)	9	1.250.000.000,00	(Luar Wilayah)	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Umum	9	2.791.120.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)								
2.22.08.5.07.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan (Orang)	15	300.400.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	Pelestari Adat Tradisi, Pelestari Cagar Budaya se Kabupaten Bantul, Seniman Budayawan Kabupaten Bantul	15	1.050.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)								
2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta (Laporan)	9	500.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat umum, Masyarakat Umum dan Pelaku seni kabupaten Bantul, Masyarakat Umum dan Pelaku Seni kabupaten Bantul	9	1.800.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)								



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1.00	4.600.000.000,00	(Kapanewon Sanden, Sanden)	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Kapanewon Sanden, Pelaku UMKM	1.00	35.960.000.000,00	Kapanewon Sanden
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1.00		(kapanawon pundong, Pundong)				masyarakat kapanewon pundong	1.00		Kapanewon Pundong
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1.00		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				Kalurahan dan masyarakat kapanewon	1.00		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Masyarakat Kapanewon Srandakan	1		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1.00		(Sewon, Sewon)				Masyarakat Kapanewon Sewon	1.00		Kapanewon Sewon
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Masyarakat	1		Kapanewon Kasihan
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1.00		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Masyarakat, pelaku seni budaya, UMKM, Kapanewon, dan Kalurahan	1.00		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1.00		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Masyarakat	1.00		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				Kapanewon, Kalurahan dan Masyarakat	1.00		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1.00		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Masyarakat Kapanewon, Pelaku Seni dan Usaha	1.00		Kapanewon Pandak
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1.00		(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)				Masyarakat Kapanewon Bantul	1.00		Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1.00		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Masyarakat Kapanewon Kretek	1		Kapanewon Kretek



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)							
								NASIONAL	DAERAH										
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1.00		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Anak Sekolah di Wilayah Kapanewon Bambanglipuro, Aparat dan Lintas Sektor Kapanewon Bambanglipuro, Pelaku Seni di Kapanewon Bambanglipuro	1.00		Kapanewon Bambanglipuro						
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1.00		(kapanewon Jetis, Jetis)				Masyarakat Kapanewon Jetis	1.00		Kapanewon Jetis						
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	16		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Kelompok/sanggar Kethoprak se Kabupaten Bantul, Kelompok/ Sanggar Teater se Kabupaten Bantul, Kelompok Sendratari se Kabupaten Bantul, Kelompok Seni Kethoprak se Kabupaten Bantul, Kelompok Teater se Kabupaten Bantul, Masyarakat umum, Masyarakat Umum, Masyarakat Umum , pelaku Seni, , Masyrakat Umum, Kelompok/ Sanggar Jatilan se Kabupaten Bantul	16		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyunqan)				Masayarakat Kapanewon Piyungan	1		Kapanewon Piyungan						
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1.00		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)				Masyarakat	2.00		Kapanewon Pleret						
		2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah (Dokumen)		13				300.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kebudayaan, Penyedia Directory Kebudayaan, Masyarakat Umum, Media Cetak, Masyarakat Umum, Mitra Kerja	15	1.470.150.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
				2.22.08.5.07.0008		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi				Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina (Orang)	13		107.030.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Umum, Penghayat Kepercayaan	15
		2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat							Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat (Laporan)	4		386.947.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	Dalang anak dan Remaja se Kabupaten Bantul, Masyarakat umum, Masyarakat Umum, Pelaku seni Wayang Kulit	4
				2.22.08.5.07.0010		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni				Jumlah Laporan Even Penggiat Seni (Laporan)	283		3.285.634.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Umum , Masyarakat Umum	284
		2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi							Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi (Laporan)	1.00		1.190.200.000,00	(Kapanewon Dlingo, Dlingo)	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, pelaku seni budaya, UMKM,Kapanewon, dan Kalurahan Masyarakat Umum	1.00
				Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi (Laporan)	55		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				55		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.22.08.5.07.0012	Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina (Orang)	5000.00	786.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	Masyarakat	5000.00	14.000.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	2.22.08.5.07.0013	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa (Laporan)	11.00	499.999.372,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	IKM di Kabupaten Bantul, IKM di Kabupaten Bantul , IKM/IKM Sentra Jamu/Minuman Herbal, IKM/IKM Sentra Jamu/Minuman Herbal Kabupaten Bantul, UMKM Se Kabupaten Bantul, UMKM Se Kabupaten Bantul	10	4.466.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.22.08.5.07.0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya (Dokumen)	1	270.752.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	mahasiswa	1	350.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2.22.08.5.08	Pendidikan Berbasis Budaya	Kurikulum Mulok yang disusun (Buku)	6	200.000.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM		0.00	2.390.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal (Laporan)	7.00	200.000.000,00	(Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Siswa	7.00	2.390.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			7.711.690.531,00							12.032.859.360,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	80	6.655.181.811,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			9.209.918.560,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Persentase)	100	1.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM		100	4.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	500.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	500.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (Persentase)	100	5.851.008.298,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM		100	6.365.665.088,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	962	5.746.824.458,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	962	6.187.061.024,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	77.760.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (ASN yang diberi tugas tambahan untuk mengelola keuangan, barang, dan kepegawaian)	12	80.160.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	19	26.423.840,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tenaga Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19	98.444.064,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (Persentase)	100	211.788.460,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	1.033.450.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.973.865,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	46.495.845,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.00	400.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	9.040.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	10.173.750,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	9.00	15.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.00	18.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	45	95.030.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Forkom Dinas Perpustakaan dan Kearsipan se-DIY, Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tamu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45	534.800.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	31.075.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	30.650.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Persentase)	100	338.651.156,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM		100	881.202.512,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	45.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	45.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	11.975.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainn	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	65.450.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	281.676.156,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tenaga Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	770.752.512,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Persentase)	100	252.733.897,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		100	925.600.960,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	58.715.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	18	313.445.760,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	138.019.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11	542.155.200,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	55.999.897,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Gedung Perpustakaan dan Gedung Arsip	2	70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi (%)	14,02	1.056.508.720,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			2.822.940.800,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan (Perpustakaan)	41	966.508.720,00	(KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		53	2.732.940.800,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	12,00	262.549.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Gedung Layanan Perpustakaan, Pengelola Perpustakaan di wilayah Kabupaten Bantul, Pengelola Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Bantul, Tim Pengadaan Barang/Jasa	12,00	808.114.400,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi (Layanan)	5.00	516.187.520,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Kelompok Masyarakat, Pengelola Perpustakaan di wilayah Kabupaten Bantul, Perpustakaan di wilayah Kabupaten Bantul, Tenaga Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.00	1.365.738.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	650.00	157.122.200,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Buku, Pengelola Perpustakaan di wilayah Kab. Bantul, Tenaga Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	675.00	529.087.800,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.00	30.650.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Jasa Survey	1.00	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat (Laporan)	1	90.000.000,00	(KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM		1	90.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)	4.00	80.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Kelompok Masyarakat	1.00	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)	1.00	10.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Perpustakaan di Kabupaten Bantul	1.00	40.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			284.062.700,00							650.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (%)	62	274.062.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			615.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif (Persentase)	85	227.202.700,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		90	515.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	200	59.351.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	300	60.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	200	139.619.200,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bantul, Tenaga Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	300	405.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	53	28.232.500,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Perangkat Daerah Sekabupaten Bantul	53	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (Persentase)	87	46.860.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		90	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	70	46.860.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	80	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat (%)	71	10.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Bantul	100	35.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (Persentase)	100	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			35.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	600	10.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			35.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			75.499.971.572,00							449.544.811.777,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			9.926.976.960,00							30.656.086.428,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	85	4.880.078.666,00	(semua Kapnewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul, Pengampu urusan kelautan dan perikanan se-DIY	100	10.427.123.668,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)	100	48.600.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			124.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	28.967.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			54.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	19.632.500,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	16	70.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)	100	3.080.454.369,00	(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	5.546.428.978,00	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	572	2.977.394.369,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	ASN DKP	572	5.328.928.978,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	99.660.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Tim Pengelola Aset, Tim Pengelola Keuangan	1	210.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22	3.400.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	22	7.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah (%)	100	1.800.000,00	(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	100	2.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1.800.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	2.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian (%)	100	22.862.500,00	(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	100	17.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5	12.500.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		5	8.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	10.362.500,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		20	9.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)	100	484.988.875,00	(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	1.608.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15.00	10.042.145,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	12.00	45.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	49.999.480,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	12	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	30	45.233.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	12.00	90.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	67.250.750,00	(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	12	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	7.800.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	12	7.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	10.000.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	1	5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	157.816.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Rapat koordinasi	12	1.100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1.785.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	1	11.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	135.062.500,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Penyuluh Perikanan, Masyarakat se Kabupaten Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul, Masyarakat se-Kabupaten Bantul	1	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah (%)	100	285.944.336,00	(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	700.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	198.125.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	5	350.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	87.819.336,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	1	350.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	490.527.436,00	(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	874.694.690,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	1	4.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	79.408.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	1	39.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	36.010.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	1	62.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	374.109.436,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul, non ASN DKP	1	769.194.690,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	464.901.150,00	(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	1.555.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	102.967.500,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	kendaraan dina jabatan, kendaraan dinas jabatan	10	525.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35	203.479.900,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	kendaraan operasional dinas	35	735.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	29.150.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	6	45.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	129.303.750,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul	6	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	833	468.099.990,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.936.475.360,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan (%)	52	53.562.500,00	(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		54	9.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	3.562.500,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	masyarakat se-Kabupaten Bantul	1	1.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	1	50.000.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	nelayan	2	8.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	5	201.200.000,00	(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		5	387.550.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	30	186.950.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	nelayan	35	347.800.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	12	7.125.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	masyarakat se-Kabupaten Bantul	15	34.750.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3	7.125.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	masyarakat se-Kabupaten Bantul	5	5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional (%)	100	201.937.490,00	(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	masyarakat se-Kabupaten Bantul, pengelola TPI	100	1.515.925.360,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	1	3.562.500,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	1	198.374.990,00	(Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Srigading, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Poncosari, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	1.505.925.360,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan (%)	5	3.800.000,00	(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		8	8.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1.900.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	masyarakat se-Kabupaten Bantul	1	3.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	5	1.900.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	masyarakat se-Kabupaten Bantul	5	5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Diterbitkan (%)	5	3.800.000,00	(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	masyarakat se-Kabupaten Bantul	8	8.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.05.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1.900.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	3.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.05.0002	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	5	1.900.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		5	5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KapalPerikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Status Operasi yang Didaftarkan (%)	5	3.800.000,00	(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	masyarakat se-Kabupaten Bantul	8	8.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.06.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1.900.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	3.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.06.0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	5	1.900.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		5	5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	<i>Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</i> <i>Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</i>	12878 12878	4.060.186.964,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			17.444.037.400,00	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya produksi benih ikan air tawar (%)	0.45	3.031.344.464,00	(Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		0.5	2.516.855.520,00	UPTD Balai Budidaya Ikan
			Peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	1		(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)					1.25		Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	53.412.500,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	masyarakat se-Kabupaten Bantul, pembudidaya ikan	1	4.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	5	2.873.474.284,00	(Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	BBI, UPTD BBI	5	2.419.085.280,00	UPTD Balai Budidaya Ikan
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	79.472.680,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	pembudidaya ikan	1	72.820.240,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	40	24.985.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	masyarakat se-Kabupaten Bantul	40	20.950.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan Jumlah Pelanggaran Aturan (%)	5	153.720.000,00	(Semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	masyarakat se- Kabupaten Bantul, Pokmaswas	100	194.900.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan (%)	100	153.720.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			194.900.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	134.720.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			188.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	19.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			6.900.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Perikanan yang Diolah (%)	2	364.891.340,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			653.550.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha (Unit)	6	29.628.840,00	(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	masyarkat se-Kabupaten Bantul, Tenaga Pengolah Data P2HP	8	10.100.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	1	29.628.840,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	10.100.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan (Unit)	7	230.925.000,00	(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		8	489.650.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (1 Unit 1 Usaha)	8	230.925.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	10	489.650.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan (Orang)	7	104.337.500,00	(semua Kapanewon semua Kalurahan, KAB. BANTUL)		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	9	153.800.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	100	49.337.500,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	masyarakat se-Kabupaten Bantul	100	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	10	55.000.000,00	(Semua Kapanewon, Semua Kalurahan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	masyarakat se kabupaten bantul, masyarakat se-Kabupaten Bantul	10	143.800.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			14.462.933.087,00							162.890.886.886,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	83	11.547.675.527,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			93.483.519.586,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (Persentase)	100	63.422.680,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100 persen	214.157.040,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.00	8.375.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah, Meningkatnya perencanaan Perangkat Daerah	3.00	4.863.600,00	Dinas Pariwisata



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	55.047.680,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Meningkatnya pelayanan administrasi kinerja perangkat daerah, Meningkatnya pelayanan administrasi kinerja perangkat daerah, Pejabat Pengadaan Barang Jasa	4	209.293.440,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (Persentase)	100	7.593.771.097,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100 persen	83.602.131.001,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	63.00	7.398.047.017,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	ASN	63.00	83.304.611.221,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.00	138.126.400,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	ASN	4.00	141.288.900,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22.00	57.597.680,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Laporan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran, Meningkatnya pelayanan administrasi kantor, Pejabat Pengadaan Barang Jasa	22.00	156.230.880,00	Dinas Pariwisata



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Persentase)	100	1.102.534.320,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat, Meningkatnya pendapatan sektor pariwisata, Pejabat Pengadaan Barang Jasa	100%	87.902.500,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12.00	1.102.534.320,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		12.00	87.902.500,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persentase)	100	26.573.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100%	51.101.960,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.00	26.573.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian, Pejabat Pengadaan Barang Jasa	5.00	51.101.960,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)	100	566.883.436,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100 persen	5.105.560.596,00	Dinas Pariwisata



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12.00	30.341.136,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya pelayanan kantor	12.00	85.274.210,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	61.00	213.790.800,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya pelayanan kantor	61.00	2.944.071.225,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	43.00	31.538.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya pelayanan kantor	43.00	570.069.417,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.00	17.533.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya pelayanan kantor	0.00	55.225.744,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12.00	9.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya pelayanan kantor	12.00	21.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12.00	256.830.000,00	(kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya pelayanan kantor	12.00	1.410.174.000,00	Dinas Pariwisata



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.00	3.600.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya pelayanan kantor	2.00	14.646.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.00	4.250.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya pelayanan kantor	1.00	5.100.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persentase)	100	1.834.616.604,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya pelayanan kantor	100 persen	1.920.327.440,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.00	308.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1.00	3.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	48.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		12.00	258.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	151.580.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		12.00	963.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	1.634.728.604,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		12.00	696.327.440,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Persentase)	100	359.873.550,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya pelayanan kantor	100 persen	2.502.339.049,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14.00	40.878.800,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		14.00	623.595.000,00	Dinas Pariwisata



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14.00	289.797.900,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya layanan kantor, Meningkatnya pelayanan kantor	14.00	1.645.279.200,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.00	29.196.850,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya pelayanan kantor	3.00	233.464.849,00	Dinas Pariwisata



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata (%)	3.13	1.492.484.020,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			59.408.161.800,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata (Persentase)	23.08	87.573.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		37.50 persen	3.904.582.480,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	5.00	26.573.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya administrasi kantor, Pejabat Pengadaan Barang Jasa	5.00	3.499.857.480,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	16.00	61.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pengelola daya tarik wisata	22.00	404.725.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata (Persentase)	17.24	1.315.497.680,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		14.71 persen	54.756.411.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.00	325.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		5.00	1.500.000.000,00	Dinas Pariwisata



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	7.00	990.497.680,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya administrasi kantor, Meningkatnya daya tarik destinasi wisata, Pejabat Pengadaan Barang Jasa	29.00	53.256.411.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Peningkatan Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Pariwisata (Persentase)	6.45	89.412.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		6.06 persen	747.168.320,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi (Usaha)	60.00	16.950.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Usaha Jasa Pariwisata	60.00	30.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.04.0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 (Usaha)	3.00	70.962.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Usaha Jasa Pariwisata, Usaha Jasa Pariwisata yang difasilitasi sertifikasi	3.00	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan)	1.00	1.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Terselenggaranya pengelolaan investasi pariwisata	1.00	617.168.320,00	Dinas Pariwisata
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	2	789.982.860,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			4.300.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	2	789.982.860,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		2	4.300.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2	81.800.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pengunjung wisata dan masyarakat umum, Pengunjung wisatawan , Pengunjung wisatawan dan masyarakat umum	2	600.000.000,00	Dinas Pariwisata



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	4	68.837.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Pariwisata dan Masyarakat Umum	4	400.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	7	104.345.360,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, Pejabat Pengadaan Barang Jasa, Tenaga Non ASN	7	600.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	8.00	535.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Destinasi wisata, Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	8.00	2.700.000.000,00	Dinas Pariwisata



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (%)	35	29.350.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			622.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Dokumen)	1	29.350.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	622.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1	9.750.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Ekonomi Kreatif	1	410.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	12	19.600.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dievaluasi	12	212.000.000,00	Dinas Pariwisata
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (*)	2	603.440.680,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.077.205.500,00	Dinas Pariwisata
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (Persentase)	100	603.440.680,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	5.077.205.500,00	Dinas Pariwisata
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	2	12.305.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Ekonomi Kreatif	2	187.005.500,00	Dinas Pariwisata
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	120	114.561.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya administrasi kantor, Pejabat Pengadaan Barang Jasa, Pelaku Ekonomi Kreatif	120	499.000.000,00	Dinas Pariwisata



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	120	476.573.840,00	(Kabupaten Bantu,;. KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya administrasi kantor, Pejabat Pengadaan Barang Jasa	120	4.391.200.000,00	Dinas Pariwisata
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			39.228.130.842,00							175.738.230.046,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	85	31.011.445.238,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			104.227.427.998,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	207.300.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	395.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.00	92.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	2.00	275.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.00	114.800.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	1.00	120.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	100	27.119.729.156,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	100	89.407.167.384,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	238.00	26.880.289.156,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		248.00	89.177.167.384,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	226.440.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	1	220.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	13.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	18	10.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
	3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Pendapatn Daerah (%)	100	8.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Unit Penghasil PAD	100	6.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	8.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	6.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (%)	100	60.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	100	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	60.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Umum (%)	100	817.979.887,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	100	5.184.100.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	15.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		11	15.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	46	239.168.887,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	46	840.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	28	28.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	28	35.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	50.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	7	80.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	5	5.100.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	30.850.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	1	20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	439.581.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	4	4.179.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	1	5.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	5.380.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	1	5.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100	533.975.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	100	250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.00	533.975.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		5.00	250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Jasa Penunjang (%)	100	790.330.448,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	100	6.231.408.614,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	6.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	6.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	91.600.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	BPP, DKPP, UPTD	4	954.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	96.750.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	3	571.408.614,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9.00	595.980.448,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	9.00	4.700.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	1.473.130.747,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	2.653.752.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30	188.640.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	30	700.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	190	138.070.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	190	300.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	1.146.420.747,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	BPP dan Puskeswan, BPP dan RPH, DKPP	1.00	1.653.752.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian (%) 										



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
			<i>Ketersediaan Sarana Peternakan (%)</i>	100								<i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<i>Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran (Persentase)</i>	100	1.598.951.060,00	<i>(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)</i>		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	100	14.002.213.860,00	<i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	<i>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)</i>	2	280.550.000,00	<i>(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)</i>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	2	220.625.000,00	<i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)</i>	12	1.318.401.060,00	<i>(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)</i>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	12	13.781.588.860,00	<i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman& (Dokumen)	2	1.403.695.360,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kebun UPTD BBP, Masyarakat Kabupaten Bantul, Operasional kegiatan UPTD BBP, Operasional kegiatan UPTD BBP, Operasional Kegiatan UPTD BBP, Operasional UPTD BBP, Petani Penangkar, UPTD BBP	2	26.000.000.000,00	UPTD Balai Benih Pertanian
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	2	1.403.695.360,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		2	26.000.000.000,00	UPTD Balai Benih Pertanian
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun (Persentase)	100	517.925.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP	100	9.074.111.320,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	15	71.100.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		15	428.010.720,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	33500	446.825.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		33500	8.646.100.600,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Prasarana yang Digunakan dengan Baik (%)</i> <i>Cakupan Sumber Bibit Ternak yang Terlindungi (%)</i>	100 100	998.473.840,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.821.375.000,00	<i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	425.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP Bantul	1	170.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	425.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP Bantul	1	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	425.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DKPP Bantul	1	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3	851.287.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kelompok Tani	3	1.250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi (Jenis)	1	2.550.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	77.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	2	2.550.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat Kabupaten Bantul	2	77.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<i>Produksi Daging (Ton)</i> <i>Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)</i> <i>Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)</i> <i>Produksi Daging (Ton)</i>	15.713 100 100 15713	1.537.592.964,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			11.708.790.488,00	<i>UPTD Rumah Potong Hewan</i> <i>UPTD Pusat Kesehatan Hewan</i> <i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</i> <i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak (%)	100	742.317.540,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	4.317.750.000,00	<i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	9	742.317.540,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat Kabupaten Bantul, Masyarakat (Kelompok Ternak)	9	4.317.750.000,00	<i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota (%) Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100 100	451.363.584,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL) (Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100 100	700.370.248,00	<i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</i> <i>UPTD Rumah Potong Hewan</i>
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	2	115.012.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat Kabupaten Bantul	2	447.000.000,00	<i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</i>
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	2	336.351.084,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pedagang daging	2	253.370.248,00	<i>UPTD Rumah Potong Hewan</i>



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	300.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	3.500.000.000,00	UPTD Pusat Kesehatan Hewan
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	300.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	10 Puskesmas, THL, UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas dan 10 Puskesmas	1	3.500.000.000,00	UPTD Pusat Kesehatan Hewan
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak (%)	100	40.861.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	3.165.670.240,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	2	8.425.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat Kabupaten Bantul	2	112.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1.00	32.436.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat Kabupaten Bantul	1.00	3.053.670.240,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Peningkatan Pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (%)	10	3.050.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		10	25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	1	3.050.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat Kabupaten Bantul	1	25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana (%)	100	50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			570.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Serangan hama yang ditangani (Lokasi)	52	50.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Gapoktan/KT	52	570.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	100	50.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	570.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)	100	12.735.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			22.000.000,00	Dinas Ketahan an Pangan dan Pertanian
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan rekomendasi usaha pertanian (Rekomendasi)	1	11.985.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kelompok Tani,Gapoktan, Pelaku usaha pertanian	1	2.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1	11.985.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	2.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan (Rekomendasi)	1	750.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat Kabupaten Bantul	1	20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	1	750.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		1	20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (Ton/Ha)	6,32	2.097.312.380,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			8.312.311.380,00	UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (Ton/Ha)	6,32								Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani (Kelompok)	5	2.097.312.380,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		5	8.312.311.380,00	UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan
		Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani (Kelompok)	5		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	5			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	6	324.713.540,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	kelompok tani, Petugas dan petani, Petugas, petani dan lembaga tani	6	2.943.534.240,00	UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	17		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					Kebun BPP, Kelompok, Kelompok Tani, Kelompok Tani / Gapoktan, KT	17	
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	17	535.363.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Alat Mesin, Kelompok Tani, Kendaraan Operasional, Petani, Petugas, Petugas dan Petani, Tenaga Non ASN, UPTD BPP	17	1.932.329.520,00	UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	6		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					Kelompok Tani	6	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	17	161.100.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Tenaga, UPT BPP	17	436.447.620,00	UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	7		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					Kelompok Tani	7		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	46	1.076.135.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kabupaten Bantul, KT/KWT, Masyarakat (Kelompok Tani)	46	3.000.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			9.274.837.219,00							52.415.229.682,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan (%)	53	540.298.750,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			400.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (%)	100	460.041.000,00	(KAB. BANTUL, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	245.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	30.00	460.041.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Usaha dan Instansi Terkait, Pelaku usaha Retail, Pelaku Usaha Ritel, Pelaku usaha toko kelontong, Pelaku usaha toko swalayan, Pelaku usaha Toko swalayan, Tenaga administrasi Non ASN	1.00	245.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Prosentase Penerbitan Izin TDG (%)	100	26.585.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	70.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	15.00	26.585.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku usaha pergudangan, Pelaku Usaha Pergudangan	1.00	70.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Prosentase Penerbitan Izin STPW (%)	50	16.235.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		50	60.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	5.00	16.235.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Usaha dan Instansi terkait, Pelaku usaha waralaba	1.00	60.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase penerbitan izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat (%)	50	16.875.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		50	15.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	16.875.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku usaha dan Instansi terkait	1	15.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (%)	100	20.562.250,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	10.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	10.00	20.562.250,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Usaha , Pelaku Usaha dan Instansi Terkait	1.00	10.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pertumbuhan Omzet Pedagang Pasar Rakyat (%)	4	6.449.969.154,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			47.227.417.505,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik (%)	46	5.164.759.884,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		48	36.015.756.722,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	4	1.287.840.800,00	(Kabupaten bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pasar Ngipik, Pasar Rakyat, Pedagang Pasar	4	22.877.679.495,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	33	3.876.919.084,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	27625000, Pasar Rakyat, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan, Tenaga Administrasi, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Tenaga Operator Komputer	33	13.138.077.227,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan pelaku usaha yang dibina (%)	15	1.285.209.270,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		15	11.211.660.783,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	12	904.311.090,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pedagang Pasar, Pedagang Pasar Rakyat, Pengelola MCK , Pengelola Pasar , Petugas Dana Bergulir dan Pedagang Pasar Rakyat, Tenaga Kerja Administrasi Kantor	12	3.323.255.148,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	10	380.898.180,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	APPSI, Masyarakat , Pasar Imogiri, Pedagang Pasar Rakyat, Tenaga Administrasi Kantor, Tenaga Operator Komputer	10	7.888.405.635,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Stabilitas Bahan Pokok Antar Waktu) (%)	6	249.203.960,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Gapoktan dan Petani di Kabupaten Bantul, Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul, Pengelola dan Pedagang Pasar Rakyat Kabupaten Bantul	64	570.658.912,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha (%)	62	40.248.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			60.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	2.00	40.248.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			60.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu) (%)	6	196.430.360,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Melaksanakan Kegiatan Bapokting, Membantu Pelaksanaan Kegiatan Bapokting, Pelaku Usaha dan Distributor serta Pedagang Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul	12.00	496.123.902,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12.00	153.720.360,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	468.623.268,00			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.00	42.710.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	27.500.634,00			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	47	12.525.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat Kabupaten Bantul	48	14.535.010,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	1.00	12.525.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	14.535.010,00			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor (*)	100	1.211.450.050,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.670.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha berpeluang ekspor yang meningkat omset pemasarannya (%)	75	1.211.450.050,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		80	1.670.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	20.00	429.479.750,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Usaha, Pelaku Usaha	10.00	750.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	85.00	495.460.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Usaha	9.00	320.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	50.00	286.510.300,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Usaha, Produk, Tenaga Administrasi	50.00	600.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku (%)	32	659.175.805,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.072.153.265,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (%)	38	659.175.805,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		38.5	2.072.153.265,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	8875.00	588.980.855,00	(wilayah kabupaten bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	pegawai non asn, pelaku usaha pemilik UTTP (wajib tera,tera ulang), sdm upt metrologi, tersedianya administrasi perkantoran, tersedianya jasa penunjang operasional kantor	9000	1.974.630.775,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	200.00	70.194.950,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	pelaku usaha pemilik alat UTTP (wajib tera)	200.00	97.522.490,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Promosi Penggunaan dan Pemasaran dalam Negeri (%)	15	164.739.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			475.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya (%)	70	164.739.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	UMKM	75	475.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	8.00	146.300.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		50.00	350.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	20.00	18.439.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	UMKM	20.00	125.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			2.057.242.560,00							20.044.378.735,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK (%)	95,32	1.957.264.720,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			19.810.378.735,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA (%)	100	1.957.264.720,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		100	19.810.378.735,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1.00	99.230.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Industri Kabupaten Bantul	00.00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	10.00	756.057.020,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	IKM / IKM Sentra di Kabupaten Bantul, IKM / IKM Sentra Kabupaten Bantul, IKM / IKM Sentra Kabupten Bantul, IKM Sentra Mebel Kabupaten Bantul, Industri Kabupaten Bantul, Sentra IKM Kabupaten Bantul	39	10.301.199.265,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	88.00	1.101.977.700,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		8	9.509.179.470,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait (%)	100	35.986.340,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			136.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan sertifikat standar yang diverifikasi (%)	14	35.986.340,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		16	136.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	15.00	3.437.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	IKM di Kabupaten Bantul	24.00	40.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	10.00	32.548.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	IKM di Kabupaten Bantul, Tenaga Administrasi	12.00	96.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten yang Masuk dalam SII Nas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten (%)	0,22	63.991.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		98.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUi, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS (%)	43.40	63.991.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		45.40	98.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1.00	24.738.750,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	IKM di Kabupaten Bantul	2.00	28.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	2.00	39.252.750,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	IKM di Kabupaten Bantul, IKM di Kabupaten Bantul yang sudah memiliki akun SIINas	2.00	70.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			549.850.904,00							7.800.000.000,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi (%)	90	549.850.904,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan		67	7.800.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi (Persentase)	66	549.850.904,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			7.800.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	5.00	549.850.904,00		(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	catran, catrans, penganggur, setengah penganggur dan warga miskin, posyantrans, tenaga non asn, Tenaga Non ASN, warga miskin, penganggur dan setengah penganggur
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			103.610.960.638,00							1.460.911.145.130,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH			54.304.072.722,00							928.730.480.045,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	83	37.550.032.092,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			72.006.141.695,00	Bagian Hukum



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Capaian Nilai AKIP (Angka)	83									Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	83									Bagian Tata Pemerintahan
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	83									Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	83									Sekretariat Daerah
			Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel (%)	100									Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	83									Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	83									Bagian Umum dan Protokol
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	83									Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	100	309.631.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	285.760.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	14.400.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Sekretariat Daerah, Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah	4.00	29.600.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	51.565.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Sekretariat Daerah	2	8.430.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.00	102.050.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Sekretariat Daerah	6.00	201.730.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)							
								NASIONAL	DAERAH										
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.00	141.616.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Sekretariat Daerah	5.00	46.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan						
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	24.053.670.708,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	19.622.849.863,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam						
			Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Bagian Perencanaan dan Keuangan						
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100		(KAB. BANTUL)					100		Bagian Hukum						
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100		(Komplek II Pemkab Bantul, Jl.Lingkar Timur Ringroad Manding Tirirenggo Bantul, KAB. BANTUL)					100		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100		(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)					100		Bagian Organisasi						
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Bagian Umum dan Protokol						
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persentase)	100		(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)					100		Bagian Kesejahteraan Rakyat						
			Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persentase)	100		(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)					100		Bagian Tata Pemerintahan						
			4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	159					23.529.535.708,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Sekretariat Daerah	159	19.104.829.863,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12.00	521.340.000,00	(Kecamatan Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Honor Pengelola Keuangan	12.00	506.020.000,00	Bagian Umum dan Protokol						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Bagian PPSDA	12.00		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12.00		(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)				KPA, PPK Unit, PPTK serta Pengelola Keuangan dan Barang Bagian Tata Pemerintahan	12.00		Bagian Tata Pemerintahan						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan	12		Bagian Perencanaan dan Keuangan						



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.02.0007		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian	12.00		Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12.00		(Komplek II Pemkab Bantul Jl.Lingkar Timur ringroad Manding Tlirenggo Bantul, KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12.00		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.00		(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)				ASN Bagian Organisasi Setda	1		Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12.00		(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)				Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Bantul	12		Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19.00	2.795.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Sekretariat Daerah	19.00	12.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	16.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Bagian Umum dan Protokol	100	16.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20.00	16.000.000,00	(Bantul, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	20.00		16.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)	100	4.861.479.309,00	(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Puhlik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	18.713.613.223,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Bagian Umum dan Protokol
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100		(Komplek II Pemkab Bantul, Jl.Lingkar Timur Ringroad Manding Tlirenggo Bantul, KAB. BANTUL)					100		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)	100		(KAB. BANTUL)					100		Bagian Hukum
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Bagian Perencanaan dan Keuangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
	4.01.01.2.06.0001		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase) Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100		(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)				100		Bagian Tata Pemerintahan	
				100		(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)				100		Bagian Organisasi	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	75.621.655,00	(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Ruangan/Kantor Bagian Organisasi	4	82.310.143,00	Bagian Organisasi	
			1.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)			Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan	1.00		Bagian Perencanaan dan Keuangan		
			1.00		(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)			Bagian Tata Pemerintaha Setda Kabupaten Bantul	4.00		Bagian Tata Pemerintahan		
			1.00		(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)			Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul	1		Bagian Kesejahteraan Rakyat		
			33.00		(KAB. BANTUL)			Aparatur Bagian Umum dan Protokol	33.00		Bagian Umum dan Protokol		
			4.00		(Komplek II Pemkab Bantul, Jl.Lingkar Timur Ringroad Manding Trirenggo bantul, KAB. BANTUL)			Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	5.00		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	720.110.185,00	(Bagian Organisasi, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bagian Organisasi Setda	8	2.183.480.900,00	Bagian Organisasi
				5.00		(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)			Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul	5		Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	10			(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)			Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Bagian PPSDA	14.00		Bagian Tata Pemerintahan			
	80			(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				81.00		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam			
	25			(KAB. BANTUL)			Aparatur Bagian Umum dan Protokol	25		Bagian Umum dan Protokol			
	9.00			(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)			Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Aparatur Bagian Pengadaan Barana dan Jasa Aparatur, Aparatur	6.00		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
	8			(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				8		Bagian Hukum			



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.06.0003		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan	14.00		Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	145.656.900,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADAL)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur	4	297.276.100,00	Bagian Hukum
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.00		(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)			Aparatur pengelola pengadaan barang dan jasa	6.00		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6		(Bagian Organisasi, KAB. BANTUL)			Bagian Organsisasi Setda	8		Bagian Organisasi	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	17		(KAB. BANTUL)			Aparatur Bagian Umum dan Protokol	20		Bagian Umum dan Protokol	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)			Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	10.00		Bagian Tata Pemerintahan	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	214.538.569,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur	4	305.258.300,00	Bagian Hukum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.00		(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)			Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul	4		Bagian Kesejahteraan Rakyat	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7		(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)			Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	4.00		Bagian Tata Pemerintahan	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	13.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)			Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan	13.00		Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.00		(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)			Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	6.00		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)			Bagian Organisasi, Bagian Organisasi Setda	18		Bagian Organisasi	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	14		(KAB. BANTUL)			Aparatur Bagian Umum dan Protokol	14		Bagian Umum dan Protokol	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)			Bagian PPSDA	3.00		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8	60.540.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Puhlik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Bagian Umum dan Protokol	8	70.240.000,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	24.00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Bagian PPSDA				24.00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12.00	(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Tirirenggo Bantul, KAB. BANTUL)	Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				12.00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)	ASN Bagian Organisasi				1	Bagian Organisasi		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12.00	(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul				1	Bagian Kesejahteraan Rakyat		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul				12	Bagian Tata Pemerintahan		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan				12	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Aparatur				2	Bagian Hukum		
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	366.450.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur, tamu	1	499.095.000,00	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6	(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)	Tamu Dinas dan Non Dinas				9	Bagian Organisasi		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	8	(KAB. BANTUL)	Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul				8	Bagian Umum dan Protokol		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.00	(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)	Perangkat Daerah Luar Daerah				5	Bagian Kesejahteraan Rakyat		
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3.183.381.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Puhlik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur	3	15.173.624.780,00	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12.00	(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)	ASN dan Non ASN, Bagian Organiasi Setda, Bagian Organisasi, Bagian Organisasi Setda, Pejabat Fungsional anjak, Pejabat Fungsional Anjak				12	Bagian Organisasi		



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	178		(KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian Umpro, Aparatur Bagian Umum dan Protokol, Aparatur Pemerintah Kabupaten Bantul Bagian PPSDA	178		Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	145.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					150.00		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Aparatur Bagian Pengadaan Barana dan Jasa	12		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25.00		(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)				Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul, OPD, Masyarakat dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab, Bantul	42		Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)				Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	75.00		Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	18.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan, Aparatur Sekretariat Daerah	18.00		Bagian Perencanaan dan Keuangan
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.00	49.306.000,00	(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Puhlik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bagian Organisasi Setda	1	51.668.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Bagian PPSDA	1		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.00		(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2.00		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Aparatur	1		Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan	1		Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	300		(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)				Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	1.00		Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.00		(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)				Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul	1		Bagian Kesejahteraan Rakyat



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB								
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)									
								NASIONAL	DAERAH												
	4.01.01.2.06.0011		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		(KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian Umum dan Protokol	1		Bagian Umum dan Protokol								
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	45.875.000,00	(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	1	50.660.000,00	Bagian Tata Pemerintahan								
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan	4.00		Bagian Perencanaan dan Keuangan								
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.00		(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)				Perangkat Daerah	1		Bagian Kesejahteraan Rakyat								
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Bagian PPSDA	1		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam								
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		(KAB. BANTUL)				Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	2		Bagian Umum dan Protokol								
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.00		(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)				Pengguna Layanan dan Infomasi	1		Bagian Organisasi								
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4		(Komplek II Pemkab Bantul Jl.lingkar timur ringroad Manding Tirirenggo Bantul, KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	4		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa								
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Aparatur, masyarakat	1		Bagian Hukum								
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	109.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	534.279.000,00	Bagian Umum dan Protokol								
			4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	50.000.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Bagian Umum dan Protokol	10	141.254.000,00	Bagian Umum dan Protokol						
					4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	5.000.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Bagian Umum dan Protokol	2	7.875.000,00	Bagian Umum dan Protokol				
							4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	4.000.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Bagian Umum dan Protokol	2	4.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol		
									4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	50.000.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Bagian Umum dan Protokol	3	381.150.000,00	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD (Persentase)	100	3.286.997.860,00	(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	22.580.214.440,00	Bagian Tata Pemerintahan								
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Bagian Perencanaan dan Keuangan								



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
	4.01.01.2.08.0001		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100	Bagian Umum dan Protokol	
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100		(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)					100	Bagian Organisasi	
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100		(Komplek II Pemkab Bantul, Jl.Lingkar Timur Ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)					100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah (%)	100		(KAB. BANTUL)					100	Bagian Hukum	
			Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur (Persentase)	100		(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)					100	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	24	5.700.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADN)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Bagian Umum dan Protokol	24	6.400.000,00
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.00		(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)				9		Bagian Tata Pemerintahan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				1		Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.00		(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)				4.00		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	172.000.000,00	(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12.00	566.850.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		(KAB. BANTUL)					12		Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.00	346.488.000,00	(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADN)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masjid Agung dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul	5	1.157.526.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	10.00		(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)				4.00		Bagian Tata Pemerintahan	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				4.00		Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				4.00		Bagian Hukum	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.08.0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.00		(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL) (Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL) (KAB. BANTUL) (Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Aparatur Bagian Pengadaan Barana dan Jasa Bagian Organisasi Setda	5.00		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.00						2	Bagian Organisasi		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	13						13	Bagian Umum dan Protokol		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5						5	Bagian PPSDA Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	2.762.809.860,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL) (Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADN)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	12	20.849.438.440,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00						5	Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul Bagian Kesejahteraan Rakyat		



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan	12		Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12.00		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	61		(KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian Umum dan Prootokol, Aparatur Bagian Umum dan Protokol, Aparatur Pemerintah Kab Bantul	61		Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)				Non ASN	12		Bagian Organisasi
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	2.496.055.260,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Puhlik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	6.738.775.656,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
			Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD (Persentase)	100		(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)					100		Bagian Tata Pemerintahan
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Capaian kinerja penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		(KAB. BANTUL)					100		Bagian Hukum
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persentase)	100		(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)					100		Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Bagian Umum dan Protokol
			Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD (%)	100		(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)					100		Bagian Organisasi
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100		(Komplek II Pemkab Bantul, Jl.Lingkar Timur Ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)					100		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	819.738.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kendaraan Dinas Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kendaraan Dinas Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	2.718.112.964,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.09.0002		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Bagian PPSDA	5	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		(KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian Umum dan Protokol, KDH/WKDH	5	Bagian Umum dan Protokol	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.00		(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)				Bagian Organisasi , Bagian Organisasi Setda	8.00	Bagian Organisasi	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.00		(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)				Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	4	Bagian Tata Pemerintahan	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.00		(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)				BMD Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	8.00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	32	710.342.100,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Bagian Umum dan Protokol, Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	32	2.688.341.088,00	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9.00		(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)				Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul, Bagian Kesra	9	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				Aparatur	4	Bagian Hukum	
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.00	11.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Mebelair Bagian Perencanaan dan Keuangan	1.00	99.245.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20		(KAB. BANTUL)				Aparatur Bagian Umum dan Protokol	20	Bagian Umum dan Protokol	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35	86.500.160,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Bagian Umum dan Protokol	35	102.525.000,00	Bagian Umum dan Protokol	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11		(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)				BMD Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	724.998.500,00	(Komplek II Pemkab Bantul jl.lingkar timur ringroad Manding Tirrenggo Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BMD Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	930.551.604,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7						Aparatur Bagian Umum dan Protokol	7		Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	143.476.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Ruang Kantor Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	200.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	100	1.135.087.260,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	1.135.087.260,00	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	185.837.260,00	(Bantul, Kec. Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	KDH dan WKDH	2	185.837.260,00	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	44	249.250.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	KDH dan WKDH	44	249.250.000,00	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	700.000.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		2	700.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Capaian Kinerja Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (%)	100	418.499.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	418.499.500,00	Bagian Umum dan Protokol



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	160.000.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kepala Daerah	1	160.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	120.000.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Wakil Kepala Daerah	1	120.000.000,00	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	2	138.499.500,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten bantul	2	138.499.500,00	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Terwujudnya kesesuaian Indikator potensi/beban kerja sesuai regulasi RightSizing/kesesuaian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam PeraturanPemerintah tentang Kelembagaan (%)	90	474.927.428,00	(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publiik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	1.572.379.489,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	2.00	112.263.000,00	(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD di Kabupaten Bantul, OPD Kabupaten Bantul	2.00	529.730.589,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2.00	59.139.000,00	(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kabupaten Bantul	2.00	130.278.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.00	240.525.428,00	(Bagian Organisasi, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD di Kabupaten Bantul	4.00	795.919.800,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	2.00	63.000.000,00	(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD di Kabupaten Bantul, OPD Pengampu Pelayanananan Masvarakat	2.00	116.451.100,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (%)	100	388.683.267,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	388.683.264,00	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	5	388.683.267,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	5	388.683.264,00	Bagian Umum dan Protokol
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) (Persentase)	92	10.567.995.630,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			840.139.214.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
			Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti (%)	100									Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Persentase Harmonisasi Rancangan Perda Menjadi Perda (%)	100									Bagian Hukum



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan (Persentase)	100	760.724.000,00	(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	4.085.465.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1.00	30.000.000,00	(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)	15	35.000.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	5.00	304.375.000,00	(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kalurahan dan Kapanewon di Bantul, masyarakat, Panewu dan Forkopimkap	8.00	907.125.000,00	Bagian Tata Pemerintahan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	8.00	426.349.000,00	(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat, OPD, OPD pengampu SPM	7	3.143.340.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	9.132.978.630,00	(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	834.336.386.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	88.00	8.723.226.220,00	(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anak Yatim dan Piatu Se Kab. Bantul, ASN Se Kabupaten Bantul, Baznas dan Bagian Kesra, Baznas dan Masjid Agung, Hafidz Quran Se Kabupaten Bantul, Perangkat Daerah dan Bagian Kesra, Kafilah Pemenang Lomba MTQ TK Kabupaten dan Bagian Kesra, Kafilah Se Kabupaten Bantul, Perangkat daerah dan Bagian Kesra, Kelompok Masyarakat dan Ormas Masyarakat Se Kabupaten Bantul, KUA Se Kabupaten Bantul, Masyarakat Non Muslim se Kabupaten Bantul, Masyarakat Non Muslim se Kabupaten Bantul dan Bagian Kesra, Masyarakat, Santri, Perangkat Daerah dan Bagian Kesra Kab. Bantul, Masyarakat Se Kabupaten Bantul dan Bagian Kesejahteraan Rakyat, Masyarakat Sekabupaten Bantul, Perangkat daerah dan Bagian Kesra, Masyarakat Se Kabupaten Bantul, Perangkat Daerah, dan Bagian Kesra, Masyarakat Seluruh Kecamatan Kab. OPD, Masyarakat dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab. Bantul, OPD Terkait, Masyarakat dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab. Bantul	18	833.232.624.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	7.00	183.010.970,00	(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		6	551.881.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	7.00	226.741.440,00	(Bagian Kesejahteraan Rakyat, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kab Bantul dan bagian Kesra, OPD Terkait , Masyarakat Umum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab Bantul	6	551.881.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (%)	100	458.206.000,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publiik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	1.110.318.000,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	500	188.712.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur, Pemerintah Daerah, Aparatur, Masyarakat	500	380.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	10.00	194.343.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pemerintah Daerah, Aparatur, Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, Masyarakat, Pemerintah Kalurahan, Masyarakat	10.00	570.318.000,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	500	75.150.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pemerintah Daerah, Aparatur, Masyarakat	500	160.000.000,00	Bagian Hukum
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah (Persentase)	100	216.087.000,00	(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	607.045.000,00
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	54.00	183.587.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat, OPD di Bantul, perguruan tinggi dan instansi lainnya, Masyarakat, OPD di Bantul, universitas dan instansi lain, Masyarakat, OPD di Bantul, universitas dan instansi lainnya	62	574.545.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	1	16.250.000,00	(Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat, OPD di Bantul dan instansi lainnya	1	16.250.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1	16.250.000,00	(Kab.Bantul, KAB. BANTUL)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat, OPD di Bantul, universitas dan instansi lainnya	1	16.250.000,00	Bagian Tata Pemerintahan
	3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindak Lanjuti (%)	100	737.900.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.699.082.000,00



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			<i>Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender (%)</i>	80									<i>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</i>
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<i>Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten (%)</i>	100	178.528.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BLUD, Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya, BUKP, Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya, BUMD, Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya, Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya	100	1.086.372.000,00	<i>Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam</i>
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)</i>	8	178.528.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		8	1.086.372.000,00	<i>Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam</i>
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	<i>Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten (%)</i>	100	73.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya, TPID, Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya	100	148.000.000,00	<i>Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam</i>
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)</i>	5	73.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		5	148.000.000,00	<i>Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam</i>
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (%)</i>	100	389.122.500,00	(Komplek II Pemkab Bantul, Jl.Lingkar Timur Ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Aparatur pengelola pengadaan barang dan jasa	100	2.084.460.000,00	<i>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</i>
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)</i>	200	142.020.000,00	(Komplek II Pemkab Bantul Jl.lingkar timur ringroad Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		200	468.000.000,00	<i>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</i>
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)</i>	5.00	75.625.000,00	(Komplek II Pemkab Bantul Jl.Lingkar Timur ringroad Manding Trirenggo bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		5.00	332.760.000,00	<i>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</i>
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)</i>	1079	171.477.500,00	(Komplek II Pemkab Bantul Jl.Lingkar Timur ringroad Manding Trirenggo bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		1079	1.283.700.000,00	<i>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</i>
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<i>Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten (%)</i>	100	97.250.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Penyalur KUR, Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya, Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya, TPAKD, Penyalur KUR, Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya	100	380.250.000,00	<i>Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam</i>
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)</i>	7	93.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		7	376.000.000,00	<i>Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam</i>



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	1	4.250.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Perangkat Daerah dan Pihak Terkait Lainnya	1	4.250.000,00	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
4.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas (%)	100	5.448.144.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			12.886.042.350,00	Kapanewon Banguntapan
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	100									Kapanewon Pundong
			Persentase Pengelolaan Keuangan Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	85									Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Capaian Internalisasi Keistimewaan Pada ASN di Kabupaten Bantul (%)	60									Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Persentase PD Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	44.44									Inspektorat Daerah
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	100									Kapanewon Piyungan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	100									Kapanewon Dlingo
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	100									Kapanewon Imogiri
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	100									Kapanewon Pandak
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	100									Kapanewon Bantul
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	100									Kapanewon Kretek
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	100									Kapanewon Bambanglipuro
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	100									Kapanewon Jetis
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	100									Kapanewon Kasihan
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	100									Kapanewon Pleret
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	100									Kapanewon Pajangan
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	100									Kapanewon Sanden
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	100									Kapanewon Sedayu
			Persentase perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan yang berkullitas (Persentase)	100									Kapanewon Sewon
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	100									Kapanewon Srandakan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Persentase Kalurahan yang Melaksanakan Urusan Kelembagaan (%)	50								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	
			Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas (Persentase)	88,5								Bagian Tata Pemerintahan	
			Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan (%)	89								Bagian Hukum	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (%)	100								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)	83								Kapanewon Pandak	
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA Di PD Kabupaten Bantul (%)	83								Kapanewon Sedayu	
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)	83								Kapanewon Pundong	
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)	83								Kapanewon Pajangan	
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)	83								Kapanewon Pleret	
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA Di PD Kabupaten Bantul (%)	83								Kapanewon Bantul	
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA Di PD Kabupaten Bantul (%)	83								Kapanewon Kretek	
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul (Persentase)	83								Kapanewon Sewon	
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)	83								Kapanewon Bambanglipuro	
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)	83								Kapanewon Sanden	
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)	83								Kapanewon Jetis	
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)	82								Kapanewon Piyungan	
			Tingkat penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul (%)	83								Kapanewon Banguntapan	
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)	83								Kapanewon Dlingo	
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)	83								Kapanewon Kasihan	
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)	83								Kapanewon Imogiri	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
			<i>Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul (%)</i>	83								<i>Kapanewon Srandakan</i>	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	<i>Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional (%)</i>	89	2.151.000.000,00	<i>(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)</i>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	90	7.166.418.000,00	<i>Bagian Organisasi</i>	
			<i>Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kelurahan pada urusan keistimewaan (%)</i>	89	<i>(KAB. BANTUL)</i>	<i>Bagian Hukum</i>							
			<i>Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan (Persentase)</i>	88.5	<i>(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)</i>	<i>Bagian Tata Pemerintahan</i>							
			<i>Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan (Desa/Kelurahan)</i>	75	<i>(Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, KAB. BANTUL)</i>	<i>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan</i>							
	4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota (Lembaga)</i>	7	200.000.000,00	<i>(Bagian Organisasi, KAB. BANTUL)</i>	Dana Keistimewaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	OPD Pengampu Dais, OPD Pengampu Dana Keistimewaan DIY	4	400.000.000,00	<i>Bagian Organisasi</i>	
	4.01.04.5.01.0005	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	<i>Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)</i>	5	200.000.000,00	<i>(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)</i>	Dana Keistimewaan DIY, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	<i>Aparatur, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, Aparatur, Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, Masyarakat</i>	5	915.000.000,00	<i>Bagian Hukum</i>	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)</i>	1	1.664.000.000,00	<i>(75 Kalurahan/17 kapanewon, KAB. BANTUL)</i>	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	1	5.461.418.000,00	<i>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan</i>	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)</i>	1.00	<i>(Kab. Bantul, Bantul, Bantul, KAB. BANTUL)</i>	<i>Kapanewon di seluruh Bantul</i>							
	4.01.04.5.01.0008	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan (Dokumen)</i>	1	87.000.000,00	<i>(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)</i>	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	1	390.000.000,00	<i>Bagian Hukum</i>	
		4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	<i>capaian kinerja peningkatan budaya pemerintahan (Persentase)</i>	100	1.552.144.500,00	<i>(kapanewon pundong, Pundong)</i>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	100	1.491.084.500,00	<i>Kapanewon Pundong</i>
<i>Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan (%)</i>				83	<i>(Kapanewon Pajangan, Pajangan)</i>	<i>Kapanewon Pajangan</i>							
<i>Capaian kinerja peningkatan budaya pemerintahan (%)</i>				100	<i>(Kapanewon Sedayu, Sedayu)</i>	<i>Kapanewon Sedayu</i>							
<i>Capaian kinerja peningkatan budaya pemerintahan (Persentase)</i>				100	<i>(Kapanewon Sewon, Sewon)</i>	<i>Kapanewon Sewon</i>							



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan (%)	100		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Srandakan
			Capaian kinerja peningkatan budaya pemerintahan (%)	83		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)					83		Kapanewon Banguntapan
			Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi (Persentase)	100		(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)					100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan (Persentase)	83		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)					83		Kapanewon Piyungan
			Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan (Persentase)	100		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)					100		Kapanewon Dlingo
			Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan (%)	100		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)					100		Kapanewon Imogiri
			capaian kinerja peningkatan budaya pemerintahan (%)	84		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)					85		Kapanewon Pandak
			Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan (%)	83		(Kapanewon Bantul, Bantul, Kec. Bantul)					84		Kapanewon Bantul
			Capaian Kinerja Budaya Pemerintahan (%)	100		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Dokumen hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)					1		Bagian Organisasi
			Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Stariya pada ASN diKabupaten Bantul (%)	83		(Kapanewon Jetis, Jetis)					84		Kapanewon Jetis
			Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan (%)	100		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Pleret



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul (%)	83		(Bagian Organisasi Setda, KAB. BANTUL)					84		Bagian Organisasi
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	811.060.000,00	(Bagian Organisasi, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kabupaten Bantul, Masyarakat Kabupaten Bantul, Masyarakat Kabupaten Bantul, Masyarakat Pengguna Layanan, Masyarakat/Pengguna Layanan	4	750.000.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan (Laporan)	1	741.084.500,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kabupaten Bantul	1	741.084.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Presentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan (%)	100	1.745.000.000,00	(Kapanewon Imogiri, Imogiri)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	4.228.539.850,00	Kapanewon Imogiri
			Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Inspektorat Daerah
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti (%)	78		(KAB. BANTUL)					80		
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan (Persentase)	100		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)					100		Kapanewon Piyungan
			Presentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (Persentase)	100		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)					100		Kapanewon Dlingo
			capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)	100		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Pandak
			Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)	100		(Kapanewon Bantul, Bantul)					100		Kapanewon Bantul
			Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)	100		(Kapanewon Kretek, Kretek)					100		Kapanewon Kretek
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan (%)	100		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)	100		(Kapanewon Sewon, Sewon)					100		Kapanewon Sewon



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.01.04.5.06.0001		Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)	100		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Srandakan
			capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (Persentase)	100		(kapanewon pundong, Pundong)					100		Kapanewon Pundong
			Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)	100		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)					100		Kapanewon Banguntapan
			Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	2		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)					2		Kapanewon Kasihan
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan (%)	100		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Pleret
			Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)	100		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)					100		Kapanewon Pajangan
			Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)	100		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)					100		Kapanewon Sedayu
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan (%)	100		(Kapanewon Jetis, Jetis)					100		Kapanewon Jetis
			Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)	100		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Srandakan
			Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (Persentase)	100		(Kapanewon Sanden, Sanden)					100		Kapanewon Sanden
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	2.00	1.095.000.000,00	(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)					Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publiik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	2		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)			Kapanewon dan Kalurahan	2		Kapanewon Kasihan		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	5.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)			Perangkat Daerah pengampu kegiatan Keistimewaan di Kabupaten Bantul	4.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	3.00		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)			Masyarakat Kapanewon Piyungan	3.00		Kapanewon Piyungan		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	3		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)			Kapanewon dan Kalurahan	3		Kapanewon Dlingo		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	2.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)			Kapanewon	2.00		Kapanewon Imogiri		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	2.00		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)			Kapanewon dan Kalurahan	2.00		Kapanewon Pandak		
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	2		(Kapanewon Bantul, Bantul, Kec. Bantul)			Kapanewon Bantul	2		Kapanewon Bantul		



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	1.00		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Kapanewon dan Kalurahan	1.00		Kapanewon Kretek
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	2		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Pamong di Kalurahan wilayah Kapanewon Bambanglipuro	2		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	2.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				Kapanewon dan Kalurahan	2.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	2.00		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)				Masyarakat	2.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	2		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Kapanewon dan Kalurahan	2		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	2.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				ASN Kapanewon Sanden, ASN Kapanewon Sanden, Masyarakat Kapanewon Sanden, Masyarakat Kapanewon Sanden, Masyarakat Kapanewon Sanden, Kalurahan se-Kapanewon Sanden	2.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	2		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Masyarakat	2		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	2.00		(Kapanewon Sewon, Sewon)				masyarakat dan kalurahan	2.00		Kapanewon Sewon
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	2.00		(Kapanewon Banguntapan, Banquntapan)				Kapanewon Banguntapan	2.00		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (Dokumen)	2		(kapanewon pundong, Pundong)				Kapanewon dan Kalurahan	2		Kapanewon Pundong
4.01.04.5.06.0002		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY (Laporan)	7.00	650.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Puhlik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Seluruh mitra Bappeda yang menggunakan Danais	4.00	2.514.594.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY (Laporan)	3.00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)				OPD Kabupaten Bantul	3		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY (Laporan)	18		(KAB. BANTUL)				APIP, APIP dan Auditee, Perangkat Daerah Pengampu dan Pemerintah Kalurahan	22		Inspektorat Daerah
	4.02	SEKRETARIAT DPRD			49.306.887.916,00							532.180.665.085,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	85	37.332.496.436,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			520.276.792.358,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	85	56.100.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		85%	67.881.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	28.050.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Sekretariat DPRD	5	33.940.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	28.050.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Sekretariat DPRD	6	33.940.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis- trasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	85	6.315.172.741,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		85%	5.528.244.155,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39.00	6.153.502.741,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Sekretariat DPRD	39.00	5.250.766.548,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	133.620.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Sekretariat DPRD	12	247.227.607,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	21	28.050.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Sekretariat DPRD	21	30.250.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis- trasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	85	268.750.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Sekretariat DPRD, Panitia Pengadaan	85%	480.757.200,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	40	268.750.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		40	480.757.200,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	85	1.952.574.865,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Sekretariat DPRD	85%	17.408.163.640,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	492.126.665,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		7	10.202.029.280,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	98.550.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	2	399.604.448,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	70.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	2	140.553.600,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	140.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	12	60.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	1.142.548.200,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Sekretariat DPRD, Panitia Pengadaan, Sekretariat DPRD, Tamu Sekretariat DPRD	12	6.545.976.312,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	9.350.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Sekretariat DPRD	12	60.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	85	1.252.409.788,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Sekretariat DPRD	85%	4.801.091.005,00
4.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	18.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	12		53.240.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	18.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	12		95.832.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	173.850.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	12		205.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1.042.559.788,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	12		4.447.019.005,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	85	1.817.213.530,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		85%	10.138.291.666,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	350.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Sekretariat DPRD	4	1.060.880.205,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	41	538.627.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Sekretariat DPRD	41	2.101.622.380,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	26.412.800,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Sekretariat DPRD	20	715.028.106,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	902.173.730,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Sekretariat DPRD	6	6.260.760.975,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)	85	25.085.443.592,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		85%	478.682.548.302,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45	24.477.943.592,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD	45	473.552.541.552,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	5	540.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD, Panitia Pengadaan, Panitia Pengadaan dan Penyedia	5	5.040.164.250,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	45	67.500.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD	45	89.842.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD (%)	85	584.831.920,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD, Sekretariat DPRD	85%	3.169.815.390,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	6	584.831.920,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		12.00	3.169.815.390,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama (%)	86	11.974.391.480,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			11.903.872.727,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (%)	85	2.548.212.500,00	(Kabupate Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD	85	2.447.885.742,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	3	1.100.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		6.00	813.897.723,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	4	1.350.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		Anggota DPRD	9.00	1.385.910.705,00
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	3	23.212.500,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD	5.00	232.149.740,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	2	75.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD	5.00	15.927.574,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran (%)	85	1.025.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD	85%	914.517.737,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	4	1.025.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		8.00	914.517.737,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	85	1.625.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD	85%	1.885.261.867,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	8	1.625.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		16.00	1.885.261.867,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD (%)	85	2.775.770.480,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD	85%	3.560.739.574,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	3	1.334.182.980,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		6.00	508.629.378,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	42	211.175.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD	42	9.461.319,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	96	259.175.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD	96	116.875.117,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	130	971.237.500,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD, Seketariat DPRD, Sekretariat DPRD	132.00	2.925.773.760,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat (%)	85	1.461.275.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		85%	1.194.528.924,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3	1.461.275.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD	4.00	1.194.528.924,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD (%)	85	200.250.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		85%	201.745.931,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	1	200.250.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD	1	201.745.931,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD (%)	85	2.338.883.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		85%	1.699.192.952,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	15	1.511.921.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD	20.00	821.073.577,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	1	145.139.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD	1	5.913.324,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	1	330.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD	4.00	337.048.915,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	30	351.823.500,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota DPRD, Sekretariat DPRD	60.00	535.157.136,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			460.694.471.875,00							366.658.723.157.585,00	
	5.01	PERENCANAAN			13.352.529.663,00							72.092.496.044,00	
	1. 5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	86,5	9.250.319.673,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			18.620.993.467,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	69.250.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	42.708.750,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	62.425.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	6	8.321.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	6.825.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	3	34.387.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan (%)	100	8.065.424.981,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	13.880.755.469,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	51	7.926.664.981,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	51	13.736.330.594,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	135.960.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	12	140.238.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2.800.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	2	4.186.875,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian (%)	100	26.725.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	231.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	26.725.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	3	231.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)	100	604.965.650,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	2.732.838.857,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	5.440.835,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	6	14.860.650,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	198.331.915,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	4.00	815.574.835,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	16.706.900,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	2.00	113.807.295,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	13.705.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	3.00	170.903.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12.00	2.400.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	2.00	3.780.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	15	12.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	16	12.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	101.00	348.376.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	141.00	1.560.263.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2.505.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	2.00	35.899.627,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	1	5.250.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	266.844.112,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	844.892.305,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	400.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	2.00	2.520.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	9.990.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	12	25.200.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	55.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	2.00	31.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	72	201.454.112,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	6.00	785.672.305,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	217.109.930,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	888.798.086,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	29	156.443.800,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	29	864.780.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	60.666.130,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul	1	24.018.086,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Substansi Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan (RKPD) (%)	100	2.490.448.880,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			43.411.420.321,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah yang Mencapai Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi (%)	96								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada/ Perda (%)	100	1.747.669.020,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	23.085.565.570,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	27.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	2	65.100.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	8.750.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	1	34.024.064,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	66.250.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	1	155.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1	43.822.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	1	556.096.256,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	6	1.601.346.520,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	5.00	22.274.945.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan (%)	100	131.560.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	456.576.876,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	90.285.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	3.00	368.061.876,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	41.275.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul	2.00	88.515.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi (%)	100	611.219.860,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	19.869.277.875,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	3	483.695.860,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bappeda Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul	3	15.075.883.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.00	127.524.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul, Perangkat Daerah	5.00	4.793.394.375,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Sub Kegiatan Renja PD dengan Rensta PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	1.611.761.110,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			10.060.082.256,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Kesesuaian Sub Kegiatan Renja PD dengan Rensta PD Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Kesesuaian Sub Kegiatan Renja PD dengan Rensta PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	100	468.317.860,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	1.833.102.516,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	15.257.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Perangkat Daerah Mitra Pemerintahan	29.00	73.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	195.930.360,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bidang PPM, Perangkat daerah Mitra Bidang Pemerintahan , Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan , Perangkat daerah mitra Pemerintahan	1	415.107.504,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	12.325.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publiik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Perangkat Daerah Mitra Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia, Perangkat Daetah Mitra Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia	11.00	82.950.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	244.805.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Perangkat Daerah Mitra Bidang Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah Mitra Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia, Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Manusia, Perangkat Daerah Mitra Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia	1	1.261.545.012,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA (%)	100	588.719.520,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	5.293.898.484,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	8.670.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian (DKUKMPP, DPMPTSP, Dispar dan Bagian Perekonomian), Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian (DKUKMPP, DPMPTSP, Dispar, dan Bagian PPSDA)	4.00	86.625.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	3	378.840.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Forum CSR, Forum CSR dan Perusahaan Mitra CSR, Komite Ekonomi Kreatif dan Forum Kreatif Bantul, Kondisi Perekonomian Kabupaten Bantul, Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian (DKUKMPP, DPMPTSP, Dinas Pariwisata dan Bagian PPSDA), Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian (DKUKMPP, DPMPTSP, Dinas Pariwisata dan Bidang PPSDA), Perusahaan Mitra CSR	3	3.680.031.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	8.925.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Perangkat Daerah Mitra Bidang SDA (DLH, DKPP, DKP), Perangkat Daerah Mitra Bidang SDA (DLH, DKPP, DKP, Bag. PPSDA)	4.00	73.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	192.284.520,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat, Perangkat Daerah Mitra Bidang SDA dan Masyarakat terdampak TPST Piyungan, Perangkat Daerah Mitra Bidang SDA (DLH, DKPP, DKP), Tenaga Non ASN	1	1.453.741.884,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)	100	554.723.730,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	2.933.081.256,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	6.885.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	PD Mitra Infrastruktur (DPTR dan DPUPKP)	2.00	73.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	374.562.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	PD mitra infrastruktur (DPTR dan DPUPKP), PD mitra infrastruktur (DPUPKP dan DPTR)	1	2.068.920.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	8.160.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	PD mitra Kewilayahan, PD Mitra Kewilayahan	4.00	73.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	165.116.230,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	PD mitra pengembangan kewilayahan (Dishub, BPBD, Diskominfo, dan Bagian PBJ)	1	717.161.256,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.02	KEUANGAN			430.328.216.857,00							366.512.473.899.496,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	85	64.363.993.571,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			80.898.102.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (Persentase)	100	35.900.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	199.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	2.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul	6	13.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.00	33.400.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul	10.00	186.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	100	22.064.304.660,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	25.703.130.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	143	21.649.972.660,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul	143	25.143.873.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	34.00	414.332.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul	34.00	559.257.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (%)	100	10.975.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	26.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	9	10.975.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul	9	26.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	100	1.928.328.175,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	3.937.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	2.001.340,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul	6	9.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	44	436.420.335,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul	58	650.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	32.666.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul	16	55.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	321.401.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul	15	1.100.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	10.800.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul	3	15.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	700	759.489.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul	700	2.080.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	3.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul	7	28.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.00	362.550.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kabupaten Bantul	1	-	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	1.025.625.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	6.900.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1.025.625.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul	32	6.900.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	38.487.081.736,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	41.632.972.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	21	7.400.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul	42	18.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	10	38.294.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kabupaten Bantul	12	40.800.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	185.681.736,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul	12	814.972.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	811.779.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	2.500.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	78	731.429.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul	79	2.400.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	123	80.350.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Bantul	4	100.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD Terhadap Anggaran Belanja APBD (%)	90	355.897.896.366,00			Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			366.392.262.841.936,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Penetapan APBD Tepat Waktu (Predikat)	100									Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu (Tepat Waktu)	100									Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah (%)	60	492.900.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		60	1.483.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	1	60.750.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kab Bantul	1	130.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	1	60.750.000,00	(Kabupaten, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kab Bantul	1	130.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	396	10.625.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kab Bantul	396	43.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	209.600.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kab Bantul	2	650.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	144.800.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	500.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	2	6.375.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kab Bantul	1	30.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target (%)	15	414.898.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		15	1.756.429.434,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	64	90.550.000,00	(Dokumen, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kabupaten Bantul, Penyedia	64	450.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	452	5.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kab Bantul	452	43.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	88	36.350.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kab Bantul	88	56.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	14	26.450.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kab Bantul	14	235.587.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	42	109.450.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kab Bantul	42	500.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	14.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kab Bantul	1	34.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	140	132.598.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul, OPD Kabupaten Bantul	438	437.842.434,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	9	453.246.340,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		9	781.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	649	39.573.840,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul	649	200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	12	3.497.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul	2	12.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	12	46.750.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul	12	22.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	266.850.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul	2	360.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	8.712.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul	1	13.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	8.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul	1	34.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	52	79.362.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul	52	140.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target (%)	15	354.536.851.186,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		15	366.388.242.412.502,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	649	299.783.544.250,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul, OPD Kabupaten Bantul	78	366.329.061.258.820,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	24.076.266.839,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul	1	6.974.357.182,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	75	30.677.040.097,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul	75	52.206.796.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Akurasi Data Barang Milik Daerah Tahun N-1 (%)	100	1.294.073.180,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		3.674.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD (%)	98	1.294.073.180,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	3.674.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	4	280.800.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kabupaten Bantul	1	300.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	120	14.050.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kabupaten Bantul	120	16.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	53.375.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kabupaten Bantul	1	80.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	52	302.725.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kabupaten Bantul, OPD se Kabupaten Bantul	52	700.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	2	43.075.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kabupaten Bantul	3	575.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1622	3.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kabupaten Bantul	1622	8.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	61.500.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kabupaten Bantul	1	65.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	11	201.175.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul, OPD Kabupaten Bantul	11	600.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	16	260.647.680,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul, OPD Kabupaten Bantul	16	1.140.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	215	73.725.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	OPD Kabupaten Bantul	58	190.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD (%)	100	8.772.253.740,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			35.638.955.560,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD (%)	44	8.772.253.740,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		46	35.638.955.560,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	4	23.250.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul	4	90.730.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	12	2.506.547.200,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul, NON ASN di BPKPAD, wajib pajak Kabupaten Bantul	12	8.965.698.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	4	627.850.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul	4	2.333.958.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	4	1.203.200.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul, Wajib Pajak Kabupaten Bantul	7	790.530.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	55.642.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul	12	61.046.300,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	3	342.911.120,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul	3	1.047.109.900,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	8	14.202.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul	12	59.985.000,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	12	2.160.512.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul	12	8.963.070.800,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	11	478.986.360,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul	11	4.992.399.480,00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12	189.744.200,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul	12	423.428.080,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12	673.316.040,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul, Pegawai NON ASN di BPKPAD, Wajib Pajak Kabuoaten Bantul	12	5.985.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	12	127.320.360,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pegawai NON ASN di BPKPAD, Wajib Pajak Kabupaten Bantul	12	60.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	12	349.645.960,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pegawai NON ASN di BPKPAD, Wajib Pajak Kabupaten Bantul	12	1.800.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	19.125.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kabupaten Bantul	15	66.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.03	KEPEGAWAIAN			16.638.061.355,00							73.305.194.489,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	82,55	8.840.716.275,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			23.896.525.889,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)	95.4	10.500.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		95.6	14.757.463,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	5.000.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	6.00	6.874.615,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	5.500.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	7	7.882.848,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (Persentase)	95.4	7.185.740.790,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	95.6	13.730.787.340,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1378	7.037.580.790,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		1378	13.582.419.802,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	143.160.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		12	143.160.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22	5.000.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		22	5.207.538,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)	97.2	1.207.441.305,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM dan ASN Kab. Bantul, BKPSDM Kab. Bantul	97.3	8.707.040.637,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	343.734.565,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		12	997.847.540,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	18.580.500,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	12	29.250.540,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	50.589.240,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	12	109.005.146,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	24	3.000.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	24	3.194.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20	9.500.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	20	7.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	110	427.367.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kab. Bantul, BKPSDM Kab. Bantul	110	7.488.320.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	30.820.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	2	41.922.611,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4	323.850.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	4	30.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	144.407.680,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	269.490.249,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	12	13.310.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	10.200.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	12	31.145.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	77.360.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	12.00	134.164.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	51.847.680,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Tenaga Non ASN BKPSDM Kab. Bantul	12	90.870.049,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Persentase)	98	292.626.500,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul	98	1.174.450.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18.00	292.626.500,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		18.00	1.174.450.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengisian Kebutuhan Formasi ASN (%) Peta Kompetensi ASN (%) Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin (%)	81 12 100	7.797.345.080,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			49.408.668.600,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keakuratan Data ASN (Persentase)	95	1.239.742.080,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		95	3.930.286.600,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	7.687.500,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pemerintah Kab. Bantul	1	16.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2	919.556.900,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kab. Bantul, Pemerintah Kab. Bantul	2	3.552.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	396	238.450.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kab. Bantul	402	228.045.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	25	74.047.680,00	(Kapanrwon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transter Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiliitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	BKPSDM Kab. Bantul, Pemerintah Kab. Bantul	25	134.241.600,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional (Persentase)	80	750.100.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabiliitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		80	1.298.636.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	800	657.225.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transter Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiliitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kab. Bantul	800	978.110.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	800	92.875.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kab. Bantul	800	320.526.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Persentase)	12	5.004.178.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		15	40.526.175.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	16	4.750.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	PNS	40.00	15.250.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	2000	192.700.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kab. Bantul	500.00	282.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	80	442.170.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	PNS yang akan menempuh pendidikan lanjut	90	140.250.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	10	4.350.308.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN, ASN Kab. Bantul, ASN Kabupaten Bantul, PNS	10	39.989.488.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	4950	14.250.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	PNS yang menduduki Jabatan Fungsional	5250	99.187.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian (Persentase)	90	803.325.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		90	3.653.571.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
								NASIONAL	DAERAH						
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	9149	299.692.500,00	(Kapanewon Banrul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kabupaten Bantul	9149	177.750.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	896	434.632.500,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kabupaten Bantul	896	3.243.006.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	141	69.000.000,00	(Kapanewon Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kabupaten Bantul	139	232.815.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			375.664.000,00							851.567.556,00			
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Sesuai dengan Road Map SiDa (%)	100	375.664.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	851.567.556,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SiDa (%)	100	136.687.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			Kabupaten Bantul	2	339.161.256,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	2	136.687.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi					512.406.300,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kegiatan pada roadmap SiDa yang terlaksana (%)	100	238.976.500,00		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bupati, Wabup dan akademisi, Masyarakat, Perangkat Daerah dan akademisi dengan lokus riset di Kabupaten Bantul, PD, masyarakat dan dunia pendidikan, Reviewer JRD	1	469.168.875,00
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	202.351.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	43.237.425,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1	36.625.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pelaku industri dan inovator di Kabupaten Bantul					
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			12.570.261.629,00							57.257.810.746,00			
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH			12.570.261.629,00							57.257.810.746,00			
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	83	11.159.622.209,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		95	45.458.219.480,00	Inspektorat Daerah		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	95	24.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			10.000.000,00	Inspektorat Daerah		



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.00	16.000.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	6.00	8.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	8.250.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	6	2.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah (%)	100	9.736.754.736,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	9.053.077.178,00	Inspektorat Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53.00	9.645.394.736,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	53.00	8.913.577.178,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrtasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	81.460.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	12	138.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22	9.900.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	22	1.500.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	274.822.000,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	95	2.563.780.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	12.050.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		2	4.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	32	262.772.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		Inspektorat, Inspektorat Bantul	33	2.559.780.000,00
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	95	612.729.905,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	95	30.500.687.302,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	2.553.460,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		10	7.840.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	21	90.834.945,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		inspektorat, Inspektorat, Inspektorat	22	5.506.920.000,00
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	25.00	17.485.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	27	144.090.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.00	44.555.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	9	28.857.302,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.00	7.500.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	6	8.700.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	22	30.250.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	22	54.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	170	378.491.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	180	24.568.060.000,00	Inspektorat Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2500	35.210.500,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	2500	122.220.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	5.850.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	12	60.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	95	299.272.968,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		95	1.847.400.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	6.000.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	12	30.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	49.350.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	4	80.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24	243.922.968,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	24	1.737.400.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	95	211.792.600,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		95	1.483.275.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23	176.792.600,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	23	1.285.670.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	35.000.000,00	(Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	1	197.605.000,00	Inspektorat Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan yang Berlaku (%)	14	232.700.000,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	2.615.090.052,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal (%)	100	219.950.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi				
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	16	64.262.500,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah , Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan, Perangkat Daerah	16	573.010.052,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	89	25.200.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan, Perangkat Daerah Penghasil	89	1.021.440.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	204	18.787.500,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah	204	312.420.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	100	29.350.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pengampu DAK, Perangkat Daerah	100	507.650.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	42	21.650.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pemerintah Kalurahan di Kabupaten Bantul	42	21.950.000,00	Inspektorat Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	4.250.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pemerintah Daerah	1	19.340.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	4	56.450.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transter Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Auditee, Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, dan Pemerintah Kalurahan	4	104.680.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti (%)	100	12.750.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	54.600.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	1.00	4.250.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Auditee	1.00	24.640.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	10.00	8.500.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Auditee	10.00	29.960.000,00	Inspektorat Daerah
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko (%)	30	1.177.939.420,00			Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			9.184.501.214,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan (%)	80	27.560.000,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		85	476.971.214,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendas)	6	22.460.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transter Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat	6	349.560.000,00	Inspektorat Daerah



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	5.100.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Auditee	2	127.411.214,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase laporan pendampingan dan asistensi (%)	100	1.150.379.420,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Inspektorat, Perangkat Daerah	100	8.707.530.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	14	7.280.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		14	333.140.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	29	8.250.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		Perangkat Daerah, Perangkat Daerah	29	291.160.000,00
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	36	1.105.749.420,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pemerintah Daerah , Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kalurahan, dan Unsur Masyarakat	36	7.626.950.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	16	29.100.000,00	(KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		Perangkat Daerah	16	456.280.000,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			61.082.504.215,00							123.417.361.155,00	
	7.01	KECAMATAN			61.082.504.215,00							123.417.361.155,00	
	1. 7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	82	56.218.347.279,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			82.723.452.672,00	Kapanewon Pandak



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	81								Kapanewon Jetis	
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	82								Kapanewon Sanden	
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	87								Kapanewon Sedayu	
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	81								Kapanewon Imogiri	
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	81								Kapanewon Kretek	
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	87								Kapanewon Srandakan	
			Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	87								Kapanewon Banguntapan	
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	82								Kapanewon Bambanglipuro	
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	87								Kapanewon Dlingo	
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	84								Kapanewon Piyungan	
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	87								Kapanewon Kasihan	
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	81								Kapanewon Pleret	
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	91								Kapanewon Sewon	
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	88								Kapanewon Pundong	
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	81								Kapanewon Pajangan	
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	88								Kapanewon Bantul	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	100	103.135.000,00	(Kapanewon Dlingo, Dlingo)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	100	320.175.000,00	Kapanewon Dlingo	
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				100		Kapanewon Imogiri	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (Persentase)	100		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)					100		Kapanewon Piyungan
			capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	88		(kapanewon Pundong, Pundong)					89		Kapanewon Pundong



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)	100		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				100		Kapanewon Banguntapan	
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)	100		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				100		Kapanewon Srandakan	
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	100		(Kapanewon Sewon, Panggungharjo, Kec. Sewon)				100		Kapanewon Sewon	
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)	100		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				100		Kapanewon Sedayu	
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	100		(Kapanewon Sanden, Sanden)				100		Kapanewon Sanden	
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)	81		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				82		Kapanewon Pajangan	
			Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)	100		(Kapanewon Kretek, Kretek)				100		Kapanewon Kretek	
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	100		(Kapanewon Pandak, Pandak)				100		Kapanewon Pandak	
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)	100		(Kapanewon Bantul, Bantul, Kec. Bantul)				100		Kapanewon Bantul	
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)				100		Kapanewon Pleret	
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)	95		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				95		Kapanewon Kasihan	
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (Persentase)	100		(KAPANEWON JETIS, Jetis)				100		Kapanewon Jetis	
			Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)	100		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				100		Kapanewon Bambanglipuro	
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	53.660.000,00	(kapanewon pundong, Pundong)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	7	161.900.000,00	Kapanewon Pundong	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.00		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				7.00		Kapanewon Piyungan	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				7		Kapanewon Dlingo	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.00		(Kapanewon imogiri, Imogiri, Kec. Imogiri)				7.00		Kapanewon Imogiri	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				7		Kapanewon Pandak	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.00		(Kapanewon Kretek, Kretek)				7.00		Kapanewon Kretek	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.00		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				7.00		Kapanewon Bambanglipuro	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
								NASIONAL	DAERAH						
	7.01.01.2.01.0002		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.00		(KAPANEWON JETIS, Jetis)				Kapanewon Jetis	7.00		Kapanewon Jetis		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				ASN	7		Kapanewon Kasihan		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.00		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)				Aparatur Kapanewon	7.00		Kapanewon Pleret		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.00		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Aparat Kapanewon	7.00		Kapanewon Pajangan		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				ASN Kapanewon Sanden	6.00		Kapanewon Sanden		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.00		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon	7.00		Kapanewon Sedayu		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.00		(kapanewon sewon, Sewon)				ASN kapanewon	7		Kapanewon Sewon		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Kapanewon Srandakan	7		Kapanewon Srandakan		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.00		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				ASN kapanewon	7.00		Kapanewon Banguntapan		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6		1.500.000,00				(Kapanewon Bantul, Bantul)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kapanewon Bantul
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	47.975.000,00	(Kapanewon Kretek, Kretek)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publiik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kapanewon Kretek	5	152.275.000,00	Kapanewon Kretek		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)								Kapanewon Bambanglipuro		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.00	(Kapanewon Jetis, Jetis)								Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro	5	Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	(Kapanewon Kasihan, Kasihan)								Kapanewon Kasihan	1	Kapanewon Kasihan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.00	(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)								Aparatur kapanewon	5.00	Kapanewon Pleret
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.00	(Kapanewon Pajangan, Pajangan)								Aparat Kapanewon	5.00	Kapanewon Pajangan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.00	(Kapanewon Sanden, Sanden)								ASN Kapanewon Sanden	5.00	Kapanewon Sanden
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	(Kapanewon Dlingo, Dlingo)								Pegawai Kapanewon Dlingo	5	Kapanewon Dlingo



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				Kapanewon	5.00		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.00		(kapanewon sewon, Sewon)				ASN kapanewon	5		Kapanewon Sewon
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				ASN Kapanewon Srandakan	5		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.00		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				Kapanewon Banguntapan	5.00		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		(kapanewon pundong, Pundong)				kapanewon pundong	5		Kapanewon Pundong
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.00		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				Aparatur Kapanewon Piyungan	5.00		Kapanewon Piyungan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon	5		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Kapanewon Pandak	5		Kapanewon Pandak
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Aparat Kapanewon	4		Kapanewon Bantul
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%)	100	47.036.177.422,00	(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Puhlik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	44.529.446.961,00	Kapanewon Banguntapan
			Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)					100		Kapanewon Imogiri
			capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah (%)	100		(Kapanewon Pandak, Pandak)					100		Kapanewon Pandak
			Capaian Kinerja Pengadministrsian Keuangan Perangkat Daerah (%)	100		(Kapanewon Bantul, Bantul)					100		Kapanewon Bantul
			Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%)	100		(Kapanewon Kretek, Kretek)					100		Kapanewon Kretek
			Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan perangkat Daerah (%)	100		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah (Persentase)	100		(KAPANEWON JETIS, Jetis)					100		Kapanewon Jetis
			Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%)	100		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)					100		Kapanewon Kasihan
			Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah (%)	100		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Pleret
			Capaian kinerja pengadministrasia n keuangan perangkat daer (%)	100		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)					100		Kapanewon Pajangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (Persentase)	85		(Kapanewon Sanden, Sanden)					85		Kapanewon Sanden
			Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%)	100		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)					100		Kapanewon Sedayu
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah (Persentase)	90		(Kapanewon Sewon, Panggungharjo, Kec. Sewon)					90		Kapanewon Sewon
			Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (Persentase)	100		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)					100		Kapanewon Dlingo
			capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (Persentase)	88		(kapanewon pundong, Pundong)					89		Kapanewon Pundong
			Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persentase)	100		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)					100		Kapanewon Piyungan
			Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%)	100		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Srandakan
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19.00	46.174.442.422,00	(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiliitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	PNS Kapanewon Piyungan	19.00	42.990.015.947,00	Kapanewon Piyungan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				ASN Kapanewon Dlingo	20		Kapanewon Dlingo
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				ASN Kapanewon	20.00		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				ASN Kapanewon	21		Kapanewon Pandak
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19		(Kapanewon Bantul, Bantul)				ASN Kapanewon	19		Kapanewon Bantul
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19.00		(Kapanewon Kretek, Kretek)				ASN Kapanewon Kretek	19.00		Kapanewon Kretek
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				ASN di Kapanewon Bambanglipuro	19		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				ASN Kapanewon Jetis	18.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				ASN	20		Kapanewon Kasihan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24.00		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)				ASN Kapanewon	26.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				ASN Kapanewon	20		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				ASN Kapanewon Sanden	19.00		Kapanewon Sanden



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.02.0002		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon	20		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20.00		(Panggungharjo, Sewon)				ASN Kapanewon	20.00		Kapanewon Sewon
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				ASN Kapanewon Srandakan	18.00		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				ASN kapanewon	24.00		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20.00		(kapanewon pundong, Pundong)				ASN kapanewon pundong	20.00		Kapanewon Pundong
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.00	792.960.000,00	(Kapanewon Sanden, Sanden)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kapanewon Sanden	2.00	1.450.281.014,00	Kapanewon Sanden
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.00		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				PNS Kapanewon Piyungan	3.00		Kapanewon Piyungan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				Pegawai Kapanewon Dlingo	3		Kapanewon Dlingo
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				ASN Kapanewon	4.00		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				ASN /Aparat Kapanewon	12		Kapanewon Pandak
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Aparat kapanewon, Aparat Kapanewon	12		Kapanewon Bantul
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2		(Kapanewon Kretek, Kretek)				ASN Kapanewon Kretek	2		Kapanewon Kretek
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	13		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Pengelola keuangan dan barang , , Pengelola website Kapanewon	13		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				ASN Kapanewon Jetis	12.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				ASN	4		Kapanewon Kasihan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.00		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)				Aparatur Kapanewon	3.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Aaparat Kapanewon, Aparat Kapanewon	12		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon	4		Kapanewon Sedayu



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.00		(Pendowoharjo, Sewon)				ASN Kapanewon	0.00		Kapanewon Sewon



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.02.0007		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	11.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				ASN Kapanewon Srandakan	11		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12.00		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				ASN kapanewon	12.00		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		(kapanewon pundong, Pundong)				ASN kapanewon pundong	12		Kapanewon Pundong
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22	68.775.000,00	(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	PSN Kapanewon Piyungan	22	89.150.000,00	Kapanewon Piyungan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				Pegawai Kapanewon Dlingo	22		Kapanewon Dlingo
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				Kapanewon Imogiri	22.00		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Kapanewon Pandak	22		Kapanewon Pandak
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Aparat Kapanewon	22		Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Kapanewon Kretek	22		Kapanewon Kretek
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				ASN, Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait	22		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				Kapanewon Jetis	22.00		Kapanewon Jetis



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22.00		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)				Aparatur kapanewon	22.00		Kapanewon Pleret



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Aparat Kapanewon	22		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				ASN Kapanewon Sanden	22.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon	22		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22.00		(Panggungharjo, Sewon)				ASN Kapanewon	0.00		Kapanewon Sewon
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				ASN Kapanewon Srandakan	22		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22.00		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				ASN kapanewon	22.00		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22		(kapanewon pundong, Pundong)				kapanewon pundong	22		Kapanewon Pundong
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Kapanewon	22		Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	34.960.000,00	(Kapanewon Imogiri, Imogiri)		Memperkuat Stabilitas	Pemantapan		100	51.607.500,00	Kapanewon Imogiri
			Capaian Kinerja Pengadministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persentase)	100		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)		Polhukhankam dan	layanan publik		100		Kapanewon Piyungan
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Persentase)	100		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)		Transformasi	berbasis teknologi		100		Kapanewon Dlingo
			capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (Persentase)	100		(kapanewon pundong, Pundong)		Pelayanan Publik	informasi		100		Kapanewon Pundong



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)	100		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)					100		Kapanewon Banguntapan
			Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Srandakan
			Capaian kinerja pengelolaan kepegawaian (Persentase)	90		(Kapanewon Sewon, Panggungharjo, Kec. Sewon)					90		Kapanewon Sewon
			Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah (%)	100		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)					100		Kapanewon Sedayu
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (Persentase)	100		(Kapanewon Sanden, Sanden)					100		Kapanewon Sanden
			Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah (%)	100		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)					100		Kapanewon Pajangan
			Capaian Kinerja Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Pleret
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)					12		Kapanewon Kasihan
			Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (Persentase)	100		(KAPANEWON JETIS, Jetis)					100		Kapanewon Jetis
			Capaian Kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian (%)	100		(Kapanewon Kretek, Kretek)					100		Kapanewon Kretek
			Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)	100		(Kapanewon Bantul, Bantul)					100		Kapanewon Bantul
			capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100		(Kapanewon Pandak, Pandak)					100		Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.00	34.960.000,00	(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	PNS Kapanewon Piyungan	1	51.607.500,00	Kapanewon Piyungan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				ASN Kapanewon Dlingo	1		Kapanewon Dlingo
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri, Kec. Imogiri)				Kapanewon Imogiri	1.00		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4.00		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Kapanewon Pandak	4.00		Kapanewon Pandak
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Aparat Kapanewon, Aparat Kapanewon	4		Kapanewon Bantul
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Masyarakat Kapanewon kretek	2		Kapanewon Kretek
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				ASN Kapanewon Bambanglipuro	4		Kapanewon Bambanglipuro



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				Kapanewon Jetis	4.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Kapanewon	4		Kapanewon Kasihan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.00		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)				Aparatur Kapanewon	2.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Aparat Kapanewon	4		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				ASN Kapanewon Sanden	1.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon	4		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4.00		(Pangunharjo, Sewon)				ASN Kapanewon	4		Kapanewon Sewon
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				ASN Kapanewon Srandakan	4		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4.00		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				ASN kapanewon	4.00		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4		(kapanewon pundong, Pundong)				kapanewon pundong	4		Kapanewon Pundong
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)	100	2.697.767.520,00	(Kapanewon Kretek, Kretek)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publiik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	14.785.689.888,00	Kapanewon Kretek
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)	100		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)					100		Kapanewon Piyungan
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	97		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)					98		Kapanewon Imogiri
			capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)	100		(Kapanewon Pandak, Pandak)					100		Kapanewon Pandak
			Capaian kinerja Pengelolaan administrasi umum (%)	100		(Kapanewon Bantul, Bantul)					100		Kapanewon Bantul
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)	100		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)	100		(KAPANEWON JETIS, Jetis)					100		Kapanewon Jetis
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)	95		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)					95		Kapanewon Kasihan
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	100		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Pleret
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum (%)	100		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)					100		Kapanewon Pajangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
	7.01.01.2.06.0001		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)	100		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)					100		Kapanewon Sedayu
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)	100		(Kapanewon sewon, Panggungharjo, Kec. Sewon)					100		Kapanewon Sewon
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)	100		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Srandakan
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)	100		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)					100		Kapanewon Banguntapan
			capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (Persentase)	88		(kapanewon pundong, Pundong)					89		Kapanewon Pundong
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)	100		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)					100		Kapanewon Dlingo
			Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (Persentase)	95		(Kapanewon Sanden, Sanden)					95		Kapanewon Sanden
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		4					91.961.537,00		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Bantul, Bantul)					Kapanewon	4	Kapanewon Bantul
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)	Kapanewon Pandak					4	Kapanewon Pandak	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00	(Kapanewon Imogiri, Imogiri)	Kapanewon Imogiri					4.00	Kapanewon Imogiri	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	(Kapanewon Dlingo, Dlingo)	Pegawai Kapanewon Dlingo					4	Kapanewon Dlingo	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00	(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)	ASN Kapanewon Piyungan					4	Kapanewon Piyungan	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	(kapanewon pundong, Pundong)	kapanewon pundong					4	Kapanewon Pundong	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00	(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)	kapanewon					4.00	Kapanewon Banguntapan	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00	(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)	Kapanewon Srandakan					4	Kapanewon Srandakan	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00	(Panggungharjo, Sewon)	Aparatur dan masyarakat					4	Kapanewon Sewon	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon	4		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				Kapanewon Sanden	12.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Kapanewon	4		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)				Aparatur Kapanewon	4.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				Kapanewon Jetis	4.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Aparat, Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait	10		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Masyarakat Kapanewon Kretek	4.00		Kapanewon Kretek
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	434.785.568,00	(kapanewon pundong, Pundong)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Pubhlik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	kapanewon pundong	4	1.100.796.375,00	Kapanewon Pundong
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				kapanewon	4.00		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Kapanewon Srandakan	4		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00		(Panggungharjo, Sewon)				Aparatur dan masyarakat	4		Kapanewon Sewon
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon	4		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				ASN Kapanewon Sanden	25.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Kapanewon	4		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)				Aparatur kapanewon	4.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Kapanewon Kasihan	15		Kapanewon Kasihan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				Pegawai Kapanewon Dlingo	4		Kapanewon Dlingo



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				ASN Kapanewon Piyungan	4		Kapanewon Piyungan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				Kapanewon Jetis	4.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Aparat Kapanewon Bambanglipuro, Aparat, Masyarakat dan instansi terkait, Aparat, Masyarakat dan Instansi terkait, Aparat, masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait	4		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Masyarakat Kapanewon Kretek	4		Kapanewon Kretek
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Kapanewon , Kapanewon	4		Kapanewon Bantul
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Kapanaewon Pandak	4		Kapanewon Pandak
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				Kapanewon	4.00		Kapanewon Imogiri
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	138.861.000,00	(Kapanewon Kasihan, Kasihan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kapanewon Kasihan	4	364.058.612,00	Kapanewon Kasihan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Kapanewon Pandak	4		Kapanewon Pandak
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		(kapanewon pundong, Pundong)				kapanewon pundong	4		Kapanewon Pundong
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				kapanewon	4.00		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Kapanewon Srandakan	4		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.00		(Panggungharjo, Sewon)				ASN Kapanewon	4		Kapanewon Sewon
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon	4		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				ASN Kapanewon Sanden	17.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Kapanewon	4		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.00		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)				Aparatur kapanewon	4.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				Kapanewon Jetis	4.00		Kapanewon Jetis



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
								NASIONAL					DAERAH			
	7.01.01.2.06.0005		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	160.467.821,00	(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparat, Masyarakat dan Instansi terkait	15	Kapanewon Bambanglipuro				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Masyarakat Kapanewon Kretek	4	Kapanewon Kretek				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Aparat dan lingkungan Kapanewon	4	Kapanewon Bantul				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				Kapanewon Imogiri	2.00	Kapanewon Imogiri				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				Pegawai Kapanewon Dlingo	4	Kapanewon Dlingo				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				ASN Kapanewon Piyungan	4.00	Kapanewon Piyungan				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		(kapanewon pundong, Pundong)				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	kapanewon pundong	4	404.988.318,00	Kapanewon Pundong
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)							kapanewon	4.00	Kapanewon Banguntapan	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)							Kapanewon Srandakan	4	Kapanewon Srandakan	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)							Pegawai Kapanewon Dlingo	4	Kapanewon Dlingo	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)							Kapanewon	4	Kapanewon Imogiri	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)							Kapanewon Pandak	4	Kapanewon Pandak	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Bantul, Bantul)							Kapanewon Bantul	4	Kapanewon Bantul	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Kretek, Kretek)							Masyarakat Kapanewon Kretek	4	Kapanewon Kretek	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)							Aparat, Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait	4	Kapanewon Bambanglipuro	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)							Kapanewon Jetis	4.00	Kapanewon Jetis	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)							Kapanewon	2	Kapanewon Kasihan	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.00		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)							Aparatur kapanewon	4.00	Kapanewon Pleret	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)							Kapanewon	4	Kapanewon Pajangan	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
7.01.01.2.06.0006			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				ASN Kapanewon Sanden	12.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		(Panggungharjo, Sewon)				Aparatur dan Kapanewon	4		Kapanewon Sewon
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon	4		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.00		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				ASN Kapanewon Piyungan	4.00		Kapanewon Piyungan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	53.800.000,00	(Kapanewon Dlingo, Dlingo)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publiik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kapanewon Dlingo	1	103.500.000,00	Kapanewon Dlingo
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.00		(kapanewon pundong, Pundong)				kapanewon pundong	1.00		Kapanewon Pundong
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				kapanewon	2		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Kapanewon Srandakan	1		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		(Panggungharjo, Sewon)				ASN Kapanewon	1		Kapanewon Sewon
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon dan Masyarakat	3		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				ASN Kapanewon Sanden	12.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Kapanewon	12		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.00		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)				Aparatur dan masyarakat	1.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Masyarakat, Anak-anak, Kapanewon Kasihan	4		Kapanewon Kasihan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				Kapanewon Jetis	2.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Aparat dan Masyarakat, Masyarakat	2		Kapanewon Bambanglipuro



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
								NASIONAL	DAERAH						
	7.01.01.2.06.0008		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Masyarakat Kapanewon Kretek	1		Kapanewon Kretek		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	(Kapanewon Bantul, Bantul)			Kapanewon	1		Kapanewon Bantul				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)			Masyarakat Kapanewon	1		Kapanewon Pandak				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.00	(Kapanewon Imogiri, Imogiri)			Kapanewon	3.00		Kapanewon Imogiri				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.00	(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)			ASN Kapanewon Piyungan	1.00		Kapanewon Piyungan				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.00	10.800.000,00	(Kapanewon Sanden, Sanden)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat	1.00	14.600.000,00	Kapanewon Sanden		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Tamu Kapanewon	12		Kapanewon Kasihan		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Kapanewon Srandakan	12		Kapanewon Srandakan		
			7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	1.697.643.844,00	(Kapanewon Imogiri, Imogiri)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kapanewon	58.00	12.258.292.583,00	Kapanewon Imogiri
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	345		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				ASN kapanewon dlingo, Kapanewon Dlingo	345		Kapanewon Dlingo
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	220.00				(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				ASN Kapanewon Piyungan, PSN Kapanewon Piyungan	250.00		Kapanewon Piyungan		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.00				(Kapanewon Sanden, Sanden)				ASN Kapanewon Sanden	3.00		Kapanewon Sanden		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24.00				(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				ASN Kapanewon Srandakan, Kapanewon Srandakan, Perjalanan Dinas ke Bali Tiket Pesawat Kelas Ekonomi YOGYAKARTA-DENPASAR	24		Kapanewon Srandakan		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	67		(kapanewon pundong, Pundong)			asn kapanewon pundong, ASN Kapanewon pundong, ASN Kapanewon Pundong, kapanewon, kalurahan dan masyarakat, kapanewon pundong, kalurahan dan masyarakat	67		Kapanewon Pundong			



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	65		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				kapanewon, kapanewon Banguntapan	70		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	382		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon, Masyarakat	382		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	128		(Panggungharjo, Sewon)				ASN dan masyarakat, ASN Kapanewon, ASN Kapanewon Sewon	128		Kapanewon Sewon
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	216		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Kapenwon, Masyarakat, Forkompinkap, Kapanewon, Kalurahan	216		Kapanewon Kasihan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	103		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				ASN dan Instansi terkait	103		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	61		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Masyarakat Kapanewon Kretek	61		Kapanewon Kretek
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	65		(Kapanewon Bantul, Bantul)				ASN Kapanewon Bantul, Kapanewon, Kapanewon Bantul, Masyakata kapanewon	65		Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Kapanewon Pandak	40		Kapanewon Pandak
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	355.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				ASN Kapanewon Jetis, Kapanewon Jetis	36.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	65		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Kapanewon	75		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	240.00		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)				Aparatur dan masyarakat, Aparatur kapanewon	250.00		Kapanewon Pleret
7.01.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.00	60.632.750,00	(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Arsip Kapanewon Piyungan, ASN Kapanewon Piyungan	1.00	210.950.500,00	Kapanewon Piyungan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		(kapanewon pundong, Pundong)				kapanewon pundong	1		Kapanewon Pundong
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.00		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				kapanewon	1.00		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Kapanewon Srandakan	1		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		(Panggungharjo, Sewon)				ASN Kapanewon dan Kalurahan	1		Kapanewon Sewon

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024												 THE ARBORNY OF NATURE AND CULTURE	
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon	1		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				ASN Kapanewon Sanden, Kalurahan se-Kapanewon Sanden	10.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Kapanewon	2		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.00		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)				Aparatur kapanewon, Aparatur Kapanewon	2.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Kapanewon Kasihan	2		Kapanewon Kasihan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				Kapanewon Jetis	1.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Aparat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait, Aparat, Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait	7		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Kapanewon Kretek	1		Kapanewon Kretek
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Kapanewon , Kapanewon Bantul	1		Kapanewon Bantul
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Kapanewon Pandak	1		Kapanewon Pandak
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				Kapanewon	2.00		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				Pegawai Kapanewon Dlingo	1		Kapanewon Dlingo
7.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.00	48.815.000,00	(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kapanewon Piyungan	1.00	58.190.000,00	Kapanewon Piyungan
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				Pegawai Kapanewon Dlingo	1		Kapanewon Dlingo
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				Kapanewon	2.00		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Masyarakat Kapanewon	1		Kapanewon Pandak
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Kapanewon	1		Kapanewon Bantul



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Masyarakat Kapanewon Kretek	4		Kapanewon Kretek
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Aparat dan Instansi terkait	4		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				ASN Kapanewon Jetis	1.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.00		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)				PPID	1.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Kapanewon	1		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				ASN Kapanewon Sanden	1.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Masyarakat	1		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		(ggu, Sewon)				ASN Kapanewon dan Kalurahan	1		Kapanewon Sewon
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Kapanewon Srandakan	1		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				kapanewon	1		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		(kapanewon pundong, Pundong)				ASN kapanewon pundong	2		Kapanewon Pundong
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Kapanewon Kasihan	2		Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah (%)	100	427.595.336,00	(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelavanan Puhlik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	3.703.840.628,00	Kapanewon Banguntapan
			capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daearah (%)	100		(Kapanewon Pandak, Pandak)					100		Kapanewon Pandak
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah (%)	100		(Kapanewon Bantul, Bantul)					100		Kapanewon Bantul
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah (%)	100		(Kapanewon Kretek, Kretek)					100		Kapanewon Kretek



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.07.0005		Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah (%)	100		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				100		Kapanewon Bambanglipuro	
			Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah (Persentase)	100		(Kapanewon Jetis, Jetis)				100		Kapanewon Jetis	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah (%)	95		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				95		Kapanewon Kasihan	
			Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)				100		Kapanewon Pleret	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah (%)	100		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				100		Kapanewon Pajangan	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah (%)	100		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				100		Kapanewon Sedayu	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah (Persentase)	100		(Kapanewon Sewon, Panggungharjo, Kec. Sewon)				100		Kapanewon Sewon	
			Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah (%)	100		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				100		Kapanewon Srandakan	
			Capaian Kinerja Penyediaan Barang Milik Daerah (Persentase)	100		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				100		Kapanewon Piyungan	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12	(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Aparat Kapanewon Bambanglipuro	6		Kapanewon Bambanglipuro		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.00	(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)				Aparatur kapanewon	1.00		Kapanewon Pleret		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	(Kapanewon Kretek, Kretek)				Masyarakat Kapanewon Kretek	3		Kapanewon Kretek		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.00	(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				kapanewon	2.00		Kapanewon Banguntapan		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.00	(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Kapanewon Srandakan	1		Kapanewon Srandakan		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	9	(Panggungharjo, Sewon)				Kapanewon Sewon	8		Kapanewon Sewon		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon	3		Kapanewon Sedayu		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Kapanewon	2		Kapanewon Pajangan		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	314.446.336,00	(Kapanewon Jetis, Jetis)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kapanewon Jetis	2.00	3.216.224.378,00	Kapanewon Jetis	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		(Kapanewon Bantul, Bantul)			Kapanewon	5		Kapanewon Bantul		



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.00		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				Peralaran dan Perlengkapan Kantor, Peralatan dan perlengkapan kantor, Peralatan dan Perlengkapan kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7		Kapanewon Piyungan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.00		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				kapanewon	6.00		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Kapanewon Srandakan	4		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		(Kapanewon Kretet, Kretek)				Masyarakat Kapanewon Kretek	4		Kapanewon Kretek
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		(Panggungharjo, Sewon)				ASN Kapanewon	4		Kapanewon Sewon
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon, Masyarakat	7		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Kapanewon	5		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.00		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)				Aparatur kapanewon	7.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kasihan	5		Kapanewon Kasihan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Masyarakat Kapanewon	4		Kapanewon Pandak
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	46.500.000,00	(Kapanewon Kasihan, Kasihan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kapanewon Kasihan	4	46.500.000,00	Kapanewon Kasihan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	3.265.819.021,00	(Kapanewon Bantul, Bantul)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	11.249.826.325,00	Kapanewon Bantul
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	100		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)					100		Kapanewon Imogiri
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (Persentase)	100		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)					100		Kapanewon Piyungan
			capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (Persentase)	100		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)					100		Kapanewon Dlingo
			capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Persentase)	100		(Kapanewon Pandak, Pandak)					100		Kapanewon Pandak



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100		(Kapanewon Kretek, Kretek)					100	Kapanewon Kretek	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)	100		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)					100	Kapanewon Bambanglipuro	
			Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100		(Kapanewon Jetis, Jetis)					100	Kapanewon Jetis	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	95		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)					95	Kapanewon Kasihan	
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)					100	Kapanewon Pleret	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)					100	Kapanewon Pajangan	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah (Persentase)	100		(Kapanewon Sanden, Sanden)					100	Kapanewon Sanden	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)					100	Kapanewon Sedayu	
			Capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100		(Kapanewon Sewon, Panggungharjo, Kec. Sewon)					100	Kapanewon Sewon	
			Capaian Kinerja Pelayanan Umum Kantor (%)	100		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)					100	Kapanewon Srandakan	
			Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)					100	Kapanewon Banguntapan	
			capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Persentase)	100		(kapanewon pundong, Pundong)					100	Kapanewon Pundong	
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	643.900.000,00	(Kapanewon Kasihan, Kasihan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kapanewon Kasihan	12	1.420.400.000,00	Kapanewon Kasihan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				Pegawai Kapanewon Dlingo	12		Kapanewon Dlingo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				Kapanewon	12.00		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Kapanewon Pandak	12		Kapanewon Pandak
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Kapanewon Bantul	12		Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Masyarakat Kapanewon Kretek	2		Kapanewon Kretek



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Aparat, Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait	12		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laoran)	12.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				Kapanewon Jetis	12.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				Kapanewon Piyungan	12		Kapanewon Piyungan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)				Aparatur kapanewon	12.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Kapanewon	12		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laoran)	12.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				ASN Kapanewon Sanden, Kapanewon Sanden	12.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon	12		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		(Panggungharjo, Sewon)				Kapanewon, Kapanewon	12		Kapanewon Sewon
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00		(Kapanewon Srandakan, Srandakan)				Kapanewon Srandakan	12		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				kapanewon Banguntapan	12.00		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		(kapanewon pundong, Pundong)				kapanewon pundong, Kapanewon Pundong	12		Kapanewon Pundong
7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.00	240.975.000,00	(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Peralatan dan peralatan rumah tangga Kapanewon Piyungan, Peralatan kantor Kapanewon Piyungan	4	768.982.000,00	Kapanewon Piyungan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				Kapanewon Dlingo	4		Kapanewon Dlingo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laoran)	12.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				Kapanewon	12.00		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Kapanewon Pandak	4		Kapanewon Pandak



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Kapanewon	12		Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		(Kapanewon Kretek, KAB. BANTUL)				Masyarakat Kapanewon Kretek	1		Kapanewon Kretek
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Aparat dan Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro	4		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				Kapanewon Jetis, perlengkapan Kantor Kapanewon Jetis	4.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Kapanewon	10		Kapanewon Kasihan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.00		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)				Aparatur kapanewon	4.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Kapanewon	4		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				Kapanewon Sanden	18.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon	4		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		(Panggungharjo, Sewon)				Kapanewon, Kapanewon	4		Kapanewon Sewon
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Kapanewon Srandakan	12		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.00		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				kapanewon Banguntapan	4.00		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		(kapanewon pundong, Pundong)				kapanewon pundong, perlengkapan kantor kapanewon pundong	4		Kapanewon Pundong
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.00	2.380.944.021,00	(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publiik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparatur kapanewon, Aparatur Kapanewon	4.00	9.060.444.325,00	Kapanewon Pleret
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.00		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				Non ASN Kapanewon Piyungan	4		Kapanewon Piyungan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				Kapanewon Dlingo, penyediaan tenaga kebersihan, keamanan dan pelayanan umum Kapanewon	5		Kapanewon Dlingo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)					6.00		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Kapanewon Pandak, Masyarakat kapanewon, Masyarakat Kapanewon, Pegawai Non ASN, Tenaga Non ASN	4		Kapanewon Pandak
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Kapanewon Bantul, Pegawai Non ASN	5		Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Masyarakat Kapanewon Kretek, Masyarakat Kretek	4		Kapanewon Kretek
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Pegawai Non ASN, Tenaga jasa angkut sampah, Tenaga non ASN di Kapanewon Bambanglipuro, Tenaga Non ASN di Kapanewon Bambanglipuro, Tim Pengadaan Pegawai Non ASN	4		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				Kapanewon Jetis, Tenaga Administrasi Kapanewon Jetis, Tenaga Keamanan Kapanewon Jetis, Tenaga Kebersihan Kapanewon Jetis	4.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Kapanewon Kasihan	5		Kapanewon Kasihan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Tenaga Non ASN Kapanewon	4		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				Tenaga Non ASN	12.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon	4		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		(Panggungharjo, Sewon)				tenaga administrasi perkantoran, tenaga keamanan, tenaga kebersihan	5		Kapanewon Sewon
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Non ASN Kapanewon Srandakan	4		Kapanewon Srandakan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.00		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				kapanewon, kapanewon Banguntapan	6.00		Kapanewon Banguntapan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)							
								NASIONAL	DAERAH										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		(Kapanewon pundong, Pundong)				Kapanewon pundong, Tenaga Administrasi, kapanewon pundong, tenaga keamanan Kap. Pundong, Tenaga kebersihan	5		Kapanewon Pundong						
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)	100	2.652.892.980,00	(Kapanewon Bantul, Bantul)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Puhlik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	8.082.866.370,00	Kapanewon Bantul						
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)	100		(Kapanewon Kretek, Kretek)					100		Kapanewon Kretek						
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	95		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)					95		Kapanewon Bambanglipuro						
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Persentase)	100		(Kapanewon Jetis, Jetis)					100		Kapanewon Jetis						
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)	95		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)					95		Kapanewon Kasihan						
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (Persentase)	100		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)					100		Kapanewon Dlingo						
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Pleret						
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)	100		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)					100		Kapanewon Pajangan						
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (Persentase)	100		(Kapanewon Sanden, Sanden)					100		Kapanewon Sanden						
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)	100		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)					100		Kapanewon Sedayu						
			Capaian kinerja pemeliharaan milik daerah (%)	100		(Kapanewon Sewon, Panggungharjo, Kec. Sewon)					100		Kapanewon Sewon						
			capaian kinerja pemeliharaan (%)	95		(Kapanewon Pandak, Pandak)					95		Kapanewon Pandak						
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Persentase)	100		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)					100		Kapanewon Piyungan						
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)	100		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)					100		Kapanewon Banguntapan						
			capaian kinerja pemeliharaanbarang milik daerah (Persentase)	88		(kapanewon pundong, Pundong)					89		Kapanewon Pundong						
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	97		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)					98		Kapanewon Imogiri						
			Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)	100		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Srandakan						
			7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10					2.236.024.040,00	(Panggugharjo, Sewon)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Puhlik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	kendaraan dinas, Kendaraan dinas	10	5.542.744.400,00	Kapanewon Sewon
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.00						(Kapanewon Jetis, Jetis)			Kapanewon Jetis	8.00		Kapanewon Jetis	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)			Kendaraan Dinas	7		Kapanewon Bambanglipuro	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)			Kapanewon Piyungan	8		Kapanewon Piyungan	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)			Kendaraan dinas, Kendaraan Dinas	7		Kapanewon Dlingo	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)			Kapanewon	7.00		Kapanewon Imogiri	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		(Kapanewon Pandak, Luar Wilayah)			Kapanewon Pandak	7		Kapanewon Pandak	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9		(Kapanewon Bantul, Bantul)			Kapanewon Bantul	9		Kapanewon Bantul	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		(Kapanewon Kretek, Kretek)			Masyarakat Kapanewon Kretek	8		Kapanewon Kretek	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)			Kapanewon Kasihan	7		Kapanewon Kasihan	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.00		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)			Aparatur kapanewon	9.00		Kapanewon Pleret	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)			Kapanewon	8		Kapanewon Pajangan	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)			ASN Kapanewon Sanden, Kapanewon Sanden	6.00		Kapanewon Sanden	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.00		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)			Aparatur kapanewon	6.00		Kapanewon Sedayu	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)			Kapanewon Srandakan	8		Kapanewon Srandakan	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9.00		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)			kapanewon	9.00		Kapanewon Banguntapan	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.00		(Kapanewon pundong, Pundong)				Kapanewon pundong, kendaraan dinas Kapanewon pundong, Kendaraan dinas Kapanewon pundong	7.00		Kapanewon Pundong
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	33.475.000,00	(Kapanewon Kasihan, Kasihan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kapanewon Kasihan	10	116.250.000,00	Kapanewon Kasihan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				Kapanewon Jetis	10.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Kapanewon Bantul	10		Kapanewon Bantul
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	383.393.940,00	(Kapanewon Sanden, Sanden)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kapanewon Sanden	1.00	2.423.871.970,00	Kapanewon Sanden
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Kapanewon	3		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.00		(Pleret, Kap. Pleret, KAB. BANTUL)				Aparatur Kapanewon	2.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Kapanewon Kasihan	3		Kapanewon Kasihan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				Kapanewon Jetis	2.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		(Panggungharjo, Sewon)				Kapanewon	2		Kapanewon Sewon
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Masyarakat Kapanewon Kretek	1		Kapanewon Kretek
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		(Kapanewon Bantul, Bantul, Kec. Bantul)				Kapanewon Bantul	2		Kapanewon Bantul
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Kapanewon , Kapanewon Pandak	3		Kapanewon Pandak
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				Kapanewon	8.00		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				Gedung dan Bangunan Kantor Kapanewon Dlingo	2		Kapanewon Dlingo
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.00		(Kalurahan Simartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				Kapanewon Piyungan	2		Kapanewon Piyungan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Aparat dan Masyarakat	4		Kapanewon Bambanglipuro



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Kapanewon Srandakan	2		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				kapanewon	1.00		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		(kapanewon pundong, Pundong)				kapanewon pundong	1		Kapanewon Pundong
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon, Masyarakat	2		Kapanewon Sedayu
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	95	695.806.200,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			3.540.053.857,00	Kapanewon Pleret
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	92									Kapanewon Pandak
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	95									Kapanewon Bambanglipuro
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	93									Kapanewon Banguntapan
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	92									Kapanewon Srandakan
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	91									Kapanewon Kretek
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	92									Kapanewon Sanden
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	97									Kapanewon Imogiri
			Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum (Persentase)	90									Kapanewon Sewon
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	93									Kapanewon Pundong
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	92									Kapanewon Sedayu
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	94									Kapanewon Piyungan
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	93									Kapanewon Jetis



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100									Kapanewon Dlingo
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	90									Kapanewon Pajangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100								Kapanewon Kasihan	
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	92								Kapanewon Bantul	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon (%)	90	506.215.800,00	(Kapanewon Sedayu, Sedayu)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Puhlik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	90	2.638.442.860,00	Kapanewon Sedayu	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon (%)	100		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)				100		Kapanewon Pleret	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon (Persentase)	100		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyunqan)				100		Kapanewon Piyungan	
			capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon (Persentase)	93		(kapanewon pundong, Pundong)				94		Kapanewon Pundong	
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon (%)	100		(Kapanewon Banguntapan, Banquntapan)				100		Kapanewon Banguntapan	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon (%)	100		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				100		Kapanewon Srandakan	
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon (Persentase)	91		(Kapanewon Sewon, Panggungharjo, Kec. Sewon)				91		Kapanewon Sewon	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (%)	100		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				100		Kapanewon Imogiri	
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon (Persentase)	90		(Kapanewon Pandak, Pandak)				90		Kapanewon Pandak	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon (%)	100		(Kapanewon Bantul, Bantul)				100		Kapanewon Bantul	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon (%)	100		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				100		Kapanewon Bambanglipuro	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon (Persentase)	100		(KAPANEWON JETIS, Jetis)				100		Kapanewon Jetis	
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon (%)	90		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				90		Kapanewon Kasihan	
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (Persentase)	100		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				100		Kapanewon Dlingo	
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon (%)	90		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				91		Kapanewon Pajangan	
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon (Persentase)	100		(Kapanewon Sanden, Sanden)				100		Kapanewon Sanden	
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon (%)	100		(Kapanewon Kretek, Kretek)				100		Kapanewon Kretek	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024												 THE HERITAGE OF NATURE AND CULTURE	
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4.00	170.697.900,00	(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiliitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	masyarakat kapanewon	4.00	556.583.760,00	Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4.00		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				Masyarakat Kapanewon Piyungan	4.00		Kapanewon Piyungan
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4		(kapanewon pundong, Pundong)				Forkopimkap kapanewon pundong	4		Kapanewon Pundong
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				Forkompimkap Kapanewon Dlingo	4		Kapanewon Dlingo
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				Kapanewon dan Kalurahan	4.00		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Perangkat Daerah dan Instansi terkait	4		Kapanewon Pandak
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Forkompinkap, Dinas/Instansi terkait	4		Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4.00		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Masyarakat Kapanewon Kretek	4.00		Kapanewon Kretek
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				3 Kalurahan di Kapanewon Bambanglipuro	4		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				Forkompimkap Kapanewon Jetis	4.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Forkompinkap , Kapanewon Kasihan, Masyarakat, Kapanewon Kasihan, Forkompinkap	4		Kapanewon Kasihan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4.00		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)				Masyarakat	4.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Forkompinkap, dinas/instansi terkait	4		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				Masyarakat Kapanewon Sanden	4.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Masyarakat	4		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4		(Sewon, Sewon)				Aparatur dan masyarakat	4		Kapanewon Sewon
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Forkompincam Kapanewon Srandakan	4		Kapanewon Srandakan
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.00	335.517.900,00	(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat Kapanewon Srandakan	7	2.081.859.100,00	Kapanewon Srandakan
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5.00		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				Masyarakat Kapanewon Piyungan	4.00		Kapanewon Piyungan
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	6		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				Dukuh dan Pamong Kalurahan, Pamong Kalurahan, Pamong Kalurahan	6		Kapanewon Dlingo
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	6.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				Kapanewon dan Kalurahan	6.00		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Kalurahan, Masyarakat Kapanewon	4		Kapanewon Pandak
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Kalurahan	4		Kapanewon Bantul



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Kalurahan se kapanewon Kretek, masyarakat kapanewon kretek, Masyarakat Kapanewon Kretek, Masyarakat Kretek 3 Kalurahan, 3 Kalurahan di Kapanewon Bambanglipuro Kapanewon Jetis, Kalurahan dan Masyarakat, Kapanewon Jetis, Kalurahan, Masyarakat Kalurahan, Kapanewon Kasihan	7		Kapanewon Kretek
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	6		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Masyarakat	6		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				Kapanewon Jetis, Kalurahan dan Masyarakat, Kapanewon Jetis, Kalurahan, Masyarakat Kalurahan, Kapanewon Kasihan	4.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Kapanewon Kasihan	4		Kapanewon Kasihan
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5.00		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)				Masyarakat	4.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	8		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Diukuh, Kalurahan, Dukuh, kalurahan, Dukungan kelancaran Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, Kalurahan	7		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				Masyarakat Kapanewon Sanden	4.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Aparatur Kapanewon dan Kalurahan, Masyarakat	4		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4		(Sewon, Sewon)				Aparatur dan masyarakat, Aparatur dan masyarakat	4		Kapanewon Sewon
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				kalurahan dan kapanewon	4		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7		(kapanewon pundong, Pundong)				kapanewon pundong, kapanewon pundong dan kalaurahan , Kapanewon Pundong dan kalurahan , kapanewon pundong, kalurahan dan masyarakat, Kapanewon Pundong, kalurahan dan masyarakat	6		Kapanewon Pundong

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024												 THE ARBOREUM OF NATURE AND CULTURE	
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	capaian kinerja pelayanan kapanewon (Persentase)	93	189.590.400,00	(kapanewon pundong, Pundong)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		94	901.610.997,00	Kapanewon Pundong
			Capaian kinerja pelayanan kapanewon (Persentase)	92		(Kapanewon Sanden, Sanden)					93		Kapanewon Sanden
			Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon (Angka)	94		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)					95		Kapanewon Piyungan
			Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon (Angka)	86		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)					87		Kapanewon Dlingo
			Capaian Kinerja Pelayanan Umum (%)	100		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)					100		Kapanewon Imogiri
			Capaian kinerja pelayanan kapanewon (Persentase)	86		(Kapanewon Pandak, Pandak)					88		Kapanewon Pandak
			Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan (%)	95		(Kapanewon Bantul, Bantul)					95		Kapanewon Bantul
			Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%)	100		(Kapanewon Kretek, Kretek)					100		Kapanewon Kretek
			Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon (%)	95		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)					95		Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan (Persentase)	100		(KAPANEWON JETIS, Jetis)					100		Kapanewon Jetis
			Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%)	90		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)					90		Kapanewon Kasihan
			Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon (%)	100		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Pleret
			Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%)	90		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)					91		Kapanewon Pajangan
			Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%)	90		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)					90		Kapanewon Sedayu
			Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Persentase)	100		(Kapanewon Sewon, Sewon)					100		Kapanewon Sewon
			Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon (%)	92		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)					92		Kapanewon Srandakan
			Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%)	90		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)					91		Kapanewon Banguntapan
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	13.320.000,00	(Panggungharjo, Sewon)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Aparat kapanewon dan masyarakat, ASN Kapanewon dan masyarakat	2	144.800.000,00	Kapanewon Sewon
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)					12.00		Kapanewon Sanden



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2.00	176.270.400,00	(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat	2.00	756.810.997,00	Kapanewon Pleret
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2.00		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Masyarakat, Kapanewon Kasihan, pamong kalurahan, Pamong Kalurahan	2.00		Kapanewon Kasihan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				ASN Kapanewon Jetis, Masyarakat	2.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro, Pamong di 3 Kalurahan	2		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Kapanewon Kretek	2		Kapanewon Kretek
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Masyarakat Kapanewon Bantul	2		Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Masyarakat Kapanewon	2		Kapanewon Pandak
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2.00		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				Kapanewon	2.00		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				Dukuh Kapanewon Dlingo, Warga Kapanewon Dlingo	2		Kapanewon Dlingo
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2.00		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				Masyarakat Kapanewon Piyungan	2.00		Kapanewon Piyungan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2		(kapanewon pundong, Pundong)				kapanewon pundong, kapanewon pundong, kalurahan dan masyarakat, masyarakat	2		Kapanewon Pundong
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2.00		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				masyarakat, masyarakat	2.00		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Kapanewon Srandakan	2		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Masyarakat	2		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Dukuh, Kalurahan, Kalurahan	2		Kapanewon Pajangan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)	83	2.072.848.797,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		23.411.523.312,00	Kapanewon Pundong	
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)	83								Kapanewon Kretek	
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)	100								Kapanewon Bantul	
			Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat (%)	92								Kapanewon Bambanglipuro	
			Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat (%)	94								Kapanewon Banguntapan	
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (Persentase)	94								Kapanewon Jetis	
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)	91								Kapanewon Kasihan	
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)	95								Kapanewon Pleret	
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)	90								Kapanewon Pajangan	
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)	82								Kapanewon Sanden	
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)	100								Kapanewon Sedayu	
			Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat (Persentase)	90								Kapanewon Sewon	
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)	100								Kapanewon Piyungan	
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)	100								Kapanewon Dlingo	
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)	97								Kapanewon Imogiri	
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)	96								Kapanewon Srandakan	
			Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (%)	86								Kapanewon Pandak	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa (Persentase)	100	1.302.505.927,00	(Kapanewon Dlingo, Dlingo)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	100	15.758.280.412,00	Kapanewon Dlingo	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa (%)	100		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)					100		Kapanewon Imogiri
			Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (Persentase)	85		(Kapanewon Pandak, Pandak)					86		Kapanewon Pandak
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (%)	100		(Kapanewon Bantul, Bantul)					100		Kapanewon Bantul
			Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)	100		(Kapanewon Kretek, Kretek)					100		Kapanewon Kretek
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (%)	92		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)					93		Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (Persentase)	100		(Kapanewo Jetis, Jetis)					100		Kapanewon Jetis
			Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)	90		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)					90		Kapanewon Kasihan
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (Persentase)	100		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)					100		Kapanewon Piyungan
			Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)	90		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)					91		Kapanewon Pajangan
			Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (Persentase)	82		(Kapanewon Sanden, Sanden)					83		Kapanewon Sanden
			Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)	90		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)					90		Kapanewon Sedayu
			Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (Persentase)	85		(Kapanewon Sewon, Sewon)					85		Kapanewon Sewon
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (%)	95		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)					95		Kapanewon Srandakan
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (%)	90		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Pleret
			Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)	100		(Kapanewon Banguntapan, Banquntapan)					100		Kapanewon Banguntapan
			capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (Persentase)	83		(kapanewon pundong, Pundong)					85		Kapanewon Pundong
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (%)	95		(Kapanewon Srandakan, Srandakan)					0		Kapanewon Srandakan
			Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)	100		(Kapanewon Kretek, Kretek)					100		Kapanewon Kretek

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) 	8.00	317.970.277,00	(Kapanewon Imogiri, Imogiri)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kapanewon dan Kalurahan	8.00	1.259.638.344,00	Kapanewon Imogiri
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10		(kapanewon pundong, Pundong)				kapanewon, kapanewon, akalurahan da, masyarakat, kapanewon, kalurahan dan masyarakat	10		Kapanewon Pundong
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				Kapanewon Banguntapan	8		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	20.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Kapanewon Srandakan	20		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	12		(Panggungharjo, Sewon)				Aparat kapanewon dan masyarakat	12		Kapanewon Sewon
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Masyarakat	7		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				ASN Kapanewon Sanden, Masyarakat Kapanewon Sanden	10.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Kalurahan, Masyarakat, kalurahan	10		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10.00		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)				Masyarakat	10.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10.00		(Kalurahan Srimaryanti Kapanewon Piyungan, Piyungan)				Masyarakat Kapaneon Piyungan, MAsyarakat Kapanewon Piyungan	10.00		Kapanewon Piyungan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
								NASIONAL	DAERAH											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Kapanewon Kasihan, Masyarakat, Kalurahan	10		Kapanewon Kasihan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				Kapanewon, Kapanewon, Kalurahan dan Masyarakat, Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat, Kapanewon, Kalurahan, Masyarakat	6.00		Kapanewon Jetis							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	40		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Masyarakat Lembaga Masyarakat	40		Kapanewon Bambanglipuro							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	12		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Masyarakat Kapanewon Kretek	12		Kapanewon Kretek							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	12		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Masyarakat Kapanewon	12		Kapanewon Bantul							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8.00		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Masyarakat Kapanewon	8.00		Kapanewon Pandak							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				instansi terkait, pegawai kapanewon dlingo dan pamong kalurahan, Intansi Terkait, Pegawai Kapanewon Dlingo dan Pamong Kalurahan, Pegawai Kapanewon Dlingo	10		Kapanewon Dlingo							
			7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)				4.00	984.535.650,00		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat Kapanewon Piyungan	4.00	14.498.642.068,00	Kapanewon Piyungan
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)				14.00			(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)			kalurahan, instansi terkait dan kapanewon Banguntapan, kapanewon, Kapanewon Banguntapan, masyarakat, masyarakat kapanewon	14.00		Kapanewon Banguntapan	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Kapanewon Srandakan, Kapnewon Srandakan	16		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16		(Sewon, Sewon)				Aparat dan masyarakat, Aparatur dan masyarakat, Aparatur dn masyarakat, ASN dan pamong kalurahan, Forum anak, Generasi muda, pelajar dan masyarakat, Guru-guru TK, Ibu-ibu hamil dan nifas, KLA, Masyarakat, Pelaku seni, PKK	16		Kapanewon Sewon
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Masyarakat	7		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	23.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				Masyarakat Kapanewon Sanden	18.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		(Kapanewon pajangan, Pajangan)				Kalurahan, Masyarakat, Masyarakat, PKK Kapanewon dan PKK	12		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	18		(kapanewon pundong, Pundong)				kapanewon dan masyarakat, kapanewon kalurahan dan masyarakat, kapanewon, kalurahan dan masyarakat, kapanewon pundong kalurahan dan masyarakat, kapanewon pundong, kalurahan dan masyarakat, masyarakat, muspika, kapanewon pundong dan kalurahan, muspikap kapanewon pundong, Muspikap kapanewon pundong	18		Kapanewon Pundong
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	14.00		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)				Masyarakat	14.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Masyarakat, Masyarakat	2		Kapanewon Kasihan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6.00		(Kapanewon Jetis, Jetis)				ASN Kapanewon, ASN Kapanewon Jetis, TNI, POLRI, ASN Kapanewon, TNI, Polri, ASN, TNI, POLRI, Masyarakat, Masyarakat , ASN Kapanewon, TNI POLRI, Masyarakat Kapanewon, Masyarakat Kapanewon , Masyarakat Kapanewon Jetis, Masyarakat Kapanewon Jetis, ASN, TNI POLRI, Pamong kalurahan, PKK Kapanewon	6.00		Kapanewon Jetis



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	23		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Aparat dan Instansi terkait, Aparat, Instansi terkait dan Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro, Karang taruna di Kapanewon Bambanglipuro , Lintas sektor di Kapanewon Bambanglipuro, Masyarakat dan Instansi terkait, Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait, Pengurus PKK, Peserta lomba MTQ dan instansi terkait, Tim Forum Layak anak, sekolah dan instansi terkait	23		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	24		(Kapanewon Krretek, Kretek)				Masyarakata Kapanewon Kretek, Masyarakat Kapanewon kretek , Masyarakat Kapanewon Kretek	24		Kapanewon Kretek
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	9		(Kapanewon Bantul, Bantul, Kec. Bantul)				Aparat Kapanewon dan masyarakat kapanewon, Masyarakat kapanewon	9		Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20.00		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				kapanewon Masyarakat Kapanewon	20.00		Kapanewon Pandak
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				Kapanewon, Kapanewon	5		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5.00		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				warga kapanewon dlingo	6		Kapanewon Dlingo
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	100	770.342.870,00	(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	7.653.242.900,00	Kapanewon Bambanglipuro



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan (Persentase)	100		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)					100		Kapanewon Piyungan
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	95		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)					95		Kapanewon Srandakan
			Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (%)	100		(Kapanewon Banguntapan, Banquntapan)					100		Kapanewon Banguntapan
			capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (Persentase)	83		(kapanewon pundong, Pundong)					85		Kapanewon Pundong
			capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (Persentase)	100		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)					100		Kapanewon Dlingo
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	100		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)					100		Kapanewon Imogiri
			Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (Persentase)	86		(Kapanewon Pandak, Pandak)					88		Kapanewon Pandak
			Capaian Kinerja Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan (%)	95		(Kapanewon Bantul, Bantul)					95		Kapanewon Bantul
			Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (%)	100		(Kapanewon Kretek, Kretek)					100		Kapanewon Kretek
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (Persentase)	100		(Kapanewon Jetis, Jetis)					100		Kapanewon Jetis
			Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (%)	90		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)					90		Kapanewon Kasihan
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	90		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Pleret
			Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (%)	90		(Kaopanewon Pajangan, Pajangan)					91		Kapanewon Pajangan
			Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (Persentase)	100		(Kapanewon Sanden, Sanden)					100		Kapanewon Sanden
			Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (%)	90		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)					90		Kapanewon Sedayu
			Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (Persentase)	91		(Kapanewon Sewon, Sewon)					91		Kapanewon Sewon
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Lemabaga Kemasyarakatan Kecamatan (Persentase)	100		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)					100		Kapanewon Piyungan
			Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	95		(Kapanewon Srandakan, Srandakan)					0		Kapanewon Srandakan
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4.00	770.342.870,00	(kapanewon jetis, Jetis)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kapanewon Jetis, Kalurahan, Masyarakat Kapanewon Jetis, Masyarakat Kapanewon Jetis	4.00	7.653.242.900,00	Kapanewon Jetis



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2.00		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				Masyarakat Kapanewon Piyungan	2.00		Kapanewon Piyungan
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	6.00		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				Dekranas Kapanewon Dlingo, Gapoktan Kapanewon Dlingo, Pamong Kalurahan, Pedukuhan Kapanewon Dlingo, UMKM Kapanewon Dlingo, warga kapanewon dlingo, Warga Kapanewon Dlingo	6.00		Kapanewon Dlingo
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	6		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				Kapanewon	6		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4.00		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Kalurahan, Masdyarakat Kapanewon, Masyarakat Kapanewon, Mayarakat Kapanewon, UMKM, Pelaku Usaha dan Masyarakat Kapanewon	4.00		Kapanewon Pandak
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	5		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Masyarakat Kapanewon , Masyarakat Kapanewon Bantul	5		Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	5		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Masyarakat Kapanewon Kretek	5		Kapanewon Kretek
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Kalurahan di Bambanglipuro, Masyarakat Bambanglipuro, Masyarakat dan Instansi terkait, Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro, Semua Pedukuhan di wilayah Kapanewon Bambanglipuro, UMKM di Kapanewon Bambanglipuro dan instansi terkait, UMKM, Instansi terkait dan Masyarakat umum	4		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				ASN, Pelaku UMKM, Kapanewon Kasihan, Masyarakat, Kalurahan, Masyarakat, Pelaku UMKM	2		Kapanewon Kasihan
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4.00		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)				Masyarakat	4.00		Kapanewon Pleret



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	5		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Gapoktan, Kalurahan, Kalurahan, Pelaku UMKM, Masyarakat	3.00		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				Masyarakat Kapanewon Sanden, Masyarakat Kapanewon Sanden, pelaku UMKM	5.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	5		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Masyarakat	5		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4		(Sewon, Sewon)				Aparat dan masyarakat, Aparatur dan masyarakat	6		Kapanewon Sewon
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	11.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Kapanewon Srandakan	11		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	5		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				kalurahan dan kapanewon, kapanewon, Kapanewon Banguntapan, masyarakat, masyarakat	5		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4		(kapanewon pundong, Pundong)				kapanewonn kapanewon kalurahan dan masyarakat, kapanewon, kalurahan dan masyarakat	4		Kapanewon Pundong
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)	100	1.890.318.816,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			11.994.857.294,00	Kapanewon Piyungan
			Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Persentase)	100									Kapanewon Sewon
			Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon (%)	96									Kapanewon Banguntapan
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)	97									Kapanewon Imogiri
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)	89									Kapanewon Kretek
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)	100									Kapanewon Sedayu
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)	100									Kapanewon Bambanglipuro



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketetiban Kapanewon (%)	100								Kapanewon Bantul	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)	100								Kapanewon Dlingo	
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)	89								Kapanewon Sanden	
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)	89								Kapanewon Pundong	
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)	90								Kapanewon Pajangan	
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)	91								Kapanewon Kasihan	
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)	95								Kapanewon Pleret	
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)	86								Kapanewon Pandak	
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)	100								Kapanewon Jetis	
			Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon (%)	96								Kapanewon Srandakan	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	84	1.890.318.816,00	(Kapanewon Pandak, Pandak)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	84	11.994.857.294,00	Kapanewon Pandak	
			Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Persentase)	100		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				100		Kapanewon Dlingo	
			capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Persentase)	89		(kapanewon pundong, Pundong)				90		Kapanewon Pundong	
			Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				100		Kapanewon Banguntapan	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	95		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				95		Kapanewon Srandakan	
			Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100		(Kapanewon Sewon, Sewon)				100		Kapanewon Sewon	
			Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				100		Kapanewon Sedayu	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	97		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				98		Kapanewon Imogiri	
			Capaian kinerja penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum (Persentase)	100		(Kapanewon Sanden, Sanden)				100		Kapanewon Sanden	
			Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	90		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				91		Kapanewon Pajangan	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	90		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)				90		Kapanewon Pleret	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	7.01.04.2.01.0001		Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	90		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)					90		Kapanewon Kasihan
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Persentase)	100		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)					100		Kapanewon Piyungan
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Persentase)	100		(Kapanewon Jetis, Jetis)					100		Kapanewon Jetis
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)					100		Kapanewon Bambanglipuro
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	100		(Kapanewon Kretek, Kretek)					100		Kapanewon Kretek
			Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100		(Kapanewon Bantul, Bantul, Kec. Bantul)					100		Kapanewon Bantul
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.00	1.890.318.816,00	(Kapanewon Jetis, Jetis)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kapanewon, TNI, POLRI dan Masyarakat Kapanewon Jetis, Muspikap, Kapanewon, Kalurahan dan Masyarakat Kapanewon Piyungan	5.00	11.994.857.294,00	Kapanewon Jetis
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5.00		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)					5.00		Kapanewon Piyungan
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				FPRB Kapanewon Dlingo, Pegawai Kapanewon Dlingo dan pamong kalurahan, Siswa SMA di Kapanewon Dlingo	5		Kapanewon Dlingo
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				Kapanewon, Kapanewon dan Masyarakat	5		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5.00		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Kapanewon dan Kalurahan, Masyarakat Kapanewon	5.00		Kapanewon Pandak
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Masyakarat Kapanewon, Masyakat kapanewon, Masyarakat kapanewon, Masyarakat Kapanewon	5		Kapanewon Bantul
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Masyarakat Kapanewon Kretek	5		Kapanewon Kretek



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Aparat dan lintas sektor di Kapanewon Bambanglipuro, Aparat dan Lintas sektor Kapanewon Bambanglipuro, Linmas kapanewon Bambanglipuro, Wilayah kapanewon Bambanglipuro, Wilayah Kapanewon bambanglipuro	5		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Kapanewon Kasihan	16		Kapanewon Kasihan
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5.00		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)				Masyarakat	5.00		Kapanewon Pleret
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5.00		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Anggota Linmas, Aparat Kapanewon, Kalurahan dan kapanewon, Kapanewon, Kalurahan, Pamong/perangkat kalurahan, sekolah, Masyarakat	5.00		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				Masyarakat Kapanewon Sanden	14.00		Kapanewon Sanden
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Masyarakat	5		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		(Sewon, Sewon)				Aparat dan masyarakat, Aparatur dan FPRB, Aparatur dan masyarakat, Aparatur dan sekolah, Aparatur, FPRB dan masyarakat, Aparatur, masyarakat dan paskibraka	5		Kapanewon Sewon
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Masyarakat Kapanewon Srandakan	5		Kapanewon Srandakan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				kapanewon Banguntapan, Kapanewon Banguntapan	5		Kapanewon Banguntapan



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5.00		(kapanewon pundong, Pundong)				muspikap, kapanewon, kalurahan dan masyarakat	5.00		Kapanewon Pundong
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	90	205.183.123,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.747.474.020,00	Kapanewon Pajangan
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100									Kapanewon Pleret
			Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum (Persentase)	100									Kapanewon Sewon
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100									Kapanewon Kasihan
			Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	100									Kapanewon Banguntapan
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (Persentase)	100									Kapanewon Jetis
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100									Kapanewon Piyungan
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100									Kapanewon Bambanglipuro
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100									Kapanewon Dlingo
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100									Kapanewon Sedayu
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100									Kapanewon Kretek
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100									Kapanewon Pandak
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100									Kapanewon Srandakan
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100									Kapanewon Imogiri
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100									Kapanewon Pundong



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
								NASIONAL					DAERAH
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100								Kapanewon Sanden	
			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100								Kapanewon Bantul	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (Persentase)	100	205.183.123,00	(Kapanewon Jetis, Jetis)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	100	1.747.474.020,00	Kapanewon Jetis	
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (Persentase)	100		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				100		Kapanewon Piyungan	
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (Persentase)	100		(Kapaanewon Dlingo, Dlingo)				100		Kapanewon Dlingo	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				100		Kapanewon Imogiri	
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	100		(Kapanewon Pandak, Pandak)				100		Kapanewon Pandak	
			Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	100		(Kapanewon Bantul, Bantul)				100		Kapanewon Bantul	
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	100		(Kapanewon Kretek, Kretek)				100		Kapanewon Kretek	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				100		Kapanewon Bambanglipuro	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	90		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				90		Kapanewon Kasihan	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100		(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)				100		Kapanewon Pleret	
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	90		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				91		Kapanewon Pajangan	
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (Persentase)	100		(Kapanewon Sanden, Sanden)				100		Kapanewon Sanden	
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	100		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				100		Kapanewon Sedayu	
			cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	100		(kapanewon sewon, Sewon)				100		Kapanewon Sewon	
			Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Umum (%)	100		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				100		Kapanewon Srandakan	
			Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	90		(Kapanewon banguntapan, Banguntapan)				91		Kapanewon Banguntapan	
			capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (Persentase)	100		(kapanewon pundong, Pundong)				100		Kapanewon Pundong	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	50.00	205.183.123.00	(Kapanewon Pleret, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat	50.00	1.747.474.020.00	Kapanewon Pleret
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	50.00		(Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan, Piyungan)				Masyarakat Kapanewon Piyungan	50.00		Kapanewon Piyungan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100		(Kapanewon Dlingo, Dlingo)				Linmas Kapanewon Dlingo	100		Kapanewon Dlingo
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	240		(Kapanewon Imogiri, Imogiri)				Kapanewon dan Masyarakat	240		Kapanewon Imogiri
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	60.00		(Kapanewon Pandak, KAB. BANTUL)				Masyarakat Kapanewon	60.00		Kapanewon Pandak
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	50		(Kapanewon Bantul, Bantul)				Masyarakat Kapanewon Bantul	50		Kapanewon Bantul



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	200		(Kapanewon Kretek, Kretek)				Masyarakat Kapanewon Kretek	200		Kapanewon Kretek
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100		(Kapanewon Bambanglipuro, KAB. BANTUL)				Aparat dan Lintas sektor di Kapanewon Bambanglipuro	100		Kapanewon Bambanglipuro
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100.00		(KAP. JETIS, Jetis)				ASN Kapanewon Jetis , Muspika dan Masyarakat , Masyarakat Kapanewon Jetis	100.00		Kapanewon Jetis
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	50.00		(Kapanewon Kasihan, Kasihan)				Kapanewon Kasihan	50.00		Kapanewon Kasihan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	50		(Kapanewon Pajangan, Pajangan)				Masyarakat	3000.00		Kapanewon Pajangan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100.00		(Kapanewon Sanden, Sanden)				Masyarakat Kapanewon Sanden	100.00		Kapanewon Sanden



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100		(Kapanewon Sedayu, Sedayu)				Masyarakat	100		Kapanewon Sedayu
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	135.00		(Sewon, Sewon)				Aparatur dan FKDM Kapanewon, Aparatur dan FKUB kapanewon , Aparatur dan FPK Kapanewon, Aparatur dan generasi muda	115.00		Kapanewon Sewon
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	74.00		(Kapanewon Srandakan, KAB. BANTUL)				Masyarakat Kapanewon Srandakan	74		Kapanewon Srandakan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75		(Kapanewon Banguntapan, Banguntapan)				Kapanewon Bantul, masyarakat, masyarakat dan kapanewon	100.00		Kapanewon Banguntapan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	44.00		(kapanewon pundong, Pundong)				muspika dan masyarakat	44.00		Kapanewon Pundong
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			57.231.388.683,00							36.840.563.500,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			57.231.388.683,00							36.840.563.500,00	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	87	3.892.760.283,00	(Seluruh Kapanewon Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Bakesbangpol, Dokumen Perencanaan Penyusunan Rentra		4.860.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kinerja Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)	100	35.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		100	30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	19.400.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		4	12.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.00	5.600.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		1.00	7.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	10.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		1	11.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja (%)	100	2.912.804.406,00	(KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	3.179.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja (%)	100		(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)					100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	2.746.204.406,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Bakesbangpol	22	3.000.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	117.600.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Bakesbangpol Bantul	2	124.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	16	49.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		16	55.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	425.745.149,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	438.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	3.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarakat	6	5.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	26.364.149,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Bakesbangpol, Bakesbangpol, Bakesbangpol	1	80.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	24.690.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bakesbangpol, Baksebangpol	6	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	3.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bakesbangpol	12	3.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	400	3.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bakesbangpol	450	300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		365.691.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN , , ASN dan Masyarakat, ASN , Lintas Sektoral dan Tokoh Masyarkat, Tamu		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	102.500.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Puhlik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Cakupan Kinerja Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)	100		(Kab Bantul, KAB. BANTUL)					100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	-	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bakesbangpol	0	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	102.500.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Baksebangpol	15	150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah meterai, Pembayaran Telepon Listrik dan Jasa Honor Non ASN (Bulan)	12	77.710.728,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		12	160.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	3.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bakesbangpol	1	4.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	4.328.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bakesbangpol	1	6.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24	70.382.728,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bakesbangpol, Non ASN	24	150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	339.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	903.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	209.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	ASN Kesbangpol, Bakesbangpol	18	690.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	10.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bakesbangpol	18	13.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15	7.500.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bakesbangpol	20	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	17.500.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bakesbangpol	25	40.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	95.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Bakesbangpol	1	150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan (Persentase)	100	1.058.024.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			10.825.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (%)	100	1.058.024.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	10.825.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	50	25.000.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarkat	100.00	25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	1300	1.033.024.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	ASN, TNI, Polri, Mahasiswa Pelajar masyarakat, Kapanewon, masyarakat, Masyarakat, Paskibraka, Pelajar, sekolah, Sekolah	1600	10.800.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Kalurahan dalam Pemahaman Berdemokrasi (%)	100	50.913.986.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			13.500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase masyarakat dalam kegiatan Demokrasi (%)	100	50.913.986.400,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada		100	13.500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	3700.00	50.913.986.400,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	ASN, Forkopimda, Bawaslu, KPU, Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Bawaslu, KPU, Masyarakat, Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD, Pelajar SMP/Sederajat dan SMA/ Sederajat, Pengurus Partai Politik	1000	13.500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas (Persentase)	28	300.000.000,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Anggota dan Pengurus Ormas, Anggota Ormas , Organisasi Kemasyarakatan se Kabupaten Bantul, Ormas Baru, Pengurus dan Anggota Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	33	1.500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan Organisasi Masyarakat (%)	28	300.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	500.00	300.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kerukunan Antar Umat Beragama (%)	100	648.720.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			100	4.800.000.000,00
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Forum koordinasi antar umat beragama aktif (%)	100	648.720.500,00	(kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		4.800.000.000,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	1875.00	648.720.500,00	(kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Kapanewon, Lintas Etnis, Masyarakat, OPD dan Masyarakat , Pelajar	2000.00		4.800.000.000,00
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Permohonan Pengkondisian Masyarakat yang Diminta Oleh PD (%)	100	417.897.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi		100	1.355.063.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan bahan kewaspadaan dini berkaitan dengan notifikasi permintaan OPD (%)	100	417.897.500,00	(Kabupaten Bantul, KAB. BANTUL)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi			1.355.063.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasiliitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1.00	35.063.500,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	Masyarkat		1.00	35.063.500,00



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	500	277.834.000,00	(Kab Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	masyarakat, Masyarakat, Masyarkat	600	1.200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	105.000.000,00	(Kab. Bantul, KAB. BANTUL)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	Tim Forkompimda	1	120.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	J U M L A H				2.133.205.685.679,00							377.166.482.362.268,00	

Tabel 5.3 Pemetaan Program dengan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
1 Peningkatan kualitas SDM	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	23.542.189.100	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	279.502.340	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	61.117.469.777	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	297.446.520	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.572.200.000	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	104.587.500	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	117.047.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.290.679.250	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	405.840.250	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	466.881.109	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	80.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	67.970.355	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	350.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	875.106.400	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	574.348.652	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	38.396.110.840	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	65.173.553.480	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12.276.266.009	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.384.739.560	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	200.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.056.508.720	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	55.000.000	RSUD Panembahan Senopati
TOTAL PD 1		209.983.447.362	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.311.385.650	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	12.340.850.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.970.041.740	

PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
2 Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	7.680.753.402	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.225.085.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.550.190.534	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.138.802.860	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.417.455.501	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.775.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.683.241.820	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	59.672.274.165	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	35.000.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	7.880.000.000	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.280.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	22.063.103.950	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	103.809.500	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	402.197.340	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	8.122.618.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	846.500.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	846.636.010	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	4.404.500	
TOTAL PD 2		203.314.349.972	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	153.720.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.060.186.964	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	468.099.990	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	364.891.340	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	586.215.000	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	145.500.000	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	32.750.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	13.500.000	

PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
3 Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.537.592.964	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.131.323.840	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	998.473.840	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.520.571.420	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	300.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	2.126.827.000	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.097.312.380	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	12.735.000	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	44.934.840	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	267.777.400	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	587.003.170	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	146.154.500	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	103.892.340	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	63.991.500	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.211.450.050	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	408.079.420	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	35.986.340	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	164.739.500	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	49.996.340	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	6.449.969.154	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	499.999.372	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.957.264.720	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	540.298.750	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	249.203.960	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	659.175.805	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	789.982.860	

PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	29.350.000	Dinas Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	603.440.680	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.492.484.020	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.450.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.513.149.430	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	112.779.250	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	73.141.130	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	312.116.180	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.162.861.780	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	705.696.150	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	335.336.783	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.260.876.600	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10.079.566.574	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.308.702.100	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.065.692.550	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	549.850.904	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	13.795.930.360	
TOTAL PD 3		72.680.574.250	
4 Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.280.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	971.460.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	600.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	109.455.760	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	53.275.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	6.481.341.113	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14.946.190.175	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	169.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.421.478.952	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	43.995.000	

PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	139.873.500	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	100.000.000	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	761.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.148.422.750	
TOTAL PD 4		33.225.892.250	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.797.345.080	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	741.084.500	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	300.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	648.720.500	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	25.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	35.063.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	270.752.000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.294.073.180	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	355.897.896.366	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.772.253.740	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.611.761.110	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	375.664.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	268.936.800	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	700.000.000	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.490.448.880	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	312.603.160	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	703.179.750	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	361.682.770	

PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	15.703.100	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	11.203.572.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.900.265.850	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.025.250.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.568.450.360	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	400.387.500	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	320.200.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.186.661.650	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
	PROGRAM PENATAAN DESA	154.887.500	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	71.500.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.403.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	500.000.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	256.196.940	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	182.611.180	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	274.062.700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	10.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	200.000.000	Inspektorat Daerah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	232.700.000	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.177.939.420	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	93.825.000	Kapanewon Bambanglipuro
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	128.468.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.445.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.302.500	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	126.275.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	123.050.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	

PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
5 Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	Kapanewon Banguntapan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.275.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.587.500	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	110.437.500	Kapanewon Bantul
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	104.860.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.350.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.100.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	91.550.000	Kapanewon Dlingo
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	93.353.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.950.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.875.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	90.300.000	Kapanewon Imogiri
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	169.500.470	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.825.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	111.687.500	Kapanewon Jetis
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	144.275.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	

PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.475.000	Kapanewon Kasihan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.419.800	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	79.481.077	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	67.681.200	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	57.928.123	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	112.925.516	Kapanewon Kretek
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	148.440.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	62.600.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.465.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	136.472.500	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	96.180.000	Kapanewon Pajangan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.450.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	134.850.000	Kapanewon Pandak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	130.442.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.360.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.560.000	

PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	69.467.500	Kapanewon Piyungan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	108.292.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.912.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.015.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	109.075.000	Kapanewon Pleret
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	110.237.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.850.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.375.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	139.337.500	Kapanewon Pundong
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	152.925.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.537.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.790.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	104.741.000	Kapanewon Sanden
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	119.988.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.850.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.350.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	142.735.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105.435.000	

PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	Kapanewon Sedayu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.125.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.200.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	168.220.000	Kapanewon Sewon
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	118.668.750	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.120.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.135.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	130.000.000	Kapanewon Srandakan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	139.250.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.500.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.567.995.630	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.559.060.000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	737.900.500	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.974.391.480	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TOTAL PD 5		442.938.358.082	
6 Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.033.024.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	382.834.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	50.913.986.400	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.964.901.817	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	786.000.000	
TOTAL PD 6		59.080.746.217	
GRAND TOTAL		1.021.223.368.133	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu pada sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,00-81,50	Dinkes RSUD UPTD Puskesmas Dikpora
	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,2	Dinas Kesehatan
	Net Death Rate (NDR)	permil	20,5	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	72,6	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	6,9	Dinas Kesehatan
	Case Fatalilty Rate Covid 19	Persen	2,25	Dinas Kesehatan
	Insiden Rate DBD	per 100.000 penduduk	115	Dinas Kesehatan
	Prevalensi stunting	Persen	8	Dinas Kesehatan
	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	15,26	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	94,25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	95,25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	98,7	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	14,25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Persen	34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Indeks	86	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	23	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	3,44	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	8	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Didukung Oleh : Dinas Pariwisata Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Desa/ Kalurahan	21	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	Indeks Rasa Aman	Indeks	2,76	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase penanganan gangguan ketertarikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Presentase gangguan trantribum yang dapat di selesaikan	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja
	Presentase Pemilih yang berpartisipasi	Persen	77	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Jumlah Intoleransi di masyarakat	Angka	0	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.	Jumlah kejadian	0	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,27-5,66	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Kukmp Perdagangan
	Rasio Gini	Angka	0,346-0,394	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Kukmp Perdagangan

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	91	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	%	0,714	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	%	0,55	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.488.970	Dinas Pariwisata
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,75	Dinas Pariwisata
	Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah/org	820.467	Dinas Pariwisata
	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Rupiah (Miliar)	1.913,28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	persen	3,3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	2.290,35	Dinas Penanaman Modal Dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,64	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Jumlah tenaga kerja yang terserap	orang	9.500	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Kalurahan	53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	100	Dinas Pariwisata Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Jumlah parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi	jumlah parameter	18	Dinas Pariwisata
	Pertumbuhan industri kreatif	persen	0,56	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Pertumbuhan industri	persen	2,1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	persen	70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Tingkat Kemiskinan	persen	10,99-11,50	Dinas Sosial
	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	71.380	Dinas Sosial
	PPKS yang dilayani dan ditangani	persen	100	Dinas Sosial
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	72,66	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Prevalensi	0,41	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Utama	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Nilai KLA	Angka	890	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	2,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
II	Aspek Pelayanan Umum			
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
	Persentase capaian SPM Pendidikan	Persen	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Persen	75	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	Persen	4,78	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82,90	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	81	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Bed Occupation Rate (BOR)	persen	69	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Turn Over Interval (TOI)	hari	2	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Bed Turn Over (BTO)	kali	50	Rumah Sakit Panembahan Senopati
	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks	1	Dinas Kesehatan
	Indeks sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minum sesuai standar dibagi dengan yang diawasi.	Indeks	1	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Jamkesda	Persen	100	UPTD Jamkesda

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Cakupan Pelayanan Labkesda	Persen	100	UPTD Labkesda
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	84,30	27 Puskesmas
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	persen	100	27 Puskesmas
	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Indeks	1	Dinas Kesehatan
	Cakupan Desa Siaga Purnama Mandiri	Kalurahan	50	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	48	Dinas Kesehatan
	Indeks capaian SPM	Indeks	1	27 Puskesmas
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Tingkat kemantapan infrastruktur permukiman (jalan desa)	Persen	81,85	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	76,65	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	Persen	90	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Persen	30	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	75,84	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	40	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	84,2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Persen	85,19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	Persen	28	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	91,92	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Persen	5,23	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Persen	100	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Persen	70,2	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persen	90	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	31,77	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase rumah layak huni	Persen	99,6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Persen	66,88	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Pemulihan Pascabencana	Indeks	55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Persen	75	Dinas Sosial
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	75	Dinas Sosial
	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Persen	70	Dinas Sosial
	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Persen	70	Dinas Sosial
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	100	Dinas Sosial
	cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Persen	80	Dinas Sosial
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	20,5	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	58	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	37	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Capaian Desa Prima	Persen	40	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	69	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 penduduk perempuan	0,00031	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Persen	9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Cakupan desa layak anak	Kalurahan	45	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Persen	48	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Persentase lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	57,14	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	153	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	Persen	90	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	44,74	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Persen	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	34	Dinas Lingkungan Hidup

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Persen	5	Dinas Lingkungan Hidup
	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Penghargaan	1	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	85,71	Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	34,84	Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Persen	25	Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	45,87	Dinas Lingkungan Hidup
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	99,83	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	96,2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Persen	99,7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	Persen	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	Persen	56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	Persen	50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i> (TFR))	Angka	1,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Persen	77,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen	84,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	Dinas Perhubungan
	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	30,43	Dinas Perhubungan
	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Angka	0,30	Dinas Perhubungan
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	72	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	Persen	71,43	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	2,9	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
	Persentase UMKM yang berizin	Persen	60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Capaian Rintisan Desa Preneur	Persen	13,33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Capaian pemasaran pada Desa Preneur	Persen	40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	2,5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	75,25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	Persen	65,48	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah,

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten			Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Persen	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	12,79	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Persen	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA			
	Jumlah prestasi Olahraga	medali	80	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	82	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Organisasi Pramuka yang aktif	Organisasi	18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	75	Dinas Komunikasi Dan Informatika
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	75,74	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	76	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	691	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
	Persentase perputakaan yang terakreditasi	Persen	14,02	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	62	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	71	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Persen	60	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Produksi perikanan tangkap	Ton	833	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Produksi perikanan budidaya	Ton	12.878	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Persen	5	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Persentase produksi perikanan yang diolah	Persen	2	Dinas Kelautan Dan Perikanan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
	Cakupan Desa Wisata	Persen	36	Dinas Pariwisata
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	Dinas Pariwisata
	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Persen	3,13	Dinas Pariwisata
	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	2	Dinas Pariwisata
	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	35	Dinas Pariwisata
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah CBT	2	Dinas Pariwisata
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	0	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Ketersediaan sarana peternakan	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Produksi Daging	Ton	15.713	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	6,32	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
	-			
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
	-	-	-	-
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	53	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Persen	4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Persen	6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Nilai ekspor	juta US\$	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Persen	15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	95,32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten	Persen	0,22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
	Persentase Penempatan Transmigrasi	persen	90	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
1	SEKRETARIAT DAERAH			
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	Sekretariat Daerah
	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Persen	92	Sekretariat Daerah
	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	Persen	80	Sekretariat Daerah
	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proporsional	Persen	88,5	Sekretariat Daerah
	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	Persen	89	Sekretariat Daerah
	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Persen	89	Sekretariat Daerah
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	Persen	83	Sekretariat Daerah
2	SEKRETARIAT DEWAN			
	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Persen	86	Sekretariat DPRD
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
1	PERENCANAAN			
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	Persen	50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	Persen	96	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	KEUANGAN			
	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	85	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	90	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	100	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Persentase Realisasi PAD	Persen	100	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
3	KEPEGAWAIAN			
	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	60	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	32	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	Peta Kompetensi ASN	Persen	12	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Persen	100	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDA	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	INSPEKTORAT DAERAH			
	Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	44,44	Inspektorat Daerah
	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Persen	14	Inspektorat Daerah
	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	30	Inspektorat Daerah
G	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Bantul
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Bantul
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	92	Kapanewon Bantul
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	Kapanewon Bantul
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	Kapanewon Bantul
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Bantul
2	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Bambanglipuro
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Bambanglipuro
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	angka	95	Kapanewon Bambanglipuro
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	92	Kapanewon Bambanglipuro
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	Kapanewon Bambanglipuro
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	Kapanewon Bambanglipuro
3	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100	Kapanewon Dlingo
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	persen	83	Kapanewon Dlingo
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	Kapanewon Dlingo
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	Kapanewon Dlingo
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	Kapanewon Dlingo
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	Kapanewon Dlingo
4	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Imogiri
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Imogiri
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	97	Kapanewon Imogiri
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	97	Kapanewon Imogiri
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	97	Kapanewon Imogiri
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	Kapanewon Imogiri
5	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Jetis
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Jetis

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	Kapanewon Jetis
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	94	Kapanewon Jetis
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	Kapanewon Jetis
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Jetis
6	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Kretek
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Kretek
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	91	Kapanewon Kretek
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	83	Kapanewon Kretek
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	89	Kapanewon Kretek
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Kretek
7	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Kasihan
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Kasihan
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	Kapanewon Kasihan
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	91	Kapanewon Kasihan
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	91	Kapanewon Kasihan
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	Kapanewon Kasihan
8	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Pandak
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Pandak
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	92	Kapanewon Pandak
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	86	Kapanewon Pandak
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	86	Kapanewon Pandak
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Pandak
9	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Pundong
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Pundong
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	Kapanewon Pundong
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	83	Kapanewon Pundong
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	89	Kapanewon Pundong

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Pundong
10	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Pleret
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Pleret
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	95	Kapanewon Pleret
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	95	Kapanewon Pleret
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	95	Kapanewon Pleret
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Pleret
11	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Piyungan
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Piyungan
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	94	Kapanewon Piyungan
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	Kapanewon Piyungan
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	Kapanewon Piyungan
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Piyungan
12	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Pajangan
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Pajangan
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	Kapanewon Pajangan
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	90	Kapanewon Pajangan
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	90	Kapanewon Pajangan
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Pajangan
13	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Sanden
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Sanden
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	92	Kapanewon Sanden
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	82	Kapanewon Sanden
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	89	Kapanewon Sanden
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Sanden
14	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Srandakan

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Srandakan
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	92	Kapanewon Srandakan
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	96	Kapanewon Srandakan
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	96	Kapanewon Srandakan
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Srandakan
15	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Sewon
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Sewon
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	Kapanewon Sewon
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	90	Kapanewon Sewon
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	Kapanewon Sewon
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Sewon
16	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Sedayu
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Sedayu
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	92	Kapanewon Sedayu
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	Kapanewon Sedayu
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	Kapanewon Sedayu
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Sedayu
17	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	Kapanewon Banguntapan
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	83	Kapanewon Banguntapan
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	Kapanewon Banguntapan
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	94	Kapanewon Banguntapan
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	96	Kapanewon Banguntapan
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	Kapanewon Banguntapan
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Cakupan Pembinaan Ormas	Persen	28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Cakupan Lokasi yang di prakondisi	Persen	25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
III	Aspek Daya Saing			
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82,5 (BB)	Semua Perangkat Daerah
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,2315	Sekretariat Daerah
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	Persen	81,45	Sekretariat Daerah
	Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Persentase rancangan perda dan perkara yang diharmonisasi	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	Persen	94	Sekretariat Daerah
	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	Persen	85	Sekretariat Daerah
	Persentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen	76	Sekretariat Dprd
	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	96	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	nilai	71	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Cakupan PD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	persen	85	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Opini Laporan Keuangan	predikat	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah	5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	22,69	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	83,75	Inspektorat Daerah
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	persen	84,5	Inspektorat Daerah
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	Inspektorat Daerah

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,35	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Index kualitas layanan informasi publik	Angka	84,25	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Nilai Indeks Pembangunan TIK	angka	7,2	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	2,8	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88,8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kapanewon
	IKM Kinerja PTSP	nilai/ angka	85,75	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,83	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	Lembaga	8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Bantul
	IKM Kapanewon	angka	95	Kapanewon Bambanglipuro
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Dlingo
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Imogiri
	IKM Kapanewon	angka	92	Kapanewon Jetis
	IKM Kapanewon	angka	94	Kapanewon Kretek
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Kasihan
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Pandak
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Pundong
	IKM Kapanewon	angka	92	Kapanewon Pleret
	IKM Kapanewon	angka	94	Kapanewon Piyungan
	IKM Kapanewon	angka	95	Kapanewon Pajangan
	IKM Kapanewon	angka	92	Kapanewon Sanden
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Srandakan
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Sewon
	IKM Kapanewon	angka	93	Kapanewon Sedayu
	IKM Kapanewon	angka	91	Kapanewon Banguntapan
	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	67,88	Dpupkp, Dptr, Dlh, Bpbd
	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	76,40	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Tingkat Kemantapan Jalan	persen	79,25	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	0,5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	81,09	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Dan Kawasan Permukiman
	Penduduk berakses air minum layak	Persen	85,19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Penduduk berakses sanitasi yang layak	Persen	93,92	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Penanganan kawasan kumuh	Persen	31,77	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	5,49	Dinas Perhubungan
	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,07	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persen	73	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Persen	77	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,42	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	41	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	61	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	75	Dinas Lingkungan Hidup
	Capaian pengelolaan sampah	Persen	67,65	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Risiko Bencana	Indeks	164,55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,93	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	menit	<15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB VII PENUTUP

Penyusunan RKPD Tahun 2024 ini mengacu dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 dengan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2024 adalah Peningkatan daya saing daerah didukung penerapan IPTEK. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, disusun tema dan prioritas pembangunan tahun 2024. Tema yaitu **Peningkatan daya saing daerah berbasis IPTEK untuk pemerataan pembangunan**. Prioritas pembangunan pada tahun 2024 adalah: 1) Peningkatan kualitas SDM, 2) Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan, 3) Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, 4) Pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana, 5) Pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi, dan 6) Sukses penyelenggaraan pemilu dan pilukada.

Dokumen RKPD Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi antar pelaku pembangunan dan sebagai bahan untuk memberi masukan saran untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul Tahun 2024.

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

RKPD 2024

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telepon: (0274) 367533 Fax: (0274) 367796

email: bappeda@bantulkab.go.id

<http://bappeda.bantulkab.go.id>